PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2010, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

(2) RKP Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Buku I, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I;

b. Buku II, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II; dan

c. Buku III, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampian III;

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

(1) RKP Tahun 2010 merupakan penjabaran arah pembangunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2010-2014) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

(2) RKP ...

(2) RKP Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010;

b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010;

c. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2010:

a. Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat;

b. Kementerian Negara/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 5

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2010.

Pasal 6

Dalam hal RKP Tahun 2010 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2010 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2010

DIPERBANYAK OLEH:
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010

BUKU I :

PRIORITAS PEMBANGUNAN, SERTA KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB 1	**PENDAHULUAN ……**	**I.1- 1**
BAB 2	**TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 ……**	**I.2- 1**
	A. KONDISI UMUM ……	**I.2- 1**
	A.1 Pencapaian Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009	**I.2- 1**
	A.2. Masalah dan tantangan Pokok Tahun 2010 …….....	**I.2-32**
	B. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2010 DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN ……	**I.2-52**
	C. PRIORITAS PEMBANGUNAN ……	**I-2-55**
	C.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional ……	**I.2-56**
	C.2. Arah Kebijakan Pembangunan Sektoral …….	**I.2-60**
	C.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan ……..	**I.2-69**
BAB 3	**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ……**	**I.3-1**
BAB 4	**KAIDAH PELAKSANAAN ……**	**I.4-1**
LAMPIRAN		
Matriks Prioritas, Fokus, dan Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 ……		**I.L-1**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
PENDAHULUAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa RKP adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berhubung RPJMN yang berlaku saat ini akan berakhir pada tahun 2009, sementara RPJMN 2010-2014 belum tersedia, maka RKP 2010 disusun untuk memenuhi amanat **UU no. 17 tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. **Pasal 5 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa:

> *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.*

dan dalam **ayat (2)** menyebutkan:

> *RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyususun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.*

RKP 2010 yang disusun oleh Pemerintahan yang periodenya akan berakhir tahun 2009 ini akan dilaksanakan oleh Pemerintahan periode berikutnya yang belum tentu sepakat dengan isi RKP tersebut. Untuk itu, **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009** dalam Bab 36 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 menyebutkan:

> *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan nasional tahun 2010 (Rencana Kerja Pemerintah 2010) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Presiden Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, maka Pemerintah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2009 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi tahun 2010.*
>
> *Selanjutnya Presiden Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih baik.*

Kekosongan payung substansi RKP 2010 selanjutnya diisi dengan menggunakan arah pembangunan jangka menengah ke-2 (RPJMN ke-2) dari RPJPN 2005-2025. Dalam Bab IV dari Lampiran Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disebutkan bahwa arah RPJMN ke-2 (2010-2014) :

> *Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai berkelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004-2009) maka RPJMN ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan* ***menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia*** *termasuk pengembangan* ***kemampuan ilmu dan teknologi*** *serta* ***penguatan daya saing perekonomian****.*

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah dalam bentuk: (i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layanan umum.

Dengan demikian RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKP mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Lebih lanjut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, RKP juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). Sebagaimana RKP sebelumnya, dokumen RKP Tahun 2009 dilengkapi dengan Buku II yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program.

RKP Tahun 2010 ini belum sepenuhnya menampung kegiatan dalam RKA-KL mengingat masih dalam proses penyusunan. Namun, RKP Tahun 2010 ini telah disesuaikan dengan hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 dan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA 2010.

BAB 2
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

A. KONDISI UMUM

A.1. PENCAPAIAN TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN TAHUN 2009

Pelaksanaan pembangunan tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009 yang merupakan tahun keempat dan kelima RPJM 2004-2009 memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan ketiga agenda pembangunan yang ditetapkan, yaitu: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan damai; Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Berbagai upaya dan kemajuan-kemajuan yang telah dan diperkirakan akan dicapai tersebut merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2010. Berbagai upaya dan kemajuan penting tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Kemiskinan. Dalam tahun 2008 dan 2009, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin masih menjadi agenda utama pembangunan, terutama dengan terjadinya krisis finansial global yang berdampak pada sektor riil dan selanjutnya menghambat upaya-upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multisektor, maka upaya untuk penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan secara sektoral dan secara lintas sektor.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pengurangan kemiskinan, program-program dikelompokkan menjadi 3 kluster, yaitu kluster pertama berisi program-program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kebutuhan dasar; kluster kedua berisi program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin; dan kluster ketiga adalah program-program perkuatan usaha mikro dan kecil.

Terkait dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, telah dilaksanakan berbagai program seperti RASKIN (program beras untuk masyarakat miskin), Jamkesmas (program jaminan kesehatan masyarakat), beasiswa siswa miskin, BLT (bantuan langsung tunai) dan PKH (program keluarga harapan). Pada tahun 2008, melalui program RASKIN telah disalurkan beras bersubsidi sebanyak 3,42 juta ton bagi 19,1 juta rumah tangga sasaran. Sementara itu, pada tahun 2009, program RASKIN akan diarahkan bagi 18,5 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi 15 kg per rumah tangga sasaran selama 12 bulan. Program Jamkesmas yang dahulu dikenal dengan Askeskin pada tahun 2008 telah memberikan pelayanan bagi 76,4 juta masyarakat miskin dan pada tahun 2009 kegiatan ini akan tetap diteruskan dengan memberikan pelayanan pada 76,4 juta masyarakat miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas III. Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin pada pendidikan, telah diberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin sebanyak 5.509.231 siswa/mahasiswa pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 akan diberikan beasiswa bagi siswa/mahasiswa miskin sebanyak 5.280.117 siswa/mahasiswa. Dengan adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2008, pemerintah juga telah meluncurkan program BLT kepada 19,05 juta rumah tangga sasaran dengan nilai sekitar Rp 14,1 triliun dengan tujuan untuk mencegah agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh kedalam kemiskinan. Pada tahun 2009, program BLT hanya dialokasikan untuk jangka waktu 2 bulan mengingat harga BBM telah dapat diturunkan dan program akan

disalurkan kepada 19,01 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi sekitar Rp 4,4 triliun. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin khususnya rumah tangga sangat miskin kepada pendidikan dan kesehatan, pada tahun 2008 telah dilaksanakan perluasan uji coba PKH di 13 provinsi dengan sasaran 620.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM). Pada tahun 2009, jumlah sasaran PKH ditingkatkan menjadi 720.000 RTSM di 13 provinsi dengan fokus pada perbaikan beberapa komponen seperti Sistem Informasi Manajemen serta pelatihan-pelatihan bagi penyedia layanan. Kegiatan PKH berupaya untuk menarik anak-anak yang bekerja dan atau tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Kegiatan ini pada tahun 2008 telah dilaksanakan di 7 provinsi dan akan diperluas di 13 provinsi penerima PKH.

Untuk mendukung pembangunan perdesaan telah dilaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam pelaksanaannya, diharapkan aparat pemerintahan desa, kelembagaan pemerintahan desa dan non pemerintahan desa maupun masyarakat miskin di perdesaan dapat meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya. Diharapkan kelompok-kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mereka usulkan. Program ini terdiri dari PNPM Inti yang terdiri dari 5 kegiatan dan PNPM Penguatan yang melalui program ini diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi program-program pengurangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2008, telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Inti di 4.768 kecamatan dan pada tahun 2009 direncanakan akan diperluas menjadi 6.408 kecamatan.

Pada tahun 2009 juga akan mulai diupayakan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program-program sektoral yang berbasis pemberdayaan untuk masuk kedalam PNPM Penguatan. Salah satunya adalah kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3). Pada tahun 2009, program PUAP ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan usaha agribisnis pertanian di 10.000 desa. Sementara itu, melalui penguatan ekonomi perdesaan diharapkan dapat tersalurkan bantuan permodalan kepada 200 LM3, terselenggaranya pengembangan hortikultura melalui LM3 dan bantuan sosial, pengembangan LM3 peternakan, serta terfasilitasinya 150 LM3 pengolahan dan pemasaran hasil. Sinkronisasi kegiatan sektor lain juga dilakukan melalui PNPM-Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan pemberdayaan, seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Pemberdayaan Nelayan melalui Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala kecil, serta Pemberian Subsidi Benih dan Bantuan Langsung Penguatan Modal Pembudidayaan Ikan. Melalui kegiatan PEMP, sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di 9.515 desa pesisir, pemberdayaan perempuan pesisir di 93 kabupaten/kota, dan pemberdayaan nelayan skala kecil melalui penyediaan sarana dan prasarana. Pada tahun 2009, kegiatan PNPM-KP akan terus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di 150 kab/kota melalui pengembangan usaha skala mikro, pemberdayaan perempuan pesisir, peningkatan akses modall serta penyusunan standar, norma, prosedur dan manual pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.Dari sisi usaha mikro dan kecil, upaya perkuatan usaha mikro dan kecil telah dilakukan melalui penyediaan kredit dan dana bergulir, pelatihan dan pendampingan bagi pengelola koperasi, dan sebagainya yang dilaksanakan melalui program perkuatan usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2008, telah disalurkan kredit sebesar Rp 12,624 triliun kepada 1.671.668 UMKM dengan rata-rata kredit per UMKM sebesar Rp 7,55 juta. Selain itu, telah dilakukan pendampingan bagi 3.500 UKM/pelatihan 500 Business Development Services (BDS), penyediaan dana kepada 125 koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota, pelatihan fasilitator budaya/ motivasi usaha dan teknis

manajemen usaha mikro melalui koperasi untuk 1.000 koperasi, bimbingan teknis/ pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/KSP bagi 2.800 koperasi/LKM, pembinaan sentra-sentra produksi UMKM di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan pada 60 sentra/1.700 UMI, fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi di 4.300 UMI, serta penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha di 75.000 UMI/3.000 koperasi/LKM. Pada tahun 2009, kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilakukan dengan sasaran yang sama.

Selain program-program tersebut, terdapat berbagai program yang mendukung pembangunan perdesaan yang dilaksanakan untuk mengembangkan ekonomi lokal terutama di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin di perdesaan dalam pelaksanaan kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian maupun non pertanian serta mempermudah aksesibilitas kepada berbagai sumber daya produktif. Selain itu, perkuatan kepada kelembagaan di tingkat masyarakat serta kelembagaan ekonomi di tingkat lokal seperti Lembaga Keuangan Perdesaan, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di tingkat lokal dapat dikembangkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal. Dengan program-program tersebut, kemiskinan dapat diturunkan dari 37,17 juta (16,6 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,4 persen) pada tahun 2008. Walaupun menurun, pencapaian ini masih jauh dari sasaran akhir RPJM 2004-2009 sebesar 8,2 persen. Dalam tahun 2009, tingkat kemiskian diperkirakan hanya menurun menjadi sebesar 12-14 persen. Hal ini terutama karena awal tahun 2009 merupakan tahun sulit bagi Indonesia karena dampak krisis finansial global sudah mulai terasa. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat miskin berupa naiknya harga-harga kebutuhan dasar, sehingga menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak. Selain itu, dengan terjadinya pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) akibat dari krisis finansial di negara-negara tujuan TKI, telah menyebabkan terdesaknya masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal karena sektor informal juga akan banyak dimasuki oleh orang-orang yang terkena PHK atau pemulangan TKI. Pelaku baru dalam sektor informal tersebut kemungkinan memang bukan rumah tangga miskin, namun desakan tersebut akan memperberat kondisi pelaku di sektor informal yang saat ini pendapatannya sudah pada tingkat rendah atau bahkan sudah berada di bawah garis kemiskinan. Tekanan ini juga akan memperberat rumah tangga miskin yang selama ini sudah berat perjuangannya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Untuk mengantisipasi dan menghadapi berkembangnya dampak negatif dari krisis finansial global lebih jauh, pemerintah telah melakukan beberapa langkah cepat melalui: (i) Melakukan berbagai langkah untuk mengamankan likuiditas; perbankan dan kondisi moneter; (ii) Pencegahan pemutusan hubungan kerja dengan mengeluarkan SPB 4 menteri; (iii) Mempertahankan kapasitas produksi dan mendorong peningkatan; (iv). Mempertahankan permintaan dalam negeri (daya beli masyarakat), antara lain dengan melakukan penurunan harga BBM dan tarif dasar listrik agar harga-harga komoditas dan biaya transportasi menurun sehingga meringankan masyarakat terutama masyarakat miskin; (v) Mempersiapkan peningkatan intensitas berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan sasaran RKP 2009 dapat tetap dipertahankan, ataupun jika menurun tetap pada tingkat yang dapat dikelola dengan baik. Tingkat kemiskinan diusahakan tetap pada sasaran maksimal 14 persen. Pengangguran yang diantisipasi akan lebih tinggi dari sasaran yang semula 7-8 persen, namun masyarakat dalam jangka pendek dapat mengatasi kebutuhan

hidupnya dan bersiap-siap untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi yang akan berubah.

Pendidikan. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun (2007), dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun yang mencapai 98,84 persen. Di samping itu, sampai tahun 2008 telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/sederajat telah mencapai masing-masing 95,14 persen dan 116,56 persen; APK pada jenjang SMP/MTs/sederajat telah mencapai 96,18 persen; dan APK pada jenjang pendidikan menengah 64,28 persen, serta APK pendidikan tinggi mencapai 18,29 persen yang berhasil melampaui target tahun 2009. Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan adalah disediakannya pelayanan pendidikan non formal termasuk melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Kemajuan lain yang monumental adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh indeks paritas gender APM atau APK yang sudah mencapai angka sekitar 1,0 untuk semua jenjang pendidikan.

Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, juga telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan pemenuhan kualifikasi S1/D4 mencapai 47,04 persen dan sertifikasi pendidikan mencapai 15,19 persen. Untuk mendorong kinerja guru, kesejahteraan guru juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp. 2,0 juta. Untuk mendukung pembangunan pendidikan yang lebih baik, anggaran pendidikan juga terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat amandemen UUD 1945 yang mencapai sebesar 20 persen dari APBN, atau sebesar Rp. 207,4 trilyun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah.

Kesehatan. Di bidang kesehatan, pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya telah meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator kesehatan masyarakat seperti meningkatnya usia harapan hidup dari 68,6 tahun (2004) menjadi 70,5 tahun (2007), menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 307 (2004) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 (2004) menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 25,8 persen (2005) menjadi 18,4 persen (2007).

Kinerja pelayanan kesehatan terus membaik, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dari 70,4 persen (2005) menjadi 72,5 persen (2007) dan cakupan imunisasi lengkap anak balita dari 51,5 persen (2002) menjadi 58,6 persen (2007). Beberapa indikator penyakit menular yaitu tingkat kejadian penyakit demam berdarah dengue (DBD) meningkat dari 37,1 (2004) menjadi 71,8 per 100.000 penduduk (2007), namun *case fatality rate* (CFR) menurun dari 1,2 persen (2004) menjadi 1,0 persen (2007), kasus diare tercatat 3.314 kasus dengan CFR 1,6 persen (2004) menjadi 3.661 kasus dengan CFR 1,3 persen (2007). A*nnual parasite incidence* (API) malaria (wilayah Jawa Bali)

tercatat 0,15 (2004) menjadi 0,16 per 1.000 penduduk (2007), sedangkan *annual malaria incidence* (AMI) di wilayah luar Jawa Bali menurun menjadi sebesar 19,7 per 1.000 penduduk (2007). Angka penemuan kasus/*case detection rate* (CDR) tuberkulosis meningkat dari 51,8 persen (2004) menjadi 69 persen (2007) dan keberhasilan penyembuhan TB meningkat dari 89 persen (2004) menjadi 91 persen (2006). Jumlah kasus HIV dan AIDS meningkat dari 9.565 kasus (2005) menjadi 22.125 kasus (2008), dan telah tersebar di 33 provinsi dan 214 kab/kota.

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan terus membaik, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan rasio Puskesmas menjadi 3,65 per 100.000 penduduk dan 94,0 persen rumah tangga berada kurang atau sama dengan 5 km dari sarana pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan terus bertambah antara lain ditunjukkan dengan rasio jumlah tenaga kesehatan untuk dokter umum yang telah mencapai 20 per 100.000 penduduk, dokter spesialis 5,5 per 100.000 penduduk, perawat 138 per 100.000 penduduk, bidan 35 per 100.000 penduduk. Demikian pula terjadi peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang berasal dari pemerintah terus meningkat, dan jaminan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin terus meningkat cakupannya dari 60 juta penduduk (2006) menjadi 76,4 juta penduduk pada tahun 2007.

Kependudukan. Dari sisi kependudukan, melalui program keluarga berencana telah dapat dihindarkan pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Sampai saat ini, dengan keberhasilan program keluarga berencana, diperkirakan telah lebih dari 100 juta kelahiran dapat dicegah. Selain itu, secara makro, Program KB juga telah berhasil merubah kondisi piramida penduduk Indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa. Perkembangan ini telah menciptakan peluang ekonomis karena ratio ketergantungan terus menurun mencapai titik terendah *(window of opportunity).*

Hasil-hasil pembangunan keluarga kecil berkualitas (keluarga berencana) yang telah dicapai pada tahun 2008, antara lain meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan menjadi 19,8 tahun (SDKI 2007). Selain itu, jumlah peserta KB aktif meningkat menjadi 25,6 juta peserta, yang 11,4 juta diantaranya adalah peserta KB aktif miskin. Peningkatan peserta KB aktif tersebut sebagai hasil dari pencapaian peserta KB baru sekitar 6,7 juta orang, yang diantaranya sebanyak 3,4 juta peserta adalah peserta KB baru miskin. Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, keluarga yang aktif dalam pembinaan tumbuh kembang anak melalui Bina Keluarga Balita (BKB) mencapai sekitar 1,8 juta keluarga**,** melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) sekitar 802 ribu keluarga**,** melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) sekitar 757 ribu keluarga, dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif (UPPKS) sekitar 1,0 juta keluarga. Pembangunan keluarga kecil berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 981 ribu institusi/sarana yang menyelenggarakan pelayanan KB, yang terdiri dari Klinik Pemerintah sekitar 210 ribu dan tempat pelayanan KB non Pemerintah sebanyak 771 ribu buah (Klinik Swasta sebanyak 36 ribu, Dokter Praktek Swasta sebanyak 158 ribu, dan Bidan Praktek Swasta sebanyak 577 ribu). Selain itu, juga karena tersedianya Pos Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 83 ribu, Sub PPKBD sebanyak 388 ribu, dan meningkatnya jumlah tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) menjadi sekitar 23.765 petugas. Pada tahun 2009, pencapaian pembangunan keluarga kecil berkualitas diharapkan dapat semakin meningkat.

Agama. Dari sisi keagamaan, kemajemukan dan pluralitas menjadi potret masyarakat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Oleh sebab itu peningkatan kerukunan umat beragama merupakan upaya yang diprioritaskan dimana perhatian serius dari

Pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan sosial yang lebih komplek. Melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong segenap umat beragama agar memahami ajaran agama masing-masing baik yang vertikal maupun horizontal, serta untuk menekankan adanya titik temu agama-agama dalam hal sama-sama mengajarkan perdamaian, toleransi dan kasih sayang antar sesama manusia. Selanjutnya kegiatan pokok lainnya yang telah dilakukan antara lain: penanganan daerah konflik, sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; Pelayanan kepada umat Khonghucu; dan orientasi tenaga rekonsiliasi.

Kebudayaan. Masih terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai antara lain dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya. Pada tahun 2008, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) pembinaan karakter dan pekerti bangsa di 33 provinsi melalui media massa, sekolah, dan organisasi kepemudaan, (2) dukungan *event* budaya di daerah, (3) pengembangan apresiasi seni dan pemberian penghargaan di bidang seni, (4) pembinaan pengembangan perfilman nasional, (5) peningkatan sensor film/video/iklan, (6) penyelamatan dan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan dan penanggulangan kasus pelestarian dan pemanfaatan peninggalan kepurbakalaan di 33 provinsi, dan (7) pendukungan pengelolaan untuk 25 museum daerah. Disamping itu, untuk mendukung pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang lebih baik, pada tahun 2009, upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pembangunan di bidang kebudayaan.

Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, berbagai kegiatan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga telah meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga yang antara lain tercermin dari meningkatnya budaya olahraga dikalangan masyarakat serta meningkatnya pencapaian prestasi di beberapa cabang olahraga di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2008, peningkatan partisipasi pemuda dicapai antara lain melalui berbagai upaya peningkatan kualitas dan kemandirian pemuda, pembinaan kesadaran bela negara, kewirausahan dan kecakapan hidup bagi pemuda, serta partisipasi pemuda terdidik dalam pembangunan perdesaan. Sementara itu, kemajuan yang dicapai di bidang olahraga didukung oleh upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan internasional, pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat di 33 provinsi, serta peningkatan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga bagi provinsi/kab/kota. Pada tahun 2009, berbagai upaya peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam hal pengembangan budaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga terus dilanjutkan.

Kualitas Pelayanan Publik. Selama tahun 2008, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah menunjukkan banyak kemajuan. Dari aspek legalitas, telah dilakukan pembahasan RUU Pelayanan Publik bersama DPR. Selanjutnya, telah pula disusun SPM sektoral bidang kesehatan, sosial, lingkungan hidup dan pemerintahan dalam negeri, yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan berbagai diklat untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah

daerah. Beberapa pencapaian lainnya antara lain; ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government* dan *e-procurement*); penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) *offline* di 471 Kabupaten/Kota; terbentuknya 293 unit pelayanan terpadu satu pintu dan pengembangan pelayanan publik di perkotaan seperti *sister city*/kota kembar di 50 daerah.

Pada tahun 2009, diharapkan pembahasan RUU Pelayanan Publik dapat diselesaikan dan diundangkan, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, kompetensi aparat pemerintah daerah dalam penerapan SPM diharapkan makin meningkat. Ditargetkan juga, bahwa pada tahun 2009 dapat disusun 4 dokumen SPM bidang pemerintahan dan penerapan 2 SPM bidang pemerintahan di 33 provinsi sebagai acuan standar pelayanan kepada masyarakat di daerah. Pengembangan *e-government* termasuk *e-procurement* dan SIAK *online* dalam rangka pemanfaatan TIK makin diperluas penerapannya. Di samping itu, diharapkan terwujud standar pelayanan publik di perkotaan dan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) secara bertahap di 33 Provinsi, 50 Kabupaten/Kota, dan 16 instansi terkait (tahap I).

Pengembangan Sistem Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS. Selanjutnya, di bidang sumber daya manusia (SDM) aparatur, telah dilakukan langkah-langkah peningkatan kompetensi, perbaikan remunerasi, pemantapan sistem merit dan penyempurnaan manajemen kepegawaian. Dalam kaitan itu beberapa capaian selama tahun 2008 antara lain: tersusunnya naskah akademik penyempurnaan UU Kepegawaian Negara dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang SDM aparatur; juga telah tersusun pedoman standar kompetensi jabatan dan pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan; pelaksanaan rekruitmen CPNS secara transparan, kompetitif dan berbasis kompetensi; diselenggarakan *assessment center* nasional di BKN dan *assessment center* di beberapa instansi yang dimanfaatkan untuk melakukan penilaian kompetensi jabatan strategis. Pada tahun 2009, diharapkan dapat tercapai antara lain penyempurnaan manajemen pendidikan dan pelatihan (Diklat) mencakup sistem dan kurikulum diklat yang disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; tersusunnya RPP Sistem Remunerasi PNS berbasis kinerja dan merit; tersusunnya RUU Kepegawaian Negara; meningkatnya kompetensi PNS melalui berbagai Diklat baik teknis, fungsional maupun pimpinan.

Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas. Di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan selama tahun 2008 diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya penyempurnaan dan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah agar dapat berfungsi secara optimal sesuai prinsip *structure follow function*. Terbitnya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan upaya untuk mengatur kelembagaan kementerian agar dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan tanpa mengurangi hak prerogratif Presiden dalam menyusun kabinetnya. Di samping itu, selama tahun 2008 telah tersusun beberapa naskah RUU sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan RUU Badan Layanan Umum (Nirlaba). Pencapaian lainnya antara lain: penataan secara bertahap atas lembaga non struktural (quasi birokrasi); terbitnya Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah; dan telah diterbitkannya Pedoman Umum Reformasi Birokrasi melalui PerMenPAN No. PER/15/M.PAN/7/2008

sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Pada tahun 2009, diharapkan implementasi reformasi birokrasi pada instansi pemerintah semakin diperluas pelaksanaannya sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi.

Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan/audit, serta penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan makin memantapkan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta bebas KKN. Terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) semakin memperjelas kedudukan dan fungsi auditor internal di lingkungan instansi pemerintah. Di sisi lain, obyek audit yang dilakukan auditor eksternal dalam hal ini BPK semakin banyak yang meliputi instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan keuangan negara. Tindak lanjut hasil audit BPK juga semakin dioptimalkan. Sedangkan dalam rangka memantapkan akuntabilitas kinerja, jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah semakin meningkat. Pada tahun 2009, pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mencegah secara dini tindak korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi. Untuk itu, pencapaian strategis yang diharapkan tercapai pada tahun 2009 adalah tersusunnya naskah RUU Sistem Pengawasan Nasional dan RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara. Selain itu, berbagai kegiatan bidang pengawasan, audit dan peningkatan akuntabilitas semakin optimal untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Kapasitas Pemerintah Daerah. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dilakukan pada tiga aspek, yakni kapasitas kelembagaan Pemda, profesionalisme aparatur Pemda, dan kapasitas keuangan Pemda. Untuk mendukung pembangunan perdesaan terpadu, perlu dilakukan peningkatan/penguatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintahan desa, penetapan dan penegasan batas desa serta pemberian dukungan terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas). Sampai dengan tahun 2008, beberapa capaian penting diantaranya: (1) telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan guna menata kelembagaan Pemda; (2) terlaksananya berbagai diklat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga; dan (3) tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Bina Administrasi Keuangan Daerah (SIM BAKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pencapaian penting untuk tahun 2009 yang diperkirakan dapat terwujud, antara lain: (1) terkait aspek kelembagaan Pemda, diperkirakan akan tercipta persepsi dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi khusus dan istimewa; (2) terkait aspek keuangan Pemda, diperkirakan akan terbangunnya SIPKD, tersedianya dukungan fasilitasi dan terpenuhinya 10 regulator dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; serta (3) terkait dengan aspek profesionalisme aparatur Pemda, diperkirakan akan tersusunnya dokumen rencana aksi nasional penguatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu indikator keberhasilan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi adalah meningkatnya indeks persepsi korupsi (IPK). Pada tahun 2003 sebesar 1,9 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 2,0. Pada tahun 2005 menjadi 2,2 dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 2,4. tahun 2007 turunn menjadi 2,3, dan tahun 2008 naik menjadi 2,6, dengan kedudukan pada peringkat 126 dari 180 negara atau di atas Filipina, Laos, Kamboja dan Myanmar.

Pada tahun 2008, kasus-kasus korupsi yang ditangani cukup banyak melibatkan para pejabat negara dari lembaga legislatif, eksekutif baik pusat maupun daerah dan yudikatif termasuk aparat penegak hukum sendiri. Dalam rangka pencegahan korupsi, telah dilakukan

berbagai perbaikan mekanisme dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Izin Mendirikan Bangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Publik, dan perizinan investasi. Pelaksanaan kampanye dan konsultasi publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan fasilitasi kepada daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi terus dilakukan, yaitu di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Gorontalo. Di samping itu juga telah dilakukan kegiatan pada tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pemalang, Kota Denpasar, Kota Magelang, dan Kota Bandung.

Pada tahun 2009 upaya pemberantasan korupsi terus dilanjutkan secara intensif, dengan sasaran utama mempercepat pembahasan perubahan UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; RUU Pengadilan Tipikor. Di samping itu, akan dilanjutkan kegiatan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi pada empat Provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Palu.

Desentralisasi serta peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah. Pemantapan desentralisasi, baik desentralisasi politik, administrasi serta keuangan sebagaimana yang telah diatur pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu terus dilakukan. Pada tahun 2008 telah dilakukan: (1) Penetapan 4 (empat) PP sebagai amanat dari UU No. 32 Tahun 2004, sehingga sampai dengan akhir 2008 telah diselesaikan 20 (dua puluh) PP, 1 (satu) Perpres dan 2 (dua) Permendagri sebagai amanat dari UU No. 32 Tahun 2004; (2) Dilakukannya perubahan terbatas, dengan diterbitkannya UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Dimulainya pelaksanaan revisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004; (4) Sosialisasi PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antardaerah; dan (5) Terfasilitasinya forum-forum kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dasar, pengembangan ekonomi regional, koordinasi penyelenggaraan pembangunan, penggunaan SDA bersama.

Pencapaian tahun 2009 yang diperkirakan akan terwujud diantaranya: (1) Selesainya seluruh peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004; (2) Selesainya revisi UU No. 32 Tahun 2004; (3) Terfasilitasinya penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-undang daerah khusus dan istimewa bagi Provinsi Aceh, DIY, Jakarta, Papua, dan Papua Barat; serta (4) Meningkatnya jumlah bentuk kerjasama antar daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Peran Organisasi Masyarakat Sipil, dan Partai Politik. Pada tahun 2008, Partisipasi politik rakyat relatif cukup tinggi untuk ikut berorganisasi dalam partai politik dan organisasi masyarakat sipil, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya 44 partai politik termasuk 6 partai politik lokal yang berhak ikut pemilu 2009, serta kurang lebih puluhan ribu organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada relatif cukup tinggi, yaitu sekitar 75,28%. Namun tingkat partisipasi tersebut belum disertai dengan kinerja peran parpol dan masyarakat sipil yang positif dalam proses demokratisasi di Indonesia. Parpol belum dapat melaksanakan fungsi-fungsi agregasi artikulasi, dan pendidikan politik. Di samping itu, kapasitas organisasi parpol masih lemah terutama dalam pola pengkaderan (rekrutmen) dan kredibilitas yang masih rendah di mata konstituennya. Organisasi masyarakat sipil belum memiliki kapasitas organisasi masyarakat sipil yang cukup memadai untuk melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara. Peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup kondusif untuk meningkatkan

peran optimal masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap negara dan pasar masih belum mampu melaksanakan perannya sebagai mitra dialog dan konsultasi dengan pemerintah berdasarkan kemitraan yang setara.

Pada tahun 2009, kebijakan pemberdayaan dan penguatan organisasi masyarakat sipil diharapkan mendapatkan bentuknya yang lebih jelas. Berbagai kelemahan organisasi masyarakat sipil oleh sebab-sebab eksternal dan internal yang sudah mulai terindentifikasi diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program-program pemberdayaan yang lebih konkrit. Komunikasi yang makin intens antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil diharapkan mulai akan memperlihatkan hasil konkrit berupa penguatan ruang publik dalam menjaga harmonisasi masyarakat secara lebih berkelanjutan. Persoalan pemberdayaan masyarakat bagi pemulihan dan rekonsiliasi di wilayah rawan konflik pada era pasca-konflik pun diharapkan dapat berjalan lebih mantap. Partai-partai yang mendapatkan kepercayaan masyarakat akan mulai diketahui polanya setelah Pemilu 2009 sehingga kebijakan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan parpol dapat dilakukan lebih terarah.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2008 Pemerintah bersama DPR telah berhasil menetapkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan akan diberlakukan sepenuhnya pada tahun 2010 mendatang. Dengan telah ditetapkan undang-undang ini, maka semua lembaga terkait diharapkan dapat segera menyiapkan diri karena undang-undang ini memiliki persyaratan dan standar kesiapan yang cukup tinggi. Melalui penetapan ini maka konsolidasi demokrasi Indonesia diharapkan segera memasuki tahap baru yang lebih baik, pada saat publik makin menjadi titik sentral dalam lalu lintas arus informasi yang berkaitan dengan proses politik dan penyelenggaraan negara. Pada tahun 2009, dengan telah ditetapkannya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan akan diberlakukan sepenuhnya pada 2010, maka perlu segera dilakukan penyusunan peraturan pelaksanaan secara transparan serta kemudian pensosialisasiannya kepada publik. Media massa diharapkan aktif dalam seluruh proses sosialisasi kepada publik.

Penguatan Wilayah Perbatasan. Berbagai upaya pengamanan wilayah perbatasan berhasil menurunkan tindak pelanggaran di wilayah perbatasan. Tindak kejahatan yang bersifat lintas batas seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking* dan gangguan kekayaan lainnya relatif berkurang. Demikian juga, klaim negara asing atas wilayah Indonesia relatif tidak ada. Pada tahun 2009 dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan beserta penggelarannya di wilayah perbatasan dan pulau terluar akan semakin meningkatkan keamanan dan kedaulatan NKRI. Selanjutnya terkait dengan pengamanan Selat Malaka, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut masih belum dapat dituntaskan. Aksi perompakan di Selat Malaka telah dapat ditekan dari 38 kali (2004) menjadi 7 kali (2007). Meskipun berbagai upaya yang dilakukan telah mampu menekan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut, tetapi dunia internasional masih meragukan keamanan wilayah perairan Indonesia dan menganggap relatif berbahaya. Munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *cooperating states* untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, menimbulkan kekhawatiran internasionalisasi keamanan wilayah perairan suatu negara. Melalui peningkatan kerjasama trilateral antara Indonesia – Singapura – Malaysia serta peningkatan operasi baik mandiri maupun bersama, diharapkan akan meningkatkan keamanan Selat Malaka sehingga kekuatan asing tidak turut ambil bagian dalam pengamanan jalur pelayaran ini.

Kemampuan Pertahanan dan Industri Strategis Pertahanan. Secara umum tingkat kesiapan kekuatan matra darat sampai penghujung RPJMN 2004 - 2009 rata-rata mencapai 68.85 persen, kekuatan matra laut mencapai tingkat kesiapan rata-rata 46,27 persen, dan

kekuatan matra udara saat ini mencapai tingkat kesiapan rata-rata 78,93 persen. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pengembangan alutsista, menyebabkan kesiapan alutsista pada tahun 2009 tidak akan meningkat secara signifikan. Sementara itu, sebagai salah satu basis pengembangan kekuatan pertahanan negara, peran industri pertahanan dalam negeri semakin berperan dalam mendukung kemandirian alutsista pertahanan. Pada saat ini hasil-hasil Industri pertahanan seperti helikopter, kapal patroli, panser, senapan serbu, atau munisi kaliber kecil telah menjadi bagian alutsista TNI dan Polri meskipun masih dalam skala terbatas. Dalam tahun 2009, dengan adanya kepastian hukum dan skema pembiayaan dalam negeri, jumlah dan variasi alutsista hasil pengembangan industri pertahanan diharapkan akan semakin meningkat.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dirasakan dengan tidak adanya kasus-kasus yang luar biasa atau menonjol sepanjang tahun 2008. Kondisi ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengantisipasi, menindak, dan mengelola setiap potensi ancaman yang ada di masyarakat. Namun demikian, adanya pengaruh eksternal berupa krisis global dan pengaruh internal dalam negeri berupa dinamika politik, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya berpotensi meningkatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, penyelesaian perkara kriminal yang saat ini masih pada kisaran 52 persen, diharapkan dapat semakin meningkat sehingga terwujud rasa aman di kalangan masyarakat, terutama dunia investasi sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional.

Penggalangan Keamanan Nasional. Meningkatnya potensi gangguan keamanan nasional baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun demikian, cakupan pengamanan rahasia negara yang baru mencapai 36 % berpotensi menyebabkan terjadinya kebocoran rahasia negara. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen pada khususnya dan keamanan nasional pada umumnya.

Pertumbuhan Ekonomi. Di bidang ekonomi, krisis ekonomi dunia yang terjadi sejak paruh kedua tahun 2008, berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 mencapai 6,1 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,3 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2008, terutama didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB)sebesar 11,7 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 10,4 persen. Sementara itu, ekspor barang dan jasa tumbuh 9,5 persen dan konsumsi masyarakat tumbuh 5,3 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertanian serta industri pengolahan nonmigas yang masing-masing tumbuh sebesar 4,8 persen dan 4,1 persen. Adapun sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih masing-masing tumbuh 16,7 persen dan 10,9 persen.

Perlambatan ekonomi dunia akibat krisis global diperkirakan masih berlangsung hingga tahun 2009. Dengan memperhatikan resiko gejolak eksternal yang cukup besar tersebut, serta berbagai kebijakan yang telah diambil termasuk kebijakan stimulus ekonomi, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 berkisar antara 4-4,5 persen.

Investasi. Selama tahun 2008, realisasi investasi berupa ijin usaha tetap (IUT) secara total Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN dan Penanaman Modal Asing/PMA meningkat sebesar 26,9 persen, pertumbuhan investasi tersebut didukung oleh tingginya realisasi PMA yang meningkat 52,2 persen. Sementara itu PMDN mengalami penurunan sebesar 41,6 persen dibandingkan tahun 2007. Meskipun aliran investasi langsung ke semua

negara termasuk Indonesia diprediksi masih akan melemah sampai dengan akhir tahun 2009, daya tarik investasi Indonesia masih cukup tinggi yang menduduki peringkat ke 8 menurut survey World Investment Prospect-UNCTAD 2008-2010 karena ketersediaan SDA dan besarnya akses pasar.

Ekspor. Pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang tahun 2008 adalah sebesar 17,2 persen. Nilai Ekspor nonmigas pada tahun 2008 mencapai angka USD 136,8 milyar, yang memberikan kontribusi sebesar 78,8 persen terhadap nilai ekspor total. Komponen ekspor nonmigas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor adalah sektor industri, yaitu sebesar 64,4 persen. Nilai ekspor sektor industri ini pada tahun 2008 mencapai USD 88,0 milyar, atau tumbuh sebesar 15,1 persen yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekspor nonmigas yang tinggi ini didorong oleh adanya faktor peningkatan volume dan harga, dimana kenaikan harga komoditas yang tinggi di pasar internasional terjadi di sepanjang semester I tahun 2008.

Selain perdagangan internasional, pariwisata memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong peningkatan penerimaan devisa negara. Secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008 mencapai 6,4 juta orang dengan jumlah devisa yang dihasilkan sebesar USD 7,3 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah wisman dan penerimaan devisa mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 16,85 dan 37,7 persen.

Dampak krisis ekonomi global mulai dirasakan pada awal semester II tahun 2008. Sejak bulan Juni tahun 2008 nilai ekspor nonmigas mengalami kecenderungan menurun. Penurunan ini terjadi karena pelemahan permintaan dunia yang berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia dan harga komoditi di pasar internasional. Dampak krisis ekonomi ini akan terus berlanjut dan memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekspor non migas pada tahun 2009. Namun demikian, di tahun 2010 permintaan dunia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2009, seiring dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih baik dibandingkan tahun 2009. Hal ini akan memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekspor non migas seiring dengan membaiknya kondisi global.

Sementara itu, kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 6,5 juta orang dengan devisa yang dihasilkan diperkirakan sekitar USD 7,2 miliar.

Industri Manufaktur. Dari sisi produksi, perkembangan industri pengolahan bukan migas menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan secara berturut-turut sebesar 5,86 persen pada tahun 2005, 5,27 persen pada tahun 2006, 5,15 persen pada tahun 2007 serta 4,05 persen pada tahun 2008. Dalam hal ini, tiga subsektor industri yang memiliki pangsa kontribusi besar adalah industri makanan dan minuman, industri pupuk, kimia dan barang karet, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2008 ketiga subsektor ini tumbuh secara positif yaitu secara berturut-turut pertumbuhannya sebesar 2,34 persen, 4,46 persen, dan 9,79 persen.

Industri manufaktur tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi global. Data pertumbuhan triwulanan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pada triwulan ke-empat sektor industri mengalami perlambatan yang cukup nyata, terutama pada subsektor yang rentan dengan pasokan atau permintaan pasar global, seperti industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, industri kertas dan barang cetakan, industri logam dasar, besi dan baja, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2009 diperkirakan pertumbuhan industri masih melemah karena memang permintaan yang belum pulih akibat krisis global baik dari pasar

domestik maupun dari pasar internasional. Sehingga pada tahun 2009 industri pengolahan non-migas diperkirakan tumbuh 3,9 persen.

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Di samping industri, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan ekspor nasional. Pada tahun 2008, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sekitar 14 persen dari PDB nasional. Sementara itu, pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pada tahun tersebut mencapai sekitar 4,8 persen, lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2008 yaitu 3,7 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada sub sektor Tanaman Bahan Makanan yang mencapai 5,9 persen, Tanaman Perkebunan 3,8 persen, Peternakan dan hasilnya 3,9 persen, serta perikanan sebesar 4,8 persen. Sampai triwulan III tahun 2008 sub sektor kehutanan berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 0,83 persen. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut didorong oleh peningkatan produksi komoditas utama pertanian, yaitu padi mencapai 60,3 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung 16,3 juta ton, kedelai 776,5 ribu ton, serta produksi daging sebesar 2.117 ribu ton. Pertumbuhan sektor pertanian juga didorong dengan peningkatan produksi komoditas hortikultura dan perkebunan.

Pada tahun 2009, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diharapkan dapat tumbuh 3,5 persen, lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 3,7 persen, yang terdiri atas pertumbuhan tanaman bahan makanan sebesar 4,9 persen, perkebunan sebesar 4,4 persen, peternakan dan hasilnya sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan sub sektor pertanian tersebut, **terutama** didukung dengan peningkatan produksi padi pada tahun 2009 yang diperkirakan dapat mencapai 60,9 juta ton GKG, produksi jagung dan kedelai masing-masing 16,5 juta ton dan 850,2 ribu ton (ARAM I, BPS). Sementara itu, pencapaian pembangunan perikanan pada tahun 2009 diperkirakan mampu meningkatkan PDB-nya menjadi sebesar 2,6 persen; produksi perikanan meningkat menjadi 12,73 juta ton; dan volume ekspor meningkat menjadi 1,6 juta ton dengan nilai ekspor sebesar USD 2,8 miliar.

Dalam penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian pada tahun 2009 diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 41,8 juta orang atau meningkat sebesar 7,05 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 41,3 juta orang. Sementara itu, sejalan dengan peningkatan produksi komoditas perikanan, jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor perikanan pada tahun 2009 diperkirakan sebanyak 10,02 juta orang atau meningkat sebesar 30,3 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 7,69 juta orang.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berorientasi ekspor dan investasi baru di bidang pemanfaatan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan telah dilakukan perbaikan kebijakan antara lain: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; (ii) Pedoman Tata Cara pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; (iii) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri; (iv) Pedoman tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu; (v) Penyederhanaan perizinan peralatan dengan mendesentralisasikan perizinan peralatan untuk IPK kepada Dinas Kehutanan Propinsi; (vi) Menyempurnakan beberapa pasal dari PP Nomor 6 Tahun 2007 melalui PP Nomor 3 Tahun 2008, dengan maksud mempertegas kriteria lahan yang dapat dicadangkan sebagai areal HTI guna mendorong percepatan pembangunan HTI.

Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, ketenagakerjaan juga mengalami kemajuan. Jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2009 sebesar 113,74 juta atau sekitar 67,60 persen dari seluruh penduduk usia kerja. Tambahan angkatan kerja sebesar 2,2 juta orang telah menambah jumlah angkatan kerja yang sudah ada. Tanpa diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja akan meningkatkan pengangguran. Kesempatan kerja yang tercipta sebanyak 2,44 juta orang, sehingga penganggur menurun menjadi 8,14 persen.

Sampai dengan Februari tahun 2009, terjadi perubahan dalam proporsi pekerja ke arah pendidikan yang lebih tinggi, yang menggambarkan peningkatan kualitas tenaga kerja. Proporsi pekerja lulusan SMTA mengalami peningkatan dari 18,54 persen tahun 2007 menjadi 21,36 persen pada Februari 2009. Untuk lulusan diploma dan perguruan tinggi, meningkat dari 6,20 persen menjadi 6,6 persen. Sementara tingkat pendidikan SD ke bawah sudah mulai menurun, dari 56,37 persen menjadi 53,05 persen.

Pendidikan dan keterampilan pekerja yang rendah, menjadi suatu kendala dalam meningkatkan produktivitas pekerja, yang lebih jauh berakibat terhadap perkembangan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Produktivitas tenaga kerja yang dihitung dari PDB per pekerja dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan harga konstan tahun 2000, PDB per pekerja di sektor pertanian, meningkat dari Rp 6,09 juta per pekerja tahun 2004 menjadi Rp 6,66 juta per pekerja tahun 2008. Pada tahun yang sama, PDB per pekerja sektor industri dan jasa meningkat masing-masing dari Rp 42,45 juta per pekerja menjadi Rp 44,84 juta per pekerja dan Rp 14,54 juta per pekerja menjadi Rp 15,16 juta per pekerja.

Meskipun meningkat, produktivitas per pekerja Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN, untuk semua sektor, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Dalam hubungan ini, investasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja mengingat jumlah penganggur yang berpendidikan menginginkan pekerjaan yang baik. Lapangan kerja formal yang tercipta melalui investasi baik investasi asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN), menunjukkan peningkatan dan memberikan harapan baru dalam penciptaan kesempatan kerja. Pada tahun 2007, lapangan kerja yang tercipta dari realisasi investasi PMDN sekitar 86.900 orang dan telah mencapai 58.800 orang pada tahun 2008 (hingga bulan November). Untuk investasi PMA, lapangan kerja yang terserap meningkat dari 180.800 orang menjadi 220.100 orang. Dengan demikian total pekerja yang diserap dari investasi yang tercatat sampai November tahun 2008 sekitar 280.000 orang. Jumlah ini memang masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penganggur terbuka. Namun demikian, perkembangan dari tahun ke tahun semakin baik.

Dalam tahun 2009, krisis keuangan AS masih berdampak kepada dunia usaha. Laporan yang dihimpun dari tim pemantau dampak krisis menyebutkan bahwa sampai dengan 1 Mei 2009, tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan pekerja terus berjalan. Saat ini sudah lebih dari 51.000 pekerja terkena PHK, dan yang sudah dirumahkan lebih dari 22.000 pekerja. Tingkat PHK tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta, sebanyak 17.000 lebih pekerja. Industri yang banyak mem-PHK antara lain garmen, tekstil, alas kaki. Kondisi ini sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pengangguran terbuka tahun 2009. Dalam situasi di mana jumlah lowongan kerja (formal) tidak mencukupi untuk menampung seluruh pencari kerja, dan menganggur tidak bisa menjadi pilihan, kemungkinan para penganggur akan memasuki lapangan kerja informal. Sehingga ada kemungkinan jumlah pekerja informal akan bertambah. Demikian halnya, pekerja yang terkena PHK kemungkinan akan memasuki lapangan kerja informal.

Produktivitas Dan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktif. Dalam menghadapi gejolak ekonomi yang sering terjadi, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peranan penting guna menampung tingkat pengangguran yang masih tinggi serta meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itu terus dilakukan upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi secara terus menerus. Hal itu dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Pada tahun yang sama, jumlah koperasi adalah sebanyak 149,3 ribu unit, dengan jumlah anggota mencapai sekitar 29,1 juta orang. Produktivitas per unit UMKM (berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 4,7 persen dari produktivitas usaha pada tahun 2006. Pertumbuhan produktivitas per unit UMKM tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produktivitas per unit usaha secara nasional.

Selama tahun 2008, upaya pemberdayaan UMKM telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: (1) penerbitan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; (2) pelaksanaan paket kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 yang mencakup penajaman fokus dan prioritas pembangunan ekonomi, termasuk di antaranya paket kebijakan mengenai UMKM; (3) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga 31 Desember 2008 telah menyalurkan sebesar Rp12,624 triliun kepada 1.671.668 UMKM dengan rata-rata kredit per debitur senilai Rp7,55 juta; (4) kegiatan bantuan sertifikasi tanah kepada 47.500 UKM untuk digunakan sebagai agunan pinjaman/kredit; (5) fasilitasi pembiayaan alternatif melalui dana bergulir yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (BLU-LPDB); (6) bantuan pembangunan pasar tradisional di daerah yang mencakup empat kategori pasar, yakni pasar reguler, pasar souvenir, pasar daerah tertinggal atau daerah mitigasi, dan pasar perbatasan; dan (7) inisiasi pembentukan lembaga pusat inovasi UMKM.

Untuk tahun 2009, pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan dapat diarahkan untuk mengatasi krisis ekonomi global yang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, antara lain: (1) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM; (2) Pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM; (3) Pengembangan jaringan antar LKM/KSP; (4) Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota; (5) Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi; (6) Pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro melalui koperasi; (7) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produksi skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha; (8) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/KSP; (9) Pembinaan sentra-sentra produksi UMKM di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan; dan (10) Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi.

Ketahanan Pangan. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan stabilitas ekonomi yang mantap, yang antara lain dicerminkan oleh meningkatnya ketahanan pangan. Situasi ketahanan pangan nasional pada periode tahun 2005-2008 menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya sebagian besar produksi bahan pangan antara lain: padi, jagung, kedelai, tebu/gula, daging sapi, telur, dan susu; (2) meningkatnya ketersediaan energi dan protein dari tahun ke tahun, dengan peningkatan masing-masing 2,6% per tahun dan 2,7% per tahun, serta tingkat ketersediaan energi telah mencapai 3.032 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sekitar 76.9 gram/kap/hari; (3) meningkatnya jumlah dan kualitas konsumsi masyarakat yang sudah mencapai Angka Kecukupan Gizi, yang ditandai dengan peningkatan skor PPH; (4) Stabilnya

pergerakan harga pangan dalam negeri. Sementara itu pada tahun 2009 diharapkan dapat terus meningkat, serta meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan dengan mutu gizi yang semakin baik. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan semakin meningkatnya konsumsi ikan masyarakat. Konsumsi ikan per kapita mengalami peningkatan sebesar 6,01% yaitu pada tahun 2007 sebesar 28,28 kg/kap/tahun menjadi 29,98 kg/kap/tahun pada tahun 2008. Melalui kampanye gemar makan ikan terutama kepada ibu dan anak diharapkan peningkatan konsumsi ikan akan terus meningkat pada masa mendatang. Pada tahun 2009 diperkirakan konsumsi ikan masyarakat menjadi sebesar 30 kg/kap/tahun.

Dukungan infrastruktur irigasi terhadap ketahanan pangan pada tahun 2008 diwujudkan melalui pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 67,64 ribu**;** hektar, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 459,23 ribu hektar**;** dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 238,61 ribu hektar**;** operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,04 juta hektar serta operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 971,75 ribu hektar. Pada tahun 2009 diperkirakan konsumsi ikan masyarakat menjadi sebesar 30 kg/kapita/tahun. Dukungan infrastruktur irigasi akan terus dilanjutkan pada tahun 2009 melalui pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 68,9 ribu hektar, pembangunan/peningkatan jaringan rawa seluas 22 ribu hektar. Selain itu, juga dilakukan upaya optimalisasi fungsi jaringan irigasi dengan melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,1 juta hektar serta operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 535 ribu hektar.

Stabilitas Harga Dan Pengamanan Pasokan Bahan Pokok. Selain ketahanan pangan, stabilitas ekonomi juga ditunjukkan oleh nilai tukar rupiah yang stabil dan inflasi yang terjaga. Nilai tukar Rupiah yang sebelumnya sempat menguat dari Rp 9.419,-/USD pada bulan Desember 2007 menjadi Rp 9.118,-/USD pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta, kemudian melemah menjadi Rp 9.153,-/USD pada bulan Agustus dan mencapai puncaknya menjadi Rp 12.151,-/USD pada bulan November 2008 dan menguat kembali menjadi Rp 10.950,-/USD pada akhir bulan Desember 2008. Pada bulan Januari 2009 nilai tukar Rupiah melemah kembali sejalan dengan gejolak di pasar uang dan pasar modal internasional sehingga pada bulan Januari 2009 nilai tukar Rupiah menjadi 11.355,-/USD, namun kemudian menguat kembali menjadi Rp 10.400,-/USD pada awal Mei 2009.

Di sisi lain, inflasi mengalami penurunan pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 seiring dengan menurunnya harga bahan bakar internasional dan domestik serta bahan-bahan pokok lainnya. Inflasi bulan April 2008 sebesar 8,96 persen (*y-o-y)* meningkat menjadi 10,38 persen (*y-o-y*) pada bulan Mei 2008 seiring dengan kenaikan harga BBM domestik dan kenaikan harga bahan pangan pokok. Inflasi terus meningkat sehingga pada bulan September 2008 mencapai 12,14 persen (*y-o-y*). Sejalan dengan menurunnya harga bahan bakar internasional dan domestik serta bahan-bahan pokok lainnya, inflasi menurun secara bertahap menjadi 11,77 persen (*y-o-y*) pada bulan Oktober 2008, 11,06 persen (*y-o-y*) pada bulan Desember 2008 dan 7,31 persen (*y-o-y*) pada bulan April 2009. Dengan semakin stabilnya harga-harga bahan pokok internasional dan domestik, diharapkan inflasi akan turun secara bertahap menjadi 5,0 persen (*y-o-y*) pada akhir tahun 2009.

Menurunnya inflasi pada akhir tahun 2008 memberikan cukup ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan perubahan kebijakan moneter yang semakin longgar. Kebijakan pengendalian moneter yang sebelumnya mengetat, yaitu dengan menaikkan BI rate naik secara bertahap dari sebesar 8,0 persen pada bulan April 2008 menjadi 9,50 persen pada bulan Oktober dan November 2008, kemudian dilonggarkan melalui penurunan BI rate menjadi 9,25 persen pada bulan Desember 2008, 8,75 persen pada bulan Januari 2009 dan 7,25 persen pada

bulan Mei 2009, atau menurun 200 basis poin dibandingkan pada bulan Desember 2008. Agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, BI rate diharapkan masih dapat sedikit diturunkan lagi dalam tahun 2009. Penurunan BI rate pada awal Desember 2008 memang belum diikuti oleh penurunan sukubunga perbankan dalam jangka pendek kecuali suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit investasi karena masih ketatnya likuditas perbankan meskipun sudah mulai melonggar secara bertahap.

Keuangan Negara. Stabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi ketahanan APBN. Realisasi APBN Tahun 2008 dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global. Sampai dengan 31 Desember 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp981 triliun atau 21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat sebesar Rp273,2 triliun atau naik sebesar 38,6 persen dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2007. Peningkatan tesebut selain disebabkan oleh perbaikan dan reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan (di antaranya melalui kebijakan intensifikasi perpajakan dan *sunset policy*), didorong pula faktor eksternal terutama dengan meningkatnya harga komoditi migas di pasar internasional.

Di sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara hingga 31 Desember 2008 mencapai Rp985,3 triliun (21 persen terhadap PDB) atau meningkat sebesar 30 persen dibandingkan realisasi APBN Tahun 2007. Peningkatan realisasi belanja negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 37,3 persen atau meningkat sebesar Rp188,3 triliun dan belanja ke daerah meningkat 15,5 persen atau sebesar Rp39,4 triliun. Meskipun tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja negara tahun 2007, namun realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada APBN-Pnya. Penurunan ini terkait erat dengan upaya pemerintah menghadapi ancaman krisis ekonomi global melalui kebijakan penajaman alokasi anggaran dan realokasi belanja negara yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Sejalan dengan upaya pengamanan APBN tersebut, pemerintah mampu menekan defisit APBN Tahun 2008 menjadi sebesar 0,1 persen terhadap PDB. Defisit tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target APBN-P Tahun 2008 sebesar 2,1 persen terhadap PDB. Hal ini menimbulkan kelebihan pembiayaan dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp51,3 triliun. Selanjutnya, kelebihan ini akan digunakan untuk memberikan stimulus fiskal kepada perekonomian pada Tahun 2009. Berdasarkan realisasi tersebut, stok utang pemerintah pada akhir tahun 2008 diperkirakan sebesar 31 persen terhadap PDB.

Pada tahun 2009, APBN diperkirakan masih akan mendapat tekanan dari faktor ekternal akibat krisis ekonomi global. Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran akan tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan *(pro growth)*, menciptakan dan memperluas lapangan kerja *(pro job)*, serta mengurangi kemiskinan *(pro poor)*. Dengan melemahnya peran investasi swasta dan ekspor, peran kebijakan fiskal menjadi sangat strategis sebagai bentuk kebijakan *counter-cyclical* dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi sepanjang tahun 2009.

Terkait dengan krisis ekonomi global yang terjadi, akan segera dilakukannya perubahan terhadap beberapa asumsi makro ekonomi dalam APBN Tahun 2009. Perubahan tersebut anara lain adalah perubahan target pertumbuhan ekonomi yang turun dari 6,0 persen menjadi sekitar 4,5 persen, perkiraan harga minyak mentah Indonesia yang turun dari USD 80 dolar per barel menjadi USD 45 dolar per barel, serta perkiraaan nilai tukar rupiah terhadap US dolar yang terdepresiasi dari Rp 9.400 per 1 US dolar menjadi Rp 11.000 per 1 US dolar. Selain itu, perubahan APBN Tahun 2009, juga terkait dengan tambahan berupa stimulus fiskal terhadap perekonomian sebesar Rp73 triliun.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pendapatan negara dan hibah diperkirakan turun dari Rp 985,7 triliun menjadi Rp 853,7 triliun. Penurunan penerimaan tersebut sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga minyak mentah dan pemberian stimulus fiskal khususnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Sementara itu, belanja negara juga diperkirakan turun dari Rp 1.037,1 triliun menjadi Rp 983,2 triliun. Penurunan belanja negara tersebut utamanya didorong oleh penurunan belanja untuk subsidi sebesar Rp43,1 triliun serta belanja ke daerah yang turun sebesar Rp16,9 triliun. Penurunan belanja ke daerah sejalan dengan turunnya penerimaan yang dibagihasilkan pemerintah khususnya penerimaan SDA migas dan pajak penghasilan.

Dengan demikian, defisit anggaran pada tahun 2009 diperkirakan meningkat sebesar Rp 88,2 triliun (naik dari Rp 51,3 triliun menjadi Rp 139,5 triliun) atau 2,5 persen terhadap PDB. Peningkatan defisit anggaran tersebut, diperkirakan dibiayai melalui SILPA sebesar Rp 51,3 triliun dan tambahan pembiayaan utang sebesar Rp 44,5 triliun yang bersumber dari penarikan pinjaman siaga (apabila penarikan pinjaman program tidak dapat dipenuhi), serta tambahan penarikan pinjaman program sebesar Rp 1,1 triliun. Selanjutnya, stok utang pemerintah pada akhir tahun 2009 diperkirakan sebesar 29 persen terhadap PDB.

Sektor Keuangan. Stabilitas ekonomi ditunjukkan pula oleh kondisi indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal. IHSG BEI yang sedikit membaik pada awal tahun 2008 dari 2.627,3 pada bulan Januari 2008 menjadi 2.721,9 (3,6 persen) pada bulan Februari 2008, menurun secara bertahap menjadi 2.165,9 (minus 20,4 persen) pada bulan Agustus, dan menurun secara bergejolak menjadi 1.355,4 (minus 37,4 persen) pada bulan Desember 2008. Penurunan IHSG didorong pula oleh keluarnya sebagian investor asing dari bursa. Pada awal Mei 2009 IHSG mengalami peningkatan menjadi 1.772,1. Pada akhir tahun 2009 diharapkan pasar modal berkembangan lebih stabil dan mengalami peningkatan jika upaya-upaya intervensi secara terkoordinasi dari seluruh negara-negara di dunia untuk menanggulangi krisis global tersebut terbukti efektif.

Beberapa negara-negara di dunia termasuk Indonesia melakukan berbagai tindakan untuk menyelamatkan sektor keuangannya seperti meningkatkan nilai penjaminan simpanan atau bahkan menerapkan jaminan menyeluruh *(blanket guarantee)* bagi simpanan di bank, menjamin dan mengambil alih aset-aset bermasalah, menambah modal kepada lembaga-lembaga keuangannya atau bahkan mengambil alih lembaga tersebut. Sementara itu, di tengah krisis global tersebut, posisi sektor keuangan di Indonesia relatif lebih baik karena tidak banyak lembaga keuangan dan perbankan domestik yang mempunyai kontak langsung *(direct exposure)* dengan *subprime mortgage*.

Meskipun pasar modal Indonesia mengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup kuat. Rasio kecukupan modal *(capital adequacy ratio – CAR)* bank umum sebesar 16,8 persen pada tahun 2008, masih jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan batas minimal 8,0 persen. Terkait dengan potensi kredit macet, tingkat kredit berkinerja buruk *(non performing loan – NPL)* bank umum kita juga turun menjadi 3,2 persen pada tahun 2008 dari 4,1 persen pada tahun 2007.

Sementara itu, pertumbuhan kredit tahunan sampai dengan Desember 2008 mencapai 30,7 persen dengan nilai Rp1.300,2 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan 2007 yang sebesar 26,4 persen. Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank tumbuh sebesar 16,2 persen (*y-o-y*), lebih lambat dibandingkan akhir tahun 2007 yang tumbuh sebesar 17,7 persen (*y-o-y*). Seiring dengan perkembangan tersebut, rasio pinjaman terhadap simpanan *(loan to deposit ratio – LDR)* naik dari 65,1 persen pada tahun 2007 menjadi

73,2 persen pada akhir 2008. Untuk sektor UMKM, kredit bank umum yang berskala mikro, kecil dan menengah (kredit UMKM) meningkat sebesar 26,1 persen (*y-o-y*) pada akhir 2008 dengan nilai Rp633,9 triliun yang terdistribusi 8,6 persen untuk kredit investasi; 39,0 persen untuk kredit modal kerja, dan 52,4 persen untuk kredit konsumsi.

Di sisi pembiayaan mikro, kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada akhir 2008 tumbuh sebesar 24,0 persen (*y-o-y*). Sementara itu, di sisi penghimpunan dana tumbuh sebesar 14,0 persen. Fungsi intermediasi BPR juga terus meningkat tercermin dari kenaikan LDR hingga mencapai 82,5 persen pada akhir 2008, lebih tinggi dari tahun 2007 yang mencapai 80,0 persen. Namun demikian, terdapat potensi kredit macet yang masih harus diwaspadai yang tercermin dari meningkatnya NPL hingga mencapai 9,9 persen, lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 5,0 persen.

Selain melalui sistem konvensional, sistem perbankan syariah juga terus meningkat. Penghimpunan dana masyarakat pada tahun 2008 tumbuh sebesar 31,6 persen (*y-o-y*), sementara pembiayaan syariah tumbuh sebesar 36,5 persen (*y-o-y*). Meningkatnya pembiayaan syariah ini juga diikuti dengan membaiknya *non performing financing* (NPF) yang mencapai 3,9 persen pada akhir tahun 2008.

Selanjutnya, di sisi lembaga keuangan non bank (LKNB) termasuk pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi kegiatan perekonomian masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hingga tahun 2007, mayoritas penyaluran dana dari LKNB adalah pada deposito perbankan serta pada SUN dan SBI. Di samping itu, instrumen penggerak sektor riil seperti obligasi korporasi dan saham porsinya relatif masih cukup kecil, yaitu sekitar 6,0 persen dari total kapitalisasi pasar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh persepsi pelaku usaha terhadap risiko instrumen keuangan non konservatif masih tinggi. Di sisi lain, industri yang memerlukan investasi jangka panjang masih relatif kecil memanfaatkan pasar modal, seperti sektor infrastruktur, listrik/air/gas dan transportasi, serta industri perdagangan, jasa dan investasi.

Dampak krisis yang terjadi diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2009 tidak terkecuali Indonesia, tercermin antara lain seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, ketahanan sektor perbankan cukup memadai. Rasio CAR bank umum pada tahun 2009 diperkirakan sedikit turun menjadi sekitar 14,0 persen dibandingkan tahun 2008. Penurunan tersebut meskipun masih di atas ketentuan yang berlaku, mencerminkan turunnya kemampuan bank di dalam menghadapi risiko yang akan timbul.

Berbeda dengan melemahnya pertumbuhan kredit perbankan di negara-negara maju, pertumbuhan kredit domestik pada tahun 2009 diperkirakan akan mencapai sekitar 18,0 sampai dengan 20,0 persen per tahun. Namun demikian, patut diwaspadai risiko kredit macet yang diperkirakan akan sedikit meningkat di tahun 2009 seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat. Terkait dengan upaya-upaya memperkuat sektor riil, fungsi intermediasi diharapkan tetap terus berjalan. Penyaluran kredit untuk UMKM dan KUR diharapkan dapat meningkat sesuai dengan *target group* yang tepat.

Infrastruktur Dan Daya Saing Sektor Riil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu didorong peningkatan daya saing sektor riil yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan air baku, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana dasar permukiman layak, ketersediaan energi, serta ketersediaan sarana prasarana lainnya. Pembangunan infrastruktur selama tahun 2008 berjalan cukup baik. Dalam rangka peningkatan ketersediaan air baku, pada tahun 2008 telah dilakukan penyelesaian pembangunan 3 buah waduk dan 111 embung, rehabilitasi 26 buah waduk dan 32 buah embung serta operasi dan

pemeliharaan 119 buah waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya. Untuk mengurangi dampak dan resiko kerusakan yang diakibatkan oleh daya rusak air telah dilakukan upaya pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 58,54 km untuk mengamankan kawasan seluas 9.306 hektar, pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 20,69 km, tanggap darurat bencana di daerah industri dan pusat-pusat perekonomian, pembangunan prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 2 unit, rehabilitasi sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 4 km.

Upaya-upaya untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil pada sub bidang sumber daya air tersebut akan terus dilakukan, pada tahun 2009 diperkirakan akan dapat dicapai, antara lain: (1) untuk menambah jumlah tampungan air, dilakukan upaya penyelesaian pembangunan 6 buah waduk dan 17 buah embung; (2) rehabilitasi 5 buah waduk, 20 embung, situ dan bangunan penpung air lainnya; (3) operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya. Untuk mengurangi dampak akibat daya rusak air, diperkirakan akan dapat dicapai pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 237,37 km, pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 47,25 km, upaya tanggap darurat bencana di daerah industri dan pusat-pusat perekonomian, rehabilitasi sarana prasarana pengaman pantai sepanjang 4,45 km, operasi dan pemeliharaan prasarana pengamanan pantai sepanjang 1,5 km dan pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 12 unit..

Dalam upaya peningkatan pembangunan transportasi, pencapaian pada tahun 2008 antara lain: (1) penanganan jalan lintas utama untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jalan yang meliputi jalan Lintas Selatan dan Pantai Utara Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, serta jalan lintas lainnya dengan panjang keseluruhan mencapai 4.957 km; melanjutkan pembangunan bentang tengah jembatan Suramadu sepanjang 2.329,6 m; pembangunan *flyover* sepanjang 4.618,6 m di Pantura Jawa dan perkotaan Jabodetabek serta pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Kuala Namu Medan; (2) pengembangan BRT (*Bus Rapid Transit*) di kota-kota besar dan pembangunan terminal; (3) peningkatan jalan KA sepanjang 544,3 Km di Sumatera dan Jawa; peningkatan sistem telekomunikasi dan kelistrikan (Sintelis) di Jawa dan Sumatera; pembangunan jalur ganda dan *double-double track*; pengadaan rel dan *wesel* UIC-54 sepanjang 109 Km; serta dimulainya pembangunan MRT Jakarta; (4) pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 14 dermaga baru dan 54 dermaga lanjutan, dermaga sungai 18 dermaga baru dan 6 dermaga lanjutan, dan dermaga danau 5 dermaga; pembangunan sarana SDP seperti kapal perintis 12 unit (lanjutan) dan 16 unit (baru) serta pembangunan *break water* pelabuhan penyeberangan; (5) pembangunan fasilitas pelabuhan di Dumai-Riau, Sorong, Manokwari, Agats, Raja Ampat, Tg. Buton-Riau, Garongkong, Machini Baji, Pamatata, Bantaeng dan Palopo; pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran tahap 4 yang tersebar di seluruh Indonesia; pengadaan kapal navigasi 10 unit; Pembangunan *vessel traffic information system (VTIS)* di Teluk Bintuni Papua Barat; pembangunan 1 unit kapal penumpang GT 2000; serta pelaksanaan *Pilot Project National Single Window* di Pelabuhan Tg. Priok dan Tg Perak; serta (6) melanjutkan pembangunan bandara Kualanamu (Medan) dan Hasanuddin (Makassar); pengembangan bandara di wilayah Indonesia bagian timur; serta pembangunan/peningkatan bandara di ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran yang tersebar di seluruh provinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran.

Sedangkan pada tahun 2009 perkiraan pencapaian pembangunan transportasi antara lain: (1) peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa sepanjang 640 km; peningkatan jalan dan jembatan pada lintas utama yaitu lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, dan lintas lainnya serta non lintas sepanjang 1.725,8 km dan jembatan sepanjang

6.243,9 m; penyelesaian dan pengoperasian jembatan Suramadu; pembangunan jalan baru dan strategis sepanjang 101 km; pembangunan *flyover* sepanjang 4.745,7 km; pembangunan jalan lintas selatan jawa sepanjang 73 km jalan dan 765 m jembatan; pembangunan jalan akses Kuala Namu sepanjang 6 km; jalan akses tol Tanjung Priok sepanjang 1,9 km; peningkatan kapasitas jalan nasional berupa penambahan lajur jalan menjadi 84.985 lajur km pada akhir 2009 dari 74.930 lajur km pada tahun 2005. (2) pengembangan angkutan massal di perkotaan/metropolitan yang didukung oleh *feeder service* yang terpadu dengan pelayanan angkutan pada wilayah pengembangan kawasan; serta meningkatkan pengawasan pelanggaran muatan lebih melalui pengoperasian jembatan timbang yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran muatan lebih di jalan; (3) melanjutkan pembangunan jalur ganda dan *double-double track* di Jawa; melanjutkan pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta; (4) pengembangan jaringan pelayanan ASDP di Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. (5) dimulainya pelaksanaan konstruksi pembangunan pelabuhan Tanjung Priok; persiapan pembangunan pelabuhan Belawan; Persiapan pembangunan *Indonesia Ship Reporting System (INDOSREP)* di Selat Sunda dan Selat Lombok dan *Vessel Traffic Services (VTS)* di wilayah Selat Malaka; Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran Tahap IV yang tersebar di seluruh Indonesia; Peningkatan sistem pengamanan pelabuhan *(Port Security System Improvement)* di 9 Pelabuhan (Belawan, Dumai, Tg. Pinang, Tlk Bayur, Palembang, Pontianak, Benoa, Bitung, dan Makassar); pengembangan pelabuhan Bitung, Manado, Manokwari, Raja Ampat di Papua untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia; serta (6) pembangunan bandara Kualanamu-Medan dan bandara-bandara di ibukota provinsi dan kabupaten/kota.

Pencapaian penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman layak pada tahun 2008, antara lain terbangunnya drainase perkotaan seluas 71 Ha. Upaya tersebut dilanjutkan pada tahun 2009 dengan penanganan daerah genangan seluas 2,169 Ha.

Secara umum pencapaian tahun 2008 untuk fokus prioritas dukungan infrastruktur bagi daya saing sektor riil sebagai upaya peningkatan kemampuan pasokan energi dilakukan melalui pembangunan infratruktur energi sebagai fasilitas transmisi dan distribusi gas. Hal ini dilakukan melaui pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat (Grissik – Pagardewa – Labuhan Maringgai – Muara Bekasi – Rawamaju) tahap I dan tahap II. Adapun perkiraan capaian tahun 2009 adalah dengan terlaksananya pembangunan transmisi dan distribusi gas.

Untuk fokus prioritas pembangunan infrastruktur perdesaan dan diversifikasi sumber daya energi, diupayakan pengembangan potensi energi lokal dengan memanfaatkan EBT terutama di daerah perdesaan termasuk kegiatan diseminasi dan *capacity building* guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME). Sejalan dengan itu fokus prioritas efisiensi penyediaan, pemanfaatan dan konservasi energi dilakukan dengan penyusunan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi yang terkait dengan pemanfaatan energi, konservasi energi dan usaha energi baru terbarukan.

Sementara itu, pencapaian utama ketenagalistrikan pada tahun 2008 adalah (1) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 65,1%; (2) Bauran energi (*energy mix*) untuk pembangkit listrik sampai dengan tahun 2008 terdiri dari Batubara sebesar 39%, Gas Bumi sebesar 20%, BBM sebesar 30%, Panas Bumi sebesar 3%, dan Tenaga Air sebesar 8 %; dan (3) kondisi sistem masih banyak yang *isolated,* sedangkan yang sudah terintegrasi adalah sistem Jawa –Madura-Bali (JAMALI) dan sistem Sumatera. Tingkat susut jaringan penyaluran masih di atas 11%. Pencapaian tersebut diantaranya merupakan hasil dari (1) pembangunan induk pembangkit dan jaringan berupa pembangunan jaringan transmisi baik 150kV, 175kV, maupun

275 kV; dan (2) pembangunan pembangkit listrik baik oleh PT. PLN maupun IPP sehingga kapasitas pembangkit meningkat menjadi 30.345 MW dimana sebesar 82% atau sebesar 24.925 MW berasal dari pembangkit PLN.

Sementara itu, perkiraan pencapaian ketenagalistrikan sampai akhir tahun 2009 adalah meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 66,3% melalui pembangunan jaringan transmisi 500kV, 275 kV, 175kV, dan 150kV beserta Gardu Induk serta jaringan distribusi. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut juga didukung oleh bertambahnya kapasitas pembangkit seiring dengan selesainya pembangunan pembangkit listrik dari program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW diantaranya yaitu PLTU Labuhan Banten, PLTU Rembang, dan PLTU Indramayu, serta beberapa pembangkit listrik IPP lainnya.

Adapun pencapaian pembangunan pos dan telematika pada tahun 2008 antara lain: (1) penurunan tarif seluler menjadi salah satu yang termurah di Asia; (2) penambahan penyelenggara telekomunikasi Sambungan Langsung Jarak Jauh; (3) penyelesaian konsultasi publik dan penyusunan dokumen lelang penyelenggaraan *broadband wireless access* (BWA); (4) pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan (5) pelaksanaan tahap awal proyek percontohan *e-government* di Batam dan *e-local government* di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Magelang, dan Kabupaten Solok. Melalui perkuatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi, perkiraan teledensitas akses aktif (setelah dikurangi *churn rate* 30%) adalah 9,18% untuk sambungan tetap (PSTN dan *fixed wireless access*) dan 43,2% untuk sambungan bergerak.

Sementara itu, perkiraan pencapaian utama di tahun 2009 antara lain (1) dimulainya pembangunan jaringan telekomunikasi nasional Palapa Ring; (2) penambahan penyelenggara telekomunikasi sambungan lokal; (3) pembukaan peluang usaha dalam penyelenggaraan BWA; (4) penyediaan *community access point* sebagai pusat akses informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di 222 kecamatan; (5) penurunan tarif internet; (6) penyelesaian pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK untuk mendukung peningkatan e-literasi aparatur pemerintah; (7) pengesahan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan *e-Government* di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah: (8) penyusunan konsep awal RUU *Cyber Crime*: dan (9) penyelesaian proyek percontohan *e-government* dan *e-local government*. Melalui perkuatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi, perkiraan teledensitas akses aktif (setelah dikurangi *churn rate* 30%) adalah 14,7% untuk sambungan tetap (PSTN dan *fixed wireless access*) dan 65,9% untuk sambungan bergerak.

Kerjasama Pemerintah Dan Swasta (KPS). Dalam periode 2005-2009 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan menarik minat swasta untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur. Setelah meluncurkan reformasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang dituangkanpada paket kebijakan pemerintah tentang infrastruktur di Bulan Februari 2006, Pemerintah menindaklanjuti dengan Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Inpres 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, termasuk kebijakan bidang infrastruktur. Terkait dengan kebijakan infrastruktur dalam Inpres 5/2008 disebutkan kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui KPS, kebijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui percepatan penyediaan tanah dan pembiayaan serta penegasan kebijakan pemerintah dalam kewajiban layanan publik. Beberapa agenda kegiatan prioritas yang harus diselesaikan pada

tahun 2009 untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui KPS adalah penyusunan tata cara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur, percepatan pembangunan model proyek KPS, peningkatan kualitas proyek KPS melalu fasilitasi pengembangan proyek dan penyusunan daftar proyek KPS.

Sementara itu peraturan yang menjadi tonggak baru pelaksanaan KPS yaitu Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur saat ini telah selesai proses revisinya dan akan segera disahkan. Revisi perpres ini juga akan memuat pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Selain revisi Perpres 67/2005, di lingkup sektor, beberapa keluaran yang terkait dengan pengembangan KPS telah berhasil diselesaikan. Setelah pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pemerintah juga telah mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Pencapaian pembangunan pembangunan transportasi tahun 2008, terkait dengan fokus peningkatan investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta antara lain pemberian dukungan pembiayaan dan penyiapan tanah untuk pembangunan jalan tol, terutama pada jalan tol Trans Jawa dan jalan tol strategis yang merupakan bentuk pola kerjasama pemerintah dan swasta. Jumlah jalan tol yang sedang dalam proses pembebasan tanah sebanyak 13 ruas jalan tol dengan panjang 568,51 km. Disamping itu, upaya reformasi perundang-undangan transportasi dan sosialisasi maupun *law enforcement*-nya serta mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing stakeholder baik regulator, *owner* dan operator diatur dengan jelas telah diterbitkan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai pengganti UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran dan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai pengganti UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan.

Sedangkan pada tahun 2009, perkiraan pencapaiannya antara lain: dukungan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo – Kertosono; Menyelesaikan revisi UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Penyelesaian revisi turunan peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut terbitnya Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; Penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Terkait dengan fokus prioritas peningkatan investasi infrastruktur melalui KPS, telah dilakukan upaya pembangunan energi khususnya di ruas transmisi Kalimantan – Jawa (Bontang-Semarang) dan persiapan pengembangan jaringan gas kota untuk beberapa kota di Sumatra dan Jawa. Sedangkan pada tahun 2009 perkiraan pencapaiannya antara lain: melanjutkan pembangunan transmisi ruas Kalimantan-Jawa Tengah dan trans Jawa, serta beberapa wilayah distribusi yang dekat dengan ruas transmisi eksisting (diantaranya Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya). Untuk pengembangan jaringan gas kota akan dibangun di dua kota yaitu Surabaya dan Palembang. Namun hal ini masih memerlukan kejelasan pengelolaan termasuk aspek legalitasnya pasca kontruksi jaringan gas.

Pada pembangunan ketenagalistrikan, pencapaian tahun 2008 adalah telah diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN. Permen tersebut merupakan bagian dari Permen ESDM nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Kedua peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemafaatan energi baru

terbarukan, terutama panas bumi. Sedangkan pada tahun 2009 adalah tersusunnya perumusan tentang peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan serta fasilitasi.

Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Terkait dengan upaya peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimum, berbagai upaya telah dilakukan dalam penyediaan air baku, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana perumahan dan permukiman layak, ketersediaan energi, serta ketersediaan sarana prasarana lainnya. Dari sisi pembangunan dan pengelolaan sumber daya air pada tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan saluran air baku dengan kapasitas terpasang 1,00 m^3/detik, rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 62 lokasi, pemeliharaan prasarana pengaman pantai sepanjang 20 km, pembangunan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan seluas 688 hektar. Sedangkan pada tahun 2009, diperkirakan akan dapat dicapai pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan debit layanan 4,14 m3/det, pembangunan tampungan untuk air baku sebanyak 35 buah, rehabilitasi tampungan untuk air baku sebanyak 20 buah, rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku sebanyak 4 buah, pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku di 5 titik, pemeliharaan tampungan untuk air baku di 34 lokasi, pembangunan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan di 12 lokasi, rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 49 lokasi, dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir di alur sungai sepanjang 240 km.

Dari sisi transportasi, dalam tahun 2008 telah dilakukan antara lain: (1) pemeliharaan jalan sepanjang 32.711 km dan jembatan sepanjang 36.127 m, serta pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 258,8 km, jalan akses di pulau-pulau kecil sepanjang 69,7 km; (2) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ yang tersebar di seluruh provinsi; pembangunan fasilitas jembatan timbang 6 paket; pengadaan bus perintis 31 unit; pembangunan bus ukuran sedang non AC 111 unit, bus sedang AC 47 unit, dan bus besar 40 unit untuk angkutan perintis, kota, pelajar, dan mahasiswa; serta subsidi bus dan trayek perintis di 20 propinsi; (3) rehabilitasi jalan KA, Sintelis, dan penanganan longsoran akibat bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera Barat, Tarahan-Tanjung Enim dan Jawa Barat; perkuatan tebing di lintas Cirebon-Kroya 9 Paket; serta pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi (K3); (4) rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan dan dermaga sungai di 30 lokasi; pengadaan dan pemasangan peralatan keselamatan pelayaran (SBNP); pengerukan alur dan kolam pelabuhan penyeberangan 2.225.000 m3; serta subsidi perintis angkutan penyeberangan antara lain: lintasan dalam provinsi 68 lintasan, antar-provinsi 8 lintasan untuk 36 buah kapal; (5) pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 293 unit; pembangunan 13 unit kapal perintis; pembangunan peralatan SAR laut 23 Set; pembangunan 16 unit kapal patroli; pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan sebanyak 2.600.000 m^3 di 17 Pelabuhan UPT; rehabilitasi fasililitas pelabuhan di seluruh 150 UPT pelabuhan; subsidi operasi pelayaran perintis di 54 trayek; serta (6) rehabilitasi fasilitas landasan, fasilitas bangunan, dan fasilitas terminal yang tersebar provinsi dan kabupaten/kota; rehabilitasi Peralatan Keselamatan Penerbangan dan Penunjang Operasional untuk 8 paket tersebar di beberapa provinsi; pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan sebanyak 9.224 paket/unit yang tersebar di seluruh provinsi; pembangunan/peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan bencana di 13 lokasi; serta subsidi angkutan udara perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis untuk 92 rute dan 2,442 drum tersebar di 15 provinsi.

Sementara perkiraan pencapaian pembangunan transportasi pada tahun 2009 antara lain: (1) terpeliharanya jalan nasional sepanjang 31.169,0 Km dan jembatan sepanjang 63.781,4 m; rehabilitasi jalan nasional 1.189,6 Km dan jembatan 7.493,6 m; pembangunan jalan kawasan perbatasan sepanjang 101,8 Km; pembangunan jalan di pulau terluar/terdepan sepanjang 85,2

km; (2) peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi jalan; peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal; meningkatkan aksesibilitas angkutan darat antara pusat kota dan *oultet* (bandara), pusat produksi dan outlet (pelabuhan laut); (3) rehabilitasi kereta api penumpang kelas ekonomi; rehabilitasi prasarana KA; (4) peningkatan keselamatan melalui rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) serta penyediaan sarana bantu navigasi; peningkatan aksesibilitas pelayanan melalui pembangunan prasarana ASDP, terutama di daerah kepulauan dan daerah lain yang mempunyai potensi untuk pengembangan ASDP, serta pembangunan prasarana angkutan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan; peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan angkutan sesuai dengan standar pelayanan minimal; perbaikan tatanan pelayanan angkutan antar-moda; (5) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran maupun kolam pelabuhan, penyelesaian pembangunan 8 unit kapal perintis; subsidi operasi pelayaran perintis di 54 trayek; pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP); serta (6) peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan melalui penyediaan peralatan keselamatan dan keamanan penerbangan seperti peralatan radar dan navigasi, x-ray, PK-PPK, ILS, dan AFL; rehabilitasi fasilitas landasan, fasilitas bangunan dan fasilitas terminal serta penyelenggaraan penerbangan perintis di wilayah terpencil/pedalaman.

Selanjutnya untuk pembangunan perumahan pada tahun 2008 telah dilakukan antara lain: (1) penyediaan subsidi untuk kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPR-RSH) sebanyak 97.238 unit dan KPRS/KPRS Mikro sebanyak 42.263 unit; (2) pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 9.443 unit rumah; (3) dukungan kawasan perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja sebanyak 101.059 unit rumah; (4) penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan terpencil/pulau kecil/terluar di 44 kawasan; (5) rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan dampak bencana alam di Aceh yaitu pembangunan 8.742 unit rumah untuk 43.710 jiwa penduduk; dan (6) penataan bangunan dan lingkungan (PBL) di 144 kelurahan. Sementara pencapaian pembangunan dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman layak, pada tahun 2008 meliputi : (1) penyediaan air minum dengan kapasitas 8,130 L/detik yang melayani 2,2 juta jiwa penduduk dan (2) pembangunan prasarana dan sarana air limbah di 92 kab/kota; dan (3) pembangunan persampahan di 94 kab/kota.

Dalam tahun 2009, pencapaian pembangunan perumahan diperkirakan antara lain meliputi: (1) penyediaan subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPR-RSH) sebanyak 136.400 unit dan KPRS/KPRS Mikro sebanyak 33.600 unit; (2) pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 1.728 unit rumah; (3) dukungan kawasan perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja sebanyak 65.000 unit rumah; (4) penyediaan infrastruktur permukiman di 1 kawasan terpencil/pulau kecil/terluar dan 1 kawasan perbatasan; dan (5) penataan bangunan dan lingkungan (PBL) di 180 kelurahan. Sedangkan perkiraan pencapaian penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman layak pada tahun 2009 antara lain : (1) penyediaan air minum dengan kapasitas 5,154 L/detik untuk melayani 4,57 juta jiwa penduduk dan (2) pembangunan prasarana dan sarana air limbah di 109 kab/kota; serta (3) pembangunan persampahan untuk melayani 147 kab/kota.

Pada tahun 2008, pencapaian pembangunan dan diversifikasi energi terkait dengan peningkatan pelayan infrastruktur sesuai dengan SPM meliputi upaya pengembangan DME melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT). Lebih lanjut fokus prioritas efisiensi penyediaan, pemanfaatan dan konservasi energi dilakukan melalui upaya pemanfaatan energi alternatif non-BBM, pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, dan pembangunan jaringan distribusi gas kota. Pada tahun 2009 diperkirakan dapat mencapai pengembangan potensi energi lokal dengan memanfaatkan EBT terutama di daerah perdesaan termasuk

kegiatan diseminasi dan *capacity building* guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME). Sejalan dengan itu fokus prioritas efisiensi penyediaan, pemanfaatan dan konservasi energi dilakukan dengan penyusunan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi yang terkait dengan pemanfaatan energi, konservasi energi dan usaha energi baru terbarukan.

Pencapaian utama pembangunan ketenagalistrikan di tahun 2008 diantaranya: meningkatnya rasio desa berlistrik 92%. Pencapaian tersebut diantaranya merupakan hasil dari (1) pembangunan listrik perdesaan yang berupa penambahan pembangunan PLTS 50 WP sebanyak 19.555 Unit, PLTMH sebesar 1.845 KW sebanyak 8 Unit, PLTBayu sebanyak 2 Unit, PLTS Terpusat 15 kW sebanyak 10 unit, JTM sepanjang 1.306 kms, JTR sepanjang 1.323 kms, dan Gardu Induk sebanyak 732,0 unit sebesar 4489 kVA. Sedangkan perkiraan pencapaian pada tahun 2009 adalah peningkatan rasio desa berlistrik menjadi sekitar 93% yang direncanakan merupakan hasil dari penambahan pembangunan PLTMH sebesar 551 kW, PLT Bayu sebanyak 3 unit, PLTS sebanyak 77.433 unit, Gardu Distribusi sebesar sekitar 46.000 kVA, JTM sepanjang 3.146 kms, dan JTR 2.891 kms.

Adapun pencapaian utama pembangunan pos dan telematika di tahun 2008 adalah: (1) penyediaan layanan pos di 2.350 kantor pos cabang luar kota (KPCLK) sebagai pelaksanaan program *Public Service Obligation* (PSO); dan (2) penyelesaian proses pelelangan penyediaan jasa akses telekomunikasi di 24.828 desa sebagai pelaksanaan program *Universal Service Obligation* (USO). Sedangkan pada tahun 2009 antara lain: (1) pelaksanaan program PSO pos di 2.350 KPCLK; (2) implementasi program USO telekomunikasi di 24.828 desa; dan (3) pembangunan pemancar TVRI di wilayah *blank spot* dan perbatasan di 25 lokasi.

Iptek. Di samping ketersediaan infrastruktur, pembangunan iptek sangat perperan untuk meningkatkan daya saing. Terutama daya saing sektor riil. Pembangunan iptek selama ini dilaksanakan secara konsisten dan walau belum sesuai harapan telah berhasil memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional. Kerangka regulasi di bidang iptek telah berhasil menetapkan UU nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek) mengatur antara lain Sistem Inovasi Nasional (SIN). Di samping itu telah juga ditetapkan peraturan turunan dari Undang Undang ini. Sarana dan prasarana riset juga terus dilengkapi dan dimutakhirkan. Namun demikian, berdasarkan *The Global Competiveness Report* 2008-2009 yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2008, untuk *Global Competiveness Index (GCI)* Indonesia masih menempati peringkat 55 dari 134 negara dan masih berada di bawah Thailand dan Malaysia.

Ketahanan Energi. Selain infrastruktur dan Iptek, kemajuan perekonomian perlu didukung oleh ketahanan energi**.** Ketahanan energi dapat ditinjau dari tiga komponen utamanya yaitu ketergantungan terhadap energi impor, ketergantungan terhadap energi minyak, dan efisiensi pemanfaatan energi. Ketahanan energi yang tinggi ditunjukkan dengan rendahnya ketergantungan terhadap energi impor dan minyak serta pemanfaatan energi yang efisien. Dampak fluktuasi harga minyak dunia selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa aspek keamanan energi (energy security) memerlukan perhatian serius melalui upaya diversifikasi, efisiensi, dan konservasi energi.

Peranan minyak bumi dalam penyediaan energi nasional masih sangat besar. Sampai akhir tahun 2007, sekitar 39,86% konsumsi energi nasional berasal dari minyak bumi (termasuk impor), sedangkan energi dari batubara sebesar 13,31%; gas bumi 8,75%; air 2,02%; panas bumi 0,93%; dan biomasa 22,96%. Ketergantungan energi yang sangat besar pada minyak bumi akan cepat menguras cadangan yang ada sehingga jumlah cadangan terus mengalami

penurunan. Khusus untuk pembangkitan tenaga listrik, pada tahun 2008, sebesar 39% menggunakan batubara; 30% BBM; 20% gas bumi; 8% tenaga air; dan hanya 3% untuk panas bumi.

Di lain pihak, produksi gas bumi cenderung terus meningkat, mencapai 7,46 milyar kaki kubik per hari pada tahun 2008 dan ditargetkan meningkat menjadi 7,53 milyar kaki kubik per hari pada tahun 2009. Meskipun demikian, kemampuan produksi gas bumi ini belum dapat memenuhi kebutuhan gas bumi yang terus meningkat. Upaya pengembangan lapangan gas baru cenderung menemukan cadangan gas yang mengecil pada mayoritas temuan lapangan gas. Sementara itu, upaya pengembangan infrastruktur gas bumi masih sangat terbatas.

Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan, maka berbagai upaya pembangunan harus disertai dengan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi sumber daya alam yang merupakan sumber daya utama dalam menunjang sektor perekonomian dari sisi pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja maupun upaya pemerataan pembangunan, masih terus menurun disebabkan arah pembangunan yang hanya berorientasi pada pemanfaatan dan kurang memperhatikan upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan baik dari sisi kualitas pengelolaan, kapasitas kelembagaan, penanganan dampak-dampak pembangunan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, termasuk pula tumpang tindihnya penataan ruang. Buruknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut mengakibatkan munculnya berbagai bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dll. Selanjutnya perubahan iklim global seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim, serta kenaikan muka air laut juga semakin mengancam daya dukung lingkungan yang berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi dan pada akhinya akan memperburuk kinerja sektor sumber daya alam jika tidak segera diantisipasi.

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam. Terkait peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya, penanganan dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan dilakukan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), program pengembangan skema REDD (*Reducing Emision from Deforestation and Degradation*), serta percepatan rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut. Sektor pertanian juga berperan aktif dengan pengurangan penggunaan pupuk anorganik, pengembangan SRI (*Sistem Rice Intensification*), peningkatan pengetahuan dan kapasitas pemangku kepentingan di sektor pertanian, serta penerapan dan pengembangan usaha mitigasi dan adaptasi pertanian meliputi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan perkuatan ketahanan pangan. Penanggulangan perubahan iklim di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, kehidupan laut dan perikanan dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan strategi respon perubahan iklim, pengurangan resiko kerusakan dan kefatalan dampak dari perubahan iklim, serta pegkajian potensi kapasitas ekosistem kelautan, pesisir dan pulau kecil dalam menyerap CO2 dan penyediaan bahan baku untuk kehidupan.

Selanjutnya dalam mendukung peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya, telah dilaksanakan Program Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) yang terpasang dan beroperasi di 160 lokasi, yang menghasilkan pemberian informasi dini gempa bumi dan peringatan dini tsunami meningkat dari rata-rata 10 menit menjadi rata-rata kurang dari 5 menit setelah kejadian gempa bumi. Selain pemasangan TEWS, telah dilakukan Pembangunan Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) berupa pemasangan komponen fasilitas dan peralatan MEWS di 4 lokasi, meliputi radar cuaca, *Ground*

Satellite Receiver, *Automatic Weather Station* (AWS), *Automatic Digital Raingauge* (ARG), displai MEWS, Sistem Komunikasi dan Integrasi, serta *Tropical Cyclone Warning Center* (TCWC). Selain itu dari sisi meteorologi dan geofisika, diupayakan peningkatan frekuensi waktu penyampaian informasi cuaca umum dalam kondisi khusus dari 2 kali per hari menjadi 4 kali per hari; terlaksananya layanan cuaca penerbangan pada bandar udara, serta layanan cuaca maritim pada pelayaran yang disiarkan melalui radio pantai; terlaksananya pemasangan peralatan kualitas udara untuk pengamatan CO debu pada 1 lokasi di Jakarta, terlaksananya penyusunan peta iklim dan peta agro klimat untuk pulau Jawa, serta peta iso dan peta curah hujan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2009 diharapkan terus ditingkatkan upaya pengarusutamaan perubahan iklim ke seluruh sektor pembangunan, serta peningkatan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi di daerah-daerah yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Di sektor kelautan, kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir diperkirakan dapat terlaksana di 7 wilayah pesisir (Pantai Barat Sumatera, Pantai Utara Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB dan NTT). Selain itu, dalam menjawab tantangan perubahan iklim pada tahun 2009 diharapkan pula terjadi peningkatan pengiriman informasi cuaca, updating periode panjang musim sampai tingkat kabupaten minimal 1 kali sebulan, peningkatan informasi kondisi kualitas udara 3 bulanan, dan diseminasi potensi tsunami setelah gempa kurang dari 4 menit. Selain itu, pembangunan bidang Meteorologi dan Geofisika juga dititikberatkan pada pemeliharaan sistem TEWS, peningkatan kualitas observasi dan penelitian, serta peningkatan data dan informasi Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika.

Selain itu, dalam rangka menyikapi kondisi wilayah Indonesia yang sangat rawan terhadap kejadian bencana, Pemerintah telah merubah paradigma penanganan bencana dari upaya reaktif menjadi pro-aktif melalui pengurangan risiko bencana. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain dengan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2006-2009. Selanjutnya pemerintah telah mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 lalu, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, dimana kebijakan pengurangan risiko bencana telah dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional. Kemudian lebih jauh lagi pada RKP 2009, pengurangan risiko bencana telah dimuat secara terintegrasi dengan fokus adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global (*climate change*).

Selanjutnya, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, serta tiga Peraturan Pemerintah turunannya, yaitu: (1) PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; serta (3) PP Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Untuk mengatur kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara itu, terkait dengan penyiapan data dan informasi untuk mitigasi bencana alam, pada tahun 2008 telah dicapai (1) terbangunnya sistem peringatan dini agar masyarakat yang beresiko bencana dapat mengambil tindakan secepatnya untuk mengurangi resiko; dan (2) terwujudnya sistem mitigasi bencana.

Masih dalam kaitannya dengan mitigasi bencana, pada sektor Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilakukan penanganan bencana geologi pada tahun 2008 antara lain: (1) telah dilaksanakannya pengamatan aktivitas 129 gunung api aktif melalui 76 pos pengamatan; (2) dilakukannya pemetaan geologi gunung api; (3) dilakukannya pemetaan kawasan rawan bencana gunung api; (4) disusunnya katalog gempa bumi di Indonesia; (5) dibuatnya peta wilayah rawan gempa bumi dan tsunami nasional skala 1:5.000.000.

Untuk tahun 2009 dan sampai dengan tahun 2010, diharapkan dapat dilakukan penyelidikan kondisi geologi lingkungan regional, perkotaan, kawasan karst, kawasan pesisir dan kawasan pertambangan. Selain itu penyelidikan geologi teknik skala 1:100.000, dan geologi teknik - geodinamika, tanah lunak, pengembangan wilayah/ infrastruktur. Beberapa hal lainnya yang akan dilakukan ke depan terkait dengan mitigasi kebencanaan geologi adalah: (1) pemetaan kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, dan zona kerentanan gerakan tanah; (2) tanggap darurat gunung api, gerakan tanah dan gempa bumi; (3) rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah yang dilanda bencana gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah; (4) peringatan dini bahaya dan pemantauan kegiatan letusan gunung api dan gerakan tanah; (5) penelitian sesar aktif; (6) penyelidikan kestabilan lereng, (7) instalasi peralatan pemantauan/kegiatan gunung api, dan (8) penerbitan peta gempa bumi/tsunami.

Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan. Upaya rehabilitasi dan konservasi di sektor kehutanan dilakukan dengan mempertahankan kondisi hutan dari degradasi dan deforestasi. Hasil yang dicapai dari beberapa program konservasi hutan antara lain adalah pembentukan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORCH) untuk menurunkan tindak pidana *illegal logging*, menurunnya kebakaran hutan, serta penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar.

Selain itu, telah dilakukan penetapan dan pemantapan 21 Taman Nasional Model dengan kegiatan pengukuhan, rencana pengelolaan dan zonasi. Selanjutnya, dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, telah dilakukan revitalisasi peralatan pemadaman kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pengembangan model Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Dalam rangka rehabilitasi dan pemulihan sumber daya hutan lahan, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Sampai dengan tahun 2007 realisasi GERHAN mencapai sekitar 2 juta hektar dari target 3 juta hektar. Selain itu juga dilakukan kegiatan aksi penanaman serentak dan pemeliharaan pohon dalam rangka kepedulian terhadap perubahan iklim.

Pada Tahun 2008, upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam juga dilakukan di sektor Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan hasil antara lain: pelaksanaan reklamasi lahan pada lebih dari 30.000 ha yaitu di lokasi-lokasi lahan Kontrak Karya sekitar 8000 ha, lahan PKP2B sekitar 14.000 ha dan lahan Kuasa Pertambangan sekitar 7000 ha, telah dikeluarkan Kuasa Penambangan (KP) untuk penyelidikan umum sebanyak 483, eksplorasi sebanyak 1209, dan eksploitasi sebanyak 623. Untuk status Kontrak Karya mulai dari generasi I sampai dengan generasi VII mencapai 235 dengan rincian 194 telah terminasi dan sisanya aktif. Dari Kontrak Karya yang aktif tersebut terdiri dari untuk penyelidikan umum sebanyak 4, eksplorasi sebanyak 10, *feasibility study* sebanyak 11, konstruksi sebanyak 5, dan produksi sebanyak 12. Sedangkan untuk status PKP2B mulai dari generasi I sampai dengan generasi III mencapai 141, dengan 76 masih aktif dan sisanya telah mengalami terminasi. Dari PKP2B yang aktif tersebut, terdiri dari eksplorasi sebanyak 5, *feasibility study* sebanyak 16, konstruksi sebanyak 15, dan produksi sebanyak 40.

Untuk tahun 2009 upaya rehabilitasi dan konservasi pada sektor Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral perkiraan pencapaiannya adalah sebagai berikut: (1) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (sebanyak 5 RPP dan 28 pedoman); (2) tersedianya kebijakan untuk mendukung pengolahan dan pemurnian produk tambang untuk meningkatkan *added value*; (3) terlaksananya penerapan *good mining practice* pada 38 PKP2B, 14 KK dan 7 WKP; (4) berkurangnya jumlah tingkat kecelakaan tambang, dampak lingkungan atas kegiatan tambang, dan; (4) tercapainya konservasi sumber daya mineral dan batubara, lindungan lingkungan standardisasi dan optimalisasi usaha jasa pertambangan.

Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan juga dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi memberikan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2008 antara lain adalah : Program Menuju Indonesia Hijau (MIH), Program pengembangan *Debt for Nature Swaps* (DNS) bidang lingkungan hidup, Program kemitraan dan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan, Pengembangan perangkat ekonomi dan pendanaan lingkungan alternatif dengan penerapan mekanisme pembangunan bersih melalui CDM (dimana telah berhasil disetujuinya 70 usulan proyek CDM oleh Komnas MPB hingga tahun 2008. Dari 70 usulan proyek tersebut, 21 di antaranya telah diakui oleh PBB dengan terdaftar di *CDM Executive Board),* Program pengendalian dan pengelolaan pencemaran limbah padat dan 8,21 juta ton limbah B3, peningkatan kualitas metodologi AMDAL dan tim penilai AMDAL, penyelesaian penyidikan 28 kasus tindak pidana lanjutan, Kegiatan ADIPURA untuk 375 kota, PROPER pada 667 perusahaan, PROKASIH, Program Langit Biru, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengarusutamakan pengendalian dampak perubahan iklim dan penghapusan pemakaian bahan perusak ozon. Sebagai bentuk pelaksanaan program pengendalian kerusakan lingkungan, dilakukan upaya pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut, pemulihan ekosistem pesisir dan laut secara terpadu, dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Sedangkan program konservasi sumber daya alam dilakukan dengan pendekatan konservasi dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati pada daerah lahan kritis dan daerah penyangga kawasan konservasi, dan kegiatan penataan ruang dan lingkungan.

Pada tahun 2009, upaya pengelolaan lingkungan dititikberatkan pada upaya penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas kapasitas pengelolaan lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas air dan udara, dengan upaya peningkatan pemenuhan baku mutu, peningkatan kota peraih ADIPURA sebanyak 96 kota dari 381 peserta, peningkatan peserta PROPER menjadi 682 industri, peningkatan proyek CDM, pengelolaan 10 juta ton B3 serta peningkatan kapasitas pengelolaan dan lembaga pengelola lingkungan hidup.

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Salah satu sumber daya alam yang penting tetapi kurang mendapatkan perhatian yang memadai adalah sumber daya air. Selama ini pengelolaan sumber daya air dilakukan secara parsial dan cenderung digunakan secara berlebihan seolah tidak mempunyai keterbatasan daya dukung serta kurang dilakukan upaya pemeliharaan terhadap ekosistem pendukungnya. Mengingat akan hal tersebut, peningkatan pengelolaan sumber daya air terpadu menjadi fokus yang sangat penting untuk diprioritaskan.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam pengelolaan sumber daya air pada tahun 2008 antara lain berupa kegiatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di 15 provinsi dan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif di 14 provinsi serta 108 kabupaten/kota. Selain itu, upaya konservasi sumber-sumber air telah mulai dilakukan dengan kegiatan konservasi kawasan lindung dan kawasan pendukungnya serta rehabilitasi sumber-sumber air melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan di berbagai wilayah di Indonesia dengan memprioritaskan pada ekosistem DAS prioritas.

Pada tahun 2009 diharapkan akan dapat dilaksanakan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai pada 15 unit pelaksana teknis (UPT) Provinsi dan 54 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu kegiatan konservasi dan rehabilitasi kawasan sumber-sumber air terus dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, para pengusaha khususnya yang terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber air, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya kelautan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km^2, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km^2. Dengan potensi fisik tersebut, Indonesia dikaruniai dengan sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati kelautan terbesar. Untuk itu, pengelolaan sumber daya kelautan telah difokuskan pada pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, pengembangan jasa kelautan, serta rehabilitasi dan konservasi.

Pada tahun 2008, dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan (*illegal fishing*) telah dilakukan pengawasan dan penegakan hukum melalui pengadaan kapal hingga menjadi 20 unit, kerja sama patroli, peningkatan jumlah awak kapal pengawas hingga 233 orang, peningkatan hari operasi menjadi 180 hari, dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah mencapai 1.369 kelompok. Dengan tambahan sarana dan prasarana tersebut, jumlah kapal yang di*ad-hoc* meningkat, sementara jumlah tindak pidana menurun menjadi 62 kasus. Selanjutnya, dalam pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, telah dicapai verifikasi 13.374 pulau, pengadaan sarana dan prasarana komunikasi, energi, air bersih, kesehatan dan transportasi. Selain itu juga telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan Perda tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 25 kab/kota. Untuk mendukung ekonomi kelautan telah dicapai pengembangan 15 lokasi wisata bahari dan 3 lokasi barang muatan kapal tenggelam (BMKT). Sementara itu, dalam rangka rehabilitasi dan konservasi telah dibentuk 28 pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM) dan dicapai 8,3 juta hektar kawasan konservasi laut.

Pelaksanaan pembangunan kelautan pada tahun 2009 diperkirakan semakin meningkat. Pada tahun ini, terjadi penambahan kapal pengawas menjadi 23 unit, peningkatan hari operasi menjadi 200 hari, dan pembentukan tambahan 88 pokmaswas. Tindak pidana di laut seperti *illegal fishing* juga diharapkan terus berkurang. Selain itu, diperkirakan akan dapat dilaksanakan pemberdayaan 30 pulau-pulau kecil, pengelolaan 2 pulau-pulau kecil terdepan/terluar, 6 UPT Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, serta 1 lokasi perbatasan wilayah laut. Pada tahun tersebut juga diperkirakan terjadi peningkatan pengembangan 6 lokasi wisata bahari, 3 lokasi BMKT dan 7 paket jasa kelautan. Di samping itu, kawasan konservasi laut terus berkembang di 10 lokasi kawasan konservasi laut daerah (KKLD), dan kerja sama regional.

Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan. Selanjutnya, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya dapat dilakukan secara optimal apabila terdapat penataan ruang dan pembagian fungsi harmonis untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya atau pembangunan. Sesuai dengan arahan RPJM 2004-2009, dalam bidang penataan ruang pada tahun 2008 juga telah dicapai beberapa capaian sebagai berikut: a) tersusunnya PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; b) tersusunnya draft 7 Perpres RTR Pulau; c) disahkannya Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diamanatkan dalam PP No. 26 Tahun 2008; d) terlaksananya sosialisasi ke berbagai stakeholders baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN dan Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; e) tersusunnya 5 draft RPP amanat UU No. 26 Tahun 2007; f) ditetapkannya Permendagri No. 28 tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; g) terselenggaranya forum koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan regional melalui Rapat Koordinasi BKTRN-BKPRD di Gorontalo dan Mataram yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penataan ruang di tingkat pusat dan daerah; h) direvisinya Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), dan i) terbentuknya 22 Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) Provinsi dan 75 BKPRD Kab/Kota.

Perkiraan pencapaian kegiatan pada tahun 2009 bidang Tata Ruang adalah: a) disahkannya 33 Perda RTRW Provinsi sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007; b) disahkannya 5 RPP amanat UU No. 26 Tahun 2007; c) disahkannya 7 Perpres RTR Pulau; d) tersedianya peta dasar sebagai basis perencanaan; e) meningkatnya penerapan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif; f) diimplementasikannya zoning regulation sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; g) terlaksananya peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi dalam rangka pemantauan evaluasi penataan ruang daerah; h) penguatan koordinasi dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Pusat dan Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKTRN; i) penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; dan j) direvisinya Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) menjadi Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Selain itu, dalam rangka upaya penyiapan data dan informasi untuk penataan ruang dan pengembangan wilayah telah tercapai (1) tersedianya data dasar pemetaan untuk tata ruang; (2) meningkatnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi. Sementara di tahun 2009 perkiraan pencapaiannya adalah (1) tersedianya peta rupabumi/ wilayah sebagai RTRW Kabupaten/ Kota; (2) tersedianya Sistem Peran Serta dalam data sharing.

Dalam rangka peningkatan kepastian hukum hak atas tanah dan peningkatan akses tanah terhadap masyarakat miskin, pada tahun 2008 telah dilakukan percepatan pendaftaran tanah yang meliputi sertifikasi tanah (Prona, LMPDP) pada 1.051.000 bidang, pembuatan peta dasar pendaftaran tanah (foto udara) pada 500.000 ha, pemasangan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) di 3.072 titik. Disamping itu, untuk memberi akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, telah diterbitkan sertifikasi tanah untuk kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 30.000 sertifikat. Disamping itu, telah dilakukan juga pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) melalui pelaksanaan konsolidasi dan redistribusi tanah sebanyak 310.000 bidang, inventarisasi P4T di

2.000 desa/kelurahan, dan inventarisasi tanah terlantar di 419 kab/kota. Disamping juga dilakukan peningkatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dengan melakukan revisi PP No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan melakukan penguatan infrastruktur dalam peningkatan kepastian hukum hak atas tanah serta menyiapkan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pertanahan.

Sedangkan pada tahun 2009 dalam bidang pertanahan dilakukan kembali upaya akselerasi pelaksanaan pendaftaran tanah demi meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah disamping melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Kegiatan tersebut antara lain mencakup pelaksanaan pendaftaran tanah di 1.245.291 bidang tanah melalui PRONA dan LMPDP sebanyak 1.065.000 bidang, RALAS sebanyak 120.000 bidang, sertifikasi tanah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 47.500 bidang, petani sebanyak 8.065 bidang, nelayan sebanyak 1.500 bidang, peserta Transmigrasi sebanyak 3.226 bidang, pembuatan peta pendaftaran tanah pada 500.000 ha lahan dan pemasangan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) di 3.072 titik. Sedangkan dalam hal pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan melalui pelaksanaan konsolidasi tanah (di luar DKI) sebanyak 10.000 bidang, redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung PPAN) sebanyak 300.000 bidang, Inventarisasi (P4T) pada 750.000 bidang, dan pembuatan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT) di 100 kabupaten/kota. Neraca Penatagunaan Tanah merupakan instrumen yang menggambarkan kesesuaian antara penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW.

Sementara, peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan dalam revitalisasi perkotaan, pada tahun 2008, hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang berhasil dicapai adalah : (1) terlaksananya fasilitasi dan pembangunan fisik *urban renewal* di 6 kota; dan (2) tersusunnya evaluasi pola dan kualitas persebaran sarana dan prasarana perkotaan di 5 ibukota provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Pada tahun 2009, upaya peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan dalam revitalisasi perkotaan akan dilaksanakan melalui Pengendalian dan Pengembalian Fungsi Kawasan Metropolitan dan Kota Besar melalui Peremajaan pada pusat kegiatan perkotaan (pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan) dengan perkiraan pencapaiannya meliputi : terkendalinya dan kembalinya fungsi kawasan pusat-pusat kegiatan perkotaan (pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan) melalui peremajaan kota di 4 kawasan pusat kegiatan perkotaan.

A.2. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK TAHUN 2010

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Menanggulangi Kemiskinan. Meskipun dalam tahun-tahun sebelumnya upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh, namun memasuki tahun 2010 masih banyak permasalah tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain adalah sebagai berikut.

Jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2008 masih cukup besar, yaitu berjumlah 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen. Kesenjangan tingkat kemiskinan antar provinsi juga masih besar dimana sekitar separuh provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-

rata nasional. Penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan.

Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Di lain pihak, kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar serta keterbatasan teknologi. Dari sisi peningkatan kualitas manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi masih rendah, dan terutama pada 2 kuantil terbawah. Hal ini disebabkan karena kesulitan menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskin yang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana. Dari sisi perlindungan masyarakat miskin, kebijakan perlindungan sosial belum terjabarkan secara lengkap, sesuai dengan UU SJSN dan cakupan perlindungan sosial masih belum terpetakan dan tertata dengan baik.

Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: (1) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; (2) masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta (3) fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di pusat maupun di daerah masih lemah. Di samping itu. kapasitas pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan ke sasaran yang tepat masih rendah. Selain itu, pembangunan berbagai bidang/sektor di daerah masih perlu ditingkatkan fokus dan keterpaduannya pada pembangunan wilayah dan manusianya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, dan bukan membangun sektor-sektor di daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi untuk dapat mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, desentralisasi yang mendasari otonomi daerah mengakibatkan keputusan-keputusan serta kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat bervariasi. Untuk itu pemerintah harus dapat menyamakan pemahaman dan wawasan pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan di daerah; meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah.

Kedua, perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola tanam bagi petani, juga berdampak pada ketersediaan air dan sanitasi, serta dapat menimbulkan bencana yang kesemuanya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Ketiga, berkembangnya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin akibat dari membaiknya standar kehidupan masyarakat sehingga tantangan yang dihadapi adalah

meningkatkan mutu kebijakan program dan pelayanan pemerintah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin serta meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pembangunan.

Tantangan lain dalam upaya peningkatakan kesejahteraan masyarakat miskin adalah terjadinya perubahan demografi dengan struktur penduduk yang menua. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menyusun sistem perlindungan sosial khususnya untuk kelompok miskin dan rentan yang dapat mengakomodasi perubahan tersebut.

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan. Berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan telah banyak dilakukan namun demikian, diakui masih ada anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar yang disebabkan karena faktor sosial ekonomi, budaya, geografi, dan sebagian karena kecacatan anak. Di samping itu, peningkatan partisipasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu: kualitas, komitmen pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem jaminan kualitas, serta manajemen pelayanan pendidikan.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, peningkatan partisipasi pendidikan juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan relevansi, utamanya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu bersaing dalam tataran global. Terkait dengan kualitas pendidik, berbagai upaya meningkatkan kualifikasi pendidik belum sepenuhnya sesuai harapan sehingga proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 masih relatif rendah. Di samping itu, persebaran guru yang tidak merata sehingga terjadi inefisiensi, dan sebagian besar sekolah/madrasah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru sementara itu sekolah/madrasah di wilayah perkotaan terjadi kelebihan guru. Tantangan lainnya yang harus dihadapi adalah peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk Indonesia terutama bagi penduduk buta aksara kaum perempuan, tinggal di daerah perdesaan atau daerah terpencil, dan berasal dari keluarga miskin. Selain itu, perlu juga dilakukan pemeliharaan kemampuan keaksaraan untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali.

Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan. Terkait dengan akses dan kualitas kesehatan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan kedepan, diantaranya: 1) status kesehatan dan gizi masyarakat masih relatif tertinggal jika dibanding dengan tingkat regional ASEAN, walaupun telah terjadi peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ; 2) akses dan kualitas pelayanan kesehatan kurang memadai karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan meningkat pesat ; 3) rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (*continuum of care*) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; 4) prevalensi anak yang pendek (stunting) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis masih sangat tinggi, walaupun status gizi anak balita menunjukkan perbaikan; 5) terjadinya *double burden of diseases*, dimana di satu pihak penyakit menular masih merupakan masalah, akan tetapi di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat; 6) masih tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri; rendahnya tingkat ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau; serta rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik di sarana pelayanan pemerintah dan swasta; 7) terjadinya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyabarannya yang kurang merata; 8) jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin dan skema asuransi kesehatan nasional belum sepenuhnya

menerapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ideal; dan 9) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum digarap dengan optimal.

Memantapkan Revitalisasi Program KB. Sampai saat ini. masalah kependudukan masih menjadi salah satu fokus utama Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh masih besarnya jumlah penduduk Indonesia secara absolut, walaupun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Dengan demikin, laju pertumbuhan penduduk harus tetap dijaga agar tidak menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sekitar 205,8 juta (Sensus 2000), meningkat menjadi 218,9 juta jiwa pada tahun 2005 (Supas 2005), dan diperkirakan sekitar 230,6 juta jiwa pada tahun 2009. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, setelah Amerika, China dan India. Sangat disayangkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang demikian banyak tidak disertai dengan kualitas yang cukup tinggi. Hal tersebut tergambar dari masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana walaupun IPM Indonesia meningkat dari 0,696 pada tahun 2004 menjadi 0,728 pada tahun 2005 (*Human Development Report* 2007-2008) hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-107 dari 177 negara. Pada tingkat ASEAN, Indonesia hanya berada di atas Laos (0,601), Kamboja (0,659) dan Myanmar (0,583). Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dibandingkan dengan SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa Total Fertility Rate (TFR) nasional, sebagai salah satu faktor penentu pertumbuhan penduduk, cenderung stagnan disekitar 2,6 per perempuan usia reproduksi. Selain itu, disparitas TFR antar provinsi dan desa-kota masih tinggi. Nilai TFR terendah 1,8 di D.I.Yogjakarta dan nilai tertinggi 4,2 di Nusa Tenggara Timur. TFR di desa (2,8) lebih tinggi dibandingkan di kota (2,3). TFR juga cenderung meningkat pada kelompok terkaya (menjadi 2,7 dari 2,2) dan pada kelompok dengan pendidikan tidak tamat SD, tamat SD dan tidak tamat SMP. Jika dilihat dari rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, terdapat kesenjangan menurut tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan desa-kota. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin (4,2) lebih banyak dibandingkan pada kelompok yang lebih mampu (3,0). Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yg berpendidikan rendah (4,1) lebih banyak dibandingkan pada perempuan berpendidikan tinggi (2,7), dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan di desa (3,7) lebih banyak dibandingkan di perempuan di kota (3,4).

Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama. Keragaman agama yang dianut oleh penduduk Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Namun demikian, keragaman agama tersebut juga merupakan tantangan dalam membangun masyarakat untuk hidup rukun dan damai. Berbagai upaya terus dilakukan dan telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Intensitas dan semangat kerjasama lintas agama terus pula ditingkatkan, termasuk melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan di tingkat kecamatan yang dinilai turut berkontribusi dalam memperkuat kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta perkembangan teknologi komunikasi yang mewarnai pola hubungan kehidupan antar dan intern umat beragama, upaya untuk memperkuat kerukunan umat beragama perlu terus dilanjutkan.

Memperkuat Jati Diri dan Karakter Bangsa. Kemudian, dengan semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa. Proses interaksi budaya tersebut di satu sisi berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi tata nilai dan perilaku bangsa Indonesia, namun di sisi lain dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti munculnya identitas dan perilaku baru yang tidak sesuai dengan nilai, tradisi dan budaya lokal-tradisional bangsa. Oleh karena itu, upaya mempertahankan dan memperkuat jati diri dan

karakter bangsa perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Guna mendukung upaya tersebut berbagai kegiatan pengembangan nilai dan keragaman budaya bangsa, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya bangsa perlu ditingkatkan secara optimal.

Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga. Peran dan eksistensi pemuda dalam pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Pemuda yang berkualitas dan berdaya saing merupakan aset bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Sementara itu, melalui olahraga diharapkan dapat ditanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, dan disiplin serta persatuan dan kesatuan bangsa serta ketahanan nasional yang tangguh. Oleh karena itu, peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olahraga perlu terus ditingkatkan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tugas pokok pemerintah. Namun, sampai saat ini kualitas pelayanan publik yang diberikan masih belum memenuhi harapan masyarakat. Beberapa kendala atau permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2010 terkait dengan pelayanan publik, antara lain: (1) pemahaman para aparat terhadap regulasi pelayanan publik masih kurang; (2) belum tersedianya standar pelayanan minimal (SPM) pada semua jenis pelayanan; (3) masih terbatasnya akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (4) Rendahnya *e*-literasi aparatur pemerintah; (5) terbatasnya pengembangan aplikasi TIK dan konten lokal; (6) masih ditemukannya prosedur pelayanan yang berbelit dan lambat terutama di bidang investasi/penanaman modal; serta (7) pelayanan perkotaan yang masih konvensional. Adapun tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010, adalah: perlunya sosialisasi peraturan perundangan-undangan atau kebijakan pelayanan publik di kalangan aparat pemerintah; percepatan penerbitan SPM untuk semua jenis pelayanan serta fasilitasi penerapannya yang terintegrasi dengan anggaran Pemda dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Pemda; peningkatan manajemen pelayanan (budaya melayani; prosedur pelayanan yang cepat, biaya yang terjangkau; serta optimalisasi pemanfaatan TIK).

Mengembangkan dan Meningkatkan Sistem Kinerja dan Kesejahteraan PNS. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, PNS merupakan salah satu motor penggerak dalam penyediaan pelayanan pada masyarakat. Upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur negara khususnya PNS, masih menghadapi kendala, antara lain belum meratanya penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan berbasis kinerja (sesuai risiko dan beban kerja) di seluruh instansi pemerintah, sehingga sistem *reward and punishment* belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kinerja PNS dinilai masih sangat rendah, sehingga masih perlu dioptimalkan melalui pengelolaan manajemen SDM berbasiskan *merit system*. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS, tantangan yang dihadapi pada tahun 2010 adalah diperlukannya penyempurnaan manajemen kepegawaian terutama sistem penilaian kinerja pegawai dan sistem remunerasi berbasis kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selain itu, perlunya upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme PNS dengan didukung sistem manajemen kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Menata Kelembagaan, Ketatalaksanaan, serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas. Permasalahan yang dihadapi dalam menata kelembagaan, ketatalaksanaan, serta meningkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas antara lain: (1) belum diterapkannya secara luas sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah; (2) pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing lingkungan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, masih bersifat parsial dan terbatas sehingga kurang terkoordinasi dan belum komprehensif dalam

implementasinya; (3) praktek KKN dalam birokrasi masih terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi; (4) masih tingginya opini *disclaimer* dari BPK yang dibarengi dengan belum memadainya kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan negara; (5) tindak lanjut hasil audit belum didukung komitmen pimpinan, dan penanganan atas pengawasan oleh masyarakat belum optimal; serta (6) sinergi lembaga intern dan ekstern yang memiliki tugas dalam pengawasan dan audit belum optimal. Adapun tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010, adalah: mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda secara sistemik, bertahap, dan komprehensif untuk mencapai sasaran yang diharapkan; dan menyempurnakan sistem pengawasan, audit, serta akuntabilitas kinerja dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih dan akuntabel.

Menguatkan Kapasitas Pemerintah Daerah. Upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah sampai saat ini masih terkendala dengan: (1) masih banyaknya Perda-perda bermasalah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; (2) penyusunan APBD di beberapa daerah yang sering mengalami keterlambatan karena adanya persepsi dan interpretasi yang berbeda terhadap Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta (3) sering terjadinya perubahan pada peraturan maupun aplikasi pendukungnya. Oleh karena itu, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010 adalah: (1) meningkatkan kemampuan Pemda dan anggota DPRD dalam penyusunan peraturan daerah; dan (2) membangun SIM BAKD dan SIPKD.

Memantapkan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan utama yang masih dihadapi pada tahun 2010 antara lain: ego sektoral yang masih sangat kuat dari kementerian/lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah; ketidakharmonisan perundangan antara perundang-undangan sektoral dengan pertauran perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; adanya sikap apatis dari masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan; minimnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan; masih tingginya ketidakpastian hukum untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan dan efisien.

Tantangan yang masih akan dihadapi pada tahun 2010 adalah: mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat luas termasuk dunia usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya; untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, terbuka dan akuntabel, dengan mekanisme keluhan publik yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat; dan mekanisme hubungan yang tertata secara sistemik antar unit-unit pada lembaga pemerintah di pusat yang mempunyai fungsi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan keuangan daerah dengan biro-biro hukum pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi dan kabupaten; serta penataan kembali secara bertahap berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pemerintah atau daerah yang akan ditetapkan sebagai percontohan.

Memantapkan Pencegahan Korupsi Dan Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Korupsi. Permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2010 adalah: belum optimalnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, karena akses yang masih terbatas; masih adanya kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan; belum profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi; belum tuntasnya penyusunan dan pembahasan RUU di bidang pemberantasan korupsi dan peraturan pelaksanaannya. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi pada tahun 2010 adalah memastikan pelaksanaan Rencana Aksi dari Strategi

Nasional Implementasi Konvensi PBB Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mencakup penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi; penegakan hukum; pencegahan; pengembalian aset negara yang dikorupsi; kerjasama internasional dan pelaporan pelaksanaan UNCAC di Indonesia. Rencana Aksi Strategi Nasional dimaksud akan melanjutkan langkah-langkah yang belum terselesaikan dari pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN PK).

Memantapkan Desentralisasi, Serta Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah. Permasalahan terkait dengan pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat dan daerah, dan antardaerah, adalah sebagai berikut: (1) Belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena belum tersusunnya dan tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi didaerah-daerah tersebut; (2) Belum adanya model/format ideal dan instrumen kerjasama yang potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (3) Belum adanya insentif yang terukur untuk mendorong daerah dalam melakukan kerjasama. Beberapa tantangan kedepan yang perlu dihadapi adalah: (1) Sosialisasi revisi UU No. 32 Tahun 2004 dan penyusunan PP turunannya; serta (2) Penyusunan model-model kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik, ekonomi dan pelayanan dasar.

Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Peran Organisasi Masyarakat Sipil, dan Partai Politik. Pada tahun 2010 pendidikan politik *(civic education)* masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sipil adalah tantangan utama demokratisasi di Indonesia. Dengan dipelopori oleh media massa, kalangan universitas, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, masyarakat perlu terus dididik dan diajak untuk secara aktif berpartisipasi mengawasi para wakil rakyat dan pemerintah yang mereka pilih dalam Pemilu 2009.

Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian terkait dengan informasi publik, pada tahun 2010 semua pihak yang terkait diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Undang-undang ini diharapkan dapat mencapai sasarannya yang asasi, yakni meningkatkan transparansi di dalam proses perumusan kebijakan publik dan melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka pada keterbukaan informasi yang menyangkut proses politik dan penyelenggaraan negara.

Menguatkan Wilayah Perbatasan. Dalam aspek pertahanan dan keamanan, pembangunan sarana dan prasarana perbatasan dan pulau terluar relatif semakin membaik. Namun potensi gangguan keamanan dan pelanggaran wilayah perbatasan masih cukup tinggi akibat intensitas pengawasan masih terkendala kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengamanan. Seharusnya jarak ideal antar pos pertahanan adalah 10 – 25 km, namun saat ini jarak antar pos rata-rata masih berkisar 50 km. Selanjutnya, pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut semakin dapat ditekan, namun *International Maritime Organization* (IMO) masih menganggap wilayah perairan Indonesia relatif berbahaya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intensitas operasi keamanan laut untuk semakin menekan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan laut, terutama di Selat Malaka agar dunia pelayaran internasional semakin percaya terhadap kemampuan Indonesia mengamankan jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Meningkatkan Kemampuan Pertahanan dan Industri Strategis Pertahanan. Kesiapan Alutsista TNI semakin meningkat, namun Postur dan Struktur Pertahanan masih belum mencapai tingkatan *Minimum Essential Force* dan baru pada tahapan *Insurgency*, serta

berada dalam kondisi penurunan efek penggentar dan "*kill probability*" yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang sangat tua. Hasil industri pertahanan dalam negeri yang diharapkan dapat mendukung kemampuan alutsista TNI belum sepenuhnya dapat diandalkan. Kondisi ini disebabkan adanya hambatan legal, institusional, R&D, dan finansial yang menyebabkan ketergantungan produk pertahanan luar negeri masih cukup tinggi.

Meningkatkan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum semakin kondusif dengan tingkat penyelesaian perkara kriminalnya mencapai 52 persen, namun pola kejahatannya semakin bervarisasi. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi upaya penyelidikan dan penyidikan, serta pencegahan tindak kriminalitas yang bertendensi meningkat sebagai akibat krisis global yang belum membaik.

Meningkatkan Penggalangan Keamanan Nasional. Selanjutnya terkait dengan upaya deteksi dini keamanan nasional, tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah memperluas cakupan sistem deteksi dini keamanan nasional yang meliputi pengamanan rahasia negara dan modernisasi teknologi peralatan intelijen untuk mendukung cipta kondisi keamanan nasional. Sementara itu, munculnya potensi ancaman yang semakin bervariasi memerlukan pengelolaan secara efektif dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas, terbatasnya kerjasama antar institusi sehingga terkesan bertindak sendiri-sendiri bermuara pada kebutuhan suatu lembaga semacam dewan keamanan nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional. Tersusunnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tupoksi maupun dalam sinerginya dengan lembaga-lembaga keamanan nasional yang lainnya.

Meningkatkan Daya Tarik Investasi. Seiring dengan kondisi ekonomi global yang cenderung melemah, diperkirakan aliran investasi dari luar ke Indonesia juga akan berkurang. Selain masalah eksternal, berbagai masalah domestik antara lain kurang terpenuhinya ketersediaan infrastruktur dan energi, serta belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi prosedur perijinan investasi. Mencermati perkembangan tersebut tantangan investasi dimasa datang adalah upaya untuk mendorong berkembangnya investasi agar lebih terdiversifikasi kelompok usahanya (primer, sekunder, dan tersier) dan upaya penyebaran investasi ke luar Jawa.

Menguatkan Daya Saing Ekspor. Sementara itu, masalah dan tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh sektor perdagangan adalah semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak lanjutan dari krisis global, yang akan berakibat pada melemahnya permintaan dunia dan aktivitas produksi global. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin ketat dan harga komoditas diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2008. Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain, akibat dari menurunnya permintaan produk di beberapa pasar utama ekspor dunia, yang kemudian dialihkan ke pasar Indonesia.

Dengan melemahnya permintaan dunia, harga komoditas di pasar internasional pada tahun 2009 dan 2010 diperkirakan masih berpotensi menurun. Bila ini terjadi, tingkat harga komoditas akan mencapai level lebih rendah dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Harga komoditas non-energi pada tahun 2009 diperkirakan turun sebesar 19,1 persen dari tahun 2008, sedangkan harga komoditas pertambangan (metal dan mineral), diperkirakan turun

sebesar 14,4 persen[1]. Penurunan harga komoditas ini akan berdampak negatif pada pertumbuhan nilai ekspor Indonesia yang terutama didorong oleh perkembangan harga komoditas. Melihat perkembangan tersebut, pada masa yang akan datang perkembangan ekspor Indonesia harus berbasis pada upaya peningkatan keragaman produk dan nilai tambah termasuk peningkatan volume.

Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan devisa negara, permasalahan yang dihadapi pariwisata adalah daya saing pariwisata Indonesia di pasar global yang masih rendah. Sehingga tantangan utama untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2010, disamping tetap memelihara pasar yang sudah ada juga perlu dilakukan upaya (a) peningkatan kemampuan pengelolaan destinasi pariwisata (Destination Management Organisation); (b) penyediaan dan penyebaran informasi pariwisata di dalam dan diluar negeri terutama dengan memanfaatkan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT); peningkatan kualitas pelayanan dan akses menuju dan di destinasi pariwisata; (c) peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata; (f) penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang pariwisata

Di sisi perdagangan dalam negeri, masalah utama yang dihadapi adalah masih belum optimalnya efisiensi dan efektivitas sistem logistik, masih kurangnya sarana prasarana perdagangan, dan belum lancarnya arus distribusi antar wilayah di Indonesia. Disamping itu, penguatan kelembagaan perdagangan dalam negeri untuk upaya perlindungan konsumen, kemetrologian, dan persaingan usaha yang sehat masih belum optimal.

Merevitalisasi Industri Manufaktur. Permasalahan yang dihadapi industri pengolahan adalah menurunnya permintaan terhadap barang-barang industri terutama di pasar global akibat krisis ekonomi global. Sehingga tantangan utama untuk menjaga pertumbuhan industri pada tahun 2010, di samping mengamankan pasar domestik dari limpahan produk-produk luar negeri yang masuk secara illegal, juga adalah kemampuan industri dalam negeri memasok kebutuhan pasar domestik tersebut dengan kualitas dan harga yang bersaing dengan produk impor. Dengan demikian tantangan pembinaan industri manufaktur adalah menciptakan iklim dan fasilitasi bagi industri agar mampu melaksanakan revitalisasi baik dalam bentuk pembaharuan teknologi produksi, keterkaitan dalam mata rantai pertambahan nilai, terutama industri-industri kecil dan menengah.

Merevitalisasi Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Selain industri manufaktur, berbagai kemajuan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan telah dicapai pada tahun 2008 dan perkiraan pada tahun 2009. Namun masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2010, antara lain sebagai berikut.

Pembangunan pertanian pada tahun 2010 masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok: (i) masih tingginya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang ditunjukkan dengan tingginya konversi lahan pertanian sehingga mengancam tingkat produksi pertanian; (ii) masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; (iii) lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; (iv) lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan (v) belum optimalnya kelembagaan pertanian, khususnya kelembagaan pemerintah, di dalam mendukung sektor pertanian.

[1] Sumber: Global Economic Prospects, Bank Dunia 2009

Pembangunan perikanan pada tahun 2010 masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok: (i) masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; (ii) rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; (iii) masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; (iv) usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; (v) masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada untuk menjangkau perairan Indonesia yang luas; dan (vi) menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budidaya perikanan.

Pembangunan kehutanan pada tahun 2010 masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok: (i) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan yang terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan; (ii) menurunnya kontribusi sektor kehutanan dalam menyumbang PDB nasional; (iii) meningkatnya permintaan produk-produk hasil hutan terutama kayu, sementara pasokan kayu dari hutan alam semakin menurun, dan pasokan kayu dari HTI dan HTR belum mampu menjadi sumber alternatif pemenuhan kebutuhan; (iv) meningkatnya kompetisi dari negara tetangga penghasil kayu dan produk kayu.

Meningkatkan Produktivitas Dan Kompetensi Tenaga Kerja. Dari sisi tenaga kerja, rendahnya produktivitas masih menjadi masalah yang harus segera diatasi. Produktivitas tenaga kerja yang rendah sangat mempengaruhi daya saing nasional. Hal ini berdampak pada peringkat daya saing Indonesia yang hanya menempati urutan ke-58 dari 134 negara *(The Global Competitiveness Report, 2008-2009).*

Produktivitas tenaga kerja secara makro dapat dihitung dari produk domestik bruto per pekerja. Dengan menggunakan perhitungan tersebut, dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, produktivitas pekerja Indonesia memang masih sangat rendah. Kemajuan yang diharapkan nampaknya belum membuahkan hasil yang memadai.

Sementara itu jika dilihat indikator lain, yakni tingkat pengangguran terbuka, meski menurun dari tahun ke tahun, tetapi pada Februari 2009 angkanya masih cukup tinggi, yaitu 8,14 persen. Masih tingginya angka pengangguran terbuka disebabkan salah satunya oleh daya serap pekerja formal yang masih sangat rendah. Rendahnya daya serap pekerja formal terkait dengan berbagai permasalahan dan hambatan dalam berinvestasi yang mewarnai kondisi pasar kerja. Setidaknya ada beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk mengatasi masalah ini, yaitu masalah pendidikan dan pelatihan, dan penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah.

Permasalahan lain di sektor tenaga kerja terkait dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkan. Indonesia selama ini dikenal memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Namun tenaga kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, sehingga biaya total tenaga kerja menjadi relatif tinggi. Perkembangan alamiah dan intervensi pemerintah telah membuat tenaga kerja Indonesia untuk tingkat kecakapan yang dimiliki menjadi tidak murah lagi. Kenaikan upah sebagai akibat aspirasi pekerja untuk memperoleh tingkat penghidupan yang lebih baik dan peningkatan upah minimum setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas merupakan persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha. Untuk itu, tantangan yang dihadapi dalam tahun-tahun mendatang adalah upaya mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Untuk itu, peningkatan produktivitas membawa implikasi pada kebutuhan kualitas tenaga kerja.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah melalui pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dengan dikembangkannya pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi, maka lulusan/tamatan pendidikan dan pelatihan kerja dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini merupakan modal bagi tenaga kerja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan sekaligus memberikan pendapatan yang layak.

Meningkatkan Produktivitas Dan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktif. Sektor Koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor strategis dengan 91,8 juta tenaga kerja di dalamnya, juga tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan dalam menghadapi tahun 2010 nanti. Koperasi dan UMKM diperkirakan masih akan menghadapi permasalahan mendasar dan tantangan yang cukup berat akibat krisis ekonomi global. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan pada tahun 2010.

Masalah-masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapi UMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan; masih panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; dan masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, tantangan utama ke depan adalah penyelesaian berbagai produk turunan dari UU yang terkait dengan UMKM dan koperasi.

Sementara itu, masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis Iptek, industri kreatif, dan inovasi.

Di sisi lain, skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi. Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah kualitas kerja yang kurang baik dan terbatasnya akses pemasaran. Kualitas kerja yang kurang baik dapat memberikan dampak terhadap lingkungan kerja dan rendahnya daya saing produk yang dihasilkan, sedangkan keterbatasan akses pemasaran berpengaruh kepada kapasitas produksi dan usaha UMKM. Dalam mengatasi kendala kualitas, perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan budaya kerja dan manajemen produksi bagi UMKM. Sementara itu, keterbatasan akses pemasaran menuntut perlunya pengembangan strategi dan jaringan pemasaran, serta penyediaan informasi peluang pasar.

Terkait dengan koperasi, kinerja lembaga koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang berarti. Masih banyak UMKM yang kurang memahami prinsip dan praktek yang benar dalam berkoperasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan terkait dengan masalah koperasi adalah melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan pembinaan dan penyediaan tenaga penyuluh perkoperasian.

Meningkatan Ketahanan Pangan. Dalam hal pencapaian stabilitas ekonomi, salah satu sektor yang terpenting adalah sektor pangan, terutama dalam hal ketahanan pangan. Bila ketahanan pangan dapat ditingkatkan, stabilitas ekonomi akan lebih terjaga. Di tahun 2010, peningkatan ketahanan pangan akan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan pokok. Adapun permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) pemenuhan kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk; (ii) jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka masih cukup besar dengan daya beli yang semakin menurun; (iii) produktivitas usaha-tani yang relatif rendah; (iv) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam/lahan yang semakin menurun; (v) konversi lahan pertanian, khususnya pangan, ke penggunaan non pertanian terus berlangsung; (vi) kerusakan lingkungan dan pemanasan global (*global warming*) yang dapat mengancam produksi pangan; (vii) teknologi pertanian yang relatif tertinggal; (viii) masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan; (ix) persaingan penggunaan komoditas untuk bahan pangan, pakan, dan energi (*food, feed and fuel*); (x) semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor; (xi) persaingan usaha yang cenderung tidak sehat di pasar produk pangan penting (beras, daging ayam dan telur); (xii) peningkatan peran daerah dalam ketahanan pangan; serta (xiii) keterbatasan keterjangkauan pangan terutama pada kelompok masyarakat miskin dan daerah terpencil.

Meningkatan Stabilitas Harga Dan Mengamankan Pasokan Bahan Pokok. Permasalahan dan tantangan dalam menjaga stabilitas harga dan mengamankan pasokan bahan pokok adalah meningkatkan penyediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan produksi, meningkatkan impor apabila diperlukan dan menyempurnakan sistem distribusi bahan pokok, baik yang didukung oleh sistem transportasi darat, laut maupun udara. Perkembangan harga bahan pokok yang cepat ini memerlukan pemantauan yang intensif dan evaluasi seksama, termasuk terhadap sistem distribusi dan stok bahan pokok. Dunia usaha yang tersebar di berbagai daerah belum terdata dan terpantau dengan baik. Tersedianya basis data tentang pusat-pusat produksi, stok beserta matarantai distribusinya dan sistem pemantauan yang baik dapat menjaga kelancaran pasokan dan meredam terjadinya lonjakan harga bahan pokok secara berarti serta dapat menghindari terjadinya penimbunan dan penyelewengan distribusi yang mengurangi ketersediaannya. Selanjutnya, upaya stabilisasi harga bahan pokok memerlukan koordinasi kebijakan ekonomi makro seperti sasaran inflasi, kebijakan tarif ekspor dan impor, kebijakan subsidi BBM, TDL, pertanian dan suku bunga. Di samping itu, relatif tingginya harga bahan pokok di berbagai daerah yang sulit dijangkau dapat diatasi dengan mempercepat pembangunan pembangunan dan meningkatkan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Di sisi lain, kecenderungan penurunan aktivitas perekonomian seiring dengan krisis ekonomi global menyebabkan inflasi cenderung turun. Meskipun demikian, luasnya wilayah negara kita yang berbentuk kepulauan dan masih terbatasnya prasarana (infrastruktur) dan sarana perhubungan, masih akan menghambat penurunan inflasi sehingga setara dengan inflasi di negara-negara sekawasan. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi dan transportasi, khususnya bahan pangan pokok, dapat mendorong kenaikan inflasi harga bahan pangan pokok yang mudah bergejolak (*volatile food prices*).

Terkait dengan pengamanan pasokan bahan pokok, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan penyediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan produksi, meningkatkan impor bila diperlukan, dan menyempurnakan sistem distribusi bahan pokok, baik yang didukung oleh sistem transportasi darat, laut, maupun udara. Perkembangan harga bahan pokok yang cepat memerlukan pemantauan intensif dan evaluasi seksama, termasuk terhadap sistem distribusi dan stok bahan pokok pemerintah dan dunia usaha yang tersebar di berbagai daerah. Sistem pemantauan yang baik dan tersedianya basis

data tentang pusat-pusat produksi, stok beserta mata rantai distribusinya, dapat menjaga kelancaran pasokan dan meredam terjadinya lonjakan harga bahan pokok secara berarti. Dengan sistem pemantauan dan basis data yang baik, penimbunan dan penyelewengan distribusi juga dapat dihindari.

Mengelola APBN Secara Berkelanjutan. Berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi akan menuntut perubahan dalam pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengelolaannya. Meski begitu, pengelolaan APBN juga tidak terlepas dari masalah dan tantangan ke depan. Masalah dan tantangan pokok yang diperkirakan masih akan dihadapi dalam pengelolaan APBN yang berlanjutan antara lain sebagai berikut:

Pertama, di bidang penerimaan negara, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya *coverage ratio* penerimaan perpajakan. Kondisi ini disebabkan oleh: (a) belum optimalnya kualitas pelayanan perpajakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (b) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak; (c) masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat. Sementara di bidang kepabeanan dan cukai permasalahan utama yang dihadapi adalah (a) belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan dan cukai; (b) belum efektifnya sistem pengawasan kepabeanan dan cukai; (c) belum memadainya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Di bidang PNBP permasalahan utama yang masih dihadapi ke depan adalah: (a) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi (migas) yang disebabkan terutama oleh faktor alam dan rendahnya investasi baru migas; (b) masih tingginya kegiatan *illegal logging* yang mengakibatkan penurunan potensi PNBP kehutanan; serta (c) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama karena faktor kinerja BUMN dan makro ekonomi.

Kedua, di bidang belanja negara, permasalahan utama yang diperkirakan akan dihadapi adalah: (a) masih terbatasnya ruang gerak fiskal; (b) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (c) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara sebagai dampak dari belum sinkronnya dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, serta belum adanya sinergi antara program nasional dengan kebijakan di daerah.

Ketiga, di bidang pembiayaan APBN, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (a) belum optimalnya pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara (SBN); (b) belum optimalnya pasar dan infrastruktur Surat Berharga Negara (SBN); (c) tingginya beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang pemerintah; (d) efisiensi dan efektivitas pemanfaatan utang luar negeri masih belum optimal yang berdampak terhadap meningkatnya beban *commitment fee* akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan *lender*.

Keempat, di bidang perbendaharaan negara permasalahan utama yang dihadapi adalah: (a) penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbendaharaan; (b) masih adanya rekening pemerintah di berbagai Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang keberadaannya tidak mencerminkan praktek yang sehat dalam pengelolaan keuangan negara; (c) pelaksanaan pengelolaan kas (*cash management*) yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan pemanfaatan *idle cash* yang juga belum optimal; (d) masih adanya BUMN/BUMD serta Pemerintah Daerah yang kesulitan melunasi kewajibannya kepada pemerintah pusat atas pemberian penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman/SLA, Rekening Dana Investasi/RDI, dan Rekening Pembangunan Daerah.

Kelima, di bidang pengelolaan kekayaan negara, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (a) belum tersedianya peraturan perundang-undangan secara lengkap terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, termasuk penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BHMN; (b) belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN) baik secara administratif, hukum, dan fisik; (c) belum optimalnya pemanfaatan BMN; (d) masih lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait penilaian barang milik negara.

Meningkatkan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan. Sektor lain yang akan berperan penting dalam pembangunan ekonomi ke depan adalah sektor keuangan. Apalagi bila mengingat, krisis ekonomi global yang terjadi saat ini dipicu oleh hancurnya sektor keuangan global, terutama di negara-negara maju. Menyikapi hal tersebut, meskipun tekanan krisis global diperkirakan akan sedikit mereda pada tahun 2010, namun terdapat beberapa hal yang patut diwaspadai. Terkait dengan ketahanan sektor keuangan, aspek supervisi dan *good governance* menjadi sangat penting di dalam mengelola risiko yang dihadapi. Tingginya risiko yang dihadapi antara lain seperti ketidak-pastian global yang berdampak pada terhambatnya fungsi intermediasi sektor keuangan.

Kendala lain yang menjadi hambatan sektor keuangan, terutama perbankan, antara lain adalah dana yang dihimpun oleh sektor perbankan mayoritas berjangka waktu pendek, sehingga sukar bagi bank untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat jangka panjang. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) diperkirakan masih tetap melambat mengingat masih tingginya risiko sebagai dampak krisis global.

Sementara itu, di sisi pembiayaan mikro, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menunjukkan kinerja yang membaik. Keunggulan BPR dibandingkan dengan Bank Umum adalah pelayanan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan kedekatan dengan nasabah melalui pelayanan langsung *(door to door)* dan pendekatan secara personal memperhatikan budaya setempat. Namun demikian, mengingat minimnya informasi tentang usaha yang dimiliki nasabah, maka terdapat kecenderungan bahwa BPR lebih fokus kepada nasabah yang *bankable*. Di sisi lembaga pembiayaan mikro yang bukan bank bukan koperasi, kinerjanya masih terkendala di dalam hal aspek legalitas, pengaturan, pengawasan maupun infrastruktur yang mendukung, antara lain seperti keberadaan Apex Bank maupun asuransi mikro.

Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil. Tidak berbeda dengan sektor keuangan, sektor riil yang merupakan motor penggerak dalam perekonomian perlu senantiasa ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya. Meski begitu, sektor ini juga memiliki permasalahan dan tantangannya masing-masing.

Di sektor riil bidang sumber daya air, permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi untuk meningkatkan daya saing adalah: (1) belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana sumber daya air terutama dalam penyediaan air baku dan kinerja prasarana pengendali daya rusak air; (2) belum optimalnya fungsi tersebut dikarenakan kualitas operasi dan pemeliharaan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini tantangan yang dihadapi bidang sumber daya air adalah makin tingginya laju kerusakan daerah aliran sungai dan terjadinya perubahan iklim global yang turut meningkatkan potensi daya rusak air terhadap lingkungan. Di samping itu, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air di masa mendatang perlu menerapkan prinsip *eco efficient* dan konsep pembangunan yang ramah lingkungan (*green construction*).

Sementara itu, masalah dan tantangan pembangunan transportasi pada tahun 2010 antara lain: (1) masih rendahnya disiplin pengguna dan penyedia angkutan yang tercermin

dengan adanya kelebihan muatan dan penumpang baik untuk kendaraan angkutan darat, laut, dan udara; (2) semakin tingginya tingkat intensitas kemacetan di jalan raya khususnya di kota-kota besar dan lintas-lintas utama jalur distribusi barang sehingga terjadi pemborosan energi dan penurunan kualitas lingkungan hidup; (3) masih lambatnya proses administrasi/pengurusan dokumen khususnya untuk kegiatan ekspor-impor sehingga mengganggu kelancaran bongkar muat dan distribusi barang; (4) kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan penyediaan transportasi, dimana di satu sisi telah terjadi kejenuhan dan "*bottleneck*" pada beberapa lintas pelayanan yang berkembang secara pesat, sedangkan di sisi lain, masih terjadi ketersediaan prasarana yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal kapasitasnya, terutama pada beberapa lintas keperintisan; (5) masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan dan kondisi prasarana dan sarana serta iklim berusaha yang belum berkembang.

Sementara dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010 adalah meningkatnya luasan daerah genangan di kawasan permukiman dan kawasan strategis ekonomi nasional

Khusus untuk sektor energi, pembangunan infrastruktur energi tahun 2010 diperkirakan masih menghadapi permasalahan dan tantangan, yaitu: (1) rendahnya kapasitas fasilitas pengolahan (*refinery*), jaringan transmisi dan distribusi (pipa minyak dan gas bumi); (2) rendahnya pemanfaatan energi primer non-BBM untuk kepentingan domestik seperti gas bumi, panas bumi dan batubara serta energi baru terbarukan (surya, mikrohidro, bayu/angin, biomassa); (3) harga energi konvensional/BBM yang belum mencerminkan keekonomiannya sehingga pengembangan energi alternatif (gas bumi, panas bumi, batubara dan terbarukan) terhambat, masih besarnya subsidi BBM dan subsidi yang tidak tepat sasaran; serta (4) rendahnya efisiensi pemanfaatan energi dan belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi.

Sementara permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketenagalistrikan adalah masih rendahnya jangkauan dan kapasitas sarana dan prasarana ketenagalistrikan dimana *reserved margin* (cadangan) masih di bawah kewajaran, bahkan beberapa daerah sudah mengalami defisit (di tahun 2008 terdapat 7 sistem yang mengalami defisit dengan total defisit sebesar 243MW). Permasalahan lain yang masih harus dihadapi adalah masih rendahnya efisiensi pola konsumsi dan peralatan listrik yang digunakan oleh konsumen. Di sisi yang lain, pembangunan ketenagalistrikan juga dihadapkan pada tantangan (1) membangun pembangkit listrik yang menggunakan potensi alternatif sumber energi yang paling mudah diperoleh, khususnya potensi energi primer setempat, serta mudah dikelola lebih lanjut oleh masyarakat secara swadaya; (2) terbatasnya kapasitas investasi untuk pengembangan dan perluasan fasilitas ketenagalistrikan, baik yang dananya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun swadaya swasta atau masyarakat; dan (3) sulitnya melakukan pembebasan lahan dan upaya mencapai titik temu kompensasi lahan yang terkena dampak pembangunan fasilitas ketenagalistrikan.

Pada tahun 2010, pembangunan pos dan telematika terkait fokus "Dukungan Infrastruktur bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil" juga menghadapi berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah (1) terbatasnya infrastruktur TIK *broadband*; (2) masih tingginya ketergantungan kepada industri luar negeri dan teknologi *proprietary*; (3) masih rendahnya e-literasi masyarakat; (4) terbatasnya pengembangan aplikasi TIK dan konten lokal; dan (5) meningkatnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Adapun tantangan pokok di tahun 2010 adalah konvergensi antara telekomunikasi, informatika, dan penyiaran yang menuntut segera dilakukannya penataan kembali kebijakan,

perangkat peraturan, serta kelembagaan dan struktur industri telekomunikasi, informatika, dan penyiaran.

Meningkatkan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dan Swasta. Di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum stabil pasca krisis industri perumahan di Amerika yang berlanjut menjadi krisis global, pengembangan kebijakan KPS dan pembangunan proyek KPS di infrastruktur, selain harus mengantisipasi kondisi global, juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan perekonomian nasional. Untuk itu kebijakan KPS infrastruktur yang dilaksanakan harus dapat mempertimbangkan masalah yang terkait hal strategis sebagai berikut: (1) pembukaan lapangan kerja; (2) penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor domestik maupun asing; sebagai upaya untuk mendorong *multiplier effect* dalam perekonomian nasional yang sedang lesu.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, tantangan yang harus diatasi dalam tahun 2010 antara lain adalah: (1) penyempurnaan dan sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan terkait KPS; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan badan pemberi kontrak dan kelembagaan keuangan baik di pusat maupun daerah melalui pembentukan Pusat dan Simpul KPS; (3) melanjutkan restrukturisasi dan reformasi di bidang infrastruktur, termasuk upaya-upaya untuk menggali potensi pendanaan dalam negeri melalui sinkronisasi regulasi perbankan dan lembaga jasa keuangan nasional.

Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian hanya akan dapat ditingkatkan apabila tersedia pelayanan infrastruktur yang memadai. Meskipun upaya peningkatan pelayanan infrastruktur telah dilakukan, namun masih diperlukan berbagai upaya lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimum. Permasalahan pokok pembangunan sumber daya air tahun 2010 diantaranya adalah: belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana sumber daya air dalam memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku, serta pengendalian daya rusak air. Adapun tantangannya adalah ketersediaan air dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, pembangunan transportasi masih menghadapi permasalahan: (1) masih banyaknya jumlah dan tingginya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi; (2) masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan khususnya untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terisolasi, dan kawasan perbatasan; (3) masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan dan kondisi prasarana dan sarana transportasi yang kurang terawat, baik akibat manajemen, kurangnya pendanaan, prioritas (pemerintah maupun BUMN), maupun teknis pelaksanaan dan sistem penyelenggaraannya.

Adapun masalah dan tantangan pokok pembangunan perumahan dan permukiman antara lain: (1) masih rendahnya aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; (2) menurunnya kualitas permukiman masyarakat berpendapatan rendah yang diindikasikan dengan semakin meluasnya permukiman kumuh; (3) masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan; (4) keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah yang belum didukung dengan upaya peningkatan sumber pendanaan alternatif dari masyarakat dan swasta; (5) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; dan (6) masih rendahnya kinerja lembaga penyedia pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan; serta (7) penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2010 antara lain: (1) masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan; (2) penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku; (3) keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah yang belum didukung dengan upaya peningkatan sumber pendanaan alternatif dari masyarakat dan swasta; serta (4) masih rendahnya kinerja lembaga penyedia pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan.

Pembangunan energi masih menghadapi permasalahan rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana energi serta aksesibilitas energi di perdesaan. Sedangkan pembangunan ketenagalistrikan masih menghadapi permasalahan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik seluruh penduduk Indonesia secara cukup, berkualitas, dan dengan harga terjangkau. Adapun tantangan utamanya adalah jumlah penduduk yang besar, lokasi yang tersebar, dan kondisi geografis yang sulit.

Permasalahan pokok pada pembangunan pos dan telematika di tahun 2010 terkait fokus "Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum" adalah (1) masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika di wilayah non komersial; dan (2) masih terbatasnya pola kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur di wilayah non komersial

Meningkatkan Dukungan Iptek Bagi Daya Saing Nasional. Selama ini dukungan inovasi dalam daya saing nasional terkendala dengan lemahnya kapasitas inovasi nasional, kolaborasi antara universitas – litbang – dan industri, serta lemahnya pemanfaatan paten. Kelemahan tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu kelemahan yang menyangkut sistem inovasi nasional yang mengatur hubungan antara unsur-unsur pendukungnya, serta kelemahan dalam substansi penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek. Dengan demikian, tantangan utama dari pembangunan iptek pada tahun 2010 adalah meningkatkan dukungan iptek terhadap daya saing nasional. Dukungan tersebut dapat ditingkatkan bila pada tahun 2010 dimulai penguatan sistem inovasi nasional serta mulai ditingkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.

Meningkatkan Ketahanan Energi. Dalam rangka pencapaian stabilitas ekonomi, peran ketahanan energi juga merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan. Namun pada tahun 2010, pembangunan ketahanan energi masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama: (i) menurunnya produksi minyak bumi hingga di bawah satu juta barel per hari; dan (ii) belum optimalnya pemanfaatan sumber energi selain minyak bumi. Sementara itu, tantangan-tantangan pokok yang dihadapi ketahanan energi: (i) penerapan teknologi tinggi pada pengurasan sumur-sumur minyak tua yang saat ini memasuki tahap *decline*; (ii) dan percepatan produksi lapangan-lapangan baru minyak bumi yang sudah siap untuk berproduksi, seperti Cepu; (iii) peningkatan upaya eksplorasi cekungan-cekungan baru dan daerah *frontier* untuk menemukan cadangan baru minyak dan gas bumi; (iv) perluasan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi; (v) percepatan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan energi listik; dan (vi) pelembagaan gerakan hemat energi.

Meningkatkan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya. Permasalahan utama yang dihadapi dengan terjadinya perubahan iklim global adalah upaya pengurangan emisi gas rumah kaca membutuhkan teknologi baru yang belum dipunyai negara berkembang seperti Indonesia. Sementara itu, upaya alih teknologi juga terkendala pada keengganan negara-negara maju untuk memberikan teknologi yang dibutuhkan kepada negara-negara berkembang. Untuk program-program mitigasi di sektor energi, misalnya

pengalihan ketergantungan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan, selain membutuhkan teknologi yang mutakhir dan tepat guna, juga membutuhkan investasi yang relatif besar. Saat ini tingkat pengetahuan dan ketersediaan teknologi relatif masih sangat terbatas, ditambah dengan kurangnya pendanaan untuk mendukung upaya penghematan dan konversi energi tersebut. Di sektor kehutanan, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) atau upaya penangkapan GRK juga membutuhkan investasi yang besar, walaupun secara teknologi relatif sudah bisa dikuasai. Selain itu, lemahnya dukungan terhadap program-program penanganan perubahan iklim di berbagai sektor, kurangnya alokasi pendanaan, kurangnya koordinasi dan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi perubahan iklim juga merupakan permasalahan yang masih terus diupayakan penyelesaiannya.

Sementara itu, untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan yang merupakan kepentingan utama negara berkembang seperti Indonesia, juga terhambat pada masalah teknologi dan investasi yang terbatas. Padahal sebagai negara kepulauan dan negara yang masih mengandalkan perekonomiannya pada sektor sumber daya alam dan pertanian, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan perubahan iklim adalah: (1) pengarusutamaan upaya mitigasi dan adaptasi di seluruh sektor pembangunan; (2) peningkatan upaya adaptasi dan kesadaran masyarakat terutama pada daerah-daerah dan sektor yang rawan terhadap perubahan iklim; (3) pengembangan alternatif pendanaan bagi program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (4) pengembangan teknologi yang didukung data dan informasi yang akurat mengenai perubahan iklim; (5) pengembangan kelembagaan yang menangani program-program terkait perubahan iklim; serta (6) perkuatan ketahanan pangan, air dan energi agar dapat bertahan terhadap perubahan iklim global.

Dalam upaya penanggulangan bencana serta upaya pengurangan risiko bencana, masalah yang dihadapi hingga saat ini adalah: (1) masih rendahnya kinerja penanganan bencana, kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pemulihan pasca bencana, upaya pendanaan pengurangan risiko bencana yang belum maksimal, dan kelembagaan penanganan bencana yang masih berorientasi pada penanganan kedaruratan; (2) masih rendahnya perhatian mengenai perlunya pengurangan risiko bencana, yang tampak dari masih rendahnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, belum terencana dan terprogramnya pengurangan risiko bencana, masih rendahnya daya guna rencana tata ruang wilayah dalam mengurangi resiko bencana, serta kurangnya perencanaan dan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah untuk: (1) meningkatkan kesiapan kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi; (2) mengarusutamakan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah dengan kelembagaan yang kuat; (3) melakukan identifikasi, mengkaji, memantau resiko bencana, serta menerapkan sistem peringatan dini; (4) mengurangi cakupan resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan (5) meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam pengembangan wilayah dan pengurangan risiko bencana.

Meningkatkan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi terpusat pada aspek pengelolaan yang masih kurang memperhatikan pemeliharaan dan aspek keberlanjutan. Permasalahan dan tantangan yang lain adalah kurangnya perhatian dan prioritas pada upaya pencegahan dan usaha untuk memasukkan faktor eksternalitas ke dalam pengelolaan sumber

daya alam. Secara detil, permasalahan dan tantangan yang dihadapi setiap sektor adalah sebagai berikut.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan sumber daya kehutanan antara lain: berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi karena daya dukung hutan sebagai penyangga kehidupan semakin menurun. Permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2010, yaitu: (i) meningkatnya kerusakan hutan dan lahan semakin mengganggu kestabilan ekosistem yang berdampak negatif terhadap peran hutan sebagai sistem penyangga kehidupan; (ii) deforestasi dan degradasi telah menyebabkan menurunnya fungsi hutan dalam tata air dan berdampak kepada penurunan kualitas DAS; (iii) masih rendahnya kualitas pengelolaan DAS dan belum terwujudnya pendekatan *one river-one plan-one management;* dan (iv) masih rendahnya kemampuan keuangan untuk mendukung konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga laju deforestasi sebesar 1,08 juta ha/tahun tidak dapat dikejar dengan kemampuan rehabilitasi yang hanya 500-700 ribu ha/tahun;

Dengan permasalahan yang dihadapinya, tantangan yang dihadapi bidang kehutanan adalah: (a) kecenderungan meningkatnya bencana alam sehingga mitigasi bencana alam perlu dilakukan dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi DAS; (c) perkembangan dunia bisnis yang berbasis "*natural resources*" merupakan ancaman terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa dalam kawasan hutan; dan (e) masih tingginya laju luasan lahan kritis merupakan dasar bagi percepatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Permasalahan dan tantangan bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral adalah: (1) belum optimalnya penerapan prinsip *good mining practice* dalam pelaksanaan pertambangan, terutama yang pengawasannya berada di pemerintah daerah; (2) menyusun peraturan yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian produk pertambangan di dalam negeri; dan (3) masih terdapatnya perbedaan penafsiran/persepsi dalam interpretasi terhadap UU. No 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan lingkungan hidup antara lain: masih tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan mengakibatkan semakin menurunnya daya dukung lingkungan. Permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya tingkat koordinasi dari para pemangku kepentingan, lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, dan terbatasnya alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya perubahan iklim global yang pengaruhnya mulai terasa di sektor-sektor pembangunan. Dampak dari perubahan iklim global tersebut menambah beban kepada lingkungan, termasuk diantaranya timbulnya bencana alam yang dewasa ini lebih sering terjadi.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup adalah: (a) peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b) peningkatan penerapan pendanaan alternatif bidang lingkungan; (c) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup; dan (d) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global dan penanggulangan bencana alam lainnya dengan pengoptimalan sistem informasi iklim dan bencana, serta pengendalian laju degradasi lingkungan;

Meningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Terkait dengan sumber daya air, peningkatan pengelolaan sumber daya air secara efisien, efektif, terpadu, dan berkelanjutan menjadi syarat mutlak untuk tercapainya visi pembangunan sumber daya air, yaitu terwujudnya kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Seiring

dengan perubahan paradigma pembangunan yang sejalan dengan semangat reformasi, pengelolaan sumber daya air memerlukan beberapa langkah penyesuaian yang terkait dengan tata kepemerintahan, peran masyarakat dan swasta, serta peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya air, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Walaupun prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya air terpadu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: (1) masih sulitnya menyatukan kerangka kerja bersama berbasis DAS antara berbagai instansi terkait, baik karena koordinasi antar-instansi atau antar-daerah otonom yang masih belum berjalan optimal dan terintegrasi maupun karena permasalahan lainnya; (2) tidak seimbangnya antara kebutuhan pendanaan pada satu kegiatan prioritas dengan ketersediaan pendanaan; (3) belum sinkronnya kebijakan, serta kurangnya komitmen dalam pengelolaan sumber daya air telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain masih terkonsentrasinya kegiatan pengelolaan sumber daya air pada penanganan pembangunan prasarana, sementara kegiatan penanganan pemeliharaan ekosistem sumber daya air relatif terabaikan; (4) masih lemahnya kapasitas kelembagaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air terpadu; (5) masih diperlukan produk turunan peraturan perundangan yang menjadi amanat undang-undang sumber daya air sebagai acuan operasional.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, tantangan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain adalah: (1) mengefektifkan berbagai forum koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya air; (2) mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran berbasis wilayah dan berbasis isu prioritas bersama; (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air, masyarakat, dan para pihak lainnya; dan (4) menindaklanjuti pembentukan peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air terpadu.

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Untuk sumber daya kelautan, permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pengelolaannya antara lain: belum terintegrasinya sektor-sektor pendukung dalam pengelolaan sumber daya kelautan, karena masih adanya konflik kewenangan dan kepentingan antarsektor; belum memadainya inovasi pengembangan teknologi dan informasi kelautan; dan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung (transportasi, air bersih, listrik), khususnya di pulau-pulau kecil.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan adalah: (a) Penanganan kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengubah eksploitasi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan; (b) meminimalisasi dampak perubahan iklim global yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengurangi akses nelayan terhadap sumber daya kelautan; (c) mengubah paradigma pembangunan nasional dari *land bases* menjadi *archipelagic bases*; (d) mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; (e) mempertahankan kedaulatan NKRI dari pelanggaran pihak luar; dan (f) mengefisienkan tata kelola kelautan NKRI untuk peningkatan manfaat sumber daya kelautan.

Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan lingkungan hidup, kualitas tata ruang dan pengelolaan pertanahan memainkan peranan yang tidak kalah penting. Namun permasalahan

dan tantangan masih harus dihadapi dalam upaya peningkatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang adalah: a) Rencana Tata Ruang belum dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang; b) belum memadainya kapasitas kelembagaan dikarenakan kurangnya kualitas SDM; dan c) masih lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan masih rendahnya kualitas rencana tata ruang ruang yang disebabkan oleh keterbatasan informasi (peta, data geologi dan data daya dukung) mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.

Menyikapi permasalahan yang dihadapinya, tantangan dalam bidang tata ruang untuk kedepannya adalah peningkatan efektifitas implementasi Rencana Tata Ruang dalam berbagai sektor pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

Disamping itu, upaya penataan ruang akan membutuhkan kegiatan survei dan pemetaan yang membutuhkan biaya yang relatif besar. Namun demikian, data dan informasi yang dihasilkan selalu memiliki nilai strategis tinggi dan menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring kegiatan pembangunan. Nilai strategis dan biaya yang besar tersebut seringkali menjadi penyebab rendahnya pertukaran data dan informasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan survei dan pemetaan. Untuk meningkatkan efisiensi nasional dalam pengadaan dan penggunaan data dan informasi nasional, maka tantangan ke depan adalah perlu ditetapkan kebijakan nasional yang mengarahkan agar seluruh data dan informasi spasial yang diproduksi dan termasuk ke kategori barang publik dapat dikoordinasikan dalam suatu infrastruktur data spasial nasional.

Isu strategis penataan ruang yang dapat menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan ke depan adalah terjadinya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman/ perkotaaan, alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi non lindung, dan semakin maraknya pemekaran wilayah yang tidak didukung oleh penataan ruang yang terencana.

Dalam bidang pertanahan, dari perkiraan total 85 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 40 persen saja yang telah terdaftar atau tersertifikasi. Akibatnya, tidak saja kepastian hukum hak atas tanah belum memadai, tetapi juga terhambatnya akses terhadap sumberdaya produktif dan permodalan, terutama bagi kalangan petani, nelayan, transmigrasi serta usaha kecil dan menengah. Salah satu penghambat utama dalam pendaftaran tanah adalah belum memadainya infrastruktur pendaftaran tanah, terutama peta pertanahan, yang baru tersedia untuk 9,5 juta ha atau sekitar 5 persen dari total wilayah Indonesia.

Tantangan dari kondisi tersebut adalah tingginya resiko pendaftaran tanah ganda dan juga sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan kerap menjadi penghambat dalam membangun daya tarik investasi di daerah. Disamping itu kinerja pelayanan pertanahan juga berpengaruh terhadap akses atas tanah, yang mencakup salah satu faktor penting dalam menstimulasi investasi di daerah. Oleh sebab itu, penanganan sengketa serta ketersediaan kantor pertanahan yang memadai turut menjadi tantangan yang perlu dijawab dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2010. Permasalahan pokok lainnya berkenaan dengan aspek legal pertanahan, terutama belum sinkronnya peraturan perundangan terkait pertanahan ataupun belum tersedianya peraturan pada aras operasional.

Tantangan lain yang dihadapi adalah mengurangi ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Sekitar 62-87 persen aset ekonomi nasional yang meliputi tanah, tambak, kebun dan properti, hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia (data BPN). Selain itu, tercatat tanah terlantar seluas 13,8 juta ha (BPS, 2005). Ironisnya, rata-rata penguasaan tanah petani di Jawa diperkirakan hanya 0,2 ha per rumah tangga petani sehingga produktivitas dan kesejahteraan petani jauh dari layak. Menjawab tantangan tersebut, penataan P4T tetap perlu dilaksanakan pada tahun 2010. Melalui P4T diharapkan akan dapat diwujudkan pemilikan dan penguasaan tanah yang lebih berkeadilan, terutama bagi kalangan kurang mampu selain semakin menyelaraskan penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga tetap menjaga daya dukung lingkungan dan menegakkan prinsip pengelolaan SDA berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk revitalisasi perkotaan**,** permasalahan yang dihadapi adalah: terjadinya penurunan kualitas fisik dan lingkungan di pusat-pusat kegiatan penduduk di perkotaan seperti pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan. Dengan demikian tantangan ke depan yang dihadapi dalam upaya Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan antara lain adalah : melaksanakan peremajaan kota di kawasan kumuh di perkotaan.

B. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2010 DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2008 dan perkiraan 2009, serta tantangan yang dihadapi tahun 2009, tema pembangunan pada tahun 2010 adalah:

"**PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**"

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 8 (delapan) prinsip-prinsip pengarusutamaan dan 3 (tiga) isu-isu lintas sektor yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu:

- **Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.** Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
- **Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.** Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga tiang utama pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling menunjang dan terkait. Lingkungan hidup yang lestari merupakan modal dasar pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlanjut mutlak harus mempertimbangkan upaya pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk upaya yang

mendukung terhadap antisipasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan kedalam kegiatan prioritas pembangunan nasional terutama pada sektor-sektor pembangunan yang langsung terkait.

- **Pengarusutamaan gender.** Pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender adalah 'Alur Kerja Analisis Gender' (*Gender Analysis Pathway* – GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

- **Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (*good governance*)**. Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (*good public governance*), dunia usaha (*good corporate governance*) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.

- **Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.** Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal termasuk kawasan perbatasan, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

- **Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah**. Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pendesentralisasian pelayanan-pelayanan kementerian/lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

- **Pengarusutamaan padat karya**. Program padat karya produktif dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran, setengah penganggur, dan masalah kemiskinan

sementara (*transient poverty*). Sasaran pemanfaatan program ini adalah penduduk miskin yang untuk sementara waktu sedang menganggur atau setengah menganggur. Melalui program ini mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan penghasilan (*income generating*). Lapangan pekerjaan produktif dalam skema ini adalah pekerjaan manual di bidang pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, dan lain-lain. Penetapan kelompok sasaran, jumlah, jenis kegiatan, dan lokasi yangn dipilih, serta penentuan upah dalam pekerjaan yang dirancang di bawah upah minimum yang berlaku did aerah tersebut. Mekanisme sistem penyaluran dan dan pengelolaannya akan dilakukan secara transparan, dan secara teknis dan administrasi kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

- **Pengarusutamaan berdimensi kepulauan**. Pembangunan berdimensi negara kepulauan adalah pembangunan yang berorientasi pada pengembangan potensi kepulauan secara ekonomi, ekologis dan sosial yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut yang mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tata kelola wilayah lautan masih partial dan bias ke daratan sehingga kebijakan yang ada tidak utuh dan terintegrasi. Padahal, sebagai negara kepulauan, jika sebagian besar kebijakan dan pendekatan *archipelagic state* dapat dikedepankan, dan laut sebagai *center of attention* dari segala kebijakan yang dilaksanakan, maka lautan yang luas dengan berbagai potensi yang sangat besar akan dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kekayaan negara ini dapat kita jaga dengan baik sehingga tidak akan terjadi lagi perpindahan kepemilikan pulau-pulau terluar kita oleh negara lain serta dapat dikendalikan pencurian hasil laut di wilayah Indonesia, dan sebagainya.

- **Isu lintas-sektor tentang perlindungan anak**. Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

- **Isu Lintas Sektor tentang Penanggulangan HIV dan AIDS**. HIV dan AIDS merupakan salah satu ancaman dalam pembangunan sosial ekonomi dan telah menyebabkan kemiskinan dan keprihatinan bangsa-bangsa di dunia. Permasalahan HIV dan AIDS bukan hanya masalah kesehatan, namun mencakup permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, kemiskinan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, kependudukan, pemberdayaan perempuan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama serta moral dan budaya. Pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan HIV dan AIDS sangat penting, tidak hanya pada tingkat perencanaan, tetapi juga penganggaran, implementasi dan tata laksana kasus, baik di pusat maupun di daerah. Penanganan HIV dan AIDS memerlukan upaya komprehensif dengan melibatkan semua sektor terkait karena

dapat menyebabkan turunnya Umur Harapan Hidup dan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya yang dilakukan sejalan dengan komitmen dalam rangka pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), khususnya tujuan keenam tentang pengendalian penyebaran HIV dan AIDS dan penyakit menular lainnya.

- **Isu Lintas Sektor tentang Perbaikan Gizi**. Rendahnya status gizi akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena status gizi mempengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu, dan produktivitas kerja bahkan dapat menjadi beban bagi pembangunan. Masalah gizi timbul karena permasalahan di banyak sektor seperti pertanian, perdagangan, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu penanganannya memerlukan pendekatan lintas sektor antara lain dengan meningkatkan upaya sinkronisasi dan integrasi kebijakan lintas sektor dan lintas program.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJM II Tahun 2010-2014, kemajuan yang telah dicapai dalam RPJM I Tahun 2005-2009, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional
4. Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2010 ini dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan nasional, sektoral, dan kewilayahan. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang disajikan sebagai Lampiran Buku I. Sedangkan arah kebijakan pembangunan sektoral disajikan dalam Buku II untuk masing-masing bidang pembangunan. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dijabarkan dalam Buku III untuk masing-masing wilayah pembangunan.

C.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas 1. PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

SASARAN

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial pada tahun 2010 adalah tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 12 – 13,5 persen;

ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tingkat kemiskinan tersebut, kebijakan yang akan ditempuh adalah:

- Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat;
- Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan.
- Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial;

Prioritas 2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

SASARAN

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia pada tahun 2010 adalah:

Pendidikan:

1. Meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7-15 tahun yang ditandai dengan meningkatnya APK SD/MI/sederajat menjadi 117,15 persen (APM 2010 - 95,27 persen) dan APK SMP/MTs/sederajat menjadi 99,26 persen;
2. Meningkatnya akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi yang ditandai dengan meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat menjadi 71,3% dan APK PT menjadi 19,40%;
3. Meningkatnya akses terhadap pendidikan anak usia dini yang ditandai dengan meningkatnya APK PAUD menjadi 57,8 persen;
4. Menurunnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas untuk semua jenjang pendidikan dan meningkatnya angka melanjutkan
5. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk kesetaraan dan keadilan gender;
6. Membaiknya kemampuan keberaksaraan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 95,40 persen dan angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun menjadi 99,33 persen;
7. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik;

Kesehatan:

8. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan;
9. Seluruh penderita demam berdarah dengue (DBD), malaria dan Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) ditemukan dan diobati;

10. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
11. Tersedianya obat generik esensial (buffer stock), obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program, dan vaksin;
12. Meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan;
13. Seluruh penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta di kelas III rumah sakit;

Perbaikan Gizi:

14. Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
15. Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet);
16. Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul Vitamin A;
17. Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup;
18. Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI;

Keluarga Berencana:

19. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang antara lain ditandai dengan terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta yang 3,7 juta diantaranya adalah peserta KB baru miskin; meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta yang 11,9 juta diantaranya adalah peserta KB aktif miskin.

Kebudayaan:

20. Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.

Pemuda dan Olahraga:

21. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya budaya serta prestasi olahraga di tingkat nasional dan internaional.

Agama:

22. Meningkatnya kerukunan baik intern maupun antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam suasana aman dan damai merupakan prioritas sasaran pembangunan bidang agama.

ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;
- Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi;
- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik;
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit;
- Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan;

- Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- Pemantapan revitalisasi program KB;
- Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;
- Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya;
- Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga;
- Peningkatan dialog intern dan antar umat beragama;
- Internalisasi nilai-nilai universal agama, termasuk toleransi dan saling menghormati dalam kemajemukan.

Prioritas 3. PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL

SASARAN

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional pada tahun 2010 adalah:

1. Meningkatnya kinerja birokrasi untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya kepastian hukum melalui pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional serta menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari tumbuhnya iklim takut korupsi, dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indonesia;
3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, dan partai politik;
4. Meningkatnya kemanan nasional dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian, khususnya dunia investasi dan usaha;
5. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah.

ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Pengembangan sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
- Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas;
- Penguatan kapasitas pemerintah daerah;
- Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi;
- Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah;
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, dan partai politik;
- Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- Penguatan wilayah perbatasan;
- Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan;

- Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat;
- Peningkatan penggalangan keamanan nasional.

Prioritas 4. PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

SASARAN

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi pada tahun 2010 adalah:

1. Laju pertumbuhan ekonomi 5,0 persen;
2. Meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 7,1 persen;
3. Meningkatnya ekspor barang dan jasa sekitar 5,0 persen;
4. Meningkatnya jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata menjadi sekitar USD 7,8 miliar dan meningkatnya wisatawan nusantara menjadi sekitar 228 juta perjalanan.
5. Tumbuhnya pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 3,6 persen;
6. Tumbuhnya industri pengolahan sebesar 3,4 persen;
7. Tumbuhnya industri pengolahan non migas sebesar 3,9 persen;
8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 persen dari angkatan kerja;
9. Meningkatnya produktivitas dan akses UKM kepada sumberedaya produktif;

ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan daya tarik investasi;
- Penguatan daya saing ekspor;
- Revitalisasi industri manufaktur;
- Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
- Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif;
- Peningkatan ketahanan pangan;
- Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok;
- Pengelolaan APBN yang berkelanjutan;
- Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan;
- Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil;
- Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta;
- Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional;
- Peningkatan ketahanan energi.

Prioritas 5. PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

SASARAN

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim pada tahun 2010 adalah:

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui peningkatan pengendalian kebakaran hutan untuk mengurangi hotspot sebesar 10% dan peningkatan sistem informasi dini meteorologi, geologi, tsunami dan kebakaran hutan
2. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, melalui upaya rehabilitasi hutan seluas 100.000 hektar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas 1 yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan rahabilitasi lahan hutan 500.000 ha yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, penanganan illegal logging, pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan, dan pengendalian pencemaran lingkungan
3. Meningkatnya pengelolaan DAS di 18 unit DAS dan meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif di 21 provinsi
4. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya kelautan melalui peningkatan kemampuan dalam mengendalikan *illegal fishing* dan meningkatnya kapasitas daerah dalam mengembangkan dan mengelola wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu di 5 provinsi, serta peningkatan pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
5. Meningkatnya operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTR Kab/Kota yang didukung oleh meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah dan tertatanya struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah secara adil dan berkelanjutan; serta meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan kapasitas penanganan perubhan iklim, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya;
- Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan;
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu;
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan.

C.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTORAL

Pembangunan di **bidang sosial budaya dan kehidupan beragama** pada tahun 2010 diarahkan pada upaya:

Pertama: peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; peningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini; penguatan tata kelola pelayanan pendidikan dan kerja sama pemerintah dan swasta (*public-private partnership*) dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan;

Kedua: Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama pada daerah dengan aksesibiltas relatif

rendah; perbaikan gizi masyarakat, dengan fokus utama pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun, dan penanggulangan gizi lebih; pengendalian penyakit menular, terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan diare serta penyakit zoonotik, dan penguatan upaya eliminasi penyakit-penyakit terabaikan, seperti kusta, frambusia, filariasis, schistosomiasis serta penyakit baru maupun penyakit yang muncul kembali; pengendalian penyakit tidak menular terutama penyakit jantung, kanker, diabetes melitus, dan metabolisme sindrom serta penyakit gangguan kejiwaan; pengendalian faktor resiko lingkungan; peningkatan pembiayaan yang diikuti oleh efisiensi penggunaan anggaran; pengembangan jaminan pelayanan kesehatan, antara lain dengan pengembangan asuransi kesehatan wajib dan pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta; peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan nasional serta antisipasi persaingan global; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan penggunaan obat, terutama obat esensial termasuk penggunaan obat yang rasional, yang didukung oleh pengembangan peraturan perundangan dan peningkatan pemanfaatan bahan obat asli Indonesia; peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk mendorong penciptaan lingkungan dan peraturan yang kondusif; perbaikan manajemen kesehatan melalui pengembangan hukum dan administrasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, penapisan teknologi kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan;

Ketiga: pemantapan revitalisasi program KB yang mencakup antara lain: peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) dan rentan lainnya, PUS mupar (muda dan paritas rendah), serta daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta daerah dengan unmet need KB tinggi; peningkatan promosi dan pelayanan metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP);

Keempat: peningkatan akses dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan jabatan publik; pemastian hukum dan peraturan perundang-undangan tidak bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan; perkuatan kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah; dan peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan;

Kelima: peningkatan perlindungan anak antara lain melalui: penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak-hak anak menjadi peduli dan ramah anak dan memperkuat kelembagaan perlindungan anak; serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga yang antara lain melalui: peningkatan keserasian kebijakan kepemudaan; peningkatan pembinaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; peningkatan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga sesuai.

Keenam: peningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama yang antara lain melalui akses komunikasi dan dialog intern dan antarumat beragama, internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultur, serta pengembangan jaringan dan kerjasama majelis agama dengan pemerintah; peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama terhadap keluarga, masyarakat, serta peserta didik; peningkatan kualitas pelayanan agama untuk penyelenggaraan urusan agama; peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji; mengoptimalkan

pengelolaan dana sosial keagamaan; peningkatan kapasitas, kualitas dan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama; dan

Ketujuh: penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya nasional melalui: peningkatan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan penciptaan keserasian hubungan antarunit sosial dan budaya; peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, edukasi, dan rekreasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan.

Bidang Ekonomi

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ekonomi baik yang bersumber dari kondisi internal maupun eksternal, maka arah kebijakan di bidang ekonomi yang akan ditempuh pada tahun 2010 adalah:

Pertama: Mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui perkuatan ekonomi domestik. Perkuatan ekonomi domestik diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, efektifitas pengeluaran pemerintah serta ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata. Dari sisi produksi, peningkatan industri pengolahan non migas dilakukan melalui revitalisasi industri sedangkan peningkatan produksi sektor pertanian dilakukan melalui revitalisasi pertanian. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kebijakan diarahkan untuk menggerakkan sektor UMKM, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Kedua: Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perkuatan lembaga keuangan. Di sisi kebijakan fiskal, kebijakan diupayakan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan. Di sisi kebijakan moneter, kebijakan diarahkan untuk menjaga laju inflasi dan nilai tukar Rupiah. Perkuatan lembaga keuangan diarahkan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan.

Pembangunan di bidang **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** pada tahun 2010 diarahkan pada:

Pertama: Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) melalui ketiga unsurnya yaitu: (1) menata kelembagaan iptek; (2) penguatan sumberdaya iptek yang mencakup peningkatan kompetensi sumberdaya manusia serta peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana riset; serta (3) penataan jaringan iptek baik antar lembaga litbang maupun antara lembaga litbang dengan masyarakat pengguna.

Kedua: Peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan riset dan perekayasaan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, kegiatan-kegiatan riset dan perekayasaan tersebut diarahkan pada: (1) menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi; (2) mendukung kebutuhan untuk

bidang kehidupan. Dengan demikian peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek difokuskan pada: konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hayati; bioteknologi; energi; penerbangan dan keantariksaan; tenaga nuklir; pertanian, perikanan; peternakan, dan kehutanan; kesehatan dan kedokteran; pertahanan dan keamanan; teknologi informasi dan komunikasi; lingkungan hidup; nanoteknologi; perekayasaaan; dan sosial.

Pembangunan di **bidang sarana dan prasarana** mencakup penyediaan infrastruktur sumberdaya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi, ketenagalistrikan, serta pos dan telematika. Pada tahun 2010, arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana adalah:

Pertama: **Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal** (SPM) melalui: (1) rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan persyaratan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik; (2) peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan wilayah terdepan; (3) peningkatan ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin baik di perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan pulau-pulau terdepan. Selanjutnya arah kebijakan ini djabarkan sebagai berikut:

Sumber Daya Air: Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air diarahkan pada; pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, perkotaan dan industri; peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air; peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Transportasi: Pembangunan saran dan prasarana transportasi tahun 2010 diarahkan pada: (1) preservasi jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional yang mencakup pemeliharaan rutin dan berkala, serta peningkatan struktur jalan untuk mengembalikan pada kondisi awal; (2) rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk mempertahankan dan memulihkan tingkat pelayanan jasa transportasi; (3) memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar keselamatan dan keamanan internasional terutama untuk untuk pelayaran dan penerbangan ; (4) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah pedalaman serta penyediaan sarana angkutan perdesaan, subsidi operasi perintis, angkutan umum massal, dan PSO untuk angkutan penumpang kelas ekonomi baik untuk angkutan perkotaan maupun angkutan antarkota

Perumahan dan Permukiman: Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan fasilitasi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpendapatan rendah; peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan; peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaran pembangunan perumahan; peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman yang layak sesuai standar pelayanan minimum ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air

limbah, persampahan, dan drainase yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) maupun yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien, dan berkelanjutan;

Energi: Pembangunan infrastruktur energi diarahkan pada diversifikasi energi, untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional dan nasional untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ketenagalistrikan: Pembangunan ketenagalistrikan tahun 2010 diarahkan pada (1) pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan untuk kelistrikan desa dan daerah terpencil; dan (2) peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional.

Pos dan Telematika: Arah kebijakan pembangunan pos dan telematika tahun 2010 adalah (1) Pengalokasian APBN secara tepat sasaran (target oriented) dengan pengukuran kinerja berbasis output yang jelas dan memperhatikan keberlanjutan layanan; (2) mendorong kerjasama dengan BUMN dan swasta yang dipilih melalui proses yang selektif; (3) mendorong peran aktif masyarakat dan pengusaha lokal untuk memanfaatkan infrastruktur/layanan yang telah disediakan sebagai bagian dari upaya penciptaan demand.

Kedua: **Mendukung peningkatan daya saing sektor riil,** melalui: (1) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana untuk daerah yang mengalami bottle neck; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana khususnya untuk daerah-daerah yang permintaan terhadap jasa sarana dan prasarana tumbuh dengan cepat; (3) peningkatan kompatibilitas sarana dan prasarana dalam menunjang perkembangan sektor industri, pertanian, perdagangan baik dalam maupun luar negeri; (4) penataan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi persaingan usaha di bidang sarana dan prasarana; (5) optimalisasi sumber daya terbatas dalam pengembangan sarana dan prasarana; (6) peningkatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arah kebijakan masing-masing adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Air: **Meningkatkan** dan melestarikan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air secara memadai baik kuantitas maupun kualitasnya; mewujudkan pendayagunaan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan; mengendalikan dan mengurangi dampak kerusakan akibat banjir baik secara struktural maupun non struktural dan diutamakan pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekenomian; mengamankan daerah pantai dari bahaya abrasi dan erosi, diutamakan pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, daerah pariwisata dan pusat-pusat perekenomian penting serta pada pulau-pulau terdepan demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Transportasi: Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi pada koridor/lintas utama dan strategis lintas pada antarkota

maupun wilayah perkotaan; meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai; meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara inter dan antar moda; meningkatkan peran armada pelayaran dan armada udara baik untuk angkutan dalam negeri maupun luar negeri dengan memberlakukan sepenuhnya azas cabotage; menegakkan peraturan dalam penanganan muatan lebih melalui program zero overloading, konsolidasi dan pengawasan dimensi kendaraan.

Perumahan dan Permukiman: Pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat skala kawasan dan Instalasi Pengolahan Lumput Tinja (IPLT); pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); serta pengembangan sistem drainase termasuk pembangunan sistem drainase primer perkotaan.

Energi:: Intensifikasi pencarian sumber energi dan optimalisasi produksi energi, untuk mendorong peningkatan kegiatan pencarian cadangan energi baru secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak bumi, gas bumi dan batu bara guna meningkatkan produksi serta menjamin pasokan energi dalam negeri; penentuan harga energi dan subsidi tepat sasaran; konservasi energi pada seluruh tahap pemanfaatan; pelaksanaan kebijakan bauran energi (energi mix); pengendalian lingkungan hidup sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Ketenagalistrikan: Peningkatan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik; dan pemanfaatan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri.

Pos dan Telematika: Restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika ke arah konvergensi; optimalisasi sumber daya dalam pengembangan infrastruktur; peningkatan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan peningkatan kualitas sumber daya manusia TIK.

Ketiga: **Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)**, melalui: (1) penyempurnaan peraturan perundangan terkait dengan KPS, berikut petunjuk pelaksanaanya; (2) pembentukan institusi manajemen KPS, Pusat KPS dan simpul KPS di tingkat pusat dan daerah; (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas badan pemberi kontrak dalam penyiapan proyek KPS, baik di tingkat pusat dan daerah melalui pembentukan simpul KPS; (4) operasionalisasi lembaga keuangan non-bank yang mendukung pembangunan infrastruktur (Dana Penjaminan dan Dana Infrastruktur); (5) operasionalisasi kebijakan dan pedoman operasional mengenai pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang akan di-KPS-kan, termasuk peningkatan kemampuan dana pengadaan tanah; (7) terwujudnya kerjasama pemerintah dan swasta di proyek-proyek infrastruktur pada sub sektor jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta-api, air minum dan persampahan.

Pembangunan di bidang **Politik** diarahkan untuk: (1) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangannya demokrasi, serta penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik; (2) mengembangkan pendidikan politik; (3) memantapkan kesiapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan (4) memfasilitasi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi;

Pembangunan di bidang **pertahanan dan keamanan** pada tahun 2010 diarahkan untuk mewujudkan postur dan struktur menuju minimum essential force yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal; mendayagunakan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan; meningkatkan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat, dan penegakan hukum di laut; mencegah dan menanggulangi terorisme melalui pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen; menurunkan kejadian kriminal (criminal index); meningkatkan penuntasan kejahatan (clearing rate); meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba; meningkatkan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi dan penerimaan informasi negara; meningkatkan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi tehnologi intelijen; serta meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga Penyusun kebijakan Pertahanan-Keamanan Negara.

Pembangunan di bidang **Hukum dan Aparatur** pada tahun 2010 diarahkan pada: (1) pemantapan pembenahan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah termasuk pengharmonisasiannya untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin serta terpinggirkan; (2) penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia antara lain melalui peningkatan efektivitas penanganan perkara yang dilakukan oleh lembaga peradilan termasuk penyelesaian sengketa HAM melalui mediasi, dan melanjutkan upaya pencegahan korupsi melalui pembentukan strategi nasional Implementasi UNCAC; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; (4) peningkatan profesionalisme, integritas dan penerapan kode etik aparat penegak hukum dan sumber daya manusia hukum; (5) peningkatan kualitas mekanisme penganggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam proses peradilan serta memperkuat masyarakat untuk memperoleh akses keadilan; (6) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan manajemen di berbagai bidang pelayanan (services delivery/management); (7) pengembangan sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS melalui penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian negara, dan perbaikan tingkat kesejahteraan yang layak, adil dan berbasis kinerja; serta (8) penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam rangka mendorong peningkatan kinerja birokrasi pemerintah.

Pembangunan di bidang **Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang** mencakup pembangunan wilaya-wilayah strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan terisolir, daerah bencana, perkotaan, perdesaan, pengembangan keterkaitan kota-desa, tataruang, dan pertanahan dengan arah pembangunan:

- Percepatan pembangunan dan pertumbuhan **wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh** didorong untuk dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan berinvestasi di daerah.

- Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perbatasan menjadi *outward looking* maka Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (PP No.26/2008) menjadikan **kawasan perbatasan** sebagai kawasan strategis nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk menjadikan kawasan perbatasan terjadi pertumbuhan maka kota di kawasan perbatasan darahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

- Arah kebijakan percepatan **pembangunan daerah tertinggal dan terisolir** meliputi: (a) pembangunan sumberdaya manusia disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam lokal dan sesuai dengan standar industri, untuk meminimalkan atau menghilangkan konflik antara masyarakat lokal dengan indsutri; (b) setiap daerah harus menentukan sektor unggulan; (c) pengembangan komoditas unggulan secara terfokus; (d) pemberian insentif fisik dan nonfisik bagi pengembangan sektor/komoditas unggulan, diantaranya berupa keringanan pajak dan retribusi, pembangunan prasarana dan sarana, kemudahan perijinan, dan kepastian hukum; (e) pembangunan industri berbasis sumberdaya alam; (f) meningkatkan produktivitas untuk menciptakan daya saing daerah; dan (g) membangun alur pasar yang jelas, terutama UKM, melalui perantara perusahaan besar.

- Dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian **bencana** beserta tantangan dan permasalahannya di tahun 2010, kebijakan penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana diprioritaskan pada upaya-upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global, sebagai berikut: pengembangan kerangka kebijakan dan perencanaan pengurangan risiko bencana; pengembangan kelembagaan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana; peningkatan pendidikan kebencanaan dan penyadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana; serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

- Untuk **bidang** perkotaan**,** arah kebijakannya adalah: Pengembangan Sistem Informasi Perkotaan; Pengembangan Badan Kerjasama Antar Kota; Penyusunan Pedoman, Rencana dan Evaluasi Pedoman Pembangunan Kota /Antar Kota; Pengembangan Sistem Kelembagaan Ekonomi Perkotaan; Pengembangan Infrastruktur Kota; Pengembangan Ekonomi Kota Kecil dan Menengah; Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Kota Besar dan Metropolitan; Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Pedoman Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Kawasan Metropolitan.

- Dalam rangka mendukung **pembangunan perdesaan**, arah kebijakannya adalah (1) Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Perdesaan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (a) penguatan kelembaga masyarakat dan pemerintahan desa termasuk kelembagaan unit pengaduan masyarakat; (b) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan; (2) Peningkatan kemampuan ekonomi lokal melalui upaya-upaya sebagai berikut: (a) Penguatan lembaga

keuangan perdesaan; (b) Pengembangan diversifikasi usaha ekonomi perdesaan termasuk upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan; dan (c) pengembangan pasar desa.

- Dalam mendukung upaya **pengembangan keterkaitan kota-desa**, arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah didorong untuk (i) mendukung pengembangan keterkaitan ekonomi perkotaan dan perdesaan dengan menggunakan pendekatan komprehensivitas pembangunan ekonomi lokal maupun daerah, yaitu : (a) berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal (*locality*); (b) dilakukan sebagai insiatif daerah secara partisipatif dengan pendekatan pengembangan bisnis; (c) melibatkan seluruh stakeholder, dunia usaha dan pemerintah daerah, dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar tercapai keberlanjutan; (d) dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah melalui komoditi unggulan yang berorientasi pasar, berbasis sumber daya alam dan pengetahuan; (e) melibatkan kerjasama antar daerah untuk peningkatan promosi investasi, proses produksi dan wilayah pemasaran; (f) membutuhkan pendampingan dan fasilitasi menuju kemandirian dan keberlanjutan pembangunan; serta (ii) mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan mengutamakan keterkaitan antar wilayah, baik antara perkotaan dan perdesaan, maupun antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*/ tertinggal/ perbatasan) dalam bentuk keterkaitan fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, sosial, penyediaan pelayanan, serta organisasional, administrasi dan politik.

- Arah kebijakan prioritas bidang **tata ruang** dalam mencapai sasaran meliputi (1) Peningkatan kualitas implementasi rencana tata ruang, (2) Pemantapan struktur dan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah, (3) Penyelesaian peta dasar dan sistem informasi data spasial dalam upaya mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, dan (4) Peningkatan sosialisasi dan informasi peraturan perundangan mengenai penataan ruang.

- Arah kebijakan pembangunan dalam bidang **pertanahan** adalah: (1) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, termasuk mengembangkan strategi percepatan pendaftaran tanah; (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanahan melalui (a) Penyediaan infrastruktur pertanahan yang memadai (sistem informasi, peta, kantor pertanahan), (b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan (sektoral, pusat, dan daerah), (c) Peningkatan kapasitas SDM; (3) Menata struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui: (a) Penyediaan informasi spasial untuk pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*land use monitoring system*), (b) Redistribusi tanah, khususnya bagi petani dan masyarakat perdesaan (*asset reform*), (c) Fasilitasi penyediaan instrumen, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan redistribusi tanah dan sertifikasi lintas kementerian/lembaga (*access reform*).

Pembangunan di **bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** mencakup pembangunan pengelolaan sumber daya air, peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya kelautan, lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan **pengelolaan sumber daya air** diarahkan untuk melakukan rehabilitasi DAS dan Sub DAS yang masuk kategori kritis, serta meningkatkan pengelolaan DAS secara terpadu.

- Sementara itu, arah kebijakan **peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam** adalah untuk meningkatkan: (1) kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan; (2) pemanfaatan keanekaragaman hayati dan tumbuhan dan satwa liar (TSL); (3) perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman, (4) pengembangan penggunaan jasa lingkungan hutan dan wisata alam; dan (5) pengembangan Taman Nasional Model.

- Selanjutnya, peningkatan **pengelolaan sumber daya kelautan** diarahkan untuk: (1) meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan; (2) pengembangan potensi sumber daya kelautan melalui pendekatan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu; (3) pembangunan kelautan berkelanjutan yang terfokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis untuk pendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun perikanan, pariwisata bahari, energi, perhubungan laut dan industri maritim; (4) meningkatkan kapasitas SDM, Iptek dan riset kelautan dan perikanan; (5) meningkatnya upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (6) mengembangkan upaya mitigasi bencana laut, pesisir dan pencemaran laut.

- Pembangunan **lingkungan hidup** dalam upaya peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan kualitas daya dukung lingkungan diarahkan untuk: (1) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan untuk memenuhi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan; (2) Meningkatkan upaya penataan lingkungan melalui pendekatan pengkajian dampak dan daya dukung lingkungan, dan didukung dengan penataan ruang yang harmonis; (3) Meningkatkan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan; (4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup; (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sarana teknis pengendalian dampak lingkungan; (6) Meningkatkan kualitas data dan akses informasi lingkungan hidup secara terpadu sektor dan daerah.

- Pembangunan meteorologi, klimatologi dan geofisika dalam upaya **peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim** diarahkan untuk: (1) mendorong upaya penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai kegiatan dalam rangka menanggulangi terjadinya perubahan iklim, serta mendorong upaya-upaya pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terutama di daerah yang rawan perubahan iklim dan bencana alam; melakukan pemeliharaan menyeluruh peralatan yang telah terpasang, antara lain sensor, radar, AWS, ARG, AAQMS, peralatan manual lainnya serta sewa jaringan telekomunikasi sampai pengamanan sensor: (2) meningkatkan kecepatan diseminasi informasi peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim kepada masyarakat dengan melanjutkan pembangunan peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim (M/CEWS); (3) meningkatkan akurasi, jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi cuaca penerbangan dan kelautan untuk keselamatan pelayaran dan penerbangan dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan membangun sistem kalibrasi di Kantor Balai Besar; (4) melanjutkan pembangunan Gedung Operasional Utama yang akan mengkomodasi: Pusat Basis Data, Pusat Nasional Perpustakaan MKKuG, Pusat Sistem Telekomunikasi Terpadu dan Pusat Perbengkelan; (5) meningkatkan akurasi prakiraan iklim/musim untuk mendukung kegiatan pertanian dengan penguatan stasiun/pos kerja sama dan penelitian-penelitian di bidang klimatologi; (6) melakukan sosialisasi pengembangan dan evaluasi model iklim kepada masyarakat, metode diseminasi informasi potensi tsunami, serta produk informasi MKKuG lainnya; (7) meningkatkan pembinaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pembangunan sarana dan prasarana diklat untuk

mengoptimalkan fasilitas BMKG; (8) memperbaharui tarif jasa pelayanan informasi MKKuG; (9) meningkatkan sistem operasi pelayanan MKKuG di daerah; dan (10) membangun Pusat Nasional Pustaka MKKuG.

C.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Pelaksanaan pembangunan selama ini telah membawa berbagai kemajuan, namun masih belum memberikan hasil yang optimal terutama dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata kepada seluruh penduduk dan kemajuan yang seimbang bagi semua daerah. Pembangunan daerah masih dihadapkan dengan permasalahan utama yaitu masih tingginya kesenjangan antar daerah yang dicerminkan oleh belum meratanya persebaran penduduk dan ketenagakerjaan secara nasional, adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat, adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, serta kesenjangan pembangunan prasarana dasar antardaerah.

Ketidakmerataan persebaran penduduk antarwilayah ditunjukkan oleh gambaran kepadatan penduduk dengan konsentrasi penduduk di Jawa dan Bali, khususnya di Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 13.344 jiwa/Km2. Sementara itu, kepadatan penduduk terendah berada di Provinsi Papua dengan kepadatan hanya 7 jiwa/Km2 (SUPAS, 2005). Sedangkan dari gambaran angkatan kerja menurut wilayah menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja terbesar berada di Jawa yaitu sebesar 62,82% dari total angkatan kerja nasional, Sumatera sebesar 18,66%, Kalimantan sebesar 5,67%, Sulawesi sebesar 6,77%, sementara jumlah angkatan kerja Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara hanya sekitar 6,07% dari total nasional (BPS, 2008).

Sementara itu, kesenjangan pembangunan prasarana dasar antardaerah dapat ditunjukkan melalui jumlah penjualan listrik dari total energi terjual di tahun 2007 yaitu sebesar 171.733.29 GWh. Dari total energi terjual, penjualan listrik Jawa Bali mencapai 140.117,20 GWh atau sebesar 81,59% dari total energi terjual dan Sumatera sebesar 19.988,40 GWh atau 11,63% dari total energi terjual. Sedangkan penjualan listrik untuk Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua adalah sebesar 6,77% dari total energi terjual (ESDM,2007).

Kesenjangan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2006, jumlah provinsi dengan dengan IPM di atas rata-rata nasional sebanyak 15 provinsi dan sebagian besar berada di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, sedangkan provinsi dengan IPM di bawah rata-rata nasional sebagian besar berada di wilayah Indonesia bagian timur (BPS, 2006). Dalam hal kesenjangan ekonomi antarwilayah, kontribusi wilayah terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto nasional selama periode 2001-2007 terbesar berasal dari wilayah Jawa dan Bali dengan kontribusi rata-rata per tahun lebih dari 60%, diikuti oleh Wilayah Sumatera dengan kontribusi rata-rata per tahun lebih dari 22%, dan Wilayah Kalimantan dengan kontribusi rata-rata per tahun sekitar 9%. Sedangkan untuk Wilayah Sulawesi dan Wilayah Indonesia bagian timur lainnya memberikan kontribusi rata-rata per tahun kurang dari 5% (BPS, 2007).

Dengan memperhatikan tujuan nasional, arus perubahan dan berbagai tantangan tersebut, pembangunan berdimensi spasial atau wilayah menjadi penting, relevan dan mendesak dalam menjamin pembangunan secara merata ke seluruh wilayah. Pendekatan wilayah menegaskan perlunya pengembangan keunggulan dan daya saing wilayah, dan sekaligus penguatan keterkaitan antardaerah.

Pengembangan wilayah **Sumatera**, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang relatif strategis

di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah satu pusat perekonomian dunia. Sementara Sumatera bagian timur dan utara juga terbuka bagi pelayaran menuju kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Eropa. Dengan demikian, wilayah Sumatera berpotensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya.

Ke depan, pengembangan wilayah Sumatera perlu ditujukan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain melalui perbaikan jangkauan dan kualitas layanan publik, penguatan ketahanan budaya, peningkatan kemandirian, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan daya saing. Selain itu, wilayah Sumatera perlu juga diarahkan kepada upaya peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan serta mengarahkan Sumatera sebagai lumbung pangan. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di pelosok daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Untuk mendukung berbagai hal tersebut, pengembangan wilayah dan penataan ruang di Sumatera perlu dilakukan secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, zonasi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah **Jawa dan Bali** sebagai salah satu pulau besar di Indonesia dan menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks. Wilayah Jawa Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Namun, Jawa dan Bali memiliki persoalan klasik akibat sumberdaya yang tidak menyebar merata dan kondisi geografis yang bervariasi. Pertumbuhan dan perkembangan yang tidak seimbang antara wilayah utara dengan selatan, inefisiensi alokasi sumberdaya dalam mendukung pembangunan pulau dan kerusakan sumberdaya pada beberapa wilayah muncul sebagai akibat program-program pembangunan sektoral yang berdiri sendiri maupun ego daerah dalam mengekploitasi sumberdaya yang dimiliki. Ketidaksiapan sumberdaya manusia dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi menimbulkan persoalan pengangguran dan kantong-kantong kemiskinan baru. Wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi dalam pengembangannya juga harus dilakukan dengan keterpaduan program untuk mendukung alokasi sumberdaya yang efisien dan pertumbuhan yang lebih seimbang.

Ke depan kebijakan pengembangan wilayah Jawa-Bali perlu diarahkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Jawa-Bali melalui perbaikan jangkauan dan kualitas layanan publik. Selanjutnya wilayah Jawa-Bali juga perlu dipertahankan sebagai lumbung pangan nasional. Untuk menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN wilayah Jawa-Bali perlu dikembangkan menjadi pusat layanan jasa kesehatan dan pendidikan, pusat layanan perbankan, pusat pariwisata serta memiliki jaringan transportasi dengan standar internasional. Ke depan juga perlu diwujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Jawa bagian utara dan bagian selatan, dan keseimbangan wilayah Bali bagian utara dan selatan.

Pengembangan wilayah **Kalimantan** mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat dan tengah Indonesia dan berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Posisi Kalimantan sangat strategis mengingat dalam konteks keterkaitan antar wilayah, Kalimantan secara posisi berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar di Indonesia.

Sebagai satu kesatuan wilayah, Kalimantan sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumberdaya alam dan sumber daya mineral. Untuk itu, pengembangan Kalimantan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan pemanfaatan dan

pengelolaan berbagai sumber daya alam dan mineral dengan tetap mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah ekploitasi yang berlebihan, dan mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah. Sementara itu, dalam upaya peningkatan standar hidup masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar. Mengingat kondisi geografis Kalimantan yang cukup luas, maka untuk mendorong perekonomian dan perdagangan di wilayah dan antar wilayah di Kalimantan perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).

Pengembangan wilayah **Sulawesi**, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat dan tengah Indonesia dan berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Posisi Sulawesi sangat strategis mengingat dalam konteks keterkaitan antar wilayah, Sulawesi secara posisi berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar di Indonesia serta memiliki potensi perdagangan langsung dengan negara luar sehingga dapat dikatakan wilayah Sulawesi memiliki akses perdagangan yang cukup strategis.

Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan sebagai pusat pembangunan di Indonesia Bagian Timur melalui pengembangan kerjasama antarwilayah dan keterkaitan antarwilayah di Bagian Timur Indonesia. Ke depan pengembangan wilayah Sulawesi perlu diarahkan pada berbagai upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik dasar. Untuk meningkatkan mobilitas sumberdaya dan penduduk sehingga dapat mendorong perdagangan dan perekonomian maka perlu dilakukan peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).

Terkait dengan berbagai sektor unggulan di Sulawesi perlu didorong melalui berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan sehingga dapat mendorong laju perekonomian sekaligus sebagai upaya untuk menjadikan Sulawesi sebagai lumbung pangan ke depan.

Pengembangan wilayah **Nusa Tenggara**, sebagai wilayah kepulauan dengan gugusan pulau kecil yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, perlu dilakukan dengan kebijakan dan progam yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Wilayah Nusa Tenggara yang terletak di sebelah timur wilayah Jawa-Bali yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya mendapat manfaat dari interaksi ekonomi yang terjadi selama ini. Wilayah Nusa Tenggara yang tersebar telah menghambat mobilitas sumberdaya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta munculnya potensi konflik dan politik-keamanan dengan penduduk Timor Leste.

Ke depan, pengembangan wilayah Nusa Tenggara perlu diarahkan pada berbagai upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Nusa Tenggara serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Nusa Tenggara terhadap pelayanan publik dasar. Sebagai satu kesatuan wilayah, Nusa Tenggara sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumberdaya alam terutama perikanan, wisata bahari, hutan dan perkebunan. Potensi sumberdaya tersebut cukup besar sehingga perlu ada peningkatan pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah serta mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Nusa Tenggara bagian barat dan timur. Arah kebijakan yang penting lainnya adalah meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar

(jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon) sehingga dapat meningkatkan kontribusi perekonomian dan perdagangan di Nusa Tenggara.

Pengembangan wilayah **Maluku**, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau kecil yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Filipina, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Tantangan terbesar adalah dalam upaya memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau, dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. Posisi kepulauan yang tersebar seringkali membuat program pembangunan yang dibuat hanya memfokuskan pada satu pulau tertentu dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan program dalam satu kesatuan tata ruang.

Sebagai satu kesatuan wilayah, Maluku dan Maluku Utara memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumberdaya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumberdaya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Potensi sumberdaya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih tersedia peluang yang cukup bagipengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Untuk itu, pengembangan wilayah Maluku perlu diarahkan pada upaya peningkatan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara, peningkatan produktivitas dan pemanfaatan sumberdaya laut dan perkebunan, peningkatan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut dan udara serta mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian utara dan bagian selatan, wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil

Pengembangan wilayah **Papua** sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit dibanding wilayah lainnya. Papua memiliki akses paling terbuka dengan pihak luar dengan potensi sumberdaya alam cukup besar di sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan dan juga memiliki tingkat kerawanan untuk pelarian sumberdaya keluar wilayah Indonesia. Dengan letak geografis paling luar, wilayah Papua juga mendapat sorotan yang lebih besar dari pihak luar terkait dengan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang terutama persoalan politik dan keamanan.

Tujuan pengembangan wilayah Papua ke depan ditujukan untuk mengatasi permasalahan kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian yaitu dengan meningkatkan standar hidup masyarakat Papua melalui peningkatan terhadap pelayanan publik yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan. Untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua ke depan, perlu dilakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah serta perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.

Dari sisi kondisi geografis, wilayah Papua terkendala oleh hambatan mobilitas sumberdaya dan penduduk akibat minimnya sarana dan prasarana. Luasnya wilayah Papua dengan pemanfaatan yang masih sangat rendah membutuhkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan jaringan infrastruktur yang memadai. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon) yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua.

=====oXo=====

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BAB 3
KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2008, perkiraan tahun 2009, sasaran-sasaran pokok tahun 2010, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2010 tersebut akan dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

A. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN TAHUN 2009

Secara garis besar, kondisi ekonomi makro tahun 2008 dan perkiraannya di tahun 2009 adalah sebagai berikut.

Pertama, sebagai dampak dari gejolak eksternal, stabilitas ekonomi mengalami tekanan yang cukup berat. Dalam keseluruhan tahun 2008, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.681 per dolar AS atau melemah 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya; laju inflasi mencapai 11,1 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,6 persen; serta cadangan devisa mencapai USD 51,6 miliar, atau turun USD 5,3 miliar dibandingkan tahun 2007. Tekanan terhadap stabilitas moneter terus berlanjut hingga memasuki tahun 2009. Pada akhir bulan Maret 2009, nilai tukar rupiah mencapai Rp 11.575 per USD dan laju inflasi setahun (*y-o-y*) mencapai 7,9 persen.

Kedua, dalam kondisi eksternal yang cukup berat, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Dalam tahun 2008, ekonomi tumbuh 6,1 persen, lebih rendah dari tahun 2007 yang besarnya 6,3 persen. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi yang meningkat, kemampuan ekspor barang dan jasa yang cukup terjaga, serta ditopang oleh daya beli masyarakat yang membaik. Dalam keseluruhan tahun 2008, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 11,7 persen; penerimaan ekspor meningkat 9,5 persen; dan konsumsi masyarakat meningkat 5,3 persen.

Ketiga, terjaganya momentum pertumbuhan ikut meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Maret 2008, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 35,0 juta orang (15,4 persen) atau berkurang 2,2 juta dibandingkan Maret 2007. Dalam Februari 2008 – Februari 2009 tercipta lapangan kerja baru bagi 2,44 juta orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 9,43 juta orang (8,46 persen) menjadi 9,26 juta orang (8,14 persen).

EKONOMI DUNIA

Dalam keseluruhan tahun 2008, perekonomian dunia mengalami perlambatan dan tumbuh 3,2 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang besarnya 5,2 persen. Ekonomi Amerika Serikat pada triwulan IV tahun 2008 tumbuh minus 0,8 persen (*y-o-y*) atau secara keseluruhan pada tahun 2008 hanya tumbuh 1,1 persen, padahal tahun 2007 tumbuh 2,0

persen. Dari penggerak pertumbuhan ekonominya, konsumsi masyarakat AS tumbuh negatif sejak triwulan III/2008 dan mencapai minus 1,5 persen pada triwulan IV/2008 (*y-o-y*). Adapun investasi turun 9,8 persen pada triwulan IV/2008 (*y-o-y*) dengan investasi non residensial yang terus melemah sejak triwulan II/2006. Demikian pula dengan Jepang sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dunia yang tumbuh negatif 0,6 persen (*y-o-y*) pada tahun 2008 (tahun 2007 tumbuh 2,4 persen). Adapun ekonomi Asia ternyata terpengaruh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. China dan India, dua negara Asia yang menyumbang besar pada pertumbuhan ekonomi dunia, melambat dibawah perkiraan. Pertumbuhan ekonomi China dan India pada triwulan IV/2008 melambat menjadi 6,8 persen dan 5,3 persen (*y-o-y*), jauh dibawah perkiraan semula yang masing-masing mencapai 8,0 persen dan 6,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, menurunkan permintaan terhadap komoditi dunia termasuk energi. Sejak bulan Agustus tahun 2008 hingga bulan Maret 2009, harga komoditi menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun terdapat perbaikan harga pada bulan Januari dan Maret 2009, namun kenaikan ini lebih disebabkan pengurangan produksi. Pada akhir tahun 2008, harga spot minyak mentah *West Texas Intermediate* (WTI) mencapai USD 41,4 per barel atau 54,7 persen lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2007. Pada akhir bulan April 2009, harga spot minyak mentah WTI meningkat hingga mencapai USD 49,7 per barel akibat pembatasan produksi minyak mentah dunia.

Turunnya harga komoditi dunia telah ikut andil dalam melunakkan tekanan inflasi global. Laju inflasi AS turun dari 5,6 persen pada bulan Juli 2008 menjadi 0,0 persen pada bulan Januari 2009 dan terus menurun hingga mencapai deflasi 0,7 persen pada bulan April 2009. Demikian pula inflasi Jepang dan Uni Eropa yang turun masing-masing dari 2,4 persen dan 4,1 persen pada bulan Juli 2008, menjadi minus 0,3 persen pada bulan Maret 2009 dan 0,6 persen pada bulan April 2009.

Guna mengatasi penurunan ekonomi lebih dalam, negara-negara maju menempuh kebijakan moneter yang lebih longgar. Sejak bulan Oktober tahun 2008, suku bunga acuan di berbagai negara di dunia secara bertahap mulai diturunkan. Pada bulan Desember 2008, suku bunga Fed Fund Rate mencapai 0,25 persen turun dibandingkan bulan Desember 2007 yang mencapai 4,25 persen. Demikian pula dengan *Japan Official Discount Rate* dan *Euro Refinancing Rate* yang masing-masing mencapai 0,30 persen dan 2,50 persen pada periode yang sama atau turun dibandingkan bulan Desember 2007 yang masing-masing mencapai 0,75 persen dan 4,0 persen. Kecenderungan penurunan kedua suku bunga ini terus berlanjut dan masing-masing mencapai 0,1 persen dan 1,0 persen pada bulan Mei 2009.

Kebijakan menurunkan suku bunga tersebut belum mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global. Indeks harga saham di berbagai pasar bursa dunia masih tertekan. Indeks saham Dow Jones di Amerika Serikat yang mencapai 8.776, pada akhir bulan Desember 2008 melemah menjadi 8.168 pada akhir bulan April 2009. Demikian pula dengan indeks Nikkei 225 di bursa saham Tokyo, yang mencapai 8.860 pada akhir bulan Desember 2008 menjadi 8.828 bulan April 2009.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan melemahnya indeks harga saham menurunkan kepercayaan masyarakat akan proses pemulihan ekonomi global. Berdasarkan *Bloomberg Professional Confidence Index* pada bulan Desember 2008 indeks kepercayaan masyarakat dunia mencapai 6,1, turun dibandingkan awal awal tahun 2008 yang mencapai 21,0, dan terus menurun hingga mencapai 5,9 pada bulan Maret 2009.

MONETER, PERBANKAN DAN PASAR MODAL

Tekanan eksternal berupa melemahnya permintaan dan harga komoditas di pasar dunia dan meluasnya dampak krisis keuangan global berpengaruh pada stabilitas dalam negeri. Dengan kebijakan moneter yang melonggar dan berhati-hati, serta pengamanan sektor keuangan di dalam negeri, stabilitas ekonomi dapat dijaga.

Perkembangan nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi. Nilai tukar Rupiah menguat dari Rp9.419,-/USD pada bulan Desember 2007 menjadi Rp9.118,-/USD pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta. Nilai tukar kemudian melemah dan menjadi Rp12.151,-/USD pada bulan November 2008 terkait dengan adanya pembalikan dana keluar negeri utuk mencari investasi aman (*safe haven*) sebagai dampak dari krisis keuangan global. Selanjutnya, nilai tukar menguat kembali menjadi Rp10.400,-/USD pada awal Mei 2009 karena membaiknya neraca perdagangan seiring dengan adanya penurunan impor yang lebih besar dibanding penurunan ekspor, dan pemasukan dana luar negeri.

Selama tahun 2008 inflasi mencapai 11,06 persen. Tingginya inflasi terjadi karena kenaikan harga yang tinggi pada *volatile foods* dan *administered price*. *Volatile foods* meningkat tajam terutama pada awal tahun akibat imported inflation seiring dengan melonjaknya harga komoditas di pasar dunia seperti gandum, kedelai, jagung, dan minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO). Sementara itu *administered price* meningkat dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 28,7 persen pada akhir Mei 2008 untuk menahan lonjakan subsidi BBM dengan meningkatnya harga minyak dunia. Tekanan inflasi *administered prices* juga berawal dari kenaikan harga minyak tanah dan elpiji terkait dengan program konversi. Inflasi pada bulan Januari 2008 sebesar 7,36 persen (y-o-y) meningkat menjadi 10,38 persen (y-o-y) pada bulan Mei 2008. Inflasi terus meningkat sehingga pada bulan September 2008 mencapai 12,14 persen.

Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain kebijakan stabilisasi pangan secara terpadu melalui subsidi bahan pangan dan operasi pasar. Sejalan dengan menurunnya harga minyak mentah dan komoditi lainnya di pasar internasional, inflasi menurun secara bertahap menjadi 11,06 persen pada bulan Desember 2008 dan menjadi 7,31 persen pada bulan April 2009.

Menurunnya inflasi pada akhir tahun 2008 memberikan cukup ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan perubahan kebijakan moneter yang semakin longgar. Kebijakan pengendalian moneter yang sebelumnya mengetat, yaitu dengan menaikkan *BI rate* naik secara bertahap dari sebesar 8,0 persen pada bulan April 2008 menjadi 9,50 persen pada bulan Oktober 2008, kemudian dilonggarkan melalui penurunan *BI rate* menjadi 9,25 persen pada bulan Desember 2008, 8,75 persen pada bulan Januari 2009 dan 7,25 persen pada awal Mei 2009. Agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, penurunan *BI rate* diharapkan dapat diikuti penurunan suku bunga perbankan. Penurunan *BI rate* pada awal Desember 2008 belum diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan dalam jangka pendek kecuali suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit investasi, karena antara lain disebabkan oleh kehati-hatian perbankan terhadap risiko perbankan.

Sampai dengan Desember 2008 kredit tumbuh sebesar 30,7 persen dengan nilai Rp1.300,2 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan 2007 yang sebesar 26,4 persen (y-

o-y). Pada akhir triwulan I-2009 (Maret 2009), pertumbuhan kredit bank umum masih relatif cukup tinggi yaitu sebesar 26,1 persen (y-o-y). Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank tumbuh sebesar 16,2 persen (y-o-y) dari Rp1.528,2 triliun pada akhir 2007 menjadi Rp1.775,2 triliun pada akhir 2008, lebih lambat dibandingkan akhir tahun 2007 yang tumbuh sebesar 17,7 persen (y-o-y). Terjaganya kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor pertumbuhan simpanan masyarakat yang tetap tinggi. Tercatat sampai dengan Maret 2009, simpanan masyarakat tumbuh mencapai Rp1.801,1 triliun (meningkat 21,5 persen/y-o-y).

Seiring dengan perkembangan tersebut, rasio pinjaman terhadap simpanan *(loan to deposit ratio – LDR)* naik dari 66,3 persen pada tahun 2007 menjadi 74,6 persen pada akhir 2008. Memasuki tahun 2009, LDR bank umum relatif stabil dibandingkan dengan akhir 2008 yaitu sebesar 73,1 persen (Maret 2009). Untuk sektor UMKM, kredit bank umum yang berskala mikro, kecil dan menengah (kredit UMKM) meningkat sebesar 26,1 persen (y-o-y) pada akhir 2008 dengan nilai Rp633,9 triliun yang terdistribusi 8,6 persen untuk kredit investasi; 39,0 persen untuk kredit modal kerja, dan 52,4 persen untuk kredit konsumsi. Tingginya penyaluran kredit UMKM di tahun 2008, berlanjut pada tahun 2009. Tercatat sampai dengan bulan Maret 2009 kredit bank umum untuk UMKM tumbuh sebesar 22,9 persen dengan nilai Rp637,2 triliun, dengan komposisi sebesar 38,4 persen kredit modal kerja; 8,5 persen kredit investasi dan 53,0 persen merupakan kredit konsumsi.

Ketahanan sektor perbankan Indonesia tahun 2008 masih cukup kuat. Rasio kecukupan modal *(capital adequacy ratio – CAR)* bank umum sebesar 16,8 persen pada tahun 2008 dan terus meningkat menjadi 18,0 persen pada akhir bulan Maret 2009, masih jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan batas minimal 8,0 persen. Terkait dengan potensi kredit macet, tingkat kredit berkinerja buruk *(non performing loan – NPL)* bank umum kita juga turun menjadi 3,2 persen pada tahun 2008 dari 4,1 persen pada tahun 2007. Namun demikian, memasuki tahun 2009 patut diwaspadai kecenderungan meningkatnya kredit macet, tercermin dari meningkatnya NPL hingga mencapai 3,9 persen pada bulan Maret 2009. Terjadinya krisis keuangan dan moneter internasional yang mempengaruhi perkembangan perdagangan perdagangan dan produksi dunia terutama pada akhir tahun 2008, menghambat perkembangan kredit pada awal tahun 2009 meskipun diperkirakan lebih membaik pada pertengahan atau akhir tahun 2009.

Goncangan pasar modal internasional dengan *Wall Street* di Amerika Serikat sebagai episentrumnya secara cepat menjalar dan menular ke negara-negara lainnya, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, Jepang dan Cina sehingga berimbas pula kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI yang mencapai 2.830,3 pada 9 Januari 2008, menurun secara bertahap menjadi 2.165,9 pada akhir Agustus 2008, dan menurun secara bergejolak menjadi 1.355,4 pada akhir 2008. Penurunan IHSG didorong pula oleh keluarnya sebagian investor asing dari bursa. Pada akhir Februari 2009 IHSG masih mengalami penurunan menjadi 1.285,5 poin. Memasuki awal Mei 2009 IHSG sudah mulai meningkat menjadi 1.729,6 poin. Meskipun masih sulit diprediksi kapan krisis keuangan global ini akan berakhir, namun pada akhir tahun 2009 diharapkan pasar modal berkembang lebih stabil dan mengalami peningkatan jika upaya-upaya intervensi secara terkoordinasi dari seluruh negara-negara di dunia untuk menanggulangi krisis global tersebut terbukti efektif.

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya harga-harga komoditi dunia kinerja neraca pembayaran tetap terjaga. Pada tahun 2008, total penerimaan ekspor mencapai USD 139,6 miliar, atau naik 18,3 persen dibandingkan tahun 2007 (Sumber: Bank Indonesia). Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 27,5 persen dan 15,8 persen. Sementara itu dalam tahun 2008, impor meningkat menjadi USD 116,7 miliar, atau naik 36,9 persen. Peningkatan ini didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masing-masing naik sebesar 24,6 persen dan 40,4 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk *income* dan *current transfer*) yang mencapai USD 22,6 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 mencapai sekitar USD 0,3 miliar turun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai USD 10,5 miliar.

Investasi langsung asing (neto) mencapai surplus sebesar USD 2,0 miliar didorong oleh investasi langsung asing yang masuk sebesar USD 7,9 miliar. Pada semester I/2008 arus masuk investasi portofolio meningkat, namun pada semester II/2008 cenderung melambat. Hal ini terutama dipengaruhi oleh arus modal keluar dari para investor guna memenuhi kebutuhan konsolidasi keuangan global, yang pada akhirnya berimbas pada pelepasan surat utang negara (SUN) dan surat berharga Bank Indonesia (SBI) yang terjadi selama semester II/2008. Secara keseluruhan tahun 2008, investasi portofolio neto mencapai USD 1,7 miliar turun dibandingkan tahun 2007 (USD 5,6 miliar) dengan investasi portofolio yang masuk sebesar USD 3,0 miliar. Adapun arus modal lainnya pada tahun 2008 mengalami defisit sebesar USD 6,2 miliar didorong oleh investasi lainnya di luar negeri sebesar USD 10,0 miliar. Dengan perkembangan ini neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2008 mengalami defisit USD 1,9 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 51,6 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 4,0 bulan impor.

Hingga akhir triwulan I/2009, total penerimaan ekspor mencapai USD 23,9 miliar atau turun dibandingkan dengan triwulan I/2008 yang mencapai USD 34,4 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan melemahnya nilai ekspor non-migas sebesar 23,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan impor selama triwulan I/2009 juga melambat dan mencapai USD 17,7 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 26,9 miliar. Secara keseluruhan nilai transaksi berjalan pada triwulan I/2009 mencapai surplus USD 1,8 miliar.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial hingga akhir triwulan I/2009 mencapai surplus USD 2,4 miliar, terutama didorong oleh arus masuk modal asing langsung neto dan arus masuk modal portfolio yang masing-masing mencapai USD 2,7 miliar dan USD 1,9 miliar. Sedangkan defisit investasi lainnya menurun dan mencapai USD 2,3 miliar. Dengan gambaran tersebut cadangan devisa pada akhir triwulan I/2009 mencapai USD 54,8 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor.

KEUANGAN NEGARA.

Dalam tahun 2008, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberi stimulus pada perekonomian dengan tetap menjaga ketahanan fiskal. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi tekanan yang sangat berat baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap perekonomian Indonesia.

Bentuk dari stimulus fiskal yang dilakukan terlihat dalam peningkatan belanja negara, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah, sebesar 30 persen dibandingkan

tahun 2007. Belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk belanja pegawai dan barang, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dasar, melindungi hajat hidup masyarakat dalam bentuk subsidi yang lebih terarah, serta memenuhi pembayaran utang baik dalam maupun luar negeri. Adapun kebijakan belanja ke daerah diarahkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sementara itu, penerimaan negara diarahkan terutama untuk menggali sumber penerimaan dalam negeri baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2008, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 658,7 triliun atau naik 34,2 persen terutama didorong oleh pajak dalam negeri yang meningkat 32,4 persen. Adapun penerimaan bukan pajak meningkat lebih tinggi, yaitu sebesar 49,2 persen. Hal ini terutama didorong oleh tingginya realisasi penerimaan migas akibat dari tingginya rata-rata harga minyak bumi sepanjang tahun 2008. Penerimaan migas tersebut mencapai sebesar Rp 209,7 triliun atau meningkat 68,1 persen dibandingkan tahun 2007. Dengan perkembangan ini, defisit anggaran pada tahun 2008 dapat ditekan pada tingkat sebesar Rp 3,3 triliun atau 0,1 persen PDB, jauh dibawah target dalam APBN-P yang sebesar 2,1 persen PDB.

Pada tahun 2009, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk memberi stimulus kepada perekonomian namun dengan terus menjaga ketahanannya. Hal ini dilakukan mengingat dampak terberat dari krisis ekonomi global diperkirakan terjadi dalam tahun ini. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang ditempuh ditujukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dengan memperluas program stimulus ekonomi melalui APBN 2009; melakukan perubahan asumsi dasar untuk memberikan sinyal yang tepat kepada publik; serta melakukan beberapa penyesuaian terhadap besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran.

Arah kebijakan stimulus fiskal yang ditempuh bertujuan untuk: (i) mempertahankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui berbagai insentif perpajakan dan pemberian subsidi, serta bantuan langsung tunai; (ii) mencegah timbulnya PHK secara luas dan meningkatkan daya tahan usaha dalam menghadapi krisis antara lain melalui penurunan berbagai tarif perpajakan dan bea masuk, potongan tarif listrik, subsidi bunga, serta pemberian kredit usaha rakyat; (iii) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan belanja infrastruktur padat karya melalui penambahan anggaran untuk infrastruktur; serta (iv) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meneruskan reformasi di seluruh kementerian negara/lembaga (K/L).

Dengan langkah-langkah tersebut diatas, pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp 848,6 triliun atau 15,5 persen PDB, lebih rendah Rp 137,2 triliun bila dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp 985,7 triliun atau 18,5 persen PDB. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan penerimaan dalam negeri, baik berupa penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak sebagai dampak dari krisis ekonomi global.

Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 988,1 triliun atau 18,0 persen PDB, lebih rendah Rp 49,0 triliun bila dibandingkan dengan anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2009 yang besarnya Rp 1.037,1 triliun atau 19,5 persen PDB. Penurunan anggaran belanja tersebut terutama disebabkan oleh beban belanja subsidi yang menurun menjadi Rp 123,5 triliun atau 2,3 persen PDB dari Rp 166,7 triliun atau 3,1 persen PDB yang ditetapkan dalam APBN 2009. Penurunan subsidi ini disebabkan oleh perubahan asumsi harga minyak yang cukup besar dari US$80 per barel menjadi US$45 per barel.

Perkembangan penerimaan dan belanja negara di atas, mendorong peningkatan defisit anggaran dalam APBN Penyesuaian Tahun 2009 (stimulus fiskal) sebesar 1,5 persen PDB atau meningkat dari 1,0 persen PDB menjadi 2,5 persen PDB. Selanjutnya stok utang pemerintah diperkirakan sebesar 31,3 persen PDB.

PERTUMBUHAN EKONOMI.

Stabilitas ekonomi yang membaik serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong kegiatan ekonomi mampu memulihkan kembali momentum pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008 perekonomian tumbuh sebesar 6,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya (6,3 persen).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 11,7 persen dan 9,5 persen. Sejak triwulan IV tahun 2007 hingga triwulan III tahun 2008, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh dua digit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 5,3 persen dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 10,4 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen. Adapun industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,0 persen. Pertumbuhan ekonomi didorong pula oleh pertumbuhan sektor tersier terutama pengangkutan dan telekomunikasi; listrik, gas dan air bersih; serta konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 16,7 persen; 10,9 persen, dan 7,3 persen.

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan dengan triwulan III – 2008 (*q-to-q*), dan dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2007 meningkat 5,2 persen (*y-o-y*) yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen di triwulan II, dan 6,4 persen di triwulan III. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2008 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa yaitu minus 5,5 persen dibandingkan triwulan III-2008 (*q-to-q*) dan hanya meningkat 1,8 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2007 (*y-o-y*). Melemahnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak serta menurunnya harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Di samping pertumbuhan ekspor yang melambat, investasi juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV-2008, yaitu hanya meningkat 0,8 persen dibandingkan dengan triwulan III-2008.

Pada triwulan I-2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4 persen (y-o-y). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing-masing tumbuh 19,2 persen dan 5,8 persen. Sedangkan ekspor mengalami pertumbuhan negatif sebesar 19,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen. Dari sektor tersier, pertumbuhan yang tinggi terdapat pada sektor listrik, gas dan air; dan pengangkutan dan telekominikasi yang tumbuh 11,4 persen dan 16,7 persen. Tekanan terhadap perekonomian nasional diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2009, sehingga pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berkisar antara 4,0 – 4,5 persen.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2010

Kondisi ekonomi tahun 2010 akan dipengaruhi oleh lingkungan eskternal yang diperkirakan lebih baik dari tahun 2009. Gejolak keuangan global diperkirakan mereda. Langkah-langkah yang ditempuh oleh negara-negara maju diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasional yang lebih baik dan menggerakkan kembali bursa saham global.

C. SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2010

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2010 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen dan laju inflasi sekitar 5 persen. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,0 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 12,0 - 13,5 persen pada tahun 2010.

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih dengan tumbuh 5,0 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai pulihnya perekonomian global yang mendorong naiknya investasi dan tumbuh positipnya ekspor nonmigas, dan masih terjaganya daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh tumbuhnya konsumsi masyarakat.

Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa tumbuh masing-masing sebesar 7,1 persen dan 5,0 persen. Sejalan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik maka diperkirakan impor barang dan jasa tumbuh 6,1 persen. Dalam keseluruhan tahun 2010, dengan terjaganya stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat maka diperkirakan konsumsi masyarakat tumbuh 4,2 persen.

Dari sisi produksi, sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,6 persen dengan peningkatan yang tinggi pada produksi tanaman bahan makanan. Industri pengolahan tumbuh 3,4 persen dengan industri pengolahan non migas yang sudah mulai mengalami pemulihan dengan tumbuh 3,9 persen sejalan dengan mulai membaiknya investasi dan meningkatnya ekspor nonmigas. Sedangkan sektor tersier juga mengalami pemulihan dibandingkan tahun 2009, tumbuh 6,5 persen; 6,8 persen; 7,3 persen; 9,7 persen dan 4,6 persen untuk sektor listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan; hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; dan jasa-jasa.

Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2010, dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.689,6 triliun (28,2 persen per PDB) yang terdiri dari investasi swasta dan pemerintah.

2. STABILITAS EKONOMI

Stabilitas ekonomi dalam tahun 2010 tetap dijaga melalui kebijakan moneter yang kondusif antara lain melalui Koordinasi Tim Pengendali Inflasi serta kebijakan fiskal berkelanjutan.

a. MONETER

Seiring membaiknya perekonomian global pada tahun 2010, ekspor dan arus masuk modal luar negeri diperkirakan akan meningkat serta kebijakan moneter yang mendukung, maka stabilitas nilai tukar Rupiah diperkirakan semakin membaik. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi diperkirakan sekitar 5 persen. Dengan semakin stabilnya laju inflasi dan nilai tukar Rupiah, suku bunga di dalam negeri diperkirakan semakin stabil pula dan pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

b. KEUANGAN NEGARA

Kebijakan fiskal tahun 2010 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian setelah kelesuan ekonomi yang diperkirakan terjadi dalam tahun 2009. Namun, kebijakan ini ditempuh dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini.

Dalam tahun 2010, penerimaan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp 871,9 triliun, terutama didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 717,1 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 153,4 triliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan sekitar Rp 949,1 triliun. Dengan besarnya dorongan fiskal ke daerah, keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.

Dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran tersebut, ketahanan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN tahun 2010 diupayakan sekitar 1,3 persen PDB, ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

3. PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 12-13,5 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8 persen dari angkatan kerja.

4. KEBIJAKAN SUBSIDI

Sesuai amanat pasal 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945, pemerintah wajib menjamin kehidupan fakir-miskin, anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaringan sosial, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian pemerintah perlu menyediakan bantuan yang dibutuhkan antara lain transfer tunai, barang dan jasa seperti jaminan tersedianya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan, subsidi yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasarnya, serta subsidi untuk menjaga agar produsen mampu berproduksi, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga terjangkau.

Dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dengan proporsi yang cukup besar dalam keseluruhan belanja negara. Pada tahun 2008 realisasi rasio subsidi terhadap belanja negara mencapai 27,9 persen, atau 5,9 persen dari PDB. Sementara itu, pada APBN tahun 2009 rasio subsidi terhadap belanja negara diperkirakan turun menjadi sebesar 12,5 persen atau 2,3 persen dari PDB. Subsidi tersebut terbagi atas berbagai dua jenis, yaitu: subsidi energi (BBM dan Listrik) dan non energi, antara lain subsidi pangan, pupuk, benih, dan bunga kredit program.

Mengingat bahwa belanja negara dalam bentuk pemberian subsidi cukup besar, dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran negara, pengusulan dan pemberian subsidi harus diatur lebih sistematis.

Arah Kebijakan Subsidi Tahun 2010. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian, subsidi yang sudah berjalan masih diperlukan atau belum berakhir jangka waktu pemberiannya akan terus dilanjutkan, namun pemberian subsidi tersebut akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang penting dan mendesak, pengusulan subsidi baru dimungkinkan dengan memperhatikan bahwa pemberian subsidi merupakan pilihan kebijakan terbaik yang perlu dilakukan, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pemerintah.

Kriteria Subsidi. Secara umum, pemberian subsidi dalam tahun 2010 diberikan untuk menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Adapun kriteria pengusulan subsidi dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak atau dalam rangka mendorong kemampuan produsen nasional dalam memproduksi komoditi tertentu;
2. Adanya kelompok sasaran penerima subsidi yang jelas, yang menjadi konsumen akhir dari komoditi yang disubsidi. Kelompok sasaran tersebut diutamakan masyarakat golongan berpendapatan rendah, dan/atau masyarakat di wilayah terpencil atau terisolir agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar.
3. Komoditi yang disubsidi agar dapat ikut menciptakan kestabilan harga;
4. Memiliki jangka waktu yang jelas. Dalam hal ini pemberian subsidi tidak dapat diberikan selamanya dan oleh sebab itu pengajuannya harus disertai dengan target waktu subsidi tersebut berakhir;
5. Pengajuan subsidi dalam batas kemampuan pembiayaan negara;
6. Pengusulan subsidi harus disertai dengan alasan dan dasar perhitungan yang jelas mengenai besarnya subsidi yang diajukan;
7. Adanya mekanisme (*delivery*) yang jelas hingga komoditi tersebut dapat dipastikan sampai pada masyarakat yang layak menerima;
8. Adanya pembenahan struktural yang menyertai pelaksanaan subsidi tersebut agar penyalahgunaan subsidi semaksimal mungkin dapat dihindarkan.

Mekanisme Pengajuan/Pemberian Subsidi. Subsidi diajukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait dengan komoditi dalam bentuk barang dan jasa, atau yang ketersediaannya menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pengajuan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan kegiatan kementerian/ lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatan atau pengajuan subsidi secara lebih terperinci diuraikan pada kegiatan prioritas, dan/atau dalam kegiatan kementerian/lembaga.

5. PENDANAAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH

Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Sejalan dengan semakin besarnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah, alokasi transfer dana ke daerah dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Hal ini telah membuat porsi dana transfer ke daerah dalam belanja pusat mengalami peningkatan yang signifikan sejak dimulainya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di tahun 2001.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam melaksanakan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dalam tahun 2010 tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan tujuan:

- Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah;
- Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro;
- Mundukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah;
- Meningkatkan aksessibilitas publik terhadap prasarana dan sarana sosial ekonomi dasar di daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
- Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; dan
- Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan pendanaan yang ditransfer ke daerah senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, memiliki kinerja terukur, dan memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan transfer ke daerah secara sistematis dan terukur akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Transfer ke daerah akan menciptakan prakondisi yang baik terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah; meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan Pemerintah Daerah; dan dapat memenuhi aspirasi dari daerah dalam memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional.

Harapannya kondisi ini akan memberikan implikasi terhadap semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor pelayanan publik.

DANA PERIMBANGAN

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Sumber-sumber penerimaan yang dibagihasilkan yaitu penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil tembakau) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Penggunaan DBH tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah penerima kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau, dimana penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Langkah-langkah untuk penyempurnaan proses penghitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran DBH akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen transfer yang diperlukan untuk penyaluran DBH ke daerah dan meningkatkan akuntabilitas/tanggung gugat dan efektivitas penggunaannya. Berkaitan dengan alokasi DBH untuk daerah pemekaran baru akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku dan akan disalurkan apabila daerah pemekaran tersebut telah diresmikan dan dilantik pejabat daerahnya.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas/tanggung gugat penggunaannya.

DAU **merupakan** transfer pemerintah Pusat kepada Daerah dan bersifat "*Block Grant*" yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. DAU terdiri dari DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/ kota. Proporsi DAU untuk daerah provinsi adalah 10,0 persen dari pagu DAU nasional dan proporsi daerah Kabupaten/Kota adalah 90,0 persen dari pagu DAU. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 tahun 2005. Alokasi DAU untuk daerah pemekaran baru dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku dan akan disalurkan apabila daerah pemekaran tersebut telah diresmikan dan dilantik pejabat daerahnya.

Langkah-langkah untuk penyempurnaan formulasi alokasi, proses penghitungan, dan penetapan alokasi akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah pegawai, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas/tanggung gugat dan efektivitas penggunaannya.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- **Kriteria Umum.** Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung berdasarkan indeks fiskal netto (IFN) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- **Kriteria Khusus.** Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah, yaitu:
  a. Peraturan perundangan:
     - Daerah-daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan diberi status otonomi khusus, diprioritaskan mendapat alokasi DAK
     - Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK
  b. Karakteristik daerah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pariwisata, diprioritaskan mendapat alokasi DAK.

  Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

- **Kriteria Teknis.** Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, kinerja pelaksanaan kegiatan DAK di daerah, dan insentif bagi daerah yang mengalokasikan dana daerah diluar DAK untuk membiayai kegiatan serupa sesuai bidang DAK. Kriteria teknis dirumuskan berdasarkan indeks teknis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga teknis terkait.

Secara umum, arah kebijakan DAK tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, alokasi juga diberikan kepada seluruh daerah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
2. Mendukung prioritas percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, terutama dalam rangka perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin.
3. Mendukung prioritas peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; peningkatan jaminan pelayanan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil,

perbatasan dan kepulauan; pemantapan revitalisasi program KB; dan peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.

4. Mendukung prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, terutama dalam rangka penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Mendukung prioritas penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi, khususnya dalam rangka peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; peningkatan ketahanan pangan; revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan; perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin; peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai SPM; dan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil.
6. Mendukung prioritas peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, khususnya dalam rangka peningkatan pengelolaan sumberdaya air; peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam; dan peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan.

Pemilihan bidang kegiatan yang layak dibiayai oleh DAK tahun 2010 dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Bidang kegiatan yang diusulkan memiliki kesesuaian dengan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional tahun 2010;
2. Bidang kegiatan yang diusulkan merupakan urusan daerah, dan diprioritaskan bagi –kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar;
3. Bidang yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan bagi kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan SPM;
4. Kesiapan dalam perencanaan dan pelaksanaan, seperti: i) telah memiliki indikator kinerja yang terukur; ii) telah memiliki kriteria teknis; iii) telah memiliki kerangka perencanaan dan penganggaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework/MTEF*); dan iv) telah memiliki indikasi lokus prioritas;
5. Bidang yang mendapat pengalihan anggaran dari kementerian/lembaga diprioritaskan. Pengalihan yang dimaksud adalah pengalihan anggaran kementerian/lembaga ke DAK yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan telah menjadi urusan daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut maka bidang kegiatan yang dinilai layak didanai DAK untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP tahun 2010 terdiri dari 14 bidang yang meliputi:

1. **Infrastruktur Air Minum;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Adapun ruang lingkup kegiatan antara lain: (i) penyempurnaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) eksisting; (ii) pembangunan SPAM baru; dan (iii) perluasan jaringan dan peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat miskin.
2. **Infrastruktur Sanitasi;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Adapun ruang lingkup kegiatan antara lain: (i) penyempurnaan Sistem dan Pelayanan Eksisting (air limbah, persampahan, dan drainase); (ii) pengembangan Pelayanan Sistem dan Layanan Baru (air limbah, persampahan, dan drainase); (iii) perluasan jaringan dan peningkatan sambungan pelayanan air limbah untuk

masyarakat miskin dan/atau kumuh melalui pengembangan sistem air limbah komunal; dan (iv) dukungan pada kegiatan 3 R (*reduce, reuse, recycle*).

3. **Kesehatan;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Lingkup kegiatan adalah; (i) pembangunan, peningkatan, dan perbaikan puskesmas, dan jaringannya; (ii) pembangunan pos kesehatan desa; (iii) pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya; (iv) pembangunan instalasi farmasi di kabupaten/kota, dan (v) peningkatan fasilitas Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota; serta (vi) pengadaan obat generik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan obat generik pada pelayanan kesehatan.

4. **Pendidikan;** arah kebijakannya adalah untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Bermutu dan Merata. Adapun ruang lingkup kegiatannya mencakup: (i) pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), (ii) pembangunan ruang perpustakaan atau pusat sumber belajar untuk Sekolah Dasar (SD) dan SMP beserta perabotnya; dan (iii) rehabilitasi gedung SD dan SMP dan fasilitas pendukungnya yang mengalami kerusakan. Penyediaan DAK bidang pendidikan diprioritaskan untuk daerah yang capaian partisipasi pendidikan dasarnya masih rendah, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah perbatasan.

5. **Keluarga Berencana;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dengan meningkatkan: (i) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (ii) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (iii) sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta (iv) sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak. Adapun ruang lingkup kegiatannya adalah pengadaan: (i) sepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB; (ii) mobil pelayanan KB keliling; (iii) sarana pelayanan di Klinik KB; (iv) mobil unit penerangan (MUPEN) KB; (v) pengadaan *public address* dan KIE Kit; serta (vi) pengadaan bina keluarga balita (BKB) Kit; (vii) pembangunan gudang alokon.

6. **Prasarana Pemerintahan Daerah**; arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009. Penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung kantor DPRD, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung kantor kecamatan dengan tetap memperhatikan kriteria umum, khusus, dan teknis dalam penentuan daerah penerima.

7. **Pertanian;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan desa dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun ruang lingkup kegiatannya: (i) penyediaan fisik prasarana penyuluhan yang hanya digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (ii) penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan meliputi: pembangunan/rehabilitasi jalan usahatani (JUT), jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan tanah, sarana/alat pengolah kompos, konservasi lahan, serta reklamasi lahan rawa pasang surut dan rawa lebak; (iii) penyediaan fisik sarana dan

prasarana pengelolaan air, meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), tata air mikro (TAM), irigasi air permukaan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, pompanisasi, dam parit, embung; dan (iv) perluasan areal meliputi: cetak sawah, pembukaan lahan kering/ perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

8. **Infrastruktur Irigasi**; arah kebijakannya adalah untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program katahanan pangan. Ruang lingkup kegiatannya adalah peningkatan, rehabilatasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Untuk tetap menjamin ketersediaan dana OP dari pemerintah daerah, maka alokasi DAK diberikan kepada pemerintah daerah, dengan persyaratan bahwa Pemda dapat memperoleh dana DAK apabila telah mengalokasikan biaya OP pada wilayah yang menjadi kewenangannya.
9. **Kelautan dan Perikanan;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat peseisir lainnya yang didukung dengan penyuluhan. Adapun tujuan kegiatannya adalah (i) meningkatkan standar pelayanan bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat; (ii) meningkatkan produksi perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan penyediaan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan; (iii) meningkatkan mutu dan nilai tambah produk perikanan, serta penaganan ikan yang lebih higienis dari *on-farm* hingga pengolahannya dalam rangka mendukung keamanan produk pangan bersumber ikan; (iv) meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; (v) meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan; (vi) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya yang terkait dengan bidang perikanan.
10. **Sarana dan Prasarana Perdesaan;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar; untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran; serta mendorong peningkatan kualitas produktivitas, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaaan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur yang diutamakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil. Adapun ruang lingkup kegiatannya adalah pengadaan moda transportasi perintis darat, laut dan air/rawa.
11. **Infrastruktur Jalan Provinsi dan Kabupaten;** arah kebijakannya adalah untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau sedang, dalam rangka mendanai kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah, mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, serta menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan.

12. **Sarana Perdagangan;** arah kebijakannya adalah meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan yang memadai sebagai upaya untuk memperlancar arus barang antar wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, terutama di daerah perdesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan paska bencana dan daerah pemekaran.
13. **Lingkungan Hidup;** arah kebijakannya adalah untuk mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara, dan informasi status kerusakan tanah. Ruang lingkup kegiatannya adalah: (i) pembangunan gedung laboratorium, pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pengadaan laboratorium lingkungan bergerak; (ii) pembangunan unit pengolahan sampah (3R), pembangunan teknologi biogas, pembangunan IPAL komunal, dan pengembangan septik tank komunal; (iii) penanaman pohon di sekitar sumber air di luar kawasan hutan, pembangunan sumur resapan/biopori, pembangunan Taman Hijau, pengadaan papan informasi, dan pengadaan alat pencacah gulma; (iv) pengembangan sistem informasi lingkungan untuk memantau kualitas air; (v) pengadaan alat pemantauan kualitas udara, alat pembuat asap cair, dan alat pembuat briket arang; dan (vi) pengadaan alat pemantau kualitas tanah.
14. **Pelestarian Hutan, Tanah, dan Air;** arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukungnya. Kebijakan tersebut dicapai dengan melaksanakan rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis, kawasan mangrove serta meningkatkan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Ruang lingkup kegiatannya adalah (i) rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luar kawasan hutan, kawasan mangrove, Tahura, dan Hutan Kota, (ii) pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan, (iii) pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya, (iv) pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahanan, dam pengendali, *gully plug*, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya, (v) peningkatan penyediaan sarana penyuluhan teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Sehubungan dengan pemberian kewenangan pelayanan publik kepada daerah yang semakin besar dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi belanja, maka untuk setiap bidang kegiatan DAK akan ditetapkan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan DAK yang dibuat oleh masing-masing K/L yang menggabungkan antara kebutuhan/aspirasi daerah dan kepentingan nasional.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus.

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan ditetapkannya UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dialokasikan Dana Otonomi Khusus.

Pada prinsipnya UU Nomor 35 Tahun 2008 tersebut mengamanatkan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 berlaku bukan hanya untuk Provinsi Papua beserta seluruh kabupaten/kota, melainkan semua daerah, baik Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota yang berada di daratan Papua. Dengan ditetapkannya Perpu tersebut, mengakibatkan antara lain: (i) dana otonomi khusus yang besarnya 2 persen dari total DAU Nasional akan dibagi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) tambahan dana otonomi khusus untuk infrastruktur akan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara terpisah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika dalam perkembangannya terdapat daerah pemekaran baru maka kebijakan dan alokasinya akan dikoordinasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tersebut diperuntukkan bagi kabupaten, kota, dan provinsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan dasar pembagian menggunakan basis perhitungan jumlah kampung secara proporsional. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan dalam rangka otonomi khusus yang diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Dana Otonomi Khusus NAD diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk NAD berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun keduapuluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional. Alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi NAD tersebut akan ditransfer secara triwulanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4
KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 4
KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 20010 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

RKP Tahun 2010 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2010 sebagai berikut:

1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya;

2. RKP Tahun 2010 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2010, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut:
   a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2010, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
   b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2010, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah;
d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2010 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, ataupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.

3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2010 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2010 sebagai berikut:
   a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2010, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
   b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2010, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
   c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
   d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2010 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

4. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2010;

5. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan: (1) partisipasi masyarakat; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) gender; (4) tata pengelolaan yang baik; (5) kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal; (6) desentralisasi dan otonomi daerah; (7) padat karya; dan pembangunan yang berdimensi kepulauan. Di samping pengarusutamaan, pelaksanaan RKP 2010 setiap Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah wajib berperanserta untuk menyelesaikan isu-isu lintas sektoral sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya yang meliputi isu lintas sektoral perlindungan anak, penanggulangan HIV dan AIDS, serta perbaikan gizi.

6. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan

peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

7. Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---oooOooo---

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
MATRIKS PRIORITAS, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas 1

PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

PENGURANGAN KEMISKINAN:

Fokus 1. Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

Fokus 2. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat;

Fokus 3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan;

Fokus 4. Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan;

SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL:

Fokus 5. Penataan kelembagaan pelaksanaan sistem jaminan sosial.

Prioritas 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
PENGURANGAN KEMISKINAN						
Fokus 1. Perluasan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
a)	7232	Penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) melalui pemberian bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi 720.000 RTSM di 13 provinsi, 70 kabupaten.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Depsos	1.100,0
b)	2580	Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PKH)	Terfasilitasinya pekerja anak ke dalam program pendidikan di 13 provinsi	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	20,0
c)	5257	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tingkat pusat, 15 provinsi dan 60 Kab/Kota, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pengembangan strategi PUG lokal; dan 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di 5 lembaga masyarakat (parpol, media, keagamaan, LSM, profesi/swasta) di 33 provinsi dalam pelaksanaan PUG serta inisiasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui advokasi dan KIE.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kemeneg PP	20,45
d)	5261	Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan/Anak (P2TP2A)	Terlaksananya fasilitasi pembentukan P2TP2A di 18 provinsi (2 provinsi untuk inisiasi pembentukan baru dan 16 provinsi untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) dan 190 kabupaten/kota (60 kabupaten/kota untuk inisiasi pembentukan baru dan 130 kabupaten/kota untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) melalui kegiatan pelatihan, konseling, persiapan materi, dan lain-lain.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Kemeneg PP	11,45
e)	5263	Penyusunan Kebijakan KHPP	1. Tersusunnya kebijakan nasional tentang peningkatan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol perempuan dalam mendukung penanggulangan penyakit menular, pemenuhan hak reproduksi, peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, dan partisipasi perempuan di badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 2. Terfasilitasinya penyusunan kebijakan perlindungan perempuan di 10 provinsi, termasuk pekerja migran, penghapusan KDRT, penanganan perdagangan orang, dan perempuan dengan kebutuhan khusus (lansia, cacat, wilayah konflik, dan eksploitasi media); dan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kemeneg PP	9,49

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			3. Terfasilitasinya pengembangan model di daerah untuk perlindungan perempuan dari kekerasan dan perempuan dengan kebutuhan khusus.			
f)	2589	Penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP	751.193 Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	413,10
g)	2576	Penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD	1.796.800 Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	684,60
h)	3470	Beasiswa untuk Siswa Miskin MI	640.000 Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	230,40
i)	3471	Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs	540.000 Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	388,80
j)	2585	Beasiswa untuk siswa miskin SMA	248.124 Siswa	Program Pendidikan Menengah	Depdiknas	193,54
k)	2585	Beasiswa untuk siswa miskin SMK	200.000 Siswa	Program Pendidikan Menengah	Depdiknas	160,60
l)	3388	Beasiswa untuk Siswa Miskin MA (termasuk beasiswa khusus untuk siswa daerah terpencil/tertinggal)	320.000 Siswa	Program Pendidikan Menengah	Depag	243,20
m)	2602/ 2385	Penyediaan Beasiswa Untuk Mahasiswa Miskin dan Peningkatan Prestasi Akademik, Serta Bantuan Belajar dan Daerah Konflik dan Bencana	100.000 Mahasiswa	Program Pendidikan Tinggi	Depdiknas	360,00
n)	3425	Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin	65.000 orang	Program Pendidikan Tinggi	Depag	78,00
o)	2812	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin di kelas III Rumah sakit	Persentase RS yang melayani pasien masyarakat miskin peserta program Jamkesmas 100%	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	4.584,00
p)	2819	Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas dan jaringannya	1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di seluruh Puskesmas dan Jaringannya khususnya bagi seluruh masyarakat miskin. 2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat di 101 Puskesmas Prioritas di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	1.000,00
q)	6369	Jaminan Pelayanan KB Berkualitas Bagi Rakyat Miskin	1. Tersedianya alat dan obat KB gratis bagi sekitar 3,7 juta PB miskin (keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1) dan 11,9 juta PA miskin, dengan rincian; a. Tersedianya IUD bagi 572,9 ribu PB miskin; MOP bagi 12,2 ribu PB miskin; MOW bagi 26,9 ribu PB miskin; Implant bagi 199,6 ribu PB miskin; suntikan 1,4 juta PB miskin; Pil bagi 1,3 juta PB miskin, dan Kondom bagi 103,4 ribu PB miskin b. Tersedianya IUD bagi 889,2 ribu PA miskin; MOP bagi 101,7 PA miskin; MOW bagi 484,1 ribu PA miskin; Implant bagi 895,4 ribu PA miskin; Suntikan bagi 5,8 juta PA miskin; Pil bagi 3,4 juta PA miskin, dan kondom bagi 204,5 ribu PA miskin. 2. Peningkatan akses pelayanan KB di daerah Galciltas di 199 Kab/kota	Program Keluarga Berencana	BKKBN	527,32

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			3. Terselenggaranya ayoman pasca-pelayanan KB bagi sekitar 280 ribu kasus. 4. Meningkatnya penggunaan alat KB jangka panjang (MOP, MOW, IUD, Implant) bagi sekitar 852 ribu peserta KB baru dan sekitar 6,5 juta peserta KB aktif. Catatan: Pengadaan alokon direncanakan untuk melayani PB miskin dan PA miskin s/d Juni 2011.			
r)	SUBSIDI	Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)	Penyediaan beras untuk 18,5 juta rumah tangga sasaran, sebanyak 15 kg per rumah tangga sasaran selama 12 bulan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Perum Bulog/ Kemenko Kesra	8.918,4
Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat						
a)	4622	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 237 kecamatan dan 32 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di 32 kabupaten, 9 provinsi	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dep. PU	499,50
b)	4280	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM Perkotaan)	Pemberdayaan masyarakat di 8.304 kelurahan pada 884 kecamatan di 246 kota	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dep. PU	1.509,50
c)	0847	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan (PNPM Perdesaan)	Terlaksananya BLM di 4.590 kecamatan pada 32 provinsi, termasuk; a. Terlaksananya PNPM Perdesaan di 4.671 kecamatan; Pelaksanaan kegiatan SADI di 4 provinsi b. Terlaksananya PNPM-LMP (Lingkungan Mandiri Perdesaan) di 88 kecamatan pada 23 kabupaten (Grant CIDA dan DANIDA) c. Terlaksananya PNPM-RISE di 9 provinsi, dengan keluaran: - Terselenggaranya kegiatan diseminasi dan pelatihan untuk tingkat pusat dan provinsi serta sosialisasi program RISE; - Tersalurkannya dana bergulir kegiatan pilot project mikro kredit perdesaan di 32 kecamatan, 32 kabupaten, 9 provinsi	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	9.756,3
d)	0713	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda dan Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PISEW/RISE di 9 provinsi, 32 kabupaten, 237 kecamatan; Terlaksananya *pilot project* pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 3 lokasi; Fasilitasi pengembangan lembaga, aparat dan kader dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 32 prov; Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat; Pelatihan pengelolaan sampah RT berbasis masyarakat di 15 kabupaten; Fasilitasi penyusunan Perda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; Modul pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat di 33 provinsi; Sosialisasi Permendagri tentang Program Masuk Desa di pusat dan daerah; Peyusunan manual desa dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan inventarisasi/pengolahan data dasar potensi desa/kelurahan pesisir dalam	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	56,58

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); Terselenggaranya sosialisasi program PAMSIMAS kepada Pemda dan DPRD; Terselenggaranya workshop perencanaan untuk Pelembagaan Rencana di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota; *Development and Review of Scalling Up Strategy Meeting* untuk Kab/Kota;			
e)	3565	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat tranmigrasi sebanyak 2.138 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	5,20
f)	3588	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat tranmigrasi sebanyak 16.420 KK	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	52,37
g)	4312	Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-PNPM)	Pelaksanaan program infrastruktur perdesaan di 4.136 desa	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	Dep. PU	1.225,92
h)	4611	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS)	130 lokasi	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	20,00
i)	4612	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan lingkungan Berbasis Masyarakat	1.320 desa, 110 kab/kota	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	501,60
j)	4108	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	Terlaksananya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui PNPM Mandiri kelautan dan perikanan di 120 kab/kota; berkembangnya usaha mikro dan kecil (UMK) masyarakat pesisir, pemberdayaan perempuan pesisir; tersusunnya 5 paket standar, norma, prosedur dan manual (SNPM) pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; peningkatan akses modal kepada masyarakat skala mikro secara langsung atau lembaga keuangan mikro (LKM) masyarakat pesisir; dan tersalurkannya subsidi benih ikan (selisih harga benih) di 33 provinsi.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	219,20
k)	1595	Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)	Fasilitasi Gapoktan (10.000 desa), fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas (10.000 desa)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	1.105,50
l)	1574	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui LM3 dan Pemuda Membangun Desa (PMD)	Bantuan permodalan LM3 Tanaman Pangan (250 LM3); Penguatan LM3 peternakan (755 klp); Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di 200 LM3; Fasilitasi pemberdayaan/pengembangan kapasitas LM3 (1.000 orang); PMD Tanaman (275 orang); PMD Hortikultura (370 orang); PMD Perkebunan (275 orang); PMD Peternakan (663 orang).	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	583,90
m)	6257	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK/SPADA) – PNPM	Percepatan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus di 32 kabupaten, 186 kecamatan di 4.596 desa	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal	KPDT	57,00
n)	6258	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P2IPDT)	Terlaksananya pembangunan prasarana perdesaan di 185 kabupaten; Terlaksananya pembangunan energi, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi lokal; Pengembangan keperintisan transportasi darat dan laut	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	KPDT	90,00
o)	6260	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di 151 kabupaten di daerah tertinggal	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	KPDT	41,93

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 3. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						
a)	4807	Peningkatan Koordinasi Pengembangan dan Investasi Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya kordinasi dalam pengembangan dan investasi SDM	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	17,16
b)	4809	Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	30,84
c)	4810	Peningkatan Koordinasi Tanggap Cepat Masalah Kesejahteraan Rakyat	Terselenggaranya koordinasi tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	3,70
d)	0712	Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Perdesaan	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia/SDM melalui pelatihan 10 angkatan, 2. Pelatihan dan orientasi bagi pelatih, aparat, fasilitator dan masyarakat di 17 Kabupaten, 3. Rakornas dan evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di 19 provinsi (mendukung PNPM)	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	7,97
e)	0716	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat	1. Penguatan kelembagaan unit pengaduan masyarakat terpadu dalam penanggulangan kemiskinan 440 kab./kota; 2. Tertanganinya masalah pengaduan masyarakat yang tersebar di 33 provinsi.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	30,58
f)	3607	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 21 paket	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	31,59
g)	3567	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 2 paket	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	1,65
Fokus 4. Peningkatan Kapasitas Usaha Skala Mikro dan Kecil Melalui Penguatan Kelembagaan						
a)	5229	Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Dengan Pola Bagi Hasil/Syariah dan Konvensional	2.600 Koperasi / Kelompok	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Kemeneg KUKM	165,00
b)	5232	Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi	2.737 UMI	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Kemeneg KUKM	15,00
c)	5205	Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Perkoperasian	5 Kebijakan/1.000 orang pembina	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kemeneg KUKM	5,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
d)	0657	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan	Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan tentang rehabilitasi lahan kritis berbasis masyarakat sebanyak 180 orang; Terlatihnya kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan sebanyak 60 orang; Terlaksananya pengembangan diversifikasi produk lokal non pertanian di perdesaan 15 prov; Terlaksananya temu karya pemberdayaan UEM bagi 32 prov; Terfasilitasinya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di 32 Provinsi	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Depdagri	2,22
e)	0659	Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan	Fasilitasi lembaga keuangan perdesaan 16.454 unit di 33 provinsi; Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Badan Kredit Desa (BKD) di 465 kab/kota; Fasilitasi penguatan manajemen lembaga keuangan mikro; Replikasi model Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) dengan pemberian stimulan bagi 19 pokmas; Revitalisasi kelembagaan Badan Kredit Desa (BKD); Fasilitasi manajemen usaha desa/ BUMDes; Penyusunan kebijakan/program Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL)	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Depdagri	3,83
f)	0807	Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Lokal	Terlaksananya bimtek pengelolaan pasar desa 12 angkatan dan pemberian stimulan kepada masyarakat; terlaksananya pengembangan pasar desa dengan fokus kegiatan pada fasilitasi, bimbingan teknis dan bantuan langsung masyarakat untuk perbaikan pasar desa di 12 desa pasca bencana dan terpencil sesuai dengan Permendagri nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, Meningkatkan jaringan informasi dan jaringan teknologi pasar desa	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Depdagri	5,16
g)	6262	Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	Terbangunnya kawasan produksi di daerah tertinggal, diikuti oleh aktifitas usaha budidaya komoditas unggulan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi tinggi di 120 kabupaten (mendukung KAPET)	Program Pembangunan Ekonomi Lokal	KPDT	121,00
h)	6326	Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)	Terbangunnya 5 pusat pertumbuhan untuk mendukung pengembangan kawasan lainnya (KAPET, KTM, KEK, Agropolitan, dll)	Program Pembangunan Ekonomi Lokal	KPDT	25,00
i)	3566	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terwujudnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 2.138 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	4,69
j)	3606	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terwujudnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 16.420 KK	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	52,5
k)	2256	Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lanjutan pembangunan 9 unit dermaga sungai, 1 unit dermaga danau, dan 43 unit dermaga penyeberangan yang menghubungkan daerah tertinggal ke pusat pertumbuhan	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	Dep. Perhubungan	608,95

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
l)	0024	Pengadaan kapal perintis	Lanjutan pembangunan kapal perintis 14 unit dan pembangunan kapal perintis baru 5 unit	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	Dep. Perhubungan	256,20
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL						
Fokus 5. Penataan Kelembagaan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial						
a)	xxxx	Pembentukan Peraturan Pelaksanaan UU SJSN Tahun 2004	Paket peraturan pelaksanaan UU No. 40 Tentang SJSN Tahun 2004 lengkap dibentuk: 1. UU Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 2. PP Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial; 3. PP Tentang Pengelolaan Dana Jaminan Sosial; 4. PP Tentang Program Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian; 5. PP Tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja 6. Perpres Tentang Program Jaminan Kesehatan	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	
b)	xxxx	Pembentukan BPJS untuk Menyelenggarakan: 1. Jaminan Kesehatan; 2. Jaminan Kecelakaan Kerja; 3. Jaminan Hari Tua; 4. Jaminan Pensiun; 5. Jaminan Kematian, bagi Berbagai Kelompok Masyarakat.	Badan publik nir laba penyelenggara program jaminan Sosial - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk dan bekerja efektif menyelenggarakan program jaminan sosial.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	
c)	xxxx	Pemberdayaan Masyarakat untuk Berperan Serta Aktif dalam Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional	Masyarakat paham, mendukung dan berpartisipasi aktif melaksanakan UU No. 40 Tentang SJSN Tahun 2004.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	

Prioritas 2

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

PENDIDIKAN:

Fokus 1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;
Fokus 2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi;
Fokus 3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
Fokus 4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik;

KESEHATAN:

Fokus 5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
Fokus 6. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit;
Fokus 7. Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan;
Fokus 8. Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan;

KELUARGA BERENCANA:

Fokus 9. Pemantapan revitalisasi program KB;

AGAMA:

Fokus 10. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;

KEBUDAYAAN:

Fokus 11. Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya;

PEMUDA DAN OLAH RAGA:

Fokus 12. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
PENDIDIKAN						
Fokus 1. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Merata						
a)	2323	Melanjutkan Penyediaan BOS SD	27.673.587 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	11.002,6
b)	2323	Melanjutkan Penyediaan BOS SMP	9.916.573 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	5.664,2
c)	2323	Penyediaan BOS jenjang pendidikan dasar	6.794.516 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	3.307,8
d)	2582	Pembangunan SD-SMP satu atap	250 lokasi	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	100,0
e)	2583	Pembangunan USB SMP	115 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	177,0
f)	0079	Pembangunan Laboratorium IPA	1.000 ruang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	85,0
g)	0108	Penyediaan Peralatan Lab SMP	1.000 set	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	80,0
h)	8372	Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajib Dikdas pada Pontren	7.058 lembaga	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	15,0
i)	3385	Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI	160 lokasi	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	8,0
j)	3385	Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs	160 lokasi	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	9,6
k)	3387	Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB)	205 MI	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	20,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
l)	3387	Bantuan Pembangunan MTs melalui MEDP (ADB)	237 MTs	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	20,1
m)	3488	Rehabilitasi Ruang Kelas MI	1.665 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	127,8
n)	3488	Rehabilitasi Ruang Kelas MTs	5.850 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	548,0
o)	2590	Penerapan TIK Jenjang Pendidikan Dasar	1.000 paket	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	60,0
p)	2598	Penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) SD	4.737.194 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	75,8
q)	2573	Penyelenggaraan Paket A setara SD	90.000 orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	51,6
r)	2645	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	390.000 orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	530,8
s)	8372	Bantuan Penyelenggaran Paket A/B Program Wajar Dikdas pada Pontren	928 lembaga	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	18,6
t)	2336, 2367, 2368, 2591	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	99.754 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	59,8
u)	2318	Akreditasi Sekolah Jenjang TK/RA/SD/MI	10.000 sek/mad	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	19,4
v)	3396	Akreditasi Sekolah Jenjang SMP	2.500 sek/mad	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	6,3
w)	2318	Akreditasi SLB	150 SLB	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	0,4
x)	0106	Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/ Bahan Ajar dan Model Pembelajaran	460 kab/kota	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	13,8
Fokus 2. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi						

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
a)	3400	Pembangunan USB SMA	10 SMA	Pendidikan Menengah	Depdiknas	10,0
b)	3400	Pembangunan USB SMK (baru dan lanjutan)	140 lokasi	Pendidikan Menengah	Depdiknas	126,0
c)	3400	Pembangunan RKB SMA	500 paket	Pendidikan Menengah	Depdiknas	50,0
d)	3400	Pembangunan RKB SMK	2.050 ruang	Pendidikan Menengah	Depdiknas	205,0
e)	3400	Pembangunan MA melalui MEDP (ADB)	243 unit	Pendidikan Menengah	Depag	97,2
f)	2586	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA	400 ruang	Pendidikan Menengah	Depdiknas	20,0
g)	3393	Rehabilitasi Ruang Kelas MA	1.921 ruang	Pendidikan Menengah	Depag	154,6
h)	2594	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA	2.100.000 siswa	Pendidikan Menengah	Depdiknas	189,0
i)	2595	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK	3.800.000 siswa	Pendidikan Menengah	Depdiknas	201,4
j)	3449	Bantuan Pengembangan Pendidikan Ketrampilan Madrasah Aliyah	58 lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	2,9
k)	0047	Pengembangan MAN Insan Cendekia	2 lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	24,0
l)	2359	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium dan Workshop SMK	483 paket	Pendidikan Menengah	Depdiknas	20,3
m)	3390	Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah	150 lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	12,0
n)	3400	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium dan Workshop SMA	300 SMA	Pendidikan Menengah	Depdiknas	45,0
o)	xxxx	Pengembangan SMK Model (INVEST)	30 sekolah	Pendidikan Menengah	Depdiknas	150,0
p)	8381	Kontrak Prestasi Madrasah	48 lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	19,2
q)	8356	Pembangunan Madrasah bertaraf Internasional	3 unit	Pendidikan Menengah	Depag	105,0
r)	8389	Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan	270.000 orang	Pendidikan Menengah	Depag	13,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
s)	3396	Akreditasi Sekolah jenjang pendidikan Menengah	2.000 sek/mad	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	5,5
t)	2385	Pengembangan bidang keilmuan (Rumah Sakit Pendidikan) PTN	9 PTN	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	90,0
u)	3473	Bantuan Beasiswa S1 Santri Berprestasi	1.635 orang	Pendidikan Tinggi	Depag	49,0
v)	2641	Pembangunan gedung, peralatan dan lab baru PT	150.000 m^2	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	750,0
w)	2318	Akreditasi PT	1.000 prodi	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	26,7
x)	8375	Pengembangan Perpustakaan	11 unit	Pendidikan Tinggi	Depag	4,1
y)	2559	Pengembangan Program Pengabdian Masyarakat	101 lembaga	Pendidikan Tinggi	Depag	15,1
z)	3422	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB	1 lembaga IAIN Ar Raniry (Pengalihan BRR-NAD)	Pendidikan Tinggi	Depag	95,0
ä)	3422	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB dan JBIC (PHLN)	3 lembaga	Pendidikan Tinggi	Depag	206,9
ä)	2558,2559,2560	Pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi (yang menghasilkan Patent, Jurnal Internasional, Teknologi Tepat Guna, Rekayasa Sosial, Kebijakan Publik, Metodologi, Karya Seni dan Buku Ajar)	420 judul	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Depdiknas	99,96
ö)	8378	Peningkatan Mutu Penelitian	490 orang	Pendidikan Tinggi	Depag	5,9
Fokus 3. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Non-Formal						
a)	2588	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C)	30.000 orang	Pendidikan Non Formal	Depdiknas	42,9
b)	3409	Penyelenggaraan Kursus dan Magang	100.000 orang	Pendidikan Non Formal	Depdiknas	180,0
c)	3472	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional	650.000 orang	Pendidikan Non Formal	Depdiknas	276,9

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
d)	2587	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembangunan Lembaga Paud dan Penyediaan Bahan Ajar dan Alat Permainan Edukasi	411.840 anak	Pendidikan Anak Usia Dini	Depdiknas	411,8
e)	2304	Perluasan akses dan mutu TK (subsidi TK-SD satu atap)	500 TK	Pendidikan Anak Usia Dini	Depdiknas	50,0
f)	2417	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah	500 lembaga	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Depdiknas	12,5
g)	2318	Akreditasi PNF	500 lembaga/program	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	2,1
h)	8358	Bantuan Penyelenggaraan Life Skill dan Short Course	100 lembaga	Pendidikan Non Formal	Depag	10,0
i)	8390	Bantuan Penyelenggaraan Paket C	300 lokasi	Pendidikan Non Formal	Depag	15,0
j)	5702	Penyediaan Fasilitas, Koleksi dan Layanan Perpustakaan	1 perangkat e-library untuk 32 propinsi dan peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan; serta pengadaan 25.000 eks bahan bacaan.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpusnas	121,1
k)	5703	Bantuan Fasilitasi Perpustakaan Keliling Kepada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	43 unit perpustakaan keliling/terapung di 40 kab/kota	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpusnas	14,8
Fokus 4. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Pendidik						
a)	2570	Subsidi Tunjangan fungsional guru Non PNS Jenjang Pendidikan Dasar	348.357 orang	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	836,1
b)	2570	Subsidi Tunjangan fungsional guru Non PNS Jenjang Pendidikan Menengah	129.643 orang	Pendidikan Menengah	Depdiknas	311,1
c)	3475	Subsidi Tunjangan fungsional guru Non PNS	501.831 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	1.505,5
d)	2571	Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Dasar dan Menengah	217.947 orang	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah	Depdiknas	4.350,0
e)	3478	Tunjangan Profesi Guru Non PNS	104.079 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	2.497,9
f)	2600	Tunjangan khusus	20.000 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	324,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
g)	3477	Tunjangan khusus Guru	3.500 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	56,7
h)	2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Pendidikan Dasar	200.000 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	400,0
i)	2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Pendidikan Menengah	10.234 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	20,5
j)	2574	Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru ProgramS1 (Lanjutan)	9.000 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	54,0
k)	3574	Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Lanjutan)	2.000 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	62,0
l)	3479	Beasiswa Guru Program S1	1.500 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	27,0
m)	8383	Beasiswa S2 dan S3 tenaga pendidikan	100 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	3,2
n)	2603	Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS	400 dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	7,2
o)	8382	Beasiswa Dosen Program S2	600 dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	18,6
p)	8383	Beasiswa Dosen Program S3	450 dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	15,8
q)	2574	Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik	22.000 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	48,4
r)	2574	Peningkatan Mutu dan Profesionalisme guru	62.000 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	175,3
s)	2575	Percepatan Sertifikasi Akademik Bagi Guru dalam Jabatan melalui Sistem Portofolio	150.000 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	311,8
t)	2575	Percepatan Sertifikasi Guru	90.000 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	180,0
u)	0001	Tunjangan profesi dosen	8.750 orang	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	262,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
v)	xxxx	Tunjangan Guru Besar	4.300 orang	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	258,0
w)	2386,2604	Peningkatan kualifikasi akademik dosen PT (DN)	7.480 orang	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	187,0
x)	2386	Peningkatan kualifikasi akademik dosen PT (LN)	1.000 orang	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	300,0
y)	2574	Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen S2/S3	800 dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	8,0
KESEHATAN						
Fokus 5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan						
a)	2804, 2871, 2872, 2873	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	1. Persentase kualitas air bersih yang memenuhi syarat bakteriologis: mencapai 84% 2. Persentase Rumah tangga yang akses terhadap air bersih diperkotaan dan perdesaan: mencapai 62% 3. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan: mencapai 68% 4. Terselenggaranya STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada 3.000 desa	Lingkungan Sehat	Depkes	227,4
b)	2815	Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	1. Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di 330 RS/BLK 2. Tersedianya RS Pemerintah standar kelas dunia (world class) 1 RS 3. Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di 34 UPT Vertikal & Kantor Pusat	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	250,9
c)	2817	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Desa Siaga	Cakupan desa siaga aktif 80%	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Depkes	86,.0
d)	2834	Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	1. Perhitungan NHA 2. Pengadaan alat olah data 600 paket 3. Operasional Jamkesmas	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Depkes	180,.0
e)	2836	Penanggulangan Krisis	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan krisis secara tepat dan cepat di daerah bencana.	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Depkes	120,.0
f)	2870	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terlaksananya 3 kegiatan survei Riskesdas dan 130 riset pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Depkes	80,.0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
g)	2821	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan dasar di 8.133 Puskesmas dan jaringannya 2. Terselenggaranya upaya kesehatan di 70.000 Poskesdes 3. Tersedianya dukungan pelayanan kesehatan dasar dalam mendukung Inpres di Papua, Sulteng dan Kalteng 4. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar pada 160 Puskesmas percontohan dan operasionalnya selama 1 tahun 5. Pembanguan Poskestern/pos panti di 400 pondok pesantren/panti asuhan 6. Terselenggaranya Pengembangan pelayanan Kesehatan di 8 UPT Kesmas	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	640,0
Fokus 6. Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak, Perbaikan Gizi Masyarakat, dan Pengendalian Penyakit						
a)	2846, 2847	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	1. Terselenggaranya persalinan yang aman sesuai standar oleh tenaga kesehatan bagi 87,5% ibu hamil 2. Terselenggaranya penanganan komplikasi Persalinan termasuk Neonatus 87,5 %	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	200,0
b)	2902	Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita	1. Terselenggaranya Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6 – 24 bulan 100% keluarga miskin 2. Teselenggaranya Respon cepat kejadiaan luar biasa gizi buruk pada sasaran 40.000 Balita gizi buruk	Perbaikan Gizi Masyarakat	Depkes	191,5
c)	2829	Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pelayanan di 269.000 Pos Yandu	Perbaikan Gizi Masyarakat	Depkes	96,8
d)	2823	Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko	1. Jumlah darah donor yang diskrining dari penyakit menular umumnya dan HIV/AIDS pada khususnya mencapai 100% 2. Data dan informasi faktor risiko lingkungan penyebab terjadinya penyakit untuk SKD di propinsi daerah binaan BTKL-PPM mencapai 100% 3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian faktor risiko PTM mencapai 10% 4. Pengendalian faktor risiko penyakit zoonosa (a.l Rabies, Schistosomiasis, Anthrax, Pes) mencapai 100% 5. Pemeriksaan dan pembinaan calon jemaah haji mencapai 100% 6. Persentase pengendalian terhadap kejadian PHEIC (Public Health Emergency International Concern) mencapai 100% 7. Persentase faktor risiko lingkungan penyebab terjadinya penyakit yang teridentifikasi di daerah binaan mencapai 100% 8. Persentase kegiatan Rapid Health Assessment di setiap pasca bencana dan situasi matra sebesar 100%	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	82,0
e)	2824	Peningkatan cakupan imunisasi	1. Persentase desa yg mencapai UCI sebesar 100% 2. Proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak mencapai 90% 3. Proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi DPT3 mencapai 90%	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	40,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
f)	2825	Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	1. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam mencapai 100% 2. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB mencapai <1 % 3. Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate ≥2 per 100.000 anak usia mencapai <15 tahun	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	16,0
g)	2826	Penemuan dan tatalaksana penderita	1. Persentase penderita Malaria yang ditangani mencapai 100 2. Kab/Kota yang melaksanakan pengobatan massal Filariasis mencapai 44% 3. Pengendalian 234.600 penderita TB Baru berdasarkan strategi Direct Observe Treatment Shortcourse (DOTS) (insidens rate 102 per 100.000 penduduk) 4. Cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia balita mencapai 100% 5. Cakupan pengobatan cacingan anak SD mencapai 75% 6. Angka penemuan penemuan penderita baru Kusta mencapai <5%	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	47,0
h)	2904	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Terselenggaranya imunisasi dasar untuk 6,9 juta bayi (usia 0-12 bulan) 2. Terlindunginya 2,3 juta penduduk berisiko tinggi tertular Malaria (insidens rate 10 per 1.000 penduduk) 3. Tertanganinya 138 ribu penduduk penderita DBD (insidens rate 60 per 100.000 penduduk) 4. Tertanganinya 100% penderita HIV/AIDS (16.110 ODHA dan 6.015 penderita HIV) 5. Cure Rate 100% kasus TB baru berdasarkan strategi Direct Observe Treatment Shortcourse/DOTS mencapai100% (insidens rate 102 per 100.000 penduduk)	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	425,0
i)	2837	Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza	1. Jumlah kasus avian influenza (AI) yang ditangani 100% 2. Persentase Prov/Kab/Kota yang mempuntai contingency plan penanggulangan pandemi influenza mencapai 100% (12 Prov, 29 Kab/Kota) 3. Persentase Tim Gerak Cepat di setiap Provinsi/Kab/Kota yang mempunyai risiko tinggi terhadap Avian Influenza pada manusia mencapai 100% (12 Prov, 29 Kab/Kota)	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	30,0
Fokus 7. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Obat dan Tenaga Kesehatan						
a)	2807	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Persentase Ketersediaan Obat Essensial Generik dan Perbekalan Kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan dasar 100 % 2. Persentase kabupaten/kota yang memiliki total alokasi anggaran obat disarana pelayanan pemerintah (pusat dan daerah) Rp. 18.000/kapita/tahun 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	21,9
b)	2907	Penyediaan dan pengelolaan obat dan vaksin	Terpenuhinya kebutuhan obat generik esensial (Bufferstock), obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program, dan vaksin termasuk pengelolaannya di sarana pelayanan kesehatan 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	600,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
c)	0003	Pelayanan publik atau birokrasi (vaksin)	Terpenuhinya kebutuhan vaksin reguler 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	430,7
d)	0024, 0111	Peningkatan Sarana dan Prasarana (BPOM)	Tersedianya 33 paket peralatan laboratorium dan 16 sarana fisik gedung	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan POM	166,7
e)	6051	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Kosmetika, Produk Komplemen, Makanan dan PKRT	Pengujian terhadap 97.000 sampel	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan POM	40,0
f)	6052	Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Kosmetika, Produk Komplemen, Makanan dan PKRT	Pemeriksaan terhadap 15.000 sarana	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan POM	30,0
g)	6057	Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	Penyidikan terhadap 510 kasus	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan POM	10,0
h)	2831	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana	1. Pelatihan bagi 40.000 SDM Kesehatan 2. Pendayagunaan 1.200 tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan, tugas belajar 3. 1.000 orang tenaga kesehatan bersertifikat kompeten 4. Tugas belajar bagi 2.000 SDM Kesehatan 5. Tersusunnya 30 paket dokumen norma, standar, pedoman, dan kebijakan (NSPK) PPSDM Kes 6. Tersedia dan terkirimnya 500 TKKI yang kompeten ke LN 7. Tersusunnya dokumen perencanaan SDM Kesehatan di 50 Kab/Kota 8. Peningkatan sarana dan prasarana di institusi pendidikan dan pelatihan	Sumber Daya Kesehatan	Depkes	470,0
i)	0048	Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian	1. Pendidikan bagi 45.000 bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya pada lembaga pendidikan tenaga kesehatan pemerintah; 2. Terselenggaranya 1.200 orang internship dokter; 3. Terselenggaranya tugas belajar bagi dokter/dokter gigi pada program spesialis, mitra spesialis, tenaga pendidik dan SDM kesehatan sebanyak 6.530 orang; 4. Pendayagunaan 700 residen senior; 5. Terselenggaranya pelatihan bagi 750 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kesehatan; 6. Peningkatan jumlah, jenis kualitas, sarana dan prasarana di 33 Poltekkes; 7. Terlaksananya 500 riset bagi tenaga pendidik.	Pendidikan Tinggi	Depkes	1.300,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 8. Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penduduk di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan						
a)	2819	Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Penduduk di Puskesmas dan jaringannya	1. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan dasar di seluruh Puskesmas dan Jaringannya khususnya bagi seluruh masyarakat miskin 2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat di 101 Puskesmas Prioritas di daerah perbatasan dan Pulau-pulau terluar	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	1.000,0
b)	2812	Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit	Persentase RS yang melayani pasien maskin peserta program Jamkesmas 100%	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	4.584,0
KELUARGA BERENCANA						
Fokus 9. Pemantapan Revitalisasi Program KB						
a)	0024	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	Perluasan aplikasi sistem informasi Program KB berbasis IT yang terintegrasi di pusat dan 33 provinsi;	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	BKKBN	15,3
b)	6365	Intensifikasi Advokasi dan KIE KB Nasional	Terlaksananya advokasi dan KIE Program KB Nasional melalui media massa dan media luar ruang di seluruh tingkatan wilayah; Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam promosi dan KIE Program KB nasional; Pengembangan metoda dan bahan advokasi dan KIE Program KB di pusat, 33 prov, 495 kab/kota	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	BKKBN	75,0
c)	6367	Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya keluarga balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB menjadi sekitar 2,6 juta; Meningkatnya keluarga remaja yang aktif mengikuti kegiatan kelompok BKR menjadi sekitar 1,3 juta; Meningkatnya keluarga lansia yang aktif mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga lansia (BKL) menjadi sekitar 1,2 juta keluarga; dan meningkatnya akses terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif dan pemantapan kesertaan ber-KB bagi 1,4 juta keluarga miskin (Pra S dan KS I)	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	BKKBN	50,0
d)	6369	Jaminan Pelayanan KB Berkualitas Bagi Rakyat Miskin.	1) Tersedianya alat dan obat KB gratis bagi sekitar 3,7 juta PB miskin (keluarga Pra S dan KS I) dan 11,9 juta PA miskin, dengan rincian: a. Tersedianya IUD bagi 572,9 ribu PB miskin, Implant bagi 199,6 ribu PB miskin; pelayanan MOP bagi 12,2 ribu PB miskin, dan MOW bagi 26,9 ribu PB miskin, Suntikan bagi 1,4 juta PB miskin, Pil bagi 1,3 juta PB miskin, dan Kondom bagi 103,4 ribu PB miskin	Keluarga Berencana	BKKBN	527,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			b. Tersedianya pil bagi 3,4 juta PA miskin, suntikan bagi 5,8 juta PA miskin, dan kondom bagi 204,5 ribu PA miskin, IUD bagi 899,2 ribu PA miskin, MOP bagi 101,7 ribu PA miskin, MOW bagi 484,1 ribu PA miskin, Implant bagi 895,4 ribu PA miskin 2) Peningkatan akses pelayanan KB di daerah Galciltas di 199 kab/kota; 3) Terselenggaranya ayoman pasca pelayanan KB bagi sekitar 280 ribu kasus; 4) Meningkatnya penggunaan alat KB jangka panjang (MOP, MOW, IUD, Implant) menjadi bagi sekitar 852,0 ribu peserta KB Baru dan sekitar 6,5 juta peserta KB Aktif Catatan: pengadaan alokon direncanakan untuk melayani PB miskin dan PA miskin sampai dengan Juni 2011			
e)	6370	Pembentukan, Pengembangan, Pengelolaan, dan Pelayanan PIK-KRR	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas PIK-KRR di tingkat kecamatan menjadi sekitar 8.145 kelompok 2. Pengembangan pusat rujukan (*center of excellent*) PIK-KRR di 33 provinsi	Kesehatan Reproduksi Remaja	BKKBN	25,0
f)	6371	Pendataan Keluarga dan Individu dalam Keluarga	Seluruh desa/kelurahan (sekitar 75.700 desa/ kelurahan) menggunakan hasil pendataan keluarga sebagai basis/dasar untuk pembinaan pengelolaan operasional KB lini lapangan; Terselenggarannya sistem informasi dan monitoring manajemen Program KBN di pusat, 33 provinsi, dan 495 kab/kota	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	BKKBN	50,0
g)	6372	Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat	Terselenggaranya pembinaan operasional lini lapangan bagi sekitar 24.765 penggerak KB di desa; terselenggaranya advokasi dan KIE Program KBN melalui forum kerjasama LSM dan swasta di pusat, 33 Provinsi, dan 495 kab/kota; Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data Informasi KB Nasional	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	BKKBN	38,6
h)	6373	Peningkatan Jejaring Pelayanan KB Pemerintah dan Swasta/Non-Pemerintah	1. Terlaksananya pembinaan pelayanan KB di sekitar 23.500 Klinik KB Pemerintah dan Swasta 2. Terlaksananya pembinaan peserta KB melalui tempat pelayanan KB swasta lainnya (Apotek, Dokter, & Bidan) di sekitar 70 ribu tempat pelayanan	Keluarga Berencana	BKKBN	35,0
i)	6374	Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola KB	Meningkatnya kompetensi 27.000 petugas lapangan, pengelola dan pelaksana program KB melalui pendidikan, pelatihan, dan orientasi porgram; dan Terselenggaranya pendidikan jangka panjang/pendek bagi 550 orang	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKKBN	75,8
j)	6352	Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Program KB Nasional	Terlaksananya mini survei di 495 kab/kota dan survei indikator RPJMN di 33 provinsi serta pengembangan indikator program	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKKBN	8,9
AGAMA						
Fokus 10. Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama						
a)	3340	Pembangunan sekber kerukunan umat beragama	Dibangunnya gedung FKUB sebanyak 15 unit	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Depag	4,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
b)	3467	Bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama	Tersalurkannya bantuan operasional untuk 183 FKUB	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Depag	4,74
c)	3468	Bantuan kegiatan pemulihan pasca konflik	Tersalurkannya bantuan kegiatan pemulihan pascakonflik untuk 33 lokasi	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Depag	5,14
KEBUDAYAAN						
Fokus 11. Pembangunan Jati Diri dan Karakter Bangsa yang Berbasiskan pada Keragaman Budaya						
a)	4861	Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa	20 dialog interaktif dan 5 kampanye Jati Diri dan Karakter Bangsa melalui media massa; Gita Bahana Nusantara; Kemah dan Jelajah Budaya; 2 Konsep kebijakan; dan Kerjasama Integral Lintas Sektor di 33 Provinsi	Pengembangan Nilai Budaya	Depbudpar	8,00
b)	4865	Pendukungan pengembangan nilai budaya daerah	Pendukungan 36 event budaya daerah di 18 provinsi	Pengembangan Nilai Budaya	Depbudpar	10,00
c)	4866	Pengembangan nilai sejarah	Penulisan Sejarah Pemikiran Tokoh Kebudayaan 1 naskah dan Dinamika Sosial Masyarakat Perbatasan 1 naskah; serta Lawatan Sejarah VIII: "Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat"	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	4,00
d)	4867	Pengembangan geografi sejarah	Pemetaan sejarah Indonesia masa Prasejarah 1 naskah dan Arung Sejarah Bahari di NTT untuk 200 orang	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	4,00
e)	4869	Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	Penyelamatan dan pengelolaan 7 kawasan peninggalan kepurbakalaan dan penanggulangan 15 kasus pencurian/penyalahgunaan BCB	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	15,80
f)	4870	Pengelolaan Permuseuman	Perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengadaan koleksi di 6 Museum (Museum Nasional, Museum Benteng, Museum Sumpah Pemuda, Museum Rumusan Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Basoeki Abdullah), dan penyelenggaraan Visit Museum 2010 sebanyak 10 kegiatan	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	14,75
g)	4871	Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah	Pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan kepurbakalaan di 14 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) dan 11 BPSNT, Rehabilitasi 3 situs BCB Pasca Gempa di Yogyakarta seluas 2.290 m3, pengembangan dan penataan Kawasan Candi Gedong Songo seluas 450 m3, Penyelesaian Diorama Monumen Pansar Sudirman seluas 150 m2, dan Pengembangan Pusat Informasi Majapahit II seluas 3.340 m2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	52,64
h)	4872	Pendukungan pengelolaan museum daerah	Pendukungan dan pembinaan teknis 25 Museum Daerah	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	3,30
i)	4875	Pengembangan dan Pelestarian Kesenian	Penyiapan kebijakan kesenian (5 naskah), inventarisasi (1 naskah), revitalisasi (1 naskah), dukungan bagi 30 organisasi kesenian daerah; misi kesenian di dalam dan luar negeri sebanyak 20 kelompok	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	16,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
j)	4876	Pengembangan Perfilman Nasional.	Penyiapan kebijakan bidang perfilman (1 naskah), promosi/diplomasi film dalam dan luar negeri (6 even), fasilitasi pengembangan film nasional (5 organisasi), peningkatan apresiasi film (6 even), pendokumentasian (1 naskah), dan peningkatan mutu karya film nasional (6 even)	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	14,00
k)	4878	Peningkatan Sensor Film	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan 40.000 judul film, rekaman video dan sarana publikasi, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan mitra terkait, serta penyediaan alat sensor film sebanyak 3 unit	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	15,35
PEMUDA DAN OLAHRAGA						
Fokus 12. Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga						
a)	3306	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi 1.500 pemuda; terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan bakti pemuda antar provinsi (BPAP)	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	53,72
b)	7604	Perluasan Pengerahan Tenaga Terdidik untuk Pembangunan Perdesaan	1.500 Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3)	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	38,21
c)	7613	Pemasyarakatan dan Pembinaan Olahraga	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat berolahraga di 33 provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	47,20
d)	7623	Pembinaan Olah Raga yang Bersifat Nasional	Terbinanya sentra-sentra olahraga unggulan daerah di 33 provinsi; Pelaksanaan kompetisi olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat; dan Pembinaan cabang olahraga prestasi melalui pusat pelatihan daerah (pelatda) dan pusat pelatihan nasional (pelatnas)	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	95,96
e)	7624	Pembinaan Olah Raga yang Bersifat Internasional	Terselenggaranya 6 even olahraga internasional (baik single event maupun multi event); 518 orang atlet andalan; Pelaksanaan program atlet lanjutan	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	294,76
f)	7626	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana	Terjalinnya kemitraan dalam mendukung pembangunan dengan pemberian 50 paket bantuan prasarana dan sarana olahraga bagi Provinsi/Kab/Kota; Pengembangan sentra pelayanan rehabilitasi Cedera Olahraga dan laboratorium anti doping; dan Pembangunan/rehabilitasi Venue untuk pelaksanaan SEA Games	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kemeneg Pora	40,00

Prioritas 3

PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL

REFORMASI BIROKRASI:

Fokus 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
Fokus 2. Pengembangan Sistem Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
Fokus 3. Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas;
Fokus 4. Penguatan kapasitas pemerintah daerah;

PEMANTAPAN HUKUM:

Fokus 5. Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
Fokus 6. Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi;
Fokus 7. Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah;

PEMANTAPAN DEMOKRASI:

Fokus 8. Peningkatan efektifitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, dan partai politik;
Fokus 9. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

KEAMANAN NASIONAL:

Fokus 10. Penguatan wilayah perbatasan;
Fokus 11. Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan;
Fokus 12. Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat;
Fokus 13. Peningkatan penggalangan keamanan nasional.

Prioritas 3 PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
REFORMASI BIROKRASI						
Fokus 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
s)	0102	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya 3 kali sosialisasi UU Pelayanan Publik dan penyusunan 3 PP.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kemeneg. PAN	3,00
t)	0109	Survei/Studi Kelayakan/ Penyusunan Master Plan/DED/ SID	Tersusunnya indeks pelayanan publik dan tersusunnya laporan hasil survey pelayanan publik.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kemeneg. PAN	2,50
u)	0625	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya SIAK on-line dan penerapan KTP tunggal berbasis NIK ber-chip dan *biometric* di 33 Provinsi untuk tahun pertama dari yang direncanakan selama 3 tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Depdagri	440,00
v)	0649	Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	(1) Terfasilitasinya penerapan 4 SPM (Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota) di 33 Provinsi; (2) Terfasilitasinya penyusunan anggaran pemerintahan daerah yang mengakomodasi penerapan SPM; (3) Tersusunnya SPM bidang pendidikan dan 7 SPM pada bidang-bidang lainya yang belum terselesaikan pada tahun 2009	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Depdagri	5,00
w)	5778	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	(1) Fasilitasi bantuan teknis *e-government* untuk 8 Pemda (2) Portal layanan publik	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	I. Depkominfo	3,50
x)	0828	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam	Terlaksananya diklat teknis dalam rangka penerapan penyelenggaraan standar	Program Peningkatan	Depdagri	7,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah	pelayanan minimal pada 2 bidang, diklat fungsional untuk koordinasi dan sinergi kegiatan diklat, penyusunan kursil diklat, pelaksanaan analisis kebutuhan diklat, diklat penyusunan spm bagi pejabat strategis	Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah		
y)	0785	Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan	(1) Terlaksananya inventarisasi, dan analisis data di bidang perkotaan di 5 kota (2) Terlaksananya finalisasi dan sosialisasi kebijakan Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan di 7 provinsi (3) Terfasilitasinya kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga di 6 kawasan metropolitan; (4) Tersusunnya rancangan pembentukan lembaga/badan pengelolaan kawasan perkotaan (5) Terfasilitasinya kerjasama kawasan perkotaan dalam negeri dan luar negeri *(sister city)* di 20 kota (6) Terfasilitasinya jaringan lintas perkotaan (*city sharing)* di 10 kota (7) Tersusunnya evaluasi penyelenggaran perencanaan di kawasan perkotaan di 10 kawasan perkotaan (8) Tersusunnya evaluasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah pada 10 provinsi	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	Depdagri	4,30
z)	0102	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	(1) Terlaksananya reformasi birokrasi Departemen Keuangan pada 10 kantor di DJKN Modern (2) Tersedianya laporan penyempurnaan *standard operating procedure* (SOP) (3) Tersusunnya pola mutasi dan karir lingkup Departemen Keuangan	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Depkeu	35,00
Fokus 2. Pengembangan Sistem Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS						

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
p)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undanganUU Kepegawaian Negara dan Peraturan Pelaksanaannya	Tersusunnya RUU Kepegawaian Negara dan 2 PP	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	2,80
q)	5604	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-udangan Sistem Manajemen Pengelolaan SDM Aparatur sesuai Sistem Karir dan Remunerasi	Tersusunnya 1 pedoman dan 1 juknis tentang penerapan harga jabatan (*job grading* dan *job pricing*)	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	1,80
r)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya 2 RPP dan 1 Permen PAN untuk pemantapan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	1,80
s)	7358	Pengembangan Karir dan Assesment Center PNS	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM PNS melalui *assesment center*	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKN	0,60
t)	0054	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Pengembangan pangkalan data/database kepegawaian nasional)	(1) Terbangunnya sistem database kepegawain nasional yang lengkap, akurat, terkini, dan aman. (2) Terbangunnya sistem jaringan terpadu yang mampu memfasilitasi manajemen pelayanan pegawai dan seluruh unit BKN di Pusat dan di 12 Kantor Regional (Kanreg) yang terintegrasi dengan instasi pusat dan daerah. (3) Terbangunnya aplikasi software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung manajemen pelayanan data pegawai dan manajemen informasi (4) Terbangunnya mailtracking sistem kepegawaian di seluruh unit kerja yang ada di BKN (5) Terlaksananya *basic training* bagi pegawai BKN dalam rangka operasionalisasi sistem informasi kepegawaian / NCSIS (6) Dihasilkannya tata naskah kepegawaian dalam bentuk elektronik.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	BKN	125,60
u)	7257	Pengembangan Sistem Pendayagunaan Aparatur Negara	(1) Tersusunnya juknis kediklatan pola baru (2) Revitalisasi SIDA dalam rangka implementasi sistem pembaharuan diklat aparatur (3) Tersusunnya laporan hasil evaluasi dan rekomendasi pelaksnaan uji coba penerapan sistem pembaharuan diklat aparatur pola baru	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	LAN	1,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			(4) Sosialisasi sistem diklat aparatur pola baru (lanjutan)			
v)	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Pedoman/Panduan sistem rekruitmen berbasis kompetensi dengan instrumen *computer assisted test* (CAT) yang telah dikembangkan	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKN	0,35
Fokus 3. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas						
a)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian peraturan perundang-undangan RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tersusunnya 1 RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LKPP	2,50
b)	0093	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tentang e-procurement	Tersusunnya 1 Perpres tentang *e-procurement*	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LKPP	0,91
c)	0090	Penyelenggaraan Sosialisasi / Diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi	Terselenggaranya sosialisasi Perpres pengganti Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di 33 Provinsi	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LKPP	3,50
d)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan (bidang Pendayagunaan Aparatur Negara)	(1) Terlaksananya pembahasan (lanjutan) RUU Administrasi Pemerintahan dan penyusunan PP (2) Terlaksananya uji materi dan pembahasan RUU Etika Penyelenggaraan Negara dan penyusunan PP (3) Terlaksananya uji materi RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan penyusunan PP	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Kemeneg. PAN	5,60
e)	0109	Implementasi Reformasi Birokrasi Instansi	(1) Terlaksananya 14 instansi yang dinilai dan 6 instansi yang dievaluasi (2) Terlaksananya sosialisasi, asistensi dan monitoring terhadap 50 instnasi pusat dan daerah	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Kemeneg. PAN	8,00
f)	5354	Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Unit Departemen/ LPND/Lembaga Non-Struktural	(1) Tertatanya organisasi dan tata kerja instansi pusat	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kemeneg. PAN	2,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			(2) Tersusunnya 1 laporan evaluasi kelembagaan instansi pusat termasuk Lembaga Non-Struktural (LNS)			
g)	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Dilaksanakannya ujicoba penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah terpilih di 2 instansi di 2 kabupaten di Jawa Barat dan Banten	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LAN	0,80
h)	7306	Penerapan Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	(1) Implementasi Sistem Kearsipan Statis berbasis TIK (SKSTI) di 12 Provinsi (2) Implementasi Sistem Kearsipan Dinamis berbasis TIK (SKDTI) di 10 instansi pemerintah pusat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ANRI	4,00
i)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	(1) Tersusunnya RUU tentang Sistem Pengawasan Nasional (Siswanas) beserta PP (2) Tersusunnya RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara beserta PP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Kemeneg. PAN	2,50
j)	0084	Penyelenggaraan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemda	(1) Tersusunnya SOP Pembinaan SPIP (2) Terselenggaranya sosialisasi SPIP pada 690 entitas/instansi pusat dan pemda	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPKP	18,80
Fokus 4. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah						
z)	0714	Pemantapan Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan	Terselenggaranya TOT peningkatan kapasitas pemerintahan 15 angkatan; Bintek tupoksi BPD 5 angkatan; serta pembangunan kantor desa di 20 lokasi, Bintek/pelatihan dan penataan organisasi pemerintahan desa di 50 kabupaten/kota, Penegasan dan penetapan batas desa di 20 kabupaten, Pengembangan *pilot project* pembangunan desa terpadu di 35 desa, Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 15 provinsi (Pamsimas) dengan fokus kegiatan untuk penyusunan pedoman teknis, pelatihan konsultan provinsi, orientasi MPA-PHAST bagi aparat provinsi dan kabupaten; Pembinaan program dan penguatan kelembagaan di 15 provinsi, 110 kabupaten	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	56,03
a)	0650	Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD	Terselenggaranya workshop untuk meningkatkan kemampuan Pemda dan Anggota DPRD Pemilu 2009 dari 33 provinsi dan 5 Kabupaten/kota per provinsi (Pimpinan dan Ketua Komisi) dalam penyusunan peraturan daerah diantaranya workshop RIA (Regulatory Impact Assesment) dan workshop terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang baru	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Depdagri	1,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
a)	0654	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Ditjen BAKD dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di 171 daerah terpilih	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Depdagri	11,50
ö)	0770	Fasilitasi pelaksanaan budaya politik demokratis	(1) Terlaksananya pendidikan politik masyarakat di 5 daerah (2) Terlaksananya pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan anggota DPRD terpilih (3) Terfasilitasinya pelaksanaan forum dan konsultasi antara lembaga legislatif dan masyarakat (4) Terwujudnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemantapan kesatuan bangsa dan politik dengan 33 provinsi (5) Terfasilitasinya parpol, eksekutif, kepala daerah dan pemda dan masyarakat sipil terkait perbaikan proses politik	Program Perbaikan Proses Politik	Depdagri	20,00
PEMANTAPAN HUKUM						
Fokus 5. Pemantapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan						
a)	0655	Pembentukan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan 12 RUU; Pembahasan 18 RUU; Penyusunan 10 RPP; harmonisasi/sosialisasi 90 PP; Penyusunan 12 Naskah RUU; Pengkajian 15 kegiatan; Penelitian 7 kegiatan	Program Pembentukan Hukum	Depkumham	26,70
b)	0093	Pemberdayaan Biro Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penyusunan/ Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan)	Sosialisasi peraturan mekanisme proses pembentukan peraturan perundang-undangan.	Program Pembentukan Hukum	Depkumham	1,50
c)	0795	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor dengan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi	(1) Terfasilitasinya penyesuaian perundang-undangan sektor dengan perundang-udangan desentralisasi pada 5 sektor (Kesehatan, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Penggunaan Lahan, Kahutanan) ; (2) Terfasilitasinya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara peraturan daerah (Perda), peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan peraturan sektor.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Depdagri	5,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 6. Pemantapan Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara Korupsi						
a)	1097	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Pemantapan dan sosialisasi rencana aksi strategi nasional implmentasi konvensi UNCAC 2003)	(1) Dokumen rencana aksi Stranas implementasi UNCAC (2) Laporan hasil konsultasi publik, dokumen *leaflet*, dan laporan hasil *talkshow* rencana aksi Stranas implementasi UNCAC 2003 (3) Dokumen rencana aksi instansi pada Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, KPK, dan Depag serta dokumen rencana aksi daerah pada 4 wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappenas	1,3
b)	7654	Percepatan Penyelesaian Perkara Korupsi yang Menarik Perhatian Masyarakat	1.700 perkara tipikor	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan	146,89
			Penyelidikan 60 kasus, penyidikan 55 perkara, penuntutan 45 perkara, eksekusi putusan inkrach 40 perkara, perlindungan saksi 1 paket, supervisi 45 kasus, kordinasi 55 K/L,pengumpulan bahan keterangan 1 paket	Program Penegakan Hukum dan HAM	KPK	26,20
c)	0097	Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	(1) Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 di 3 wilayah regional (2) Tersusunnya 1 laporan hasil koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Kemeneg. PAN	4,50
Fokus 7. Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah						
a)	0794	Finalisasi dan Sosialisasi UU No. 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah Hasil Penyempurnaan	1) Tersosialisasinya revisi UU No. 32 Tahun 2004; 2) Tersusunnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (Kepmen) Pelaksana Revisi UU No. 32 Tahun 2004; 3) Tersusun dan tersosialisasinya revisi UU no.32 Tahun 2004 dan UU tentang pemilu KDH dan WKDH.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Depdagri	3,00
b)	0788	Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah.	(1) Tersusunnya model-model kerjasama antar daerah dibidang Ekonomi, Pelayanan Publik dan Prasarana Dasar; (2) Replikasi model-model kerjasama antar pemerintah daerah di 5 provinsi percontohan	Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah	Depdagri	1,20

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
PEMANTAPAN DEMOKRASI						
Fokus 8. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Peran Organisasi Masyarakat Sipil, dan Partai Politik						
a)	4701	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat (penyiapan modul dan memulai voters education and infromation)	(1) Terlaksananya pendidikan pemilih bagi masyarakat di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada di tahun 2010; (2) Fasilitasi pembentukan pusat pendidikan pemilih	Program Perbaikan Proses Politik	KPU	23,50
b)	xxxx		(1) Fasilitasi pembentukan pusat partisipasi politik rakyat dalam pengawasan pilkada dan pemilu (2) Fasilitasi peningkatan partisipasi/peran masyarakat dalam pengawasan pemilu	Program Perbaikan Proses Politik	Bawaslu	(PM) (BA 999)
c)	0762	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan untuk Melakukan Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Daerah-Daerah	Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat di daerah oleh 400 OMS	Program Penyempurnaan dan Penguatan Lembaga Demokrasi	Depdagri	20,00
d)	0772	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	(1) Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada 180 OMS; (2) Terlaksananya fasilitasi pembentukan pusat pendidikan kebangsaan (3) Tersusunnya 3 pedoman terkait identitas dan budaya nasional	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan	Depdagri	10,65
e)	0606	Fasilitasi Terhadap Parpol, Eksekutif, Kepala Daerah dan Pemda, dan Masyarakat Sipil	(1) Ditetapkannya UU hasil revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (2) Terfasilitasinya forum organisasi masyarakat sipil untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi (3) Terfasilitasinya pemantapan sosial budaya kemasyarakatan dengan 33 provinsi	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Depdagri	23,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			(4) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan masyarakat sipil (5) Terfasilitasinya penigkatan kapasita FKUB dan FKDM			
f)	0774	Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik	Terfasilitasinya konsultasi dan dialog di 6 wilayah pasca konflik dan perbatasan	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik	Depdagri	9,00
Fokus 9. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik						
a)	0104	Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/ Swasta/ Lembaga	(1) Tersosialisasikannya UU KIP dan peraturan pelaksanaannya kepada lembaga/ badan publik baik di pusat maupun daerah (sampai ke kab/kota) (2) Tersedianya pelayanan informasi publik (3) Terfasilitasinya peningkatan peran lembaga kominfo pusat, daerah dan kemasyarakatan serta Komisi Informasi Daerah, KPI, Dewan Pers, Monumen Pers, dan Museum Penerangan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Depkominfo	62,80
b)	0049	Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia	(1) Terselenggaranya pelatihan budaya dokumentasi bagi 1.048 aparatur pemerintah provinsi dan kab/kota (2) Terlaksananya pelatihan untuk 524 calon CIO di seluruh provinsi/ kab/kota (3) 160 SDM bidang kominfo yang memeproleh pendidikan S2/S3 di dalam dan luar negeri	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Depkominfo	43,96
c)	5753	Pembangunan dan Penguatan Media Center di Daerah	(1) Tersedianya sarana dan prasarana media center di 37 lokasi dan terlaksananya penguatan media centre di 25 lokasi (2) Terlaksananya pelatihan bagi pengelola media centre di 70 daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Depkominfo	7,75
d)	5784	Penyebaran Informasi Publik	(1) Terlaksananya bantuan dana operasional penyebaran informasi publik untuk 32 provinsi dan 50 kabupaten/kota	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Depkominfo	22,47

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			(2) Tersedianya kendaraan operasional siaran keliling untuk 20 lokasi media centre, terutama di daerah perbatasan terpencil, dan pasca/rawan konflik (3) Dukungan komunikasi publik dalam rangka citra positif pemerintah melalui *government public relations* (GPR) (4) Terlaksananya sosialisasi PKH dan PNPM			
KEAMANAN NASIONAL						
Fokus 10. Penguatan Wilayah Perbatasan						
a)	1210	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pos-Pos Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan Laut dan Darat terutama di perbatasan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Nunukan, Sangihe dan Merauke	Terbangunnya pos pertahanan dan keamanan	Program Penegakkan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI	TNI-AL, TNI AD	45,1
	1153		Terlaksananya dukungan material operasi dan pengawasan aktivitas asing di wilayah perbatasan dan daerah rawan	Program Pertahanan Integratif	Mabes-TNI	50,0
	1160			Program Pertahanan Matra Darat	TNI-AD	42,0
	1166			Program Pertahanan Matra Laut	TNI-AL	50,5
	1172			Program Pertahanan Matra Udara	TNI-AU	80,0
	5408			Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	99,9
b)	0792	Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas	Terfasilitasinya pembangunan/peningkatan PLB di Atuk, Jagoibabang (Bengkayang), Nunukan (Sebatik), Entikong dan Kapuas Hulu dan beberapa PLB tradisional lainnya	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depdagri	13,9

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			yang dianggap perlu ditingkatkan			
c)	1410	Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai	Terbentuknya pelayanan kepabeanan dan cukai di 6 kabupaten perbatasan	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	359,4
d)	4711	Operasi Bersama Keamanan Laut	Terlaksananya operasi keamanan laut sebanyak 4 kali, 180 hari operasi mandiri, 17 paket kerjasama operasi, dan 6 paket kebijakan operasi	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	BAKORKAMLA	35,00
e)	0024	Perkuatan Sistem Monitoring dan Surveillances Kelautan	Penyelesaian strategi gelar RCC sebanyak 3 paket termasuk peralatan integrated RCC interface	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	BAKORKAMLA	50,00
	1191		Terlaksananya pengadaan bertahap pesawat Maritime Patrol Aircraft dari Dalam Negeri.	Program Pengembangan Industri Pertahanan	Dephan/TNI	100,00
	0024		Terlaksananya pembangunan Radar Kelautan ALKI I, II, III	Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut	TNI-AL	25,00
f)	1166	Peningkatan Keamanan Transportasi di Selat Malaka dan ALKI	Terlaksananya patroli keamanan laut di Selat Malaka dan ALKI	Program Pengembangan Pertahanan Mata Laut	TNI-AL	5,00
g)	7111	Pemetaan Wilayah Perbatasan	Kajian dan Pemetaan Batas Wilayah Negara RI-Malaysia, RI-PNG dan RI-RDTL; Kajian dan pemetaan batas maritim Indonesia RI-Malaysia dan RI-Filipina; Survei, demarkasi dan pemetaan darat dengan PNG, RDTL, dan Malaysia serta pemeliharaan tanda batas negara dan pemetaan etnik perbatasan; Fasilitasi dan penyediaan peta batas dan wilayah pemerintahan daerah serta kajian penyelesaian konflik batas antar daerah; Pengelolaan Basis data dan sistim informasi batas wilayah negara dan daerah	Program pengembangan Wilayah Perbatasan	Bakosurtanal	15,63
h)	6295	Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)	Terfasilitasinya pengembangan wilayah perbatasan di 24 kabupaten perbatasan (Alor, Belu, Bengkayang, Boven Digoel, Halmahera Utara, Kapuas Hulu, Keerom, Kep. Aru, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Kupang, Kutai Barat, Malinau, Maluku Tenggara Barat, Merauke, Natuna, Nunukan, Pegunungan Bintang, Raja Ampat, Sambas, Sanggau, Sintang, Supiori, Timor Tengah Utara)	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kemeneg PDT	34,00
i)	4643	Pembangunan jalan di kawasan Perbatasan	Terbangunnya jalan dan jembatan di 6 pusat kawasan strategis nasional (PKSN) perbatasan sepanjang 50,8 km jalan dan 147 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan jalan dan jembatan	Dep PU	176,01
j)	4645	Pembangunan Jalan di pulau-pulau terpencil dan pulau terluar	Terlaksananya pembangunan jalan sepanjang 23,7 Km di pulau-pulau terpencil dan pulau terluar.	Program Peningkatan/Pembangunan jalan dan jembatan	Dep. PU	90,45

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
k)	4660	Pengembangan PS kawasan perbatasan	Terbangunnya infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan permukiman di 25 kawasan	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. PU	69,75
l)	4630	Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum pada kawasan strategis	Tersedianya Prasarana dan Sarana air minum di 115 kawasan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Dep. PU	638,60
m)	5771	Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah non ekonomis	Jasa akses telekomunikasi di 31.824 desa, internet di 4.218 kecamatan, dan layanan *internet exchange* di ibukota propinsi	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	Depkominfo	1.002,60
Fokus 11. Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Industri Strategis Pertahanan						
a)	1208	Penggantian dan Pemeliharaan Alutsista Integratif (C4SIR dan Rudal), Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara, Pengadaaan Alutsista.	Terlaksananya penjagaan kondisi alutsista integratif sistem C4SIR dan Pertahanan Kohanudnas, Alutsista Matra Darat : Helikopter dan Ranpur, Alutsista Matra Laut : KRI dan KAL, dan Alutsista Matra Udara : Radar dan Pesawat.	Program Pengembangan Pertahanan Integratif	Mabes TNI	131,6
				Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat	TNI-AD	123,8
				Program Pengembangan Matra Laut	TNI-AL	394,6
				Progam Pengembangan Matra Udara	TNI-AU	292,3
	1209		Terlaksananya pengadaan Alutsista dalam tahapan mencapai minmum essential forces (lanjutan prioritas nasional) baik melalui pinjaman luar negeri maupun dalam negeri	Program Pengembangan Industri Pertahanan.	Dephan/TNI	6.335,9
a)	0024	Pembangunan fasilitas bekal dan kesatriaan di daerah rawan dan pendukung perbatasan	Tergelarnya fasbek dan kesatrian di wilayah rawan dan perbatasan	Program Pengembangan Matra Darat	TNI-AD	154,4
				Program Pengembangan Matra Laut	TNI-AL	90,0
				Program Pengembangan Matra Udara	TNI-AU	110,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
b)	1199	Litbang, Rekayasa, dan Pengembangan Kemandirian Industri Pertahanan.	Tersedianya produk Litbanghan dan alutsista produksi dalam negeri	Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan	Dephan/TNI	11,6
Fokus 12. Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat						
a)	5856	Meningkatkan sistem pelaporan, jangkauan, kualitas dan ketepatan waktu pelayanan kepolisian kepada masyarakat.	Terselenggaranya Sistem Emergency Kepolisian yang handal; Database Krimalitas; dan Aplikasi Teknologi Kepolisian Modern	Program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian	POLRI	50,00
b)	5869	Meningkatkan kapasitas penyidikan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian clearing rate 60%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	100,00
c)	5856	Pembangunan materiil dan fasilitas Polri	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional Polri baik melalui pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri	Program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian	POLRI	2.750,69
d)	5856	Peningkatan mekanisme kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian	Terselenggaranya Validasi organisasi Polri dan dukungan Teknologi Informasi – Masyarakata - Kompolnas	Program sistem dan strategi keamanan.	POLRI/Kompolnas	11,00
Fokus 13. Peningkatan Penggalangan Keamanan Nasional						
a)	5410	Peningkatan SDM & Litbang Rekayasa Intelijen dan Pengamanan Rahasia Negara	Terlaksananya pelatihan dan pendidikan intelijen dan persandian	Program Pendidikan Kedinasan	BIN	5,00
	5453				LEMSANEG	5,86
b)	5403	Peningkatan Kemampuan Penggalangan Keamanan Nasional	Terlaksananya penggelaran teknologi intelijen	Program penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	111,12
	5404					39,22

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
	5405					36,47
c)	5454	Peningkatan Pengamanan Rahasia Negara	Terlaksananya updating sistem SISDINA	Program pengamanan Rahasia Negara	LEMSANEG	150,00
d)	5501		Terlaksananya Desain Sistem Informasi Real Time, akuisisi dan pengolahan informasi ketahanan Nasional	Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan	Wantannas	15,00
	6211		Meningkatnya kapasitas *suppy reduction* pencegahan dan penanggulangan Narkoba.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	BNN	100,00

Prioritas 4

PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

PERTUMBUHAN EKONOMI:

Fokus 1. Peningkatan daya tarik investasi;
Fokus 2. Penguatan daya saing ekspor;
Fokus 3. Revitalisasi industri manufaktur;
Fokus 4. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
Fokus 5. Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
Fokus 6. Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif;

STABILITAS EKONOMI:

Fokus 7. Peningkatan ketahanan pangan;
Fokus 8. Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok;
Fokus 9. Pengelolaan APBN yang berkelanjutan;
Fokus 10. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan;

INFRASTRUKTUR:

Fokus 11. Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil;
Fokus 12. Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta;
Fokus 13. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM);

IPTEK:

Fokus 14. Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional;

ENERGI:

Fokus 15. Peningkatan ketahanan energi

Prioritas 4 PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
PERTUMBUHAN EKONOMI						
Fokus 1. Peningkatan Daya Tarik Investasi						
a)	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Terbangunnya satu Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) secara bertahap di 33 provinsi dan 40 kabupaten/kota dan 13 instansi terkait (tahap II) 2. Pengadaan sarana untuk kegiatan 20 PTSP di daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKPM	54,78
b)	0032	Pembinaan hukum dan organisasi	Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum di bidang penanaman modal sebanyak 18 kasus	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKPM	6,00
c)	6154	Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal	1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan operasional kelembagaan 3 UPIT di Riau, Manado, dan Kendal termasuk penyediaan prasarana dan sarana 3 UPIT 2. Tersusunnya referensi/panduan penerbitan izin usaha dari 12 negara dan 12 daerah; Buku standar verfikasi masterlist bahan baku untuk 5 sektor (industri plastik, logam, makanan, gula, dan minuman); Sosialisasi tatacara dan prosedur penanaman modal di 4 daerah, kaji ulang peningkatan pelayanan pemberian fasilitas di 2 sektor teknis (pertambangan dan perpajakan)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKPM	18,11
d)	6175	Peningkatan Promosi Investasi Di Dalam Negeri	Gelar Potensi Investasi Daerah (2x); Indonesia Investment Expo sebanyak 15 kali; Talk show investasi di dalam negeri (6x); Seminar nasional investasi di dalam negeri (2x); Pameran investasi di dalam negeri (5 di DKI, 4 di luar DKI); penyusunan information kit dalam 5 bahasa (Inggris, Mandarin, Jepang, Arab dan Indonesia).	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPM	17,50
e)	6177	Peningkatan Promosi Investasi Terintegrasi Di Luar Negeri	*Marketing Intelligence* (MI) di 15 negara; Pemberdayaan perwakilan promosi Investasi Luar Negeri di 5 negara; Marketing Investasi Indonesia (MII) di 5 negara; Promosi Investasi Indonesia melalui media internasional; dan persiapan pendirian Pusat Promosi Terpadu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan investasi (IPO)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPM	63,04
f)	0035	Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RIPJM) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penyusunan RPIJM di 32 provinsi	Program Percepatan Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah	Dep. PU (Ditjen Cipta Karya)	30,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
g)	4766	Strategi kebijakan percepatan pengembangan KEK	2 rumusan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 lap sosialisasi/sinkronisasi, 5 rekomen dasi kebijakan infrastruktur dalam percepatan pengembangan wilayah	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kemenko Perekonomian	11,07
h)	1410	Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai	Terlaksananya modernisasi di bidang Kepabeanan dan Cukai dengan terbentuknya 9 KPPBC Madya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Kaltim, Kalbar, Lampung, Sumsel, Keppri, dan Bali	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	359.42
i)	1398	Pemantapan Koordinasi Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan LK	Tersusunnya 20 laporan hasil pengawasan/pemeriksaan/ penyidikan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, tersedianya 20 pedoman/manual/peraturan melandasi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	25,52
j)	5654	Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Operasi tuntuas 900 kasus; operasi sidik 1000 kasus; pengkajian 1000 kasus; penanganan perkara dan non perkara 600 kasus	Program Pengelolaan Pertanahan	BPN	24,68
Fokus 2. Penguatan Daya Saing Ekspor						
a)	7461	Peningkatan Partisipasti Aktif dalam Perundingan di Berbagai Fora Internasional	Partisipasi aktif dalam 150 sidang internasional (termasuk penyelenggaraan sidang) baik yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral, sosialisasi hasil perundingan di 10 daerah.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Depdag	18,00
b)	7464	Peningkatan koordinasi penanganan isu-isu perdagangan internasional	Meningkatnya upaya perlindungan kepada dunia usaha terhadap tuduhan anti dumping dan penanganan isu perdagangan internasional lainnya : 8 kasus yang tertangani	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Depdag	5,00
c)	7470	Penyelenggaraan ITPC	Revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan 20 ITPC dalam rangka penetrasi pasar ekspor tradisional dan nontradisional (termasuk kegiatan bussines matching dan peningkatan jumlah eksportir terutama UKM)	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Depdag	40,00
d)	7472	Pembentukan dan Pengembangan National Single Window dan ASEAN Single Window	Pengembangan sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik dalam rangka pelaksanaan *Indonesia National Single Window* dan *ASEAN Single Window* untuk mendukung pasar tunggal ASEAN (104 perijinan ekspor dan impor on line) serta tersedianya sarana pendukung INATRADE antara lain *help-desk* dan SMS Gateway.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Depdag	2,00
e)	7514	Pelaksanaan pengamatan pasar (*market intelligence*)	Terselenggaranya kegiatan *Market Intelligence* di 20 negara ITPC; Tersedianya informasi ekspor berupa 20 petunjuk pasar, 15 profil produk, 15 analisa pasar, 10 katalog produk di Wilayah Pasar; serta sosialisasi informasi pasar ekspor di 10 daerah potensi ekspor utama	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Depdag	5,25

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
f)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya Undang-undang Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Depdag	6,00
g)	4885	Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata[1)]	Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri melalui media cetak, elektronik, dan e-marketing (125 kali)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	133,55
h)	4903	Pengembangan Meeting, Incentive, Covention, and Exhibition [1)]	Fasilitasi dan promosi penyelenggaraan MICE di 12 destinasi utama MICE Indonesia (68 kali)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	43,60
i)	4886	Pengembangan Informasi Pasar Wisata [1)]	Penyiapan dan pelayanan informasi pasar dalam dan luar negeri (30 kali) dan 1.000 orang peserta FAM Trip dan dukungan penyiapan Indonesia Promotion Office (IPO) di luar negeri	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	42,00
j)	4887	Pendukungan Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah[1)]	Pendukungan pemasaran pariwisata daerah di 33 provinsi (79 Kali)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	36,34
k)	4889	Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan[1)]	3 destinasi / kawasan strategis pariwisata bahari, 3 destinasi / kawasan strategis paraiwisata eko (ekowisata), 3 destinasi / kawasan strategis pariwisata budaya, pengembangan 200 desa wisata melalui program PNPM bidang Pariwisata, 6 pengembangan travel pattern, sertifikasi 5 ribu orang, sertifikasi 100 jenis usaha, dan Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di 9 destinasi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Departemen Budpar	53,40
l)	4890	Pengembangan Standarisasi Pariwisata[1)]	5 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, 15 Diseminasi Destinasi dan 5 Standar Usaha, 5 Lembaga Sertifikasi Nasional	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Departemen Budpar	7,60
m)	4891	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata[1)]	Penerapan kode etik kepariwisataan dunia (15 kali) dan penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat (5 naskah)	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Departemen Budpar	6,50
n)	4896	Pengembangan Kebijakan SDM Kebudayaan dan Pariwisata Nasional.[1]	1.000 aparatur / pelaku kepariwisataan / masyarakat yang memperoleh pendidikan pelatihan bidang budpar	Program Pengembangan Kemitraan	Departemen Budpar	5,40
o)	4901	Pendukungan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah [1)]	750 orang Aparatur Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata di 15 provinsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Program Pengembangan Kemitraan	Departemen Budpar	4,00
Fokus 3. Revitalisasi Industri Manufaktur						
a)	2049	Restrukturisasi Permesinan Industri	Restrukturisasi teknologi proses dan teknologi energi bagi 155 Perusahaan, dan revitalisasi industri potensial ekspor, 80 IKM TPT dan alas kaki	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	253,00
b)	2044	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus	Fasilitasi pembangunan 12 kawasan industri bekerjasama dengan Pemda melalui penyusunan Master Plan, penyusunan rencana detail teknis (detailed engineering design/DED) dan kajian AMDAL	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	20,29

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
c)	2036	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyediaan data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi 650 produk, sosialisasi dan promosi P3DN, pembuatan direktori, fasilitasi HKI	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	35,80
d)	2032	Peningkatan Iklim Usaha Industri melalui Fasilitasi Industri Prioritas	Fasilitasi pemerintah terhadap 30 klaster industri, 1 terminal kayu, kajian kompetensi inti di 40 Kabupaten/Kota	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	106,02
e)	2010	Pengembangan IKM Unggulan Daerah	Pembinaan IKM dengan metode OVOP di 33 propinsi, 75 kabupaten/kota serta penerapan metode OVOP di 14 Provinsi	Program Pengembangan Indsutri Kecil dan Menengah	Depperin	60,00
f)	2021	Peningkatan Standarisasi Industri	Penyusunan 118 Rancangan SNI	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	16,30
g)	2050	Penerapan Standardiasi, Akreditasi dan Peningkatan Mutu	Penerapan di 107 perusahaan lokal yang memperoleh SPPT-SNI serta Penetapan pemberlakuan SNI wajib (10 Permen)	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	22,99
h)	2045	Revitalisasi sentra-sentra IKM dan fasilitasi layanan UPT	20 sentra dan 40 UPT	Program Pengembangan Indsutri Kecil dan Menengah	Depperin	55,00
Fokus 4. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan						
d)	1552	Pengembangan Agroindustri Terpadu	Fasilitasi Investasi Terpadu Hortikultura (FATIH) 34 paket; Pengembangan gerbang ekspor tanaman hias 9 paket; Pengembangan komersialisasi kebun buah 29 paket; Pengembangan sapi perah 2 paket; Roda 2 Inseminator (300 unit); Peningkatan Produksi Pakan Skala Kecil Ruminansia (10 paket) ; Peningkatan Produksi Pakan Skala Kecil Ruminansia (10 paket); Manajemen P2SDS (18 propinsi); UPJA Unggas (30 klp); ULIB (200 unit); Pengembangan agroindustri tepung singkong (MOCAF) (9unit); Pengembangan mutu bokar untuk ekspor (23 unit); Pengembangan mutu biji kopi untuk ekspor (13 unit); Pengembangan agroindustri mete dan minyak atsiri. (10 unit); Pengembangan agroindustri susu sapi (8 unit); Pengembangan agroindustri hortikultura mangga dan jeruk (10 unit)	Program Pengembangan Agribisnis	Deptan	150,2
e)	1554	Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan Perkebunan Komersial (Bahan Baku Bio Energi)	Kegiatan revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet, kapas, jarak, kelapa teh, rempah) (84.300 Ha); Pengembangan Komoditi Unggulan Non Revit (kelapa sawit, jambu mete, karet, kakao, kopi robusta, kina – 20.985 Ha); Revitalisasi Perbenihan; Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan (690 Ha); penguatan Kelembagaan Perbenihan (67 paket); Insentif Pengawas Benih Tanaman (233 org)	Program Pengembangan Agribisnis	Deptan	285,7
f)	1569	Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen	Pengembangan UPJA (350 unit); Koordinasi dan pengawalan (30 unit); Terselenggaranya pengembangan Mekanisasi Pertanian (12 paket); Tersedianya alat dan mesin pertanian bagi pengembangan hortikultura (49 paket); Pengembangan mutu kakao fermentasi untuk ekspor 20 lokasi (20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	61,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			pkt); Pengembangan pelayanan pengujian mutu alsintan (1 pkt)			
g)	1575	Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian, dan Kewirausahaan Agribisnis	Terselenggaranya Magang dan SL GAP (90 paket); Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan SL GAP (33 pkt); SL- PHT perkebunan (88 klp); Pelatihan penyuluh pertanian dan pendidikan kewirausahaan bagi calon petani (30rb org); Pelatihan petugas dan pelatihan petani dibidang teknis agribisnis (10rb org); Diklat pembekalan bagi calon THL-TB PP (10rb org); Diklat enterpreunership bagi ex THL-TB PP (5.608 org); Pembinaan, pendampingan, managemen PSDMP (33 prop)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	166,0
h)	999	Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional	Peremajaan 20 ribu ha , Rehabilitasi 100 ribu ha, Intensifikasi 65 ribu ha, Pemberdayaan Petani 7.250 orang, Operasional TKP, Kegiatan Pendukung, Pembinaan dan Pengawalan di 12 provinsi, 50 kabupaten.	Program Pengembangan Agribisnis	Deptan / Depkeu	PM (BA 999)
i)	4109	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Bertambahnya 200 kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap di 33 provinsi; fasilitasi sertifikasi 3000 bidang tanah nelayan; Terbinanya 300 orang nelayan terlatih, Terwujudnya jaminan sosial bagi nelayan melalui asuransi di 21 pelabuhan perikanan, Terwujudnya pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu berbasis kawasan di Laut Arafura dan Laut Cina Selatan, Terwujudnya pengembangan diversifikasi usaha perikanan oleh 33 kelompok wanita nelayan, Terlaksananya pelayanan perizinan di 33 Provinsi; meningkatnya 100 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) tawar, 50 pokdakan payau dan 100 pokdakan laut yang mampu mengakses permodalan; meningkatnya investasi usaha perikanan budidaya di 33 provinsi; terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha besar dan pembudidaya kecil; terbukanya akses Kredit Modal Kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui sekitar 894 konsultan keuangan mitra bank (KKMB); berkembangnya kemitraan usaha budidaya ikan melalui 14 klaster pengolahan hasil; terbinanya 550 tenaga kerja pengolahan dan pemasaran	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	51,52
j)	4110	Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan	Terselenggaranya sistem pengelolaan kesehatan ikan di 33 provinsi dan berkembangnya 46 UPT Karantina Perikanan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana UPT, terbinanya pengelolaan *community based fisheries* (CBF) melalui *restocking*, pengendalian penyebaran penyakit ikan di 33 provinsi, dan pengembangan Balai Penyidik Penyakit Ikan (BPPI)	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	107,31
k)	4112	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan	Meningkatnya kompentensi 2.000 nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di 6 balai pendidikan dan pelatihan perikanan (BPPP); terakreditasinya 6 sarana pelatihan; 2.350 penyuluh perikanan; 5 Permen dan 1 PP tentang penyuluhan.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	54,76
l)	4113	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan	Terlaksananya gemarikan dan promosi di 33 prov, terbukanya akses pemasaran di Eropa Timur dan Timur Tengah, 5 pameran internasional; tereduksinya hambatan tarif di 1 negara tujuan; terbinanya UKM berpotensi ekspor di 11 Provinsi; dan sosialisasi persyaratan ekspor ke negara mitra di 5 provinsi	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	33,30

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
m)	4114	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya	Berkembangnya fasilitas di 21 UPT Pelabuhan Perikanan; 8 lokasi *port state measure*; Pusat informasi pelabuhan perikanan di 6 pelabuhan perikanan samudra (PPS), 13 pelabuhan perikanan nusantara (PPN), 45 pelabuhan perikanan pantai (PPP); terlaksananya operasional kesyahbandaran di 41 pelabuhan perikanan (PP); pembangunan PP Jakarta Fishing Port, Belawan dan Sibolga; terlaksananya pembangunan pelabuhan perikanan di 15 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) lanjutan; tersedianya data alokasi perijinan penangkapan dan sertifikasi ikan di 11 wilayah pengelolaan ikan (WPP); restrukturisasi 40 armada perikanan di 11 WPP; penguatan *broodstock center*, penerapan standar cara perbenihan ikan yang baik (CPIB) di 33 balai benih ikan sentral (BBIS), 23 balai benih ikan payau (BBIP), 10 balai benih udang (BBU), 5 balai benih udang galah (BBUG).	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	541,65
n)	4115	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Berkembangnya sentra pengolahan di 10 lokasi, sistem rantai dingin di 33 lokasi, Terbinanya 30 UPI, berkembangnya 10 produk bernilai tambah di 10 sentra; Tersedianya 20 rancangan Standar Nasional Indonesia RSNI; terakreditasinya 3 Lab Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan surveilensi di 27 LPPMHP dan pra akreditasi di 9 LPPMHP; tercapainya UPI bersertifikat kelayakan pengolahan dan HACCP untuk 460 UPI; 7 paket metode pengujian dan 7 paket monitoring	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	75,00
o)	4116	Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan	Terlaksananya percontohan usaha produksi, temu lapang dan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) utk 50 lokasi kwsn budidaya air payau, 100 lokasi kwsn budidaya air tawar, 100 lokasi kwsn budidaya laut; terbangunnya 5 lokasi kawasan usaha perikanan budidaya berkelanjutan (SAFVER); berkembangnya kelembagaan dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran di 6 PPS, 3 PPN dan 4 PPP; berkembangnya otoritas kompeten hasil perikanan di 7 Provinsi; dan terlaksananya verifikasi UPI dalam rangka revitalisasi perikanan terpadu di 8 pelabuhan perikanan	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	213,90
p)	4117	Pengembangan Rekayasa Teknologi Terapan Perikanan	16 paket rekayasa dan alih teknologi pengolahan 16 paket diseminasi teknologi penangkapan; 4 UPT Budidaya air payau, 4 UPT Budidaya air tawar dan 4 UPT Budidaya laut, serta UPT Tambak Pandu Karawang	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	73,11
q)	4118	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	Tersusunnya rencana pengelolaan perikanan (RPP) di 2 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di Laut Cina Selatan dan Laut Arafura; tertatanya perairan pedalaman; identifikasi sumber daya ikan (SDI) terancam punah; pemacuan stok SDI; koordinasi pengelolaan perikanan melalui forum koordinasi pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan (FKPPS) nasional dan 11 FKPPS regional; rancangan PP bidang pengawasan; pengawasan ketaatan kapal perikanan di 100 pelabuhan pangkalan.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	23,85
r)	DAK	Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan pemanfaatan sumber daya, penyuluhan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
s)	4006	Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu/HHBK/Jasling sebesar 1% dan meningkatnya unit IUPHHK bersertifikat PHPL sebesar 10%	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	39,0
t)	4011	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Draft final peta penunjukan dan penetapan KH di propinsi Riau dan Kalteng (2 judul); Data penetapan kawasan hutan yang sudah temu gelang di 33 propinsi (33 judul); Sistem informasi pengukuhan KH; Data hasil identifikasi dan tindak lanjut permasalahan kawasan hutan di 20 propinsi (20 buku); Laporan tindak lanjut hasil pencermatan permasalahan perubahan fungsi di 4 lokasi (4 judul); Peta hasil telaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan KH di 20 lokasi (20 judul).	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	46,5
u)	4034	Pembangunan KPH	Draft SK penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi (4 judul); Data fasilitasi implementasi pembangunan KPH di 33 propinsi (33 judul); Data monitoring dan evaluasi pembangunan KPH di 15 propinsi (15 judul).	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	10,2
v)	4038	Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat	Terwujudnya pemberian ijin HTI/HTR kumulatif seluas 12,4 juta ha dan penanaman kumulatif seluas 6 juta ha (tahun 2010 HTI seluas 600.000 ha dan HTR seluas 200.000 ha)	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	27,03
w)	4052	Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan	Evaluasi IPHHK kapasaitas > 6.000 m3/th 40 unit; Meningkatkan produk industri hasil hutan yang bersertifikat 10%; Meningkatnya efisiensi penggunaan bahan baku industri rata-rata 60%	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	16,5
Fokus 5. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja						
c)	3621	Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi	Berfungsinya 11 BLK (UPTP) untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Depnakertrans	100,00
d)	3627	Percepatan pengakuan/rekognisi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional	Diakuinya sertifikat kompetensi pada 10 bidang profesi tenaga kerja di bidang industri manufaktur dan jasa oleh pengguna tenaga kerja dan profesi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Depnakertrans	50,00
e)	3535	Fasilitasi pendukung pasar kerja, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi, penyelenggaraan bursa kerja	Tersedianya informasi pasar kerja on-line yang akurat, terintegrasi dan mutakhir di 2 Provinsi dan 228 Kabupaten/Kota	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Depnakertrans	100,00
f)	3522	Pemberian dorongan dan penyempurnaan pelaksanaan negosiasi bipartit	Terselenggaranya proses negosiasi upah, kondisi kerja, dan penyelesaian perselisihan di 33 Provinsi	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	77,20
Fokus 6. Peningkatan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumber Daya Produktif						

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
a)	0093	Penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM	1 Paket	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM	Kemeneg KUKM	12,00
b)	5158	Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi dan pengembangan industri kreatif	2.130 UMKM, 20 UKM dan 10 Koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kemeneg KUKM	18,70
c)	5178	Penyelenggaraan Promosi KUKM	3.000 KUKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Kemeneg KUKM	36,00
d)	3571	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat transmigrasi sebanyak 14.160 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	67,25
e)	3586	Pengembangan usaha ekonomi masayarakat transmigrasi	Terwujudnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 14.160 KK	Program Pengembangan Wilayah Starategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	42,56
f)	4756	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM	2 rekomendasi kebijakan, 5 laporan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM	Kemenko Perekonomian	2,50
g)	5157	Koordinasi Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi	2 paket rekomendasi dan 5 lap kebijakan mengenai pengembangan UMKM berbasis teknologi di daerah serta 4 lap hasil peninjauan, 1 lap raker, 2 lap monitoring kebijakan iklim usaha	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM	Kemenko Perekonomian	6,70
STABILITAS EKONOMI						
Fokus 7. Peningkatan Ketahanan Pangan						
d)	0021	Koordinasi, monitoring, & evaluasi stabilisasi harga pangan pokok, cadangan pangan dan penanganan pangan strategis	8 rumusan kebijakan koordinasi stabilisasi harga pangan pokok, cadangan pangan dan penanganan pangan strategis (termasuk Timnas Stabilisasi harga Pangan Pokok)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kemenko Perekonomian	7,20
e)	1580	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Meningkatnya kemampuan 440 Gapoktan dalam pengelolaan distribusi pangan dan cadangan pangan masyarakat di sentra produksi pangan; terlaksananya pemantauan dan analisis distribusi harga pangan di 275 kab, 33 provinsi.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	134,4
f)	1544	Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pemberdayaan kemandirian pangan di desa rawan pangan (1.374 desa) dan Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat di lahan kering (19 kab)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	169,4
g)	1567	Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian	Revitalisasi penggilingan padi kecil milik gapoktan di 54 kabupaten (54 paket); Pengembangan unit pengeringan dan penyimpanan jagung (5 unit); Pengembangan pasar tanaman hias (horti) 5 lokasi; Pengembangan pasar tani 34 unit (34 lokasi); Pengembangan STA dan kemitraan 9 lokasi;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	124,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Pengembangan pasar ternak 20 lokasi; Pengembangan pasar lelang 5 lokasi; Pengembangan informasi pasar (Insentif petugas dan sarana) di 150 kab/kota (4 sub sektor)			
h)	1563	Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur Pertanian	Jariangan Irigasi (135.000 ha); Kelengkapan irigasi lainnya (875 unit); Jalan usahatani/produksi (1.756 km);Pengelolaan lahan (39.100 ha); Pengembangan SRI (100 unit); Pembukaan lahan pertanian (15.200 ha); Perluasan areal perkebunan, horti, dan peternakan (16.000 ha)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	678,7
i)	1564	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan	Jumlah operasional BPMPT (1 unit); Jumlah operasional BBPOPT Jatisari (1 unit); Jumlah operasional BPTPH (29 unit); Pengendalian OPT (33 unit); Koordinasi dan pengawalan pestisida (33 unit); Operasional THLPOPT-PHP (1.288 org; Penyelenggaraan SLPHT (300 unit); Penyelenggaraan SL-Iklim (100 unit); Terlaksananya pengelolaan OPT Hortikultura (33 paket); Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hortikultura (1 paket); Terlaksananya Operasionalisasi BPTPH)33 paket); Terselenggaranya Kegiatan Deteksi dini dan mitigasi dampak fenomena iklim (17 paket); Terselenggaranya pembayaran honor POPT PNS (307 org); Pengendalian OPT perkebunan kelapa, karet, jambu mete, lada, kopi, cengkeh (7258 ha); Operasional laboratorium (Lab. Lapangan, lab. Hayati, UPPT)(47 unit); Insentif petugas hama dan penyakit (851 org); pencegahan penyakit : ANTHRAX (250rb ds), RABIES (400rb ds), BRUCELLOSIS (150rb ds), Hog cholera (HC) (100rb ds), JEMBRANA (30rb ds); Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik ; Pendampingan pembangunan lab BPMSOH dan operasional BPPV Subang dan Lab lainnya; Fasilitasi Puskeswan (15 unit); Pengamatan Penyakit Hewan Menular (BBV, BPPV dan PUSVETMA) (8 unit); Pengawasan Obat hewan (Fasilitasi BPMSOH dan Pedoman Pendaftaran Obat Yang Baik); Penanggulangan penyakit reproduksi pada sapi potong (30rb ekor); Peningkatan pelayanan keswan; Pembangunan lab AI (bantuan Jerman); Penyediaan pangan asal hewan ASUH (33 prop); Penerapan jaminan keamanan pangan pd mata rantai prod susu segar (6 unit); Pengembangan GHP pada unit usaha telur (5 prop); Monit & surveilans residu cemaran mikroba pada produk hewan (24 prop); Pengendalian penanggulangan zoonosis (33 prop); Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dan RPU (20 okt); Pengawasan dan Pelayanan Karantina Pertanian (323 wilker); Fasilitasi dan sertifikasi terhadap kegiatan ekspor di 20 lokasi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	457,3
j)	1565	Pengembangan Pembibitan Sapi	Pengembangan perbibitan sapi/kerbau (22 pkt); Pengembangan perbibitan unggas(23 klp); Perbibitan kambing/domba-babi (17 kel); Peningkatan perbibitan sapi perah (10 klp); Faslitasi UPT Perbibitan (8 klp)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	55,0
k)	1566	Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan Mekanisme Subsidi Pupuk	Operasional BBPMBTPH Cimanggis (1 unit); Operasional di BPSBTPH (29 unit);Operasional di BBI (27 unit); Pengembangan perbenihan 33 prop 200 kab; Koordinasi dan pengawalan perbenihan; Pengawas benih/bibit (700 org); Terlaksanya perbanyakan benih hortikultura dan operasional BBH (33 paket); Terselenggaranya Operasional Lab Kultur Jaringan (11 pkt); Penguatan BPSBTPH dan BPMP TPH Cimanggis (32 pkt);	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	107,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Terlaksanaya revitalisasi Perbenihan Hortikultura (bawang merah, jamur, jahe, anggrek, durian, jeruk keprok) (6 pkt); Terlaksananya kegiatan perbenihan hortikultura (1 pkt); Terselenggaranya pembayaran BOP Pengawas Benih (700 orang); Bantuan benih mendukung gerbang ekspor tanaman hias (6 pkt); Bantuan benih di kawasan terintegrasi hortikultura (49 pkt); Akselerasi peningkatan produksi tebu: Pembangunan kebun bibit berjenjang (250 ha), Perluasan tebu rakyat (1.025 ha), Biaya operasional TKP dan pelatihan (71 org), Pengawalan tebu (133.567 Ha)			
l)	1571	Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian	Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (85 tek); Varietas unggul baru (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (40 VUB); Bibit unggul ternak (4 jenis); Teknologi pengelolaan (35 tek); Kebijakan pengembangan sumberdaya (10 rekom); Pengembangan suberdaya (5 paket); Rekomendasi kebijakan (30 rekom); Diseminasi dan penjaringan inovasi teknologi (32 prop)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	334,0
m)	1570	Peningkatan produksi, produktivitas & mutu produk pertanian	Jumlah satker pengawal SLPTT (400 satker); Jumlah SL-PTT padi non hibrida (80rb poktan); Jumlah SL-PTT padi hibrida (20rb poktan); Jumlah SL-PTT padi lahan kering (12 rb poktan); Jumlah SL-PTT jagung hibrida (10rb poktan); Penyelenggaraan SL-PTT kedelai (25rb poktan); Penyelenggaraan SL-PTT kacang tanah (5rb poktan); Pelatihan PL SL-PTT padi (30 unit); Pelatihan PL SL-PTT jagung (22 unit); Pelatihan PL SL-PTT kedelai (15 unit); Pelatihan PL SL-PTT kacang tanah (5 unit); Pelatihan komoditas non palagungnah (5 unit); Pengembangan komoditas non palagungnah (100 unit); Pengembangan Kawasan Hortikultura terintegrasi berbasis Good Agricultural Practices (GAP) (244 pkt); Terselenggaranya Management Pengembangan Hortikultura (199 pkt); Terselenggaranya Pembayaran Insentif Mantri Tani (2.625 org); Pengembangan inisiasi kawasan hortikultura (75 paket); Produksi semen beku dan pengadaan N2 cair (4jt ds); Fasilitasi Balai Inseminasi Buatan (2 unit); Fasilitasi Pengawasan Mutu Pakan (32 pkt); Budidaya babi dan aneka ternak (28 klp); Penyusunan program dan anggaran keg pembangunan Satker lingkup peternakan (33 prop); Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Satker lingkup Peternakan(33 prop); Pengumpulan Data Statistik Peternakan Nasional (348 kab); Pengembangan ternak sapi (23 klp); Pengadaaan Pejantan (1000 ekor); Pengadaan Bull (50 ekor); Pengawalan dan monev kegiatan (33 prop)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	722,2
n)	1588	Restrukturisasi Perunggasan	Honor THL Drh dan Paramedik; Restrukturisasi Perunggasan : Pengembangan budidaya unggas melalui VPF (49 klp); Restrukturisasi pemeliharaan unggas (15 unit); Pengembangan pakan lokal (7 unit)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	21,5
o)	1592	Diversifikasi Pangan	Promosi penganekaragaman konsumsi pangan pada 132 unit usaha rumah tangga dan PKK, 132 SD/MI/Ponpes, 930 klp wanita tani, dan kerjasama dengan 12 perguruan tinggi dan 7 STPP	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	63,1
p)	SUBSIDI	Penyediaan Dana Subsidi Pupuk	Penyediaan pupuk bersubsidi untukpupuk jenis urea 5,5 juta ton, NPK 1,5 juta ton, ZA 740 ribu ton, superphos 1 ribu ton dan organik 450 ribu ton	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	17.124,70

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
q)	SUBSIDI	Penyediaan Dana Subsidi Benih	Penyediaan benih bersubsidi untuk komoditi padi non hibrida 62,5 ribu ton, jagung komposit 2 ribu ton, jagung hibrida 3 ribu ton, kedelai 2 ribu ton; Cadangan Benih Nasional untuk: benih padi non hibrida 10 ribu ton jagung komposit 375 ton, jagung hibrida 3,75 ribu ton , kedelai 2 ribu ton; Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk benih: padi non hibrida 50 ribu ton, padi hibrida 3 ribu ton, padi lahan kering 7,5 ribu ton, jagung hibrida 9 ribu ton, kedelai 12,8 ribu ton, kacang tanah 6 ribu ton, kacang hijau 250 ton, ubi kayu 20 ribu ton, ubi jalar 1,2 ribu ton	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	1.563,5
r)	DAK	Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	Sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	PM
s)	CAD	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah	Pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 500 ribu ton.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Perum BULOG	PM
t)	1576	Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian, dan Pengembangan Kelompok Tani	Biaya Operasional (BOP) Penyuluh PNS (28.706 org); Honorarium Penyuluh Kontrak (THL-TBPP) (29.170 org); Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan kelompok (33 rop); Fasilitasi Pembangunan/Renovasi BPP dan kegiatan Penyuluhan melalui FEATI; Sekolah Lapangan PLA (365 paket); Pemberdayaan Masyarakat melalui keg. READ Program di Sulteng (365 paket)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	822,5
u)	4426	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi seluas 310.800 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dep. PU	668,80
v)	4427	Rehabilitasi Jaringan Rawa	Terlaksananya rehabilitasi jaringan rawa seluas 72.400 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dep. PU	229,07
w)	4429	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2.344.800 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dep. PU	454,07
x)	4430	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa	Terpeliharanya jaringan rawa seluas 1.200.000 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dep. PU	226,75
Fokus 8. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pengamanan Pasokan Bahan Pokok						
a)	7456	Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	Peningkatan kapasitas BPKN, BPSK & LPKSM dalam rangka sosialisasi, advokasi, dan penyelesaian sengketa; Mendorong pembentukan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK di 10 daerah; Fasilitasi pelayanan pos pengaduan di 5 Lokasi baru, pelatihan motivator dan mediator perlindungan konsumen di 5 daerah	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Depdag	16,00
b)	7482	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi	1. Pengembangan Pasar Percontohan yang bersih dan nyaman di 3 daerah 2. Tersusunnya cetak biru pengembangan sistem distribusi nasional 3. Terbangunnya pusat pengendalian dan sistem pelaporan online harga	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Depdag	61,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			dan stock komoditas di 5 provinsi percontohan dan pusat informasi distribusi nasional			
c)	7486	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Penyelenggaraan pasar lelang di 18 Propinsi 20 lokasi	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Depdag	6,00
d)	4752	Koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur	5 rumusan kebijakan, 8 laporan monev kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	Kemenko Perekonomian	7,00
e)	4752	Peningkatan koordinasi stabilisasi ekonomi makro dan keuangan	5 laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dan 5 rekomendasi kebijakan stabilisasi ekonomi makro dan keuangan	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	Kemenko Perekonomian	4,50
f)	0021	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan energi Termasuk Energi Alternatif	10 laporan kegiatan, 10 rumusan kebijakan pengelolaan energi termasuk energi alternatif	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi, dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Kemenko Perekonomian	8,20
g)	4751	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional	8 Rekomendasi kebijakan percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam bidang peningkatan investasi asing, ekspor, kapasitas pendonor mitigasi perubahan iklim, pengamanan APBN, 2 lap kegiatan dan 1 laporan monev	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	Kemenko Perekonomian	5,00
Fokus 9. Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan						
aa)	1355	Pemantapan Modernisasi Adiministrasi Perpajakan	- Terlaksananya program PINTAR - Tersedianya perangkat IT untuk 3 DPC di Makassar, Jambi, dan Surabaya, pengembangan ITSM dan SIDJP serta pembangunan aplikasi SISMIOP - Perhutanan	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	396.78
bb)	1390	Penyusunan dan Evaluasi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan kerangka Ekonomi Makro	- Tersedianya 17 laporan tentang pengembangan EED dalam - Tersedianya 7 jurnal yang memuat hasil kajian di bidang ekonomi dan keuangan	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	23,97
cc)	1411	Pengelolaan Risiko Fiskal	Tersedianya 13 laporan dan 4 model tentang risiko fiskal yang terukur dan kontinjen liability yang berkualitas	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	15.3
Fokus 10. Peningkatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Keuangan						
a)	6801	Pengembangan Sistem Analisis dan Kajian TPPU	Tersusunnya 15.600 Tabulasi data Laporan Transaksi Keuangan Mencurugakan (LTKM); Tersusunnya 480 Laporan Hasil Analisis (LHA); Tersedianya 104 Informasi Hasil Analisis (IHA); Tersusunnya 3 Pedoman Umum Direktorat Riset dan Analisis (PUDRA); Pedoman Teknis Riset dan	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	1,80

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Analisis (PTRA) I; Pedoman Teknis Riset dan Analisis (PTRA) II; Terselenggaranya capacity building tenaga riset dan analisis untuk 27 orang; Tersusunnya 3 laporan Tipologi TPPU; Tersusunnya 2 laporan semesteran Tipologi; Tersusunnya 4 Laporan Manajemen Risiko; Tersusunnya 14 Laporan statistik LTKM; Tersusunnya 18 Laporan Hasil Riset dan Analisis Strategis (LHRAS)			
b)	6803	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PPATK	Terwujudnya pembangunan Gedung Disaster Recovery Center (DRC) seluas 2.000 m2; Pengadaan 74 unit Meubelair Gedung DRC; Pengadaan 17 unit Peralatan dan Mesin Gedung DRC; Pengadaan 1 paket perlengkapan sarana gedung DRC.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	27,30
c)	6804	Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	Tersusunnya 1 dokumen Laporan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana implementasi Stranas 2010; Tersusunnya 1 dokumen Laporan pelaksanaan Strategi Nasional, implementasi rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report, dan kebijakan NPO; Terselenggaranya 6 dokumen penandatanganan Naskah MoU dengan Financial Intelligent Unit (FIU) negara lain maupun lembaga terkait di dalam negeri; Terselenggaranya 5 kegiatan asistensi/koordinasi penanganan TPPU dengan aparat penegak hukum; Tersampaikannya 200 dokumen IHA LTKM ke penyidik; Tersusunnya 1 dokumen Sistem Prosedur dan Operasi (SPO) Pertukaran Informasi; Terjalinnya 1 kegiatan kerjasama yang efektif antara pihak donor dan instansi penerima di Indonesia terkait TPPU dan Anti Pendanaan Terorisme; Tercapainya 2 kegiatan pemahaman mengenai mekanisme pertukaran informasi dan kegiatan operasional lainnya di FIU/ negara lain; Terjalinnya 18 kegiatan kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan terpenuhinya iuran keanggotaan APG dan Egmont Group sebagai bentuk komitmen PPATK/Indonesia; Terciptanya1 kegiatan kemampuan FIU yang diberi bantuan serta meningkatnya kredibilitas PPATK di dunia internasional; Laporan pertemuan Working Group Egmont Group, Sidang Tahunan, dan Typologies Workshop APG sebanyak 5 dokumen; Tersusunnya laporan perkembangan hasil Mutual Evaluation dan Jurisdiction report untuk 3 kegiatan; Terlaksananya 5 kegiatan tindak lanjut atas MoU dengan FIU negara lain	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	5,11

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
d)	6807	Penyempurnaan Peraturan Perundangan, Penelaahan, dan Pemberian Nasihat Hukum di Bidang TPPU	Terselenggaranya capacity building bidang hukum dan AML untuk 28 orang; Tersusunnya 8 dokumen laporan bantuan teknis hukum kepada apgakum dalam penyelesaian perkara TPPU dan tersampaikannya BAP Ahli; Tersusunnya 2 dokumen Laporan monitoring persidangan perkara TPPU; Terselenggaranya 4 kegiatan seminar tentang TPPU dan Rezim AML; Penyempurnaan 7 naskah RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksana UU TPPU yang komprehensif; Tersampaikannya 1 dokumen rekomendasi terkait sinkronisasi peraturan perundang- undangan terkait TPPU kepada instansi terkait yang komprehensif dan efektif; Tersusunnya 2 Draft Naskah Akademis RUU Perampasan Aset dan draft RUU Perampasan Aset; Tersusunnya 6 naskah Produk Hukum PPATK	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	3,39
e)		Evaluasi dan monitoring dampak krisis global & evaluasi program stimulus fiskal	1. Diperolehnya data dampak krisis global pada kelompok rentan dalam masyarakat Indonesia, seperti: Pekerja, baik di sektor formal maupun informal, kesehatan, kemiskinan, pendidikan dan industri, TKI yang kembali ke Indonesia, serta penyampaian rekomendasi yang diperlukan untuk mempercepat penanganan dampak krisis global. 2. Laporan hasil evaluasi Program Stimulus Fiskal APBN 2009 berjalan sesuai rencana dan menjaga laju pertumbuhan 4,7%, dan membuka lapangan kerja.	Program Penanganan Dampak Krisis Global	Bappenas	4,57
f)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Sektor Keuangan Negara	Tersedianya 4draft dan 3 naskah akademik RUU di bidang pasar modal dan lembaga keuangan dan 19 peraturan baru/revisi yang menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap nasabah/investor/pelaku pasar, kelembagaan yang efisien dan prudent serta harmonisasi peraturan dengan standar internasional.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	19,50
INFRASTRUKTUR						
Fokus 11. Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil						
		a. Infrastruktur Sumber Daya Air				
a)	4417	Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya kegiatan pembangunan 6 waduk dan 39 embung dan 11 situ	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Dep. PU	1.459,93

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
b)	4418	Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi 13 waduk, 17 embung, dan 20 situ	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Dep. PU	176,76
c)	4419	Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya 57 waduk dan 164 embung	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Dep. PU	194,05
d)	4432	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana / prasarana pengendali banjir sepanjang alur sungai 190 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Dep. PU	1.475,30
e)	4434	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	Terlaksananya kegiatan tanggap darurat bencana di daerah industri dan pusat-pusat perekonomian	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Dep. PU	17,81
f)	4435	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana / prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 28 buah	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Dep. PU	116,80
	b. Transportasi					
a)	2225	Peningkatan jalan KA di lintas: Sumatera bagian utara, selatan; Lintas Jawa	357,5 Km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	563,8
b)	2226	Peningkatan Jembatan KA/Underpass di Lintas Utama Sumatera dan Jawa	64 Bh	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	169,4
c)	2227	Pembangunan Perkeretaapian di NAD	1 Pkt	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	48,9
d)	2227	Pengadaan Rel UIC-54	Peningkatan daya dukung sebesar 17.047,5 ton	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	292,5
e)	2227	Pengadaan Wesel UIC-54	164 Unit	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	147,6
f)	2228	Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Padalarang-Cicalengka (*Engineering Services*)	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	18,7
g)	2228	Peningkatan Sintelis (Jawa dan Sumatera)	35 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	456,1
h)	2230	Pembangunan Jalur Ganda di 8 lokasi	Terlaksananya pembangunan jalur ganda KA sepanjang 58,08 km dan 4 paket pada lintas : Kroya-Kutoarjo, Cirebon-Kroya, Serpong-Maja, Duri-Tangerang, Tegal-Pekalongan, Brebes-Losari, Cikampek-Cirebon, dan	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dephub	730,2

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Blambanganumpu-Negeriagung			
i)	2232	Pembangunan MRT Jakarta (Engineering Services)	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	40,5
j)	0024	Pembangunan kapal patroli	Pembangunan Kapal Patroli Kelas III 20 unit, Pembangunan Kapal Patroli Kelas IB 1 unit, SAR Laut 23 unit, pemadam kebakarann dan ISPS	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dephub	187,5
k)	0024	Pembangunan Vessel Traffic System di Selat Malaka	Pengadaan VTS sebanyak 5 titik	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	50,0
l)	0024	Indosrep Project (*Multi years*): Indonesia Ship Reporting System/Vessel Traffic Information System termasuk supervisi	Pengadaan VTIS sebanyak 18 lokasi tersebar di seluruh perairan Indonesia	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	42,6
m)	0024	Pembangunan Fasilitas Sistem Telekomunikasi Pelayaran tahap 4	Pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran terpadu di 48 titik di seluruh perairan Indonesia	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	356,2
n)	2243	Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Ramsu : 141 unit; Mensu : 8 unit ; Ramtun : 9 unit	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	145,0
o)	2244	Lanjutan Pembangunan Kapal 2000 GT	Lanjutan Pem. Kapal 2000 GT (2unit)	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	50,0
p)	2248	Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation	Pembangunan SBNP sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	15,0
q)	2250	Lanjutan Pengembangan Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai termasuk supervisi	Pembangunan 2 unit dermaga apung 15 x 8 (m2), trestel 313 x 9 (m2), causeway 94 x 13,7 (m2)	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	37,5
r)	2292	Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (prioritas nasional)	Perpanjangan dermaga 300 m	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	142,6
s)	2292	Lanjutan Pembangunan Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	50,0
t)	2268	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan	Terpasangnya fasilitas keselamatan penerbangan (4.000 paket/unit)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	359,8
u)	2270	Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan	Terlaksananya lanjutan pembangunan Bandara Kualanamu (6 paket), Multi Years Contract	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	763,4
v)	2271	Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana	Terjaminnya pelayanan operasi penerbangan yang aman dan cepat di daerah perbatasan, terpendil dan rawan bencana	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	254,1
w)	2271	Pembangunan/peningkatan Bandara di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan Daerah Pemekaran	Terlaksananya pembanguan dan prasarana dan sarana bandar udara guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	250,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
x)	2271	Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin-Makassar	Terlaksananya pembayaran sisa kontrak konstruksi sisi udara tahap II (1 paket), Multi Years Contract	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	53,9
y)	4334	Pembebasan Lahan	LS	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	250,00
z)	4610	Pembangunan Fly-over	676,5 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	193,45
â)	4626	Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Lintas	1.571,6 km jalan dan 920,9 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	4.068,52
ä)	4627	Peningkatan Jalan dan Jembatan Non Lintas	335,2 km jembatan 1.046,4 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	1.473,27
ö)	4643	Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan	50,8 km jalan dan 147 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	176,01
aa)	4644	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa	48,7 km jalan dan 115 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	164,85
bb)	4645	Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau Terpencil dan Pulau Terluar	23,7 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	90,45
cc)	4646	Pembangunan Jalan Akses	45,3 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	1.045,83
dd)	4655	Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis	131 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	80,87
		c. Infrastruktur Energi				
a)	2173	Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas, Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Pendukung	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas di Depok, Bekasi dan Tarakan-Kaltim untuk 11.000 rumah tangga	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	188,0
b)	2133	Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi	Terselenggaranya Audit Energi di Sektor Bangunan dan Sektor Industri dan monitoring implementasinya : (1) Audit energi (Industri = 100 objek, Bangunan = 60 objek); (2) Monitoring (Industri 154 objek, Bangunan 86 objek)	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	28,5
c)	2160	Pelayanan usaha pengolahan usaha hilir migas	Studi Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Gas Suar Bakar (Kalimantan, Sulawesi dan Papua) untuk Bahan Baku Kilang LPG; Studi Kelayakan Pembangunan Kilang Mini LPG; Front End	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	10,2

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Engineering Design (FEED) Pembangunan Kilang Mini LPG			
		d. Ketenagalistrikan				
a)	2136	Induk Pembangkit dan Jaringan	Terselesaikannya pembangunan pembangkit sebesar 54 MW, Gardu Induk 150 kV dan transmisi sepanjang 1358 kms serta melanjutkan pembangunan transmisi yang multi years kontrak	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	2.040,98
b)	2138	Penyiapan Program Ketenagalistrikan	Laporan prakiraan kebutuahn tenaga listrik; Kepmen ESDM/Laporan Review Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN); Laporan hasil monitoring Pengembangan Jaringan Tenaga Listrik Terkait Program 10.000 MW; Laporan Monitoring Penanganan Daerah Krisis Tenaga Listrik; Laporan dan informasi mengenai daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber _nergy primer air dan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik dan kebijakan yang diambil untuk melakukan upaya pengembangannya; Laporan Monitoring evaluasi pembangunan pembangkit listrik cras program tahap I; laporan Tim pendamping Master Plan For Hydro Power Development in Indonesia.	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	3,70
c)	8215	Fasilitasi percepatan pembangunan tenaga listrik	Fasilitasi percepatan pembangunan pembangkit listrik 10,000 MW	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	5,40
d)	2155	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Ketenagalistrikan	(1) Rumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) bidang ketenagalistrikan; (2) Standar peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang berhubungan dengan keselamatan keamanan dan kesehatan untuk diberlakukan sebagai standar wajib; (3) Kajian kesiapan infrastruktur (Laboratorium uji dan Lembaga sertfikasi Produk) dalam permberlakuan SNI wajib; (4) Pemberlakuan SNI Wajib untuk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang prioritas; (5) Sosialisasi SNI wajib sehingga terwujud pemahaman yang sama terhadap penerapan SNI Wajib oleh instansi, masyarakat dan pelaku usaha;.(6) Pembinaan dan pengawasan SNI wajib sehingga terwujud kepatuhan penggunaan SNI Wajib; (7) Koordinasi dan mengikuti sidang standardisasi internasional IEC, ASEM / TFAP on SCA dan ACCSQ serta MRA regional maupun internasional; (8) Kerjasama kalibrasi alat ukur listrik dalam rangka pelaksanaan SKB Peneraan alat ukur listrik; (9) Pedoman penilaian kesesuaian teknis produk peralatan dan peranti yang standarnya akan diberlakukan sebagai standar wajib	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	5,00
e)	2156	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	1. Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan 2. Pelaksanaan sertifikasi laik operasi; Fasilitasi Tim Keandalan Tenaga Listrik 3. Tersusunnya database sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik 4. Menegakkan peraturan di bidang keselamatan ketenagalistrikan	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	7,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			khususnya SLO instalasi penyaluran TL di P.Jawa dan Bali 5. Memfasilitasinya berdirinya Konsuil di daerah seluruh Indonesia; Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan 6. Tersusunnya pedoman pemeriksaan PLTBayu 7. Tersusun kajian pengaruh harmonisa pada sistem distribusi 8. Terlaksana kajian kelaikan teknik untuk PLTBayu On Grid terhadap sistem 9. Terwujud strategi pemeliharaan untuk menjaga/meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik 10. Tersusun kajian manfaat integrasi relai proteksi berteknologi digital dengan system SCADA untuk meningkatkan keandalan system tenaga listrik 11. Terlaksana evaluasi pengaruh penggunaan capasitor bank terhadap keandalan system transmisi 12. Tersosialisasi regulasi keselamatan ketenagalistrikan			
f)	2159	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Lindungan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	1. Mewujudkan Clean Development Mechanism bidang ketenagalistrikan dalam rangka menghadapi pemanasan global 2. Analisis dan evaluasi hasil pengukuran medan magnet, medan listrik, dan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di bawah SUTET 500 kV pada Kab. Brebes 3. Memfasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus Lingkungan di bidang Ketenagalistrikan 4. Pengawasan Pelaksanaan Community Development sektor ketenagalistrikan 5. Perumusan/revisi kebijakan (regulasi) bidang pengelolaan lingkungan sektor ketenagalistrikan 6. Pengawasan pelaksanaan percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW Tahap I dan II di bidang Lingkungan ketenagalistrikan 7. Diseminasi kebijakan/regulasi bidang pengelolaan lingkungan sektor ketenagalistrikan 8. Pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	2,92
		e. Pos dan Telematika				
a)	5766	Penyusunan/Pembaharuan Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Industri Pos dan Telematika	(1) Rancangan revisi UU Telekomunikasi era konvergensi; (2) Materi tindak lanjut UU Pos; (3) 7 Produk peraturan perundang-undangan bidang penyiaran dan implementasi sistem stasiun jaringan; (4) Sistem stasiun berjaringan (data pemantauan implementasi dan diseminasi peraturan); (5) *Blue print* migrasi sistem penyiaran radio dan TV analog ke digital; (6) Buku data teknik penyiaran dan sistem berjaringan	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika	Depkominfo	14,35

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
b)	5786	Peningkatan Jangkauan, Kapasitas, dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Pos dan Telematika	(1) Hasil pemantauan pembangunan Palapa Ring; (2) Penyelenggara BWA (hasil seleksi); (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR); (4) Sarana dan infrastruktur *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII); (5) Infrastruktur TV digital (1 Paket pemancar TV digital, *set top box*, dan 8 pesawat penerima siaran TV digital); (6) Materi dan sosialisasi migrasi ke penyiaran digital; (7) Demo perangkat pemancar dan penerima digital; (8) Database penyiaran digital; (9) Pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran digital; (10) Penyelenggaraan *ICT Training Center* di Jababeka; (11) Strategi implementasi jaringan dan layanan *next generation network*; (12) Pemeliharaan Stasiun Monitor Frekuensi Radio; (13) Rencana pengalokasian frekuensi di perbatasan negara; (14) Aplikasi penyelenggaraan teknologi transaksi elektronik; (15) 3 Model implementasi blue print e-bisnis yang dapat direplikasi; (16) 1 lokasi window show e-bisnis; (17) 1 Pusat Komunikasi Kreatif; (18) 1 Paket inkubator inovasi TIK	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	Depkominfo	133,67
c)	5766	Penyusunan/Pembaharuan Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Industri Pos dan Telematika	(1) RUU *Cyber Crime* dan RUU Ratifikasi *Convention on Cyber Crime*; (2) Kebijakan *e-Government* tentang Nama Domain (Situs Pemerintah); (3) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Depkominfo	7,00
d)	5777	Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Literacy)	(1) Perangkat TIK tahap II (komputer dan jaringan internet, data *center*, instalasi) di kota Yogya, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul; (2) Infrastruktur (gedung, perangkat keras TIK, perangkat lunak, dan sistem) untuk *ICT Training Center* di UIN Syarif Hidayatullah; (3) Penyelenggaraan *ICT Training Center* di UIN Syarif Hidayatullah; (4) CAP di 222 kecamatan di Jabar, Banten dan Lampung	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Depkominfo	130,78
e)	5778	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	(1) Pemeliharaan 20 *Mobile* CAP (MCAP) dan 30 CAP; (2) 7 Lokasi CAP, 6 unit MCAP, 12 lokasi CAP untuk wanita; (3) Aplikasi layanan dasar publik (*e-citizen*); (4) Bantuan teknis/pendampingan *e-government* di 8 pemda; (5) Pengelolaan nama domain; (6) Fasilitasi 5 instansi pengguna sistem e-pengadaan; (7) Fasilitasi 3 instansi pemerintah untuk implementasi interoperabilitas dan interkonektivitas dan 3 instansi pemerintah untuk aplikasi keamanan informasi; (8) Penyelenggaraan Badan Pengawas Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; (9) 2 Lokasi fasilitasi *e-health* di RS/puskesmas; (10) 2 Lokasi fasilitasi sistem e-legislasi DPRD; (11) Portal layanan publik; (12) Penyelenggaraan Dewan TIK Nasional; (13) Diseminasi Internet Sehat; (14) Materi dan sosialisasi sistem peringatan dini bencana alam; (15) Buku data jalur jaringan informasi bencana alam dan sarana peringatan dini bencana alam	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Depkominfo	25,11
f. Perumahan dan Pemukiman						

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
a)	4257	Pengembangan Sistem Drainase	3 kab/kota di NAD	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	Dep. PU	400,38
b)	4257	Pengembangan Sistem Drainase	37 kota	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Dep. PU	242,19
c)	4617	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat	9 Kabupaten/Kota dan 22 kawasan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	257,29
d)	4630	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum pada Kawasan Strategis	115 kawasan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	638,60
e)	7581	Fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan	6 kawasan	Program Pengembangan Perumahan	Kemenpera	14,60
		g. Infrastruktur Kewilayahan				
a)	0020	Perencanaan dan Pembangunan Sektor Perkotaan	Terlaksananya pengelolaan pembangunan sektor perkotaan (USDRP) di 11 kota	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	Dep. PU	27,20
b)	4241	Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan	50 kawasan agropolitan	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Dep. PU	98,50
c)	3575	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 17 paket	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	23,60
d)	3628	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Terselenggaranya pengembangan kota terpadu mandiri sebanyak 7 paket	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	45,00
e)	3644	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Terselenggaranya pengembangan kota terpadu mandiri sebanyak 3 paket	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	16,00
f)	3640	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Terselenggaranya pengembangan kota terpadu mandiri sebanyak 20 paket	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	115,00
g)	0792	Fasilitasi pembangunan wilayah perbatasan	Terfasilitasinya pembangunan/peningkatan prasarana pemerintahan umum kecamatan perbatasan (kantor camat, gedung pertemuan warga, dll) di 34 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Dalam Negeri	6,80
h)	4660	Pengembangan PS kawasan perbatasan	Terbangunnya infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan pemukiman di 40 kawasan termasuk 7 PKSN perbatasan (Kab. Sambas, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kab.Nunukan, Kab. Sangihe, Kab. Talaut, dan Kab. Merauke)	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. PU	69,75

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
j)	4561	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya infrastruktur di kawasan KEK, KPBPB, dan KAPET di 9 kawasan	Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. PU	13,69
Fokus 12. Peningkatan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta						
		a. Infrastruktur Transportasi				
n)	4253	Pengusahaan Jalan Tol	Perjanjian pengusahaan jalan tol dan perjanjian pelaksanaan dana bergulir untuk jalan tol	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	33,0
o)	4334	Pembebasan Lahan	LS	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	250,0
p)		Resiko tanah (*Landcapping*)	Tersedianya dana *landcapping* untuk pembangunan jalan tol		Dep. PU	2.625,0 (Anggaran 999)
		b. Ketenagalistrikan				
a)	2190	Pengaturan Investasi dan Pendanaan Ketenagalistrikan	(1)Terlaksananya penyusunan investasi penyediaan tenaga listrik; (2) Pemantauan pelaksanaan pendanaan pembangunan tenaga listrik; (3) Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan Power Transmission Improvement/Renewable Energy; (4) Peningkatan investasi sektor ketenagalistrikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; (5) Terverifikasinya kegiatan usulan pendanaan program pada Satker Lisdes dan Ikitring.	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	4,10
b)	2152	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Harga dan Subsidi Listrik	(1) Monitoring dan verifikasi usulan harga beli tenaga listrik dari IPP; (2) Monitoring dan verifikasi realisasi susut jaringan dan penjualan tenaga listrik dalam proses penetapan subsidi listrik; (3) Monitoring dan evaluasi optimalisasi penggunaan dan biaya bahan bakar pembangkit PKUK dalam rangka penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN; (4) Monitoring dan perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dan TDL-PLN; (5) Monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan rekening listrik yang disediakan PKUK; (6) Tersedianya hasil penelaahan dan perhitungan subsidi listrik; (7) Menyusun pedoman penetapan harga beli tenaga listrik yang kompetitif melalui optimalisasi pembelian tenaga listrik swasta sesuai formula yang tepat; (8) Kajian pola dan mekanisme penetapan TDL menuju keekonomian secara bertahap	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	3,80

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
c)		Dana dukungan infrastruktur	Tersedianya jaminan pemerintah atas proyek 10.000 MW sebesar Rp. 1T		Dep. ESDM	1.000,00 (Anggaran 99 – pembiayaan)
		c. Proyek Kerja Sama Pemerintah-Swasta				
a)		Fasilitasi pengembangan proyek KPS melalui *Project Development Facility*	1. Terselenggaranya bpemberian bantuan teknis kepada Departemen dan Pemda 2. Terselenggaranya pendidikan dajn pelatihan tim KPS di 10 Pemda 3. Terselenggaranya 4 kali sosialisasi, penyebarluasan buku dan majalah KPS, serta operasionalisasi website KPS 4. Terselenggaranya infrastruktur forum, investor forum, dan reginal forum 5. Terselenggaranya pusat pengembangan dan simpul PKS		Bappenas	119,20 (PHLN) 10,00 (APBN)
Fokus 13. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)						
		a. Infrastruktur Sumber Daya Air				
a)	4436	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	Terlaksananya rehabilitasi sarana prasarana pengendali banjir sepanjang 170 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Dep. PU	130,77
b)	4439	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	Terpeliharanya prasarana pengendali banjir sepanjang 700 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Dep. PU	103,77
c)	4442	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	Terlaksananya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku dengan debit layanan 7,6 m3/det	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Dep. PU	875,08
d)	4445	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	Terlaksananya rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku sebanyak 14 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Dep. PU	32,82
e)	4446	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	Terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku sebanyak 56 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Dep. PU	6,33
		b. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo				
a)	4330	Pembangunan jalan nasional	1. Terselesaikannya pengadaan tanah untuk jalur jalan TOL, jalan arteri, dan pipa air (sisa kekurangan TA 2009) sekitar 30 Ha. 2. Terselesaikannya konstruksi relokasi Jalan Arteri Raya Siring-Porong (paket 1,2,3, dan 4) sepanjang 7,1 km. 3. Terbangunnya *Interchange Fly Over* (jalan simpang susun) Kesambi.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	BPLS	344,90

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
b)	4332	Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir	1. Terselesaikannya pelunasan jual beli tanah di 3 desa (sebesar 80%). 2. Terkendalinya luapan lumpur dan terlaksananya pengaliran lumpur ke Kali Porong, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa pembuang lumpur 3. Terpeliharanya tanggul penahan lumpur sepanjang 14 km. 4. Terselesaikannya saluran drainase di seputar tanggul sepanjang 10 km. 5. Terpeliharanya kondisi kali porong dan Muara-nya sepanjang 500 m untuk menjamin kelancaran pengaliran lumpur ke muara Kali Porong/Laut lepas. 6. Terpeliharanya spoilbank hasil pengerukan dengan mereklamasi lahan seluas 20 Ha, yang berfungsi untuk konservasi dan budidaya hasil laut. 7. Tersedianya 4 unit kapal keruk, 1 unit pompa air dan 1 unit pompa lumpur. 8. Terlaksananya kegiatan mitigasi luapan lumpur pada tanggul luar	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	BPLS	831,20
c. Transportasi						
c)	2218	Pengadaan Bus Perintis	Bus Perintis 40 Unit; Bus besar AC untuk pengembangan BRT 30 Unit; Bus sedang Non AC 40 unit & AC 30 unit untuk angkutan pelajar/mahasiswa/umum dan pemadu moda	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Dep. Perhubungan	66,4
d)	2219	Pelayanan Angkutan Jalan Perintis	22 Provinsi	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Dep. Perhubungan	48,3
e)	4326	Rehabilitasi Jalan Nasional	1.956,2 km	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	3.834,9
f)	4327	Pemeliharaan Jalan Nasional	32.463 km	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	1.447,6
g)	4328	Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional	15.148,8 m	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	740,1
h)	4329	Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional	69.041 m	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	36,9
i)	2202	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi	Marka jalan sepanjang 1.707.440M; Guardrail 61.200M, Rambu Lalulintas 10.894 Bh, Delineator 20.730M, RPPJ 726 Bh, LPJU 650 Bh, ATCS 1 pkt, Traffic Light Solar Cell 62 Unit, Warning Light 54 Unit; Cermin Tikungan 448Bh; Paku Marka 31.300Bh.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dep. Perhubungan	329,9
j)	2246	Pelayanan Angkutan Laut Perintis	Pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 60 trayek	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	274,0
k)	2257	Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis	92 lintasan untuk 49 kapal	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Dep. Perhubungan	166,43

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
l)	2266	Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis	Pelayanan angkutan udara perintis (118 rute) dan angkutan BBM penerbangan perintis (3.766 drum)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	249,95
m)	2295	Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Rambu Sungai Transportasi Penyeberangan		Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Dep. Perhubungan	5,4
n)	2268	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan	Terpasangnya fasilitas keselamatan penerbangan (4.000 paket/unit)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	359,8
		d. Infrastruktur Energi				
a)	2104	Koordinasi dan Pengembangan Energi Perdesaan	Terselenggaranya workshop biofuel pedesaan, Terselenggaranya koordinasi pengembangan DME, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pemanfaatan listrik, tersedianya percontohan peralatan energi terbarukan non listrikdi pulau kecil terluar, terselenggaranya workshop pengembangan DME berbasis non BBN, Terselenggaranya pelatihan, workshop FGD dan kajian pengembangan mikrohidro, Terselenggaranya program pengembangan masyarakat dilokasi PLTM, terlaksananya implementasi biogas untuk rumah tangga, terlaksananya workshop pengembangan biogas untuk rumah tangga, terlaksananya sosialisasi pengembangan tungku pedesaan dan terselenggaranya workshop pengembangan tungku pedesaan, terlaksananya program pengembangan DME tersebar di 17 Propinsi : NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Riau, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulbar dan Malut, Terlaksananya verifikasi FS pengembangan EBT di 40 lokasi	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi, dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	90,0
		e. Ketenagalistrikan				
a)	2137	Listrik Perdesaan	Terwujudnya pembangunan sistem distribusi dan pembangkit energi baru terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik berupa : Gardu Distribusi = 715 Unit/ 42.600 KVA; JTM = 2125 kms ; JTR = 1930 kms PLTS 50 Wp Tersebar = 73.361 UNIT ; PLTMH = 1800 kW; PLTS Terpusat = 3 unit	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	1.158,49
b)	2189	Pengembangan Ketenagalistrikan Sosial	(1) Tersusunnya pedoman pembuatan FS dan DD untuk pembangunan PLTMH; (2) Terlaksananya pembinaan dan koordinasi dengan Pemda, koperasi dan PLN Wilayah/Distribusi dalam perencanaan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana listrik perdesaan; (3) tersusunnya pendanaan pembangunan listrik perdesaan; (4) kompilasi dan updating database listrik perdesaan; (5) laporan monitoring dan evaluasi kegiatan listrik perdesaan	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	3,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		f. Pos dan Telematika				
a)	5771	Penyediaan Infrastruktur Pos dan Telematika di Daerah Non Ekonomis	(1) Jasa akses telekomunikasi di 31.824 desa, internet di 4.218 kecamatan, dan layanan *internet exchange* di ibukota propinsi ; Pemancar TV di 10 lokasi *blank spot* (2) Jasa layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota sebagai pelaksanaan program PSO pos (3) Infrastruktur TVRI dan RRI	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	Depkominfo, PT Pos Indonesia, LPP TVRI, LPP RRI	255,40 (BA 62); PM (BA 999)
		g. Perumahan dan Pemukiman				
a)	4625	Peningkatan Pengelolaan TPA/Sanitary Landfill/Sistem Regional	7 TPA regional pada 24 Kab/Kota dan peningkatan TPA di 25 Kab/Kota	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Dep. PU	218,50
b)	4619	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	2 Provinsi	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dep. PU	20,00
c)	7578	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Rumah di Kawasan Bencana	800 unit	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kemenpera	29,30
d)	4277	Perbaikan lingkungan pemukiman	210 kawasan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dep. PU	373,70
e)	4270	Pembangunan Rumah Sakit Sederhana Sewa beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya	40 *Twin Blok*	Program Pengembangan Perumahan	Dep. PU	300,00
f)	7555	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya	25 *Twin Blok* dan 200 unit rumah sewa	Program Pengembangan Perumahan	Kemenpera	205,46
g)	9262	Penyediaan Infrastruktur Primer bagi Kawasan RSH	200 Kawasan	Program Pengembangan Perumahan	Dep. PU	275,87
h)	4628	Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk RSH/S dan Rumah Susun	12.000 Unit	Program Pengembangan Perumahan	Kemenpera	50,24
i)	4613	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman di Pulai Kecil/Terpencil	35 Kawasan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dep. PU	35,00
j)	7580	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	12.000 unit	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kemenpera	83,40
k)	7582	Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	10.000 unit dan 10 kawaasan kumuh	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kemenpera	115,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
l)	7583	Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	10.000 unit	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kemenpera	50,00
m)	4611	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS)	130 lokasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	20,00
n)	4612	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat	1.320 desa pada 110 Kab/Kota dan 190 desa rawan air	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	501,60
o)	4629	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	70 kawasan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	158,90
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)						
Fokus 14. Peningkatan Dukungan Iptek Bagi Daya Saing Nasional						
e)	5064	Iptek utk Penanggulangan Bencana di Indonesia	1 hasil kajian penguatan kapasitas iptek kebencanaan dan peta probabilitas gempa di Indonesia	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek	KRT	10,00
f)	999	Peningkatan Tunjangan fungsional Peneliti / Perekayasa	Peningkatan tunjangan fungsional untuk 2.242 orang Peneliti Pertama, 2.938 orang Peneliti Muda, 3.188 orang Peneliti Madya, 916 orang Peneliti Utama, dan 261 orang Profesor Riset.		KRT	225,0
g)	5020	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Iptek	150 karya siswa untuk program S2 dan 150 karya siswa untuk program S3	Program Penguatan Kelembagaan Iptek	KRT	50,00
h)	5028	Penelitian Penyakit Menular Tropis	1 paket peralatan laboratorium penelitian untuk emerging deases sesuai standar WHO dan 13 hasil penelitian penyakit menular tropis	Program Penguatan Kelembagaan Iptek	KRT	20,00
i)	7002	Peningkatan Penguasaan Teknologi Produksi Bahan Bakar Nabati dan Energi Alternatif Lainnya (Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih)	PLTP skala kapasitas 2 MW, Gasifikasi Batubara sebagai substitusi BBG dan BBM, Tek Efisiensi Energi untuk Menurunkan Elastisitas Energy Nasional, Substitusi Bahan Bakar Nabati (BioFuel). Sistem kelistrikan dan solar termal, PLT angin, PLT arus, Optimalisasi SD energi (markal), pencairan batubara dan fuel cell	Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BPPT	40,00
j)	5168	Pengembangan Inovasi UMKM berbasis Teknologi (Pusat Inovasi UMKM Berbasis Teknologi)	Paket kegiatan UMKM Inovatif, wirausaha, audit teknologi dan SD inovasi bidang prioritas	Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BPPT	20,00
k)	6865	Pengembangan Bioresource Center, Microbial Culture Collection	Pengembangan BRC, penambahan koleksi, data base; sistem pengelolaan berstandar internasional yang diakui, regulasi pertukaran pertukaran spesimen, penelitian pemanfaatan koleksi plasma nutfah, kerjasama, rintisan bank DNA, biji dan cryoopreservasi.	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	LIPI	10,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
l)	6862	Eksplorasi, bioprospeksi, konservasi dan pemanfaatan Sumber Daya alam Hayati (SDH) dan Sumber Daya Genetik (SDG), Molecular Farming, Transgenetik, ploiploidi	Penambahan koleksi, jenis baru dan catatan baru (Flora, fauna dan mikroba) di Indonesia, model pengelolaan SDH dan SDG, Informasi jenis SDH berpotensi termasuk hasil rekayasa genetika; Prototipe dan contoh produk; bertambahnya Biota terdomestikasi dan ter-reintroduksi; Paket teknologi pemanfaatan SDH; Usulan perlindungan jenis yang terancam punah untuk diundangkan; Mewakili kepentingan Indonesia dalam forum internasional terkait dengan keanekaragman hayati dan lingkungan termasuk CITES, CBD, MAB, PROSEA, Flora Malaysiana, BCGI, ATBC, GTI	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	LIPI	10,00
m)	4101	Penyelenggaraan Riset, Eksplorasi dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	Pelaksanaan sejumlah riset dan survei iptek kelautan non perikanan, iptek kelautan untuk mitigasi perubahan iklim, Pengembangan UPT Kelautan di Kawasan Timur	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	LIPI	12,00
n)	2024	Pelaksanaan Litbang dan Aplikasi Teknologi Hasil Litbang	Pelaksanaan 40 paket program Iptekda	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek	LIPI	6,00
o)	7054	Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa Teknologi Roket	Uji terbang roket 2 tingkat RX 420/420, Uji terbang roket cair daya 500 kgf, Pengembangan Lab. Kendali, Uji terbang roket 530, Litbang dan produksi bahan baku propelan (TDI, AP dan HTPB), Pengembangan space mindedness (uji muatan, payload dan kendali) bagi mahasiswa, desain konfigurasi varian roket 420, desain dan model ramjet, uji validasi G54 muatan roket s/d 60 G, Meningkatkan perhitungan komputasi 30 Gflop/detik, Operasional sistem stasiun peluncuran roket, Kendaraan operasional di lapangan, Renovasi Lab/kantor/ruang kerja, Pengadaan mixer skala kecil, Hidrant, genset, casting skala kecil, Kajian/litbang atmosfer dan iklim untuk variabilitas cuaca/iklim dan dampaknya, Peralatan penelitian, upgrading sistem stasiun bumi pengamat dirgantara dan operasi stasiun pengamat dirgantara dan radar, Akuisisi data radar atmosfer untuk pemodelan perubahan iklim/cuaca, data ozon dan geomagnet.	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	LAPAN	45,00
p)	2023	Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	Pembangunan 3 unit pabrik Bio-etanol	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	16,00
q)	2047	Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri	5 Teknologi baru melalui *Pilot Project* dan Pusat Pengembangan Inovasi, Pembangunan 4 Pabrik pembuatan pupuk organik, 2 Permen tentang Mitigasi	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	16,53
r)	7102	Penyediaan Atlas Sumberdaya, Atlas Publik dan Pengembangan Basis Data Atlas	Atlas sumberdaya dan Atlas Publik serta Basis Data Atlas	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Bakosurtanal	6,38
ENERGI						
Fokus 15. Peningkatan Ketahanan Energi						

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
a)	8179	Penilaian dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Berdasarkan WP&B KKKS; Evaluasi, Konsultasi & Pengawasan Pealaksanaan POD I ; Pembahasan dan Evaluasi Usulan Perpanjangan dan atau Amandemen Kontrak; Penanganan Masalah Tumpang Tindih Lahan Kegiatan Hulu Migas Dengan Kawasan Hutan dengan kegiatan lain; Fasilitasi Pelaksanaan PI Kepada BUMD Atau Perusahaan Nasional Terkai Dengan POD I; Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Lapangan Kegiatan KKKS Dari BPMigas	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	Dep.ESDM	4,05
b)	8175	Pengelolaan, Penyiapan dan Penilaian Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	Penawaran 20 wilayah kerja baru migas, Seismik laut flores sepanajang 1.500 km, sinopsis geologi WK, Interpretasi potensi migas di laut Sulawesi Promosi Wilayah Kerja Baru Migas; Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas ; Pengambilan dan Pengumpulan Serta Pengolahan Data Seismik 2D di Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 Km; Studi Kebijaksanaan (Evaluasi dan Interpretasi Potensi Migas Laut Flores)	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	Dep.ESDM	50,0
c)	8188	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi	Pembuatan surfaktan untuk aplikasi pendesakan minyak dengan injeksi kimia, penyusunan database data fluida reservoir migas, inventarisasi dan analisis data cadangan migas Indonesia, Studi efektifitas penggunaan PPD (Pour Pount Depresant), Penentuan profil pendesakan fuida dengan menggunaka CT Scanner untuk optimasi EOR, Penelitian dan pengembangan oil based mud yang berbasis pada penggunaan base oil dari minyak nabati, Litbang desain formulasi semen untuk mengatasi adanya gas migration, perancangan sistem monitoring sumur-sumur CBM secara online, Studi eksperimental desain untuk mengatasi ketidakpastian perhitungan cadangan pada reservoir rekah alami, Kajian sequestrasi CO2 skala lab pada Coal Bed Reservoir.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	Dep.ESDM	12,9
d)	8152	Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi	Pembinaan dan sinkronisasi pengembangan panas bumi, fasilitasi RPP pemanfaatan langsung panas bumi, fasilitasi pelaksanaan pelelanganWKP di daerah, pembinaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan panas bumi.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Dep.ESDM	7,35
e)	8170	Survei pemetaan geologi, Penelitian Eksplorasi	Promosi wilayah kerja, penelitian, Inventarisasi dan Eksplorasi Panas Bumi, Pengembangan Investasi, Pengembangan Data dan Informasi	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Dep.ESDM	295,5
f)	8166	Penelitian dan Pengembangan Batubara	PSU pencairan batubara, pilot plan pembakaran batubara, pilot plan cucas, pilot plan carbon aktif, UPC demo plan, klasifikasi batubara untuk PLTD	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Dep.ESDM	13,2
g)	8178	Pelayanan dan Pemantauan Usaha Gas Bumi	Implementasi Penawaran Wilayah Kerja Gas Methana-B; Evaluasi persetujuan harga gas bumi; Penanganan masalah tumpang tindih lahan kegiatan pengusahaan Gas Metana-B; Monitoring pasokan gas konsumen hulu dalam rangak meningkatkan jaminan pasokan; Penyiapan data penyediaan dan kebutuhan gas bumi	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	Dep.ESDM	30,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
h)	1553	Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas	Pembuatan rumah kompos (200 unit); Pengembangan sistem penyediaan dan pewasanan pupuk (33 prop); Sistem pengutuhan integasi kelapa sawit-sapi (15 paket); Pengembangan pertanian terpadu kakao-ternak (3 paket; Pengembangan pertanian terpadu kopi-ternak (3 paket); Pengembangan integrasi ternak-Tebu (3 paket); Batamas sapi potong /perah (100 klp); Integrasi tanaman-ternak sapi/kerbau (31 klp); Demplot biogas babi / unggas/pupuk organik (10 klp)	Program Pengembangan Agribisnis	Deptan	40,8

Prioritas 5

PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Fokus 1. Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya

Fokus 2. Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan

Fokus 3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Fokus 4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Fokus 5. Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

Prioritas 5 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 1. Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya						
h)	.....	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS)	Terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) meliputi antara lain, Radar Cuaca 12 lokasi, AWS 54 lokasi, ARG 20 lokasi, Wedis dan Synergie 12 set, GSR 6 lokasi, sewa telekomunikasi 12 bulan. Terpasangnya 1 lokasi Radar Cuaca, Terintegrasinya sistem MEWS. Terlaksananya Konggres dan sosialisasi TCWC 1 laporan. Terbangunannya persiapan operasional NWP 1 paket, terlaksanannya workshop teknisi Radar Cuaca 1 laporan.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	43,85
i)	.....	Pengembangan Meteorologi Penerbangan dan Maritim	Terpasangnya AWOS 1 lokasi, AWS Maritim 1 lokasi dan AWS kapal 2 unit. Terbangunnya sistem pertukaran data Opmet Pusat dan UPT 11 lokasi, terbangunannya Pusat Prosesing Data Meteorologi Penerbangan 1 lokasi.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	13,45
j)	5069	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan untuk menurunkan laju kerusakan lingkungan di 11 daerah aliran sungai, 6 lokasi pemantauan ekosistem pesisir dan laut, 7 lokasi pengembangan model pemulihan lingkungan pesisir dan laut, 6 provinsi pengelolaan pesisir terpadu, pengendalian kerusakan hutan dan lahan di 8 provinsi di Sumatera dan Kalimantan yang rawan kebakaran, 4 lokasi pengelolaan kawasan karst, 3 daerah longsor, perlindungan lapisan ozon melalui perhitungan jejak emisi karbon di 3 lokasi, pengembangan mitigasi kampung iklim di 3 lokasi, montoring dan evaluasi 16 proyek CDM, 30 ton ozon depleting potential (ODP), serta pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Kualitas Lingkungan Hidup	KLH	33,79
k)	1558	Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan	Berkembangnya Hortikultura Organik (49 paket); Pengembangan DAS/ Daerah rawan Erosi dan Longsor (21 paket);Pengembangan alternatif development (5 paket); Sertifikasi produk pangan organik sebesar 25% (15 unit); 75 % Pengembangan OKKPD dan pembinaan mutu di(18 unit); Pengembangan usaha pengolahan kompos dan biogas sebesar 50 % (24 unit)	Program Pengembangan Agribisnis	Deptan	27,70

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
l)	4102	Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir	Terlaksananya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di 2 lokasi; Peningkatan kapasitas perencanaan mitigasi bencana di 2 lokasi prioritas dan kapasitas perencanaan adaptasi perubahan iklim di 2 lokasi; *green belt* kawasan pesisir di 5 lokasi; Pengendalian pencemaran perairan darat, pesisir dan laut secara terpadu di 3 lokasi; 1 paket analisis resiko bencana dan 1 paket analisis adaptasi perubahan iklim; *Pilot Project* mitigasi bencana di 2 lokasi ; 5 paket standar, norma, prosedur dan manual (SNPM) mitigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	14,75
m)	4014	Pengendalian Kebakaran Hutan	Menurunnya hotspot sebesar 10% dari tahun 2008 dan didukung partisipasi masyarakat serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan yang kuat di 10 provinsi rawan kebakaran; Tersedianya sistem peringatan dini di 30 DAOPS	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dephut	100,00
n)	7108	Penyediaan Kerangka Geodesi Kebencanaan	**LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DINAMIKA BUMI UNTUK MULTI HAZARD (GEOID, MARINE GEODESI, PASUT)**	Program Perlindugnan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Bakosurtanal	2,0
o)	……..	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS)	Terbangunnya Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) yang meliputi antara lain, terpasangnya AWS 10 lokasi, ARG 10 lokasi, penakar hujan 1.000 lokasi. Tersusunnya Peta dan Atlas mengenai Iklim sebanyak 3 peta, serta tersusunnya informasi nomor-nomor Pos Hujan Kerjasama Tahap I sebanyak 1 laporan.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	9,40
p)	.....	Pengembangan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	Terlaksananya Workshop International on Climate Information Service in Supporting Mitigation and Adaptation to Climate Change in Infrastructure and Health Sector (2 laporan), Workshop International Global Atmosphere Watch (GAW) (1 laporan), dan diseminasi informasi iklim (5 laporan).	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	3,60
q)	.....	Tsunami Early Warning System (TEWS)	Terkelolanya Sistem Operasional TEWS yang meliputi antara lain, Sensor Seismik 1 paket, Sistem Sirine 1 paket, Sistem Komunikasi dan Integrasi 1 paket, Sistem Prosesing 1 paket, DSS 1 paket. Terbangunnya Sistem Monitoring CCTV 10 unit, Sistem Sirine 6 Unit, terpasangnya Accelerometer 35 Unit, Sistem Diseminasi Nasional 25 paket. Terselenggaranya koordinasi dengan Universitas. Meningkatnya fasilitas operasional di NSC. Meningkatnya fasilitas pelayanan AEIC. Workshop Internasional TEWS 2 laporan.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	84,60
r)	5778	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan sarana dan prasarana informasi mengenai peringatan dini dan tanggap darurat bencana geologi dan meteorologi	Program Penguasaan serta pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dep. Kominfo	15,60
s)	6718	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya peningkatan dan pengamanan serta pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi: (1) tersajinya 260 informasi kebencanaan; (2) terlaksananya pertemuan forum komunikasi; (3) teroptimalkannya operasional model pusdalops; (4) beroperasinya peralatan teknologi informasi (*hardware dan software*) kebencanaan; (5) beroperasinya jaringan komunikasi (LAN dan WAN) antara BNPB dengan instansi terkait (pusat dan daerah)	Program Penguasaan serta pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	BNPB	13,50
t)	0552	Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana	Terlaksananya 7 paket pengembangan sistem manajemen penanganan bencana	Program Pemulihan Daerah Terkena Bencana Nasional	BNPB	36,44

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
u)	0553	Penanggulangan Pasca Bencana dan Kerusuhan Sosial	Terlaksananya 2 paket kegiatan penanggulangan pasca bencana dan kerusuhan sosial	Program Pemulihan Daerah Terkena Bencana Nasional	BNPB	62,19
v)	0752	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan bahaya kebakaran	Terwujudnya kapasitas Pemda dalam upaya-upaya mitigasi bencana dan pendamping Safer Community through Disaster Risk Reduction (SCDRR) dan penanganan bahaya kebakaran di 33 Provinsi	Program peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	Dep. Dalam Negeri	9,40
w)	4434	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Dukungan emergensi bencana alam di tingkat nasional di 30 provinsi	Program Pengembangan Pertahanan Integratif	MABES TNI	5,00
Fokus 2. Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan						
a)	4055	Pengamanan Kawasan Hutan	Terselesaikannya kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh Polhut/PPNS sampai dengan P.21 untuk tahun berjalan 50% dan tunggakan kasus sebelumnya 25%; Meningkatnya sarana dan prasarana pangamanan hutan di 77 UPT (TN dan KSDA) dan Kabupaten/Kota; Terlaksananya operasi pengamanan hutan di pelabuhan, di bandara dan di 50 TN serta 27 KSDA sebanyak 924 kali; Meningkatnya kualitas SDM pengamanan hutan bagi 200 orang Polhut dan 120 orang PPNS serta terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 33 kelompok/unit	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	Dephut	95,02
b)	4054	Pengelolaan Taman Nasional Model	Terlaksananya pengelolaan TN berbasis resort untuk 20 TN di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Papua; Terlaksananya pengembangan pengelolaan TN dalam rangka Dept Nature Swap (DNS); Terlaksananya sistem monitoring kawasan konservasi dan HL; Terbangunnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Perambahan Kawasan Berbasis GIS/Remote Sensing di 10 TN prioritas	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dephut	90,00
c)	4019	Rehabilitasi Lahan Kritis DAS Prioritas	Penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan seluas 100.000 ha prioritas I	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut	500,00
d)	4042	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Penetapan luas areal kerja Hkm seluas 420.000 ha; Fasilitasi 4 kelompok IUPHKM baru; Fasilitasi 10 unit kemitraan Hkm; Fasilitasi ketahanan pangan sektor kehutanan di 4 provinsi	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut	18,79
e)	DAK	Penyediaan DAK Konservasi Sumber Daya Tanah dan Air	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 20.000 ha yg menjadi tanggungjawab daerah (Kab/Kota); Terlaksananya pengelolaan hutan lindung, Tahura dan Hutan Kota di 100 Kab/Kota; Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) sebanyak 600 unit; Tersedianya sarana pendukung penyuluhan, terlaksananya penyuluhan teknik pembuatan bangunan KTA, serta terlaksananya penyuluhan teknik RHL.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut.	PM
f)	5053	Pengembangan Debt for Nature Swaps (DNS) Bidang Lingkungan Hidup	Terserapnya dana yang tersedia pada program DNS sebesar Rp 18 milyar untuk 90 UMK bagi investasi lingkungan dalam rangka mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	18,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
g)	5068	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Menurunnya beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa, pengelolaan air limbah domestik dan sampah melalui implementasi kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*) di 5 kota, pengembangan 2 IPAL Terpadu Biogas untuk sentra industri kecil, pelaksanaan Program Adipura di 26 kota, Program Langit Biru di 20 kota, pembinaan pengendalian pencemaran di Kabupaten/Kota, pengelolaan limbah industri skala kecil, 6 kota supervisi Prokasih dan penanganan kasus pencemaran lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Kualitas Lingkungan Hidup	KLH	31,49
h)	5057	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Penyelesaian dan penanganan 20 kasus pidana, 20 kasus pengenaan sanksi administrasi lingkungan dan 20 kasus perdata lingkungan, penyelesaian 20-30% pengaduan dan sengketa lingkungan, 10 pos P3SLH, meningkatnya kemampuan SDM PPLH/D dan PPNS-LH, dan evaluasi 8 peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional bidang LH	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Kualitas Lingkungan Hidup	KLH	14,601
i)	DAK	Penyediaan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas air dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Lingkungan Hidup di 465 Kab/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KLH	PM
j)	2126	Penetapan Good Mining Practise	Perumusan Pedoman teknis bid. Lingkungan minerbapabum, penunjang tugas keteknikan mineral, pengembangan pedoman standarisasi menerbapabum dan perumusan rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) bidang Minerbapabum, terlaksananya penerapan good mining practices pada 38 PKP2B, 14 KK, 7 WKP	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	12,00
k)	2193	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kerja Pertambangan	Tertatanya wilayah kerja panas bumi dan wilayah usaha pertambangan minerba serta tersedianya informasi minerbapabum, Penyusunan draft dan data WKP panas bumi.	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	12,00
Fokus 3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu						
m)	4039	Pengelolaan DAS	Tersedianya kebijakan Pengelolaan DAS yang mempunyai kekuatan hukum sebanyak 1 UU, 1 PP/Permenhut/Perpres dan 1 pedoman; Tersusunnya perencanaan pengelolaan DAS terpadu di 18 unit DAS; Meningkatnya dukungan stakeholders di 10 propinsi; Pembangunan baseline data DAS di 18 unit DAS; Tersedianya model PDAS Terpadu sebanyak 1 unit; Terpantaunya penyelenggaraan PDAS dan kinerja DAS di 36 BPDAS.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut	135,00
n)	4463	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) di 14 Dinas Provinsi	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Ditjen SDA- Dep PU	33,00

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
o)	4464	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) di 14 Dinas Provinsi dan 99 Dinas kota / kabupaten	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Ditjen SDA- Dep PU	91,34
p)	4465	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP) di 6 Dinas Provinsi dan 26 Dinas kota / kabupaten	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Ditjen SDA- Dep PU	177,22
Fokus 4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan						
a)	4106	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Non Konvensional (Jasa Kelautan)	Terlaksananya pengembangan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 2 lokasi dan operasional panitia nasional BMKT; pilot pengembangan pemanfaatan air laut dalam; pilot pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut, pilot pengembangan *mikroalgae* sebagai bahan baku biofuel, tersusunnya SNPM pengembangan jasa kelautan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	10,00
b)	4107	Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tindak lanjut dan fasilitasi pengembangan pengelolaan pesisir (pasca MCRMP) di 42kab/kota; meningkatnya kapasitas daerah non-MCRMP di 10 kab/kota di 5 provinsi; berkembang dan menguatnya kelembagaan di 5 UPT BPSPL; terlaksananya pengembangan pariwisata bahari di 2 pulau-pulau kecil (ppk); meningkatnya investasi di 5 ppk; terbukanya akses transportasi di 2 kawasan ppk, meningkatnya infrastruktur pendukung dasar di 10 lokasi ppk, meningkatnya kualitas ekosistem ppk di 5 lokasi; tersusunnya 5 paket SNPM pengelolaan ppk.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	23,20
c)	4103	Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya 180 hari operasi terpadu; terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan di 2 UPT pengawasan; beroperasinya VMS off-line 1000 unit secara penuh bagi kapal perikanan di atas 30 GT; meningkatnya kemampuan pengawasan di 3 WPP utama (laut Natuna, laut Sulawesi, dan Arafura); meningkatnya ketaatan pelaku terhadap peraturan; terlaksananya tindak pidana laut dan penyelesaian tindak pidana perikanan dan kelautan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	247,00
d)	4105	Perencanaan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Serta Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya perencanaan pengembangan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 20 lokasi; meningkatnya penataan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil (ppk) berbasis masyarakat di 20 kab/kota; tersusunnya 5 paket NSPM penataan kawasan laut, pesisir dan ppk	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	11,25
e)	4120	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria dan Teluk	Membaiknya ekosistem terumbu karang di 23 kab/kota pada 8 provinsi; terehabilitasinya ekosistem pesisir di 5 lokasi	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	DKP	183,32
f)	4119	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	Terkelolanya kawasan konservasi perairan seluas 4 juta ha; berkembangnya konservasi jenis dan genetik ikan di 8 lokasi; berkembang dan menguatnya kelembagaan konservasi sumber daya ika`1n di 2 UPT balai konservasi kawasan perairan nasional (BKKPN); Pengembangan dan implementasi kerja sama *Sulu Selawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Bismarck Solomon Seas Ecoregion* (BSSE), *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); 6	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DKP	20,80

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			paket SNPM konservasi SDI.			
g)	4101	Penyelenggaraan riset, eksplorasi dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan	Kajian sumber daya ikan laut di 3 wilayah pengelolaan perikanan/WPP (Laut Cina Selatan, Teluk Tomini, dan Laut Jawa); kajian ekosistem, habitat di 5 ekosistem; pemahaman fenomena alam kelautan 3 paket dan dukungan kerja sama riset internasional; pemetaan kerentanan pesisir di 2 kawasan; pengembangan teknologi budidaya ikan; invensi, inovasi dan pengkajian teknologi kelautan; invensi, inovasi dan pengembangan teknologi pengolahan; berkembangnya teknologi budidaya ikan 5 komoditas utama dan komoditas penting lainnya di 1 pusat dan 5 UPT riset budidaya; dokumen hasil analisis isu terkini kelautan dan perikanan 12 paket; rekomendasi/rumusan kebijakan kelautan dan perikanan 5 paket	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	DKP	69,00
Fokus 5. Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan						
a).	4470	Pengendalian dan Pengembangan Fungsi Kawasan Metropolitan dan Kota Besar melalui peremajaan *(urban renewal)* di kawasan strategis perkotaan (pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan)	Terlaksananya peremajaan kota *(urban renewal)* di kawasan kumuh (5 kawasan)	Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan	Dep. PU	13,00
b).	4268	Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terselenggaranya pembinaan manajemen penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mendukung turbinlakwas penataan ruang	Penataan Ruang	Dep. PU	88,68
c).	4265	Operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTR Kab/Kota	Terselenggaranya operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, serta terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang oleh pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat	Penataan Ruang	Dep. PU	74,45
d).	0826	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya SDM yang memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengelola penataan ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah dan pemerintah pusat.	Penataan Ruang	Depdagri	4,00
e).	0846	Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Terwujudnya keseimbangan, keharmonisan, keselarasan dan keterpaduan pembangunan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota pemekaran melalui program penataan ruang	Penataan Ruang	Depdagri	2,13
f).	5657	Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	Sertifikasi pada 495.620 bidang tanah (Prona sebanyak 139.620 bidang, RALAS 120.000 bidang, LMPDP 150.000 bidang, UKM 30.000 bidang, Pertanian 23.000 bidang, DKP 3.000 bidang, Transmigrasi 30.000 bidang); Larasita di 40 Kab/Kota	Pengelolaan Pertanahan	BPN	376,71
g).	5658	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaaan Tanah	Pelaksanaan Redistribusi Tanah sebanyak 210.000 bidang tanah; Konsolidasi 10.000 bidang tanah; Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di 200.000 bidang tanah; dan Neraca Penatagunaan Tanah di 100 Kab/Kota	Pengelolaan Pertanahan	BPN	266.,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
h).	5676	Pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah	Penertiban tanah terindikasi terlantar 115 SP; inventarisasi tanah bekas hak / kawasan kritis 92 SP;	Pengelolaan Pertanahan	BPN	5,94
i).	7107	Pemetaan dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Peta Dasar Rupabumi 1 : 50 K Papua	Penataan Ruang	Bakosurtanal	76,67
j).	7113	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)	Dukungan kegiatan JBIC Loan : Data Utilisasi, Networking, PMO, IGTE dan kerjasama ASEAN Kegiatan Konsultan Service I, Konsultan Service II, Networking, Data Akuisisi dan Produksi	Penataan Ruang	Bakosurtanal	205,00
k).	2120	Penataan Ruang Berbasis Geologi	Terciptanya data geologi dan geofisika kelautan Tersusunnya rekomendasi penataan ruang berbasis geologi Terselenggaranya penyelidikan geologi lingkungan regional (4 lokasi), penyelidikan geologi perkotaan (4 lokasi), serta inventarisasi dan evaluasi data geologi untuk tata ruang wilayah di Indonesia (6 cluster)	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DESDM	14,1
l).	7110	Pemetaan Tematik SDA dan LH Matra Darat	Basis data tematik SDA Darat Pembaharuan dan pengadaan data SDA dan LH Regional Inventarisasi SDA dan LH Ekspedisi Geografi Indonesia Diseminasi dan pencetakan produk	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Bakosurtanal	7,40
m).	7103	Pemetaan Tematik SDA dan LH Matra Laut	1. Pengelolaan Basis data spasial pesisir 2. Survei dan pemetaan SDA pesisir, laut dan pulau kecil 3. Pemetaan neraca dan valuasi ekonomi SDA PL 1:1000k sampai 1:50k Nasional 4. Inventarisasi dan pemetaan SDA Mangrove Indonesia, Inventarisasi dan Pemetaan SDA Pesisir dan Survei dan Pemetaan Pulau kecil terluar 5. Neraca ekosistim pesisir dan laut 6. Penyusunan dan aplikasi basisdata kelautan 7. Pengembangan Marine and Coastal Georis Information System 8. Penyelenggaraan dan pengembangan Lab. Parangtritis	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Bakosurtanal	11,56
n).	7104	Pemetaan dasar Kelautan dan kedirgantaraan	1. Peta Resmi untuk Zonasi Tingkat peringatan 2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Basisdata spasial 3. Perawatan wahana dan peralatan survei laut untuk percepatan pengadaan data spasial pesisir dan laut 4. Survei hidrografi pantai Kalimantan 5. Peta Aeronautical Chart ICAO 1:250K & Peta LBI 1:25K & WAC ICAO 1:1.000.000 Aceh, Riau, Kaltim, Malut, Maluku, Papua, dan NTT 6. Pengelolaan sistim informasi dan basisdata spasial	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	Bakosurtanal	13,87
o).	7105	Pengembangan Geodesi dan Geodinamika	Pengelolaan Staf Tetap GPS; Pemantauan Deformasi Kerak Bumi dan Pemeliharaan Kerangka Referensi Geodetik; Penyediaan JKH dan JKV; Pemetaan Geoid dan Operasioanalisasi stasiun pasang surut realtime	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Bakosurtanal	4,21

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
p).	7109	Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Standarisasi Data Spasial	Penyelenggaraan Fora IDS; Pengembangan dan Peningkatan Upaya Penerapan Standar Data Geospasial; Pengembangan dan Peningkatan Upaya Penerapan Standar Data Geospasial; Penyiapan Sumber Daya Manusia Penyusunan Regulasi Informasi Spasial; Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Bakosurtanal	5,55
q).	5675	Survey, pengukuran dan pemetaan	Peta pertanahan 1.000.000 Ha yang terdiri dari Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) 2500 titik, Peta Dasar Pendaftaran Tanah 1.000.000 Ha, Peta Tematik 3.000.000 Ha, Peta Nilai Tanah 3.000.000 Ha.	Pengelolaan Pertanahan	BPN	66,86
r).	0093	Penyusunan Penyempurnaan Pengkajian Peraturan Perundangan	1 paket kerangka kebijakan dan pedoman operasional pengadaan tanah	Pengelolaan Pertanahan	BPN	7.55

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010

BUKU II

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …… i

BAB 1 SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
A. Kondisi Umum ……. 1-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 1-8
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 ……. 1-16
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 1-20

BAB 2 EKONOMI
A. Kondisi Umum……... 2-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010……. 2-22
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010……... 2-35
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 2-42

BAB 3 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
A. Kondisi Umum ……... 3-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010……. 3-4
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 3-5
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 3-6

BAB 4 SARANA DAN PRASARANA
A. Kondisi Umum ……... 4-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 4-12
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 4-16
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 4-25

BAB 5 POLITIK
5.1 Politik Dalam Negeri ……. 5-1
A. Kondisi Umum ……... 5-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010……. 5-3
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 ……... 5-5
5.2 Politik dan Hubungan Luar Negeri ……...……. 5-5
A. Kondisi Umum ……. 5-5
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010……. 5-9
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 5-12
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 5-14

BAB 6 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
A. Kondisi Umum ……... 6-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 6-8
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 6-13
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 6-15

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 7 HUKUM DAN APARATUR

A. Kondisi Umum …….. 7-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 7-5
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 7-8
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 7-10

BAB 8 WILAYAH DAN TATA RUANG

A. Kondisi Umum …….. 8-3
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 8-14
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 8-23
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 8-32

BAB 9 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Kondisi Umum …….. 9-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 9-16
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 9-24
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 9-27

BAB 7 HUKUM DAN APARATUR

A. Kondisi Umum …….. 7-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 7-5
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 7-8
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 7-10

BAB 8 WILAYAH DAN TATA RUANG

A. Kondisi Umum …….. 8-3
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 8-14
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 8-23
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 8-32

BAB 9 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Kondisi Umum …….. 9-1
B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010…….. 9-16
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 …….. 9-24
D. Matriks Program Pembangunan Tahun 2010 …… 9-27

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

A. Kondisi Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu:

(1) terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, yang ditandai antara lain oleh: (a) karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa; dan
(2) terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Dalam rangka mencapai kedua sasaran pembangunan jangka panjang tersebut di atas, berbagai upaya pembangunan di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama selama periode tahun 2004 - 2009 telah dilakukan antara lain melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan perbaikan gizi, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pembangunan bidang agama.

Pelaksanaan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama tahun 2008 dan perkiraan pencapaian tahun 2009 yang merupakan tahun keempat dan kelima RPJMN 2004—2009 memberikan kemajuan penting sekaligus merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2010. Berbagai upaya dan kemajuan penting tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Kualitas Sumber Daya Manusia. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan

nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk membangun kualitas manusia sebagai insan dan sumber daya manusia pembangunan tetap menjadi perhatian penting. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi makin membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit, yang mengukur tiga dimensi dasar dalam pembangunan manusia, yaitu: hidup sehat dan panjang umur, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup yang memadai. Ketiga dimensi dasar ini diukur melalui: angka harapan hidup sejak lahir; angka melek huruf; dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi; serta pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Berdasarkan *Human Development Report* 2007-2008, IPM Indonesia telah meningkat dari 0,696 pada tahun 2004 menjadi 0,728 pada tahun 2005. Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-107 dari 177 negara.

Kualitas SDM yang makin membaik tersebut tidak terlepas dari hasil berbagai upaya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana. Pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan bangsa Indonesia, antara lain penyediaan layanan pendidikan yang baik bagi segenap anak bangsa melalui pelaksanaan berbagai program strategis seperti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk.

Pendidikan. Pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan bangsa Indonesai melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap anak bangsa melalui pelaksanaan berbagai program strategis seperti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun (2007) dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun yang mencapai 98,84 persen.

Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2008 angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/sederajat masing-masing telah mencapai 95,14 persen dan 116,56 persen; APK pada jenjang SMP/MTs/sederajat telah mencapai 96,18 persen; dan APK pada jenjang pendidikan menengah 64,28 persen, serta APK pendidikan tinggi mencapai 18,29 persen yang berhasil melampaui target tahun 2009. Berbagai kegiatan telah dilakukan guna meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan non formal termasuk melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur pendidikan non formal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Kemajuan penting lainnya adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh

indeks paritas gender APM atau APK yang sudah mencapai angka sekitar 1,0 untuk semua jenjang pendidikan.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 menjadi 47,04 persen dan yang memiliki sertifikasi pendidik menjadi 15,19 persen. Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan sehingga prosentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional. Seiring dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp. 2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan, serta kualitas pendidikan, maka dilakukan upaya peningkatan anggaran pendidikan secara terus menerus sehingga pada tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat amandemen UUD 1945 yaitu sebesar 20 persen dari APBN atau sebesar Rp. 207,4 trilyun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,6 Trilyun dan melalui Transfer Daerah sebesar Rp. 117,9 Trilyun.

Kesehatan dan Perbaikan Gizi. Kesehatan dan perbaikan gizi merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator antara lain meningkatnya usia harapan hidup dari 68,6 tahun (2004) menjadi 70,5 tahun (2007), menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 307 (2004) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 (2004) menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 25,8 persen (2005) menjadi 18,4 persen (2007). Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Philipina, status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia masih tertinggal. Status kesehatan dan gizi yang masih rendah tersebut akan menyebabkan rendahnya daya saing bangsa.

Membaiknya status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan hasil kinerja pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang meliputi enam subsistem yaitu: upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman; manajemen dan informasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat. Berikut, diuraikan secara ringkas pencapaian kinerja dari ke enam sub sistem tersebut.

Upaya kesehatan terus mengalami perbaikan**,** antara lain ditandai dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dari 70,4 persen (2005) menjadi 72,5 persen (2007). Selain itu, cakupan imunisasi lengkap anak balita untuk mencegah penyakit meningkat dari 51,5 persen (2002) menjadi 58,6 persen (2007). Beberapa indikator penyakit menular yaitu tingkat kejadian (*incidence rate*) penyakit demam berdarah dengue (DBD) meningkat dari 37,1 (2004) menjadi 71,8 per 100.000

penduduk (2007), namun *case fatality rate* (CFR) menurun dari 1,2 persen (2004) menjadi 1,0 persen (2007), kasus diare tercatat 3.314 kasus dengan CFR 1,6 persen (2004) menjadi menjadi 3.661 kasus dengan CFR 1,3 persen (2007). Kasus malaria di Indonesia dengan indikator *annual parasite incidence* (API) malaria (wilayah Jawa Bali) tercatat sekitar 0,15 (2004) menjadi 0,16 per 1.000 penduduk (2007), sedangkan *annual malaria incidence* (AMI) di wilayah luar Jawa Bali menurun menjadi sebesar 19,7 per 1.000 penduduk (2007). Tren angka penemuan kasus/*case detection rate* (CDR) tuberkulosis meningkat dari 51,8 persen (2004) menjadi 69 persen (2007) dan keberhasilan penyembuhan TB meningkat dari 89 persen (2004) menjadi 91 persen (2006). Jumlah kasus HIV dan AIDS meningkat dari 9.565 kasus (2005) menjadi 22.125 kasus (2008), dan telah tersebar di 33 provinsi dan 214 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Secara nasional prevalensi HIV adalah sebesar 0,2 persen, sedangkan proporsi kasus AIDS secara nasional sebesar 5,23 per 100.000 penduduk (2008). Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka penyakit menular, dilain fihak berdasarkan data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan terjadinya peningkatan angka penyakit tidak menular. Sebagai contoh, prevalensi hipertensi penduduk umur lebih 18 tahun sebesar 7,6 persen, prevalensi penyakit jantung sebesar 7,2 persen, dan prevalensi diabetes melitus 1,1 persen.

Upaya perbaikan gizi di sektor kesehatan ditingkatkan, antara lain melalui pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-9 bulan mencakup 75 persen (SDKI, 2007), pemberian ASI pada bayi umur 0-6 bulan mencakup 32,4 persen (SDKI,2007), pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6 - 59 bulan. mencakup 71,5 persen (Riskesdas, 2007) dan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil tahap pertama mencakup 92,2 persen (Riskesdas, 2007). Perbaikan pangan dan gizi masyarakat merupakan upaya yang dilaksanakan secara lintas sektor. Ketahanan pangan dan gizi bertujuan tidak terbatas pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan tetapi juga status gizi masyarakat, khususnya anak balita dan ibu hamil. Dengan demikian investasi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi adalah investasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat, cerdas, produktif, mempunyai daya saing tinggi untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Membaiknya upaya kesehatan antara lain disebabkan oleh pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Pemanfatan fasilitas pelayanan kesehatan terus membaik, antara lain ditandai oleh rasio Puskesmas 3,61 per 100.000 penduduk, 94,1 persen rumah tangga berada kurang atau sama dengan 5 km dari sarana pelayanan kesehatan. Selain itu, sekitar 97,3 persen penduduk dapat menjangkau sarana kesehatan kurang dari 60 menit, dan akses ke upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) 78,9 persen rumah tangga kurang dari 1 km. Namun, akses penduduk terhadap fasilitas belum optimal, masih terdapat sekitar 33,7 persen penduduk mengalami kendala jarak dan biaya. Selain itu, sekitar 14 persen puskesmas berada dalam kondisi rusak.

Pembiayaan kesehatan dalam 4 tahun terakhir telah meningkat secara bermakna, walaupun masih belum sesuai dengan anjuran WHO. Pembiayaan kesehatan terutama diarahkan untuk menjaga akses penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar baik di puskesmas maupun rumah sakit. Cakupan sasaran jaminan kesehatan kepada masyarakat (Jamkesmas) telah meningkat dari 36,4 juta orang (2005) menjadi 76,4 juta orang (2007). Cakupan asuransi kesehatan baru menjangkau sekitar 18,7 persen penduduk, yang sebagian besar adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan penduduk yang mampu.

Sumberdaya tenaga kesehatan terus mengalami perbaikan. Jumlah tenaga kesehatan terus bertambah, antara lain adalah rasio jumlah tenaga kesehatan untuk dokter umum 20 per 100.000 penduduk, dokter spesialis 5,5 per 100.000 penduduk, perawat 138 per 100.000

penduduk, bidan 35 per 100.000 penduduk. Rasio ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Indonesia masih mengalami masalah ketenagaan kesehatan baik jumlah, jenis, mutu maupun distribusinya yang kurang merata.

Obat dan perbekalan kesehatan juga mengalami perbaikan. Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan obat, makanan dan perbekalan membaik. Sebagai contoh, peresepan obat generik esensial fasilitas pelayanan dasar puskesmas telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, peresepan tersebut masih rendah di rumah sakit dan Apotek Pengawasan obat dan makanan terus ditingkatkan untuk menjamin keamanannya. Dalam hal obat, ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri masih tinggi, hal ini ditandai dengan masih besarnya kebutuhan impor bahan baku obat yaitu sekitar 80-85 persen.

Manajemen kesehatan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan di berbagai tingkat dan bidang, terus dikembangkan. Hal ini antara lain dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan 2005-2009, proses Revisi Sistem Kesehatan Nasional, dan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan, serta dilaksanakannya Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) sebagai data dasar dalam perencanaan kesehatan. Hal yang perlu diperkuat dalam manajemen kesehatan antara lain implementasi perencanaan anggaran berbasis kinerja, sikronisasi kebijakan dan perencanaan antara pusat dengan daerah serta memperkuat regulasi.

Kependudukan. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui program keluarga berencana, pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindarkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang, dengan keberhasilan program keluarga berencana, diperkirakan telah lebih dari 80 juta kehamilan atau kelahiran dapat tercegah. Selain itu, secara makro, Program KB juga telah berhasil merubah kondisi piramida penduduk Indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa. Perkembangan ini telah menciptakan peluang ekonomis karena ratio ketergantungan terus menurun mencapai titik terendah (*window of opportunity*).

Hasil-hasil yang dicapai pembangunan keluarga kecil berkualitas pada tahun 2008 dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk, antara lain meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan menjadi 19,8 tahun (SDKI 2007). Selain itu, meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 25,6 juta peserta, yang 11,4 juta diantaranya adalah peserta KB aktif miskin. Peningkatan peserta KB aktif tersebut sebagai hasil dari pencapaian peserta KB baru sekitar 6,7 juta orang, yang 3,4 juta diantaranya adalah peserta KB baru miskin. Pembangunan keluarga kecil berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 981 ribu institusi/sarana yang menyelenggarakan pelayanan KB, yang terdiri dari Klinik Pemerintah sekitar 210 ribu dan tempat pelayanan KB non Pemerintah sebanyak 771 ribu buah (Klinik Swasta sebanyak 36 ribu, Dokter Praktek Swasta sebanyak 158 ribu, dan Bidan Praktek Swasta sebanyak 577 ribu). Selain itu, juga karena tersedianya Pos Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 83 ribu, Sub PPKBD sebanyak 388 ribu, dan meningkatnya jumlah tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) menjadi sekitar 23.765 petugas.

Pembangunan keluarga kecil berkualitas (keluarga berencana) juga telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM. Dengan keluarga berencana, setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Hasil-hasil yang

dicapai pembangunan keluarga kecil berkualitas pada tahun 2008 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, antara lain terlihat dari keluarga yang aktif dalam pembinaan tumbuh kembang anak melalui Bina Keluarga Balita (BKB) mencapai sekitar 1,8 juta keluarga, melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) sekitar 802 ribu keluarga, melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) sekitar 757 ribu keluarga, dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif (UPPKS) sekitar 1,0 juta keluarga. Pada tahun 2009, pencapaian tersebut diharapkan dapat semakin meningkat.

Pemberdayaan Perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. IPM Indonesia telah meningkat, namun Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*/GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement*/GEM) menunjukkan masih adanya kesenjangan, yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. GDI Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, walaupun mengalami peningkatan dari 0,704 pada tahun 2004 menjadi 0,721 pada tahun 2005, tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai HDI pada tahun yang sama. Peningkatan GDI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-94 dari 177 negara. Di antara negara-negara ASEAN, GDI Indonesia termasuk dalam peringkat yang rendah. Sementara itu, GEM Indonesia, yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan; juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,621 pada tahun 2007 (KNPP-BPS). Namun demikian, peningkatan nilai GEM yang kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik, belum signifikan.

Peningkatan pemberdayaan perempuan pada tahun 2008 tersebut antara lain juga dicapai melalui: (1) terbentuknya 305 unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) di polres seluruh Indonesia; (2) meningkatnya angka melek aksara perempuan usia 15 tahun ke atas dari 88,4 persen pada tahun 2006 menjadi 89,2 persen pada tahun 2007; (3) menurunnya tingkat buta huruf perempuan usia 15 tahun ke atas dari 11,61 persen pada tahun 2006, menjadi 11,38 persen pada tahun 2007; dan (4) meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan dari 49,52 persen pada tahun 2007 menjadi 51,25 persen pada tahun 2008.

Perlindungan Anak. Upaya perlindungan anak, sesuai Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002, mencakup perlindungan sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Perlindungan anak mencakup hidup, tumbuh, berkembang, dan keterlibatan anak dalam proses pembangunan, serta perlindungan khusus. Perlindungan khusus bagi anak memerlukan porsi perhatian yang sangat besar, terutama pada isu-isu lintas-sektor seperti perdagangan anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual komersial terhadap anak, dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan berkurangnya jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun dari 5,52 persen pada tahun 2005 menjadi 4,65 persen pada tahun 2006, dan 3,78 persen pada tahun 2007. Sementara itu, variabel-variabel HDI di bidang kesehatan juga menunjukkan bahwa angka harapan hidup setiap anak Indonesia yang terlahir hidup cukup tinggi, yaitu 69,7 tahun (perempuan 71,6 tahun dan laki-laki 67,8 tahun).

Peningkatan perlindungan anak pada tahun 2008 tersebut antara lain juga dicapai melalui: (1) tersusunnya standar prosedur operasional pemulangan korban perdagangan anak; (2) terbentuknya telepon sahabat anak TESA 129 di 7 kota; dan (3) tersusunnya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat.

Pemuda dan Olahraga. Masih terkait dengan peningkatan kualitas SDM, berbagai kegiatan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga telah meningkatkan peran dan partisipasi pemuda serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat. Pada tahun 2008, peningkatan partisipasi pemuda dicapai antara lain melalui berbagai upaya peningkatan kualitas dan kemandirian pemuda, pembinaan kesadaran bela negara, kewirausahan dan kecakapan hidup bagi pemuda, serta partisipasi pemuda terdidik dalam pembangunan perdesaan. Sementara itu, kemajuan yang dicapai di bidang olahraga didukung oleh upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan internasional, pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah, serta peningkatan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Pada tahun 2009, berbagai upaya peningkatan peran dan partisipasi pemuda serta pengembangan budaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Agama. Beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing adalah salah satu unsur dari hak azasi manusia (HAM) yang wajib dihormati dan dilindungi keberlangsungannya. UUD 1945 Pasal 29 menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Dengan demikian, agama dan ekspresi keagamaan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Upaya mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda prioritas dalam pembangunan bidang agama. Kemajemukan dan pluralitas menjadi potret masyarakat Indonesia yang perlu perhatian dari Pemerintah. Perhatian serius dari Pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan sosial yang lebih komplek. Melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat. Upaya ini dimaksudkan mendorong segenap umat beragama untuk memahami ajaran agama masing-masing baik yang vertikal maupun horizontal, serta untuk menekankan adanya titik temu agama-agama dalam hal sama-sama mengajarkan perdamaian, toleransi dan kasih sayang antar sesama manusia. Beberapa perkembangan penting lainnya yang dicapai dalam pembangunan bidang agama antara lain: pembangunan berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata; perbaikan manajemen peyelenggaraan ibadah haji; serta penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pemberdayaan umat.dan pengelolaan dana sosial keagamaan.

Kebudayaan. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Masih terkait dengan peningkatan kualitas manusia sebagai insan, berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditandai dengan makin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari makin meningkatnya berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya. Pada tahun 2008, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) pembinaan karakter dan pekerti bangsa di 33 provinsi melalui media massa, sekolah, dan organisasi

kepemudaan, (2) dukungan *event* budaya di daerah melalui kegiatan pertunjukkan, pameran, lomba, peragaan, (3) pengembangan apresiasi seni melalui pagelaran, festival, pementasan, lomba dan pemberian penghargaan di bidang seni, (4) pembinaan pengembangan perfilman nasional, (5) peningkatan sensor film/video/iklan, (6) penyelamatan dan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, penanggulangan kasus pelestarian dan pemanfaatan peninggalan kepurbakalaan, (7) pelestarian peninggalan purbakala di 33 provinsi melalui pertunjukan, pameran, lomba, peragaan, dan (8) pendukungan pengelolaan untuk 25 museum daerah. Disamping itu, untuk mendukung pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang lebih baik, pada tahun 2009, upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pembangunan di bidang kebudayaan.

B. Permasalahan dan Sasaran Tahun 2010

B.1. Permasalahan dan tantangan

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas SDM Indonesia yang diukur oleh IPM saat ini masih rendah. Pada 2005 IPM Indonesia berada pada posisi ke 107, berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun yang sama tercatat Singapura menduduki peringkat 25, Brunai 30, Malaysia 63, Thailand 78, dan Filipina 90. Kualias SDM juga berdampak pada daya saing (*competitiveness*) Indonesia dengan negara-negara lain. Dari 55 negara yang diukur peringkat daya saingnya, pada tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke-54. Peringkat ini termasuk terendah di kalangan negara-negara ASEAN lainnya.

Upaya untuk mewujudkan kualitas SDM yang tangguh dan kompetitif dilakukan antara lain melalui upaya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi, serta keluarga berencana. Dalam pelaksanaannya, sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan.

Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan. Pembangunan pendidikan sampai saat ini masih menghadapi masalah dan tantangan terkait dengan akses dan pemerataan pendidikan. Angka partisipasi jenjang pendidikan dasar mengalami perkembangan yang menggembirakan dengan sangat memuaskan dengan capaian APM dan APK SD/MI sederajat masing-masing sebesar 95,14 persen dan 116,56 persen, serta APK SMP/MTs/sederajat sebesar 96,18 persen. Namun demikian sampai saat ini masih terdapat sebagian anak usia 7-15 tahun yang tidak dapat mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya adalah faktor ekonomi, sosial-budaya, dan geografi. Mengingat Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan hak yang harus dipenuhi untuk setiap warga negara, maka berbagai upaya perlu dilakukan agar semua anak usia 7-15 tahun dapat bersekolah paling tidak sampai lulus jenjang SMP/MTs/sederajat.

Pada saat yang sama, pendidikan anak usia dini juga belum dapat diikuti oleh seluruh anak usia pra sekolah dengan APK yang baru mencapai 50,62 persen. Peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini perlu dilanjutkan untuk memastikan semua anak

Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal dan lebih siap untuk mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, peningkatan akses pendidikan anak usia dini yang diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pendidikan jenjang berikutnya.

Permasalahan akses dan pemerataan pendidikan juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, yang ditandai dengan tingkat kesenjangan partisipasi pendidikan yang lebih lebar antarkelompok masyarakat. Pemerataan layanan pendidikan menengah dan tinggi masih jauh dari harapan dan belum sepenuhnya mampu menjangkau penduduk kurang beruntung (*underprivilige*) yang disebabkan kondisi geografis dan kondisi sosial ekonomi. Dengan APK pendidikan menengah yang baru mencapai 64,28 persen dan APK pendidikan tinggi sebesar 18,29 persen, Indonesia masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga yang sama-sama sedang membangun sektor industri dan pertanian yang membutuhkan sumberdaya manusia yang handal. Kinerja pendidikan jenjang pendidikan menengah dan tinggi tersebut memberi pengaruh terhadap daya saing Indonesia dalam tataran global.

Meningkatnya partisipasi pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional telah berhasil meningkatkan kemampuan keberaksaraan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, sampai saat ini belum semua penduduk usia 15 tahun keatas memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sebagian besar dari mereka yang buta aksara adalah penduduk perempuan, tinggal di daerah perdesaan atau daerah terpencil, dan berasal dari keluarga miskin. Keadaan ini perlu diperbaiki mengingat kemampuan keberaksaraan merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

Peningkatan partisipasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu antara lain ketersediaan, kompetensi dan kualifikasi pendidik; ketersediaan sarana dan prasarana; serta sistem jaminan kualitas yang belum mantap. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi akademik pendidik belum sepenuhnya sesuai harapan sehingga proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 masih relatif rendah. Persebaran guru juga belum merata yang ditandai dengan terjadinya kekurangan guru di sebagian besar sekolah/madrasah di daerah terpencil dan kelebihan guru di sekolah/madrasah di wilayah perkotaan. Belum mantapnya pelaksanaan sertifikasi dan evaluasi kinerja guru juga berpengaruh pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pada saat yang sama sebagian besar satuan pendidikan tidak memiliki sarana dan prasarana minimum yang mutlak harus dimiliki untuk terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan keadaan ini berdampak pada ketimpangan kualitas hasil belajar siswa antarsatuan pendidikan. Oleh karena itu perlu upaya sungguh-sungguh agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan diupayakan agar seluruh satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pelayanan paling tidak setara dengan standar pelayanan minimum.

Masalah relevansi pendidikan juga masih mengemuka. Pendidikan menengah khususnya pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan tinggi juga belum berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara optimal. Sinergi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi dengan industri dan lembaga penelitian yang dimiliki oleh kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah juga belum berjalan dengan baik. Disamping itu, penelitian dan pengembangan yang dilakukan juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu penyediaan layanan

pendidikan keterampilan melalui pendidikan non formal masih belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas dan relevansi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan pendidikan juga masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan manajemen pelayanan pendidikan seperti: (1) belum mantapnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan karena kurangnya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antartingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) sehingga masih terjadi tumpang tindih fungsi dan pendanaan; (2) belum mantapnya sistem pembiayaan pendidikan yang berdampak pada kesenjangan kinerja pendidikan yang masih cukup lebar antardaerah serta semakin melebarnya kesenjangan kualitas antarsatuan pendidikan; (3) belum mantapnya sistem informasi pendidikan dan pelaksanaan penelitian kebijakan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pendidikan; dan (4) sistem kerjasama pemerintah dan swasta (*public-private partnership*) dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan belum dikembangkan secara optimal.

Meningkatkan Akses Dan Kualitas Kesehatan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan kedepan antara lain: (1) walaupun telah terjadi peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, namun hal ini masih relatif tertinggal jika dibanding dengan tingkat regional ASEAN; (2) walaupun ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan meningkat pesat namun akses dan kualitas pelayanan kesehatan kurang memadai karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan; (3) rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (*continuum of care*) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; (4) walaupun status gizi anak balita menunjukkan perbaikan, tetapi prevalensi anak yang pendek (*stunting*) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis masih sangat tinggi; (5) terjadinya *double burden of diseases*, disatu fihak penyakit menular masih merupakan masalah, dilain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat; (6) terjadinya fluktuasi harga obat yang tinggi karena masih tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri dan rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik berlogo terutama di RSUD, RS Swasta dan apotek; (7) terjadinya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyabarannya yang kurang merata; (8) jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin dan skema asuransi kesehatan nasional seperti diinginkan Sistem Jaminan Sosial Nasional belum terlaksana; dan (9) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum digarap dengan optimal.

Selain itu, permasalahan gizi akan menjadi makin berat oleh karena Indonesia mulai menghadapi beban ganda dalam masalah gizi. Disatu pihak masih harus menuntaskan masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi prevalensinya, dipihak lain harus mulai menghadapi masalah penyakit kegemukan akibat kelebihan gizi. Apabila tidak dicegah, kedua masalah tersebut berpotensi menjadi beban masyarakat dan bangsa yang dapat mengganggu laju pembangunan. Permasalahan lain yang terkait dengan gizi adalah keamanan pangan yang saat ini masih berkisar pada seringnya terjadi kasus keracunan, pangan tercemar oleh kontaminan mikrobiologi, kimia, bahan tambahan terlarang dan melampaui ambang keamanan. Masalah keamanan pangan dapat terjadi sepanjang rantai pangan karena ketidaktahuan produsen, terutama produsen usaha kecil, terhadap pentingnya keamanan pangan, ketidakperdulian produsen dan konsumen terhadap pangan yang tidak aman, serta karena kemiskinan yang memaksa konsumen memilih makanan yang sesuai daya beli meskipun tahu tidak aman.

Memantapkan Revitalisasi Program KB. Walaupun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia tetap besar. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sekitar 205,8 juta (Sensus 2000), meningkat

menjadi 218,9 juta pada tahun 2005 (Supas 2005), dan diperkirakan sekitar 230,6 juta pada tahun 2009. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, setelah Amerika, China dan India. Oleh sebab itu, masalah kependudukan dan KB masih menjadi salah satu fokus utama Pemerintah sampai saat ini, mengingat besarnya peran pembangunan kependudukan dan KB dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dibandingkan dengan SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) nasional cenderung stagnan, yaitu sebesar 2,6 per perempuan usia reproduksi. Selain itu, disparitas TFR antar provinsi dan desa-kota masih tinggi. Nilai TFR terendah 1,8 di D.I.Yogjakarta dan nilai tertinggi 4,2 di Nusa Tenggara Timur. TFR di desa (2,8) lebih tinggi dibandingkan di kota (2,3). TFR juga cenderung meningkat pada kelompok terkaya (menjadi 2,7 dari 2,2) dan pada kelompok dengan pendidikan tidak tamat SD, tamat SD dan tidak tamat SMP. Jika dilihat dari rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, terdapat kesenjangan menurut tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan desa-kota. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin (4,2) lebih banyak dibandingkan pada kelompok yang lebih mampu (3,0). Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah (4,1) lebih banyak dibandingkan pada perempuan berpendidikan tinggi (2,7), dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan di desa (3,7) lebih banyak dibandingkan di perempuan di kota (3,4). TFR yang cenderung stagnan tersebut disebabkan oleh tidak meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi secara berarti; terbatasnya akses pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan berpendidikan rendah, di desa, daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; sulitnya meningkatkan kesertaan pria dalam pemakaian kontrasepsi; menurunnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; dan menurunnya jumlah dan kualitas PPLKB dan PLKB/PKB. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat (termasuk remaja) tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi; masih kurangnya pembinaan keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak; dan rendahnya akses keluarga akseptor miskin kepada sumber permodalan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga.

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan. Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan yang diperkirakan akan dihadapi antara lain adalah: (1) belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) masih rendahnya akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik; (3) masih terdapatnya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan; dan (4) masih belum efektifnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah.

Meningkatkan Perlindungan Anak. Permasalahan pembangunan perlindungan anak antara lain adalah: (1) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertentangan dengan hak-hak anak dan tidak ramah anak; (2) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang kuat dan lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan; (3) masih rendahnya perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi; dan (4) terbatasnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh-kembang anak, terutama layanan pengembangan anak sejak usia dini dan sangat kurangnya akses anak terhadap area bermain.

Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga. Peran dan eksistensi pemuda dalam pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Pemuda yang berkualitas dan berdaya saing merupakan aset bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Sementara itu, melalui olahraga diharapkan dapat ditanamkan

nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, dan disiplin serta persatuan dan kesatuan bangsa serta ketahanan nasional yang tangguh. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olah raga adalah peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*).

Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama. Dalam rangka meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah: (1) harmonisasi sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud; (2) kualitas penyuluhan agama di tengah masyarakat belum memadai; (3) belum optimalnya pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik; (4) sarana dan prasarana peribadatan belum merata; (5) belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan; (6) masih belum optimalnya manajemen penyelenggaraan haji; dan (7) peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum optimal.

Memperkuat Jati Diri dan Karakter Bangsa. Dengan semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa. Proses interaksi budaya tersebut di satu sisi berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi tata nilai dan perilaku bangsa Indonesia, namun di sisi lain dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti munculnya identitas dan perilaku baru yang tidak sesuai dengan nilai, tradisi dan budaya lokal-tradisional bangsa. Oleh karena itu permalahan dan tantangan dalam upaya mempertahankan dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa adalah (1) gejala krisis jati diri dan karakter bangsa yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa; (2) belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya; (3) kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya perlu dioptimalkan; dan (4) sumber daya di bidang kebudayaan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas masih terbatas.

B.2. Sasaran Tahun 2010

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, maka sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sasaran yang akan dicapai pembangunan di bidang pendidikan meliputi: (1) meningkatnya akses dan pemerataan akses pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7-15 tahun yang ditandai dengan meningkatnya APM dan APK SD/MI/sederajat masing-masing menjadi 95,27 persen dan 117,15 persen; APK SMP/MTs/sederajat menjadi 99,26 persen; APS penduduk usia 7-12 tahun menjadi 98,42 persen; APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 90,69 persen; rasio APS penduduk usia 7-12 yang berasal dari 20 persen kelompok termiskin terhadap APS penduduk yang berasal dari 20 persen kelompok terkaya (Q1:Q5) menjadi 0,98; rasio Q1:Q5 APS penduduk usia 13-15 yang menjadi 0,85; terjaganya indeks paritas gender APS 7-12 dan APS 13-15 menjadi sekitar 1,0; (2) meningkatnya efisiensi internal pendidikan dasar yang ditandai dengan: menurunnya angka putus sekolah jenjang SD/MI menjadi 1,41 persen dan jenjang SMP/MTs menjadi 2,07 persen; menurunnya angka mengulang kelas jenjang SD/MI menjadi 2,61 persen dan jenjang SMP/MTs menjadi 0,38 persen; dan meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/sederajat ke SMP/MTs/sederajat menjadi 91,38 persen; (3) meningkatnya kualitas satuan pendidikan dasar yang ditandai dengan meningkatnya persentase SD/MI yang terakreditasi minimal B menjadi 55 persen dan persentase SMP/MTs menjadi 22 persen; (4) meningkatnya kualitas hasil belajar jenjang

pendidikan dasar yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional di tingkat SMP/MTs menjadi 7,05; (5) meningkatnya akses terhadap pendidikan menengah yang ditandai dengan meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat menjadi 71,3 persen; APS penduduk usia 16-18 tahun menjadi 79,28 persen; dan terjaganya indeks paritas gender APS 16-18 tahun menjadi sekitar 1,0; (6) meningkatnya efisiensi internal pendidikan menengah yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA menjadi 2,04 persen dan menurunnya angka mengulang kelas jenjang SMA/SMK/MA menjadi 0,42 persen; (7) meningkatnya kualitas SMA/SMK/MA yang ditandai dengan meningkatnya persentase SMA/SMK/MA/sedarajat yang berakreditasi minimal B menjadi 55 persen; (8) meningkatnya kualitas hasil belajar jenjang pendidikan menengah yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional di tingkat SMA/SMK/MA menjadi 7,75; (9) meningkatnya akses terhadap pendidikan tinggi yang ditandai dengan meningkatnya APK PT menjadi 19,40 persen dan terjaganya indeks paritas gender APK PT menjadi sekitar 1,0; (10) meningkatnya kualitas pendidikan tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya persentase satuan pendidikan tinggi terakreditasi menjadi 29,8%; meningkatnya jumlah dosen yang menenuhi kualifikasi akademik S2 dan S3, meningkatnya jumlah dosen yang melakukan publikasi, baik tingkat nasional dan juga internasional; (11) meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini yang ditandai dengan APK pendidikan anak usia dini mencapai 57,80%; (12) membaiknya tingkat keaksaraan penduduk yang ditandai dengan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 95,404% dan angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun mencapai 99,33%; (13) meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik.

Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan di bidang kesehatan meliputi: ((1) seluruh penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta di kelas III rumah sakit; (2) meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) 95 persen, kunjungan bayi 90 persen dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 90 persen; (3) tersedianya obat generik esensial (*buffer stock*), obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program, dan vaksin; (4) seluruh penduduk di daerah risiko tinggi malaria menggunakan kelambu; (5) seluruh desa mencapai *Universal Child Immunization* (UCI); (6) meningkatnya cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam 100 persen dan *Case detection rate (*CDR) diare pada saat KLB <1 persen; (7) seluruh penderita demam berdarah dengue (DBD), malaria dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) ditemukan dan diobati; (8) meningkatnya pengendalian TB melalui *Case Detection Rate* 90 persen dan pengobatan 88 persen; (9) meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan; (10) terselenggaranya pendidikan bagi tenaga pendidik, dokter spesialis, dan mitra dokter spesialis; (11) meningkatnya penduduk yang tercakup dalam berbagai skema jaminan kesehatan/asuransi dan tersedianya data NHA (*National Health Account*) untuk dukungan perencanaan; (12) meningkatnya jumlah kasus yang diselidiki di bidang obat dan makanan mencakup 510 kasus; dan (13) meningkatnya pengujian 97.000 sampel dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan 15.000 sarana.

Sementara itu dalam rangka **perbaikan gizi**, upaya yang akan dilakukan bertujuan untuk menurunkan prevalensi berbagai bentuk masalah gizi makro dan gizi mikro, dengan perhatian utama pada: (1) seluruh anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat makanan pendamping ASI; (2) meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet) 80 persen; (3) meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul Vitamin A 80 persen ; (4) meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup 80 persen ; (5) meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI 65 persen; (6) meningkatnya anak balita ditimbang berat badannya 80 persen; (7) seluruh Puskesmas menyelengarakan Pemantauan Status Gizi (PSG) keluarga sadar gizi; (8) seluruh Puskesmas

melaksanakan sistem kewaspadaan dini- kejadian luarbiasa (SKD KLB)-Gizi Buruk; dan (9) seluruh balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Pemantapan Revitalisasi Program KB. Sasaran yang akan dicapai pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana pada tahun 2010 antara lain: (1) terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta, yang 3,7 juta diantaranya adalah peserta KB baru miskin dan sekitar 254,5 ribu adalah peserta KB baru pria; (2) meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta, yang 11,9 juta diantara adalah peserta KB aktif miskin dan sekitar 659,5 ribu adalah peserta KB aktif pria; (3) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga akseptor tentang: pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB; pembinaan kualitas kehidupan keluarga lansia melalui kelompok BKL; dan usaha peningkatan pendapatan ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga; dan (4) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, keluarga, dan remaja tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dan perencanaan kehidupan berkeluarga melalui kelompok BKR dan PIK-KRR.

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan, yang antara lain diukur oleh IPG, maka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan pada tahun 2010 terus dilakukan dengan sasaran: (1) meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang antara lain ditunjukkan dengan menurunnya angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan; (2) meningkatnya akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum dan politik; (3) berkurangnya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan; dan (4) meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah.

Peningkatan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan perlindungan anak untuk tahun 2010 adalah: (1) berkurangnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak-hak anak dan tidak ramah anak; (2) terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang kuat; (3) meningkatnya akses terhadap perlindungan bagi anak dari berbagai tindak kekerasan; dan (4) meningkatnya akses terhadap layanan tumbuh-kembang anak, termasuk pengembangan anak sejak usia dini dan meningkatnya akses terhadap area bermain anak.

Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga. Masih terkait dengan peningkatan kualitas SDM, maka sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pemuda dan olahraga adalah: (1) terlaksananya keserasian kebijakan dan kerjasama internasional di bidang pemuda; (2) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda; (3) terlaksananya optimalisasi peran Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3); (4) terselenggaranya lomba, kejuaraan dan festival olahraga di 33 propinsi; (5) terlaksananya pembinaan olahragawan di pusat pelatihan daerah (pelatda) dan pusat pelatihan nasional (pelatnas), dan sentra-sentra olahraga unggulan daerah; (6) terbinanya 230 orang atlet andalan dalam program atlet lanjutan; (7) terlaksananya peningkatan mutu organisasi; (8) terlaksananya sertifikasi, akreditasi dan standarisasi tenaga keolahragaan; (9) terselenggaranya pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga yang berprestasi; dan (10) terlaksananya pemberian bantuan prasarana dan sarana olahraga bagi Provinsi/Kab/Kota.

Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama. Sasaran pembangunan di bidang agama adalah: (1) terlaksananya pertemuan dan kerja sama intern dan antarumat beragama; (2) terlaksananya penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi keluarga, masyarakat dan peserta didik di semua jalur, jenis

dan jenjang pendidikan; (3) terselenggaranya urusan agama dan kegiatan operasional KUA; (4) terselenggaranya pelayanan haji yang berkualitas, efisien dan transparan; dan (5) terselenggaranya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan pengelolaan dana sosial keagamaan.

Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa. Dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran, dan berakhlak mulia antara lain dilakukan melalui upaya pembangunan kebudayaan. Sasaran pembangunan di bidang kebudayaan meliputi: (1) terselenggaranya dialog kebudayaan dan kebangsaaan dalam rangka pembinaan karakter dan jatidiri bangsa; (2) terlaksananya pengembangan nilai budaya daerah di balai kajian sejarah dan nilai tradisional; (3) terlaksananya revitalisasi, temu karya, festival, pameran dan kompetisi seni dan film nasional dalam rangka peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan keragaman budaya; (4) terlaksananya sensor film/video/iklan; (5) terlaksananya penulisan dan pemetaaan sejarah, serta lawatan sejarah dan arung bahari; (6) terlaksananya penyelamatan dan pengelolaan kawasan peninggalan kepurbakalaan dan penanggulangan kasus pencurian/penyalahgunaan benda cagar budaya; (7) terlaksananya perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengadaan koleksi di galeri, museum dan museum daerah; dan (8) terlaksananya pengembangan kekayaan budaya daerah di balai pelestarian peninggalan purbakala.

C. Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2010, maka arah kebijakan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama diprioritaskan pada upaya:

(1) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui penyediakan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh anak usia 7-15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun, tanpa membedakan status sosial ekonomi orangtua;

(2) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi melalui penyediaan pelayanan pendidikan menengah yang lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyrakat, serta dapat memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki pasar kerja terutama bagi lulusan menengah kejuruan; dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen, penambahan daya tampung pada program-program studi prioritas di perguruan tinggi yang mendukung daya saing bangsa dan penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin melalui sistem seleksi yang akuntabel, serta peningkatan kualitas dan relevansi penelitian pendidikan tinggi;

(3) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal melalui perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan keaksaraan fungsional bagi kelompok usia dewasa (15 tahun ke atas) sekaligus memelihara kemampuan keaksaraan bagi penduduk usia di atas 25 tahun dan penyelenggaraan kursus serta pendidikan kecakapan hidup;

(4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, dan pelaksanaan sertifikasi pendidik serta penyediaan berbagai tunjangan guru;

(5) peningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini yang didukung dengan pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif sebagai upaya untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar;

1. penguatan tata kelola pelayanan pendidikan dan kerja sama pemerintah dan swasta (*public-private partnership*) dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan;

(6) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, melalui peningkatan kesehatan masyarakat; pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) desa siaga; pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan;

peningkatan pembiayaan jaminanan kesehatan, penanggulangan krisis; penelitian dan pengembangan kesehatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;

(7) percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat serta pengendalian penyakit, melalui pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita; penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan pemberantasan penyakit; pencegahan dan penanggulangan resiko; peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan wabah; peningkatan imunisasi; dan penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza;

(8) peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan, melalui peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; penyediaan dan pengelolaan obat dan vaksin; peningkatan sarana dan prasarana; pengujian sampel obat dan makanan; pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan; peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan; pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana; dan pengembangan pendidikan profesional dan keahlian;

(9) peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan, melalui pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya; dan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit;

(10) peningkatan status gizi masyarakat, melalui perbaikan status gizi masyarakat terutama ibu hamil, nifas, menyusui, bayi, dan balita; pemberdayaan masyarakat; memperkuat dan mengefektipkan lembaga masyarakat seperti PKK dan Posyandu;

(11) peningkatan efektifitas pelaksanaan berbagai peraturan dan perundangan pengawasan keamanan pangan dengan intensifikasi pendidikan dan penyuluhan kepada produsen, importir, distributor, pengecer dan konsumen, serta peningkatan tindakan hukum bagi pelanggar;

(12) peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pola hidup sehat, melalui penyebarluasan pola makan dengan prinsip gizi seimbang yang dievaluasi dampaknya pada perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat; dan intensifikasi pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat tentang kebersihan diri dan kebersihan lingkungan;

(13) peningkatan kualitas tenaga profesi gizi di berbagai tingkatan guna mendukung ketahanan pangan dan gizi;

(14) peningkatan kegiatan penelitian pangan dan gizi untuk meningkatkan jumlah dan mutu data dan informasi tentang pangan dan gizi, khususnya yang berkaitan dengan pola konsumsi pangan rumah tangga dan perorangan dari waktu ke waktu, perkembangan status gizi masyarakat, dan efektivitas program perbaikan gizi termasuk penyebarluasan pengetahuan tentang gizi seimbang dan pola hidup sehat;

(15) peningkatan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan dalan keadaan darurat dengan memperhatikan kebutuhan gizi bayi dan balita dengan memasukkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang difortifikasi sebagai komponen penting dari paket bantuan pangan;

(16) pemantapan revitalisasi program KB, melalui: peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) dan rentan lainnya, PUS mupar (muda dan paritas rendah), serta daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta daerah dengan unmet need KB tinggi; peningkatan promosi dan pelayanan metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP); peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi; peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas

kesehatan reproduksinya; peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga; pemberdayaan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif; pengoptimalisasian upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas; pembinaan kuantitas dan kualitas SDM terutama di tingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen Program KB Nasional; dan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi Program KB Nasional berbasis teknologi informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis;

(17) peningkatan akses dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan jabatan publik; pemastian hukum dan peraturan perundang-undangan tidak bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan; perkuatan kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah; dan peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan;

(18) peningkatan perlindungan anak melalui: penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak-hak anak menjadi peduli dan ramah anak; memperkuat kelembagaan perlindungan anak; peningkatan kepedulian serta partisipasi keluarga, masyarakat, dan dunia usaha terhadap anti kekerasan terhadap anak; dan peningkatan akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan forum partisipasi anak dalam pembangunan, serta penyediaan area bermain yang layak dan aman bagi anak;

(19) peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga melalui: peningkatan keserasian kebijakan kepemudaan; peningkatan pembinaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; peningkatan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga sesuai standarDalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk, revitalisasi Program KB Nasional akan difokuskan pada upaya;

(20) peningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama melalui akses komunikasi dan dialog intern dan antarumat beragama, internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultur, serta pengembangan jaringan dan kerjasama majelis agama dengan pemerintah; peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama terhadap keluarga, masyarakat, serta peserta didik; peningkatan kualitas pelayanan agama untuk penyelenggaraan urusan agama; peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji; mengoptimalkan pengelolaan dana sosial keagamaan; peningkatan kapasitas, kualitas dan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama; dan

(21) penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya nasional melalui: peningkatan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan penciptaan keserasian hubungan antarunit sosial dan budaya; peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, edukasi, dan rekreasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010
PRIORITAS BIDANG : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
FOKUS PRIORITAS BIDANG 1: PENDIDIKAN						
1.	0079	Pembangunan Laboratorium IPA	1.000 ruang	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	85,0
2.	0108	Penyediaan Peralatan Lab SMP	1.000 set	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	80,0
3.	2323	Melanjutkan Penyediaan BOS SD	27.673.587 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	11.002,6
4.	2323	Melanjutkan Penyediaan BOS SMP	9.916.573 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	5.664,2
5.	2323	Penyediaan BOS jenjang pendidikan dasar	6.794.516 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	3.307,8
6.	2336	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	99.754 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	59,9
7.	2573	Penyelenggaraan Paket A setara SD	90.000 orang	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	51,6
8.	8372	Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren	7.058 lembaga	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	15,0
9.	8372	Bantuan Penyelenggaraan Paket A/B Wajar Dikdas pada Pontren	928 lembaga	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	18,6
10.	2576	Penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD	1.796.800 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	684,6
11.	3470	Beasiswa untuk Siswa Miskin MI	640.000 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	230,4
12.	3488	Rehabilitasi Ruang Kelas MI	1.665 unit	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	127,8
13.	3488	Rehabilitasi Ruang Kelas MTs	5.850 unit	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	548,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
14.	2582	Pembangunan SD-SMP satu atap	250 lokasi	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	100,0
15.	2583	Pembangunan USB SMP	115 unit	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	177,0
16.	3387	Bantuan Pembangunan MTs melalui MEDP (ADB)	237 MTs	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	20,1
17.	3387	Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB)	205 MI	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	20,0
18.	2589	Penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP	751.193 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	413,1
19.	3471	Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs	540.000 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	388,8
20.	2590	Penerapan TIK Jenjang Pendidikan Dasar	1.000 paket	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	60,0
21.	2598	Penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) SD	4.737.194 siswa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	75,8
22.	2645	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	390.000 orang	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	530,8
23.	3385	Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI	160 lokasi	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	8,0
24.	3385	Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs	160 lokasi	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	9,6
25.	0106	Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran	460 kab/kota	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	13,8
26.	2318	Akreditasi Sekolah Jenjang TK/RA/SD/MI	10.000 Sekolah/Madrasah	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	19,4
27.	2593	Penyelenggaraan UN SMP (Termasuk Paket A dan B)	4.472.025 Siswa	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	134,2
28.	3396	Akreditasi Sekolah Jenjang SMP	2.500 Sekolah/Madrasah	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	6,3
29.	2318	Akreditasi SLB	150 SLB	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	0,4
30.	2359	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium dan Workshop SMK	483 Paket	Pendidikan Menengah	Depdiknas	20,29

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
31.	2585	Beasiswa untuk siswa miskin SMA	248.124 Siswa	Pendidikan Menengah	Depdiknas	193,5
32.	2585	Beasiswa untuk siswa miskin SMK	200.000 Siswa	Pendidikan Menengah	Depdiknas	160,6
33.	3388	Beasiswa untuk Siswa Miskin MA	320.000 Siswa	Pendidikan Menengah	Depag	243,2
34.	2586	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA	400 Ruang	Pendidikan Menengah	Depdiknas	20,0
35.	8356	Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional	3 unit	Pendidikan Menengah	Depag	105,0
36.	3393	Rehabilitasi Ruang Kelas MA	1.921 Ruang	Pendidikan Menengah	Depag	154,6
37.	2594	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA	2.100.000 Siswa	Pendidikan Menengah	Depdiknas	189,0
38.	2595	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK	3.800.000 Siswa	Pendidikan Menengah	Depdiknas	201,4
39.	3390	Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah	150 Lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	12,0
40.	8381	Kontrak Prestasi Madrasah	48 Lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	19,2
41.	3400	Pembangunan USB SMA	10 sekolah	Pendidikan Menengah	Depdiknas	10,0
42.	3400	Pembangunan USB SMK (dan lanjutan)	140 sekolah	Pendidikan Menengah	Depdiknas	126,0
43.	3400	Pembangunan MA melalui MEDP (ADB)	243 unit	Pendidikan Menengah	Depag	97,2
44.	3400	Pembangunan RKB SMA	500 ruang	Pendidikan Menengah	Depdiknas	50,0
45.	3400	Pembangunan RKB SMK	2.050 ruang	Pendidikan Menengah	Depdiknas	205,0
46.	3400	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium dan Workshop SMA	300 SMA	Pendidikan Menengah	Depdiknas	45,0
47.	3449	Bantuan Pengembangan Pendidikan Ketrampilan Madrasah Aliyah	58 Lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	2,9
48.		Pengembangan SMK Model (INVEST)	30 Sekolah	Pendidikan Menengah	Depdiknas	150,0
49.	0047	Pengembangan MAN Insan Cendekia	2 Lokasi	Pendidikan Menengah	Depag	24,0
50.	2593	Penyelenggaraan UN Jenjang Pendidikan Menengah (Termasuk Paket C)	2.965.620 Siswa	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	89,0
51.	3396	Akreditasi Sekolah jenjang pendidikan Menengah	2.000 Sekolah/Madrasah	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	5,5
52.	2318	Dana BAS Provinsi	33 prov	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	10,7
53.	2318	Akreditasi PT	1.000 Prodi	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	26,7
54.	2558,2559 ,2560	Pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi (yang menghasilkan Patent, Jurnal Internasional, Teknologi Tepat Guna, Rekayasa Sosial, Kebijakan Publik,	420 Judul	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Depdiknas	99,96

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
		Metodologi, Karya Seni dan Buku Ajar)				
55.	2385	Pengembangan bidang keilmuan (Rumah Sakit Pendidikan) PTN	9 PTN	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	90,0
56.	2602/ '2385	Penyediaan Beasiswa Untuk Mahasiswa Miskin dan Peningkatan Prestasi Akademik, Serta Bantuan Belajar dan Daerah Konflik dan Bencana	100.000 MHS	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	360,0
57.	3425	Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin	65.000 Orang	Pendidikan Tinggi	Depag	78,0
58.	3473	Bantuan Beasiswa S1 Santri Berprestasi	1.635 Orang	Pendidikan Tinggi	Depag	49,0
59.	2641	Pembangunan gedung , peralatan dan lab baru PT	150.000 m^2	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	750,0
60.	3417	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	68 Lembaga	Pendidikan Tinggi	Depag	467,0
61.	8375	Pengembangan Perpustakaan	11 Unit	Pendidikan Tinggi	Depag	4,1
62.	3422	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB	IAIN Ar-Raniry (pengalihan BRR-NAD) 1 Lembaga	Pendidikan Tinggi	Depag	95,0
63.	3422	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB dan JBIC (PHLN)	3 Lembaga	Pendidikan Tinggi	Depag	206,9
64.	2559	Pengembangan Pengabdian Masyarakat	101 Lembaga	Pendidikan Tinggi	Depag	15,2
65.	8378	Peningkatan Mutu Penelitian	490 Orang	Pendidikan Tinggi	Depag	5,9
66.	2588	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C)	30.000 Orang	Pendidikan Non Formal	Depdiknas	42,9
67.	3409	Penyelenggaraan Kursus dan Magang	100.000 Orang	Pendidikan Non Formal	Depdiknas	180,0
68.	3472	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional	650.000 Orang	Pendidikan Non Formal	Depdiknas	276,9
69.	2587	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembangunan Lembaga Paud dan Penyediaan Bahan Ajar dan Alat Permainan Edukasi	411.840 Anak	Pendidikan Anak Usia Dini	Depdiknas	411,8
70.	2304	Perluasan akses dan mutu TK (subsidi TK-SD satu atap)	500 TK	Pendidikan Anak Usia Dini	Depdiknas	50,0
71.	2318	Akreditasi PNF	500 Lembaga/Prog	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Depdiknas	2,1
72.	2417	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah	500 Lembaga	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Depdiknas	12,5
73.	8358	Bantuan Penyelenggaraan Life Skill dan Short Course	100 lembaga	Pendidikan Non Formal	Depag	10,0
74.	8390	Bantuan Penyelenggaraan Paket C	300 lokasi	Pendidikan Non Formal	Depag	15,0
75.	0055	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan	Fasilitas penunjang layanan Perpustakaan di 2 UPT;	Pengembangan Budaya	Perpusnas	1,3

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
		Operasional		Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
76.	0116	Pembinaan/Pengembangan/Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan	Penguatan layanan dan jaringan kerjasama di 250 unit Perpustakaan Umum.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpusnas	19,3
77.	2416	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	3 jenis media promosi dan 3 jenis sosialisasi Minat dan Kegemaran Membaca	Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan	Perpusnas	2,5
78.	5702	Penyediaan Fasilitas, Koleksi dan Layanan Perpustakaan	1 perangkat e-library untuk 32 provinsi dan peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan; serta pengadan 25.000 eks bahan bacaan.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpusnas	121,1
79.	5703	Bantuan Fasilitasi Perpustakaan Keliling Kepada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	43 unit perpustakaan keliling/terapung di 40 kab/kota	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpusnas	14,8
80.	5706	Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan dan Informasi	Pelayanan perpustakaan dan informasi di perpusnas dan 2 UPT (Blitar dan Bukittinggi); 20 naskah (10 naskah literatur sekunder untuk perpusnas dan 10 naskah di 2 UPT); pemasyarakatan perpustakaan, dan penyusunan dan evaluasi program 10 naskah.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpusnas	12,3
81.	5714	Supervisi/pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum/Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	Bintek, sosialisasi, monev, lomba minat baca, dan koordinasi serta pengadaan 2 juta eksemplar untuk 2.000 desa di 32 provinsi.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpusnas	70,0
82.	2574	Peningkatan Mutu dan Profesionalisme guru	62.000 Orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	175,3
83.	2575	Percepatan Sertifikasi Akademik Bagi Guru dalam Jabatan melalui Sistem Portofolio	150.000 Orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	311,8
84.	2575	Percepatan Sertifikasi Guru	90.000 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	180,0
85.	3575	Percepatan Sertifikasi Dosen	2.000 Dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	4,0
86.	2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi	200.000 Orang	Peningkatan Mutu	Depdiknas	400,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
		Pendidik Pendidikan Dasar		Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
87.	2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Pendidikan Menengah	10.234 Orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	20,5
88.	2574	Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 (Lanjutan)	9.000 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	54,0
89.	3574	Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Lanjutan)	2.000 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	62,0
90.	2574	Peningkatan Kompetensi Dosen (short corse)	100 dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	10,0
91.	2574	Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3	800 dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	8,0
92.	2386,2604	Peningkatan kualifikasi akademik dosen PT (DN)	7.480 Dosen	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	187,0
93.	2386	Peningkatan kualifikasi akademik dosen PT (LN)	1.000 Orang	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	300,0
94.	2570	Subsidi Tunjangan fungsional guru Non PNS Jenjang Pendidikan Dasar	348.357 Orang	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	836,1
95.	2571	Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Dasar dan Menengah	217.947 Orang	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah	Depdiknas	4.350,0
96.	2570	Subsidi Tunjangan fungsional guru Non PNS Jenjang Pendidikan Menengah	129.643 Orang	Pendidikan Menengah	Depdiknas	311,1
97.	2600	Tunjangan khusus	20.000 Orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	324,0
98.	3477	Tunjangan khusus Guru	3.500 Guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	56,7
99.	3475	Subsidi Tunjangan fungsional guru Non PNS	501.831 Guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	1.505,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
100.	2603	Tunjangan Profesi Dosen non-PNS	400 dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	7,2
101.	8383	Beasiswa S2 dan S3 Tenaga Pendidikan	100 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	3,2
102.	2574	Pengambangan Mutu Tenaga Pendidik	22.000 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	48,4
103.	3478	Tunjangan Profesi Guru Non PNS	104.079 Guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	2.497,9
104.	0001	Tunjangan profesi dosen	8.750 Dosen	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	262,5
105.	xxxx	Tunjangan guru besar	4.300	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	258,0
106.	3479	Beasiswa Guru Program S1	1.500 Guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	27,0
107.	8382	Beasiswa Dosen Program S2	600 Dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	18,6
108.	8383	Beasiswa Dosen Program S3	450 Dosen	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depag	15,8
109.	2599	Peningkatan Jardiknas (Setjen)	38.181 Titik	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Depdiknas	190,9
FOKUS PRIORITAS BIDANG 2: KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI						
1.	2803	Pengembangan wilayah sehat	Cakupan kab/kota/kawasan yang masyarakatnya dengan fasilitasi pemerintah menyelenggarakan kab/kota/kawasan sehat 50%	Lingkungan Sehat	Depkes	10,0
2.	2804, 2871, 2872, 2873	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	1. Persentase kualitas air bersih yang memenuhi syarat bakteriologis: mencapai 84% 2. Persentase Rumah tangga yang akses terhadap air bersih di perkotaan dan perdesaan: mencapai 62% 3. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban	Lingkungan Sehat	Depkes	227,4

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			yang memenuhi syarat kesehatan: mencapai 68% Terselenggaranya STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada 3.000 desa			
3.	2805, 2886	Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan	1. Persentase sekolah yang memenuhi syarat kesehatan: mencapai 80% 2. Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan: mencapai 75,3 % 3. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan: mencapai 80% 4. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan: mencapai 75%	Lingkungan Sehat	Depkes	20,0
4.	2806, 2891	Pengendalian dampak pencemaran lingkungan	Persentase perencanaan program /proyek pembangunan mempunyai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang memenuhi kriteria Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan: mencapai 70%	Lingkungan Sehat	Depkes	10,0
5.	2855, 2876, 2877, 2878	Pelayanan dukungan administrasi dan manajemen	Terlaksananya dukungan manajemen dan administrasi program lingkungan sehat	Lingkungan Sehat	Depkes	100,0
6.	2815	Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	1. Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di 330 RS/BLK 2. Tersedianya RS Pemerintah standar kelas dunia (*world class*) 1 RS 3. Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di 34 UPT vertikal & kantor pusat	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	250,8
7.	2813	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	1. Persentase RS yang terakreditasi 100% 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK 100% 3. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) 60% 4. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan pelayanan	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	175,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			darah aman 100% 5. Persentase RSU Pemerintah di daerah endemis EID (*Emerging Infectious Diseases*: DBD,TB) dapat melakukan pelayanan wabah/KLB EID (DBD, TB) sesuai pedoman penatalaksanaan EID 100% di RS 6. Persentase RS kab/kota yang menerapkan SPM RS 100% 7. Persentase RS yang mengembangkan pelayanan Geriatri 20% 8. Persentase Labkes (BLK) yang terakreditasi 100% 9. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan kadar sesuai standar 100%			
8.	2814	Operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan medik	Persentase RS bergerak di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 6 % (14 RS)	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	30,0
9.	2838	Penanggulangan flu burung	Seluruh penderita flu burung dapat tertangani di rumah sakit	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	5,0
10.	2861, 2906	Pelayanan operasional rumah sakit	Terpenuhinya biaya operasional 34 RS/4 BBLK	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	3,248
11.	2817	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) desa siaga	Cakupan desa siaga aktif 80%	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Depkes	86,0
12.	2816	Pengembangan promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi	1. Tersedianya media promosi kesehatan di 20% sekolah dasar 2. Tersedianya media promosi kesehatan di 20% Puskesmas 3. Tersedianya media promosi kesehatan di 20% Rumah Sakit Umum	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Depkes	18,2
13.	2818	Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat	Tersedianya 4 jenis media promosi kesehatan untuk mendukung kegiatan imunisasi, gizi dan KIA di 15 provinsi prioritas	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Depkes	13,0
14.	2821	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan dasar di 8.133 Puskesmas dan jaringannya 2. Terselenggaranya upaya kesehatan di 70.000	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	640,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			Poskesdes 3. Tersedianya dukungan pelayanan kesehatan dasar dalam mendukung Inpres di Papua, Sulteng dan Kalteng 4. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar pada 160 Puskesmas percontohan dan operasionalnya selama 1 tahun 5. Pembanguan Poskestern/pos panti di 400 pondok pesantren/panti asuhan 6. Terselenggaranya Pengembangan pelayanan Kesehatan di 8 UPT Kesmas			
15.	2834	Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan	1. Perhitungan NHA 2. Pengadaan alat olah data 600 paket 3. Operasional Jamkesmas	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Depkes	180,0
16.	2836	Penanggulangan krisis	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan krisis secara tepat dan cepat di daerah bencana	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Depkes	120,0
17.	0016	Penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi	Pengelolaan data secara terpadu mencapai 35%	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Depkes	50,0
18.	0020	Penyusunan, pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi	1. 100% dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran telah teregistrasi 2. 80% Institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi telah menerapkan standar nasional pendidikan profesi 3. 60% Institusi pendidikan dokter dan dokter gigi telah dilakukan pembinaan dan penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik 4. 25% tertanganinya kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi 5. 100% Penyusunan kegiatan terpadu, serta pengembangan peningkatan SDM ICT	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Depkes	40,0
19.	0032	Pembinaan hukum dan organisasi	1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan 2 RUU, 4 RPP, 2 Kepres, 30 Kepmen, dan 1 kajian	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Depkes	20,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			2. Terbinanya organisasi dan tatalaksana ditingkat pusat (Depkes dan 10 UPT Vertikal serta Daerah 10 UPTD)			
20.	0033	Penyelenggaraan/Pembinaan informasi publik	1. Jumlah berita/pesan/info kesehatan yang tersedia atau disebarluaskan melalui media massa bagi publik sebanyak 435 publikasi 2. Persentase opini publik atau pemberitaan di media massa yang positif/netral terhadap Depkes (80%)	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Depkes	50,0
21.	0035	Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran	Tersedianya 830 dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Depkes	261,2
22.	2905	Pemeliharaan, peningkatan, dan penanggulangan intelegensia kesehatan	Pemeliharaan, peningkatan intelegensia masyarakat 5% dan penanggulangan masalah intelegansia masyarakat 5%	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Depkes	10,5
23.	2870	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terlaksananya 3 kegiatan survei Riskesdas dan 130 riset pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Depkes	80,0
24.	0058	Peningkatan/pemanfaatan/penerapan produk litbang	Pemanfaatan hasil analisis Riskesdas Biomedis Tingkat Nasional, 7 publikasi ilmiah nasional dan internasional dan 4 *policy option* dari hasil penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Depkes	24,0
25.	0024	Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana litbang	Meningkatnya sarana dan prasarana litbang di pusat dan daerah	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Depkes	40,0
26.	2846, 2847	Peningkatan kesehatan ibu dan anak;	1. Terselenggaranya persalinan yang aman sesuai standar oleh tenaga kesehatan bagi 87,5% ibu hamil 2. Terselenggaranya penanganan komplikasi Persalinan termasuk Neonatus 87,5 %	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	200,0
27.	2902	Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita	1. Terselenggaranya pemberian MP-ASI pada anak usia 6 – 24 bulan 100% keluarga miskin 2. Teselenggaranya respon cepat kejadiaan luar biasa gizi buruk pada sasaran 40.000 balita gizi buruk	Perbaikan Gizi Masyarakat	Depkes	191,5
28.	2828	Peningkatan pendidikan gizi masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Kadarzi di 467 Kabupaten	Perbaikan Gizi Masyarakat	Depkes	4,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
29.	2829	Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pelayanan di 269.000 Posyandu	Perbaikan Gizi Masyarakat	Depkes	96,8
30.	2823	Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko	1. Jumlah darah donor yang diskrining dari penyakit menular umumnya dan HIV/AIDS pada khususnya mencapai 100% 2. Data dan informasi faktor risiko lingkungan penyebab terjadinya penyakit untuk SKD di provinsi daerah binaan BTKL-PPM mencapai 100% 3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian faktor risiko PTM mencapai 10% 4. Pengendalian faktor risiko penyakit zoonosa (a.l Rabies, Schistosomiasis, Anthrax, Pes) mencapai 100% 5. Pemeriksaan dan pembinaan calon jemaah haji mencapai 100% 6. Persentase pengendalian terhadap kejadian PHEIC (*Public Health Emergency International Concern*) mencapai 100% 7. Persentase faktor risiko lingkungan penyebab terjadinya penyakit yang teridentifikasi di daerah binaan mencapai 100% 8. Persentase kegiatan *Rapid Health Assessment* di setiap pasca bencana dan situasi matra sebesar 100%	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	82,0
31.	2825	Peningkatan *Surveillance* Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam mencapai 100% 2. *Case Fatality Rate* (CFR) Diare pada saat KLB mencapai <1 % 3. Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate ≥2 per 100.000 anak usia mencapai <15 tahun	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	16,0
32.	2826	Penemuan dan tatalaksana penderita	1. Persentase penderita Malaria yang ditangani mencapai 100 2. Kab/Kota yang melaksanakan pengobatan massal Filariasis mencapai 44% 3. Pengendalian 234.600 penderita TB Baru berdasarkan	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	47,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			strategi *Direct Observe Treatment Shortcourse* (DOTS) (insidens rate 102 per 100.000 penduduk) 4. Cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia balita mencapai –100% 5. Cakupan pengobatan cacingan anak SD mencapai 75% 6. Angka penemuan penemuan penderita baru Kusta mencapai <5%			
33.	2904	Pencegahan dan pemberantasan penyakit	1. Terselenggaranya imunisasi dasar untuk 6,9 juta bayi (usia 0-12 bulan) 2. Terlindunginya 2,3 juta penduduk berisiko tinggi tertular Malaria (insidens rate 10 per 1.000 penduduk) 3. Tertanganinya 138 ribu penduduk penderita DBD (insidens rate 60 per 100.000 penduduk) 4. Tertanganinya 100% penderita HIV/AIDS (16.110 ODHA dan 6.015 penderita HIV) 5. *Cure Rate* 100% kasus TB baru berdasarkan strategi *Direct Observe Treatment Shortcourse*/DOTS mencapai100% (insidens rate 102 per 100.000 penduduk)	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	425,0
34.	2827	Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit.	Terlaksananya KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit mencapai 100%	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	6,0
35.	2824	Peningkatan cakupan imunisasi	1. Persentase desa yg mencapai UCI sebesar 100% 2. Proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak mencapai 90% 3. Proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi DPT3 mencapai 90%	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	40,0
36.	2837	Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza	1. Jumlah kasus avian influenza (AI) yang ditangani 100% 2. Persentase Prov/Kab/Kota yang mempuntai contingency plan penanggulangan pandemi influenza mencapai 100% (12 Prov, 29 Kab/Kota) 3. Persentase Tim Gerak Cepat di setiap Provinsi/Kab/Kota yang mempunyai risiko tinggi	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Depkes	30,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			terhadap Avian Influenza pada manusia mencapai 100% (12 Prov, 29 Kab/Kota)			
37.	2807	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;	1. Persentase Ketersediaan Obat Essensial Generik dan Perbekalan Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar 100 % 2. Persentase kabupaten/kota yang memiliki total alokasi anggaran obat disarana pelayanan pemerintah (pusat dan daerah) Rp. 18.000/kapita/tahun 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	21,9
38.	2907	Penyediaan dan pengelolaan obat dan vaksin	Terpenuhinya kebutuhan obat generik esensial (*Bufferstock*), obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program, dan vaksin termasuk pengelolaannya di sarana pelayanan kesehatan 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	600,0
39.	0003	Pelayanan publik atau birokrasi (vaksin)	Terpenuhinya kebutuhan vaksin reguler 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	430,7
40.	2808	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	1. Persentase peresepan obat generik (INN) di RSU di Provinsi 100 % 2. Persentase peresepan dengan antibiotik pada diare non spesifik dan ISPA non Pneumonia di Puskesmas 3. Persentase peresepan dengan suntikan pada myalgia di Puskesmas 4. Persentase RS Provinsi yang mengadopsi DOEN dalam Formularium di Rumah Sakit 100% 5. Persentase Provinsi yang telah swamedikasi untuk masyarakat 6. Jumlah provinsi yang melaksanakan penggerakan POR di RSUD Provinsi	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	9,9
41.	2810	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	22. Persentase puskesmas memiliki tenaga apoteker 15% 23. Persentase cakupan Pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek 50% 24. Persentase cakupan Pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di RS Pemerintah 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	7,6
42.	2811	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	1. Persentase Alat Kesehatan dan PKRT yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat 100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Depkes	7,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			2. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang melaksanakan Cara produksi yang Baik 100% 3. Persentase iklan alat kesehatan dan PKRT sesuai Persyaratan dan tidak menyesatkan 100%			
43.	6051	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Kosmetika, Produk Komplemen, Makanan dan PKRT	Pengujian terhadap 97.000 sampel obat dan makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	40,0
44.	6052	Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Kosmetika, Produk Komplemen, Makanan dan PKRT	Pemeriksaan terhadap 15.000 sarana distribusi dan produksi obat dan makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	30,0
45.	6057	Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	Penyidikan terhadap 510 kasus hukum bidang obat dan makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	10,0
46.	0024, 0111	Peningkatan Sarana dan Prasarana (BPOM)	Tersedianya 33 paket peralatan laboratorium dan 16 sarana fisik gedung	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	166,7
47.	6053	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif/Rokok, dan Bahan Berbahaya	1.650 sarana	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	3,0
48.	6054	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan	6.000 sarana dalam rangka surveilan keamanan dan mutu makanan diperiksa	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	4,5
49.	6055	Penyusunan standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan	64 pedoman/standar obat dan makanan yang dikaji dan disusun	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	9,5
50.	6056	Penilaian Permohonan Pendaftaran Produk Obat, Kosmetika, Produk Komplemen dan Makanan	31.000 berkas pendaftaran produk obat dan makanan yang dinilai	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	11,0
51.	0077	Pengembangan kapasitas/kualitas SDM	53 unit ditingkatkan kapasitas manajemennya	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	40,0
52.	6059	Stimulasi Eksplorasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Penelitian Teknologi Produksi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	Jumlah pengembangan dan penelitian tanaman obat bahan alam Indonesia sebanyak 37 paket	Pengembangan Obat Asli Indonesia	BPOM	3,5
53.	2831	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana	1. Pelatihan bagi 40.000 SDM Kesehatan 2. Pendayagunaan 1.200 tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan, tugas belajar 3. 1000 orang tenaga kesehatan bersertifikat kompeten 4. Tugas belajar bagi 2.000 SDM Kesehatan 5. Tersusunnya 30 paket dokumen norma, standar, pedoman, dan kebijakan (NSPK) PPSDM Kes 6. Tersedia dan terkirimnya 500 TKKI yang kompeten	Sumber Daya Kesehatan	Depkes	470,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			ke LN 7. Tersusunnya dokumen perencanaan SDM Kesehatan di 50 Kab/Kota 25. 8. Peningkatan sarana dan prasarana di institusi pendidikan dan pelatihan			
54.	0048	Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian	1. Pendidikan bagi 45.000 bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya pada lembaga pendidikan tenaga kesehatan pemerintah; 2. Terselenggaranya 1.200 orang internship dokter; 3. Terselenggaranya tugas belajar bagi dokter/dokter gigi pada program spesialis, mitra spesialis, tenaga pendidik dan SDM Kesehatan sebanyak 6.530 orang; 4. Pendayagunaan 700 residen senior; 5. Terselenggaranya pelatihan bagi 750 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kesehatan; 6. Peningkatan jumlah, jenis kualitas, sarana dan prasarana di 33 Poltekkes; 7. Terlaksananya 500 riset bagi tenaga pendidik.	Pendidikan Tinggi 26.	Depkes	1.300,0
55.	2812	Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit	Persentase RS yang melayani pasien maskin peserta program Jamkesmas 100%	27. Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	4.584,0
56.	2819	Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Penduduk di Puskesmas dan jaringannya	1. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan dasar di seluruh Puskesmas dan Jaringannya khususnya bagi seluruh masyarakat miskin 2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat di 101 Puskesmas Prioritas di daerah perbatasan dan Pulau-pulau terluar	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	1.000,0
FOKUS PRIORITAS BIDANG 3: KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA						
1.	0024	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	Perluasan aplikasi sistem informasi program KB berbasis IT yang terintegrasi di pusat dan 33 provinsi.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	BKKBN	15,3
2.	6365	Intensifikasi Advokasi dan KIE KB Nasional	Terlaksananya advokasi dan KIE Program KB Nasional melalui media massa dan media luar ruang di seluruh tingkatan wilayah; Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam promosi dan KIE Program KB nasional; Pengembangan metoda dan bahan advokasi dan KIE Program KB di pusat, 33 prov, 495 kab/kota	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	BKKBN	75,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
3.	6367	Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya keluarga balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB menjadi sekitar 2,6 juta; Meningkatnya keluarga remaja yang aktif mengikuti kegiatan kelompok BKR menjadi sekitar 1,3 juta; Meningkatnya keluarga lansia yang aktif mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga lansia (BKL) menjadi sekitar 1,2 juta keluarga; Meningkatnya akses terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif dan pemantapan kesertaan ber-KB bagi 1,4 juta keluarga miskin (keluarga Pra-KS dan KS-I).	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	BKKBN	50,0
4.	6366	Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya ketersediaan dan kemampuan tenaga pengelola program KB melalui program ketahanan dan pemberdayaan keluarga di 4.040 kecamatan	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	BKKBN	0,6
5.	6368	Peningkatan Akses Informasi, Pembinaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya akses informasi program KB melalui program ketahanan dan pemberdayaan keluarga di 33 provinsi	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	BKKBN	1,0
6.	6369	Jaminan Pelayanan KB Berkualitas Bagi Rakyat Miskin.	2. Tersedianya alat dan obat KB gratis bagi sekitar 3,7 juta PB miskin (Keluarga Pra-KS dan Klg S-1) dan 11,9 juta PA miskin dengan rincian : a. Tersedianya IUD bagi 572,9 ribu PB miskin, pelayanan MOP bagi 12,2 ribu PB miskin, dan MOW bagi 26,9 ribu PB miskin, implant bagi 199,6 ribu PB miskin, suntikan bagi 1,4 juta PB miskin, pil bagi 1,3 juta PB miskin, dan kondom bagi 103,4 ribu PB miskin b. Tersedianya IUD bagi 899,2 ribu PA miskin, MOP bagi 101,7 ribu PA miskin, MOW bagi 484,1 ribu PA miskin, implant bagi 895,4 ribu PA miskin suntikan bagi 5,8 juta PA miskin, pil bagi 3,4 juta PA miskin, dan kondom bagi 204,5 ribu PA miskin 3. Peningkatan akses pelayanan KB di daerah Galciltas di 199 kab/kota 4. Terselenggaranya ayoman pasca pelayanan KB bagi	Keluarga Berencana	BKKBN	527,3

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			sekitar 280 ribu kasus 5. Meningkatnya penggunaan alat KB jangka panjang (MOP, MOW, IUD, Implant) menjadi bagi sekitar 852,0 ribu peserta KB Baru dan sekitar 6,5 juta peserta KB Aktif. *Catatan :* Pengadaan alokon direncanakan PB miskin dan PA miskin sampai dengan Juni 2011.			
7.	6370	Pembentukan, Pengembangan, Pengelolaan, dan Pelayanan PIK-KRR	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas PIK-KRR di tingkat kecamatan menjadi sekitar 8.145 kelompok 2. Pengembangan pusat rujukan (*center of excellent*) PIK-KRR di 33 provinsi	Kesehatan Reproduksi Remaja	BKKBN	25,0
8.	6359	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terselenggaranya advokasi dan KIE KRR di 33 provinsi dan 495 kab/kota	Kesehatan Reproduksi Remaja	BKKBN	7,4
9.	6360	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam kagiatan KRR	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan KRR di 33 provinsi dan 495 kab/kota	Kesehatan Reproduksi Remaja	BKKBN	2,4
10.	6371	Pendataan Keluarga dan Individu dalam Keluarga	Seluruh desa/kelurahan (sekitar 75.700 desa/ kelurahan) menggunakan hasil pendataan keluarga sebagai basis/dasar untuk pembinaan pengelolaan operasional program KB lini lapangan; Terselenggarannya sistem informasi dan monitoring manajemen Program KB Nasional di pusat, 33 provinsi, dan 495 kab/kota	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	BKKBN	50,0
11.	6372	Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat	1. Terselenggaranya pembinaan operasional lini lapangan bagi sekitar 24.765 penggerak KB di desa; 2. Terselenggaranya advokasi dan KIE program KB Nasional melalui forum kerjasama LSM dan swasta di pusat, 33 Provinsi, dan 495 kab/kota 3. Pengembangan jaringan komunikasi dan Penyediaan Data Informasi program KB Nasional	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	BKKBN	38,6
12.	6362	Pengembangan Jaringan dan Peningkatan KIE-Advokasi Program KB Nasional	Terbentuknya jaringan program KB nasional dalam rangka peningkatan KIE dan advokasi program KB di lini lapangan	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	BKKBN	1,7
13.	6363	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data dan Informasi program KB Nasional	Terbentuknya jaringan komunikasi dalam rangka penyediaan data dan informasi program KB nasional di	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	BKKBN	3,4

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			495 kab/kota			
14.	6373	Peningkatan Jejaring Pelayanan KB Pemerintah dan Swasta/Non-Pemerintah	1. Terlaksananya pembinaan pelayanan KB di sekitar 23.500 klinik KB Pemerintah dan Swasta 2. Terlaksananya pembinaan peserta KB melalui tempat pelayanan KB swasta lainnya (Apotek, Dokter, & Bidan) di sekitar 70 ribu tempat pelayanan	Keluarga Berencana	BKKBN	35,0
15.	6374	Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola Program KB	Meningkatnya kompetensi 27.000 petugas lapangan,pengelola, dan pelaksana program KB melalui pendidikan, pelatihan, dan orientasi program; dan Terlaksananya pendidikan jangka panjang/ pendek bagi 550 orang	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKKBN	75,8
16.	6325	Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Program KB Naisonal	Terlaksananya mini survei di 495 kab/kota dan Survei Indikator RPJMN di 33 provinsi serta pengembangan indikator program	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKKBN	8,9
17.	0625	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya SIAK on-line dan penerapan KTP Tunggal berbasis NIK di 33 Provinsi, sebagai tahap pertama	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Depdagri	440,0
18.	0839	Penyempurnaan Sistem Koneksi (interface) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi yang terkait	Terwujudnya SIAK on-line dan penerapan KTP Tunggal berbasis NIK di 33 Provinsi, sebagai tahap pertama	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Depdagri	20,0
19.	0838	Penyempurnaan dan Pengembangan berbagai Kebijakan Bidang Kependudukan	Terwujudnya penyempurnaan dan pengembangan kebijakan kependudukan sebanyak 4 buah	Program keserasian Kebijakan kependudukan	Depdagri	1,7
20.	0619	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan melalui penyerasian pelaksanaan kebijakan kependudukan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kependudukan melelui penyerasian pelaksanaan kebijakan kependudukan	Program keserasian Kebijakan kependudukan	Depdagri	5,0
FOKUS PRIORITAS BIDANG 4: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	5262	Peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KHPP)	1. Terlaksananya advokasi dan KIE peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (PKHPP) di tingkat pusat, 10 provinsi, dan 65 kabupaten/kota; dan 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan di 33 provinsi, melalui pelatihan pengembangan program kerja dan pendanaan, serta penyusunan strategi penguatan jaringan kerja.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	9,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
2.	5263	Penyusunan kebijakan KHPP	1. Tersusunnya kebijakan nasional tentang peningkatan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol perempuan dalam mendukung penanggulangan penyakit menular, pemenuhan hak reproduksi, peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, dan partisipasi perempuan di badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif; 2. Terfasilitasinya penyusunan kebijakan perlindungan perempuan di 10 provinsi, termasuk pekerja migran perempuan, penghapusan KDRT, penanganan perdagangan orang, dan perempuan dengan kebutuhan khusus (lansia, cacat, wilayah konflik, dan eksploitasi media) 3. Terfasilitasinya pengembangan model di daerah untuk perlindungan perempuan dari kekerasan dan perempuan dengan kebutuhan khusus.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	9,5
3.	5264	Koordinasi pelaksanaan kebijakan KHPP	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan KHPP di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	3,3
4.	5251	Penyusunan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA)	Tersusunnya: 1. Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanganan perlindungan anak terhadap kekerasan; 2. Pedoman penyusunan perda kesejahteraan perlindungan anak untuk Kota Layak Anak; 3. Strategi advokasi pengembangan anak usia dini; dan 4. Kebijakan perlindungan pekerja rumah tangga anak.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1,4
5.	5265	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)	Terlaksananya pengawasan perlindungan anak di 33 provinsi, terutama perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum, anak dalam situasi darurat, dan perlindungan terhadap kekerasan di rumah tangga.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	3,3
6.	5266	Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA)	1. Terlaksananya advokasi dan KIE hak-hak dan perlindungan anak di 15 provinsi dan 60	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Kementerian Negara	6,7

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			kabupaten/kota. 2. Terlaksananya advokasi dan KIE pengembangan anak usia dini di 10 provinsi dan 90 kabupaten/kota. 3. Terfasilitasinya pembentukan PPT PTPPO di 10 provinsi dan 30 kabupaten/kota. 4. Meningkatnya kelembagaan perlindungan anak di tingkat nasional. 5. Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja dan jaringan untuk perlindungan anak di 33 provinsi dan 150 kabupaten/kota. 6. Terlaksananya pelatihan bagi kelembagaan yang menangani anak di 33 provinsi dan 165 kabupaten/kota. 7. Tersusunnya pedoman pemantauan dan evaluasi untuk perlindungan anak.		Pemberdayaan Perempuan	
7.	5252	Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak (KPAI)	1. Terlaksananya pelatihan bagi lembaga pengawas perlindungan anak di 5 provinsi dan 150 kabupaten/kota, mengenai teknik *assesment*, pengumpulan data terpilah, analisis data dan informasi, dan penyusunan laporan; 2. Tersusunnya mekanisme pemberian sanksi bagi lembaga pelaksana perlindungan anak terhadap pelanggaran pelaksanaan perlindungan anak; dan 3. Tersusunnya piranti *assesment* perlindungan anak.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	2,6
8.	0033	Penyelenggaraan/Pembinaan informasi publik (KPAI)	Terselenggaranya informasi publik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	0,7
9.	5253	Koordinasi pelaksanaan kebijakan KPA	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1,9
10.	5257	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tingkat pusat, 15 provinsi, dan 60 kabupaten/kota,	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Kementerian Negara Pemberdayaan	20,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pengembangan strategi PUG lokal; 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di 5 lembaga masyarakat (parpol, media, keagamaan, LSM, profesi/swasta) di 33 provinsi dalam pelaksanaan PUG serta inisiasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui advokasi dan KIE.		Perempuan	
11.	5259	Penyusunan data gender dan anak	1. Tersusunnya dan tersedianya data terpilah di tingkat nasional dan 33 provinsi terutama terkait indikator MDGs; 2. Tersusun dan tersedianya data tindak kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional dan provinsi; 3. Terbentuknya jaringan data dan informasi antar-*focal point* gender; 4. Tersusun dan tersedianya data terpilah anak di tingkat nasional dan provinsi, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak sesuai KHA, dan data perlindungan khusus bagi anak; dan 5. Terbentuknya jaringan data dan informasi antar-*focal point* anak.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	11,6
12.	5261	Pembentukan P2TP2A	Terlaksananya fasilitasi pembentukan P2TP2A di 18 provinsi (2 provinsi untuk inisiasi pembentukan baru dan 16 provinsi untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) dan 190 kabupaten/kota (60 kabupaten/kota untuk inisiasi pembentukan baru dan 130 kabupaten/kota untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) melalui kegiatan pelatihan, konseling, persiapan materi, dan lain-lain.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	11,5
13.	5260	Koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1,9

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
14.	0093	Penyerasian peraturan perundang-undangan bidang anak dan perempuan	1. Terfasilitasinya koordinasi penyerasian peraturan perundangan yang responsif gender dan peduli anak, sesuai CRC, WFC, CEDAW, CSW, dan lain-lain. 2. Terfasilitasinya pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan komitmen nasional dan internasional, termasuk CRC, WFC, CEDAW, CSW, dan lain-lain.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	2,9
15.	5254	Penyusunan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang anak, perempuan, dan gender	1. Tersusunnya materi KIE untuk 8 isu strategis perempuan dan anak di media cetak dan elektronik; dan 2. Terlaksananya KIE di media cetak dan elektronik tentang 8 isu strategis perempuan dan anak.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	10,0
16.	5255	Pemantauan pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan.	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan di 20 provinsi.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	2,8
17.	5256	Evaluasi pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan di 15 provinsi.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1,5
FOKUS PRIORITAS BIDANG 5: PEMUDA DAN OLAHRAGA						
1.	7601	Peningkatan keserasian kebijakan pemuda.	Terselenggaranya sosialisasi/desiminasi Undang-undang Kepemudaan; dan jaring aspirasi kepemudaan; meningkatnya koordinasi pemberdayaan pemuda dan rencana aksi pembangunan kepemudaan; pengembangan lembaga kepemudaan; dan kaderisasi lembaga kepemudaan	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kemeneg Pora	7,2
2.	0088	Pembinaan/Penyelenggaraan kerjasama internasional	Pertukaran pemuda antarnegara; dan Pengiriman delegasi ke luar negeri	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kemeneg Pora	3,9
3.	0093	Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan	Terbitnya undang-undang kepemudaan dan tersusunnya rancangan peraturan pemerintah tentang Kepemudaan	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan	Kemeneg Pora	3,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
				Pemuda		
4.	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya dukungan kepada 33 sentra kepemudaan (sentra pemberdayaan pemuda, sentra kewirausahaan pemuda, sentra pengembangan kepemimpinan pemuda)	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	15,1
5.	0039	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan pengembangan kepemudaan; Pengembangan hubungan kerjasama luar negeri; dan Pelaksanaan ujicoba, studi banding dan pengembangan standar pelayanan minimun	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	4,9
6.	0082	Pemberdayaan Lembaga	Terlaksananya dukungan kepada organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di 33 provinsi; meningkatnya kapasitas lembaga kepemudaan dan pengembangan manajemen OKP	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	5,0
7.	3306	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi 1.500 pemuda; terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan bakti pemuda antar provinsi (BPAP)	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	53,7
8.	7604	Perluasan pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan	1.500 Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3)	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	38,2
9.	7605	Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan bahaya destruktif lainnya	Penyuluhan dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bahaya destruktif lainnya	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	1,4
10.	7606	Peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.	Pelatihan kewirausahaan, kepeloporan dan kepeminpinan pemuda; Pameran/ visualisasi/publikasi dan promosi; Konferensi internasional di dalam dan luar negeri; dan Festival internasional pemuda	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	5,7
11.	7607	Penyelenggaraan kemitraan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian pemuda.	Pelatihan kempemimpinan dan kewirausahaan bagi 1.000 pemuda dan bantuan bagi 33 OKP	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	26,9
12.	7602	Peningkatan dialog pemuda tingkat kabupaten/kota, regional dan nasional	Tercapainya peningkatan dialog pemuda tingkat kabupaten/kota, regional, nasional; terjaringnya isu-isu regional dan nasional kepemudaan	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	2,0
13.	0090	Penyelenggaraan Sosialisasi/desiminasi/Seminar/ workshop/Publikasi	Terlaksananya sosialisasi/desiminasi/seminar/workshop/publikasi olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga pendidikan	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kemeneg Pora	2,0
14.	7608	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis bagi tenaga keolahragaan; Penyuluhan dan penyebaran informasi; dan Pengembangan jaringan kemitraan dan	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kemeneg Pora	10,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			kelembagaan			
15.	7610	Pengkajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Keolahragaan	Terlaksananya pengkajian implementasi tentang kebijakan olahraga	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kemeneg Pora	6,2
16.	7609	Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan keolahragaan di tingkat pusat dan daerah	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kemeneg Pora	1,00
17.	7613	Pemasyarakatan dan Pembinaan Olahraga	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat berolahraga di 33 provinsi	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	47,2
18.	7624	Pembinaan olahraga yang bersifat internasional	Terselenggaranya 6 event olahraga internasional (baik single event maupun multi event); 518 orang atlet andalan; Pelaksanaan program atlet lanjutan	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	294,8
19.	7614	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah	Pembinaan PPLP dan PPLM di 33 provinsi: Penyelenggaraan POPNAS ke-11; dan Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap cabang olahraga unggulan daerah di seluruh kabupaten/ kota	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	67,0
20.	7611	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga.	Terpilihnya atlet pelajar berbakat melalui pemanduan bakat pelajar dalam olahraga di 33 provinsi	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	4,3
21.	7623	Pembinaan olahraga yang bersifat nasional	Pembinaan sentra-sentra olahraga unggulan daerah di 33 provinsi; Pelaksanaan kompetisi olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat; dan Pembinaan cabang olahraga prestasi melalui pusat petihan daerah (pelatda) dan pusat pelatihan nasional (pelatnas)	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	96,0
22.	0040	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	3,3
23.	0082	Pemberdayaan Lembaga	Pembinaan dan penguatan induk-induk organisasi olahraga	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	4,9
24.	7620	Pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga.	Penghargaan bagi 100 pelaku olahraga yang berprestasi	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	16,6
25.	7612	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Teridentifikasinya dan berkembangnya olahraga unggulan daerah	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	2,0
26.	7616	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Meningkatnya kebugaran jasmani masyarakat, pelajar, dan mahasiswa melalui aktivitas olahraga rekreasi	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	2,0
27.	7618	Penyelenggaraan kompetisi secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan	Terselenggaranya POPDA dan POPWIL, kejuaraan antar PPLP, PPLM, KOP, kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa dalam event internasional	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	12,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
28.	7619	Pengembangan olahraga khusus	Terselenggaranya pembinaan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat di tingkat nasional maupun internasional dan POSPENAS	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	1,0
29.	7622	Pembinaan dan pengembangan industri olahraga	Tumbuh dan berkembangnya sentra-sentra industri olahraga	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kemeneg Pora	1,0
30.	7626	Peningkatan kerja sama dan pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana	Terjalinnya kemitraan dalam mendukung pembangunan dengan pemberian 50 paket bantuan prasarana dan sarana olahraga bagi Provinsi/Kab/Kota; Pengembangan sentra pelayanan rehabilitasi Cedera Olahraga dan laboratorium anti doping; dan Pembangunan/rehabilitasi Venue untuk pelaksanaan SEA Games	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kemeneg Pora	40,0
31.	0024	Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana	Terlaksananya dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, sentra olahraga nasional, provinsi dan kab/kota sesuai dengan cabang olahraga prioritas daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kemeneg Pora	25,5
FOKUS PRIORITAS BIDANG 6: AGAMA						
1.	3324	Rehabilitasi Gedung KUA	Adanya rehabilitasi gedung bagi 500 unit KUA	Pelayanan Kehidupan Beragama	Depag	45,0
2.	3491	Operasional KUA untuk Pelayanan Nikah dan Rujuk	Tersalurkannya dana operasional untuk pelayanan nikah dan rujuk bagi 5.025 KUA	Pelayanan Kehidupan Beragama	Depag	60,3
3.	3310	Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah	Terselenggaranya pelayanan ibadah haji dan umrah kepada 210.000 jemaah	Pelayanan Kehidupan Beragama	Depag	140,1
4.	3465	Subsidi Bimbingan Penyuluh Non PNS	Tersalurkannya tunjangan kesejahteraan pada 90.510 orang penyuluh non-PNS	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Depag	108,6
5.	3340	Pembangunan Seketariat Bersama Kerukunan Umat Beragama	Dibangunnya gedung FKUB sebanyak 15 unit	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Depag	4,5
6.	3467	Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama	Tersalurkannya bantuan operasional untuk 183 FKUB	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Depag	4,7
7.	3468	Bantuan Kegiatan Pemulihan Paska konflik	Tersalurkannya bantuan kegiatan pemulihan pascakonflik untuk 33 lokasi	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Depag	5,1
8.	0082	Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pemberdayaan pada	Pengembangan Lembaga-	Depag	18,8

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			60 lembaga sosial keagamaan	lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan		
FOKUS PRIORITAS BIDANG 7: KEBUDAYAAN						
1.	4861	Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa	20 dialog Interaktif dan 5 kampanye Jati Diri dan Karakter Bangsa melalui media massa; Gita Bahana Nusantara; Kemah dan jelajah budaya; 2 Konsep kebijakan; serta Kerjasama Integral Lintas Sektor di 33 Provinsi	Pengembangan Nilai Budaya	Depbudpar	8,0
2.	4862	Peningkatan dan pengaktualisasisian nilai-nilai tradisi	7 inventarisasi, 9 revitalisasi, 1 pendokumentasian, dan 2 penyebarluasan informasi nilai-nilai budaya tradisional	Pengembangan Nilai Budaya	Depbudpar	4,6
3.	4863	Pengembangan masyarakat adat	Pemberdayaan komunitas adat dan organisasi kepercayaan bagi 1.000 orang	Pengembangan Nilai Budaya	Depbudpar	3,4
4.	4864	Pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai budaya	Penyiapan kebijakan NBSF 73 naskah dan Pengembangan Nilai Budaya di 11 UPT/BPSNT	Pengembangan Nilai Budaya	Depbudpar	28,1
5.	4865	Pendukungan pengembangan nilai budaya daerah	Pendukungan 36 event budaya daerah di 18 provinsi	Pengembangan Nilai Budaya	Depbudpar	10,0
6.	5705	Penyediaan bahan pustaka	Translasi, transliterasi, transkripsi, dan transmedia, inventarisasi Naskah Kuno Dalam dan Naskah Kuno Luar Negeri sebanyak 12 naskah.	Pengembangan Nilai Budaya	Perpusnas	5,0
7.	4875	Pengembangan dan Pelestarian Kesenian	Penyiapan kebijakan kesenian (5 naskah), inventarisasi (1 naskah), revitalisasi (1 naskah), dukungan bagi 30 organisasi kesenian daerah; misi kesenian didalam dan luar negeri sebanyak 20 kelompok.	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	16,0
8.	4876	Pengembangan perfilman nasional.	Penyiapan kebijakan bidang perfilman (1 naskah), promosi/diplomasi film dalam dan luar negeri (6 even), fasilitasi pengembangan film nasional (5 organisasi), peningkatan apresiasi film (6 even), pendokumentasian (1 naskah), dan peningkatan mutu karya film nasional (6 even).	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	14,0
9.	4877	Pengembangan galeri nasional	Penyajian karya seni rupa, penyebarluasan informasi dan apresiasi, pendokumentasian, preservasi, promosi/diplomasi seni rupa dalam dan luar negeri sebanyak 8 even.	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	1,5
10.	4878	Peningkatan sensor film	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan 40.000 judul	Pengelolaan Keragaman	Depbudpar	15,4

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			film, rekaman video dan sarana publikasi, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan mitra terkait, serta penyediaan alat sensor film sebanyak 3 unit	Budaya		
11.	4879	Pendukungan pengelolaan taman budaya daerah	Pergelaran dan pameran seni budaya di 24 taman budaya daerah	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	2,0
12.	4880	Pendukungan pengembangan keragaman budaya daerah	Pendukungan promosi/diplomasi budaya daerah dalam dan luar negeri, kerjasama lintas sektor di 2 provinsi dan 3 negara	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	4,9
13.	4881	Optimalisasi Koordinasi Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Film.	Jumlah penyediaan dokumen program kegiatan, pembinaan dan pengelolaan administrasi bidang kepegawaian, keuangan, umum, inventarisasi aspek-aspek budaya, peningkatan kualitas teknis NBSF, koordinasi dan kerjasama dokumentasi, publikasi dan kehumasan, forum diskusi kebudayaan, serta penyelesaian RUU Perfilman 1 naskah	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	10,7
14.	4882	Penyelenggaraan dialog kebudayaan dan kebangsaan pusat	Fasilitasi pusat kajian kebudayaan dan badan pekerja konggres kebudayaan dengan melaksanakan dialog budaya sebanyak 7 kali di 7 universitas	Pengelolaan Keragaman Budaya	Depbudpar	6,0
15.	4866	Pengembangan nilai sejarah	Penulisan Sejarah Pemikiran Tokoh Kebudayaan 1 naskah dan Dinamika Sosial Masyarakat Perbatasan 1 naskah; serta Lawatan Sejarah VIII: "Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat".	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	4,0
16.	4867	Pengembangan geografi sejarah	Pemetaan sejarah Indonesia masa Prasejarah 1 naskah dan Arung Sejarah Bahari di NTT untuk 200 orang	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	4,0
17.	4868	Pengelolaan peninggalan bawah air	Konservasi 300 BCB bawah air dan pemetaan/survey 4 situs peninggalan bawah air	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	4,1
18.	4869	Pengelolaan peninggalan kepurbakalaan	Penyelamatan dan pengelolaan 7 kawasan peninggalan kepurbakalaan dan penanggulangan 15 kasus pencurian/penyalahgunaan BCB	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	15,8
19.	4870	Pengelolaan Permuseuman	Perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengadaan koleksi di 6 Museum (Museum Nasional, Museum Benteng, Museum Sumpah Pemuda, Museum Rumusan Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Basoeki Abdullah), dan penyelenggaraan Visit Museum 2010 sebanyak 10	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	14,8

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			kegiatan.			
20.	4871	Pengembangan pemahaman kekayaan budaya daerah	Pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan kepurbakalaan di 14 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) dan 11 BPSNT, Rehabilitasi 3 situs BCB Pasca Gempa di Yogyakarta seluas 2.290 m3, Pengembangan dan penataan Kawasan Candi Gedong Songo seluas 450 m3, Penyelesaian Diorama Monumen Pansar Sudirman seluas 150 m2, serta Pengembangan Pusat Informasi Majapahit II seluas 3.340 m2.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	52,6
21.	4872	Pendukungan pengelolaan museum daerah	Pendukungan dan Pembinaan teknis 25 Museum Daerah	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	3,3
22.	4873	Pendukungan pengembangan kekayaan budaya daerah	Dukungan pengembangan kawasan budaya di 15 Destinasi Pariwisata Unggulan	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	5,0
23.	4874	Optimalisasi koordinasi pengembangan sejarah Dan purbakala	Koordinasi perencanaan program dan anggaran dengan 33 provinsi, penyusunan dan pengembangan database sejarah, purbakala dan museum daerah 1 naskah, serta monitoring dan evaluasi	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	13,0
24.	4900	Pengembangan arkeologi nasional	Penelitian arkeologi di Pusat Arkeologi Nasional (1 naskah) dan 10 Balai Arkeologi (10 naskah).	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar	22,0
25.	5709	Pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno	95.000 eks bahan pustaka dan naskah kuno serta 30.000 karya cetak dan karya rekam	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Perpusnas	7,5
26.	4898	Peningkatan litbang kebudayaan	Penelitian dan pengembangan kebudayaan (4 naskah)	Pengembangan Kemitraan	Depbudpar	5,0

BAB 2
EKONOMI

BAB 2
EKONOMI

A. Kondisi Umum

Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia yang sedang mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Krisis ini telah menyebabkan perekonomian Amerika mengalami resesi ekonomi yang dalam, dan saat ini telah menjalar ke negara maju lainnya, serta telah berimbas pula ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Kecenderungan perlambatan perekonomian dunia telah memaksa Bank Dunia mengkoreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 dari 0,9 persen pada bulan Nopember 2008, menjadi minus 1,7 persen pada bulan Maret 2009. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang dan Singapura telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sejak triwulan IV tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 11,7 persen dan 9,5 persen. Stabilitas ekonomi terjaga yang ditunjukkan oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh dengan 5,3 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah tumbuh 10,4 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen. Sementara itu pertumbuhan industri nonmigas hanya tumbuh sebesar 4,0 persen. Dari sektor tersier, penyumbang terbersar untuk pertumbuhan adalah sektor pengangkutan dan telekomunikasi; listrik, gas dan air bersih; serta konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 16,7 persen; 10,9 persen, dan 7,3 persen.

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,3 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, dan 6,4 persen pada triwulan III. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2008 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa yaitu minus 5,5 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q) dan hanya meningkat sebesar 1,8 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2007 (y-o-y). Melemahnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak serta menurunnya harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Di samping pertumbuhan ekspor yang melambat, investasi juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV-2008, yaitu hanya meningkat 0,8 persen dibandingkan dengan triwulan III-2008.

Pada triwulan I-2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4 persen (y-o-y). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing-masing tumbuh 19,2 persen dan 5,8 persen. Sedangkan ekspor mengalami pertumbuhan negatif sebesar 19,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen. Dari sektor tersier, pertumbuhan yang tinggi terdapat pada sektor listrik, gas dan air; dan pengangkutan dan telekominikasi yang tumbuh 11,4 persen dan 16,7 persen.

Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2009. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Di samping itu, efektifitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diproyeksikan berkisar antara 4,0 – 4,5 persen.

Kinerja **neraca pembayaran** pada tahun 2008 tetap terjaga di tengah melambatnya perekonomian dunia dan menurunya harga-harga komoditas di pasar dunia. Pada tahun 2008, total penerimaan ekspor mencapai USD 139,6 miliar, atau naik 18,3 persen dibandingkan tahun 2007. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 27,5 persen dan 15,8 persen. Sementara itu dalam tahun 2008, impor meningkat menjadi USD 116,7 miliar, atau naik 36,9 persen. Peningkatan ini didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masing-masing naik sebesar 24,6 persen dan 40,4 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk *income* dan *current transfer*) yang mencapai USD 22,6 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 mencapai sekitar USD 0,3 miliar turun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai USD 10,5 miliar.

Investasi langsung asing (neto) mencapai surplus sebesar USD 2,0 miliar didorong oleh investasi langsung asing yang masuk sebesar USD 7,9 miliar. Pada semester I-2008 arus masuk investasi portofolio meningkat, namun pada semester II-2008 cenderung melambat. Hal ini terutama dipengaruhi oleh arus modal keluar dari para investor guna memenuhi kebutuhan konsolidasi keuangan global, yang pada akhirnya berimbas pada pelepasan surat utang negara (SUN) dan surat berharga Bank Indonesia (SBI) yang terjadi selama semester II-2008. Secara keseluruhan tahun 2008, investasi portofolio neto mencapai USD 1,7 miliar turun dibandingkan tahun 2007 (USD 5,6 miliar) dengan investasi portofolio yang masuk sebesar USD 3,0 miliar. Adapun arus modal lainnya pada tahun 2008 mengalami defisit sebesar USD 6,2 miliar didorong oleh investasi lainnya di luar negeri sebesar USD 10,0 miliar. Dengan perkembangan ini neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2008 mengalami defisit USD 1,9 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 51,6 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 4,0 bulan impor.

Pada triwulan I-2009, total penerimaan ekspor mencapai USD 23,9 miliar atau turun dibandingkan dengan triwulan I-2008 yang mencapai USD 34,4 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan melemahnya nilai ekspor non-migas sebesar

23,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan impor selama triwulan I-2009 juga melambat dan mencapai USD 17,7 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 26,9 miliar. Secara keseluruhan nilai transaksi berjalan pada triwulan I-2009 mencapai surplus USD 1,8 miliar.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial hingga akhir triwulan I-2009 mencapai surplus USD 2,4 miliar, terutama didorong oleh arus masuk modal asing langsung neto dan arus masuk modal portfolio yang masing-masing mencapai USD 2,7 miliar dan USD 1,9 miliar. Sedangkan defisit investasi lainnya menurun dan mencapai USD 2,3 miliar. Dengan gambaran tersebut cadangan devisa pada akhir triwulan I/2009 mencapai USD 54,8 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor.

Di sisi keuangan negara, realisasi APBN Tahun 2008 banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam (migas) serta krisis finansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar. Sampai dengan 31 Desember 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 981,0 triliun (realisasi per 31 Desember 2008) atau 21,0 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi penerimaan negara dan hibah tersebut meningkat sebesar Rp 273,2 triliun atau naik sebesar 38,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2007.

Peningkatan pendapatan negara dan hibah tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007, realisasi penerimaan perpajakan meningkat sebesar 34,2 persen dan penerimaan negara bukan pajak meningkat sebesar 48,8 persen. Peningkatan pendapatan negara dan hibah tersebut selain disebabkan oleh perbaikan dan reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan (di antaranya melalui kebijakan intensifikasi perpajakan dan *sunset policy*), juga didorong oleh faktor eksternal, terutama meningkatnya harga komoditi di pasar internasional. Sementara itu, di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga 31 Desember 2008 mencapai Rp 985,3 triliun (21,0 persen terhadap PDB) atau meningkat sebesar 30 persen dibandingkan realisasi APBN Tahun 2007. Peningkatan realisasi belanja negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 37,3 persen atau meningkat sebesar Rp188,3 triliun dan belanja ke daerah meningkat 15,5 persen atau sebesar Rp. 39,4 triliun.

Sejalan dengan upaya pengamanan APBN, pemerintah mampu menekan defisit APBN Tahun 2008 menjadi sebesar 0,1 persen terhadap PDB. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi defisit defisit tahun 2007 yang besarnya 1,3 persen terhadap PDB. Rendahnya realisasi defisit anggaran tersebut menimbulkan adanya kelebihan pembiayaan dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp51,3 triliun. Kelebihan ini selanjutnya akan digunakan untuk memberikan stimulus fiskal pada tahun 2009. Dengan demikian, stok utang pemerintah pada akhir tahun 2008 diperkirakan sebesar 34,7 persen terhadap PDB.

Selanjutnya pada tahun 2009, APBN diperkirakan masih akan mendapat tekanan dari faktor ekternal akibat krisis ekonomi global. Melemahnya peran

investasi swasta dan ekspor akibat turunnya perekonomian global, telah menjadikan peran kebijakan fiskal menjadi sangat strategis sebagai bentuk kebijakan *counter-cyclical* dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi sepanjang tahun 2009. Terkait dengan itu, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009. Perubahan asumsi tersebut antara lain adalah perubahan target pertumbuhan ekonomi yang turun dari 6,0 persen menjadi sekitar 4,5 persen, perkiraan harga minyak mentah Indonesia yang turun dari USD 80 dolar per barel menjadi USD 45 dolar per barel, serta perkiraaan nilai tukar rupiah terhadap US dolar yang terdepresiasi dari Rp.9.400 per 1 US dolar menjadi Rp11.000 per 1 US dolar. Selain itu, perubahan APBN Tahun 2009, juga terkait dengan tambahan berupa stimulus fiskal terhadap perekonomian sebesar Rp73,0 triliun.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pendapatan negara dan hibah diperkirakan turun dari Rp 985,7 triliun menjadi Rp 848,6 triliun. Penurunan pendapatan negara dan hibah tersebut, utamanya didorong oleh penurunan penerimaan perpajakan dari Rp725,8 triliun menjadi Rp 661,8 triliun. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga minyak mentah Indonesia dan pemberian stimulus fiskal khususnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Meskipun penerimaan perpajakan diperkirakan lebih rendah dari target APBN Tahun 2009, namun sedikit lebih tinggi dibanding realisasi APBN Tahun 2008. Penurunan pendapatan negara dan hibah didorong pula oleh penurunan penerimaan bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan menurun dari Rp258,9 triliun menjadi Rp185,9 triliun, yang disebabkan oleh perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebagai akibat dari turunnya harga minyak mentah dunia.

Sementara itu, di sisi pengeluaran negara, alokasi belanja negara pada APBN Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp1.037,1 triliun (19,5 persen terhadap PDB). Dengan demikian, dibandingkan dengan realisasi APBN Tahun 2008, perkiraan tersebut meningkat sebesar Rp51,8 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar Rp23,74 triliun dan alokasi belanja ke daerah sebesar Rp28,06 triliun bila dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2008. Namun demikian, besaran alokasi belanja negara yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2009 diperkirakan turun sebesar Rp49,0 triliun (dari Rp1.037,1 triliun menjadi Rp 988,1 triliun) pada APBN Penyesuaiannya. Penurunan belanja negara tersebut utamanya didorong oleh penurunan belanja subsidi Rp43,2 triliun yang terdiri atas penurunan belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp33,1 triliun, subsidi listrik Rp3,5 triliun, dan subsidi pajak Rp7,0 triliun. Sementara itu, belanja ke daerah diperkirakan turun Rp17,6 triliun. Penurunan belanja ke daerah sejalan dengan turunnya penerimaan yang dibagihasilkan khususnya penerimaan SDA migas dan penerimaan pajak penghasilan. Di sisi lain, terdapat peningkatan belanja negara sebagai tambahan stimulus fiskal sebesar Rp11,2 triliun yang dialokasikan pada kegiatan infrastruktur dan realokasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan ASEI.

Berdasarkan perkembangan tersebut, defisit anggaran pada tahun 2009 diperkirakan meningkat dari Rp51,3 triliun menjadi Rp139,5 triliun atau menjadi 2,5 persen PDB. Peningkatan defisit anggaran tersebut, diperkirakan dibiayai melalui SILPA sebesar Rp51,3 triliun dan tambahan pembiayaan utang sebesar

Rp44,5 triliun yang bersumber dari penarikan pinjaman siaga, serta tambahan penarikan pinjaman program sebesar Rp1,1 triliun. Sementara itu stok utang pemerintah pada akhir tahun 2009 diperkirakan sebesar 31,3 persen terhadap PDB.

Sebagai salah satu pelaku dalam perekonomian nasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dibina agar semakin sehat dan mampu berdayasaing di kancah global. Pembinaan BUMN sejak tahun 2005 hingga 2009 meliputi: restrukturisasi, privatisasi, penyempurnaan infrastruktur hukum, pembinaan pelaksanaan tata-kelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan penyertaan modal negara (PMN), serta penyelesaian/restrukturisasi hutang BUMN. Langkah-langkah pembinaan tersebut menyebabkan kinerja BUMN membaik. Dari tahun 2005 hingga tahun 2007 jumlah BUMN yang merugi semakin sedikit yaitu 36 BUMN pada tahun 2005, menjadi 39 BUMN pada tahun 2006, dan 28 BUMN pada tahun 2007. Sejalan dengan itu, besarnya keuntungan yang diraih BUMN juga meningkat. Dengan demikian, bagian laba BUMN yang diserahkan ke kas negara juga meningkat, yaitu dari Rp12,8 trilliun pada tahun 2005, menjadi Rp22,9 trilliun pada tahun 2006, menjadi Rp23,2 trilliun pada tahun 2007, dan meningkat menjadi Rp30,8 trilliun pada tahun 2008.

Di sisi moneter, perkembangan nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi. Nilai tukar Rupiah menguat dari Rp9.419,-/USD pada bulan Desember 2007 menjadi Rp9.118,-/USD pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta. Nilai tukar kemudian melemah dan mejad Rp12.151,-/USD pada bulan November 2008 terkait dengan adanya pembalikan dana keluar negeri utuk mencari investasi aman (*safe haven*) sebagai dampak dari krisis keuangan global. Selanjutnya, nilai tukar menguat kembali menjadi Rp10.400,-/USD pada awal Mei 2009 karena membaiknya neraca perdagangan seiring dengan adanya penurunan impor yang lebih besar dibanding penurunan ekspor, dan pemasukan dana luar negeri.

Selama tahun 2008 inflasi mencapai 11,06 persen. Tingginya inflasi terjadi karena kenaikan harga yang tinggi pada *volatile foods* dan *administered price*. *Volatile foods* meningkat tajam terutama pada awal tahun akibat imported inflation seiring dengan melonjaknya harga komoditas di pasar dunia seperti gandum, kedelai, jagung, dan minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO). Sementara itu *administered price* meningkat dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 28,7 persen pada akhir Mei 2008 untuk menahan lonjakan subsidi BBM dengan meningkatnya harga minyak dunia. Tekanan inflasi *administered prices* juga berawal dari kenaikan harga minyak tanah dan elpiji terkait dengan program konversi. Inflasi pada bulan Januari 2008 sebesar 7,36 persen (y-o-y) meningkat menjadi 10,38 persen (y-o-y) pada bulan Mei 2008. Inflasi terus meningkat sehingga pada bulan September 2008 mencapai 12,14 persen.

Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain kebijakan stabilisasi pangan secara terpadu melalui subsidi bahan pangan dan operasi pasar. Sejalan dengan menurunnya harga minyak mentah dan komoditi lainnya di pasar internasional, inflasi menurun secara bertahap menjadi 11,06 persen pada bulan Desember 2008 dan menjadi 7,31 persen pada bulan April 2009. Dengan

semakin stabilnya harga komoditi di pasar internasional dan semakin intensifnya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia, diharapkan inflasi akan turun secara bertahap menjadi di bawah 6,0 persen pada akhir tahun 2009.

Menurunnya inflasi pada akhir tahun 2008 memberikan cukup ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan perubahan kebijakan moneter yang semakin longgar. Kebijakan pengendalian moneter yang sebelumnya mengetat, yaitu dengan menaikkan *BI rate* naik secara bertahap dari sebesar 8,0 persen pada bulan April 2008 menjadi 9,50 persen pada bulan Oktober 2008, kemudian dilonggarkan melalui penurunan *BI rate* menjadi 9,25 persen pada bulan Desember 2008, 8,75 persen pada bulan Januari 2009 dan 7,25 persen pada awal Mei 2009. Agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, penurunan *BI rate* diharapkan dapat diikuti penurunan suku bunga perbankan. Penurunan *BI rate* pada awal Desember 2008 belum diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan dalam jangka pendek kecuali suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit investasi, karena antara lain disebabkan oleh kehati-hatian perbankan terhadap risiko perbankan.

Sektor Keuangan. Meskipun kondisi perekonomian dunia mengalami goncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup kuat. Rasio kecukupan modal *(capital adequacy ratio – CAR)* bank umum sebesar 16,8 persen pada tahun 2008 dan meningkat mencapai 18,0 persen pada bulan Maret 2009, masih jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan batas minimal 8,0 persen. Terkait dengan potensi kredit macet, tingkat kredit berkinerja buruk *(non performing loan – NPL)* bank umum turun menjadi 3,2 persen pada tahun 2008 dari 4,1 persen pada tahun 2007. Namun demikian, memasuki tahun 2009 patut diwaspadai kecenderungan meningkatnya kredit macet, tercermin dari meningkatnya NPL hingga mencapai 3,9 persen pada bulan Maret 2009.

Sampai dengan Desember 2008 kredit tumbuh sebesar 30,7 persen dengan nilai Rp1.300,2 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan 2007 yang sebesar 26,4 persen (y-o-y). Pada akhir triwulan I-2009 (Maret 2009), pertumbuhan kredit bank umum masih relatif cukup tinggi yaitu sebesar 26,1 persen (y-o-y). Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank tumbuh sebesar 16,2 persen (y-o-y) dari Rp1.528,2 triliun pada akhir 2007 menjadi Rp1.775,2 triliun pada akhir 2008, lebih lambat dibandingkan akhir tahun 2007 yang tumbuh sebesar 17,7 persen (y-o-y). Terjaganya kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor pertumbuhan simpanan masyarakat yang tetap tinggi. Tercatat sampai dengan Maret 2009, simpanan masyarakat tumbuh mencapai Rp1.801,1 triliun (meningkat 21,5 persen/y-o-y).

Seiring dengan perkembangan tersebut, rasio pinjaman terhadap simpanan *(loan to deposit ratio – LDR)* naik dari 66,3 persen pada tahun 2007 menjadi 74,6 persen pada akhir 2008. Memasuki tahun 2009, LDR bank umum relatif stabil dibandingkan dengan akhir 2008 yaitu sebesar 73,1 persen (Maret 2009). Untuk sektor UMKM, kredit bank umum yang berskala mikro, kecil dan menengah (kredit UMKM) meningkat sebesar 26,1 persen (y-o-y) pada akhir 2008 dengan nilai Rp633,9 triliun. Tingginya penyaluran kredit UMKM di tahun 2008, berlanjut pada tahun 2009. Tercatat sampai dengan bulan Maret 2009 kredit bank umum untuk

UMKM tumbuh sebesar 22,9 persen dengan nilai Rp637,2 triliun, dengan komposisi sebesar 38,4 persen kredit modal kerja; 8,5 persen kredit investasi dan 53,0 persen merupakan kredit konsumsi.

Selain melalui sistem konvensional, pembiayaan melalui perbankan syariah juga terus meningkat. Pembiayaan melalui perbankan syariah tumbuh sebesar 36,5 persen (y-o-y) dari Rp28,0 triliun pada akhir 2007 menjadi Rp38,2 triliun pada 2008. Dilihat dari komposisinya, pembiayaan terbesar masih merupakan pembiayaan yang keuntungannya telah disepakati dahulu (piutang murabahah). Di sisi lain, penghimpunan dana masyarakat pada tahun 2008 tumbuh sebesar 31,6 persen (y-o-y) dari Rp28,0 triliun (2007) menjadi Rp36,9 triliun (2008). Terkait dengan fungsi intermediasi, rasio LDR perbankan syariah relatif stabil yaitu sekitar 103,0 persen. Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan membaiknya kualitas pembiayaan yang disalurkan. Rasio *non performing financing* (NPF) turun menjadi 3,9 persen (2008) dari 4,1 persen (2007).

Goncangan pasar modal internasional dengan *Wall Street* di Amerika Serikat sebagai episentrumnya secara cepat menjalar dan menular ke negara-negara lainnya, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, Jepang dan Cina sehingga berimbas pula kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI yang mencapai 2.830,3 pada 9 Januari 2008, menurun secara bertahap menjadi 2.165,9 pada akhir Agustus 2008, dan menurun secara bergejolak menjadi 1.355,4 pada akhir 2008. Penurunan IHSG didorong pula oleh keluarnya sebagian investor asing dari bursa. Pada akhir Februari 2009 IHSG masih mengalami penurunan menjadi 1.285,5 poin. Memasuki awal Mei 2009 IHSG sudah mulai meningkat menjadi 1.729,6 poin. Meskipun masih sulit diprediksi kapan krisis keuangan global ini akan berakhir, namun pada akhir tahun 2009 diharapkan pasar modal berkembang lebih stabil dan mengalami peningkatan jika upaya-upaya intervensi secara terkoordinasi dari seluruh negara-negara di dunia untuk menanggulangi krisis global tersebut terbukti efektif.

Terkait dengan kondisi eksternal yang tidak menentu, selama tahun 2008 telah ditetapkan kebijakan guna memperkuat ketahanan sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Beberapa kebijakan penting perbankan yang dikeluarkan Pemerintah selama tahun 2008 antara lain adalah (i) memberikan bantuan bagi perbankan yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik serta menimbulkan potensi krisis akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN[1]; (ii) merubah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)[2] yang didahului oleh Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan UU No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; serta (iii) membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan[3]. Seiring dengan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah di dalam penanganan sektor keuangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan sektor

[1] Perppu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia
[2] PP nomor 66 tahun 2008
[3] Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan

keuangan yang antara lain adalah fleksibilitas di dalam pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM)[4].

Selanjutnya, lembaga keuangan non bank (LKNB) termasuk pasar modal telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kepercayaan masyarakat terhadap LKNB sudah semakin baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset lembaga keuangan non bank (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) sebesar 23,2 persen (yoy) dari Rp369,9 triliun (2006) menjadi Rp455,8 triliun (2007), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2006 yang sebesar 20,3 persen (y-o-y). Namun demikian, terkait dengan gejolak krisis keuangan dunia, nilai kapitalisasi pasar modal terhadap PDB menurun dari 64,4 persen PDB pada tahun 2007 menjadi 33,8 persen PDB.

Kesadaran para Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk mematuhi ketentuan pelaporan semakin meningkat di berbagai industri keuangan. Luasnya cakupan wilayah Indonesia serta besarnya jumlah penduduk maupun keragaman bentuk kejahatan yang dilakukan memunculkan tantangan baru dan diperlukan kesungguhan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Jika pada tahun 2002 jumlah LTKM per bulan hanya mencapai 103 laporan, pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 171 LTKM per bulan dan terus meningkat menjadi 290 LTKM per bulan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 jumlah LTKM menjadi 486 laporan dan meningkat drastis menjadi rata-rata 869 laporan per bulan sampai pada akhir tahun 2008. Jika dilihat dari jumlah rata-rata LTKM yang diterima PPATK sepanjang kurun waktu 3 bulan pertama tahun 2009 semakin menunjukkan peningkatan yang sangat berarti, yaitu rata-rata sebanyak 1.301 LTKM per bulan.

Sebagai tindak lanjut dari laporan yang telah diterima, hingga akhir bulan Maret 2009, PPATK telah menyerahkan 666 kasus atau Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada Aparat Penegak Hukum. Dari jumlah tersebut, kasus dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal merupakan kasus yang terbanyak dengan jumlah 297 kasus diikuti dengan kasus penipuan sebanyak 210 kasus. Hal ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2009 serta 2010 ke depan.

Investasi. Pertumbuhan investasi berupa PMTB (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) selama tahun 2008 meningkat sebesar 11,7 persen, yang berarti tumbuh lebih tinggi dari tahun 2007 yang hanya mencapai sebesar 9,4 persen. Pertumbuhan investasi tersebut sebagian didukung oleh tingginya peningkatan dari realisasi ijin usaha tetap (IUT) Penanaman Modal Asing (PMA) sektor non migas. Selama tahun 2008, realisasi IUT PMA mencapai nilai USD 14,87 miliar atau tumbuh 43,7 persen dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat

[4] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan PBI nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing menetapkan bahwa GWM Rupiah Bank Umum sebesar 7,5% yang terdiri dari GWM Utama sebesar 5,0% dan Sekunder sebesar 2,5%. GWM Utama terdiri dari rekening simpanan Rupiah bank umum pada Bank Indonesia dan GWM Sekunder terdiri dari SBI, SUN atau *excess reserve*.

dibandingan dengan tahun 2007. Meningkatnya kinerja PMA selama tahun 2008, memberikan imbas positif bagi pertumbuhan realisasi investasi sektor non migas secara keseluruhan yang mencapai Rp 164,27 triliun atau meningkat 26,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurun sebesar 41,6 persen selama tahun 2008.

Tabel 1
Realisasi Ijin Usaha Tetap PMDN dan PMA

	2006	2007	2008	Pertumbuhan (y-o-y)	
				2006 terhadap 2007	2007 terhadap 2008
Realisasi Investasi/IUT (triliun)	**75,46**	**129,43**	**164,3**	**72%**	**26,9%**
PMDN (Rp. Triliun)	20,65	34,88	20,36	69%	-41,6%
PMA (Rp triliun)	54,81	94,55	143,91	73%	52,2%
PMA (US$ miliar)	5,98	10,34	14,87	73%	43,8%

Sumber: BKPM

Dari sisi lokasi, pulau Jawa masih menduduki tingkat realisasi ijin usaha tetap PMDN tertinggi dengan nilai realisasi ijin usaha tetap sebesar Rp. 12,23 triliun, atau 60,1 persen dari total nilai realisasi IUT PMDN tahun 2008, diikuti dengan Pulau Sumatera dengan nilai realisasi ijin usaha tetap (IUT) sebesar Rp. 4,8 triliun atau 23,8 persen, pulau Kalimantan dengan nilai IUT sebesar Rp. 1,82 triliun atau 8,9 persen serta Sulawesi dengan nilai IUT sebesar Rp. 1,14 triliun atau 5,6 persen dari total nilai realisasi IUT PMDN tahun 2008 yaitu sebesar Rp.20,4 triliun. Untuk realisasi IUT PMA, pulau Jawa tetap diminati oleh investor, dimana prosentase realisasi IUT PMA di pulau Jawa mencapai 91,2 persen dengan nilai USD 13,56 miliar, dikuti pulau Sumatera 6,8 persen dengan nilai USD 1,0 miliar dari total nilai IUT PMA tahun 2008 sebesar USD 14,9 miliar.

Tabel 2
Realisasi Ijin Usaha Tetap Per Lokasi
(Tahun 2006-2008)

LOKASI	PMDN (Rp. Miliar)						PMA (US$ Juta)					
	2006		2007		2008		2006		2007		2008	
	Nilai	persen	Nilai	persen	Nilai	persen	Nilai	persen	Nilai	persen	Nilai	persen
Sumatera	4,504.9	21.8%	10,754.5	30.8%	4,840.1	23.8%	898.4	15.0%	1,398.5	13.5%	1,009.9	6.8%
Jawa	13,030.8	63.1%	18,668.9	53.5%	12,230.7	60.1%	4,416.4	73.7%	8,503.5	82.2%	13,566.8	91.2%
Bali &Nusa Tengga	104.9	0.5%	15.7	0.0%	29.0	0.1%	106.2	1.8%	56.7	0.5%	95.5	0.6%
Kalimantan	2,536.1	12.3%	1,558.0	4.5%	1,821.4	8.9%	534.6	8.9%	300.6	2.9%	115.2	0.8%
Sulawesi	68.6	0.3%	3,881.6	11.1%	1,147.5	5.6%	15.5	0.3%	79.6	0.8%	65.4	0.4%
Maluku	0.2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	20	0.3%	0	0.0%	-	0.0%
Papua	403.5	2.0%	0	0.0%	294.7	1.4%	0.6	0.0%	2.5	0.0%	18.7	0.1%
Total	**20,649.0**	**100.0%**	**34,878.7**	**100.0%**	**20,363.4**	**100.0%**	**5,991.7**	**100.0%**	**10,341.4**	**100.0%**	**14,871.5**	**100.0%**

sumber data: BKPM,

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) yang merupakan indikator perkembangan ekonomi terkini hasil survey BPS menyatakan bahwa secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada Triwulan IV-2008 masih meningkat dengan nilai ITB sebesar 102,2 meskipun peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kondisi bisnis pada Triwulan III-2008 dengan nilai ITB sebesar 111,1.

Perdagangan. Ekspor selama tahun 2007 dan tahun 2008 meningkat cukup tinggi. Pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang tahun 2007 adalah sebesar 15,6 persen, dan pada tahun 2008 pertumbuhannya meningkat menjadi 17,2 persen. Realisasi pertumbuhan ekspor nonmigas tahun 2008 didorong oleh adanya faktor peningkatan volume dan harga, dimana kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi di pasar internasional terjadi sepanjang semester I tahun 2008. Namun sejak awal semester II tahun 2008, pertumbuhan ekspor cenderung mengalami penurunan seirama dengan melambatnya perekonomian dunia.

Nilai Ekspor nonmigas pada tahun 2008 mencapai angka USD 107,8 miliar, yang memberikan peran sebesar 78,8 persen terhadap nilai ekspor total. Komponen ekspor nonmigas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor adalah sektor industri, yaitu sebesar 64,4 persen. Nilai ekspor sektor industri ini pada tahun 2008 mencapai USD 88,0 miliar, atau tumbuh sebesar 15,1 persen .

Sejalan dengan itu, dampak krisis ekonomi global telah pula berimbas pada kinerja ekspor yang ditandai dengan berfluktuasinya nilai ekspor pada tahun 2008, dimana dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan. Ekspor nonmigas juga mengalami penurunan pada paruh kedua tahun 2008 kecuali di bulan September yang sempat menguat. Penurunan pertumbuhan untuk ekspor total dan nonmigas mulai terjadi pada semester kedua tahun 2008, dimana penurunan pertumbuhan ekspor total (*m-o-m*) terbesar terjadi pada bulan Oktober sebesar 11,6 persen dan penurunan pertumbuhan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada bulan November yaitu sebesar 9,2 persen.

Tabel 3
Nilai Ekspor, Pertumbuhan, dan Peran terhadap Pertumbuhan Ekspor Nonmigas

Komoditas	Nilai Ekspor (USD Juta)			Peran Terhadap Ekspor Total (%)			Pertumbuhan (%)			Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Total Ekspor	**100.798,6**	**114.100,9**	**136.761,7**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**17,7%**	13,2%	19,9%			
Non Migas	**79.589,1**	**92.012,3**	**107.803,4**	**79,0%**	**80,6%**	**78,8%**	19,8%	15,6%	17,2%	19,8%	15,6%	17,2%
Pertanian	3.364,9	3.657,8	4.937,4	3,3%	3,2%	3,6%	16,8%	8,7%	35,0%	0,7%	0,3%	1,6%
Industri	65.023,9	76.460,8	88.044,4	64,5%	67,0%	64,4%	17,0%	17,6%	15,1%	13,9%	14,6%	12,4%
Pertambangan	11.191,4	11.885,0	14.821,6	11,1%	10,4%	10,8%	40,8%	6,2%	24,7%	5,7%	0,8%	3,4%

Sumber: BPS

Pertumbuhan ekspor sektor pertanian mencapai pertumbuhan yang tertinggi yaitu, 35,0 persen dibandingkan sektor industri dan pertambangan. Namun, apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekspor nonmigas, sektor industri memberikan kontribusi yang tertinggi yaitu, 12,4 persen dibandingkan dengan kedua sektor lainnya yang hanya sebesar 1,6 persen dari produk pertanian dan 3,4 persen dari produk pertambangan. Oleh sebab itu, ekspor produk manufaktur memiliki peranan yang besar terhadap pertumbuhan ekspor nonmigas.

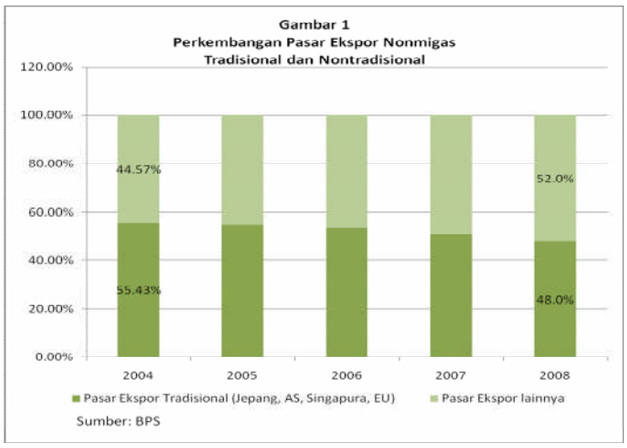

Dari sisi pasar ekspor, tingkat ketergantungan ekspor nonmigas Indonesia terhadap empat pasar ekspor tradisional, yaitu: Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan Singapura, mengalami penurunan. Pada tahun 2004 pangsa pasar ekspor nonmigas di pasar ekspor tradisional adalah sebesar 52,0 persen turun menjadi 48,0 persen pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tujuan ekspor Indonesia sudah mulai terdiversifikasi.

Dalam rangka mengatasi kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain, akibat dari menurunnya permintaan produk di beberapa pasar utama ekspor dunia, yang sangat berpotensi dialihkan ke pasar Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.56/M-DAG/PER/12/2008 *yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 60/M-DAG/PER/12/2008* tentang ketentuan impor produk tertentu, yang mencakup produk pakaian jadi, makanan dan minuman, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 untuk produk pakaian jadi; dan untuk produk lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2009.

Di sisi perdagangan dalam negeri, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kelancaran arus barang terutama bahan pokok. Selain itu, untuk memperlancar arus distribusi bahan pokok, pemerintah telah mengupayakan bantuan untuk mendirikan pembangunan pasar desa/tradisional di daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau kecil terluar/terdepan dan daerah pasca bencana alam/konflik; pengembangan percontohan pasar tradisional yang bersih, aman dan sehat; serta percontohan pasar sinergi antara pasar penunjang dengan pasar induk. Selain itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif pemerintah daerah dan peningkatan kerjasama antara pusat-daerah agar lebih nyata dalam mendukung pembangunan sarana distribusi perdagangan, maka mulai tahun 2009 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan pembangunan pasar tradisional.

Di bidang persaingan usaha, hasil penting yang telah dicapai adalah telah dikeluarkannya Perpres No. 80/2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dan menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Sedangkan hasil lain yang dicapai selama ini adalah semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan laporan, penanganan perkara, dan monitoring putusan dan litigasi. Hal ini menunjukkan semakin besarnya peranan kebijakan persaingan usaha dalam mencegah berbagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, yang akan mendukung terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha.

Pariwisata. Peran yang cukup strategis dalam pembangunan perekonomian nasional juga didukung oleh sektor pariwisata terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga mempunyai peran sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial budaya, sarana persahabatan, wadah pertukaran dan perdamaian antar bangsa, memperkuat integritas dan jati diri bangsa, serta alat efektif dalam mendorong pengembangan daerah utamanya bagi pelestarian lingkungan alam dan budaya tradisional.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pariwisata cukup menggembirakan. Hal ini dicerminkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah penerimaan devisa selama periode tersebut. Secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008 mencapai sekitar 6,4 juta orang atau meningkat 16,85 persen dari tahun 2007. Jumlah penerimaan devisa menjadi USD 7,3 miliar atau meningkat 37,7 persen. Sementara itu, jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2008 mencapai 223,0 juta dan pengeluaran wisnus mencapai Rp. 107,4 triliun.

Industri manufaktur. Perkembangan industri pengolahan bukan migas secara berturut-turut adalah 5,86 persen pada tahun 2005, 5,27 persen pada tahun 2006, 5,15 persen pada tahun 2007 serta 4,05 pada tahun 2008. Tiga subsektor industri yang memiliki pangsa kontribusi besar adalah industri makanan dan minuman, industri pupuk, kimia dan barang karet, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2008 ketiga subsektor ini tumbuh cukup baik yaitu berturut-turut sebesar 2,34 persen; 4,46 persen dan 9,79 persen. Data pertumbuhan triwulanan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pada triwulan ke-empat mengalami perlambatan yang cukup nyata, terutama subsektor yang rentan dengan pasokan atau permintaan pasar global, seperti industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, industri kertas dan barang cetakan, industri logam dasar, besi dan baja, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. Pada tahun 2009 diperkirakan pertumbuhan industri masih melemah karena memang permintaan yang belum pulih akibat krisis global baik dari pasar domestik maupun dari pasar internasional. Sehingga pada tahun 2009 industri pengolahan non-migas diperkirakan tumbuh 3,3 persen.

Tabel 4. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas
Tahun 2004 – 2008
(*Harga Konstan Tahun 2000*)
(*dalam persen*)

Cabang Industri	2004	2005	2006	2007	2008
1). Makanan, Minuman, Tembakau	1,39	2,75	7,21	5,05	2,34
2). Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki	4,06	1,31	1,23	-3,68	-3,64
3). Brg. Kayu dan Hasil Hutan	-2,07	-0,92	-0,66	-1,74	3,45
4). Kertas dan Barang Cetakan	7,61	2,39	2,09	5,79	-1,48
5). Pupuk, Kimia dan Barang Karet	9,01	8,77	4,48	5,69	4,46
6). Semen, Brg.Galian Non Logam	9,53	3,81	0,53	3,40	-1,49
7). Logam Dasar Besi dan Baja	-2,61	-3,70	4,73	1,69	-2,05
8). Alat Angkut, Mesin, Peralatan	17,67	12,38	7,55	9,73	9,79
9). Barang Lainnya	12,77	2,61	3,62	-2,82	-0,96
Industri Pengolahan Non Migas	**7,51**	**5,86**	**5,27**	**5,15**	**4,05**

Sumber: BPS, diolah Depperin

Pada tahun 2008 kebijakan dan pembinaan untuk mendorong pertumbuhan industri yang dilaksanakan antara lain revitalisasi teknologi produksi industri tekstil; rintisan pola pembinaan industri di daerah dengan skema *one village one product (OVOP*); dan berbagai koordinasi lintas instansi untuk memecahkan berbagai persoalan nyata yang dihadapi oleh pengusaha industri. Menjelang akhir 2008, pembinaan industri difukuskan pada upaya menyiapkan industri nasional menghadapi krisis global, yaitu dengan memfasilitasi penyediaan insentif fiskal bagi industri-industri strategis. Langkah strategis lain dalam persiapan krisis global adalah menjaga pasar domestik dari produk-produk impor illegal, yaitu dengan membatasi pelabuhan masuk barang-barang impor tersebut. Selanjutnya pada awal tahun 2009 persiapan menghadapi krisi global semakin ditingkatkan yaitu dengan mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Untuk itu, telah diterbutkan Instruksi presideng nomor 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Pada tahun yang sama, jumlah koperasi adalah sebanyak 149,3 ribu unit, dengan jumlah anggota mencapai sekitar 29,1 juta orang. Produktivitas per unit UMKM (berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan

sebesar 4,7 persen dari produktivitas usaha pada tahun 2006. Pertumbuhan produktivitas per unit UMKM tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produktivitas per unit usaha secara nasional.

Selama tahun 2008, upaya pemberdayaan UMKM telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: (1) Penerbitan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; (2) pelaksanaan paket kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 yang mencakup penajaman fokus dan prioritas pembangunan ekonomi, termasuk di antaranya paket kebijakan mengenai UMKM; (3) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga 31 Desember 2008 telah menyalurkan sebesar Rp12,6 triliun kepada 1.671.668 UMKM dengan rata-rata kredit per debitur senilai Rp7,6 juta; (4) Kegiatan bantuan sertifikasi tanah kepada 47.500 UKM untuk digunakan sebagai agunan pinjaman/kredit; (5) Fasilitasi pembiayaan alternatif melalui dana bergulir yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (BLU-LPDB); (6) Bantuan pembangunan pasar tradisional di daerah yang mencakup empat kategori pasar, yakni pasar reguler, pasar souvenir, pasar daerah tertinggal atau daerah mitigasi, dan pasar perbatasan; dan (7) Inisiasi pembentukan lembaga pusat inovasi UMKM.

Untuk tahun 2009, pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan dapat diarahkan untuk mengatasi krisis ekonomi global yang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, antara lain: (1) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM; (2) Pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM; (3) Pengembangan jaringan antar LKM/KSP; (4) Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota; (5) Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi; (6) Pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro melalui koperasi; (7) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produksi skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha; (8) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/KSP; (9) Pembinaan sentra-sentra produksi UMKM di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan; dan (10) Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi.

Ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selama 2004-2008 telah mampu meningkatkan jumlah orang yang bekerja, sehingga angka pengangguran telah berhasil diturunkan. Lapangan kerja yang tercipta pada periode tersebut sebanyak 8,8 juta, dengan pertambahan angkatan kerja sebanyak 8,0 juta. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9,9 persen atau 10,3 juta orang pada tahun 2004. Jumlah ini sempat meningkat menjadi 11,2 persen pada tahun 2005, namun telah berhasil menurun sampai 8,14 persen atau sekitar 9,26 juta orang pada Februari 2009. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 2004 dan Februari 2009 jumlah penganggur telah berhasil berkurang sebanyak sekitar 990 ribu orang.

Gambar 2
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Pekerja, Penganggur serta Tingkat Pengangguran Terbuka, 2004-Agustus 2008

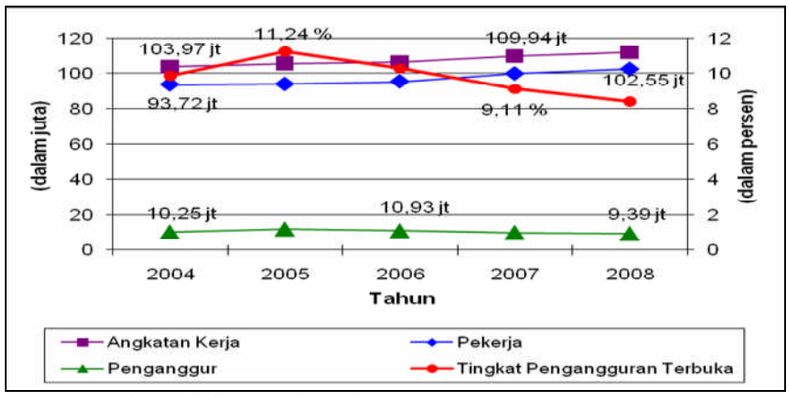

Sumber: Sakernas (BPS)

Peningkatan kesempatan kerja menurut lapangan pekerjaan utama cukup bervariasi. Dalam kurun waktu 2004 – Februari 2009, kesempatan kerja di sektor industri bertambah 1,55 juta orang, di sektor pertanian bertambah sebanyak 2,43 juta orang, dan sektor jasa termasuk perdagangan, transport, bangunan, keuangan bertambah 6,79 juta orang. Di sisi lain, sebagian besar lapangan kerja masih berupa lapangan kerja informal. Jumlah pekerja formal sampai dengan Februari 2009 sebanyak 31,88 juta orang atau sekitar 30,51 persen dari seluruh lapangan kerja yang tersedia. Lapangan kerja formal selama 4 (empat) tahun terakhir meningkat dengan daya serap sebanyak 3,48 juta orang. Secara absolut jumlah pekerja informal meningkat lebih banyak dari pekerja informal yang bertambah 7,29 juta. Krisis keuangan AS pada akhir tahun 2008 menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia melakukan restrukturisasi usaha, yang salah satunya adalah mengurangi karyawan/pekerja formal di perusahaan.

Sampai dengan 1 Mei 2009, tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan pekerja terus berjalan. Saat ini sudah lebih dari 51.000 pekerja terkena PHK dan yang sudah dirumahkan lebih dari 22.000 pekerja. Tingkat PHK tertinggi terdapat di DKI Jakarta, yaitu sebanyak lebih dari 17.000 pekerja. Industri yang banyak melakukan PHK kebanyakan adalah industri padat pekerja seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Kondisi ini sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pengangguran terbuka. Jika jumlah lowongan kerja (formal) tidak cukup untuk menampung seluruh pencari kerja dan menganggur tidak bisa menjadi pilihan, penganggur akan memasuki lapangan kerja informal, sehingga ada kemungkinan jumlah pekerja informal akan bertambah. Pekerja yang terkena PHK pun kemungkinan akan memasuki lapangan kerja informal.

Pemerintah telah melakukan intervensi baik itu intervensi langsung seperti pemberian bantuan langsung, maupun intervensi tidak langsung seperti regulasi sesuai dengan sasarannya. Pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan agar perusahaan dapat terus bertahan termasuk mendorong penyaluran kredit perbankan kepada pelaku usaha dan menurunkan harga BBM. Pemerintah juga telah menjaga agar tidak terjadi PHK massal dengan mempertahankan upah minimum dan mendorong dilakukannya perundingan bipartit untuk berbagai masalah ketenagakerjaan. Perusahaan dihimbau untuk tidak melakukan PHK dan diminta mengambil langkah-langkah seperti pengaturan kembali jam kerja (*defensive restructuring*) dan juga mengambil inisiatif untuk dapat melakukan

pelatihan kepada para pekerjanya sehingga bila keadaan membaik pekerja telah siap bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Produktivitas tenaga kerja yang dihitung dari PDB per pekerja telah menunjukkan peningkatan. Dengan harga konstan tahun 2000, PDB per pekerja di sektor pertanian meningkat dari Rp 6,1 juta per pekerja tahun 2004 menjadi Rp 6,7 juta per pekerja tahun 2008. Pada tahun yang sama, PDB per pekerja sektor industri dan jasa meningkat masing-masing dari Rp 42,5 juta per pekerja menjadi Rp 44,8 juta per pekerja dan Rp 14,5 juta per pekerja menjadi Rp 15,2 juta per pekerja. Meskipun meningkat, produktivitas per pekerja Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN untuk sektor pertanian, industri, dan jasa. Sementara itu, investasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik. Lapangan kerja formal yang tercipta melalui investasi baik investasi asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) menunjukkan peningkatan. Lapangan kerja yang tercipta dari realisasi investasi PMDN sekitar 86.900 orang pada tahun 2007 dan telah mencapai sekitar 67.300 orang tahun 2008. Untuk investasi PMA, lapangan kerja yang terserap meningkat dari sekitar 180.900 orang menjadi 246.000 orang. Dengan demikian total pekerja yang diserap dari investasi yang tercatat di BKPM selama tahun 2008 sekitar 313.000 orang. Jumlah ini memang masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penganggur terbuka, namun dari tahun ke tahun cenderung membaik.

Tabel 4
PDB/Pekerja (dalam Juta Rp/orang)
Berdasarkan Harga Konstan 2000

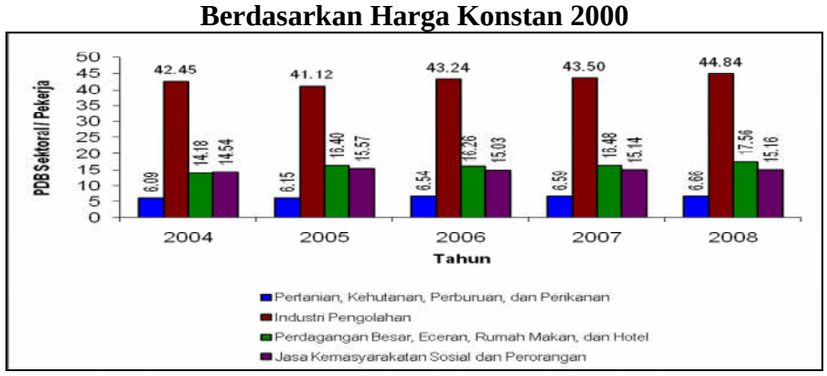

Sumber: PDB Nasional dan Sakernas dalam berbagai seri BPS (diolah kembali)

Jumlah penganggur sampai dengan Februari 2009 sebanyak 9,26 juta orang. Meskipun 50,5 persen penganggur berpendidikan SMP ke bawah, jumlah penganggur lulusan SLTA ke atas bertambah sebanyak 303.400 orang selama 2004-Februari 2009 atau mencapai 4,6 juta orang pada Februari 2009. TPT untuk penganggur berpendidikan SLTA ke atas adalah yang tertinggi, yaitu lulusan SMK sebesar 15,7 persen dan lulusan SMA sebesar 12,4 persen, lulusan diploma 15,4 persen dan lulusan universitas 12,9 persen. Sementara itu, TPT untuk lulusan SD ke bawah dan SMP hanya sebesar 4,5 persen dan 9,4 persen. Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya ketidaksesuaian antara bidang-bidang studi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan SMA/SMK ke atas dengan lapangan

kerja yang tersedia, kurang sesuainya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan dengan tuntutan lowongan pekerjaan yang diisi, atau para lulusan pendidikan tingkat atas/tinggi cenderung memilih-milih jenis pekerjaan yang disukainya termasuk mempertimbangkan gaji/upah yang sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, kebanyakan penganggur adalah penganggur usia muda. TPT usia muda (15-24 tahun) pada Februari 2009 mencapai 22,4 persen atau sekitar 4,7 juta orang, sementara TPT penganggur yang berada di luar kelompok usia tersebut hanya 4,9 persen.

Penanggulangan Kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, program-program dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu klaster pertama berisi program-program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pemenuhan kebutuhan dasar; klaster kedua berisi program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin; dan klaster ketiga adalah program-program perkuatan usaha mikro dan kecil.

Untuk program peningkatan akses masyarakat miskin kepada pemenuhan kebutuhan dasar, berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2008 dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti RASKIN (program beras untuk masyarakat miskin), Jamkesmas (program jaminan kesehatan masyarakat), beasiswa siswa miskin, BLT (bantuan langsung tunai) dan PKH (program keluarga harapan). Pada tahun 2008, melalui program RASKIN telah disalurkan beras bersubsidi sebanyak 3,4 juta ton bagi 19,1 juta rumah tangga sasaran. Sementara itu, pada tahun 2009, program RASKIN diarahkan bagi 18,5 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi 15,0 kg per rumah tangga sasaran selama 12 bulan. Program Jamkesmas yang dahulu dikenal dengan Askeskin pada tahun 2008 telah memberikan pelayanan bagi 76,4 juta masyarakat miskin. Pada tahun 2009 kegiatan ini diberikan kepada 76,4 juta masyarakat miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas III. Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin pada pendidikan, telah diberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin sebanyak 5.509.231 siswa/mahasiswa pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 akan diberikan *kepada* sebanyak 5.280.117 siswa/mahasiswa. Dengan adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2008, pemerintah juga telah meluncurkan program BLT kepada 19,01 juta rumah tangga sasaran dengan nilai sekitar Rp 14,1 triliun dengan tujuan untuk mencegah agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke dalam kemiskinan. Pada tahun 2009, program BLT hanya dialokasikan untuk jangka waktu 2 bulan kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi sekitar Rp 4,4 triliun, mengingat harga BBM telah dapat diturunkan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin khususnya rumah tangga sangat miskin kepada pendidikan dan kesehatan, pada tahun 2008 telah dilaksanakan perluasan uji coba PKH di 13 provinsi dengan sasaran 620.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM). Pada tahun 2009, jumlah sasaran PKH akan ditingkatkan menjadi 720.000 RTSM di 13 provinsi dengan fokus pada perbaikan beberapa komponen seperti Sistem Informasi Manajemen serta pelatihan-pelatihan bagi penyedia layanan. Kegiatan ini juga diupayakan untuk menarik anak-anak yang bekerja agar kembali bersekolah.

Program-program pemberdayaan masyarakat miskin telah dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dengan

dilaksanakannya program ini, diharapkan masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan mereka, merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mereka usulkan. Program ini terdiri dari PNPM Inti yang terdiri dari 5 kegiatan dan PNPM Penguatan yang terdiri dari program-program pengurangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Sampai dengan tahun 2008, telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Inti di 4.768 kecamatan dan pada tahun 2009 direncanakan akan diperluas menjadi 6.408 kecamatan.

Pada tahun 2009 ini juga mulai diupayakan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program-program sektoral yang berbasis pemberdayaan untuk masuk kedalam PNPM Penguatan. Salah satunya adalah kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3). Pada tahun 2009, melalui program PUAP diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan usaha agribisnis pertanian di 10.000 desa. Sementara itu, melalui penguatan ekonomi perdesaan diharapkan dapat tersalurkan bantuan permodalan kepada 200 LM3, terselenggaranya pengembangan hortikultura melalui LM3 dan bantuan sosial, pengembangan LM3 peternakan, serta terfasilitasinya 150 LM3 pengolahan dan pemasaran hasil. Sinkronisasi kegiatan sektor lain juga dilakukan melalui PNPM-Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Pemberdayaan Nelayan melalui Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala kecil, serta Pemberian Subsidi Benih dan Bantuan Langsung Penguatan Modal Pembudidayaan Ikan. Melalui kegiatan PEMP, sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di 9.515 desa pesisir; telah menghasilkan 342 buah Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang mampu mengalokasikan dana ekonomi produktif sebesar Rp.518,6 miliar. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan pesisir di 93 kabupaten/kota berhasil membentuk sebanyak 256 unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemberdayaan juga dilakukan bagi nelayan skala kecil dengan pengadaan kapal perikanan sebanyak 139 unit, pemasangan rumpon sebanyak 90 unit, bantuan mesin kapal perikanan sebanyak 574 unit, serta pembentukan 3.631 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di 31 provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 91.351 orang. Pada tahun 2009, kegiatan PNPM-KP akan terus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di 150 kab/kota.

Program perkuatan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui pelatihan fasilitator budaya/ motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro melalui koperasi untuk 1.000 koperasi, bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/KSP bagi 2.800 koperasi/LKM, pembinaan sentra-sentra produksi UMKM di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan pada 60 sentra/1.700 UMI, fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi di 4.300 UMI, serta penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha di 75.000 UMI/3.000 koperasi/LKM. Pada tahun 2009, kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilakukan dengan sasaran yang sama.

Selain program-program tersebut, terdapat berbagai program yang dilaksanakan untuk mengembangkan ekonomi lokal terutama di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin serta aksesibilitas kepada berbagai sumber daya produktif. Selain itu, perkuatan kepada kelembagaan di tingkat masyarakat serta kelembagaan ekonomi di tingkat lokal juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di tingkat lokal dapat dikembangkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Dengan program-program tersebut, kemiskinan dapat diturunkan dari 37,17 juta (16,6 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,4 persen) pada tahun 2008. Walaupun terjadi penurunan, namun angka ini masih jauh dari sasaran akhir RPJM 2004-2009 sebesar 8,2 persen. Dalam tahun 2009, dengan upaya keras dan serius tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun menjadi sebesar 12,0-14,0 persen. Hal ini terutama karena awal tahun 2009 merupakan tahun sulit bagi Indonesia karena dampak krisis finansial global sudah mulai terasa.

Selanjutnya, disamping hal-hal di atas, beberapa kondisi kemiskinan, yang masih dihadapi adalah:

1. Secara makro, kesenjangan tingkat kemiskinan antar provinsi masih besar. Sekitar separuh dari propinsi yang ada masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rataan nasional.
2. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada 2 kuintel terbawah terutama disebabkan oleh kesulitan menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi.
3. Konsentrasi penduduk miskin masih berada di perdesaan, meskipun demikian kemiskinan di perkotaan meningkat sehingga perlu diperhatikan.
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diharapkan dapat menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar, serta keterbatasan teknologi.

Menyadari kondisi di atas dan untuk mengantisipasi serta menghadapi berkembangnya dampak negatif dari krisis finansial global lebih jauh, pemerintah telah melakukan beberapa langkah cepat melalui: (i) Melakukan berbagai langkah untuk mengamankan likuiditas; perbankan dan kondisi moneter; (ii) Pencegahan pemutusan hubungan kerja dengan mengeluarkan SPB 4 menteri; (iii) Mempertahankan kapasitas produksi dan mendorong peningkatan; (iv) Mempertahankan permintaan dalam negeri (daya beli masyarakat), antara lain dengan melakukan penurunan harga BBM dan tarif dasar listrik agar harga-harga komoditas dan biaya transportasi menurun sehingga meringankan masyarakat terutama masyarakat miskin; serta (v) Mempersiapkan peningkatan intensitas berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan sasaran RKP 2009 dapat tetap dipertahankan, ataupun jika menurun tetap pada tingkat yang dapat dikelola dengan baik. Pertumbuhan diusahakan tetap dijaga pada tingkat 4,0 - 4,5 persen. Tingkat kemiskinan diusahakan tetap pada sasaran maksimal 14,0 persen. Pengangguran yang diantisipasi akan lebih tinggi dari sasaran yang semula 7-8 persen, namun masyarakat dalam jangka pendek dapat mengatasi kebutuhan hidupnya dan bersiap-siap untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi yang akan berubah.

Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Kondisi penduduk miskin bagi seluruh negara di dunia terutama pada negara berkembang merupakan fenomena kompleks yang bersifat multi dimensional. Kondisi ini dan masalah yang ditimbulkannya perlu ditangani secara serius, yang antara lain melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan sosial. Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial, namun kompleksitas permasalahan masih terus terjadi.

Saat ini, masih banyak terjadi permasalahan konvensional, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan bencana, serta permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan anak, lanjut usia, dan penyandang cacat. Selain itu, belum seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, di samping masih adanya kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, menyebabkan pelayanan tersebut belum mencapai kualitas yang diharapkan. Tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan berkemampuan dalam bidang kesejahteraan sosial, jumlahnya masih sangat terbatas.

Permasalahan yang berkaitan dengan bantuan sosial seperti pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terjadi karena pelaksanaan berbagai kegiatan bantuan sosial saat ini masih belum terintegrasi, dan target sasarannya belum optimal. Selain itu, kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) masih bersifat ujicoba (*pilot*), meskipun telah dilaksanakan sejak tahun 2007.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No. 11 tahun 2009 yang baru-baru ini disetujui oleh DPR belum mengemuka, dan belum disosialisasikan secara luas. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Undang-Undang tersebut perlu mempertimbangkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang lebih dahulu diterbitkan, maupun undang-undang lain yang selama ini menjadi dasar hukum pemberian pelayanan jaminan sosial, agar dalam pelaksanaannya selaras. Hingga saat ini, Undang-Undang SJSN No. 40 tahun 2004 tersebut belum dapat dioperasionalkan, karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaannya.

Tahun 2010 diperkirakan masih diwarnai dengan beberapa permasalahan sosial ekonomi sebagai imbas krisis global yang terjadi sebelumnya. Untuk itu diperlukan suatu upaya pembangunan dan pembenahan sistem perlindungan sosial yang layak bagi masyarakat. Dalam kelembagaan pelaksanaan jaminan sosial, sesuai amanat Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, diperlukan harmonisasi kelembagaan badan pelaksana jaminan sosial (BPJS) yang telah ada, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT

Asabri, dan PT Taspen. Oleh karena itu, dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengaturnya. Saat ini, anggota DJSN sudah dilantik namun belum berfungsi sebagaimana mestinya (*fully operational*).

Permasalahan lainnya yang terjadi dalam situasi krisis global adalah kondisi ekonomi yang menurun, yang mempersulit kehidupan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Hal ini terutama berdampak pada masyarakat miskin dan rentan, sehingga menjadi penyebab bertambahnya jumlah PMKS. Kondisi ini semakin dipersulit dengan seringnya kejadian bencana pada 5 tahun terakhir.

Kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, banjir, tidak mungkin diperkirakan lokasi dan waktunya secara tepat, termasuk dalam pendataan jumlah korbannya. Laporan kejadian bencana alam dari daerah/lokasi bencana masih sering terlambat, dan perhitungan jumlah korbannya seringkali kurang tepat dan akurat, sehingga menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penghitungan jumlah dan jenis bantuan yang diberikan. Terbatasnya anggaran penanggulangan bencana alam dibandingkan jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan, menyebabkan penanganan korban bencana alam belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun, pada tahun 2010 diupayakan terjaminnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana alam yang memadai khususnya di Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) pada tahun 2008, masih terdapat banyak masyarakat yang tergolong kategori PMKS. Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 11 juta jiwa dan 16,8 juta rumah tangga yang termasuk dalam PMKS. Khusus untuk data keluarga miskin, saat ini, BPS telah mengeluarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08), yang berjumlah 18,5 juta RTS.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007, terus dikembangkan hingga menjangkau 720.000 RTSM di 70 kabupaten dalam 13 provinsi pada tahun 2009. Pemantapan program difokuskan pada perbaikan beberapa komponen kegiatan termasuk penyiapan Sistem Informasi Manajemen serta pelatihan-pelatihan bagi penyedia layanan. Untuk pelaksanaan PKH pada tahun 2010, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang diperkirakan belum membaik sebagai dampak krisis ekonomi global, diperkirakan belum dapat dilakukan perluasan baik dari sisi wilayah maupun jumlah penerima bantuan. Pada tahun 2010, pelaksanaan program akan difokuskan pada pemantapan dan perbaikan semua komponen PKH.

Program-program perlindungan sosial di Indonesia dirasakan penting untuk dikaitkan dengan perubahan demografi yang terjadi (*aging population*) di masa mendatang. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000, pada tahun 2010 jumlah lanjut usia diperkirakan mencapai 19,07 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari jumlah seluruh penduduk. Seiring dengan meningkatnya umur harapan hidup (*life expectancy*) penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, di masa datang jumlah lanjut usia di Indonesia diperkirakan terus meningkat. Hal ini merupakan tantangan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan sosial khususnya bagi lanjut usia yang tergolong dalam kelompok penduduk miskin dan rentan agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Permasalahan dan tantangan pelaksanaan perlindungan sosial (termasuk di dalamnya jaminan dan bantuan sosial), seperti keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan terbatasnya sumber pendanaan, menyebabkan pelaksanaan sistem perlindungan sosial perlu diprioritaskan pada mereka yang paling membutuhkan atau mereka yang miskin dan rentan.

Tantangan lain dalam upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, ditujukan untuk meningkatkan cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, serta penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar perlu ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan unsur masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan penanganan yang lebih komprehensif, karena apabila diabaikan akan menyebabkan beban sosial yang lebih besar dan mempengaruhi pembangunan ekonomi.

B. Permasalahan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2008 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2009, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010 adalah pemulihan perekonomian. Untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional diperlukan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memerlukan peningkatan investasi, ekspor, menjaga konsumsi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah. Untuk menwujudkan pertumbuhan yang berkualitas diperlukan peran UMKM, peningkatan produktifitas kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian diperlukan kesinambungan fiskal, stabilitas harga dan ketahanan sektor keuangan.

Kesinambungan Fiskal. Permasalahan dan tantangan pokok yang diperkirakan masih akan dihadapi dalam pengelolaan APBN yang berlanjutan antara lain adalah:

- Di bidang penerimaan negara permasalah utama yang dihadapi dikelompokkan kedalam tiga kelompok utama yaitu : (1) Di bidang perpajakan, masalah utamanya adalah masih rendahnya *coverage ratio* penerimaan perpajakan. Kondisi ini disebabkan oleh: (a) belum optimalnya kualitas pelayanan perpajakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (b) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak; (c) masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat. (2) Di bidang kepabeanan dan cukai permasalahan utama yang dihadapi adalah (a) belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan dan cukai; (b) belum efektifnya sistem pengawasan kepabeanan dan cukai; (c) belum memadainya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai; (3) Di bidang PNBP permasalahan utama yang masih dihadapi ke depan adalah: (a) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi (migas) yang disebabkan terutama oleh faktor alam dan rendahnya investasi baru di sektor hulu migas; (b) masih tingginya kegiatan *illegal logging* yang mengakibatkan penurunan potensi PNBP kehutanan; serta (c) risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama karena faktor makro ekonomi;
- Terkait dengan BUMN pada tahun 2010 disebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa baik di pasar global maupun di pasar domestik yang berpotensi menurunkan kinerja bisnis BUMN. Tantangan bagi pembinaan BUMN adalah

menjaga agar tuntutan kontribusi BUMN bagi APBN dapat diseimbangkan dengan kebutuhan BUMN melakukan investasi bagi pengembangan usahanya. Tuntutan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara tugas BUMN sebagai penyedia layanan bagi masyarakat *(Public Service Obligation*/PSO) dengan tuntutan profitabilitas BUMN. Tantangan lainnya adalah masih luasnya rentang regulasi yang dihadapi BUMN dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, yang mencakup regulasi sektoral, regional, serta regulasi badan usaha membuat BUMN kurang leluasa dalam operasi bisnisnya. Bila tantangan ini dapat diselesaikan dengan baik maka pada tahun 2010 kontribusi BUMN bagi APBN dapat terjaga.

- Di bidang belanja negara, permasalahan utama yang diperkirakan akan dihadapi adalah: (a) masih terbatasnya ruang gerak fiskal; (b) Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (c) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara sebagai dampak dari belum sinkronnya dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dan belum adanya sinergi antara program nasional dengan kebijakan di daerah.

- Di bidang pembiayaan APBN, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (a) belum optimalnya pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara (SBN); (b) belum optimalnya pasar dan infrastruktur Surat Berharga Negara (SBN); (c) tingginya beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang pemerintah; (d) efisiensi dan efektivitas pemanfaatan utang luar negeri masih belum optimal yang berdampak terhadap meningkatnya beban *commitment fee* akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan *lender*.

- Di bidang perbendaharaan negara permasalahan utama yang dihadapi adalah: (a) penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbendaharaan; (b) masih adanya rekening pemerintah di berbagai Kementerian Negara/Lembaga yang keberadaannya tidak mencerminkan praktek yang sehat dalam pengelolaan keuangan negara; (c) pelaksanaan pengelolaan kas (*cash management*) yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan pemanfaatan *idle cash*; (d) masih adanya BUMN/BUMD serta Pemerintah Daerah yang kesulitan melunasi kewajibannya kepada pemerintah pusat atas pemberian penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman/SLA, Rekening Dana Investasi/RDI dan Rekening Pembangunan Daerah.

- Di bidang pengelolaan kekayaan negara, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (a) belum sempurnanya peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara, kekayaan yang dikuasai negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMH, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; (b) belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN) baik secara adminsitratif, hukum dan fisik; (c) belum optimalnya pemanfaatan BMN; (d) belum sepenuhnya terlaksana koordinasi yang baik antara Pengelola Barang Milik Negara (Departemen Keuangan) dengan Kementerian dan Lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara terkait optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan APBN yang berkelanjutan Tahun 2010 adalah mengembangkan kebijaksanaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (*prudent*), bertanggungjawab, dan transparan melalui: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan cara peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berkeadilan; (c) peningkatan ketahanan utang dengan tingkat likuiditas, solvabilitas dan daya tahan yang mantap; serta (d) pengelolaan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok. Permasalahan dan tantangan adalah meningkatkan penyediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan menyempurnakan sistem distribusi bahan pokok yang didukung oleh sistem transportasi yang memadai. Perkembangan harga bahan pokok yang berfluktuasi memerlukan pemantauan dan evaluasi secara cepat dan seksama, termasuk sistem distribusi dan stok bahan pokok pemerintah yang tersebar di berbagai daerah. Terjaganya harga bahan pokok diharapkan menurunkan laju inflasi.

Dengan menurunnya inflasi, diharapkan suku bunga perbankan dapat menurun dan menggerakkan kembali sektor produksi dan perdagangan. Meskipun demikian, luasnya wilayah negara kita yang berbentuk kepulauan dan masih terbatasnya prasarana (infrastruktur) dan sarana perhubungan, diperkirakan masih menjadi faktor penghambat penurunan inflasi sehingga setara dengan inflasi di negara-negara sekawasan. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi dan transportasi bahan pokok khususnya bahan pangan pokok, dapat mendorong kenaikan inflasi harga bahan pangan pokok yang mudah bergejolak (*volatile food prices*).

Ketahanan Sektor Keuangan. Pemantauan dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan eksternal tetap perlu dilakukan terutama dengan adanya tuntutan globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia yang saat ini kurang menguntungkan. Tuntutan globalisasi menghendaki adanya perbaikan-perbaikan fundamental pada industri perbankan agar mampu bersaing pada tataran regional maupun internasional. Perbaikan fundamental tersebut pada prinsipnya mencakup aspek: (i) penguatan kemampuan dan kapasitas bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, (ii) penguatan ketahanan dan kelembagaan serta sistem pengawasan perbankan, dan (iii) peningkatan daya saing industri perbankan.

Dengan melihat kondisi krisis yang ada, diperkirakan ketahanan sektor perbankan masih cukup memadai. Rasio CAR pada tahun 2009 diperkirakan sedikit turun dibandingkan tahun 2008. Meskipun rasio tersebut masih di atas ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut mencerminkan menurunnya kemampuan bank di dalam menghadapi risiko yang akan timbul.

Terkait dengan fungsi intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit pada tahun 2009 diperkirakan akan mencapai sekitar 15,0 persen per tahun. Namun demikian,

patut diwaspadai risiko kredit macet yang diperkirakan akan sedikit meningkat di tahun 2009 seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat. Di sisi lain, tingginya dana pihak ketiga yang berjangka waktu pendek menyulitkan perbankan di dalam menyalurkan dananya kepada sektor yang berjangka waktu panjang terutama sektor infrastruktur. Pada perbankan syariah, meskipun perkembangannya relatif cepat (tercermin dari tingginya FDR dan rendahnya NPF), namun dari sisi ukuran (*size*) masih sangat kecil yaitu asetnya hanya sebesar 2,1 persen dibandingkan dengan total bank umum pada akhir 2008. Hal inilah yang menjadi tantangan perbankan syariah di Indonesia.

Terkait dengan upaya-upaya memperkuat sektor riil, fungsi intermediasi diharapkan tetap terus berjalan. Penyaluran kredit untuk UMKM dan KUR diharapkan dapat meningkat sesuai dengan *target group* yang tepat. Kendala lain yang menjadi hambatan sektor keuangan terutama perbankan antara lain adalah dana yang dihimpun oleh sektor perbankan mayoritas berjangka waktu pendek, sehingga sukar bagi bank untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat jangka panjang. Sektor keuangan di Indonesia masih terpusat pada perbankan, sehingga perlu dikembangkan alternatif pembiayaan di luar industri perbankan.

Peran lembaga keuangan non bank (LKNB) termasuk pasar modal yang sesungguhnya diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi kegiatan perekonomian masyarakat masih perlu dioptimalkan. Hingga tahun 2007, dua pangsa industri LKNB terbesar (asuransi dan perusahaan pembiayaan) masih memusatkan penyaluran dananya pada deposito perbankan dan surat utang negara (SUN) dan SBI. Di samping itu, instrumen penggerak sektor riil seperti obligasi korporasi dan saham porsinya relatif masih cukup kecil, yaitu sekitar 6,0 persen dari total kapitalisasi pasar. Hal ini disebabkan oleh persepsi pelaku usaha terhadap risiko instrumen keuangan non konservatif masih tinggi serta masih terbatasnya jenis-jenis instrumen keuangan di dalam pasar modal dalam negeri. Selanjutnya, penggalangan dana melalui pasar modal yaitu penerbitan saham dan obligasi telah mencapai Rp553,4 triliun (Desember 2008) atau meningkat sebesar 19,9 persen (y-o-y).

Sementara itu, di sisi pembiayaan mikro, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menunjukkan kinerja yang membaik. Keunggulan BPR dibandingkan dengan Bank Umum adalah pelayanan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan kedekatan dengan nasabah melalui pelayanan langsung *(door to door)* dan pendekatan secara personal memperhatikan budaya setempat. Namun demikian, mengingat minimnya informasi tentang usaha yang dimiliki nasabah, maka terdapat kecenderungan bahwa BPR lebih fokus kepada nasabah yang *bankable.* Di sisi lembaga pembiayaan mikro yang berbentuk bukan bank bukan koperasi (B3K) masih terkendala di dalam hal aspek legalitas, pengaturan, pengawasan maupun infrastruktur yang mendukung antara lain seperti keberadaan Apex Bank maupun asuransi mikro

Memasuki 2010, meskipun tekanan krisis global diperkirakan akan sedikit mereda, namun terdapat beberapa hal yang patut diwaspadai. Terkait dengan ketahanan sektor keuangan, aspek supervisi dan *good governance* menjadi sangat penting di dalam mengelola risiko yang dihadapi. Tingginya risiko yang dihadapi

antara lain seperti ketidak-pastian global berdampak pada terhambatnya fungsi intermediasi sektor keuangan.

Berbagai kasus kejahatan keuangan baru bermunculan, melibatkan jumlah dana yang sangat besar serta menimbulkan korban yang luas. Hal ini secara langsung berdampak terhadap semakin maraknya modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dibutuhkannya upaya pengungkapan kejahatan keuangan dalam hal menelusuri aliran dana ataupun harta kekayaan dalam kaitannya dengan TPPU yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan tersebut.

Berkembangnya dan bervariasinya berbagai modus operandi TPPU, baik yang menggunakan lembaga keuangan bank maupun sarana lainnya, pemalsuan identitas dalam pemanfaatan fasilitas perbankan semakin marak dilakukan dalam rangka melakukan TPPU. Penyuapan dengan menggunakan uang atau instrumen keuangan lainnya, dan penyamaran pelaku pembalakan (*illegal logging*), merupakan modus operandi TPPU yang hingga saat ini terus terjadi. Modus-modus lain yang bermunculan adalah penjualan instrument efek terhadap nasabah bank, penggunaan dana nasabah bank untuk pemberian pinjaman pada pihak terafiliasi dengan jaminan fiktif, *ponzi scheme* (Skema berantai seperti pada kasus Bernard Lawrence Maddof di USA), *Repurchase Agreement Obligation* (REPO), REPO berantai, dan lain-lain yang semakin canggih dan lintas industri keuangan. Modus operandi TPPU lainnya yang juga sering dilakukan melalui Lembaga Keuangan Non Bank antara lain penyetoran tunai polis asuransi jiwa dalam jumlah besar yang dibayarkan sekaligus, serta tindakan terselubung pelarian dana-dana hasil perbuatan melawan hukum di Indonesia ke luar negeri kemudian kembali masuk ke dalam negeri melalui pasar modal dalam bentuk pembelian saham dan reksadana. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan TPPU tersebut, telah diusulkan amandemen UU TPPU yang diharapkan dapat disahkan pada tahun 2009.

Investasi. Ketidakpastian global merupakan tantangan terbesar yang masih akan dihadapi oleh semua negara. Investasi langsung dari mereka akan menurun di tahun 2009 dan kemungkinan masih berimbas sampai 2010. Investasi berpotensi menurun yang dipicu oleh terjadinya gejolak *subprime mortgage di AS* yang mengakibatkan anjloknya pasar modal dan mengeringnya likuiditas, sehingga menurunnya keuntungan perusahaan yang akan berdampak bagi berkurangnya atau berhentinya perluasan usaha di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Sementara itu, masalah domestik yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya tarik investasi antara lain adalah: (1) masih belum optimalnya harmonisasi dan simplifikasi berbagai peraturan yang berkaitan investasi baik di pusat maupun daerah, (2) masih belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur secara merata, (3) belum terpenuhinya kebutuhan energi termasuk pengembangan energi alternatif guna memenuhi kebutuhan investasi di berbagai industri dan (4) masih belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan investasi di berbagai sektor.

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi khususnya untuk sektor non migas adalah meningkatkan realisasi investasi PMDN dan PMA, tersebarnya realisasi investasi ke seluruh wilayah Indonesia dalam berbagai sektor, dan meningkatnya realisasi penyerapan tenaga kerjanya. Pada tahun 2010

diharapkan investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) meningkat 7,1 persen.

Perdagangan. Permasalahan terbesar yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2010 adalah dampak lanjutan dari melemahnya permintaan dunia yang diperkirakan akan berlangsung di tahun 2009, sebagai akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin tinggi dan harga komoditas primer pun diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2008, yang disebabkan oleh menurunnya permintaan dunia dan aktivitas produksi industri global.

Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pokok di bidang perdagangan luar negeri, antara lain adalah (1) penurunan permintaan terhadap produk ekspor manufaktur, karena krisis global menyebabkan penurunan daya beli dan pergeseran pola konsumsi dunia yang lebih ke arah kebutuhan primer; (2) meningkatnya hambatan non tarif di pasar tujuan ekspor, karena adanya kecenderungan di berbagai negara menerapkan kebijakan untuk mengamankan perekonomian sebagai respon dalam meredam dampak krisis global; (3) masih terbatasnya infrastruktur pendukung ekspor; serta (4) masih perlu dilanjutkannya penyederhanaan prosedur ekspor dan impor agar dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Di bidang perdagangan dalam negeri permasalahan pokok yang dihadapi adalah: (1) sistem distribusi barang antar wilayah terutama barang kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia saat ini masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga. Di beberapa wilayah Kawasan Timur Indonesia dan tempat terpencil lainnya terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana distribusi yang kurang memadai, kondisi geografis kepulauan, penyebaran sentra produksi yang tidak merata, terbatasnya sistem informasi dan masih banyaknya pungutan dalam pengangkutan barang dari produsen sampai ke konsumen sehingga berakibat meningkatnya biaya distribusi; (2) upaya perlindungan konsumen saat ini belum optimal dan masyarakat belum memiliki kesadaran penuh terhadap peranan penting perlindungan konsumen. Sebagai salah satu komponen strategis dalam upaya membangun pilar daya saing perdagangan yang kuat, sehat dan efisien, maka saat ini tantangan yang dihadapi adalah upaya peningkatan kapasitas di bidang kemetrologian, oleh karena masih terbatasnya ketersedian peralatan laboratorium kemetrologian baik di pusat maupun di daerah. Padahal, kemetrologian memiliki peranan besar dalam berbagai aktivitas perdagangan, dimana dengan meningkatnya kapasitas kemetrologian berarti dapat diperoleh kualitas pengukuran yang benar, tertelusur dan diakui kebenarannya dalam tingkat nasional, regional maupun internasional, sehingga dapat menciptakan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. (3) pelaksanaan persaingan usaha belum optimal karena antara lain: (i) masih perlu peningkatan hubungan kelembagaan antara komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dengan baik terutama dalam penanganan perkara; dan (ii) masih belum selesainya proses amandemen UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada bulan Januari 2009 mencapai 473.165 orang atau meningkat sebesar 8.04 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan pada bulan yang sama pada tahun 2008. Kemajuan pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut belum mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2009 daya saing pariwisata Indonesia berada pada peringkat 81 (World Economic Forum Report 2009), masih di bawah Singapura (peringkat 10), Malaysia (peringkat 32), Thailand (peringkat 39).

Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2009 mengalami penurunan yang disebabkan terutama oleh (1) destinasi pariwisata yang belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (2) informasi pariwisata di dalam dan luar negeri yang belum memadai; (3) Pengelolaan dan daya saing sumber daya pariwisata yang belum optimal; (4) koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra dan antarlembaga, pusat dan daerah dan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata belum optimal.

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan destinasi antara lain: (1) pengelolaan destinasi pariwisata (*Destination Management Organization*) yang belum optimal; (2) sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, ketersediaan hotel dan restoran, belum memadai; (3) peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pariwisata yang belum optimal disebabkan oleh belum membaiknya kondisi ekonomi, situasi keamanan, dan belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; dan (4) pembangunan pariwisata belum merata, terutama antara kawasan Indonesia Barat dan Timur.

Selanjutnya masalah untuk meningkatkan ketersediaan informasi dalam promosi pariwisata adalah (1) pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology*/ICT) sebagai sarana promosi belum optimal; (2) promosi destinasi pariwisata di dalam dan di luar negeri yang belum memadai; (3) kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal: dan (4) dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendukung promosi pariwisata daerah masih terbatas.

Sementara masalah yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya pariwisata adalah (1) kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata masih rendah; (2) ketersediaan data dan informasi kepariwisataan untuk mendukung penetapan kebijakan dan operasional kepariwisataan masih terbatas; dan (3) kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata belum optimal.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, sasaran pembangunan pariwisata pada tahun 2010 diarahkan pada: (1) meningkatnya daya saing destinasi pariwisata Indonesia di tingkat internasional; (2) meningkatnya ketersediaan informasi

pariwisata Indonesia di dalam dan di luar negeri sebagai sarana promosi dan (3) optimalnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata lintas sektor dan lintas daerah.

Dengan meningkatnya dayasaing, diharapkan pada tahun 2010 pariwisata mampu meningkatkan (a) kontribusi PDB pariwisata terhadap PDB nasional; (b) meningkatkan persentase kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional; (c) meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia; (d) meningkatkan perolehan devisa dari wisatawan mancanegara; (e) meningkatkan pengeluaran wisatawan nusantara.

Industri Manufaktur. Permasalahan yang dihadapi industri pengolahan adalah menurunnya permintaan terhadap barang-barang industri terutama di pasar global akibat krisis ekonomi global. Sehingga tantangan utama untuk menjaga pertumbuhan industri pada tahun 2010, di samping mengamankan pasar domestik dari limpahan produk-produk luar negeri yang masuk secara illegal, juga adalah kemampuan industri dalam negeri memasok kebutuhan pasar domestik tersebut dengan kualitas dan harga yang bersaing dengan produk impor. Dengan demikian tantangan pembinaan industri manufaktur adalah menciptakan iklim dan fasilitasi bagi industri agar mampu melaksanakan revitalisasi baik dalam bentuk pembaharuan teknologi produksi, keterkaitan dalam mata rantai pertambahan nilai, terutama industri-industri kecil dan menengah. Bila tantangan ini berhasil diselesaikan maka pada tahun 2010 industri pengolahan non-migas diproyeksikan tumbuh 3,9 persen.

Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Koperasi dan UMKM diperkirakan masih akan menghadapi permasalahan mendasar akibat krisis ekonomi global dan menghadapi tantangan yang cukup berat, sehingga pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan pada tahun 2010. Masalah-masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapi UMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan; masih panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; dan masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat. Tantangan utama ke depan adalah penyelesaian berbagai produk turunan dari UU yang terkait dengan UMKM dan koperasi.

Sementara itu, masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki tingkat kompetitif dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis Iptek, industri kreatif dan inovasi.

Skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya, sehingga pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui

koperasi. Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan.

Demikian pula, kualitas kerja UMKM yang kurang baik dapat memberikan dampak terhadap lingkungan kerja dan produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah perlunya pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan budaya kerja dan manajemen produksi bagi UMKM.

Selain itu, UMKM juga masih menghadapi kendala keterbatasan kepada akses pemasaran yang mempengaruhi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan usahanya. Oleh karena itu, tantangan ke depan UMKM adalah juga perlunya dikembangkan strategi dan jaringan pemasaran, serta penyediaan informasi peluang pasar.

Di samping itu, kinerja lembaga koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang berarti. Masih banyak UMKM yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang benar dalam berkoperasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan terkait dengan masalah koperasi adalah melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan pembinaan dan penyediaan tenaga penyuluh perkoperasian.

Perkembangan UMKM ke depan akan semakin bersifat lintas sektor atau multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM memerlukan upaya yang dilakukan secara sistematis/melembaga dan terarah. Di samping itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM juga akan menghadapi tantangan untuk berperan lebih besar dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas usaha mikro dan kecil yang didukung oleh lembaga koperasi;
2. Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna dan industri kreatif bagi koperasi dan UMKM;
3. Meningkatnya kemampuan wirausaha koperasi dan UMKM;
4. Meningkatnya produktivitas dan ekspor UKM yang didukung oleh kelembagaan usaha yang semakin kuat;
5. Meningkatnya kualitas lembaga koperasi, kapasitas SDM pengelola koperasi dan pemahaman perkoperasian bagi anggotanya.

Ketenagakerjaan. Angka pengangguran terbuka Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 8,14 persen dari total angkatan kerja. Daya serap pekerja formal setiap tahun masih belum mampu menampung penganggur yang menginginkan pekerjaan formal. Hambatan dalam berinvestasi juga masih mewarnai perkembangan pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan sudah memperoleh prioritas dalam pembangunan, meskipun masih perlu ditingkatkan. Walaupun produktivitas tenaga kerja telah meningkat selama 4 tahun terakhir, namun bila dibandingkan dengan rata-rata produktivitas di negara lain masih sangat rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah sangat mempengaruhi daya saing nasional. Posisi daya saing Indonesia

menurut IMD *World Competitiveness Yearbook* 2008 berada di urutan ke 51 dari 55 negara.

Dengan jumlah penganggur yang masih sangat banyak, upaya penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya menjadi tantangan yang berat. Penciptaan lapangan kerja salah satunya dapat diciptakan melalui investasi, dari investasi kecil sampai investasi besar. Hambatan dalam melakukan usaha masih menjadi kendala yang dirasakan oleh para pengusaha, meskipun Pemerintah sudah banyak memperbaiki peraturan melalui beberapa inpres, seperti Inpres Perbaikan Iklim Investasi, Pengembangan Sektor Riil dan UMKM, dan paket kebijakan ekonomi, yang ketiganya tidak lain adalah untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Industri padat pekerja yang berorientasi ekspor telah banyak menghasilkan devisa bagi negara dan banyak menciptakan lapangan kerja, namun industri ini sedang mengalami hambatan akibat krisis keuangan AS. Selain ekspor non migas, remitansi dari pekerja di luar negeri (TKI) yang masuk ke Indonesia (*inflow workers remittances*) juga telah menghasilkan devisa yang besar. Remitansi ini terus meningkat mencapai 3,9 miliar USD (data sampai dengan Juli 2008) yang 82 persennya dikirim menggunakan jalur non-bank. Pengiriman melalui jalur non-bank sering menimbulkan permasalahan tersendiri dan menimbulkan kerugian yang besar bagi TKI. Di sisi lain, remitansi besar sering mendapat tanggapan yang kurang menyenangkan dari masyarakat yang sangat perduli terhadap pekerja migran. Isu yang kemudian muncul adalah bahwa Pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Permasalahan TKI juga erat hubungannya dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah.

Tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang masih rendah menyebabkan biaya total tenaga kerja menjadi relatif tinggi. Perkembangan alamiah dan intervensi pemerintah telah membuat tenaga kerja untuk tingkat kecakapan yang dimiliki sekarang menjadi tidak murah lagi. Kenaikan upah sebagai akibat aspirasi pekerja untuk memperoleh tingkat penghidupan yang lebih baik dan peningkatan upah minimum setiap tahun tanpa diimbangi dengan produktivitas merupakan persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha.

Sasaran pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010 adalah (1) meningkatnya penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan investasi kecil hinga besar dan melalui program-program APBN; (2) meningkatnya kualitas lulusan lembaga pelatihan kerja yang berbasis pada kompetensi tenaga kerja; (3) meningkatnya jaminan sosial pekerja; (4) meningkatnya perundingan bipartit untuk mencapai kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja; dan (5) meningkatnya perlindungan pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Penanggulangan Kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi dalam penurunan angka kemiskinan semakin berat dengan semakin rendahnya tingkat penurunan kemiskinan yang ada. Dengan kata lain, upaya penurunan kemiskinan semakin berat, pertama karena masyarakat miskin yang ada adalah yang memiliki berbagai hambatan relatif lebih sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesulitan timbul baik karena kapasitas produksi yang terbatas, maupun karena akses mereka terhadap berbagai sumberdaya produktif jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Masalah kedua, pemenuhan kebutuhan dasar untuk mereka juga lebih

sulit, disebabkan oleh kesulitan menjangkau. Dengan semakin sedikitnya jumlah masyarakat miskin secara relatif, serta lokasi mereka juga semakin menyebar (*scattered*), sehingga semakin sulit untuk membantu mereka tetap memelihara tingkat kebutuhan minimum tersebut, karena: (i) kapasitas mereka untuk memelihara pemenuhan kebutuhan tersebut relatif rendah; (ii) karena pendapatannya tidak cukup stabil untuk memelihara tingkat pemenuhan kebutuhan, serta memanfatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Permasalahan ketiga yang dihadapi adalah semakin besar jumlah masyarakat yang pada tingkat rentan (*vulnerable*) yaitu pada tingkat hampir miskin. Kelompok masyarakat inilah yang memiliki fluktuasi untuk bergerak diantara garis kemiskinan, dan paling rentan terhadap berbagai hal yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.

Selain jumlah dan akses, permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari masih rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan perumahan terutama pada 2 kuantil terbawah. Hal ini disebabkan karena kesulitan menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan, ketidaktersediaan sarana dan prasarana maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Permasalahan kemiskinan juga ditandai dengan terkonsentrasinya penduduk miskin di perdesaan termasuk daerah pesisir yang sangat bertumpu pada kegiatan perekonomian perdesaan yang masih memiliki kelemahan dalam hal kelembagaan ekonomi perdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi perdesaan.

Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, permasalahan yang dihadapi adalah kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Selain itu, aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar masih rendah dan perlu ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan masyarakat. Kerentanan masyarakat miskin juga dikaitkan dengan kejadian bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Di lain pihak, anggaran untuk penanganan bencana dibandingkan dengan kerugian serta jumlah korban yang diakibatkannya tidak sebanding sehingga penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dengan permasalahan tersebut di atas, maka upaya penanggulangan kemiskinan meskipun jumlah dana dan program layanannya semakin lengkap dan meluas cakupannya, namun faktor efektivitas pelaksanaan memegang peran yang sangat penting. Dalam rangka meningkatkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan efektivitasnya, beberapa masalah yang masih dihadapi adalah:

a. Kebijakan perlindungan sosial belum terjabarkan secara lengkap, sesuai dengan UU SJSN dan cakupan perlindungan sosial masih belum terpetakan dan tertata dengan baik.
b. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif karena:
    i. Keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan masih rendah.
    ii. Keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait masih rendah.
    iii. Fokus dan efektivitas program-program masih rendah:
        a). Data dan identifikasi (rumah tangga dan wilayah) masih belum sama.

b). Koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi baik di pusat maupun di daerah masih lemah: pemahaman fungsi dan tugas, pemahaman program, kejelasan tupoksi koordinasi.

c. Kapasitas pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan ke sasaran yang tepat masih rendah, termasuk didalamnya adalah kapasitas dalam mendorong perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.

d. Pembangunan berbagai bidang/sektor di daerah masih perlu ditingkatkan fokus dan keterpaduannya pada pembangunan wilayah dan manusianya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, dan bukan membangun sektor-sektor di daerah.

Upaya penurunan kemiskinan dengan segala keberhasilan dan kekurangan yang masih ada, selalu menghadapi tantangan dalam perkembangannya. Tantangan tidak saja dari belum berhasilnya target sasaran yang dicapai baik dari sisi kuantitatif pencapaian penurunan kemiskinan, namun juga belum lengkapnya penjabaran dan pencapaian berbagai hak dasar yang sudah diadopsi di dalam Amandemen UUD 1945 dan dituangkan di dalam RPJM 2004-2009. Dalam perjalananannya, kebijakan penurunan kemiskinan juga masih mengalami tantangan baru yang berasal dari tuntutan pemenuhan kebutuhan yang semakin berkembang kualitasnya dengan semakin membaiknya standar kehidupan masyarakat. Tantangan lain datang dari desentralisasi yang telah melahirkan otonomi daerah pada 501 kabupaten/kota. Selain itu, demokratisasi dengan berkembangnya jumlah partai dan pola hubungan pemerintah dan lembaga legislatif telah melahirkan keseimbangan baru dalam hubungan birokrasi dan politik, yang semakin memberi warna baru dalam proses pengambilan keputusan di setiap tingkat pembangunan. Selanjutnya, tantangan datang juga dari dampak perubahan iklim terhadap masyarakat miskin serta dampak lanjut dari proses globalisasi yang membuka peluang dan tantangan yang lebih besar bagi daerah dan secara maksimal terhadap pasar global dengan segala akibatnya. Perubahan demografi dengan struktur penduduk yang menua juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan sosial khususnya untuk kelompok miskin dan rentan.

Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sasaran pembangunan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah PMKS, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan akses bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial serta pelayanan sosial dasar lainnya;
2. Meningkatnya jumlah dan jenis bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
3. Meningkatnya peran TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Dimanfaatkannya berbagai hasil penelitian dan pengkajian bidang kesejahteraan sosial dalam penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatnya upaya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kearifan lokal; dan
6. Meningkatnya keserasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak sosial dasar kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2010 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 4,0 – 4,5 persen dan laju inflasi sebesar 5,5 persen. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,0 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 12,0 – 13,5 persen pada tahun 2010. Sementara itu, pertumbuhan ekspor barang dan jasa diperkirakan sebesar 5,0 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 7,1 persen.

Data dan Informasi Statistik. Keberhasilan pembangunan nasional (dari tingkat nasional sampai pembangunan tingkat administrasi terkecil) tidak bisa dilepaskan dari data dan informasi statistik. Untuk itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan statistik terutama pada tahap pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data statistik, serta penyajian data wilayah administrasi terkecil, seperti Sensus Penduduk.

Pada tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan pendahuluan yang menunjang kegiatan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang menghasilkan, antara lain, Peta Wilayah SP2010, data Podes SP2010, dan Peta Dasar Wilayah Kerja Stat 2008-Pemetaan SP2010. Kegiatan–kegiatan pada tahun 2009 yang akan dilaksanakan meliputi : Gladi Bersih SP2010, Publisitas SP2010, Klasifikasi Desa Urban-Rural, Pemetaan wilayah Tahap II, Penghitungan Penduduk dan Rumah tangga untuk Penimbang Survei Kependudukan 2009.

Terkait dengan kegiatan rutin, pada tahun 2008 telah dilakukan, antara lain: (i) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menghasilkan data rinci mengenai konsumsi/pengeluaran rumah tangga, data rinci mengenai social budaya dan pendidikan, serta data statistik secara umum tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga; (ii) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dengan capaian berupa data struktur ketenagakerjaan, Pengangguran dan Setengah Pengangguran, publikasi keadaan pekerja/karyawan di Indonesia; dan (iii) survei rutin lainnya, seperti, Survei Statistik Harga Konsumen, Survei Industri Besar Sedang, Penyusunan PDB dan PDRB. Selanjutnya, pada tahun 2009 tetap terus melakukan kegiatan rutin tahun 2008.

Permasalahan yang dihadapi dalam data dan informasi statistik adalah belum sempurnanya penyediaan data dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional, yang disebabkan oleh, antara lain: Pertama, belum sepenuhnya dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi, terutama terkait dengan pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi. Kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama terkait dengan adanya fenomena pesatnya pembentukan wilayah administrasi baru baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Ketiga, masih belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Terkait hal tersebut, sasaran tahun 2010 bidang data dan informasi statistik adalah: (1) Meningkatnya daya guna statistik melalui penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan menjangkau kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah di seluruh bidang pembangunan, yaitu kependudukan, politik, hukum dan penyelenggaraan negara, pertahanan dan keamanan, sosial dan

budaya, ekonomi, agama, daerah, infrastuktur, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Terwujudnya sumberdaya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan keadministrasian; (3) Meningkatnya fungsi Sistem Statistik Nasional melalui peningkatan kemampuan sistem informasi, pengolahan, dan diseminasi; (4) Meningkatnya koordinasi antar instansi di bidang stasistik untuk menghindari duplikasi data yang serupa; (5) Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan statistik.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan tersebut di atas dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal yang akan kita hadapi ke depan, maka arah kebijakan di bidang ekonomi yang akan ditempuh pada tahun 2010 adalah: pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Perkuatan ekonomi diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, efektifitas pengeluaran pemerintah serta ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata. Dari sisi produksi, peningkatan industri pengolahan non migas diupayakan melalui revitalisasi industri sedangkan peningkatan produksi sektor pertanian dilakukan melalui revitalisasi pertanian. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kebijakan diarahkan untuk menggerakkan sektor UMKM, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perkuatan lembaga keuangan. Di sisi kebijakan fiskal, kebijakan diupayakan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan. Di sisi kebijakan moneter, kebijakan diarahkan untuk menjaga laju inflasi dan nilai tukar Rupiah. Perkuatan lembaga keuangan diarahkan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan.

Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, perdagangan (luar negeri dan dalam negeri), pariwisata, revitalisasi industri manufaktur, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Investasi. Kebijakan investasi akan difokuskan pada peningkatan daya tarik investasi.

Fokus Peningkatan Daya Tarik Investasi didukung oleh: (1) Pembinaan hukum dan organisasi; (2) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan prasarana dan sarana; (3) Peningkatan kapasitas Kelembagaan Investasi; (4) Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal; (5) Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan yang Terkait dengan pengembangan Penanaman Modal; (6) Pengendalian dan pelaksanan penanaman modal; (7) Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; (8) Peningkatan fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dengan UMKM; (9) Peningkatan Kerjasama Bilateral, Regional,

Multilateral di Bidang Investasi; (10) Peningkatan promosi investasi di dalam negeri; (11) Peningkatan promosi Investasi di luar negeri; dan (12) Pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Perdagangan Luar Negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri ke depan akan difokuskan pada penguatan daya saing ekspor yang dititikberatkan pada upaya untuk peningkatan diplomasi perdagangan, pengembangan ekspor, dan peningkatan fasilitasi perdagangan. Fokus Penguatan Daya Saing Ekspor akan didukung dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: (1) Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai fora internasional; (2) Peningkatan koordinasi penanganan isu-isu perdagangan internasional; (3) Penyelenggaraan Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional; (4) Penyelenggaraan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC); (5) pengembangan promosi dagang; (6) Pelaksanaan pengamatan pasar (Market Intelligence); (7) Pengembangan ekspor daerah; (8) Pembentukan dan pengembangan *National Single Window* dan *ASEAN Single Window*; (9) Pembinaan ekspor, peningkatan daya saing, dan pengendalian impor; (10) Peningkatan kualitas dan desain produk ekspor dalam rangka ekonomi kreatif (IDP); (11) Pengadaan peralatan laboratorium; dan (12) Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

Perdagangan Dalam Negeri. Sedangkan kebijakan perdagangan dalam negeri akan difokuskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang akan dititikberatkan pada pengembangan sarana perdagangan dan peningkatan pengamanan pasar domestik. Fokus tersebut akan didukung dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: (1) Pembinaan pasar dan distribusi; (2) Pengembangan Sistem Resi Gudang; (3) Penegakan hukum persaingan usaha; (4) Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha; (5) Penyelenggaraan Monitoring dugaan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat; (6) Peningkatan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa; (7) Peningkatan Pengawasan Kemetrologian; (8) Peningkatan dan pengembangan kelembagaan kemeterologian; (9) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PDN) daerah; (10) Pengembangan perdagangan dalam negeri (11) Pembinaan dan pengembangan usaha, lembaga perdagangan, dan pendaftaran perusahaan dan (12) Penyelenggaraan Identifikasi pemeriksaan dan penyidikan perdagangan berjangka komoditi

Pariwisata. Kebijakan pariwisata akan difokuskan pada peningkatan intensitas kepariwisataan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan serta tetap memperhatikan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Fokus Peningkatan Intensitas Kepariwisataan, akan didukung dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: (1) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata; (2) Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri; (3) Peningkatan promosi pariwisata dalam negeri; (4) Pengembangan *Meeting, Incentive, Covention, and Exhibition*; (5) Pengembangan informasi pasar wisata; (6) Pendukungan pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata daerah; (7) Optimalisasi koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata; (8) Fasilitasi pengembangan

destinasi pariwisata unggulan; (9) Pendukungan pengembangan daya tarik pariwisata daerah; (10) Perintisan Pengembangan destinasi pariwisata; (11) Pengembangan usaha dan investasi pariwisata; (12) Pengembangan standarisasi pariwisata; (13) Pemberdayaan Masyarakat di destinasi pariwisata; (14) Optimalisasi koordinasi pembangunan pariwisata; (15) Pengembangan kebijakan SDM Kebudayaan dan Pariwisata nasional; (16) Peningkatan litbang pariwisata; (17) Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan daerah; (18) Optimalisasi koordinasi kemitraan kebudayaan dan pariwisata dan (19) Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM kebudayaan dan kepariwisataan.

Industri Manufaktur. Pembangunan industri diarahkan untuk memantapkan revitalisasi industri manufaktur dengan melanjutkan upaya restrukturisasi teknologi proses dan teknologi energi bagi industri potensial ekspor, memberikan fasilitasi bagi industri prioritas, mendorong penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan jumlah industri yang wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan fasilitas pembinaan industri oleh daerah melalui skema "*one village one product (OVOP)*".

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Berdasarkan permasalahan dan tantangan serta sasaran tersebut diatas, maka kebijakan umum pada tahun 2010 diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui: (1) Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan; dan (2) Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif.

Dalam rangka mendukung peningkatan peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan usaha mikro difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin melalui kelembagaan koperasi, arah kebijakannya meliputi: (1) menyediakan dana untuk kegiatan produktif usaha skala mikro dan kecil dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional; (2) memfasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro dan kecil melalui koperasi; dan (3) Melakukan revitalisasi fungsi kelembagaan perkoperasian.

Dalam kaitannya dengan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif, arah kebijakannya meliputi: (1) Memfasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi dan pengembangan UKM industri kreatif; (2) Mengembangkan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM; (3) Meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan dengan mendorong pemanfaatan skim penjaminan kredit dan kredit usaha rakyat (KUR), khususnya untuk investasi produktif di sektor agribisnis dan industri. Seiring dengan peningkatan akses tersebut, pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk meningkatkan wirausaha yang tangguh dan kompetitif, serta berwawasan iptek dan inovasi.

Arah kebijakan penting lainnya yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, meliputi: (1) Menyelesaikan penyusunan turunan peraturan pelaksanaan RUU tentang UMKM dan koperasi; (2) Meningkatkan formalisasi badan usaha UMKM; (3) memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi yang menghambat usaha dan investasi pada sektor maupun di daerah.

Sementara itu, arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, meliputi: (1) Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian perkoperasian; dan (2) Menyelenggarakan pelatihan dan pemasyarakatan praktek-praktek koperasi terbaik, sekaligus melakukan bimbingan teknis penerapan akuntabilitas koperasi.

Ketenagakerjaan. Dalam rangka mencapai sasaran prioritas bidang ekonomi, terdapat 2 (dua) fokus arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran di tahun 2010 yaitu (1) Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja dan (2) Perlindungan Pekerja Migran (TKI) dan Penguatan Kelembagaan.

Arah Kebijakan Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja meliputi:

1. Memperbaiki iklim usaha dalam rangka rangka memperluas kesempatan kerja dengan menghilangkan hambatan dalam investasi;
2. Memperkuat sektor perbankan melalui penguatan peraturan dan pengembangan sistem penjaminan, serta meningkatkan akses UKM kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
3. Mendorong lebih banyak industri yang banyak menyerap tenaga kerja;
4. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja serta mengembangkan standar kompetensi kerja dengan mempertimbangkan berbagai jenis profesi yang berkembang;
5. Mengembangkan informasi pasar tenaga kerja dengan mengembangkan dan membangun pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan yang mengadopsi “model bisnis” yang kompetitif;
6. Membangun sistem hubungan industrial yang terdesentralisasi;
7. Mengkonsolidasikan program-program pembangunan untuk lebih memperluas lapangan kerja.

Arah Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran (TKI) dan Penguatan Kelembagaan meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan pekerja migran (TKI) dengan mempermudah dalam pengurusan dokumen perpindahan bekerja ke luar negeri;
2. Memberikan akses informasi pasar kerja yang terbuka di luar negeri;
3. Memperkuat kelembagaan dan regulasi untuk memperoleh kredit perbankan dan pengiriman remitansi;
4. Mempersiapkan TKI yang kurang terampil agar memperoleh kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri;
5. Memberikan bentuk perlindungan yang maksimal bagi TKI.

Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang ada sebagaimana diuraikan di atas, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah: (i) Meningkatkan keterkaitan pertumbuhan-penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan/penurunan kemiskinan; (ii) Memperluas cakupan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai amanat UUD 45 dan hak dasar masyarakat melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar serta peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; (iii) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan

kemiskinan di daerah melalui kegiatan usaha mikro dan kecil serta kegiatan perekonomian perdesaan.

Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan kondisi sosial yang ada saat ini dan perkembangannya yang menjadi tantangan ke depan, arah kebijakan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: Meningkatkan aksesibilitas PMKS dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan bantuan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial serta pelayanan sosial dasar lainnya:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas;
2. Memberikan perlindungan sosial bagi rumah tangga sangat miskin melalui bantuan tunai bersyarat;
3. Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;
4. Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;
5. Mendorong dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap anak, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya;
6. Meningkatkan peran TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
7. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kearifan lokal;
8. Mempersiapkan penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Mempersiapkan peralihan PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Meningkatkan keserasian kebijakan dan pelaksanaan agenda kesejahteraan rakyat; dan
11. Mengembangkan jaringan kerja nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Stabilitas ekonomi sebagai prasyarat pemulihan ekonomi diupayakan melalui pengelolaan APBN yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan ketahanan sektor keuangan.

Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan. Pada tahun 2010, kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Keberlanjutan ketahanan fiskal diupayakan melalui penurunan stok utang pemerintah relatif terhadap PDB dengan meningkatkan penerimaan negara utamanya penerimaan yang berasal dari perpajakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok, diarahkan pada peningkatan dan pemantapan koordinasi otoritas fiskal, moneter dan keuangan serta sektor riil (produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor), koordinasi kebijakan kerjasama luar negeri dan koordinasi kebijakan percepatan penyediaan

infrastruktur serta meningkatkan kapasitas dan peran aktif para pemangku kepentingan daerah dalam pengendalian stabilitas ekonomi di tingkat lokal/regional. Melalui kebijakan tersebut diharapkan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah dapat terjaga. Selain itu, fokus stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok ini akan didukung oleh upaya Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi, Pengembangan pasar lelang daerah, dan pemberdayaan perlindungan konsumen.

Ketahanan Sektor Keuangan. Pada tahun 2010 arah kebijakan yang terkait dengan stabilitas ekonomi adalah meningkatkan ketahanan sektor keuangan melalui:

1. Pemantapan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan pasar modal serta lembaga keuangan termasuk kerjasama dengan otoritas pasar modal dan lembaga jasa keuangan di negara lain;
2. Penerapan standar internasional terutama untuk pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan dan pengembangan sistem peringatan dini sektor keuangan;
3. Perkuatan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan;
4. Perkuatan perlindungan bagi konsumen/investor lembaga jasa keuangan termasuk pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga jasa keuangan

Seiring dengan upaya perkuatan ketahanan sektor keuangan, arah kebijakan yang terkait dengan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melakukan percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan (LJK) kepada masyarakat miskin melalui:

1. Melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan bukan bank termasuk pengembangan sistem keuangan syariah;
2. Memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor UMKM;
3. Mengembangkan infrastruktur pendukung lembaga jasa keuangan

Data dan Informasi Statistik. Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan yang merupakan prioritas penyelenggaraan program-program pembangunan tahun 2010 tetap melanjutkan arah kebijakan tahun sebelumnya, yaang difokuskan pada:

- Pembinaan, pembuatan, dan pengembangan sistem data statistik dan informasi, melalui berbagai kegiatan survei, studi, dan kompilasi produk administrasi, seperti SUSENAS, SAKERNAS, Survei-survei harga, Survei bidang industri, pertanian, transportasi, dan lain-lain;
- Pembinaan Statistik dan Sensus, melalui kegiatan SP2010, yang dapat memberikan gambaran secara faktual mengenai kondisi demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan sehingga dimungkinkan untuk dianalisa struktur dan permasalahan kependudukan.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010

PRIORITAS BIDANG: PEMULIHAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

I. INVESTASI

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 1. Peningkatan Daya Tarik Investasi – Prioritas 4						
(1)	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Terbangunnya satu Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) secara bertahap di 33 provinsi & 40 kabupaten/kota dan 16 instansi terkait (Tahap II). 2. Pengadaan sarana untuk kegiatan 20 PTSP di daerah.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKPM	54,8
(2)	0032	Pembinaan Hukum dan Organisasi	Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum di bidang penanaman modal sebanyak 18 kasus.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKPM	6,0
(3)	0062	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Investasi	Diklat Penanaman Modal terhadap 2.500 orang aparatur pusat dan daerah; Tersedianya 9 jenis modul Diklat Penanaman Modal; Pengembangan tenaga kediklatan terhadap 9 orang Instruktur Widyaiswara dan 20 orang tenaga kediklatan.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKPM	9,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(4)	6154	Penyederhanaan Prosedur, Peningkatan Pelayanan dan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan operasional kelembagaan 3 UPIT di Riau, Manado, dan Kendal termasuk penyediaan prasarana dan sarana 3 UPIT. 2. Tersusunnya referensi/panduan penerbitan izin usaha dari 12 negara dan 12 daerah; Buku standar verifikasi *masterlist* bahan baku untuk 5 sektor (industri plastik, logam, makanan, gula dan minuman); Sosialisasi tata cara dan prosedur penanaman modal di 4 daerah, kaji ulang peningkatan pelayanan pemberian fasilitas di 2 sektor teknis (pertambangan dan perpajakan).	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKPM	18,1
(5)	6166	Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan yang Terkait dengan Pengembangan Penanaman Modal	Review terhadap 17 peraturan yang terkait dengan penanaman modal,; Penyusunan 5 Peraturan Presiden/Kepala BKPM; Sosialisasi kebijakan penanaman modal di 33 daerah dan 20 negara; Terselenggaranya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional/KP3MR di 5 daerah, KP3MN 1 kali dan workshop di 4 daerah.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPKM	16,4
(6)	6179	Pengendalian dan Pelaksanan Penanaman Modal	1. Percepatan realisasi investasi terhadap 13.000 perusahaan PMA dan PMDN; Operasionalisasi gugus tugas (*task force*) dlm rangka penyelesaian masalah investasi di 33 provinsi dan 6 negara; seleksi dan pemberian penghargaan untuk 3 kabupaten 3 kota terbaik. 2. Pelaksanaan tugas investasi di daerah melalui fungsi pembagian tugas dekonsentrasi ke 33 provinsi dalam rangka pengawasan, pemantauan, dan fasilitasi penyelesaian masalah investasi di kabupaten/kota serta pembinaan terhadap perusahaan di kabupaten/kota.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BKPM	21,9
(7)	6158	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	1. *Masterplan* perencanaan pengembangan investasi bagi 6 sektor industri (logam dasar, petrokimia, makanan dan minuman, otomotif, kimia, pulp dan kertas yang terintegrasi). 2. Prakelayakan peluang usaha pengembangan bagi 4 sektor industri (pangan berbasis pertanian skala	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BKPM	18,6

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			besar, industri rumput laut, industri bahan bakar nabati, dan industri pendukung). 3. Konsep pengembangan investasi di bidang logistik dan wisata bahari/tirta. 4. Pemetaan potensi di 4 daerah dalam rangka kebijakan diversifikasi energi.			
(8)	6168	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar UMKM	Terlaksananya 11 temu investasi di dalam negeri dan 10 di luar negeri.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPM	3,0
(9)	6175	Peningkatan Promosi Investasi Di Dalam Negeri	Gelar Potensi Investasi Daerah (2 kali); Indonesia Investment Expo sebanyak 15 kali; Talk show investasi di dalam negeri (6 kali); Seminar nasional investasi di dalam negeri (2 kali); Pameran investasi di dalam negeri (5 di DKI, 4 di luar DKI); penyusunan *information kit* dalam 5 bahasa (Inggris, Mandarin, Jepang, Arab dan Indonesia).	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPM	17,5
(10)	6174	Peningkatan Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral di Bidang Investasi	Peningkatan partisipasi aktif pada kerja sama Sub Regional, ASEAN, serta APEC; dan penyusunan analisis dan database penanaman modal dari Indonesia ke luar negeri (FDI *Outflow*).	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPM	5,0
(11)	6177	Peningkatan Promosi Investasi Terintegrasi Di Luar Negeri	*Marketing Intelligence* (MI) di 15 negara; Pemberdayaan Perwakilan Promosi Investasi di Luar Negeri di 5 negara; Marketing Investasi Indonesia (MII) di 5 negara; Promosi Investasi Indonesia melalui media internasional; dan Persiapan pendirian Pusat Promosi Terpadu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (IPO).	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPM	63,0
(12)	6178	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Sosialisasi di 6 daerah dan 4 negara dalam rangka pengembangan dan promosi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BKPM	1,2

II.

III.PERDAGANGAN

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 2. Penguatan Daya Saing Ekspor – Prioritas 4						
(1)	7461	Peningkatan Partsipasi Aktif Dalam Perundingan Di Berbagai Fora Internasional	Partisipasi aktif dalam 150 sidang internasional (termasuk penyelenggaraan sidang) baik yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral; Sosialisasi hasil perundingan di 10 daerah.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Departemen Perdagangan	18,0
(2)	7462	Penyelenggaraan Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional	1. Tersedianya 1 paket rekomendasi untuk memperluas kerjasama perdagangan internasional; Terlaksananya 30 perundingan perdagangan internasional; 1 paket analisa dampak hasil perjanjian internasional. 2. Terselenggaranya Tim Koordinasi Bidang Jasa (TKBJ).	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Departemen Perdagangan	17,5
(3)	7464	Peningkatan Koordinasi Penanganan Isu-Isu Perdagangan Internasional	Meningkatnya upaya perlindungan kepada dunia usaha terhadap tuduhan *anti dumping* dan penanganan isu perdagangan internasional lainnya : 8 kasus yang tertangani.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Departemen Perdagangan	5,0
(4)	7470	Penyelenggaraan ITPC	Revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan 20 ITPC dalam rangka penetrasi pasar ekspor tradisional dan nontradisional (termasuk kegiatan *bussiness matching* dan peningkatan jumlah eksportir terutama UKM).	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	40,0
(5)	7478	Pengembangan Promosi Dagang	Partisipasi pada 35 pameran dagang internasional dalam dan luar negeri termasuk partisipasi aktif dalam Shanghai Expo, 3 kegiatan *Indonesian Week*, dan misi dagang di 8 negara tujuan ekspor non tradisional.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	108,0
(6)	7514	Pelaksanaan Pengamatan Pasar (*Market Intelligence*)	Terselenggaranya kegiatan *Market Intelligence* di 20 negara ITPC; Tersedianya informasi ekspor berupa 20 petunjuk pasar, 15 profil produk, 15 analisa pasar, 10 katalog produk di Wilayah Pasar; serta Sosialisasi informasi pasar ekspor di 10 daerah potensi ekspor utama.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	5,25
(7)	0108	Pengadaan Peralatan Laboratorium	Peningkatan kapasitas laboratorium Penguji Mutu Barang	Program Peningkatan dan	Departemen	5,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Ekspor dan Impor untuk 2 balai di pusat dan 6 produk.	Pengembangan Ekspor	Perdagangan	
(8)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya Undang-undang Perdagangan.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	6,0
(9)	7469	Pengembangan Ekspor Daerah	Meningkatnya daya saing komoditi ekspor melalui promosi dan fasilitasi di 33 daerah; Meningkatnya kontak dagang eksportir di 33 daerah.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	27,5
(10)	7472	Pembentukan dan Pengembangan *National Single Window* dan ASEAN *Single Window*	Pengembangan sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik dalam rangka pelaksanaan *Indonesia National Single Window* dan *ASEAN Single Window* untuk mendukung pasar tunggal ASEAN (104 perijinan ekspor dan impor *online*) serta tersedianya sarana pendukung INATRADE antara lain *help-desk* dan SMS *Gateway*.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	2,0
(11)	7474	Pembinaan Ekspor, Peningkatan Daya Saing, dan Pengendalian Impor	Penyempurnaan kebijakan perdagangan luar negeri; Sosialisasi kebijakan umum perdagangan luar negeri di 33 provinsi (2.145 orang); Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri (ekspor, impor, mutu dan fasilitasi, untuk 1.000 orang); Partisipasi pada sidang/konferensi internasional di luar negeri dalam rangka sidang komoditi dan lobi (20 negara); Pengembangan sarana dan transfer data SKA (57 IPSKA); Verifikasi API (1.300 API); Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri (33 provinsi); Operasionalisasi Timnas PEPI dan KEK; Bantuan peralatan untuk UKM ekspor dan pengembangan ekonomi kreatif.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	86,0
(12)	7521	Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Ekspor dalam rangka Ekonomi Kreatif (IDP)	Terselenggaranya 1 kegiatan Konvensi Pameran Produk Budaya Indonesia/ PPBI; Sosialisasi dan kampanye Tahun Indonesia Kreatif; Fasilitasi *branding* 65 produk/jasa; Promosi produk Ekonomi Kreatif di DN & LN.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Departemen Perdagangan	6,0
(13)	4760	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan untuk Mendorong Peningkatan Perdagangan LN	8 laporan hasil peninjauan lapangan, 2 laporan raker, 10 rekomendasi rapat, 4 laporan monitoring koordinasi kebijakan perdagangan luar negeri dan industri manufaktur.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kemenko Perekonomian	3,5
(14)	4761	Pelaksanaan Timnas PEPI	3 laporan hasil peninjauan lapangan di negara maju, 4 laporan raker, 5 laporan rekomendasi rapat, 4 laporan monitoring Timnas PEPI.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kemenko Perekonomian	3,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(15)	4761	Koordinasi Pelaksanaan Tim NSW	2 laporan hasil peninjauan lapangan di negara maju, 2 laporan raker, 3 rekomendasi rapat, 2 laporan monitoring.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kemenko Perekonomian	3,0
Fokus 19. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri – Prioritas 4						
(1)	4763	Pembinaan Pasar dan Distribusi	(1) Pelatihan pengelolaan manajemen pasar sejumlah 10 akt (450 orang); (2) Pengamanan distribusi bahan pokok dan barang penting sejumlah 10 komoditi; (3) Pemberian bantuan sarana usaha (3.000 unit).	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Departemen Perdagangan	10,5
(2)	7488	Pengembangan PDN Daerah	(1) Tersedianya infomasi harga bahan kebutuhan pokok di 33 provinsi; (2) Terlaksananya pengawasan barang, jasa dan kemetrologian di 33 provinsi; (3) Terlaksananya sosialisasi kebijakan PDN di 33 provinsi.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Departemen Perdagangan	20,0
(3)	7513	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	(1) Sosialisasi ACI melalui TV, radio komersial, dan 8 media cetak; Pembuatan logo ACI di bus di 10 daerah; Pembuatan *merchandise product* serta pemasangan *billboard*; (2) Terselenggaranya media promosi dan akses pasar produk bagi 500 UKM berpotensi ekspor.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Departemen Perdagangan	44,5
(4)	7484	Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Lembaga Perdagangan, dan Pendaftaran Perusahaan	Fasilitasi 35 UMKM yang potensial untuk diwaralabakan, fasilitasi 50 usaha waralaba lokal, optimalisasi LKTP di 30 daerah, 16.000 TDP.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Departemen Perdagangan	10,0
(5)	7487	Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG)	Pelaksanaan Identifikasi Infrastruktur Pelaksanaan SRG di 10 daerah, evaluasi, pertemuan teknis dan pembinaan serta asistensi dalam rangka pelaksanaan SRG di 34 daerah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Departemen Perdagangan	2,7
(6)	7452	Penegakan Hukum Persaingan Usaha	60 resume laporan, 60 perkara Pemeriksaan Pendahuluan, 55 perkara Pemeriksaan Lanjutan, 25 perkara Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 35 perkara Litigasi, 50 Monitoring Pelaksanaan Putusan, 6 paket Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999.	Program Persaingan Usaha	KPPU	13,4
(7)	7454	Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha	21 paket naskah laporan analisa kebijakan pemerintah, 5 paket kajian persaingan usaha sektor industri dan perdagangan, 1 dokumen laporan Harmonisasi Kebijakan Persaingan.	Program Persaingan Usaha	KPPU	4,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(8)	7502	Penyelenggaraan Monitoring dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	30 monitoring	Program Persaingan Usaha	KPPU	2,0
(9)	7457	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Operasionalisasi pengawasan barang beredar dan jasa untuk 3 kelompok komoditi; Pelatihan PPNSPK dan PPBJ 160 orang, sosialisasi dan publikasi hasil pengawasan.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Departemen Perdagangan	7,5
(10)	7458	Peningkatan Pengawasan Kemetrologian	Pengadaan peralatan laboratorium metrologi sebanyak 1 paket dan Pengawasan SPBU & LPG di 4 daerah.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Departemen Perdagangan	7,7
(11)	7519	Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kemetrologian	Pengadaan lahan untuk 4Kantor BSML (Balai Sertifikasi Metrologi Legal) di daerah.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Departemen Perdagangan	10,0

IV. PARIWISATA

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 18. Peningkatan Intensitas Kepariwisataan – Prioritas 4						
(1)	4885	Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata[1)]	Promosi kapariwisataan dalam dan luar negeri melalui media cetak, elektronik, dan melalui *e-marketing* (125 kali).	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	133,55
(2)	4884	Peningkatan Promosi Pariwisata ke Luar Negeri	Promosi pariwisata dalam bentuk partisipasi bursa, *sales promotion*, *direct selling*, *road show*, festival dan *event* (92 kali) di 15 negara fokus pasar utama pariwisata termasuk pengoperasian 9 Kantor Perwakilan Promosi Pariwisata (*representative office*).	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	100,00
(3)	4883	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Promosi pariwisata melalui berbagai *event*, festival, bursa pariwisata dan kegiatan *sales promotion* untuk menjaring wisatawan nusantara di 33 destinasi pariwisata sebanyak 91 kali.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	43,30
(4)	4903	Pengembangan *Meeting, Incentive, Covention,*	Fasilitasi dan promosi penyelenggaraan MICE di 12	Program Pengembangan Pemasaran	Departemen Budpar	43,60

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		and Exhibition [1)]	destinasi utama MICE Indonesia (68 kali).	Pariwisata		
(5)	4886	Pengembangan Informasi Pasar Wisata [1)]	Penyiapan dan pelayanan informasi pasar dalam dan luar negeri (30 kali) dan 1.000 orang peserta FAM Trip dan dukungan penyiapan Indonesia Promotion Office (IPO) di luar negeri.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	42,00
(6)	4887	Pendukungan Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah[1)]	Pendukungan pemasaran pariwisata daerah di 33 provinsi (79 kali).	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	36,34
(7)	4888	Optimalisasi Koordinasi Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	Dukungan promosi pariwisata daerah melalui pengembangan SDM pemasaran, peningkatan pelayanan pendukung pemasaran, sinkronisasi dan koordinasi pemasaran dan promosi pariwisata (64 kali).	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Departemen Budpar	27,55
(8)	4889	Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan[1)]	3 destinasi/kawasan strategis pariwisata bahari, 3 destinasi/kawasan strategis pariwisata ekowisata, 3 destinasi/kawasan strategis pariwisata budaya, pengembangan 200 desa wisata melalui program PNPM Bidang Pariwisata, 6 pengembangan *travel pattern*, sertifikasi 5 ribu orang, sertifikasi 100 jenis utama, dan Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di 9 destinasi.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Departemen Budpar	53,40
(9)	4893	Pendukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah	24 pendukungan kapasitas perencanaan dan pengembangan daya tarik pariwisata daerah dan fasilitasi pengembangan infrastruktur darat, udara, dan infrastruktur pariwisata.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Departemen Budpar	45,00
(10)	4894	Perintisan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan 3 daya tarik wisata bahari, 1 daya tarik wisata budaya, 1 daya tarik ekowisata, dan 1 daya tarik wisata buatan berstandar internasional.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Departemen Budpar	6,50
(11)	4892	Pengembangan Usaha dan Investasi Pariwisata	Fasilitasi penyusunan profil investasi bagi 6 destinasi pariwisata, 6 fasilitasi informasi dan promosi investasi dalam dan luar negeri di bidang pariwisata, 10 pembinaan usaha/industri pariwisata, 13 penyusunan kebijakan usaha.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Departemen Budpar	6,50

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(12)	4890	Pengembangan Standarisasi Pariwisata[1)]	5 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), 15 diseminasi destinasi, dan 5 Standar Usaha, 5 lembaga sertifikasi nasional.	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Departemen Budpar	7,60
(13)	4891	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata[1)]	Penerapan kode etik pariwisata dunia (15 kali) dan Penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat (5 naskah).	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Departemen Budpar	6,50
(14)	4895	Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata	13 naskah kebijakan, 6 koordinasi, 3 Destination Management Organization (DMO), Peningkatan kemampuan 10 orang pengelola destinasi pariwisata, 5 kegiatan kerjasama teknik dan tersusunnya *database* dan informasi destinasi pariwisata (2 dokumen).	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Departemen Budpar	5,00
(15)	4896	Pengembangan Kebijakan SDM Kebudayaan dan Pariwisata Nasional.[1)]	1.000 aparatur/ pelaku kepariwisataan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bidang budpar.	Program Pengembangan Kemitraan	Departemen Budpar	5,40
(16)	4899	Peningkatan Litbang Pariwisata	Litbang di bidang kepariwisataan (7 naskah).	Program Pengembangan Kemitraan	Departemen Budpar	5,00
(17)	4901	Pendukungan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah [1)]	750 orang aparatur pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata di 15 provinsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Kemitraan	Departemen Budpar	4,00
(18)	4902	Optimalisasi Koordinasi Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinasi dan pelayanan teknis yang dapat memperlancar pengembangan sumber daya budpar (19 kali).	Program Pengembangan Kemitraan	Departemen Budpar	6,60
(19)	4897	Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing SDM Kebudayaan dan Kepariwisataan	1.150 kelulusan di 4 lembaga pendidikan kepariwisataan Debudpar yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.	Program Pendidikan Tinggi	Departemen Budpar	23,42

V. INDUSTRI MANUFAKTUR

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 3. Revitalisasi Industri Manufaktur – Prioritas 4						
(1)	2010	Pengembangan IKM Unggulan Daerah	Pembinaan IKM di 33 provinsi dan 75 kab/kota serta penerapan metode OVOP di 14 provinsi.	Program Pengembangan IKM	Depperin	60,0
(2)	2045	Revitalisasi Sentra-sentra IKM dan Fasilitasi Layanan UPT	20 sentra dan 40 UPT	Program Pengembangan IKM	Depperin	55,0
(3)	2021	Peningkatan Standardisasi Industri	Penyusunan 118 rancangan SNI.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	16,3
(4)	2023	Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	Pembangunan 3 unit pabrik bio-ethanol.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	16,0
(5)	2047	Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri	5 teknologi baru melalui *pilot project* dan pusat pengembangan inovasi; Pembangunan 4 pabrik pembuatan pupuk organik; 2 Permen tentang mitigasi.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	16,5
(6)	2050	Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Peningkatan Mutu	Penerapan di 107 perusahaan lokal yang memperoleh SPPT/SNI serta penetapan pemberlakuan SNI wajib (10 Permen).	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	23,0
(7)	2032	Peningkatan Iklim Usaha Industri melalui Fasilitasi Industri Prioritas	Fasilitasi pemerintah terhadap 30 klaster industry, 1 terminal kayu, kajian kompetensi inti di 40 kab/kota.	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	106,0
(8)	2036	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyediaan data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi 650 produk; Sosialisasi dan promosi P3DN; Pembuatan direktori; Fasilitasi HKI.	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	35,8
(9)	2044	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus	Fasilitasi pembangunan 12 kawasan industri (melalui penyusunan *Master Plan*, penyusunan rencana detail teknis dan Kajian Amdal)	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	20,3
(10)	2049	Restrukturisasi Permesinan Industri	Restrukturisasi teknologi proses dan teknologi energi bagi 155 perusahaan, termasuk revitalisasi industri potensial ekspor (80 IKM TPT dan alas kaki).	Program Penataan Struktur Industri	Depperin	253,0

VI. USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 4. Peningkatan Kapasitas Usaha Skala Mikro dan Kecil Melalui Penguatan Kelembagaan – Prioritas 1						
(1)	5229	Penyediaan Dana untuk Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan Pola Bagi Hasil/Syariah dan Konvensional	2.600 koperasi/kelompok	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Kemeneg KUKM	165,0
(2)	5232	Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi	2.737 UMi	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Kemeneg KUKM	15,5
(3)	5205	Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Perkoperasian	5 kebijakan/1.000 orang pembina	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kemeneg KUKM	5,0
(4)	5162	Penumbuhan Wiraswasta Baru Melalui Dukungan Fasilitasi Praktek Usaha	2.500 UMi/100 unit TPKU	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kemeneg KUKM	20,0
(5)	4241	Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan	Terlaksananya pengembangan di 106 kawasan agropolitan (lanjutan)	Program Pembangunan Ekonomi Lokal	DEP. PU	98,5
(6)	4756	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM	2 rekomendasi kebijakan, 5 laporan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM	Kemenko Perekonomian	2,5
(7)	5157	Koordinasi Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi	2 paket rekomendasi dam 5 laporan kebijakan mengenai pengembangan UMKM berbasis teknologi di daerah serta 4 laporan hasil peninjauan, 1 laporan raker, 2 laporan monitoring kebijakan iklim usaha	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM	Kemenko Perekonomian	6,7
(8)	5200	Pengembangan Badan Layanan Umum Dana Bergulir		Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	BLU - LPDB	350,0
(9)	5214	Pelatihan Budaya/Motivasi Usaha dan Teknis Manajemen Usaha Mikro	1.000 orang	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Kemeneg KUKM	5,0
(10)	5230	Bimbingan Teknis/Pendampingan dan Pelatihan Pengelola LKM/KSP	1.500 orang	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Kemeneg KUKM	10,0
(11)	5231	Pembinaan Sentra-Sentra Produksi UMKM di	60 Koperasi, 800 UMi	Program Pemberdayaan Usaha Skala	Kemeneg KUKM	9,2

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		Daerah Terisolir dan Tertinggal/Perbatasan		Mikro		
Fokus 6. Peningkatan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumberdaya Produktif – Prioritas 4						
(1)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Koperasi dan UMKM	1 paket	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM	Kemeneg KUKM	12,0
(2)	5158	Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi dan Pengembangan Industri Kreatif	2.130 UMKM, 20 UKM dan 40 koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kemeneg KUKM	18,7
(3)	5163	Penyediaan Dana Melalui Koperasi untuk Sarana Produksi Bersama Anggota	60 koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kemeneg KUKM	35,0
(4)	5180	Perkuatan Jaringan Kerja Sama Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS-P)	100 BDS, 20 klinik bisnis dan 50 UMK	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Kemeneg KUKM	3,4
(5)	5178	Penyelenggaraan Promosi Produk UKM	3.000 KUKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Kemeneg KUKM	36,0

VII. KETENAGAKERJAAN

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 5. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja – Prioritas 4						
(1)	3504	Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi bagi 20.000 tenaga kerja.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Depnakertrans	100,0
(2)	3507	Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terselenggaranya pemagangan bagi 10.000 tenaga kerja terdidik.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Depnakertrans	50,0
(3)	3621	Peningkatan Fungsi & Revitalisasi BLK Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi	Berfungsinya 11 BLK (UPTP) untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Depnakertrans	100,0
(4)	3627	Percepatan Pengakuan/Rekognisi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional	Diakuinya sertifikat kompetensi pada 10 bidang profesi tenaga kerja di bidang industri manufaktur dan jasa oleh pengguna tenaga kerja dan profesi.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Depnakertrans	50,0
(5)	3520	Pembinaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisa Diskriminasi	Terwujudnya pembinaan persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisa diskriminasi.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	8,0
(6)	3522	Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit	Terselenggaranya proses negosiasi upah, kondisi kerja, syarat kerja, dan penyelesaian perselisihan di 33 provinsi.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	77,2
(7)	3527	Pembinaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Terwujudnya konsolidasi peningkatan fungsi kelembagaan dan perbaikan persyaratan kerja.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	8,0
(8)	3528	Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial	Terwujudnya pembinaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	7,7
(9)	3529	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terwujudnya konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	9,0
(10)	3530	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	Meningkatnya penerapan norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga	Depnakertrans	5,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
				Kerja		
(11)	3532	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengawas Hubungan Industrial	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan di 33 provinsi.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	59,5
(12)	3534	Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya sinergi program APBN untuk memperluas kesempatan kerja di 32 provinsi dan 231 kabupaten/kota.	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Depnakertrans	175,0
(13)	3535	Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja, Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi, Penyelenggaraan Bursa Kerja	Tersedianya informasi pasar kerja *online* yang akurat, terintegrasi dan mutakhir di 2 provinsi dan 228 kabupaten/kota.	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Depnakertrans	100,0
(14)	6374	Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola KB	Terlaksananya pelatihan dasar umum (LDU) dan pelatihan teknis bagi 31.075 PLKB/PKB serta pengelola KB agar memenuhi standar kompetensi; dan Pendidikan jangka panjang/pendek bagi 550 orang.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKKBN	80,5
(15)	0077	Pengembangan kapasitas/kualitas SDM	53 unit ditingkatkan kapasitas manajemennya.	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	40,0
(16)	2831	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana	1. Jumlah senior residen/dokter spesialis yang didayagunakan mencakup 200 orang. 2. Terlaksananya sertifikasi tenaga kesehatan sebanyak 1.000 orang. 3. Terlaksananya tugas belajar 5.000 orang. Tersedianya tenaga kesehatan sebanyak 1.200 orang di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.	Sumber Daya Kesehatan	Depkes	470,0
(17)	0048	Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian	1. Pendayagunaan sebanyak 1.500 *internship* dokter. 2. Terselenggaranya pendidikan bagi 1.000 tenaga pendidik, 1.740 dokter spesialis, 750 mitra dokter spesialis.	Pendidikan Tinggi	Depkes	1.300,0
(18)	3409	Penyelenggaraan Kursus dan Magang	134.400 orang	Pendidikan Non Formal	Depdiknas	180,0
(19)	2575	Percepatan Sertifikasi Guru	90.000 guru	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	311,8
(20)	2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Pendidikan Dasar	318.341 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	400,0
(21)	2574	Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Pendidikan Menengah	10.234 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	20,5
(22)	2574	Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru	17.222 orang	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Depdiknas	175,3
(23)	2386	Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen PT (LN)	1.600 orang	Pendidikan Tinggi	Depdiknas	300,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(24)	7607	Penyelenggaraan Kemitraan untuk Meningkatkan Kualitas dan Kemandirian Pemuda	Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi 1.000 pemuda dan bantuan bagi 33 OKP	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Kemeneg Pora	26,9
(25)	0383	Peningkatan Kemampuan Profesional Aparatur Hakim	3.000 orang	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Mahkamah Agung	31,0
(26)	0067	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	30 jenis diklat dengan 1.000 orang	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Kejaksaan Agung	20,0
(27)	0407	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	Terselenggaranya Diklat pembentukan Jaksa di DKI Jakarta dan 6 sentra Diklat di daerah pada 6 Kejati di Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel.	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Kejaksaan Agung	60,0
(28)	0048	Pengembangan Pendidikan Profesional dan keahlian	4 kegiatan (400 orang)	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Mahkamah Konstitusi	2,9
(29)	7404	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya 1 paket diklat untuk 9.000 orang auditor (pusat dan daerah).	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BPKP	15,7
Fokus 16. Perlindungan Pekerja Migran (TKI) dan Penguatan Kelembagaan – Prioritas 4						
(1)	3622	Peningkatan Pelayanan TKI ke Luar Negeri	Terfasilitasinya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	BNP2TKI	115,0
(2)	3624	Penguatan Kelembagaan Badan Penyelenggara TKI	Terselenggaranya proses rekrutmen calon TKI di 24 Propinsi	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	BNP2TKI	95,0

VIII. KEMISKINAN

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) – Prioritas 1						
(1)	2580	Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan	Terfasilitasinya pekerja anak ke dalam program pendidikan di 13 provinsi.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Depnakertrans	20,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		(PKH)				
(2)	5257	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tingkat pusat, 15 provinsi, dan 60 kab/kota, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pengembangan strategi PUG lokal. 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di 5 lembaga masyarakat (parpol, media, keagamaan, LSM, profesi/swasta) di 33 provinsi dalam pelaksanaan PUG serta inisiasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui advokasi dan KIE.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kemeneg PP	20,5
(3)	5261	Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan/Anak (P2TP2A)	Terlaksananya fasilitasi pembentukan P2TP2A di 18 provinsi (2 provinsi untuk inisiasi pembentukan baru dan 16 provinsi untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) dan 190 kabupaten/kota (60 kabupaten/kota untuk inisiasi pembentukan baru dan 130 kabupaten/kota untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) melalui kegiatan pelatihan, konseling, persiapan materi, dan lain-lain.	Program Penguatan Kelembagaan Pangarustamaan Gender dan Anak	Kemeneg PP	11,5
(4)	5263	Penyusunan Kebijakan KHPP	1. Tersusunnya kebijakan tentang peningkatan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol perempuan dalam mendukung penanggulangan penyakit menular, pemenuhan hak reproduksi, peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, dan partisipasi perempuan di badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 2. Terfasilitasinya penyusunan kebijakan perlindungan perempuan di 10 provinsi, termasuk pekerja migran, penghapusan KDRT, penanganan perdagangan orang, dan perempuan dengan kebutuhan khusus (lansia, cacat, wilayah konflik, dan eksploitasi media). 3. Terfasilitasinya pengembangan model di daerah untuk perlindungan perempuan dari kekerasan dan perempuan dengan kebutuhan khusus.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kemeneg PP	9,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(5)	2589	Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SMP	751.193 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	413,1
(6)	2576	Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD	1.796.800 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depdiknas	684,6
(7)	3470	Beasiswa untuk Siswa Miskin MI	640.000 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	230,4
(8)	3471	Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs	540.000 siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Depag	388,8
(9)	2585	Beasiswa untuk Siswa Miskin SMA	248.124 siswa	Program Pendidikan Menengah	Depdiknas	193,5
(10)	2585	Beasiswa untuk Siswa Miskin SMK	200.000 siswa	Program Pendidikan Menengah	Depdiknas	160,6
(11)	3388	Beasiswa untuk Siswa Miskin MA (termasuk beasiswa khusus untuk siswa daerah terpencil/tertinggal)	320.000 siswa	Program Pendidikan Menengah	Depag	244,0
(12)	2602/ 2385	Penyediaan Beasiswa Untuk Mahasiswa Miskin dan Peningkatan Prestasi Akademik, Serta Bantuan Belajar dan Daerah Konflik dan Bencana	100.000 mahasiswa	Program Pendidikan Tinggi	Depdiknas	360,0
(13)	3425	Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin	65.000 orang	Program Pendidikan Tinggi	Depag	78,0
(14)	2812	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin di Kelas III Rumah Sakit	Persentase RS yang melayani pasien masyarakat miskin peserta program Jamkesmas 100%.	Upaya Kesehatan Perorangan	Depkes	4.584,0
(15)	2819	Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Seluruh Penduduk di Puskesmas dan Jaringannya	1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di seluruh Puskesmas dan jaringannya khususnya bagi seluruh masyarakat miskin. 2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat di 101 Puskesmas Prioritas di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Depkes	1.000,0
(16)	6369	Jaminan Pelayanan KB Berkualitas Bagi Rakyat Miskin	1. Tersedianya alat dan obat KB gratis bagi sekitar 3,7 juta PB miskin (keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1) dan 11,9 juta PA miskin, dengan rincian; a. Tersedianya IUD bagi 572,9 ribu PB miskin;	Program Keluarga Berencana	BKKBN	527,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			MOP bagi 12,2 ribu PB miskin; MOW bagi 26,9 ribu PB miskin; *Implant* bagi 199,6 ribu PB miskin; suntikan 1,4 juta PB miskin; Pil bagi 1,3 juta PB miskin; dan Kondom bagi 103,4 ribu PB miskin b. Tersedianya IUD bagi 889,2 ribu PA miskin; MOP bagi 101,7 PA miskin; MOW bagi 484,1 ribu PA miskin; *Implant* bagi 895,4 ribu PA miskin; Suntikan bagi 5,8 juta PA miskin; Pil bagi 3,4 juta PA miskin; dan Kondom bagi 204,5 ribu PA miskin. 2. Peningkatan akses pelayanan KB di daerah Galciltas di 199 kab/kota. 3. Terselenggaranya ayoman pasca-pelayanan KB bagi sekitar 280 ribu kasus. 4. Meningkatnya penggunaan alat KB jangka panjang (MOP, MOW, IUD, Implant) bagi sekitar 852 ribu peserta KB baru dan sekitar 6,5 juta peserta KB aktif. Catatan: Pengadaan alokon direncanakan untuk melayani PB miskin dan PA miskin s/d Juni 2011.			

(17)

Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat – Prioritas 1						
(1)	0847	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan (PNPM Perdesaan)	Terlaksananya BLM di 4.590 kecamatan pada 32 provinsi, termasuk: a. Terlaksananya PNPM Perdesaan di 4.671 kecamatan; Pelaksanaan kegiatan SADI di 4 provinsi. b. Terlaksananya PNPM-LMP (Lingkungan Mandiri Perdesaan) di 88 kecamatan pada 23 kabupaten (Grant CIDA dan DANIDA). c. Terlaksananya PNPM-RISE di 9 provinsi, dengan keluaran: - Terselenggaranya kegiatan diseminasi dan pelatihan untuk tingkat pusat dan provinsi serta	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	8.356,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			sosialisasi program RISE; - Tersalurkannya dana bergulir kegiatan *pilot project* mikro kredit perdesaan di 32 kecamatan, 32 kabupaten, 9 provinsi.			
(2)	0713	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dan Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Meningkatnya kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PISEW/RISE di 9 provinsi, 32 kabupaten; 2. Terlaksananya *pilot project* pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 3 lokasi; Fasilitasi pengembangan lembaga; Aparat dan kader dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 32 provinsi; Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat; Pelatihan pengelolaan sampah RT berbasis masyarakat di 15 kabupaten; Fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangan Kawasan Perdesaan berbasis Masyarakat; Modul pelatihan pengelolaan SD pesisir berbasis Masyarakat di 33 provinsi; Sosialisasi Permendagri tentang Program Masuk Desa di Pusat dan Daerah; Penyusunan manual desa dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan inventarisasi/pengolahan *database* potensi desa/kelurahan pesisir dalam mendukung PNPM.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	37,8
(3)	4280	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM Perkotaan)	Pemberdayaan masyarakat di 8.304 kelurahan pada 884 kecamatan di 246 kota.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dep. PU	1.509,5
(4)	4622	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 237 kecamatan dan 32 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di 32 kabupaten, 9 provinsi.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dep. PU	499,5
(5)	4312	Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-PNPM)	Pemberdayaan masyarakat di 3.224 desa di 479 kec. pada 25 provinsi.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	Dep. PU	926,0
(6)	4611	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS)	130 lokasi	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	20,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(7)	4612	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat	1.600 desa	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dep. PU	633,2
(8)	1595	Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)	Fasilitasi Gapoktan (10.000 desa); Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas (10.000 desa).	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	1.105,5
(9)	1574	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui LM3 dan Pemuda Membangun Desa (PMD)	Bantuan permodalan LM3 Tanaman Pangan (250 LM3); Penguatan LM3 peternakan (755 klp); Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di 200 LM3; Fasilitasi pemberdayaan/pengembangan kapasitas LM3 (1.000 orang); PMD Tanaman (275 orang); PMD Hortikultura (370 orang); PMD Perkebunan (275 orang); PMD Peternakan (663 orang).	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	583,9
(10)	6257	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK/SPADA) – PNPM	Percepatan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus di 32 kabupaten, 186 kecamatan di 4.596 desa.	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal	KPDT	57,0
(11)	6258	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P2IPDT)	Terlaksananya pembangunan prasarana perdesaan di 185 kabupaten; Terlaksananya pembangunan energi, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi lokal; Pengembangan keperintisan transportasi udara dan laut (direncanakan dialihkan untuk mendukung alokasi dana DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan sebesar Rp. 100 M).	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	KPDT	90,0
(12)	6260	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di 151 kabupaten di daerah tertinggal.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	KPDT	41,9
(13)	4108	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	Terlaksananya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui PNPM Mandiri kelautan dan perikanan di 150 kab/kota; berkembangnya usaha mikro dan kecil (UMK) masyarakat pesisir, pemberdayaan perempuan pesisir; Tersusunnya 5 paket standar, norma, prosedur dan manual (SNPM) pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; Peningkatan akses modal kepada masyarakat skala mikro secara langsung atau lembaga keuangan mikro (LKM)	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	219,2

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			masyarakat pesisir; Tersalurkannya subsidi benih ikan (selisih harga benih) di 33 provinsi.			
(14)	3565	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat tranmigrasi sebanyak 2.138 KK.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	5,2
(15)	3588	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat tranmigrasi sebanyak 16.420 KK.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	52,4
Fokus 3. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan – Prioritas 1						
(1)	4807	Peningkatan Koordinasi Pengembangan dan Investasi Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya kordinasi dalam pengembangan dan investasi SDM.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	17,2
(2)	4809	Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	30,8
(3)	4810	Peningkatan Koordinasi Tanggap Cepat Masalah Kesejahteraan Rakyat	Terselenggaranya koordinasi tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra	3,7
(4)	0712	Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Perdesaan	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia/SDM masyarakat melalui pelatihan 10 angkatan. 2. Pelatihan dan orientasi bagi pelatih, aparat, fasilitator, dan masyarakat di 17 kabupaten. 3. Rakornas dan evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di 19 provinsi (mendukung PNPM).	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	8,0
(5)	0716	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat	1. Penguatan kelembagaan unit pengaduan masyarakat terpadu dalam penanggulangan kemiskinan 440 kab/kota. 2. Tertanganinya masalah pengaduan masyarakat yang tersebar di 33 provinsi.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Depdagri	30,6
(6)	3607	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 21 paket.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	31,6
(7)	3567	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 2 paket.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	1,7

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 4. Peningkatan Kapasitas Usaha Skala Mikro dan Kecil melalui Penguatan Kelembagaan – Prioritas 1						
(1)	3644	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Perbatasan	Terselenggaranya pengembangan KTM sebanyak 4 paket.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	37,0
(2)	3640	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Tertinggal	Terselenggaranya pengembangan KTM sebanyak 23 paket.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	330,0
(3)	3628	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terselenggaranya pengembangan KTM sebanyak 6 paket	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	142,5
(4)	3566	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 2.138 KK.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	4,7
(5)	3606	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi sebanyak 16.420 KK.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depnakertrans	52,5
(6)	6262	Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	Terbangunnya kawasan produksi di daerah tertinggal, diikuti oleh aktivitas usaha budidaya komoditas unggulan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi tinggi di 120 kabupaten (mendukung KAPET).	Program Pembangunan Ekonomi Lokal	KPDT	121,0
(7)	6326	Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)	Terbangunnya 5 pusat pertumbuhan untuk mendukung pengembangan kawasan lainnya (KAPET, KTM, KEK, Agropolitan, dll)	Program Pembangunan Ekonomi Lokal	KPDT	25,0
(8)	0657	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan	1. Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan tentang rehabilitasi lahan kritis berbasis masyarakat sebanyak 180 orang. 2. Terlatihnya SIM-AKLIK bagi aparat kecamatan sebanyak 180 orang. 3. Terlatihnya kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan sebanyak 60 orang. 4. Terlaksananya pengembangan diversifikasi produk lokal non pertanian di perdesaan 15 provinsi.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Depdagri	2,2

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			5. Terlaksananya temu karya pemberdayaan UEM bagi 32 provinsi. 6. Terfasilitasinya lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di 32 provinsi.			
(9)	0659	Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan	1. Fasilitasi lembaga keuangan perdesaan 16.454 unit di 33 provinsi. 2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Badan Kredit Desa (BKD) di 465 kab/kota. 3. Fasilitasi penguatan manajemen lembaga keuangan mikro. 4. Replikasi model lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat (LSPBM) dengan pemberian stimulan bagi 19 pokmas. 5. Revitalisasi kelembagaan badan kredit desa (BKD), fasilitasi manajemen usaha desa/BUMDES, penyusunan kebijakan/program badan usaha milik kelurahan (BUMKEL).	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Depdagri	3,8
(10)	0807	Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Lokal	1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pasar Desa 12 Angkatan dan pemberian stimulan kepada masyarakat. 2. Terlaksananya pengembangan pasar desa dengan fokus kegiatan pada fasilitasi, bimbingan teknis dan bantuan langsung masyarakat untuk perbaikan pasar desa di 12 desa pasca bencana dan terpencil sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, meningkatkan jaringan informasi jaringan teknologi pasar desa.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Depdagri	5,2
(11)	2256	Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lanjutan pembangunan 9 unit dermaga sungai, 1 unit dermaga danau, dan 43 unit dermaga penyeberangan yang menghubungkan daerah tertinggal ke pusat pertumbuhan.	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	Dep. Perhubungan	609,0
(12)	0024	Pengadaan kapal perintis	Lanjutan pembangunan kapal perintis 14 unit dan pembangunan kapal perintis baru 5 unit.	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	Dep. Perhubungan	256,2

IX. PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 1. Perluasan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) – Prioritas 1						
(1)	7205	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial)	Tercapainya tuna sosial 16.545 orang di 33 provinsi, 2 panti.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		30,1
(2)	7206	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza)	Terehabnya Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 3.320 orang.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		24,6
(3)	7207	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat)	Terbantunya kebutuhan dasar 17.300 orang penyandang cacat berat dan 11.000 orang penyandang cacat dalam panti; dan terlaksananya pelayanan dan rehabsos 3.500 orang penca di 33 provinsi	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		137,5
(4)	7209	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak)	Terlayani dan terlindunginya 21.800 anak terlantar di 33 provinsi.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		259,3
(5)	7231	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat	Terlaksananya pelayanan sosial dalam panti kepada lanjut usia terlantar pada 10.525 lanjut usia.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		73,3
(6)	7213	Penyelenggaran Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi 40.000 korban bencana alam; Meningkatnya kapasitas kemampuan dan performan 350 orang masyarakat di bidang penanggulangan bencana; Tersedianya peralatan evakuasi di 33 provinsi.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial		290,3
(7)	7214	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial)	Tertanggulanginya korban bencana sosial, terbantunya korban bencana kebakaran sebanyak 5.000 KK, dan terbantunya eks korban bencana sosial sebanyak 43.000 KK.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial		117,6
(8)	7215	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak	Terlayaninya Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial		35,2

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		Kekerasan dan Pekerja Migran)				
(9)	7217	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial)	Terlindunginya pekerja mandiri di sektor informal sebanyak 24.200 KK melalui ASKESOS.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial		45,0
(10)	7232	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberian bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi 720.000 RTSM di 13 provinsi, 70 kabupaten.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Depsos	1.100,0
Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat – Prioritas 1						
(1)	6303	Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE 92.841 KK, RSRTLH 6.000 Unit, program lanjutan 20 lembaga pembiayaan KUBE .	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Depsos	434,5
(2)	7202	Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya (Pemberdayaan Keluarga)	Tersedianya data dan tersalurkannya bantuan stimulan UEP bagi sejumlah 18.420 KK miskin dan bantuan operasional 465 LK3 di 465 kabupaten/kota di 33 provinsi.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Depsos	44,1
(3)	7204	Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil)	Terlaksanana Pemberdayaan KAT di 30 Provinsi dan Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil Tahap II 9.948 KK.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Depsos	118,0

PRIORITAS BIDANG: STABILITAS EKONOMI

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
Fokus 8. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pengamanan Pasokan Bahan Pokok – Prioritas 4						
(1)	4751	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional	8 rekomendasi kebijakan percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam bidang peningkatan investasi asing, ekspor, kapasitas pendonor mitigasi perubahan iklim, pengamanan APBN, 2 laporan kegiatan dan 1 laporan monev.	Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Kemenko Perekonomian	5,0
(2)	4752	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	5 rumusan kebijakan, 8 laporan monev kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur.	Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Kemenko Perekonomian	7,0
(3)	4752	Peningkatan Koordinasi Stabilisasi Ekonomi Makro dan Keuangan	5 laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi dan 5 rekomendasi kebijakan stabilisasi ekonomi makro dan keuangan.	Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Kemenko Perekonomian	4,5
(4)	0094	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	Tersedianya informasi statistik bidang ekonomi antara lain: industri, pertambangan dan energi, pertanian, perdagangan dan jasa, telekomunikasi, PDB, PDRB, IHK dan inflasi; bidang sosial antara lain: kependudukan, sakernas, susenas, polkam, pendidikan, kesehatan dan lintas sektor.	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	BPS	471,6
(5)	7456	Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	Peningkatan kapasitas BPKN, BPSK & LPKSM dalam rangka sosialisasi, advokasi, dan penyelesaian sengketa; Mendorong pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK & LPKSM di 10 daerah; Fasilitasi pelayanan pos pengaduan di 5 lokasi baru, pelatihan motivator dan mediator perlindungan konsumen di 5 daerah.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Departemen Perdagangan	16,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(6)	7504	Penyelenggaraan identifikasi pemeriksaan dan penyidikan perdagangan berjangka komoditi	Terselenggaranya 13 identifikasi, 12 pemeriksaan, 10 penyidikan dan 8 audit kepada pelaku usaha PBK, serta rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di 5 wilayah	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Departemen Perdagangan	2,5
(7)	7482	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi	(1) Pengembangan pasar percontohan yang bersih dan nyaman di 3 daerah; (2) Tersusunnya cetak biru pengembangan sistem distribusi nasional; (3) Terbangunnya pusat pengendalian dan tersedianya sistem pelaporan online harga dan stok komoditas di 5 provinsi percontohan dan pusat informasi distribusi nasional.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Departemen Perdagangan	61,0
(8)	7486	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Penyelenggaraan pasar lelang di 18 provinsi 20 lokasi (dekonsentrasi).	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Departemen Perdagangan	6,0
Fokus 9. Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan – Prioritas 4						
(1)	0102	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Terlaksananya reformasi birokrasi Departemen Keuangan pada 10 kantor DJKN modern. 2. Tersedianya laporan penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP). 3. Tersusunnya pola mutasi dan karir lingkup Depkeu.	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Depkeu	35,0
(2)	1355	Pemantapan Modernisasi Adiministrasi Perpajakan	1. Terlaksananya program PINTAR. 2. Tersedianya perangkat IT untuk 3 DPC di Makassar, Jambi, dan Surabaya, pengembangan ITSM dan SIDJP, serta pembangunan aplikasi SISMIOP – Perhutanan.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	396,8
(3)	1357	Reformasi Administrasi Sengketa Pajak (*Tax Court Reform*)	1. Tercapainya implementasi sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Teknologi Informasi sebesar 70%. 2. Tersedianya informasi dan putusan PP melalui *Web* sebanyak 2.400 file. 3. Tersusunnya 1 dokumen laporan mengenai standar format putusan/standar kepaniteraan. 4. Terbitnya TC media sebanyak 21 edisi.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	50,5
(4)	1364	Pengkajian Kebijakan/Analisis Tarif, Objek dan Subjek atas Bea Masuk, Cukai, Pajak &	Tersedianya rekomendasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP yang dimuat dalam 25 PMK dan 10	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	15,6

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		PNBP	laporan.			
(5)	1410	Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai	Terlaksananya modernisasi di bidang Kepabeanan dan Cukai dengan terbentuknya 9 KPPBC Madya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Kaltim, Kalbar, Lampung, Sumsel, Keppri, dan Bali.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	359,4
(6)	1411	Pengelolaan Risiko Fiskal	Tersedianya 13 laporan dan 4 model tentang risiko fiskal yang terukur dan kontinjen *liability* yang berkualitas.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	15,3
(7)	1413	Pengembangan Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai	Tersedianya sewa jaringan dan sistem informasi kepabeanan dan cukai dalam bentuk Pertukaran Data Elektronik (EDI) dan satu unit *server* untuk pelayanan PDE.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	96,6
(8)	1414	Peningkatan Sarana Pengawasan Kepabeanan	Terlaksananya pengawasan bidang kepabeanan yang diwujudkan dengan tersedianya 5 unit *scanner cabin*, *upgrade* 1 unit x-*ray container scanner*, rehab kapal patroli FPB 28, dan 10 unit mobil patroli.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	125,5
(9)	1427	Pembinaan/Koordinasi/Evaluasi dan Pelaporan PNBP	1. Tercapainya target PNBP Tahun 2010. 2. Terlaksananya pembayaran subsidi BBM dan elpiji tepat waktu.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	Depkeu	7,9
(10)	0043	Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran	1. Tercapainya 100% persentase jumlah satker yang konsep Surat Pengesahan DIPA-nya tepat waktu. 2. Tercapainya 100% persentase Surat Rincian Alokasi Anggaran yang disusun tepat waktu.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	13,3
(11)	0054	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	1. Tersedianya program aplikasi perbendaharaan (4 modul).	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	38,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			2. Tersedianya perangkat teknologi yang handal (1 modul) 3. Tersedianya peraturan dan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan.			
(12)	0069	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Tersedianya 2 laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	3,7
(13)	1369	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	1. Tersedianya 48 buku laporan realisasi APBN. 2. Tersedianya 60 laporan *Treasury Single Account* (TSA). 3. Tersedianya 12 dokumen perencanaan kas.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	15,0
(14)	1370	Peningkatan Perencanaan Kebijakan APBN	Tersusunnya NK dan RAPBN 2011 beserta RUU APBN 2011, NK dan RAPBN-P 2010 beserta RUU RAPBN-P 2010 secara tepat waktu.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	5,2
(15)	1371	Penyelenggaraan dan Peningkatan SIKD	1. Tersedianya infrastruktur dan jaringan pada 171 prov/kab/kota. 2. Tersedianya *database* keuangan daerah 510 prov/kab/kota. 3. Terlaksananya asistensi SIKS aplikasi keuangan daerah bagi daerah 171 prov/kab/kota. 4. Tersedianya 5 program aplikasi data dasar, APBD, anggaran transfer ke daerah, pinjaman dan hibah daerah serta pajak dan retribusi daerah.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	16,5
(16)	1372	Pengkajian Kebijakan/Analisis di Bidang Belanja Negara	1. Tersedianya 8 laporan dan 1 model mengenai rekomendasi kebijakan APBN dan proyeksi kebijakan fiscal. 2. Tersedianya *capacity building* pada program *degree* yang melibatkan 12 orang pejabat/staf Depkeu. 3. Tersusunnya Perpres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat secara tepat waktu.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	22,7
(17)	1373	Peningkatan Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah	1. Tersedianya penyusunan/pengumpulan/ pengolahan/*updating*/analisa dan statistik pada 510 prov/kab/kota. 2. Tersedianya data usulan pemerintah daerah yang diprioritaskan mendapat PHLN pada 40 prov/kab/kota. 3. Terselenggaranya kegiatan *monitoring* dan evaluasi pada 510 prov/kab/kota.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	30,9

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(18)	1405	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Tersedianya 20 KMK tentang penetapan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	8,4
(19)	1406	Pengelolaan Investasi dan Penerusan Pinjaman	1. Tersedianya 11 PMK perjanjian pinjaman yang diteruspinjamkan dan kredit program. 2. Tersedianya 3 dokumen rencana kebutuhan/penyediaan dana investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya. 3. Terlaksananya realisasi dana RDI /RPD.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	22,1
(20)	1417	Penyempurnaan dan Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah	1. Tersedianya 1 modul rencana pengembangan koneksitas proses bisnis bidang perbendaharaan dengan satker. 2. Tersedianya 1 modul rencana pengembangan proses bisnis dalam kerangka *asset liability management system.* 3. Tersedianya 2 modul rencana pengembangan koneksitas proses bisnis bidang perbendaharaan dengan sistem perbankan umum dan bank sentral.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara	Depkeu	108,1
(21)	0069	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	Tersedianya 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang teraudit dan 3 laporan yang belum teraudit.	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	Depkeu	7,3
(22)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bid.Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN	1. Tersusunnya 1 dokumen RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN. 2. Tersedianya penyempurnaan posting rule accrual (1 modul). 3. Tersusunnya sistem dan prosedur aplikasi web-based (1modul) 4. Tersusunnya sistem dan prosedur SAKIP dan SIAP (1 modul). 5. Penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) sebanyak 4 paket.	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	Depkeu	2,7
(23)	1419	Penyempurnaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis *Accrual*	1. Tersedianya 1 modul akuntasi berbasis *accrual*. 2. Penyempurnaan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam bentuk 1 buku. 3. Penyusunan 1 buletin Standar Teknis akuntansi	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	Depkeu	4,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			pemerintahan akuntansi berbasis *accrual*.			
(24)	1428	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	1. Tersedianya buku Daftar Satuan Pengguna Anggaran (1 modul). 2. Tersusunnya pedoman akuntansi Pemerintah Daerah (1 modul).	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	Depkeu	4,5
(25)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bid.Akuntansi Publik	1. Pengajuan RUU Akuntan Publik ke DPR. 2. Penyusunan naskah akademik PAD draft RUU tentang Laporan Keuangan Sektor Swasta/Privat.	Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan	Depkeu	3,7
(26)	1390	Penyusunan dan Evaluasi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan kerangka Ekonomi Makro	1. Tersedianya 17 laporan tentang pengembangan EED. 2. Tersedianya 7 jurnal yang memuat hasil kajian di bidang ekonomi dan keuangan.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	24,0
(27)	1394	Pengkajian/Analisis tentang Isu-isu Ekonomi dan Keuangan dalam Kerangka Kerja sama Internasional	Tersedianya 14 laporan dan 3 kesepakatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	22,0
(28)	1420	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1. Tercapainya 100% persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah tepat waktu. 2. Tercapainya 100% persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program.	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Depkeu	10,2
(29)	1421	Pengelolaan Surat Berharga Negara	Tercapainya 100% persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN.	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Depkeu	9,7
(30)	1422	Pengelolaan Portofolio dan Resiko Utang	Tersedianya 1 dokumen tentang strategi pengelolaan utang tahunan.	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Depkeu	2,5
(31)	1423	Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh eksternal auditor terhadap 2 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – Bendahara Umum Negara (LKPP-BUN).	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Depkeu	6,3
(32)	1429	Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Syariah	Tercapainya 100% persentase pemenuhan target pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah.	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Depkeu	7,8
(33)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penganggaran	Tersusunnya PMK Standar Biaya TA. 2011, PMK Tata Cara Revisi RABPP dan DIPA TA. 2010, dan PMK tentang Juknis Penyusunan RKA-KL TA. 2011 secara tepat waktu serta tersedianya rekomendasi atas evaluasi dan harmonisasi peraturan di bidang penganggaran.	Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran	Depkeu	9,4
(34)	4954	Kegiatan Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi BUMN	Terlaksananya privatisasi BUMN, restrukturisasi dan konsolidasi bertahap BUMN.	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN	Kemeneg BUMN	27,7
(35)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian	Penyempurnaan/Revisi UU BUMN, pelaksanaan legal	Program Pembinaan dan	Kemeneg BUMN	6,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
		Peraturan Perundang-undangan	*due diligence*.	Pengembangan BUMN		
(36)	4957	Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan BUMN	Penerapan GCG, *Fit and Proper Test*, Analisis Laporan Keuangan BUMN, Pelaksanaan Audit Teknologi.	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN	Kemeneg BUMN	20,0
Fokus 10. Peningkatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Keuangan – Prioritas 4						
(1)	0094	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data Statistik dan Informasi	Tersedianya 12 *database*/statistik dan 7 sistem informasi yang disempurnakan secara berkelanjutan.	Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan	Depkeu	17,9
(2)	1381	Peningkatan Kerjasama pengkajian Pengembangan Produk Pasar Modal dan LK Berbasis Syariah	Tersusunnya 2 peraturan dan 3 hasil kajian pengembangan produk pasar modal dan lembaga keuangan berbasis syariah.	Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan	Depkeu	2,5
(3)	0088	Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional	Terwujudnya kontribusi Bappepam-LK pada 10 pertemuan internasional, serta mengikuti perundingan perdagangan bebas bidang jasa keuangan non bank.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	5,8
(4)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya 4 draft dan 3 naskah akademik RUU di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan 19 peraturan baru/revisi yang menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap nasabah/investor/pelaku pasar, kelembagaan yang efisien dan pruden, serta harmonisasi peraturan dengan standar internasional.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	19,5
(5)	1398	Pemantapan Koordinasi Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan LK	Tersusunnya 20 laporan hasil pengawasan/pemeriksaan/ penyidikan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, tersedianya 20 pedoman/manual/peraturan melandasi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan	Depkeu	25,5
(6)	6801	Pengembangan Sistem Analisis dan Kajian TPPU	Tersusunnya 15.600 tabulasi data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM); Tersusunnya 480 Laporan Hasil Analisis (LHA); Tersedianya 104 Informasi Hasil Analisis (IHA); Tersusunnya 3 Pedoman Umum Direktorat Riset dan Analisis (PUDRA), Pedoman Teknis Riset dan Analisis (PTRA) I, Pedoman Teknis Riset dan Analisis (PTRA) II; Terselenggaranya *capacity building* tenaga riset dan analisis untuk 27 orang; Tersusunnya 3 laporan Tipologi TPPU; Tersusunnya 2	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	1,8

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Laporan Semesteran Tipologi; Tersusunnya 4 Laporan Manajemen Risiko; Tersusunnya 14 Laporan statistik LTKM; Tersusunnya 18 Laporan Hasil Riset dan Analisis Strategis (LHRAS).			
(7)	6802	Sosialisasi dan Penyamaan Pemahaman Kepada Aparat Penegak Hukum, PJK, dan Masyarakat Tentang TPPU	Terselenggaranya 9 kegiatan sosialisasi agar tercapainya persamaan persepsi dalam membangun rezim anti pencucian uang; Penyempurnaan 10 dokumen modul sosialisasi terkait Rezim *Anti Money Laundering* (AML), Kelembagaaan PPATK, UU TPPU dan Pendanaan Terorisme; Tersedianya 4 dokumen hasil kajian dan rekomendasi dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan kelembagaan; Terselenggaranya 2 kegiatan Seminar AML/*Counter Finance Terrorism* (CFT) dan isu terkait lainnya.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	1,3
(8)	6803	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PPATK	Terwujudnya pembangunan Gedung *Disaster Recovery Center* (DRC) seluas 2.000 m2; Pengadaan 74 unit *Meubelair* Gedung DRC; Pengadaan 17 unit Peralatan dan Mesin Gedung DRC; Pengadaan 1 paket perlengkapan sarana gedung DRC.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	27,3
(9)	6804	Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Tersusunnya 1 dokumen laporan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana implementasi Stranas 2010; Tersusunnya 1 dokumen laporan pelaksanaan Strategi Nasional,implementasi rekomendasi hasil *Mutual Evaluation Report*,dan kebijakan NPO; Terselenggaranya 6 dokumen penandatanganan Naskah MoU dengan FIU negara lain maupun lembaga terkait di dalam negeri; Terselenggaranya 5 kegiatan asistensi/koordinasi penanganan TPPU dengan aparat penegak hukum; Tersampaikannya 200 dokumen IHA LTKM ke penyidik; Tersusunnya 1 dokumen Sistem Prosedur dan Operasi (SPO) Pertukaran Informasi; Terjalinnya 1 kegiatan kerjasama yang efektif antara pihak donor dan instansi penerima di Indonesia terkait TPPU dan Anti Pendanaan Terorisme; Tercapainya 2 kegiatan pemahaman mengenai	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	5,1

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			mekanisme pertukaran informasi dan kegiatan operasional lainnya di *Financial Intelligent Unit* (FIU)/ negara lain; Terjalinnya 18 kegiatan kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan terpenuhinya iuran keanggotaan APG dan Egmont Group sebagai bentuk komitmen PPATK/Indonesia; Terciptanya 1 kegiatan kemampuan FIU yang diberi bantuan serta meningkatnya kredibilitas PPATK di dunia internasional; Laporan pertemuan *Working Group* Egmont Group, Sidang Tahunan, dan *Typologies Workshop* APG sebanyak 5 dokumen; Tersusunnya laporan perkembangan hasil *Mutual Evaluation* dan *Jurisdiction Report* untuk 3 kegiatan; Terlaksananya 5 kegiatan tindak lanjut atas MoU dengan FIU negara lain.			
(10)	6805	Pengawasan Pelaksanaan Kepatuhan PJK dalam Pelaporan TPPU	Tercapainya peningkatan kewajiban pelaporan bagi 75 Penyedia Jasa Keuangan (PJK); Tercapainya peningkatan keahlian auditor kepatuhan untuk 25 orang; Tersedianya 3 dokumen modul Pedoman Audit Kepatuhan dan Pedoman Pelaporan bagi PJK; Terselenggaranya 15 kegiatan sosialisasi/ workshop/diseminasi/seminar/ publikasi tentang kewajiban pelaporan bagi PJK; Tersedianya 1 Sistem *Back Office* Direktorat Pengawasan Kepatuhan (DPK) yang telah disempurnakan.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	1,8
(11)	6806	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komputerisasi Pengolahan Data	Disempurnakannya 4 dokumen pedoman teknis proses atau produk Teknologi Informasi; Terlaksananya 2 paket kegiatan inventarisasi dan pengajuan usulan perpanjangan, pengadaan, pemeliharaan *hardware* dan koneksi internet/*leased line* untuk DRC; Penyempurnaan 5 dokumen sistem keamanan TI PPATK sesuai dengan Standar Keamanan TI; Terselenggaranya 19 kegiatan *capacity building* di bidang TI; Tersedianya 3 paket sistem DRC PPATK dan pengembangan perangkat lunak sistem DRC; Tersusunnya 14 dokumen laporan pemeliharaan sistem operasional TI; Tersusunnya 36 dokumen laporan *update patch* sistem operasi dan *office automation*, serta pengelolaan anti virus; Tersusunnya 12	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	15,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			dokumen laporan bulanan pelaksanaan pengawasan (*monitoring*) *Firewall*, *Proxy* dan *Intrusion Prevention System*; Tersusunnya 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Fungsi Sistem *Expert*; Tersusunnya 1 dokumen pedoman teknis Implementasi Desktop Terpusa;, Tersusunnya 1 dokumen laporan tahunan pelaksanaan kegiatan *Review* Berkala terhadap Sisten Keamanan TI PPATK; Terlaksananya 7 dokumen laporan pemeliharaan kualitas (*quality assurance*) sistem aplikasi PPATK; Tersusunnya 1 dokumen persiapan ISO; Tersedianya 2 paket perangkat lunak dan lisensi; Tersusunnya 1 dokumen hasil audit dan rekomendasi teknologi informasi; Pengembangan 3 aplikasi *Suspicious Transaction Report* (STR), *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Cross Border Cash Carrying* (CBCC) yang terintegrasi; Pengembangan dan penyempurnaan 5 Aplikasi Eksplorasi *Database* dan aplikasi *front end*; Terintegrasinya 1database STR, CTR dan CBCC; Tersusunnya 1 dokumen rekomendasi penggunaan teknologi yang ideal untuk pelaporan PJK.			
(12)	6807	Penyempurnaan Peraturan Perundangan, Penelaahan, dan Pemberian Nasihat Hukum di Bidang TPPU	Terselenggaranya *capacity building* bidang hukum dan AML untuk 28 orang; Tersusunnya 8 dokumen laporan bantuan teknis hukum kepada apgakum dalam penyelesaian perkara TPPU dan tersampaikannya BAP Ahli; Tersusunnya 2 dokumen laporan *monitoring* persidangan perkara TPPU; Terselenggaranya 4 kegiatan seminar tentang TPPU dan Rezim AML; Penyempurnaan 7 naskah RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksana UU TPPU yang komprehensif; Tersampaikannya 1 dokumen rekomendasi terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait TPPU kepada instansi terkait yang komprehensif dan efektif; Tersusunnya 2 Draft Naskah Akademis RUU Perampasan Aset dan draft RUU Perampasan Aset; Tersusunnya 6 naskah Produk Hukum PPATK.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	3,4

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
(13)	6809	Penyelidikan TPPU	Tersusunnya 1 dokumen pedoman teknis penyelidikan TPPU; Pelatihan 10 orang tenaga penyelidik TPPU; Penyelidikan atas 100 kasus dugaan TPPU.	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan	PPATK	5,0
Fokus 17. Pengelolaan Kekayaan Negara – Prioritas 4						
(1)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bid. Kekayaan Negara	1 net draft RUU penilaian ke Biro Hukum; 1 RUU Pengelolaan Kekayaan Negara ke DPR; 1 net draft RPP pengelolaan kekayaan Negara ex.BPPN; 1 draft PP tentang BMAC.	Progran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara	Depkeu	8,0
(2)	1426	Inventarisasi dan Penilaian Kekayaan Negara/Barang Milik Negara	Tersedianya 14.000 laporan penilaian, yang terdiri dari : - Laporan penilaian barang milik negara - Laporan penilaian barang milik negara dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan - Laporan penilaian atas akses ex-BPPN - Laporan penilaian atas asset Bea dan Cukai - Laporan penilaian atas kekayaan negara yang dipisahkan - Laporan potensi dan nilai sumber daya alam - Laporan penilaian atas asset Ba	Progran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara	Depkeu	144,6

BAB 3
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BAB 3
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

A. Kondisi Umum

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mencakup pembangunan sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air dalam satu Sistem Inovasi Nasional serta pembangunan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kedua bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Sistem Inovasi Nasional (SIN)

Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa upaya mentransformasikan perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam ke perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi. Hal ini membutuhkan cara pandang dan tindakan yang sistemik dan sistematis dalam Sistem Inovasi Nasional (SIN).

SIN Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan pola hubungan yang saling memperkuat antara **unsur** penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan. Selanjutnya unsur yang dimaksud dalam SIN terdiri atas unsur kelembagaan, unsur sumber daya, dan unsur jaringan iptek dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Kelembagaan** ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang yang berfungsi untuk: (1) mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; dan (2) membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi masing-masing unsur kelembagaan ini adalah sebagai berikut:

   a. Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur SIN berfungsi membentuk sumberdaya manusia iptek;

   b. Lembaga litbang baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, maupun organisasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan iptek dan bertanggungjawab mencari berbagai invensi serta menggali potensi pemanfaatannya;

   c. Badan usaha sebagai salah satu unsur SIN berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang

memiliki nilai ekonomis dengan mengusahakan pendayagunaan manfaat keluaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Dalam rangka membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dari tahun 2005 hingga tahun 2008 telah ditetapkan beberapa regulasi yang penting, antara lain: (1) PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; serta (2) PP Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi. Di samping itu telah juga diterbitkan Kebijakan Industri Nasional melalui Perpres no. 28 tahun 2008 yang memberikan insentif bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

2. **Sumberdaya** iptek terdiri atas keahlian, komptensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana iptek. Setiap unsur kelembagaan iptek bertanggungjawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumberdayanya.

   Untuk memperkuat sumberdaya iptek telah dibangun gedung dan fasilitas 'Herbarium Bogoriense' di kawasan *Science Center* Cibinong yang diresmikan pada tahun 2007. Fasilitas Herbarium ini merupakan salah satu koleksi utama di dunia yang menyimpan lebih dari 2 juta spesimen tumbuhan. Fasilitas ini melengkapi Museum '*Zoologicum Bogoriense*', mempunyai koleksi spesimen fauna terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan 10-besar koleksi di dunia. Kedua fasilitas ini merupakan aset penting untuk menyimpan contoh flora dan fauna hasil eksplorasi. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan peralatan modern yang memungkinkan dilakukannya pengkajian lanjutan tentang manfaat kekayaan hayati Indonesia.
   Disamping itu, juga sedang dikembangkan pembangunan *Indonesian Culture Collection* (InaCC), yaitu Pusat Penyimpanan Mikroba, untuk menjadi aset bangsa. Dalam batas ketentuan Konvensi Budapest yang mengatur mengenai mikroba, maka InaCC diharapkan untuk segera mendapatkan pengakuan dunia. '*Herbarium Bogoriense*' dan Museum *'Zoologicum Bogoriense'* adalah dua instalasi keilmuan Indonesia yang telah menjadi rujukan masyarakat dan ilmuwan dunia dan menjadi basis bagi pengembangan teknologi.

3. **Jaringan** iptek berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri. Jaringan terbentuk oleh adanya kemitraan antar unsur kelembagaan, berdasarkan adanya saling kepentingan karena unsur yang satu dapat mengisi, melengkapi, dan memperkuat unsur yang lain.

   Salah satu upaya untuk membangun jaringan antara lembaga litbang dengan industri adalah penyedian infrastruktur pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas

(measurement, standardization, testing, and quality/MSTQ). Hasil yang telah dicapai dalam kurun 2005 hingga 2008 adalah: telah dibangun laboratorium Metrologi dan Pengujian serta laboratorium pengujian Electro Magnetic Compatibility (EMC) merupakan pusat metrologi ilmiah yang terlengkap di Indonesia. Sampai dengan medio 2008 kemampuan kalibrasi dan pengukuran nasional telah memperoleh pengakuan internasional.

2) Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan IPTEK

Sesuai dengan Agenda Riset Nasional 2006-2009, pelaksanaan program penelitian dan pengembangan iptek pada keenam bidang fokus untuk kurun waktu 2005 hingga 2008 telah menghasilkan sebagai berikut: (1) ketahanan pangan, (2) energi baru dan terbarukan, (3) teknologi dan manajemen transportasi, (4) teknologi informasi dan komunikasi, (5) teknologi pertahanan dan keamanan, dan (6) teknologi kesehatan dan obat-obatan. Berdasarkan pengelompokkan ini, hasil-hasil yang dicapai untuk kurun waktu 2005 hingga 2008 adalah sebagai berikut:

Untuk mendukung ketahanan pangan, telah berhasil dikembangkan dan dilepas beberapa varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai. Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai, kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas sapi unggul. Di samping itu juga telah berhasil dikembangkan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit cacing hati, serta kit *Radioimmunoassay* (RIA) untuk inseminasi buatan, dan berbagai suplemen pakan multi nutrisi.

Untuk Fokus Area Energi Baru dan Terbarukan, telah diujicoba pemakaian minyak kelapa sawit asli pada mesin diesel genset, pemakaian minyak nabati pada kompor, pemakaian minyak nabati pada mobil pengganti minyak solar, dan campuran minyak nabati *Pure Plant Oil* pada beberapa kendaraan dalam bentuk kegiatan *Road Show* Menado – Jakarta. Di samping itu telah dikembangkan pemanfaatan fuel grade ethanol sebagai bahan bakar di sektor transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk *Fuel Grade Ethanol* (FGE) serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20. Selanjutnya telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak nabati berbasis biji jarak untuk subtitusi BBM termasuk alat press biji jarak yang *portable* dan *transportable* sehingga mudah diterapkan.

Pada Fokus Area Teknologi dan Manajemen Transportasi, telah dikembangkan teknologi Boogie kereta *duorail* dan *monorail* pada kecepatan medium dan tinggi; teknologi persinyalan dan sistem peringatan otomatis penutup pintu perlintasan kereta api; *Rail Fastening* (KA Clip) untuk memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek permukaan (*Wing in Surface Effect Ship* – WISE). Selanjutnya pada Fokus Area Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah dibangun sistem *Technical Assistance* Pengembangan *E-Government*, paket aplikasi SIMDA.

Untuk Fokus Area Teknologi Pertahanan dan Keamanan, telah berhasil dikembangkan panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan panser 4x4 untuk mengangkut 12 personil; disain dan contoh awal senjata berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI; amunisi gas air mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian kerusuhan massa; alat komunikasi yang dinamakan *Tactical Radio Communications Hf-90 Transceivers* dan *Tactical Radio Communicartions* Vhf-90 Ina *Transceivers*; radio jammer untuk mengganggu sistim, komunikasi musuh dan sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh; transponder sasaran torpedo latih yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal selam di sekitar Kapal Atas Air; pesawat udara tanpa awak (PUNA); *Blast Effect Bomb* (BEB) yang merupakan bom latih yang memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam.

Di bidang peroketan dan keantariksaan hingga tahun 2007 telah berhasil dikembangkan roket dengan diameter 320 mm, RX-320 dan telah diluncurkan; roket balistik dan roket kendali berukuran kecil – sedang dengan bobot sampai dengan 243 Kg berdaya jangkau s/d 51 Km; serta telah dikembangkan produksi bahan bakar roket Amonium Perklorat (AP); propelan *double base* untuk substitusi propelan yang sudah kadaluarsa, misal untuk roket FFAR. Di samping itu, juga berhasil dikembangkan satelit mikro untuk penginderaan jauh melalui kerjasama dengan Jerman.

Untuk Fokus Area Teknologi Kesehatan dan Obat-obatan, telah dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit kanker dan infeksi bakteri; telah dikembangkan protein human EPO yang saat ini akan memasuki uji klinis; interferon I-2a yang sering digunakan sebagai anti viral dan anti kanker; produk herbal menjadi bahan baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu Indonesia telah membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu Burung sendiri.

Di samping ke enam fokus area di atas, kegiatan-kegiatan penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial telah dilakukan kajian mengenai keterkaitan antara demokratisasi, kebangkitan sentimen primordialisme dan eksistensi kebangsaan yang menunjukkan bahwa demokratisasi sebagai suatu paradoks, yang memberikan peluang sekaligus kemunduran bagi penguatan kebangsaan. Meski semangat kebangkitan primordialisme makin meluas, namun masih terindikasi adanya peluang dan potensi untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Hasil ini menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya komprehensif yang meliputi: pengembangan model demokrasi yang berorientasi dialogis; pemantapan pemahaman kebangsaan; menumbuhkan Pemerintah yang peduli terhadap hakekat keIndonesiaan; perluasan aspek kognitif yang menekankan substansi keberagamaan sebagai penyeimbang bagi kebangkitan sentimen primordialisme.

B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Berdasarkan *The Global Competiveness Report 2008-2009* yang dikeluarkan *World Economic Forum* pada tahun 2008, untuk *Global Competiveness Index* (GCI) Indonesia masih menempati peringkat 55 dari 134 negara. Menurut laporan ini, dukungan inovasi

dalam daya saing nasional terkendala dengan lemahnya kapasitas inovasi nasional, kolaborasi antara universitas – litbang – dan industri, serta lemahnya pemanfaatan paten.

Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diuraikan ke dalam dua bagian besar yaitu belum berdayanya SIN dalam mendorong inovasi di dalam negeri, serta masih lemahnya substansi penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek.

Kelemahan dalam SIN Indonesia dapat dijabarkan pada ketiga unsurnya sebagai berikut: (1) unsur kelembagaan yang belum kondusif ditunjukkan antara lain oleh kebijakan pemerintah yang belum memadai, terjadinya tumpang-tindih kegiatan penelitian, serta masih rendahnya investasi teknologi; (2) unsur sumberdaya yang belum kuat ditunjukkan oleh kualitas dan kuantitas SDM iptek yang belum memadai serta terbatasnya ketersediaan sarana dan prasara; dan (3) unsur jaringan yang belum terbangun ditunjukkan oleh kurangnya keterkaitan kelembagaan, interaksi, dan kerjasama difusi inovasi. Untuk mengatasi kelemahan SIN maka sasaran pembangunan pada tahun 2010 adalah tercapainya tahap awal penataan unsur-unsur SIN sehingga secara keseluruhan mampu bersinergi dalam meningkatkan dukungan iptek dalam daya saing nasional.

Kelemahan dalam substansi penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek dapat ditunjukkan oleh masih rendahnya efektifitas pengoperasian pusat-pusat riset yang ada, sedangkan pusat-pusat riset yang strategis mendukung daya saing nasional belum terbangun dengan baik. Untuk itu, sasaran pembangunan tahun 2010 adalah peningkatan efektifitas pengoperasian pusat-pusat keunggulan yang ada dan tercapainya tahap awal pembangunan pusat riset yang strategis.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Pembangunan iptek pada tahun 2010 diarahkan pada:

Pertama: Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) melalui ketiga unsurnya yaitu: (1) menata kelembagaan iptek; (2) penguatan sumberdaya iptek yang mencakup peningkatan kompetensi sumberdaya manusia serta peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana riset; serta (3) penataan jaringan iptek baik antar lembaga litbang maupun antara lembaga litbang dengan masyarakat pengguna.

Kedua: Peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan riset dan perekayasaan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, kegiatan-kegiatan riset dan perekayasaan tersebut diarahkan pada: (1) menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi; (2) mendukung kebutuhan untuk bidang kehidupan. Dengan demikian peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek difokuskan pada: konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hayati; bioteknologi; energi; penerbangan dan keantariksaan; tenaga nuklir; pertanian, perikanan; peternakan, dan kehutanan; kesehatan dan kedokteran; pertahanan dan keamanan; teknologi informasi dan komunikasi; lingkungan hidup; nanoteknologi; perekayasaaan; dan sosial.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010
PRIORITAS BIDANG: PENGUATASN SISTEM INOVASI NASIONAL

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
1. PENATAAN KELEMBAGAAN IPTEK						
a.	5020	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IPTEK	Rehabilitasi infrastruktur perkantoran LIPI Pusat	Penguatan Kelembagaan Iptek	LIPI	6,5
b.	6866	Pengembangan dan Penyusunan Indikator Iptek dan statistik Iptek Nasional/ Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek	Pemutakhiran Indikator dan Statistik Iptek nasional	Penguatan Kelembagaan Iptek	LIPI	6,0
d.	0020	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi	Naskah RUU	Pengembangan Standarisasi Nasional	BSN	2,0
e.	7155	Perbaikan Proses Pengembangan SNI	Pengembangan SNI	Pengembangan Standarisasi Nasional	BSN	7,75
2. PENGUATAN SUMBERDAYA IPTEK						
a.	5020	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IPTEK	150 karya siswa program S2 dan 150 karya siswa S3	Penguatan Kelembagaan Iptek	Kemeneg. Ristek	50,0
b.	0108	Penguatan Pengadaan Peralatan Laboratorium (Animal Husbandary Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat Milk Project)	Dana Pendukung Pelaksanaan Proyek Meat Milk Pro	Penguatan Kelembagaan Iptek	LIPI	2,0
d.	6921	Revitalisasi dan pendayagunaan reaktor, instalasi dan fasilitas nuklir	Laporan (a) revitalisasi laboratorium karakterisasi dan analisis nuklir, (b) laboratorium bahan industri nuklir; (c)	Penguatan Kelembagaan IPTEK	BATAN	30,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			revitalisasi instalasi listrik kawasan nuklir Bandung; (d) revitalisasi fasilitas dan instalasi bahan galian nuklir di kawasan Kalan, Kalbar; (e) revitalisasi peralatan Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR) dan dan sarana keselamatan lingkungan; (f) revitalisasi fasilitas nuklir Instalasi Radiometalurgi (IRM) dan Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE); (g) revitalisasi sistem pengendalian keselamatan, perawatan dan modifikasi Sistem Reaktor RSG-GAS; dan (h) revitalisasi fasilitas peralatan Iradiasi, laboratorium dan peralatan penunjang; revitalisasi siklotron dan fasilitas Iradiasi serta sarana penunjang laboratorium dan proses radioisotop dan radiofarmaka menuju ke tingkat GMP			
3. PENATAAN JARINGAN IPTEK – INDUSTRI						
a.	6863	Pendayagunaan Iptek bagi Pembangunan Daerah dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Wilayah	Penerapan dan Pengembangan Teknologi tepat Guna (TTG) di 5 provinsi	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	LIPI	9,0
b.	6868	Pengembangan Prasarana Rujukan Bagi Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas (MSTQ) (Penguasaan Iptek dan Teknologi pengujian garda depan dan sistem penjaminan mutu)	Terakreditasinya laboratorium teknik pengujian EMC untk 4 produk uji dan 7 produk peralatan kesehatan; Terujinya sistem pelayanan pengukuran melalui jaringan internet; Terkoordinasikannya kegiatan metrologi dan teknik pengujian dalam paket kegiatan technologi	Penguatan Kelembagaan Iptek	LIPI	2,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
c.	2024	Pelaksanaan Litbang dan Aplikasi Teknologi Hasil Litbang	Pelaksanaan 40 paket Program Iptekda	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	LIPI	6,0
d.	1199, 1200	Pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi	1000 judul penelitian yang menghasilkan paten, jurnal internasional, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, kebijakan publik, metodologi, karya seni dan buku ajar	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Depdiknas	255,0
e.	5012	Penyelenggaraan Insentif Peningkatan Inovasi & Kapasitas Iptek Sistem Produksi	80 paket pengembangan prototype, hasil uji coba prototype, modifikasi sistem produksi untuk produk baru	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Kemeneg. Ristek	40,0
f.	5007	Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Teknologi	50 paket produk teknologi inovatif unggulan	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	Kemeneg. Ristek	25,0
g.	5003	Insentif Penelitian Dasar	20 paket penelitian dasar	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Kemeneg. Ristek	10,0
h.	5017	Insentif Penelitian Terapan	50 paket penelitian terapan	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Kemeneg. Ristek	25,0
i.	2047	Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri	5 Teknologi (baru), 4 Pabrik pupuk organik, 2 Permen Mitigasi	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	16,5
j.	2050	Penerapan standardisasi, akreditasi dan peningkatan mutu	Penerapan di 107 Perusahaan lokal serta penetapan pemberlakuan SNI Wajib (10 Permen)	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Depperin	22,9
k.	6917	Diseminasi hasil litbang iptek nuklir	Laporan survei penerimaan masyarakat P. Jawa terhadap pemanfaatan iptek nuklir untuk energi dan non energi; dan 3 media masa yang mensosialisasikan informasi iptek nuklir	Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	BATAN	7,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
l.	6924	Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir	Laporan inovasi dan teknoekonomi hasil litbang berbasis iptek nuklir; dan MoU kerjasama inovasi fabrikasi perangkat medik	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BATAN	0,75
m.	5168	Pengembangan Inovasi UMKM berbasis teknologi	Paket kegiatan UMKM Inovatif, wirausaha, audit teknologi dan SD inovasi bidang prioritas	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BPPT	20,0
n.	2047	Pengembangan teknologi Baru dan Aplikasi Industri	Otomasi Industri untuk Pabrik Gula dan Baja. Manufaktur logam untuk kesehatan dan hankam, pengembangan pipa apung dan SRF, inteligent manufaktur serta refrigerasi absorbsi	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BPPT	10,0
o.	0054	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	3 modul database pendukung inspeksi, perizinan, kearsipan dan kepegawaian	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	BAPETEN	0,55
p.	7152	Perluasan Penerapan SNI	1 Paket Pengembangan Penerapan SNI	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	BSN	5,0

PRIORITAS BIDANG: PENINGKATAN PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
1. KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI						
a.	5072	Peningakatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 paper ilmiah di jurnal internasional terkait dengan koordinasi dan pengembangan kebijakan iptek utk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim globa	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	Kemeng. Ristek	10,0
b.	0039	Penyelenggaraan Litbang	Penelitian dan penguasaan iptek kebumian : Model dan konsep mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan kebumian dan iklim, konsep eksplorasi dan tata ruang berbasis SDA dan bencana, konsep pemanfaatan potensi sumber daya air, lahan, mineral dan energi serta pengembangan teknologinya, sistem informasi kebumian dan diseminasi informasi kebumian, model dan rekomendasi pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, model proses produksi sumber daya perairan , pertemuan forum kelautan negara2 Asia Pasifik (IOC Westpav) dan Ecohydrology Asia Pasifik, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kebencanaan	Penelitian dan Pengembangan Iptek	LIPI	10,0
c.	6870	Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP)	Terlaksananya Survey Monitoring Reef Health di 15 lokasi, In country training di 8 lokasi; workshop di 8 lokasi; Pendidikan dan pendampingan teknis untuk penyadaran di 7	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	LIPI	28,4

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			lokasi; Pembinaan SDM dan penguatan kelembagaan CRITC, pencetakan dan diseminasi buku.			
d.	4016	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	Model pengembangan kawasan konservasi in situ dan ex situ Kebun Raya di 5 lokasi	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI	10,0
e.	4101	Penyelenggaraan riset, eksplorasi dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan	Pelaksanaan sejumlah riset dan survei Iptek kelautan non perikanan, Pengembangan Iptek kelautan untuk mitigasi perubahan iklim, pengembangan UPT Kelautan di Kawasan Timur	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI	12,0
f.	6862	Eksplorasi, bioprospeksi, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDH) dan Sumber Daya Genetik (SDG), Molecular Farming, Transgenetik, ploiploidi	Penambahan koleksi, jenis baru dan catatan baru (Flora, fauna dan mikroba) di Indonesia, model pengelolaan SDH dan SDG, Informasi jenis SDH berpotensi termasuk hasil rekayasa genetika; Prototipe dan contoh produk; bertambahnya Biota terdomestikasi dan ter-reintroduksi; Paket teknologi pemanfaatan SDH; Usulan perlindungan jenis yang terancam punah untuk diundangkan; Mewakili kepentingan Indonesia dalam forum internasional terkait dengan keanekaragman hayati dan lingkungan termasuk CITES, CBD, MAB, PROSEA, Flora Malaysiana, BCGI, ATBC, GTI	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI	10,0
2. BIOTEKNOLOGI						
a.	6865	Pengembangan Bioresource Center,	Pengembangan BRC, penambahan koleksi,	Penelitian dan	LIPI	10,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
		Microbial Culture Collection	data base; sistem pengelolaan berstandar internasional yang diakui, regulasi pertukaran pertukaran spesimen, penelitian pemanfaatan koleksi plasma nutfah, kerjasama, rintisan bank DNA, biji dan cryoopreservas	Pengembangan IPTEK		
3. ENERGI						
a.	6936	Penyiapan infrastruktur dasar pendukung pembangunan PLTN	5 dokumen mencakup (a) monitoring seismologi dan meteorologi, (b) konsep dokumen AMDAL serta pemutakhiran site data report PLTN Muria; (c) survei tapak di Banten tahap penapisan II; (d) data survei deformasi tanah di Muria menggunakan GPS Geodetik, (e) prasurvey di Bangka Belitung; (f) penyusunan program pengembangan SDM PLTN dan konsep fasilitas pelatihan dan 1 laporan laporan community development di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTN	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BATAN	7,55
b.	7002	Peningkatan Penguasaan Teknologi Produksi Bahan Bakar Nabati dan Energi Alternatif Lainnya (Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih)	PLTP skala kapasitas 2 MW, Gasifikasi Batubara sebagai substitusi BBG dan BBM, Tek Efisiensi Energi untuk Menurunkan Elastisitas Energy Nasional, Substitusi Bahan Bakar Nabati (BioFuel). Sistem kelistrikan dan solar termal, PLT angin, PLT arus, Optimalisasi SD energi (markal), pencairan batubara dan fuel cell	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BPPT	40,0
c.	7068	Peningkatan Kemampuan Kapasitas Litbang Sistem Konversi Energi Angin	Komponen SKEA 50 KW dan integrasi serta uji coba; Komponen SKEA 300 KW,	Penelitian dan Pengembangan	LAPAN	1,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			Pengukuran potensi angin	Iptek		
d.	6869	Pengembangan Teknologi Fuel cell dan alat penghemat BBM (Electric Fuel Treatment) (Pengembangan Teknologi Fuel Cell, Bio Fuel dan Panas Surya)	Pengembangan lebih lanjut energi hidrogen dan teknologi fuel cell, sistem transportasi ramah lingkungan dan hemat energi dengan Konsep Hibrid Car; Optimasi bahan baku dan energi dalam pembuatan ingot besi, pengembangan biofuel, pengembangan teknologi concentrated solar power skala 50 W	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI	10,0
4. PENERBANGAN DAN KEANTARIKSAAN						
a.	7003	Rancang Bangun Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dan Kapal Motor Bersayap (WISE)	Prototipe PUNA, Tsunami Ealry Warning System, SIRRMA, HARIMAU dan penahan pantai artificial	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	BPPT	10,0
b.	7054	Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa Teknologi Roket	Uji terbang roket 2 tingkat RX 420/420, Uji terbang roket cair daya 500 kgf, Pengembangan Lab. Kendali, Uji terbang roket 530, Litbang dan produksi bahan baku propelan (TDI, AP dan HTPB), Pengembangan space mindedness (uji muatan, payload dan kendali) bagi mahasiswa, desain konfigurasi varian roket 420, desain dan model ramjet, uji validasi G54 muatan roket s/d 60 G, Meningkatkan perhitungan komputasi 30 Gflop/detik, Operasional sistem stasiun peluncuran roket, Kendaraan operasional di lapangan, Renovasi Lab/kantor/ruang kerja, Pengadaan mixer skala kecil, Hidrant, genset, casting skala kecil, Kajian/litbang atmosfer dan	Penelitian dan Pengembangan Iptek	LAPAN	45,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			iklim untuk variabilitas cuaca/iklim dan dampaknya, Peralatan penelitian, upgrading sistem stasiun bumi pengamat dirgantara dan operasi stasiun pengamat dirgantara dan radar, Akuisisi data radar atmosfer untuk pemodelan perubahan iklim/cuaca, data ozon dan geomagnet.			
c.	7065	Litbang dan Rekayasa Teknologi Satelit Mikro dan Stasiun Bumi	Pengujian dan integrasi sistem satelit mikro A2 dan satelit radio amatir (Amsat), Biaya peluncuran satelit uji tahap awal orbit dari satelit mikro A2 dan Amsat, sparepart untuk LEOPs (Launch Early Orbit Phase), Networking operasi stasiun bumi Parepare - Biak dan Rumpin, Kajian lingkungan antariksa, Space debris dan orbit satelit, Kajian gangguan komunikasi pengaruh interaksi atmosfer ionosfer dan dampaknya, Desain sistem satelit mikro A3, Planetarium mobile.	Penelitian dan Pengembangan Iptek	LAPAN	25,0
d.	7066	Penelitian Sains Antariksa, Atmosfir, Iklim, Ionosfir dan Geomagnet	Litbang pemodelan interaksi matahari-ionosfer-atmosfer-bumi dan gangguannya, Litbang koreksi GPS berdasarkan koreksi ionosfer, informasi cuaca antariksa, fenomena antariksa, orbit satelit dan potensi benda jatuh, aktivitas harian geomagnet serta precursor gempa bumi , kondisi ionosfer dan komunikasi radio, TEC dan waktu tunda, Test/uji coba VHF radar, Diseminasi hasil litbang berbasis web operasional website,	Penelitian dan Pengembangan Iptek	LAPAN	5,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			variabilitas cuaca antariksa, Hasil penelitian dan layanan tentang fisika atmosfer, kimia atmosfer dan lingkungan atmosfer,			
e.	7067	Litbang Sist. Tek. Penginderaan Jauh dan St. Bumi	Litbang teknologi akuisisi dan pengolahan data satelit inderaja, Litbang sensor (payload imager) dan kamera satelit, Litbang sistem stasiun bumi dan perekaman data, Litbang model aplikasi data inderaja, Operasi perekaman, akuisisi, pengolahan data inderaja, Pengembangan modul-modul pengolahan data dan aplikasi pemanfaatan, Litbang koeraksi geometrik, radiometrik untuk satelit mikro generasi III, Pengembangan model aplikasi untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, ketahanan pangan, mitigasi bencana	Penelitian dan Pengembangan Iptek	LAPAN	5,0
5. TENAGA NUKLIR						
a.	6909	Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	(5 dokumen (a) bangtek fabrikasi perangkat bahan bakar nuklir reaktor riset dan reaktor daya; (b) bahan struktur dan dukung elemen bakar nuklir burn up tinggi; (c) bangtek proses konversi bahan bakar nuklir – proses konversi Yellow Cake menjadi serbuk UO2 murni nuklir (Skala meja); (d) pra-studi kelayakan pabrik ZrO2 kapasitas industri 50 ton/tahun; (e) pembakuan metode pengujian pra dan pasca Iradiasi bahan dan bahan bakar nuklir; dan 1 prototip bahan acuan standar UxSiy hasil pengembangan	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	2,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
b.	6910	Pengembangan Teknologi Perekayasaan Perangkat Nuklir	6 modul prototype, mencakup (a) sistem instrumentasi dan kendali reaktor riset dan daya; (b) pencacah RIA untuk diagnosis hepatitis B, pesawat sinar-X Fluoroscopy, Brachyterapy Medium Dose Rate dan perangkat deteksi dini virus flu burung; dan (c) sistem pencitraan petikemas dan dokumen desain pencitraan material dalam reaktor Petrokimia dengan teknik serapan sinar Gamma	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	3,3
c.	6911	Pengembangan Teknologi Proses Radioisotop	3 dokumen, mencakup (a) pengembangan teknologi pembuatan radioisotop untuk keperluan diagnosa dan terapi kanker servics, payudara dan prostat; (b) pengembangan teknologi pembuatan sumber radiasi untuk terapi; (c) teknologi produksi radiofarmaka untuk diagnosa dan terapi	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	4,2
d.	6912	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	4 jenis jenis benih varietas pangan tersertivikasi; 3 galur harapan tanaman pangan baru; 1 formula formula suplemen pakan ternak; 2 bahan bahan vaksin ternak untuk mencegah penyakit spesifik ternak dan bahan kit RIA untuk peningkatan reproduksi sapi, dan 2 dokumen pengembangan teknologi isotop dan radiasi untuk pengelolaan sumberdaya air, panasbumi dan pengembangan teknologi perunut serta pengembangan biofertilizer dan	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	3,4

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			biocyclofarming			
e.	6913	Pengembangan Teknologi Reaktor dan Energi Nuklir	5 dokumen mencakup (a) hasil kajian teras RSG-GAS densitas optimal; (b) dokumen kajian reaktor riset inovatif;(c) kajian sistem keselamatan dan keandalan teras fitur keselamatan reaktor daya; (d) dokumen awal teras dan sistem konversi reaktor kogenerasi RGTT (HTGR); dan (e) dokumen pendukung URD reaktor daya PWR.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	2,4
f.	6914	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah	2 dokumen mencakup (a) pengembangan teknologi proses pengolahan limbah radioaktif, limbah B3 dan bahan bakar nuklir bekas serta sistem informasi manajemen limbah radioaktif; (b) studi wilayah potensial penyimpanan limbah lestari ; Konsep desain PLLR tipe “Near Surface Disposal” serta laporan kesiapan teknologi pendukung penyiapan PLLR	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	2,9
g.	6932	Pengembangan Teknologi Bahan Galian Nuklir	6 dokumen mencakup (a) data potensi Th dan U di Kabupaten Bangka Tengah, Kodya Pangkal Pinang, dan Ketapang - Kalbar; (b) data cadangan U kategori tereka di sektor Kawat, Mahakam Hulu Kalimantan Timur; (c) peta digital eksplorasi BGN di Kalan Kalimantan Barat;(d) prototipe reaktor pengendapan RE (OH)3 skala laboratorium; (e) teknik/metoda pemisahan U dan Th dengan metoda Resen Penukar Ion; dan (f)	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	3,5

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
			dokumen data pemantauan lingkungan dengan luas cakupan 20 km2 di Kalan Kalbar.			
h.	6934	Pengembangan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	2 dokumen mencakup (a) metode standardisasi dan kalibrasi radiasi dan (b) teknik penatalaksanaan kanker payudara dan prostat dengan teknik nuklir; dan 1 bahan vaksin malaria dengan radiasi pengion	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BATAN	5,0
i.	7183	Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Pengawas Tenaga Nuklir	13 Kajian bidang FRZR dan IBN	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	BAPETEN	1,6
j.	7181	Pengembangan Regulasi Pemanfaatan Nuklir	7 PerKa, 1 naskah akademik, 1 perpres dan 2 Amandemen PP bidang FRZR dan IBN	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	BAPETEN	2,2
k.	7182	Penguatan Pengawasan Pemanfaatan Nuklir	3 Pedoman sistem penunjang pengawasan PLTN, 6 prosedur penunjang inspeksi, 4 instruksi kerja mendukung perizinan instalasi nuklir	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	BAPETEN	2,6
l.	7184	Penguatan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	56 Paket Laporan Hasil Inspeksi FRZR, 1 laporan kegiatan proteksi radiasi dan keselamatan nuklir di bidang radiodiagnostik	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	BAPETEN	3,1
m.	7185	Pengawasan Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir (INBN)	54 Laporan Hasil Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, 2 pedoman penunjang pengawasan INBN	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	BAPETEN	1,7
6. PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN						
a.		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Tersusunnya 9 paket IPTEK hasil penelitian dan pengembangan kehutanan integrative	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Dephut	31,2
b.		Perencanaan, evaluasi, kerjasama dan	Tersusunnya 20 paket dokumen	Penelitian dan	Dephut	50,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
		peningkatan sarana penelitian dan pengembangan	perencanaan, evaluasi pelaporan, dan terlaksananya kerjasama penelitian dan peningkatan sarana prasarana	Pengembangan IPTEK		
c.		Penerapan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan	Terlaksananya 20 paket diseminasi dan pemasyarakatan hasil litbang kehutanan	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Dephut	12,7
d.	7001	Pengembangan Diversifikasi Produk dan Pangan Berbasis Jagung Serta Protein Hewani (Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Kemandirian Pangan Nasional)	Produk Derivat CPO, Paket Teknologi Ikan Nila Unggul, pangan fungsional, lab. iptiab, jagung dan bibit unggul tanaman perkebunan dan kehutanan	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	BPPT	10,0
7. KESEHATAN DAN KEDOKTERAN						
a.	0058	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang	Pemanfaatan hasil Riskesdas di 200 kab/kota, 7 publikasi ilmiah nasional dan internasional dan 4 policy option hasil penelitian dan pengembangan		Depkes	24,0
b.	5028	Penelitian Penyakit Menular Tropis	1 paket peralatan laboratorium penelitian untuk emerging deases sesuai standar WHO dan 13 hasil penelitian penyakit menular tropis	Program Penguatan Kelembagaan Iptek	Kemeneg. Ristek	20,0
c.	6972	Pengembangan Obat Herbal (Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produk Generik)	Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik Amoxycilin, obat herbal, biosensor untuk deteksi dini keanfalan tubuh, biomaterial untuk kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Iptek	BPPT	7,5
8. PERTAHANAN DAN KEAMANAN						
a.	2558, 2559, 2560	Litbang, Rekayasa, dan Pengembangan Kemandirian Industri Pertahanan Nasional	Tersedianya produk Litbanghan dan prototype alutsista produksi dalam negeri	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan	Dephan/TNI	35,0

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
b.	0054	Pengembangan Sistem Jaringan Teknologi Informatikan dan Komunikasi (Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pemerintahan dan Kemanan)	Prototipe CNS/ATN; Sistem Informasi untuk Keamanan Pemerintah; Sistem Infrastruktur Akuntabilitas Presiden; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), free open source, Digital Broadcasting serta INGN	Penelitian dan Pengembangan Iptek	BPPT	10,0
9. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
a.	5026	Melanjutkan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source	1 prosedur, 1 standardisasi dan implementasi interoperabilitas teknologi informasi dan komunikasi berbasis open source	Difusi dan Pemanfaatan Iptek	Kemeneg. Ristek	10,0
10. LINGKUNGAN HIDUP						
a.	5064	Iptek Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia	Kajian Penguatan Kapasitas Iptek Kebencanaan dan Peta Probabilitas Gempa di Indonesia	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek	Kemeneg. Ristek	10,0
b.	6967	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan dan Kebumian (Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan dan Kebumian untuk Mendukung Energi, Pangan dan Penanggulangan Bencana)	Teknologi Lingkungan untuk mengantisipasi global warming, Efisiensi Sumberdaya Air, Mini plant bijih besi, Teknologi inventarisasi SDA untuk ketahanan pangan, teknologi pengelolaan SD lahan wilayah, remediasi serta eksplorasi migas.	Penelitian dan Pengembangan Iptek	BPPT	7,5
11. NANOTEKNOLOGI						
a.	6867	Pengembangan Material Baru dan Nano Teknologi	Pengembangan metodologi, proses, dan karakterisasi Advance Material dan Nano Teknologi; Terciptanya Peralatan proses dan alat uji material baru dan nano teknologi, Terlaksananya penerapan Advance Material dan Nano Teknologi untuk bidang prioritas	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI	8,0
12. PEREKAYASAAN						

No.	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milliar)
a.	2024	Pelaksanaan Litbang dan Aplikasi Teknologi Hasil Litbang	Penerapan Teknologi Kendali pada Sistem Kereta Api, Teknologi Produksi Otomotif Komponen Bus, WISE, Kapal ikan hidup, ditching model pesawat, sephul bubble vessel, komponen motor bakar	Penelitian dan Pengembangan Iptek	BPPT	10,0
13. SOSIAL						
a.	2117	Pengembangan Tematis Technopolis	1 Paket pengembangan tematis technopolis	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI	5,0
b.	5016	Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Dukungan Iptek untuk Kebijakan Pemerintah	Kajian Issu strategis bidang Sosial Ekonomi Politik: Pemetaan upaya pengentasan kemiskinan, tata pemerintahan/kebijakan dan pengelolaan lingkungan, SDA yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi (ICT) serta pengaruh eksternal (global/internasional); rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya ekonomi Indonesia, berbagai kajian tentang kependudukan dan ketenagakerjaan, diplomasi dan demokrasi Indonesia, etnisitas	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI	5,0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4
SARANA DAN PRASARANA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4
SARANA DAN PRASARANA

A. Kondisi Umum

Sarana dan prasarana berperan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Infrastruktur transportasi berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang mobilisasi manusia dan distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Sarana dan prasarana lainnya seperti telekomunikasi, listrik, dan air juga merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata serta pengelolaan Sumberdaya Air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Arahan RPJPN 2005 – 2025 menyebutkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, maju, adil dan merata untuk mendukung: (1) pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (2) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (3) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; dan (4) memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana maka Pemerintah mengupayakan alternatif sumber pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dalam Inpres 5/2008 disebutkan kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui KPS diantaranya melalui percepatan penyediaan tanah dan pembiayaan serta penegasan kebijakan pemerintah dalam kewajiban layanan publik. Beberapa agenda kegiatan prioritas yang harus diselesaikan dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur melalui KPS adalah penyusunan tatacara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur, percepatan pembangunan model proyek KPS, peningkatan kualitas proyek KPS melalu fasilitasi pengembangan proyek dan penyusunan daftar proyek KPS.

Sementara itu peraturan yang menjadi tonggak baru pelaksanaan KPS yaitu Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur saat ini telah selesai proses revisinya dan diharapkan akan dapat segera disahkan. Revisi Perpres ini akan disertai dengan lampiran pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Selain revisi Perpres 67/2005, beberapa keluaran yang terkait dengan pengembangan KPS di lingkup sektor telah berhasil diselesaikan. Setelah pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pemerintah juga telah mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan secara menyeluruh melalui upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dengan

tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga harus didukung oleh peran serta masyarakat dan ketersediaan data serta informasi yang tepat, akurat dan terpercaya.

Dalam rangka meningkatkan keandalan ketersediaan air, pada tahun 2008 telah diselesaikan kegiatan pembangunan 3 buah waduk, operasi dan pemeliharaan 119 buah waduk yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan tampungan air dalam skala kecil/menengah sebanyak kurang lebih 111 buah embung. Sementara itu dalam tahun 2009 kegiatan dalam meningkatkan keandalan ketersediaan air antara lain: (1) rehabilitasi 5 waduk dan 20 embung; (2) pembangunan 6 waduk dan 17 embung; (3) operasi dan pemeliharaan 23 buah bangunan penampung air; dan (4) peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air di 15 provinsi.

Terkait dengan peningkatan dan optimalisasi penyediaan air baku untuk usaha tani, pada tahun 2008 telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi seluas sekitar 118,5 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas sekitar 238,6 ribu hektar, pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk mengairi lahan seluas 1.060 hektar dan peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas sekitar 459,2 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2009 peningkatan dan optimalisasi yang akan dilakukan antara lain: rehabilitasi jaringan irigasi seluas 239 ribu hektar, peningkatan jaringan irigasi seluas 68,9 ribu hektar, rehabilitasi jaringan rawa seluas 170 ribu hektar, peningkatan jaringan rawa seluas 20,7 ribu hektar, peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif di 15 propinsi dan 100 kabupaten/kota.

Capaian pemenuhan kebutuhan air baku non pertanian pada tahun 2008 antara lain: pembangunan saluran air baku dengan kapasitas terpasang 8 m3/detik untuk melayani kebutuhan sekitar 3 juta jiwa, pembangunan tampungan air baku sebanyak 9 buah, rehabilitasi prasarana air baku sekitar 84 buah, dan rehabilitasi tampungan air baku sebanyak 5 buah. Sedangkan pada tahun 2009 kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: operasi dan pemeliharaan tampungan air baku di 34 lokasi, rehabilitasi 20 buah tampungan air baku, pembangunan 35 buah tampungan air baku, rehabilitasi 4 buah prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku, pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan kapasitas 4,14 m3/dt, pembangunan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan di 12 lokasi.

Dalam rangka mengurangi dampak bencana alam yang disebabkan oleh daya rusak air baik berupa banjir maupun abrasi pantai kegiatan yang telah dilakukan tahun 2008 adalah pemasangan dan pengoperasian peralatan pendugaan banjir (*flood forecasting*) di 2 wilayah sungai, pembangunan prasarana pengendali banjir kurang lebih sepanjang 58,54 km untuk mengamankan kawasan seluas 10 ribu hektar, pembangunan pengamanan pantai kurang lebih sepanjang 20,69 km. Pada tahun 2009 kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengurangi dampak bencana alam yang disebabkan oleh daya rusak air adalah: operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir 240 km, rehabilitasi prasarana pengendali banjir di 49 lokasi, pembangunan 232,37 km prasarana pengendali banjir, rehabilitasi 4,45 km sarana/prasarana pengaman pantai, pembangunan 47,25 km sarana/prasarana pengaman pantai, pembangunan 12 unit prasarana pengendali lahar gunung berapi.

Terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada tahun 2008 telah diselesaikan: (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; (2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; (3) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air sebagai dasar pembentukan Dewan Sumber Daya Air. Pemilihan anggota Dewan Nasional Sumber Daya Air (DNSDA) dari unsur non pemerintah sebagaimana dalam Perpres No. 12 Tahun 2008 telah diselesaikan, dan pembentukan DNSA

melalui keppres No. 6 tahun 2009. Sementara itu pada tahun 2009 dalam rangka memfasilitasi penyusunan, mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya air akan dilaksanakan penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan amanat UU No 7 Tahun 2004, pembentukan Dewan Sumber Daya Air di tingkat nasional dan daerah, perkuatan balai-balai pengelolaan sumber daya air, pembentukan, penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air, dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data.

2. Transportasi

Pembangunan transportasi diperlukan untuk meningkatkan kelancaran pergerakan penumpang dan barang ke seluruh wilayah Nusantara. Selama tahun 2008, secara umum produksi dan kondisi fasilitas transportasi telah meningkat seiring dengan peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas infrastruktur transportasi. Meskipun demikian, masih terus diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, kelancaran, keamanan, keselamatan, keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan sejalan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan oleh masyarakat. Pelayanan transportasi di dearah yang belum berkembang juga masih terbatas.

Kegiatan prasarana jalan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 adalah : (1) penanganan jalan lintas utama yang meliputi 318 Km jalan pada Lintas Timur Sumatera, 332 Km jalan pada Lintas Pantai Utara Jawa, 282,9 Km jalan pada Lintas Selatan Kalimantan, dan 260,4 Km jalan pada Lintas Barat Sulawesi, serta 1.401,2 Km jalan pada lintas lainnya; (2) melanjutkan pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 2.329,6 m, pembangunan 258,8 Km jalan pada kawasan perbatasan, 69,7 Km jalan akses di pulau terluar dan terdepan, (3) pembangunan 4.618 m *flyover* di Pantura Jawa dan perkotaan Jabodetabek serta kota metropolitan lainnya; (4) pembangunan 0,5 Km jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 Km jalan akses Bandara Kuala Namu; (5) pembangunan 33,2 Km jalan pada Lintas Pantai Selatan Jawa; (6) dukungan penyiapan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan jalan tol strategis yang merupakan bentuk pola kerjasama pemerintah dan swasta. Upaya yang dilakukan di atas, pada akhir tahun 2008 kondisi mantap jalan nasional menjadi 83 persen dari total panjang jalan nasional dan strategis nasional sepanjang 36.406 Km. Kecepatan rata-rata meningkat menjadi 45,5 km/jam dari 44,9 km/jam pada tahun 2007. Kapasitas jalan juga meningkat menjadi 82.360 lajur-kilometer pada tahun 2008 dari 74.930 lajur-kilometer pada tahun 2005. Panjang jalan tol yang beroperasi menjadi 687,87 Km dengan dioperasikannya 12,8 Km jalan tol SS Waru-Bandara Juanda dan 11,6 Km jalan tol Makassar Seksi IV.

Pada tahun 2009 kegiatan prasarana jalan akan dilaksanakan: (1) pemeliharaan 31.169,0 km jalan nasional dan 63.781,4 m jembatan sepanjang; (2) rehabilitasi 1.189,6 km jalan nasional dan 7.493,6 m jembatan; (3) pembangunan 110 km jalan kawasan perbatasan dan 250 m jembatan; (4) pembangunan 69 km jalan di pulau terluar/terdepan dan 190 m jembatan; (5) peningkatan 640 km jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa; (6) peningkatan 1.725,8 km jalan dan 6.243,9 m jembatan pada lintas utama yaitu lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, dan lintas lainnya serta non lintas; (7) pembangunan 64 km jalan baru dan strategis serta 226 m jembatan; (8) pembangunan 2 buah *flyover* di Pulau Jawa (*North Java Corridor*) serta beberapa *flyover* lain sepanjang 1.794 m; (9) pembangunan 73 km jalan lintas selatan Jawa dan 765 m jembatan; (10) pembangunan 73 km jalan lintas selatan Jawa dan jembatan 765 m; (11) pembangunan 7 km jalan akses Kuala Namu; (12) pembangunan 1,532 km jalan akses tol Tanjung Priok; (13) pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Kertosono; (14) peningkatan kapasitas jalan nasional berupa penambahan lajur jalan menjadi 84.985 lajur km pada akhir 2009 dari 74.930 lajur km pada tahun 2005; serta (15) rehabilitas jalan dan jembatan Ex-BRR NAD dan Nias sepanjang 265 km.

Pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilakukan tahun 2008, antara lain: pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ berupa 1.949.000 m marka jalan, 70.902 m *guardrail*, 15.651 buah rambu jalan, 22.935 m *delineator*, 524 buah rambu penunjuk pendahulu jalan (RPPJ), 52 unit *traffic light*, 15 unit *warning light*, 72 buah cermin tikungan, 8.550 buah paku marka, *LED Hi-Flux* 252 unit, manajemen dan rekayasa lalu lintas di berbagai lokasi; pembangunan fasilitas jembatan timbang 6 lokasi; pengadaan dan pemasangan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan jalan dilakukan pengadaan 31 unit bus perintis; 111 unit bus sedang non AC, 47 unit bus sedang AC, dan 40 unit bus besar untuk angkutan perintis, kota, pelajar, dan mahasiswa; serta pelayanan angkutan jalan dan trayek perintis di 20 provinsi. Disamping itu juga telah dilaksanakan pengembangan BRT (*Bus Rapid Transit*) di Yogyakarta, Bogor dan Surabaya.

Pada Tahun 2009 kegiatan pembangunan LLAJ yang akan dilakukan antara lain: (1) peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi jalan; (2) peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal; (3) meningkatkan pengawasan pelanggaran muatan lebih melalui pengoperasian jembatan timbang yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran muatan lebih di jalan; (4) pengembangan angkutan massal di perkotaan/metropolitan yang didukung oleh *feeder service* yang terpadu dengan pelayanan angkutan pada wilayah pengembangan kawasan; (5) meningkatkan aksesibilitas angkutan darat antara pusat kota dan *oultet* (bandara), pusat produksi dan *outlet* (pelabuhan laut); serta (6) menyelesaikan revisi UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada tahun 2008 pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang dilakukan antara lain: (1) peningkatan jalan KA sepanjang 544,3 km di lintas utama Jawa dan Sumatera; (2) Peningkatan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan sebanyak 17 paket di Jawa dan Sumatera; (3) lanjutan pembangunan perkeretaapian di NAD sepanjang 9,0 km; (4) lanjutan pembangunan jalur ganda lintas Serpong – Maja (termasuk elektrifikasi *track* eksisting) sepanjang 11,7 km, lintas Tegal – Pekalongan sepanjang 22,7 km, lintas Cirebon – Kroya (segmen 2) sepanjang 24,5 km, parsial jalur ganda antara Tulungbuyut – Blambangan Umpu; (5) lanjutan pembangunan *double-double track* Manggarai – Cikarang; (6) pengadaan rel UIC-54 sebanyak 58,0 km (kontrak tahun jamak) dan wesel UIC-54 sebanyak 50 unit; (7) penyelesaian pekerjaan KRDI sebanyak 8 unit; (8) pengadaan kereta ekonomi (K3 termasuk KMP3 sebanyak 25 unit; (9) modifikasi KRL menjadi KRDE sebanyak 20 unit; (10) pengadaan kereta penolong/NNR sebanyak 2 unit; (11) gerbong kerja sebanyak 20 unit; (12) lanjutan pengadaan KRL baru (program KfW) sebanyak 40 unit; (13) rehabilitasi persinyalan, telekomunikasi dan pelistrikan pasca gempa di Sumatera Barat; (14) *engineering services* untuk pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT); serta (15) Penyelesaian rencana Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Selama tahun 2009 pembangunan perkeretaapian yang akan dilakukan antara lain: (1) modifikasi stasiun Cirebon; (2) lanjutan pembangunan perkeretaapian di NAD; (3) lanjutan pembangunan jalur ganda lintas Serpong – Maja (termasuk elektrifikasi *track* eksisting) lintas Tegal – Pekalongan, lintas Cirebon – Kroya (segmen 3), parsial jalur ganda antara Tulungbuyut – Blambangan Umpu; (4) *engineering services* untuk pembangunan jalur ganda segmen 1 dan 3 lintas Cirebon – Kroya; (5) pembangunan jalur KA antara Sidoarjo-Gunung Gangsir lintas Surabaya-Bangil sebagai pengganti jalur KA yang terendam akibat lumpur Sidoarjo; (6) peningkatan jalur KA di lintas utama Jawa dan Sumatera sepanjang 326,64 km; (7) peningkatan jembatan KA di Jawa dan Sumatera sebanyak 76 buah; (8) dimulainya konstruksi pembangunan jalur KA *double-double track* Manggarai-Cikarang; (9) peningkatan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan di Jawa dan Sumatera sebanyak 17 paket; (10) pengadaan rel R. 54 sebanyak 118 km; (11) pengadaan kereta ekonomi (K3) termasuk KMP3 sebanyak 35 unit; (12) Pengadaan KRDI sebanyak 12 unit; (13) Pengadaan kereta kedinasan

sebanyak 2 unit; (14) pengadaan railbus (tahap 1) sebanyak 3 unit; (15) modifikasi KRL menjadi KRDE (tahap 1) sebanyak 25 unit; (16) lanjutan pengadaan KRL baru (program KfW) sebanyak 40 unit; (17) pengadaan kereta inspeksi sebanyak 1 set; (18) pengadaan train simulator sebanyak 1 paket; serta (19) pengesahan rencana Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Pembangunan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) tahun 2008 adalah: (1) rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan pada 22 lokasi dan dermaga sungai 8 lokasi; (2) pembangunan dermaga penyeberangan baru 14 dermaga baru dan 54 dermaga lanjutan, dermaga sungai 18 dermaga baru dan 6 dermaga lanjutan, dan dermaga danau 5 dermaga; (3) pengadaan dan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan rambu sungai berupa 15 rambu suar dan 900 rambu sungai; (4) pembangunan sarana SDP berupa 12 unit pengadaan kapal perintis (lanjutan) dan 16 unit (baru), 7 unit bus air, 3 unit kapal patroli dan 1 unit kapal latih; (5) pembangunan *break water* pelabuhan penyeberangan; (6) pelayanan angkutan penyeberangan perintis antara lain: lintasan dalam provinsi 68 lintasan, antar-provinsi 8 lintasan untuk 36 buah kapal; serta (7) pengerukan alur dan kolam pelabuhan penyeberangan 2.225.000 m3.

Selama tahun 2009 pembangunan prasarana ASDP yang akan dilakukan antara lain: (1) peningkatan keselamatan melalui rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta penyediaan sarana bantu navigasi; (2) peningkatan aksesibilitas pelayanan melalui pembangunan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di daerah kepulauan dan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan; (3) peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal; (4) perbaikan tatanan pelayanan angkutan antar-moda; serta (5) pengembangan jaringan pelayanan ASDP di Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.

Pembangunan transportasi laut pada tahun 2008 antara lain adalah (1) pembangunan fasilitas pelabuhan di Dumai-Riau, Sorong, Manokwari, Agats, Raja Ampat, Tg. Buton-Riau, Garongkong, Maccini Baji, Pamatata, Bantaeng dan Palopo; (2) persiapan pembangunan fasilitas sistem Telekomunikasi Pelayaran Tahap 4 yang tersebar di seluruh Indonesia; (3) Pengadaan kapal navigasi (*ATN Vessel*) 4 unit; (4) pembangunan *vessel traffic information system* (VTIS) di Teluk Bintuni Papua Barat; (5) pembangunan peralatan sistem monitoring SBNP di Tanjung Datu-Kalimantan Barat; (6) pembangunan dan rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (menara suar, rambu suar, rambu tuntun); (7) pembangunan kapal navigasi; (8) pembangunan tahap pertama 2 unit kapal GT 2000; (9) pembangunan tahap pertama 5 unit kapal perintis; (10) pengadaan peralatan SAR laut 23 Set; (11) pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di 17 lokasi; (12) peningkatan dan sosialisasi keselamatan pelayaran di 9 lokasi pelabuhan; (13) rehabilitasi fasililitas pelabuhan pada 150 UPT pelabuhan; (14) pembangunan sistem *National Single Window* untuk 3 pelabuhan (Belawan, Semarang dan Tg Perak); dan (15) Pelayanan angkutan laut perintis di 54 trayek.

Selama tahun 2009 pembangunan transportasi laut yang akan dilakukan antara lain: (1) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan; (2) lanjutan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Belawan di Sumatera Utara, Raja Ampat dan Manokwari di Papua Barat,dan Bitung di Sulawesi Utara; (3) persiapan pembangunan Indonesia *Ship Reporting System* (INDOSREP) di Selat Sunda dan Selat Lombok serta pembangunan *Vessel Traffic Services* (VTS) di wilayah Selat Malaka; (4) lanjutan pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran Tahap 4 yang tersebar di seluruh Indonesia; (5) pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; (6) lanjutan pembangunan 8 unit kapal perintis; (7) penyelesaian pembangunan kapal navigasi (ATN Vessel) 7 unit; (8) Peningkatan sistem pengamanan pelabuhan (*Port Security System Improvement*) di 9 Pelabuhan (Belawan, Dumai, Tg. Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Pontianak, Benoa, Bitung dan Makassar); serta (9) penyelesaian penyusunan Peraturan

Pemerintah sebagai tindak lanjut terbitnya Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pembangunan transportasi udara pada tahun 2008 diantaranya adalah (1) rehabilitasi fasilitas landasan, fasilitas bangunan, dan fasilitas terminal yang tersebar di beberapa provinsi; (2) rehabilitasi Peralatan Keselamatan Penerbangan dan Penunjang Operasional 11 paket di Bengkulu, Kepri, Babel, Papua, Papua Barat dan DKI Jakarta; (3) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan sebanyak 9.224 paket/unit yang tersebar di beberapa provinsi; (4) lanjutan pembangunan bandara Kualanamu (Medan) dan Hasanuddin (Makassar); (5) pengembangan Bandara di Dobo (Maluku), Saumlaki Baru (Maluku), Seram Bagian Timur (Maluku), Namniwel (Maluku), Sam Ratulangi (Manado, Sulut), bandara pengganti Dumatubun (Langgur, Maluku), Waghete baru (Papua); (6) pembangunan/peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan bencana di 13 lokasi; (7) pembangunan/peningkatan bandara di ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran; (8) pelayanan angkutan udara perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis untuk 92 rute dan 2.442 drum di 15 provinsi; (9) selesainya revisi Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan.

Selama tahun 2009 pembangunan transportasi udara yang akan dilakukan antara lain: (1) lanjutan konstruksi bandara Kualanamu-Medan (2) pembangunan bandara di daerah perbatasan; (3) peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan dengan menyediakan peralatan keselamatan dan keamanan penerbangan; (4) penyelenggaraan penerbangan perintis di wilayah terpencil/pedalaman; serta (5) penyelesaian peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pembangunan prasarana penunjang transportasi mencakup pembangunan SAR serta pendidikan dan pelatihan transportasi. Pembangunan SAR yang dilakukan tahun 2008 meliputi: pengadaan 6 unit *Rescue Boat* ukuran 36 m, 25 unit *rescue truck*, 1 unit *rescue hoist*, 1 set *emergency floating*, pengadaan 1 set *avionic* pesawat helikopter BO-105, alat selam 5 paket, *hydraulic rescue tool* 5 set, *rescue car* 5 unit, *motor all train* 40 unit, dan prasarana penunjang operasional lainnya. Pembangunan pendidikan dan pelatihan transportasi meliputi pembangunan balai diklat kepelautan di NAD, Sorong, dan Ambon; pembangunan *Maritime Education and Training Improvement* (METI); pengembangan STT Transportasi Darat di Makassar dan NAD; Pengembangan STPI Curug menuju *center of excelence* dan Program PC-200; pengadaan fasilitas penunjang diklat dan pembangunan/peningkatan prasarana diklat, perbaikan/perawatan sarana dan prasarana diklat, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2007 jumlah lulusan diklat perhubungan sebanyak 409.375 orang yang terdiri dari diklat awal 6.426 orang, diklat prajabatan 4.532 orang, diklat penjenjangan 757 orang, diklat teknis 396.906 orang dan diklat luar negeri 667 orang.

Pada tahun 2009, pembangunan prasarana penunjang transportasi yang akan dilakukan antara lain: (1) lanjutan pembangunan balai diklat kepelautan di NAD, Sorong, dan Ambon; (2) lanjutan pembangunan *Maritime Education and Training Improvement* (METI); (3) pengembangan STT Transportasi Darat di Makassar dan NAD; (4) pengembangan STPI Curug menuju *center of excelence* dan Program PC-200; serta (5) peningkatan fasilitas dan sarana operasi pencarian dan penyelamatan yang meliputi pengadaan peralatan komunikasi SAR dan pembangunan gedung operasional SAR di 48 lokasi.

Hasil-hasil yang akan dicapai dalam melanjutkan reformasi transportasi pada tahun 2009 adalah penyelesaian beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunan pelaksanaan dari UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian, UU No.17/2008 tentang Pelayaran, serta UU No. 1/2009 tentang Penerbangan serta penyelesaian revisi UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian diharapkan

penyelanggaraan transportasi dapat dilaksanakan dengan baik yang akhirnya akan memberikan jaminan yang lebih baik dalam kelancaran arus barang dan jasa serta manusia di seluruh wilayah Indonesia.

3. Perumahan dan Permukiman

Kegiatan pembangunan perumahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 adalah: (1) penyediaan subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPR-RSH) sebanyak 97.238 unit dan subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS-Mikro) sebanyak 42.263 unit; (2) pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasar sebanyak 9.443 unit; (3) pembangunan rumah khusus (transmigrasi, pasca bencana NAD-Nias, rehabilitasi pasca bencana DIY-Jateng) sebanyak 8.742 unit; (4) fasilitasi dan stimulasi perbaikan dan pembangunan perumahan swadaya sebanyak 4.850 unit; (5) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman di 260 kelurahan; (6) Penataan bangunan dan lingkungan (PBL) di 144 kelurahan; (7) pembangunan infrastruktur permukiman kawasan terpencil/pulau kecil/terluar di 44 kawasan; (8) dukungan penyediaan infrastruktur untuk 101.059 unit rumah di kawasan perumahan PNS/TNI-Polri/pekerja.

Beberapa kegiatan pembangunan perumahan dan pernukiman yang akan dilakukan tahun 2009 sebagian besar merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dalam rangka pencapaian target RPJMN. Perkiraan pencapaian kegiatan pembangunan perumahan tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) Penyediaan subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPR-RSH) 136.400 unit dan subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS-Mikro) sebanyak 33.600 unit; (2) Pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasar sebanyak 1.728 unit; (3) Pembangunan rumah khusus (transmigrasi, pasca bencana NAD-Nias, rehab pasca bencana DIY-Jateng) sebanyak 13.915 unit (4) Fasilitasi dan stimulasi perbaikan dan pembangunan perumahan swadaya sebanyak 10.000 unit; (5) Penataan dan perbaikan lingkungan permukiman di 285 kelurahan; (6) Penataan bangunan dan lingkungan (PBL) di 180 kelurahan; (7) Pembangunan infrastruktur permukiman di satu kawasan terpencil/pulau kecil/terluar; (8). Dukungan penyediaan infrastruktur untuk 65.000 unit rumah di kawasan perumahan PNS/TNI-Polri/pekerja.

Pada bidang penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman layak, kegiatan yang telah dilaksanakan hingga tahun 2008 antara lain : (1) penyediaan air minum dengan kapasitas 8.130 L/detik yang melayani 2,2 juta jiwa penduduk dan (2) pembangunan prasarana dan sarana air limbah di 69 kab/kota; dan pembangunan persampahan di 66 kab/kota; dan (4) terbangunnya drainase perkotaan seluas 71 Ha.

Sementara perkiraan pencapaian kegiatan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman layak yang akan dilakukan tahun 2009 antara lain : (1) Penyediaan air minum dengan kapasitas 5,154 L/detik yang melayani 4,57 juta jiwa penduduk; (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah di 109 kab/kota; (3) Pembangunan persampahan di 147 kab/kota; dan (4) Pembangunan drainase perkotaan seluas 2,169 Ha.

4. Energi

Sampai dengan tahun 2008 hasil-hasil yang telah dicapai pada pembangunan infra stuktur energi adalah : (1) pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat tahap I dan tahap II dengan total investasi US$ 1,508 juta yang diharapkan akan mampu mengalirkan gas sebesar 1700 MMSCFD; (2) pembangunan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat melalui *Domestic Gas Market Development Project* dengan total investasi sebesar US$ 80 juta; (3) beberapa investor dalam negeri telah menyampaikan keinginannya untuk melakukan

investasi pembangunan infrastruktur terminal penerima LNG (LNG *Receiving terminal*) di Jawa Barat dan Jawa Timur; (4) penambahan pasokan gas domestik, melalui penandatanganan 20 (dua puluh) kontrak jual beli gas (GSA dan HoA) dengan total volume 1,5 TCF; (5) penerbitan 56 ijin usaha kegiatan hilir, dengan komitmen investasi sebesar US$ 653,9 juta; dan (6) pencanangan program percepatan substitusi BBM dengan memanfaatkan LPG, BBG dan briket batubara. Pada sisi lain pembangunan infrastruktur gas bumi belum semuanya berjalan, misalnya ruas transmisi Kalimantan-Jawa (Bontang-Semarang) dan ruas trans-Jawa, yang erat kaitannya dengan proses bisnis yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dampaknya adalah jaringan trans Jawa juga ikut tertunda. Oleh karena itu terus diupayakan untuk kelanjutan pembangunan ruas transmisi Kalimantan-Jawa Tengah dan trans-Jawa, serta beberapa wilayah distribusi yang dekat dengan ruas transmisi eksisting (diantaranya Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya); serta (7) penyempurnaan beberapa regulasi diantaranya adalah penerbitan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, penerbitan cetak biru (*blueprint*) Pengelolaan Energi Nasional (PEN) sebagai panduan arah pengembangan energi nasional yang merupakan penjabaran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Secara umum pencapaian bauran energi (*energy mix*) belum menunjukkan komposisi adanya penyehatan dan jaminan keamanan pasokan energi nasional. Sebagian besar masih didominasi oleh pemanfaatan energi fosil/konvensional (BBM). Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) porsi pemanfaatan BBM masih sebesar 51,66 persen. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yaitu panas bumi, mikrohidro, surya, angin dan biomassa belum sepenuhnya menunjukkan capaian yang berarti jika dibandingkan dengan potensi sumberdaya yang ada.

Khusus mengenai program kemitraan dalam rangka implementasi konservasi energi perlu dilakukan upaya-upaya tindak lanjut seperti menambah jumlah peserta (target) kemitraan, fasilitasi pendanaan dalam rangka implementasi hasil rekomendasi audit energi, dan menyediakan bantuan teknis untuk industri kecil dan menengah.

Adapun perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2009 adalah (1) melanjutkan upaya pembangunan transmisi ruas Kalimantan-Jawa Tengah dan trans-Jawa, serta beberapa wilayah distribusi yang dekat dengan ruas transmisi eksisting (diantaranya Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya); (2) pengembangan jaringan gas kota di 2 (dua) kota yaitu Surabaya dan Palembang, termasuk kejelasan pengelolaan dan aspek legalitasnya pascakontruksi jaringan gas tersebut; (3) berkembangnya pemanfaatan potensi energi lokal dengan memanfaatkan EBT terutama di daerah perdesaan termasuk kegiatan diseminasi dan *capacity building* guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME); dan (4) tersusunnya rumusan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi untuk mendukung efisiensi penyediaan, pemanfaatan dan konservasi energi.

5. Ketenagalistrikan

Sampai saat ini, pembangunan ketenagalistrikan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, dimana penyediaan tenaga listrik merupakan pasar monopsoni (*multi seller*, *single buyer*) yang dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh PT. PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK). Selanjutnya, upaya penyempurnaan regulasi telah dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 2006. Penyempurnaan regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan dalam penyediaan tenaga listrik, serta untuk mendorong upaya diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi selain minyak. Hal tersebut dilakukan mengingat peran koperasi, swasta, dan Pemda masih terbatas, bahkan tingkat keberhasilan *independent power producers* (IPP) sampai saat ini hanya sekitar 13 persen dari seluruh IPP yang saat ini telah mendapat ijin.

Kebijakan harga (*pricing policy*) di bidang ketenagalistrikan adalah penentuan tarif oleh pemerintah dan subsidi. Namun, tarif dan subsidi yang diberikan selama ini belum memberikan margin yang cukup bagi PKUK untuk melakukan pengembangan usaha. Selain itu, kebijakan subsidi yang diberikan selama ini juga belum tepat sasaran.

Adapun pencapaian utama pembangunan ketenagalistrikan di tahun 2008 adalah (1) meningkatnya rasio desa berlistrik 92,0 persen. Pencapaian tersebut diantaranya merupakan hasil dari pembangunan listrik perdesaan yang berupa penambahan pembangunan PLTS 50 WP sebanyak 19.555 Unit, PLTMH sebesar 1.845 KW sebanyak 8 Unit, PLT Bayu sebanyak 2 Unit, PLTS Terpusat 15 kW sebanyak 10 unit, JTM sepanjang 1.306,0 kms, JTR sepanjang 1.323,0 kms, dan Gardu Induk sebanyak 921,0 unit sebesar 44.895,0 kVA; (2) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 65,1 persen, yang diantaranya merupakan hasil dari pembangunan induk pembangkit dan jaringan berupa lanjutan pembangunan jaringan transmisi baik 150kV, 175kV, maupun 275 kV dan 500 kV, dan juga pembangunan pembangkit listrik baik oleh PT. PLN, *independent power producers* (IPP), maupun pembangkit terintegrasi, sehingga kapasitas pembangkit meningkat menjadi 30.345 MW dimana sebesar 82 persen atau sebesar 24.925 MW berasal dari pembangkit PLN.; (3) bauran energi (*energy mix*) untuk pembangkit listrik masih belum sehat dimana sampai dengan tahun 2008 komposisinya terdiri dari Batubara sebesar 39 persen, Gas Bumi sebesar 20 persen, BBM sebesar 30 persen, Panas Bumi sebesar 3 persen, dan Tenaga Air sebesar 8 persen; (4) pengembangan jaringan terintegrasi di sistem Jawa-Madura-Bali (JAMALI), sistem Sumatera, Sistem Kalimantan, dan sistem Sulawesi dengan tingkat susut jaringan penyaluran masih di atas 11 persen; dan (5) telah diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN. Permen tersebut merupakan bagian dari Permen ESDM nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Kedua peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, terutama panas bumi.

Perkiraan pencapaian utama pembangunan ketenagalistrikan di tahun 2009 adalah (1) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi sekitar 93 persen yang direncanakan merupakan hasil dari penambahan pembangunan pembangkit skala kecil dan menengah yang menggunakan energi baru terbarukan (PLTS, PLTMH, dan PLT Bayu) dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi (gardu induk, JTM, dan JTR); (2) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 66,3 persen melalui pembangunan jaringan transmisi 500kV, 275 kV, 175kV, dan 150kV beserta Gardu Induk serta jaringan distribusi. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut juga didukung oleh bertambahnya kapasitas pembangkit seiring dengan selesainya pembangunan pembangkit listrik dari program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW diantaranya yaitu PLTU Labuhan Banten, PLTU Rembang, dan PLTU Indramayu, serta beberapa pembangkit listrik IPP lainnya; dan (3) tersusunnya rumusan tentang peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan serta fasilitasi terhadap pembangunan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh swasta.

6. Pos dan Telematika

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga yaitu tahun 2015-2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, tetapi juga meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur pos dan telematika yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan, merupakan persyaratan utama dan harus dimanfaatkan secara optimal, bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi.

Hasil pelaksanaan program pembangunan pos dan telematika pada tahun 2008 antara lain (1) penyediaan layanan pos di 2.350 kantor pos cabang luar kota (kpclk) sebagai pelaksanaan program *Public Service Obligation* (PSO); (2) penyelesaian proses pelelangan penyediaan jasa akses telekomunikasi sebagai pelaksanaan program *Universal Service Obligation* (USO); (3) penyusunan rancangan awal RUU Telekomunikasi di era konvergensi pengganti UU No. 36 Tahun 1999; (4) pemantauan pembangunan jaringan serat optik sebagai tulang punggung telekomunikasi nasional (Palapa Ring); (5) pembukaan peluang usaha (pelelangan) untuk penyelenggaraan telekomunikasi Sambungan Langsung Jarak Jauh; (6) pelaksanaan konsultasi publik dan persiapan dokumen lelang dalam rangka pembukaan peluang usaha untuk penyelenggaraan *broadband wireless access* (BWA); (7) operasionalisasi *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengamanan dan pengawasan jaringan internet di Indonesia; (8) pembuatan prototipe produk telekomunikasi dalam negeri untuk mendukung implementasi BWA; (9) penurunan tarif seluler menjadi salah satu yang termurah di Asia; (10) pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (11) penyusunan konsep awal RUU *Cyber Crime*; dan (12) pelaksanaan tahap awal proyek percontohan *e-government* di Batam bekerja sama dengan Otorita Batam dan *e-local government* bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Selatan, Pemprov Kalimantan Timur, Pemko Magelang, dan Pemkab Solok. Melalui perkuatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi, teledensitas akses telekomunikasi menjadi 11,49 persen[5] untuk sambungan tetap (PSTN dan *fixed wireless access*) dan 61,72 persen[6] untuk sambungan bergerak.

Perkiraan pencapaian kegiatan pokok tahun 2009 di antaranya (1) penyediaan layanan pos di 2.350 kpclk; (2) penyediaan jasa akses telekomunikasi di 24.828 desa dan layanan akses internet setidaknya di 2.109 kecamatan; (3) penyediaan pemancar TVRI di 25 lokasi *blank spot* dan perbatasan; (4) penyusunan rancangan awal RUU Konvergensi pengganti UU Telekomunikasi; (5) lanjutan pemantauan pembangunan jaringan telekomunikasi *Palapa Ring* yang akan memasuki tahap konstruksi; (6) pembukaan peluang usaha (pelelangan) untuk penyelenggaraan telekomunikasi lokal; (7) pembukaan peluang usaha (pelelangan) dalam penyelenggaraan BWA; (8) lanjutan pembuatan prototipe produk telekomunikasi dalam negeri untuk mendukung implementasi BWA; (9) penurunan tarif internet; (10) lanjutan penyusunan RUU *Cyber Crime* dan RUU Ratifikasi *Convention on Cyber Crime*; (11) implementasi proyek percontohan *community access point* (CAP) sebagai pusat akses informasi masyarakat berbasis TIK

[5] Merupakan teledensitas berdasarkan nomor yang dikeluarkan, sedangkan perkiraan akses yang aktif (setelah dikurangi *churn rate fixed wireless access* sebesar 30 persen) adalah 9,18 persen
[6] Merupakan teledensitas berdasarkan nomor yang dikeluarkan, sedangkan perkiraan akses yang aktif (setelah dikurangi *churn rate* sebesar 30 persen adalah 43,2 persen

di 222 kecamatan (tahap 1); (12) penyelesaian pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK untuk pekerja di Jababeka; (13) pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi pemerintah Pusat dan Daerah (*e-Government*); dan (14) penyelesaian proyek percontohan *e-government* di Batam dan *e-local government* di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Magelang, dan Kabupaten Solok. Melalui perkuatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi, teledensitas akses telekomunikasi[7] di tahun 2009 diperkirakan menjadi 14,7 persen untuk sambungan tetap (PSTN dan *fixed wireless access*) dan 65,9 persen untuk sambungan bergerak.

B. Permasalahan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Sesuai dengan RPJPN 2005 – 2025, tahapan pembangunan RPJMN kedua 2010 – 2014 difokuskan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun kemampuan IPTEK untuk memperkuat daya saing perekonomian. Pada kenyataannya, kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung daya saing perekonomian nasional saat ini masih belum memadai. Menurut *World Economic Forum* tahun 2008, kondisi daya saing sarana dan prasarana Indonesia berada pada peringkat 96 dari 134 negara. Sedangkan secara lebih rinci, kondisi daya saing prasarana jalan berada pada peringkat ke-105, perkeretapian peringkat ke-58, pelabuhan peringkat ke-104, bandara peringkat ke-75, ketenagalistrikan peringkat ke-82, dan telepon peringkat ke-100. Di samping itu, kapasitas tampungan air perkapita baru mencapai 30 meter kubik perjiwa pertahun serta daya dukung sumber daya air masih rendah dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan dan pemenuhan air baku serta perlindungan daerah strategis dari daya rusak air.

Masalah lain yang masih akan dihadapi adalah aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana dan prasarananya yang belum memadai. Upaya pencapaian target *Millenium Development Goals* pada tahun 2015 masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman serta pengurangan separuh penduduk miskin yang menghuni permukiman kumuh. Pada tahun 2007, diperkirakan terdapat 12,5 juta rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri. Akses penduduk terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan baru mencapai 52,1% dari target sebesar 67%. Pelayanan sanitasi dasar telah mencapai 68% dari target sebesar 65,5%, namun pencapaian tersebut belum memperhatikan kualitas pelayanan sanitasi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Kondisi tersebut diperkirakan akan mengalami stagnasi yang disebabkan oleh kemampuan penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya yang belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Kendala infrastruktur untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata terutama disebabkan oleh kurang tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga tidak dapat berfungsi optimal. Hal ini disebabkan oleh kelembagaan, sumberdaya manusia dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Pada saat ini banyak lembaga yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menyulitkan koordinasi. Sementara kualitas sumber daya manusia masih rendah. Sedangkan terkait dengan pembiayaan investasi infrastruktur saat ini masih jauh dari kemampuan negara negara berkembang lainnya. Sebagai gambaran, untuk negara-negara berkembang, investasi ideal untuk infrastruktur sebesar 5 persen dari PDB. Sementara pada saat ini alokasi investasi untuk infrastruktur di Indonesia masih kurang dari 3 persen, diantaranya 2,5 persen bersumber dari APBN.

Untuk mengatasi keterbatasan daya saing dan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana

[7] Merupakan akses yang aktif (setelah dikurangi *churn rate*)

tersebut diatas, maka sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2010 melalui:

1. Sumber Daya Air

Dalam upaya mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan pembangunan sumber daya air, sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air pada tahun 2010 secara umum antara lain: (1) meningkatnya fungsi dan kapasitas tampungan air di 327 waduk, embung dan situ; (2) meningkatnya keandalan dan layanan jaringan irigasi dan rawa pada areal seluas 4,1 juta hektar; (3) meningkatnya kinerja infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi resiko dan dampak kerusakan banjir pada alur sungai sepanjang 1.100 km; (4) meningkatnya kinerja prasarana pengamanan pantai untuk mengurangi resiko dan dampak abrasi pantai sepanjang 134 km; (5) meningkatnya kapasitas penyediaan air baku sebesar 7,6 m^3/det; (6) meningkatnya fungsi dan kapasitas tampungan air baku serta prasarana pengambilan dan saluran pembawa sebanyak 170 buah; (7) tersedia dan optimalnya fungsi prasarana sumber daya air di daerah terisolasi, pulau terpencil dan kawasan perbatasan sebanyak 26 buah; (8) meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan pengelola sumber daya air serta pemberdayaan para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air di 14 provinsi dan 99 kabupaten/kota; (9) meningkatnya ketersediaan dan keterbukaan data serta informasi sumber daya air.

2. Transportasi

Secara umum sasaran pembangunan transportasi tahun 2010 adalah: (1) tercapainya kondisi mantap 88 persen dan penambahan 2.500 lajur-km jalan pada ruas lintas nasional dan non lintas; (2) meningkatnya kecepatan rata-rata 47 km/jam; (3) tercapainya *Berth Occupancy Ratio* (BOR) pelabuhan 50-70 persen; (4) meningkatnya permintaan penumpang angkutan udara dalam negeri 9,78 persen dan angkutan udara luar negeri sebesar 12,3 persen; (5) ketepatan keberangkatan dan kedatangan kereta api penumpang masing-masing meningkat menjadi 90 persen untuk keberangkatan dan 70 persen untuk kedatangan; (6) tercapainya tingkat keandalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan 90 persen; (7) dikembangkannya angkutan massal dan *area traffic control system* (ATCS) di 16 kota besar. Sedangkan, sasaran antara yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi; (2) terpenuhinya peraturan dan ketentuan berstandar internasional di bidang transportasi yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional; (3) diselesaikannya seluruh peraturan perundangan di bidang transportasi untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan peran serta pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi; (4) meningkatnya disiplin penyelenggara dan pengguna transportasi; (5) meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman dan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil dan pulau terluar; (6) meningkatnya kelancaran jalur distribusi dan logistik nasional serta komoditi ekspor-impor; (7) meningkatnya kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan maupun bencana alam.

3. Perumahan dan Permukiman

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan perumahan antara lain: (1) meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian milik/sewa yang layak dan terjangkau kepada 266 ribu rumah tangga; (2) meningkatnya kualitas permukiman masyarakat berpendapatan rendah untuk 10.000 unit rumah berpendapatan rendah, 216 kawasan dan 8.304 kelurahan; dan (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan. Sedangkan, sasaran sarana dan prasarana permukiman layak yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap prasarana dan sarana

dasar permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) melalui pembangunan prasarana dan sarana air minum di 1.510 desa dan 70 kawasan, pembangunan prasarana dan sarana air limbah di 130 kawasan serta pembangunan prasarana dan sarana persampahan di 7 TPA Regional dan 25 kab/kota; (2) meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; (3) meningkatnya kinerja lembaga penyedia pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan; serta (4) tercapainya peningkatan daya saing sektor riil melalui penyediaan dan optimalisasi prasarana dan sarana permukiman di kawasan strategis perekonomian nasional guna menunjang pariwisata, industri, dan perdagangan di 46 kab/kota dan 143 kawasan. Selain itu, seperti halnya yang dilaksanakan pada tahun 2008, pemerintah akan melanjutkan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha swasta melalui kegiatan berbasis masyarakat maupun Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman layak.

4. Energi

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan energi, sasaran di tahun 2010 meliputi (1) fasilitasi pengembangan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot untuk penyimpanan; (2) pembangunan jaringan gas kota di 3 kota yaitu Tarakan, Bekasi, dan Depok, dengan perkiraan jumlah rumah tangga yang dilayani sebesar 11.000 rumah tangga; (3) fasilitasi peningkatan investasi bidang infrastruktur energi; (4) fasilitasi peningkatan pemanfaatan energi alternatif non-BBM termasuk energi baru terbarukan (panas bumi, surya, mikrohidro, angin/bayu, biomassa) sebagai bagian dari kebijakan bauran energi, efisiensi dan diversifikasi serta mengurangi beban subsidi pemerintah; (5) penyelesaian perangkat peraturan pelaksanaan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi meliputi 3 peraturan pemerintah; dan (6) fasilitasi peningkatan efisiensi pemanfaatan infrastruktur energi dan konsumsi energi final di semua bidang dengan pertimbangan penciptaan nilai tambah nasional dan kepentingan generasi mendatang.

5. Ketenagalistrikan

Pembangunan ketenagalistrikan pada tahun 2010 ditujukan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut (1) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 94 persen pada tahun 2010; (2) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 67,2 persen; (3) tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dengan penambahan 8.077 MW dengan tingkat keandalan (*reserve margin*) yang semakin meningkat; (4) tercapainya bauran bahan bakar (*fuel-mix*) yang lebih baik, dicerminkan oleh pengurangan penggunaan bahan bakar minyak hingga kontribusi produksi pembangkit berbahan bakar minyak semakin menurun terhadap total produksi energi listrik pada tahun 2010 melalui peningkatan pemanfaatan potensi gas, batubara, dan panas bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik; (5) meningkatnya efisiensi, jangkauan, dan kehandalan di sarana dan prasarana ketenagalistrikan melalui rehabilitasi dan *repowering*, *debottlenecking* dan *uprating*, serta interkoneksi jaringan penyaluran di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; (6) berkurangnya susut penyaluran (transmisi dan distribusi) menjadi sekitar 10,9 persen melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti *enterprise resource planning*/ERP, dan *consumer information system*/CIS; (7) mendorong pemanfaatan listrik yang lebih efisien (*demand side management*) termasuk standarisasi peralatan tenaga listrik; (8) terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan berupa penyelesaian turunan undang-undang ketenagalistrikan.

6. Pos dan Telematika

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan akses dan rendahnya pemanfaatan informasi, sasaran utama pembangunan pos dan telematika tahun 2010 adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah akses, kapasitas, kualitas, dan jangkauan infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi, informatika, serta penyiaran TVRI dan RRI di wilayah non komersial yang meliputi (a) tersedianya layanan pos di 2.363 kpclk; (b) tersedianya keberlanjutan layanan telekomunikasi di 31.824 desa dan internet setidaknya di 4.218 kecamatan; dan (c) selesainya pembangunan pemancar TVRI di 10 lokasi *blank spot*; (2) Terciptanya sektor pos dan telematika yang efisien dan kompetitif dalam era konvergensi yang meliputi (a) selesainya penataan struktur industri pos dan telematika menuju era konvergensi; (b) selesainya penyusunan 16 standar bidang TIK dan rumusan penyiaran digital beserta *blue print* migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital, dan (c) tersedianya sistem informasi manajemen perizinan dan aplikasi *e-licensing* untuk pengelolaan spektrum frekuensi radio dan penyelenggaraan penyiaran; (3) Meningkatnya infrastruktur dan layanan pos dan telematika yang modern, *broadband*, *secured* dan berkualitas baik dengan harga terjangkau yang meliputi (a) tercapainya teledensitas total akses telekomunikasi[8] sekurang-kurangnya 75 persen[9] dan pengguna internet sekurang-kurangnya 40 persen; (b) tercapainya jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing sebesar 60 persen dan 80 persen; (c) berlanjutnya pembangunan *ring* timur *Palapa Ring* yang menghubungkan Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara; (d) selesainya uji coba implementasi TV digital; dan (e) tersedianya *community access point* (CAP) di 222 kecamatan di Jawa Barat, Banten, dan Lampung, CAP di 7 lokasi dan *Mobile* CAP di 6 lokasi; (4) Tercapainya e-literasi sebesar 40 persen; (5) Berkembangnya e-government yang meliputi (a) selesainya pengembangan aplikasi layanan dasar publik (*e-citizen*); (b) tersedianya bantuan teknis untuk pengembangan *e-local government* di 8 pemda; (c) tersedianya portal layanan publik; dan (d) tersedianya infrastruktur *e-government* yaitu data *center*, *Government Secured Intranet*, dan *Government Intranet Exchange*; (6) Terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK melalui perkuatan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID SIRTII) sebagai pengawas dan pengaman jaringan internet Indonesia; dan (7) Meningkatnya kemandirian industri TIK dalam negeri melalui fasilitasi pengembangan prototipe perangkat unggulan telekomunikasi terutama untuk mendukung penyelenggaraan *broadband wireless access*.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Pada tahun 2010, arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana adalah: (i) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan (iii) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Arah kebijakan secara rinci diuraikan sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), melalui: (1) rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan persyaratan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik; (2) peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan wilayah terdepan; (3) peningkatan ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin baik di perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan pulau-pulau terdepan. Arah kebijakan masing-masing adalah sebagai berikut:

[8] Terdiri dari sambungan tetap, sambungan tetap nirkabel (*fixed wireless access*), dan sambungan bergerak
[9] Merupakan akses yang aktif (setelah dikurangi *churn rate* sebesar 30 persen)

1. Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, perkotaan dan industri, dengan: (1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; (2) pengendalian pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku disertai upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan; (3) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan air sebagai sumber air baku, dan optimalisasi sumber air baku yang ada dengan melakukan operasi dan pemeliharaan; (4) mendorong peran serta pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur air baku terutama dalam sistem penyaluran air (*conveyance system).*

Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air, dengan: (1) mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan UU No 7 Tahun 2004 sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; (2) meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; (4) menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan; (5) menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, dengan: (1) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*); (2) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data antar seluruh *stakeholders* dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan data dan informasi; (3) melakukan *collecting, updating* dan sinkronisasi data serta informasi secara rutin dari instansi/lembaga terkait; (4) menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar tentang keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan informasi masyakat.

2. Transportasi

Arah kebijakan pembangunan transportasi tahun 2010 adalah: (1) preservasi jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional yang mencakup pemeliharaan rutin dan berkala, serta peningkatan struktur jalan untuk mengembalikan pada kondisi awal; (2) rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk mempertahankan dan memulihkan tingkat pelayanan jasa transportasi; (3) memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar keselamatan dan keamanan internasional terutama untuk untuk pelayaran dan penerbangan; (4) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah pedalaman, serta penyediaan sarana angkutan perdesaan, subsidi operasi perintis, angkutan umum massal, dan PSO untuk angkutan penumpang kelas ekonomi baik untuk angkutan perkotaan maupun angkutan antarkota.

3. Perumahan dan Permukiman

Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat

berpendapatan rendah melalui (1) penyediaan subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH/KPRS Mikro); (2) pembangunan rumah susun sederhana sewa; (3) fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik; (4) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan perumahan swadaya; (5) bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di kawasan bencana beserta sarana dan prasarana dasarnya; serta (6) penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman masyarakat berpendapatan rendah.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan, melalui: (1) peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan; (2) penanggulangan kemiskinan perkotaan (PNPM Perkotaan); serta (3) pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW).

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaran pembangunan perumahan, melalui (1) pembinaan teknis penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan lingkungan; (2) pengembangan kebijakan, strategi, program serta Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM); serta (3) peningkatan pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

Peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman yang layak sesuai standar pelayanan minimum ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) maupun yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien, dan berkelanjutan, melalui (1) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat; (2) penyediaan prasarana dan sarana air minum pada kawasan strategis, Ibu Kota Kecamatan (IKK)/kawasan yang belum memiliki SPAM, kab/kota pemekaran, kawasan bencana, kawasan perbatasan serta pulau kecil/terpencil; (3) pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala komunitas melalui program SANIMAS; (4) pembangunan pembuangan air limbah sistem terpusat; (5) peningkatan pengelolaan TPA/*sanitary landfill*/sistem regional termasuk pengembangan TPA regional, peningkatan kinerja TPA sampah dan pembuatan *trash rack*; (6) bantuan teknis/bantuan program penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (7) bantuan teknis pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

4. Energi

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi adalah diversifikasi energi. Kebijakan ini diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional dan nasional untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

5. Ketenagalistrikan

Arah kebijakan pembangunan ketenagalistrikan tahun 2010 adalah (1) memberikan prioritas kepada pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan untuk kelistrikan desa dan daerah terpencil; dan (2) peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong penerapan standar peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, kewajiban sertifikasi laik operasi bagi instalasi tenaga listrik, sertifikasi bagi peralatan dan

pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik, dan sertifikasi bagi badan usaha penunjang tenaga listrik, serta menerapkan standar baku mutu lingkungan.

6. Pos dan Telematika

Arah kebijakan pembangunan pos dan telematika tahun 2010 adalah (1) Pengalokasian APBN secara tepat sasaran (*target oriented*) dengan pengukuran kinerja berbasis output yang jelas dan memperhatikan keberlanjutan layanan; (2) mendorong kerjasama dengan BUMN dan swasta yang dipilih melalui proses yang selektif; (3) mendorong peran aktif masyarakat dan pengusaha lokal untuk memanfaatkan infrastruktur/layanan yang telah disediakan sebagai bagian dari upaya penciptaan *demand.*

Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, melalui: (1) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana untuk daerah yang mengalami *bottle neck*; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana khususnya untuk daerah-daerah yang permintaan terhadap jasa sarana dan prasarana tumbuh dengan cepat; (3) peningkatan kompatibilitas sarana dan prasarana dalam menunjang perkembangan sektor industri, pertanian, perdagangan baik dalam maupun luar negeri; (4) penataan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi persaingan usaha di bidang sarana dan prasarana; (5) optimalisasi sumber daya terbatas dalam pengembangan sarana dan prasarana; (6) peningkatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arah kebijakan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air

Meningkatkan dan melestarikan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air secara memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, melalui: (1) pengembangan pola hubungan hulu-hilir dalam mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan; (2) percepatan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, situ) terutama di daerah selatan khatulistiwa dan wilayah strategis; (3) pengendalian pemanfaatan air tanah sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah; (4) pengendalian pencemaran air dengan meningkatkan pemantauan kualitas air untuk mengendalikan limbah domestik dan industri.

Mewujudkan pendayagunaan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan, melalui: (1) pembangunan daerah irigasi baru dengan prioritas luar pulau Jawa; (2) mengoptimalkan infrastruktur irigasi; (3) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi dan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar pulau Jawa, (4) rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada daerah-daerah andalan penghasil padi, (5) meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi, (6) meningkatkan pengembangan sistem irigasi hemat air; (7) menjamin terlaksananya rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi pada daerah-daerah yang berpotensi menyumbang penyediaan pangan melalui Dana Alokasi Khusus.

Mengendalikan dan mengurangi dampak kerusakan akibat banjir baik secara struktural maupun non struktural dan diutamakan pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekenomian, melalui: (1) pendekatan *flood management* (pencegahan, penanggulangan dan penanganan) bahaya banjir; (2) meningkatkan kinerja infrastruktur

pengendali banjir dengan melakukan optimalisasi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; (3) revitalisasi fungsi sungai dan sumber air lainnya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama pada siklus hidrologi; (4) perbaikan sistem drainase baik makro maupun mikro pada daerah strategis, perkotaan dan pusat perekonomian.

Mengamankan daerah pantai dari bahaya abrasi dan erosi, diutamakan pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, daerah pariwisata dan pusat-pusat perekenomian penting serta pada pulau-pulau terdepan demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui: (1) peningkatan pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; (2) penetapan zona-zona pantai prioritas yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim; (3) adaptasi terhadap perubahan iklim dengan penyesuaian parameter desain dalam proses perencanaan bangunan pengaman pantai termasuk bangunan pengendali banjir.

2. Transportasi

Arah kebijakan pembangunan transportasi tahun 2010 adalah : (1) peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi pada koridor/lintas utama dan strategis lintas pada antarkota maupun wilayah perkotaan melalui pembangunan jalan tol, jalan bebas hambatan, jembatan bentang panjang, *under pass*, *fly over*, jalur ganda kereta api, lapangan penumpukan di pelabuhan, fasilitas bandara; (2) meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai; (3) meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara inter dan antar moda; (4) meningkatkan peran armada pelayaran dan armada udara baik untuk angkutan dalam negeri maupun luar negeri dengan memberlakukan sepenuhnya azas *cabotage*; (5) menegakkan peraturan dalam penanganan muatan lebih melalui program *zero overloading*, konsolidasi dan pengawasan dimensi kendaraan.

3. Perumahan dan Permukiman

Kebijakan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman untuk mendukung daya saing sektor riil dilakukan melalui: (1) pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat skala kawasan dan Instalasi Pengolahan Lumput Tinja (IPLT); (2) pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); serta (3) pengembangan sistem drainase termasuk pembangunan sistem drainase primer perkotaan.

4. Energi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi untuk masa datang dalam jumlah yang memadai, berkesinambungan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi untuk segala lapisan masyarakat dan kepentingan nasional, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi adalah: (1) intensifikasi pencarian sumber energi dan optimalisasi produksi energi, untuk mendorong peningkatan kegiatan pencarian cadangan energi baru secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak bumi, gas bumi dan batu bara guna meningkatkan produksi serta menjamin pasokan energi dalam negeri; (2) penentuan harga energi dan subsidi tepat sasaran. Harga energi perlu diperhitungkan dengan harga produksi

dan mengikuti harga pasar, namun juga harus memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan faktor eksternalitas yang mempengaruhinya. Pada sisi lain subsidi energi terutama untuk energi fosil secara bertahap harus dikurangi dan diarahkan untuk mendorong usaha pemanfaatan energi alternatif yaitu energi baru terbarukan; (3) konservasi energi pada seluruh tahap pemanfaatan. Kebijakan ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin kepentingan generasi mendatang; (4) pelaksanaan kebijakan bauran energi (*energi mix*). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendapatkan komposisi penggunaan energi yang optimum pada suatu kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber energi di Indonesia yang beraneka, profil permintaan energi yang bervariasi serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi dari lokasi-lokasi tempatnya tersedia ke lokasi-lokasi permintaan; dan (5) pengendalian lingkungan hidup sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Aspek-aspek lingkungan harus diperhatikan dalam semua tahapan pembangunan energi, yaitu mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi yang diikuti dengan usaha reklamasi dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan ekologis sampai dengan tahap pemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan, termasuk diantaranya adalah adanya regulasi dan kebijakan yang dilaksanakan dengan baik serta adanya komitmen yang kuat (termasuk penegakkannya) dari para pemangku kepentingan untuk melaksanakannya.

5. Ketenagalistrikan

Arah kebijakan pembangunan ketenagalistrikan tahun 2010 adalah: (1) peningkatan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik. Kebijakan ini ditujukan terutama untuk mendorong upaya peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit termasuk pemanfaatan energi terbarukan (terutama *geothermal* dan mikrohidro), pengembangan PLTU *Minemouth* untuk beban dasar, dan pembangkit *pump storage* untuk beban puncak, pengembangan sistem interkoneksi untuk sekuriti dan efisiensi biaya, pengurangan *losses*, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien, serta penerapan *good governance* pengelolaan korporat; dan (2) pemanfaatan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha penunjang tenaga listrik dan mendorong penggunaan TKDN dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

6. Pos dan Telematika

Restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika ke arah konvergensi. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan sektor pos dan telematika yang efisien, kompetitif, mantap (*robust*), dan berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai oleh (1) perangkat peraturan yang jelas, konsisten, tidak diskriminasi, dan berpandangan ke depan (*forward looking*); (2) iklim investasi dan berusaha yang kondusif; (3) kompetisi yang setara (*level playing field*) dengan tetap menjaga profitabilitas sektor; (4) kemampuan sektor yang responsif dan adaptif terhadap konvergensi dan kemajuan teknologi dengan proses perubahan yang halus (*seamless*).

Optimalisasi sumber daya dalam pengembangan infrastruktur. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur yang modern dan aman di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah non komersial, dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien melalui (1) pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas; (2) pengembangan kerja sama antara pemerintah dan swasta; (3) implementasi konsep *infrastructure sharing* untuk efisiensi investasi serta mendorong pergeseran dari belanja modal menjadi belanja

operasional.

Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kebijakan ini ditujukan untuk (1) mendorong pendayagunaan TIK dalam kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan norma yang berlaku; (2) mewujudkan keamanan, kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK; dan (3) meningkatkan kemampuan industri dalam negeri bidang TIK.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia TIK. Kebijakan ini ditujukan untuk (1) memperkuat *e-leadership*, apresiasi, dan komitmen di kalangan instansi pemerintah untuk mendayagunakan TIK; dan (2) meningkatkan e-literasi dan kompetensi aparatur pemerintah dan masyarakat.

Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), melalui: (1) penyempurnaan peraturan perundangan terkait dengan KPS, berikut petunjuk pelaksanaanya; (2) pembentukan institusi manajemen KPS, Pusat KPS dan simpul KPS di tingkat pusat dan daerah; (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas badan pemberi kontrak dalam penyiapan proyek KPS, baik di tingkat pusat dan daerah melalui pembentukan simpul KPS; (4) operasionalisasi lembaga keuangan non-bank yang mendukung pembangunan infrastruktur (Dana Penjaminan dan Dana Infrastruktur); (5) operasionalisasi kebijakan dan pedoman operasional mengenai pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang akan di-KPS-kan, termasuk peningkatan kemampuan dana pengadaan tanah; (6) terwujudnya kerjasama pemerintah dan swasta di proyek-proyek infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta-api, air minum dan persampahan.

Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia paska krisis industri perumahan di Amerika yang berlanjut menjadi krisis global dan seiring dengan pengembangan kebijakan KPS dan pembangunan proyek KPS di infrastruktur, maka kebijakan KPS infrastruktur dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal strategis sebagai berikut: (1) pembukaan lapangan kerja, memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya; (2) mendorong pembangunan ekonomi wilayah; (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor domestik maupun asing; sebagai upaya untuk mendorong *multiplier effect* dalam perekonomian nasional yang sedang lesu.

Prioritas diletakkan untuk menjaga kinerja infrastruktur yang sudah dibangun, sehingga kualitas layanannya tidak berkurang. Restrukturisasi dan reformasi kerangka regulasi dan kerangka investasi di bidang infrastruktur perlu diarahkan kepada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi maupun usaha di bidang jasa pelayanan infrastruktur sekaligus menyehatkan dan meningkatkan kinerja sektor infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur baru diarahkan untuk menunjang pertumbuhan permintaan jasa pelayanan, baik untuk pasar domestik maupun pasar luar negeri. Pengembangan pola KPS infrastruktur perlu diprioritaskan untuk mendukung kegiatan produksi dan peningkatan distribusi yang mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta memicu *multiplier effect* yang positif bagi perekomian lokal dan nasional.

Untuk mendukung implementasi KPS dalam rencana kerja pemerintah, kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain adalah: (i) fasilitasi pengembangan proyek KPS melalui *Project Development Facility*; (ii) resiko tanah (*landcapping*); dan (iii) dana dukungan infrastruktur.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010

PRIORITAS BIDANG: INFRASTRUKTUR

PRIORITAS PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK YANG BERDAYASAING DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)						
A. SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR						
1.	4436	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	Terlaksananya rehabilitasi sarana prasarana pengendali banjir sepanjang 170 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	130,8
2.	4439	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	Terpeliharanya prasarana pengendali banjir sepanjang 700 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	103,8
3.	4442	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	Terlaksananya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku dengan debit layanan 7,6 m^3/det	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	875,1
4.	4445	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	Terlaksananya rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku sebanyak 14 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	32,8
5.	4446	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	Terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku sebanyak 56 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	6,3
6.	4443	Pembangunan Tampungan Air Baku	Terlaksananya pembangunan tampungan untuk air baku sebanyak 21 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	111,5

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
7.	4444	Rehabilitasi Tampungan Air Baku	Terlaksananya rehabilitasi tampungan untuk air baku sebanyak 18 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	33,6
8.	4447	Operasi dan Pemeliharaan Tampungan Air Baku	Terpeliharanya tampungan untuk air baku sebanyak 26 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	10,0
9.	4458	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Air Tanah untuk Air Minum Daerah Terpencil/Perbatasan	Terlaksananya pembangunan prasarana air tanah untuk air minum sebanyak 18 buah di daerah terpencil/perbatasan	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	4,2
10.	4460	Rehabilitasi Prasarana Air Tanah Untuk Air Minum Daerah Terpencil/Perbatasan	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Air Tanah Untuk Air Minum Daerah Terpencil/Perbatasan sebanyak 8 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	1,9
11.	4452	Pembangunan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya 12 buah	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	6,5
12.	4456	Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Departemen Pekerjaan Umum	1,2
B. SUB BIDANG TRANSPORTASI						
1.	4244	Penanggulangan darurat jalan dan jembatan	LS	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	150,0
2.	4246	Pengadaan peralatan/bahan jalan dan jembatan	LS	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	275,0
3.	4326	Rehabilitasi Jalan Nasional	1.956,2 km	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	3.834,9

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
4.	4327	Pemeliharaan Jalan Nasional	32.463 km	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	1.447,6
5.	4328	Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional	15.148,8 m	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	740,1
6.	4329	Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional	69.041 m	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	36,9
7.	4643	Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan	50,8 km jalan dan 147 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	176,0
8.	4645	Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau Terpencil dan Pulau Terluar	23,7 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	90,5
9.	4646	Pembangunan Jalan Akses	45,3 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	1.045,8
10.	2288	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencarian dan penyelamatan	Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan SAR 1 Paket	Program Pencarian dan Penyelamatan	Basarnas	348,4
11.	2218	Pengadaan Bus Perintis	Bus Perintis 40 Unit; Bus besar AC untuk pengembangan BRT 30 Unit; Bus sedang Non AC 40 unit & AC 30 unit untuk angkutan pelajar/mahasiswa/umum dan pemadu moda	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Dep. Perhubungan	66,4
12.	2219	Pelayanan Angkutan Jalan Perintis	22 Provinsi	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	Dep. Perhubungan	48,2

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
13.	0024	Pembangunan Vessel Traffic System di Selat Malaka	Pengadaan VTS sebanyak 5 titik	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	50,0
14.	0024	Pembangunan Fasilitas Sistem Telekomunikasi Pelayaran tahap 4	Pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran terpadu di 48 titik di seluruh perairan Indonesia	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	356,2
15.	0024	Pembangunan kapal patroli, peralatan SAR Laut, pemadam kebakaran dan peralatan ISPS Code untuk Pelabuhan Semarang dan Ambon	Kapal Patroli Kelas III (20 unit), Kelas I-B (1 unit), SAR Laut (23 unit), pemadam kebakaran dan peralatan ISPS	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	187,5
16.	2250	Pembangunan baru kapal perintis type 750 DWT, 500 DWT dan type-2000	Lanjutan pembangunan kapal perintis type 750 DWT, 500 DWT dan type-2000 masing-masing 1 unit	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	101,0
17.	0024	Indosrep Project (*Multi years*): Indonesia Ship Reporting System/Vessel Traffic Information System termasuk supervisi	Pengadaan VTIS sebanyak 18 lokasi tersebar di seluruh perairan Indonesia	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	42,6
18.	2243	Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Ramsu : 141 unit; Mensu : 8 unit; Ramtun : 9 unit	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	145,0
19.	2246	Pelayanan Angkutan Laut Perintis	Pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 60 trayek	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	274,0
20.	2248	Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation	Pembangunan SBNP sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	15,0
21.	2253	Pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan	Pengerukan pada 13 Lokasi : Adpel Lhokseumawe-NAD, Muntok-Babel, Toboali-Sadai Babel, Teluk Bayur-Sumbar, Palembang-Sumsel, Brebes-Jateng, Tegal-Jateng, Batang-Jateng, Juwana-Jateng, Sampit-Kalteng, Kumai-Kalteng, Samarinda-Kaltim, Manado-Sulut.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	90,0
22.	2257	Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis	92 lintasan untuk 49 kapal	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Dep. Perhubungan	166,43

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
23.	2295	Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Rambu Sungai Transportasi Penyeberangan		Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Dep. Perhubungan	5,4
24.	2266	Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis	Pelayanan angkutan udara perintis (118 rute) dan angkutan BBM penerbangan perintis (3.766 drum)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	249,9
25.	2268	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan	Terpasangnya fasilitas keselamatan penerbangan (4.000 paket/unit)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	359,8
26.	2223	Rehabilitasi peralatan operasional jembatan timbang & terminal & Fasilitas Keselamatan LLAJ	Peningkatan operasional prasarana jembatan timbang, terminal	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dep. Perhubungan	32,4
27.	2224	Pembangunan Sarana Kereta : KRDI; K3; KMP3; Railbus; KRL	Peningkatan kapasitas angkut sebanyak 33 unit	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian	Dep. Perhubungan	135,9
28.	2237	Rehabilitasi Jalan KA (Lintas Tarahan-Tj. Enim; Bandung-Banjar; Cikampek - Padalarang, Semarang-Solo	Peningkatan keselamatan sepanjang 11,66 km	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	40,7
29.	2244	Lanjutan pembangunan Kapal Perintis	Lanjutan pemb Kapal Perintis 750 DWT (1 unit), 500 DWT (1 unit)	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	9,0
30.	2261	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan	Peningkatan operasional prasarana SDP: dermaga penyeberangan 6 lokasi, dermaga sungai 9lokasi, dan dermaga danau 3 lokasi.	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dep. Perhubungan	43,4
31.	0113	Rehabilitasi Fasilitas Bangunan	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas bangunan 73.000 m2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	45,1

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
32.	2272	Rehabilitasi Fasilitas Landasan	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas landasan 425.000 m2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	155,9
33.	2273	Rehabilitasi Fasilitas Terminal	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas terminal 3.000 m2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	20,9
34.	2274	Rehabilitasi Peralatan Keselamatan Penerbangan dan Penunjang Operasional	Terlaksananya rehabilitasi peralatan keselamatan penerbangan 8 paket	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	18,9
35.		Pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi (PSO PT.KAI)	Terselenggaranya pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi di Jawa dan Sumatera			670,6 (BA 999)
36.		Pelayanan angkutan laut kelas ekonomi (PSO PT.Pelni)	Terselenggaranya pelayanan angkutan laut kelas ekonomi di seluruh Indonesia			531,0 (BA 999)
C. SUB BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1.	4270	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya	40 *Twin Blok*	Program Pengembangan Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	300,0
2.	7555	Pembangunan Rumah Susun Sederhana beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya	25 *Twin Blok* dan 200 unit rumah sewa	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	205,4
3.	9262	Penyediaan Infrastruktur Primer Bagi Kawasan RSH	200 kawasan	Program Pengembangan Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	275,8
4.	4628	Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar untuk RSH/S dan Rumah Susun	12.000 unit	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	50,2

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
5.	4613	Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman di Pulau Kecil/Terpencil	35 Kawasan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	35,0
6.	7580	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	12.000 unit	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	83,4
7.	7582	Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	10.000 unit dan 10 kawasan kumuh	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	115,0
8.	7583	Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	10.000 unit	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	50,0
9.	4611	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS)	130 lokasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Departemen Pekerjaan Umum	20,0
10.	4612	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat	1.320 desa pada 110 kab/kota dan 190 desa rawan air	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Departemen Pekerjaan Umum	501,6
11.	4629	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	70 kawasan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Departemen Pekerjaan Umum	158,9
12.	4625	Peningkatan Pengelolaan TPA/Sanitary Landfill/Sistem Regional	7 TPA Regional pada 24 kab/kota dan peningkatan TPA di 25 kab/kota	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Departemen Pekerjaan Umum	218.5
13.	4619	Penanganan Rahabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	3 provinsi	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	20,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
14.	7578	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Rumah di Kawasan Bencana	800 Unit	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	29,3
15.	4277	Perbaikan Lingkungan Permukiman	210 kawasan	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	373,7
16.	4312	Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-PNPM)	Pemberdayaan masyarakat di 4.136 desa	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	Departemen Pekerjaan Umum	1.225,9
17.	4279	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung	Penguatan kelembagaan di 33 propinsi, RISPK di 59 kab/kota, RTBL di 67 kab/kota, PIP2B di 24 propinsi, NSPK sebanyak 71 buah, SLF di 34 kab/kota, pendataan bangunan gedung di 36 kab/kota	Program Pengembangan Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	122,4
18.	4470	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Strategi Pengembangan Kota (SPK) di 49 kab/kota dan penyusunan rencana pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas di 30 kawasan	Program Pengembangan Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	80,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
D. SUB BIDANG ENERGI						
1.	2104	Koordinasi dan Pengembangan Energi Perdesaan	(1)Terselenggaranya workshop pengem-bangan biofuel; (2)Terselenggaranya koordinasi pengem-bangan DME; (3)Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pemanfaatan listrik; (4)Tersedianya percontohan peralatan energi terbarukan non listrik di pulau kecil terluar; (5)Terselenggaranya workshop pengembangan DME berbasis Non BBN; (6)Terselenggaranya pelatihan, workshop, FGD dan kajian pengembangan mikrohidro; (7)Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat di lokasi PLTM; (8)Terlaksananya implementasi biogas untuk rumah tangga,; (9)Terlaksanakanya sosialisasi pengembangan tungku perdesaan; (10)Terselenggaranya workshop pengem-bangan tungku perdesaan; (11) Terselenggaranya program DME tersebar di 17 provinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Riau, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Malut); (12) Terlaksananya verifikasi FS pengembangan EBT di 40 lokasi.	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	90,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
E. SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN						
1.	2189	Pengembangan Ketenagalistrikan Sosial	(1) Tersusunnya pedoman pembuatan FS dan DD untuk pembangunan PLTMH; (2) Terlaksananya pembinaan dan koordinasi dengan Pemda, koperasi dan PLN Wilayah/Distribusi dalam perencanaan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana listrik perdesaan; (3) tersusunnya pendanaan pembangunan listrik perdesaan; (4) kompilasi dan updating database listrik perdesaan; (5) laporan monitoring dan evaluasi kegiatan listrik perdesaan	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	3,0
2	2137	Listrik Perdesaan	Terwujudnya pembangunan sistem distribusi dan pembangkit energi baru terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik berupa : Gardu Distribusi = 715 Unit/ 42.600 KVA; JTM = 2125 kms; JTR = 1930 kms PLTS 50 Wp Tersebar = 73.361 UNIT; PLTMH = 1800 kW; PLTS Terpusat = 3 unit	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	1.158,5
F. SUB BIDANG POS DAN TELEMATIKA						
1.	5771	Penyediaan Infrastruktur Pos dan Telematika di Daerah Non Ekonomis	(1) Jasa akses telekomunikasi di 31.824 desa, internet di 4.218 kecamatan, dan layanan *internet exchange* di ibukota propinsi; (2) Pemancar TV di 10 lokasi *blank spot*	Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	Dep. Kominfo	1.047,0
2.	5771	Penyediaan Infrastruktur Pos dan Telematika di Daerah Non Ekonomis	Layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota	PSO	PT Posindo BA 62	255,4

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS BIDANG: DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL						
A. SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR						
1.	4417	Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya kegiatan pembangunan 6 waduk, 39 embung dan 11 situ	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	1.459,9
2.	4418	Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi 13 waduk, 17 embung, dan 20 situ	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	176,8
3.	4419	Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya 57 waduk dan 164 embung	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	194,1
4.	4432	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana / prasarana pengendali banjir sepanjang alur sungai 190 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	1.475,3
5.	4434	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	Terlaksananya kegiatan tanggap darurat bencana di daerah industri dan pusat-pusat perekonomian	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	17,8
6.	4435	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana / prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 28 b uah	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	116,8
7.	4420	Konservasi Danau dan Situ Serta Perbaikan Sabuk Hijau Di Kawasan Sumber Air	Terlaksananya kegiatan konservasi danau dan situ serta perbaikan sabuk hijau di 25 lokasi	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	87,4

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
8.	4433	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 71 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	201,1
9.	4437	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai	Terlaksananya rehabilitasi sarana prasarana pengaman pantai sepanjang 3 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	7,2
10.	4438	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi	Terlaksananya rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi sebanyak 4 buah	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	6,9
11.	4440	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Pantai	Terpeliharanya prasarana pengaman pantai sepanjang 60 km	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Departemen Pekerjaan Umum	12,0
B. SUB BIDANG TRANSPORTASI						
1.	4610	Pembangunan Fly-over	676,5 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	193,5
2.	4626	Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Lintas	1.571,6 km jalan dan 920,9 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	4.068,5
3.	4627	Peningkatan Jalan dan Jembatan Non Lintas	335,2 km jembatan 1.046,4 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	1.473,3
4.	4644	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa	48,7 km jalan dan 115 m jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	164,9
5.	4655	Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis	131 km	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	80,9

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
6.	2202	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi	Marka jalan sepanjang 1.707.440M; Guardrail 61.200M, Rambu Lalulintas 10.894 Bh, Delineator 20.730M, RPPJ 726 Bh, LPJU 650 Bh, ATCS 1 pkt, Traffic Light Solar Cell 62 Unit, Warning Light 54 Unit; Cermin Tikungan 448Bh; Paku Marka 31.300Bh.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dep. Perhubungan	297,3
7.	2225	Peningkatan jalan KA di lintas: Sumatera bagian utara, selatan; Lintas Jawa	357,5 Km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	563,8
8.	2226	Peningkatan Jembatan KA/Underpass di Lintas Utama Sumatera dan Jawa	64 Bh	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	169,4
9.	2227	Pembangunan Perkeretaapian di NAD	1 Pkt	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	48,9
10.	2227	Pengadaan Rel UIC-54	Peningkatan daya dukung sebesar 17.047,5 ton	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	292,5
11.	2227	Pengadaan Wesel UIC-54	164 Unit	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	147,6
12.	2228	Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Padalarang-Cicalengka (*Engineering Services*)	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	18,7
13.	2228	Peningkatan Sintelis (Jawa dan Sumatera)	35 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	456,1

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
14.	2230	Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo (termasuk supervisi/engineering services & pengadaan lahan)	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	45,2
15.	2230	Pembangunan Jalur Ganda Cirebon - Kroya	Segment I Cirebon - Prupuk dan Segment III Purwokerto - Kroya (engineering services) sebanyak 1 paket; dan Segment II Prupuk – Purwokerto sepanjang 17,01 km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	272,6
16.	2230	Lanjutan Pembangunan Double-double Track Manggarai-Cikarang	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	337,3
17.	2230	Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Serpong - Maja	20,97 Km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	102,9
18.	2230	Pemb. Jalur Ganda Duri - Tangerang dengan elektrifikasi	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	30,0
19.	2230	Pembangunan Jalur Ganda Tegal - Pekalongan	4,65 Km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	160,2
20.	2230	Pembangunan Jalur Ganda KA Brebes - Losari	5,65 Km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	47,5
21.	2230	Pembangunan Jalur Ganda Segment III lintas Cikampek - Cirebon (supervisi)	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	15,7
22.	2230	Lanjutan Pembangunan Partial Jalur Ganda di Blambanganumpu - Negeriagung	9,80 Km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	56,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
23.	2230	Lanjutan Pembangunan Short-cut Jalan KA Cisomang – Cikadondong	5,71 Km	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	17,5
24.	2232	Pembangunan MRT Jakarta (Engineering Services)	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	40,5
25.	2244	Lanjutan Pembangunan Kapal 2000 GT	Lanjutan Pem. Kapal 2000 GT (2unit)	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	50,0
26.	2292	Lanjutan Pembangunan Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	50,0
27.	2292	Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (prioritas nasional)	Perpanjangan dermaga 300 m	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	142,6
28.	2268	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan	Terpasangnya fasilitas keselamatan penerbangan (4.000 paket/unit)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	359,8
29.	2268	Pengadaan dan pemasangan Jakarta Air Traffic System	Terpasangnya JATS (1 paket)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	270,0
30.	2270	Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan	Terlaksananya lanjutan pembangunan Bandara Kualanamu (6 paket), Multi Years Contract	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	763,4
31.	2271	Pembangunan/peningkatan Bandara di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan Daerah Pemekaran	Terlaksananya pembanguan dan prasarana dan sarana bandar udara guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	250,0
32.	2271	Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin-Makassar	Terlaksananya pembayaran sisa kontrak konstruksi sisi udara tahap II (1 paket), Multi Years Contract	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	53,9

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
33.	2271	Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana	Terjaminnya pelayanan operasi penerbangan yang aman dan cepat di daerah perbatasan, terpendil dan rawan bencana	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	254,1
34.	2204	Pembangunan Terminal	Peningkatan mobilitas/pergerakan penumpang di 15 lokasi (12 lanjutan dan 3 baru)	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dep. Perhubungan	92,4
35.	2208	Pembangunan Jembatan Timbang	Penanganan Muatan Lebih (overloading) transportasi jalan sebanyak 1 paket	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dep. Perhubungan	2,0
36.	2224	Pembangunan Sarana Kereta : KRDI; K3; KMP3; Railbus; KRL	33 Unit	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian	Dep. Perhubungan	168,4
37.	2227	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan KA baru Tulangan – Gununggangsir	1 Paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	30,0
36.	2232	Modifikasi Stasiun Cirebon	Peningkatan pelayanan sebanyak 1 paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	136,8
39.	2227	Lanjutan pembangunan jalan KA Sidoarjo-Tulangan-Tarik	Peningkatan pelayanan 1 paket	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Dep. Perhubungan	56,0
40.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Atapupu	Perpanjangan dermaga 160x8 (m2), pembangunan talud 245 m' dan fasilitas sisi darat	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
41.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sapudi	Pembangunan fasilitas pelabuhan sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	5,0
42.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Waikelo	Pembangunan fasilitas pelabuhan sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
43.	2250	Lanjutan perpanjangan dermaga Faspel Laut Reo	Pembangunan fasilitas pelabuhan sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	14,4
44.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Ba'a	Pembangunan dermaga 42 x 8 (m2), trestel 75 x 8 (m2)	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
45.	2250	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Maccini Baji tahap IV termasuk supervisi (selesai)	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	5,0
46.	2250	Lanjutan pembangunan faspel Pamatata tahap V (selesai)	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	5,0
47.	2250	Lanjutan Pengembangan Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai termasuk supervisi	Pembangunan 2 unit dermaga apung 15 x 8 (m2), trestel 313 x 9 (m2), causeway 94 x 13,7 (m2)	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	37,5
48.	2250	Lanjutan Faspel Tg. Batu Manggar	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
49.	2250	Lanjutan pembangunan faspel Pomako tahap II termasuk supervisi	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	20,0
50.	2250	Pembangunan faspel Papela	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	2,65
51.	2250	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Anggrek tahap IV	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	11,73
52.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tg. Buton-Riau untuk ekspor CPO	Pembangunan trestel 33,5 x 12 (m2)	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	7,68
53.	2250	Lanjutan faspel laut Malarko tahap III	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	20,0
54.	2250	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Palaihari dan Faspel Tanjung Batu-Kalimantan Selatan	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut di 2 lokasi	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	15,0
55.	2250	Lanjutan pembangunan Faspel Penajam Pasir tahap III termasuk supervisi	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	20,0
56.	2250	Penyelesaian pembangunan Faspel laut Teluk Tapang termasuk supervisi	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	20,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
57.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kalbut	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	5,0
58.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Boom Banyuwangi	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	5,0
59.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batang dan Rembang-Jawa Tengah	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut pada 2 lokasi	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
60.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manado	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
61.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bitung	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	41,0
62.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tilamuta – Gorontalo	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
63.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Gorontalo	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
64.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sei Nyamuk - Kaltim	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	16,0
65.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pantoloan	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	40,0
66.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Ahmad Yani - Ternate	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	30,0
67.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Depapre	Pembangunan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 1 pkt	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	10,0
68.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bau-Bau	Pembangunan dermaga 50 x 15 (m2) dan 70 x 15 (m2) trestle 147 x 8 (m2) dan fasilitas darat	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	6,9
69.	2250	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Tembaga	Pembangunan dermaga 93 x 18,5 (m2), trestle 3.648 m2 dan causeway 55 m	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	35,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
70.	0024	Pembangunan Sarana ASDP	Peningkatan keselamatan, aksesibilitas angkutan SDP dengan rincian Kapal perintis lanjutan 14 unit, baru 5 unit	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Dep. Perhubungan	256,2
71.	2256	Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Peningkatan keselamatan, aksesibilitas angkutan SDP → Dermaga peyeberangan lanjutan 43 dermaga, 9 dermaga sungai lanjutan dan 1 dermaga danau lanjutan & Breakwater	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Dep. Perhubungan	608,9
72.	2270	Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo	Terlaksananya pembangunan : landas pacu (21.000 m2), Stopway (3.600 m2), Taxiway (5.210 m2), Apron (5.888 m2) dan box culvert (338 m3)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	39,1
73.	2270	Pembangunan Bandar Udara Waghete Baru	Terlaksananya pembangunan : taxiway (2.250 m2), Apron (2.400 m2), Turning Area (1.800 m2), shoulder (19.600 m3), talud (132 m3)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	13,9
74.	2270	Pembangunan Bandar Udara Pengganti Dumatubun	Terlaksananya pembangunan landasan, taxiway dan apron tahap I (45.632 m2)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	27,0
75.	2270	Pembangunan Bandar Udara Seram Bagian Timur	Terlaksananya kegiatan penimbunan dan pemadatan tanah (120.000 m3)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	9,9
76.	2271	Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok-Sorong	Terlaksananya pembangunan fasilitas landasan (72.900 m3), ganti rugi tanah (1 paket), fasilitas keselamatan penerbangan (7 pkt), fasilitas bangunan (744 m2)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	63,4
77.	2271	Pengembangan Bandar Udara Pangsuma-Putussibau	Terlaksananya pembangunan fasilitas bangunan (682 m2, 440 m'), pembebasan tanah (150.000 m2), fasilitas keselamatan penerbangan (1 unit)	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	15,1
78.	0024	Pembangunan Rating School NAD dan Sorong	2 paket	Program Pendidikan Tinggi	Dep. Perhubungan	100,0
79.	0024	Pengembangan Kampus PIP Makasar dan STTD Bekasi	Terbangunnya Kampus Baru PIP Makassar dan STTD Bekasi	Program Pendidikan Tinggi	Dep. Perhubungan	100,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
80.	0024	Pembangunan Kampus BP2IP Surabaya	Terbangunnya Kampus BP2IP Surabaya	Program Pendidikan Tinggi	Dep. Perhubungan	131,8
81.	0024	Pembangunan dan pemasangan Simulator Pesawat Komersial beserta Fasilitas Pendukungnya	Tersedianya fasilitas Diklat Transportasi Udara	Program Pendidikan Tinggi	Dep. Perhubungan	285,1
82.	0024	Pembangunan Maritime Education and Training Improvement (METI)	Terbangunnya fasilitas pendidikan Diklat Kepelautan/Maritime 7 lokasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Dep. Perhubungan	119,0
83.	0024	Pembangunan Akademi Perkeretaapian Indonesia (penyusunan DED)	Terbangunnya Akademi Kereta Api Indonesia 1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Dep. Perhubungan	1,0
86.	2250	Lanjutan pembangunan pelabuhan ex BRR	Terlaksananya pembangunan pelabuhan Calang, Lhok Seumawe, dan Kuala Langsa	Program Pembangunan Transportasi Laut	Dep. Perhubungan	61,2
87.		Lanjutan pembangunan kapal penyeberangan Labuhan Haji-Sinabang ex BRR	Terlaksananya pembangunan kapal penyeberangan LabuhanHaji-Sinabang dan dermaga penyeberangan Meulaboh	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Dep. Perhubungan	51,9
88.		Lanjutan pembangunan terminal ex BRR	Terlaksananya pembangunan terminal di Nagan Raya, Meulaboh, Aceh Timur dan pembangunan fasilitas jalan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dep. Perhubungan	20,8
89.		Lanjutan pembangunan prasarana dan peralatan penunjang keselamatan penerbangan ex BRR	Tercapainya pelayanan jasa transportasi udara pasca tsunami	Program Pembangunan Transportasi Udara	Dep. Perhubungan	49,4
C. SUB BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN						
1.	4257	Pengembangan Sistem Drainase	3 kab/kota di NAD	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	Departemen Pekerjaan Umum	400,4
2.	4257	Pengembangan Sistem Drainase	37 kota	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Departemen Pekerjaan Umum	242,2

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
3.	4617	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat	9 kota dan 22 kawasan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Departemen Pekerjaan Umum	257,3
4.	4630	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum pada Kawasan Strategis	115 kawasan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Departemen Pekerjaan Umum	638,6
5.	7581	Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Kawasan	6 kawasan	Pengembangan Perumahan	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	14,6
D. SUB BIDANG ENERGI						
1.	2160	Pelayanan Usaha Pengolahan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Studi Optimasi Pemanfaatan Gas Bumi melalui Pipa Transmisi dan Gas Suar Bakar untuk Bahan Baku Kilang LPG (Kalimantan, Sulawesi, dan Papua); Studi Kelayakan Pembangunan Kilang Mini LPG; *Front End Engineering Design* (FEED) Pembangunan Kilang Mini LPG	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	10,2
2.	2173	Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas, Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Pendukung	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas di Depok, Bekasi dan Tarakan-Kaltim untuk 11.000 rumah tangga	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	188,0
3.	2133	Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi	Terselenggaranya Audit Energi di Sektor Bangunan dan Sektor Industri dan monitoring implementasinya : (1) Audit energi (Industri = 100 objek, Bangunan = 60 objek); (2) Monitoring (Industri 154 objek, Bangunan 86 objek)	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi	Dep. ESDM	28,5

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
E. SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN						
1.	2136	Induk Pembangkit dan Jaringan	Terselesaikannya pembangunan pembangkit sebesar 54 MW, Gardu Induk 150 kV dan transmisi sepanjang 1358 kms serta melanjutkan pembangunan transmisi yang multi years kontrak	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	2.041,0
2.	8215	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	Fasilitasi percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000MW	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	5,4
3.	2138	Penyiapan Program Ketenagalistrikan	(1) Laporan prakiraan kebutuahn tenaga listrik; (2) Kepmen ESDM/Laporan Review Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN); (3) Laporan hasil monitoring Pengembangan Jaringan Tenaga Listrik Terkait Program 10.000 MW; (4) Laporan Monitoring Penanganan Daerah Krisis Tenaga Listrik; (5) Laporan dan informasi mengenai daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber energi primer air dan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik dan kebijakan yang diambil untuk melakukan upaya pengembangannya; (6) Laporan Monitoring evaluasi pembangunan pembangkit listrik cras program tahap I; (7) laporan Tim pendamping Master Plan For Hydro Power Development in Indonesia.	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	3,8

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
4.	2155	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Ketenagalistrikan	(1) Rumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) bidang ketenagalistrikan; (2) standar peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang berhubungan dengan keselamatan keamanan dan kesehatan untuk diberlakukan sebagai standar wajib; (3) Kajian kesiapan infrastruktur (Laboratorium uji dan Lembaga sertfikasi Produk) dalam permberlakuan SNI wajib; (4) Pemberlakuan SNI Wajib untuk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang prioritas; (5) sosialisasi SNI wajib sehingga terwujud pemahaman yang sama terhadap penerapan SNI Wajib oleh instansi, masyarakat dan pelaku usaha; (6) Pembinaan dan pengawasan SNI wajib sehingga terwujud kepatuhan penggunaan SNI Wajib; (7) koordinasi dan mengikuti sidang standardisasi internasional IEC, ASEM / TFAP on SCA dan ACCSQ serta MRA regional maupun internasional; (8) kerjasama kalibrasi alat ukur listrik dalam rangka pelaksanaan SKB Peneraan alat ukur listrik; (9) pedoman penilaian kesesuaian teknis produk peralatan dan peranti yang standarnya akan diberlakukan sebagai standar wajib	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	5,0

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
5.	2159	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Lindungan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	(1) Mewujudkan Clean Development Mechanism bidang ketenagalistrikan dalam rangka menghadapi pemanasan global; (2) Analisis dan evaluasi hasil pengukuran medan magnet, medan listrik, dan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di bawah SUTET 500 kV pada Kab. Brebes; (2) Memfasilitasi Penyelesaian Kasus-Kasus Lingkungan di bidang Ketenagalistrikan; (3) Pengawasan Pelaksanaan Community Development Sektor Ketenagalistrikan; (4) Perumusan/revisi kebijakan (regulasi) bidang pengelolaan lingkungan sektor ketenagalistrikan; (5) Pengawasan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW Tahap I dan II di bidang Lingkungan Ketenagalistrikan; (6) Diseminasi kebijakan/regulasi bidang pengelolaan lingkungan sektor ketenagalistrikan; (7) Pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	2,9

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
6.	2156	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	(1) Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan; (2) Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi; Fasilitasi Tim Keandalan Tenaga Listrik; (3) Tersusunnya database sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik; (4) Menegakkan peraturan di bidang keselamatan ketenagalistrikan khususnya SLO instalasi penyaluran TL di P. Jawa dan Bali; (5) Memfasilitasi berdirinya Konsuil di daerah seluruh Indonesia; Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan; (6) Tersusun pedoman pemeriksaan PLTBayu; (7) Tersusun kajian pengaruh harmonisa pada sistem distribusi; (8) Terlaksana kajian kelaikan teknik untuk PLT Bayu *On Grid* terhadap sistem; (9) Terwujud strategi pemeliharaan untuk menjaga/meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik; (10) Tersusun kajian manfaat integrasi relai proteksi berteknologi digital dengan sistem SCADA untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik; (11) Terlaksana evaluasi pengaruh penggunaan capasitor bank terhadap keandalan sistem transmisi; (12) Tersosialisasi regulasi keselamatan ketenagalistrikan.	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	7,0
F. SUB BIDANG POS DAN TELEMATIKA						
1.	5766	Penyusunan/Pembaharuan Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Industri Pos dan Telematika	(1) Rancangan revisi UU Telekomunikasi era konvergensi; (2) Materi tindak lanjut UU Pos; (3) 7 Produk peraturan perundang-undangan bidang penyiaran dan implementasi sistem stasiun jaringan; (4) Sistem stasiun berjaringan (data pemantauan implementasi dan diseminasi peraturan); (5) *Blue print*	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika	Dep. Kominfo	14,4

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
			migrasi sistem penyiaran radio dan TV analog ke digital; (6) Buku data teknik penyiaran dan sistem berjaringan			
2.	5786	Peningkatan Jangkauan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Pos dan Telematika	(1) Hasil pemantauan pembangunan Palapa Ring; (2) Penyelenggara BWA (hasil seleksi); (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR); (4) Sarana dan infrastruktur *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII); (5) Infrastruktur TV digital (1 Paket pemancar TV digital, *set top box*, dan 8 pesawat penerima siaran TV digital); (6) Materi dan sosialisasi migrasi ke penyiaran digital; (7) Demo perangkat pemancar dan penerima digital; (8) Database penyiaran digital; (9) Pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran digital; (10) Penyelenggaraan *ICT Training Center* di Jababeka; (11) Strategi implementasi jaringan dan layanan *next generation network*; (12) Pemeliharaan Stasiun Monitor Frekuensi Radio; (13) Rencana pengalokasian frekuensi di perbatasan negara; (14) Aplikasi penyelenggaraan teknologi transaksi elektronik; (15) 3 Model implementasi blue print e-bisnis yang dapat direplikasi; (16) 1 lokasi window show e-bisnis; (17) 1 Pusat Komunikasi Kreatif; (18) 1 Paket inkubator inovasi TIK	Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	Dep. Kominfo	133,7

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
3.	5766	Penyusunan/Pembaharuan Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Industri Pos dan Telematika	(1) RUU *Cyber Crime* dan RUU Ratifikasi *Convention on Cyber Crime*; (2) Kebijakan *e-Government* tentang Nama Domain (Situs Pemerintah); (3) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dep. Kominfo	7,0
4.	5777	Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Literasi)	(1) Perangkat TIK tahap II (komputer dan jaringan internet, data *center*, instalasi) di kota Yogya, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul; (2) Infrastruktur (gedung, perangkat keras TIK, perangkat lunak, dan sistem) untuk *ICT Training Center* di UIN Syarif Hidayatullah; (3) Penyelenggaraan *ICT Training Center* di UIN Syarif Hidayatullah; (4) CAP di 222 kecamatan di Jabar, Banten dan Lampung	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dep. Kominfo	130,8
5.	5778	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	(1) Pemeliharaan 20 *Mobile* CAP (MCAP) dan 30 CAP; (2) 7 Lokasi CAP, 6 unit MCAP, 12 lokasi CAP untuk wanita; (3) Aplikasi layanan dasar publik (*e-citizen*); (4) Bantuan teknis/pendampingan *e-government* di 8 pemda; (5) Pengelolaan nama domain; (6) Fasilitasi 5 instansi pengguna sistem e-pengadaan; (7) Fasilitasi 3 instansi pemerintah untuk implementasi interoperabilitas dan interkonektivitas dan 3 instansi pemerintah untuk aplikasi keamanan informasi; (8) Penyelenggaraan Badan Pengawas Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; (9) 2 Lokasi fasilitasi *e-health* di RS/puskesmas; (10) 2 Lokasi fasilitasi sistem e-legislasi DPRD; (11) Portal layanan publik; (12)	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dep. Kominfo	25,1

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
			Penyelenggaraan Dewan TIK Nasional; (13) Diseminasi Internet Sehat; (14) Materi dan sosialisasi sistem peringatan dini bencana alam; (15) Buku data jalur jaringan informasi bencana alam dan sarana peringatan dini bencana alam			
6.	5767	Peningkatan Transparansi/Kejelasan Proses Perizinan Sektor Pos dan Telematika	(1) Hasil evaluasi penerapan ISO 9001:2000 spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; (2) Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (konsep perizinan frekuensi berbasis e-licensing, akses jaringan, pemeliharaan); (3) Hasil evaluasi/kajian spektrum frekuensi radio (*spectrum policy review* dan pentarifan); (4) Koordinasi penyelesaian proses perizinan penyiaran dan koordinasi dengan lembaga penyiaran; (5) Verifikasi faktual perizinan penyiaran di 33 provinsi; (6) Evaluasi uji coba siaran di 33 provinsi; (7) Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (SIMP3)	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika	Dep. Kominfo	20,1
7.	5774	Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Pelayanan, Keahlian SDM, Perangkat dan Sistem Pos dan Telematika	(1) Dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi; (2) 16 Standar/audit bidang TIK dan tim auditor; (3) 9 Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi; (4) Hasil verifikasi penggunaan TKDN terhadap belanja modal penyelenggara telekomunikasi; (5) Rumusan penyiaran digital (standar, persyaratan teknis perangkat penyiaran, uji coba dan pengukuran sistem penyiaran digital radio, forum internasional penyiaran digital, dan diseminasi rumusan penyiaran	Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	Dep. Kominfo	27,9

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
			digital); (6) Pameran pekan informasi nasional; (7) Peraturan Menteri tentang keamanan informasi; (8) 1 Paket data *center*, 1 paket *Government Secured Intranet*, 1 paket *Government Intranet Exchange*; (9) SIM TKI			
8.	5786	Peningkatan Jangkauan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Pos dan Telematika	Infrastruktur TVRI dan RRI	Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	LPP TVRI, LPP RRI BA 999	PM
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PENINGKATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA						
A. SUB BIDANG TRANSPORTASI						
1.	4253	Pengusahaan Jalan Tol	Perjanjian pengusahaan jalan tol dan perjanjian pelaksanaan dana bergulir untuk jalan tol	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	33,0
2.	4334	Pembebasan Lahan	LS	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dep. PU	250,0
B. SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN						
1.	2190	Pengaturan Investasi dan Pendanaan Ketenagalistrikan	(1) Terlaksananya penyusunan investasi penyediaan tenaga listrik; (2)pemantauan pelaksanaan pendanaan pembangunan tenaga listrik; (3) terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan Power Transmission	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	4,1

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
			Improvement/Renewable Energy; (4) peningkatan investasi sektor ketenagalistrikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; (5) terverifikasinya kegiatan usulan pendanaan program pada Satker Lisdes dan Ikitring.			
2.	2152	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Harga dan Subsidi Listrik	(1) Monitoring dan verifikasi usulan harga beli tenaga listrik dari IPP; (2) Monitoring dan verifikasi realisasi susut jaringan dan penjualan tenaga listrik dalam proses penetapan subsidi listrik; (3) Monitoring dan evaluasi optimalisasi penggunaan dan biaya bahan bakar pembangkit PKUK dalam rangka penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN; (4) Monitoring dan perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dan TDL-PLN; (5) Monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan rekening listrik yang disediakan PKUK; (6) Tersedianya hasil penelaahan dan perhitungan subsidi listrik; (7) Menyusun pedoman penetapan harga beli tenaga listrik yang kompetitif melalui optimalisasi pembelian tenaga listrik swasta sesuai formula yang tepat; (8) Kajian pola dan mekanisme penetapan TDL menuju keekonomian secara bertahap	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan	Dep. ESDM	3,8
C. SUB BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA						
1.		Fasilitasi Pengembangan Proyek KPS melalui *Project Development Facility*	· Terselenggaranya Pemberian Bantuan Teknis kepada Departemen dan Pemerintah Daerah		Bappenas (BA 999)	129,0
			· Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tim KPS di Pemerintah Daerah			

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
			· Terselenggaranya sosialisasi, penyebarluasan buku dan majalah KPS, serta operasionalisasi website KPS			
			· Terselenggaranya Infrastruktur Forum, Investor Forum, dan Regional Forum			
			· Terselenggaranya Pusat Pengembangan dan Simpul KPS			
2.		Risiko Tanah *(Landcapping)*	Tersedianya dana *landcapping* untuk pembangunan jalan tol		Departemen Pekerjaan Umum (BA 999)	1.890,0
3.		Dana Dukungan Infrastruktur	· Tersedianya dana sebesar Rp. 1 T untuk *land revolving fund* BLU tanah · Tersediannya jaminan pemerintah atas proyek 10 rb MW sebesar Rp. 1 T		Departemen Pekerjaan Umum (BA 999) Departemen ESDM (BA 999)	2.000,0
FOKUS PRIORITAS: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL						
A. SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR						
1.	4426	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi seluas 310.800 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	668,8
2.	4427	Rehabilitasi Jaringan Rawa	Terlaksananya rehabilitasi jaringan rawa seluas 72.400 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	229,1

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
3.	4429	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2.344.800 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	454,1
4.	4430	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa	Terpeliharanya jaringan rawa seluas 1.200.000 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	226,8
5.	4422	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	Terlaksananya kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 117.200 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	1.125,6
6.	4423	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Rawa	Terlaksananya kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan seluas 8.100 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	55,9
7.	4424	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Irigasi Air Tanah	Terbangunnya prasarana irigasi air tanah untuk mengairi lahan seluas 2.600 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	29,9
8.	4428	Rehabilitasi Prasarana Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya prasarana irigasi air tanah seluas 5.000 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	24,3
9.	4431	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Optimalnya fungsi jaringan irigasi air tanah seluas 6.700 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	26,3

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Miliar Rupiah)
10.	4468	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi air tanah seluas 555 ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	7,6
FOKUS PRIORITAS: PENINGKATAN KEBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT						
A. SUB BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1.	4622	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 237 kecamatan dan 32 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di 32 kabupaten, 9 provinsi.	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	499,5
2.	4280	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM Perkotaan)	Pemberdayaan masyarakat di 8.304 kelurahan pada 884 kecamatan di 246 kota	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	1.509,5

PRIORITAS 5 : PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Milyar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS: PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						
A. SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR						
1.	4463	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di 14 Dinas Provinsi	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	33,0
2.	4464	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) di 14 Dinas Provinsi dan 99 Dinas kota /kabupaten	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	91,3
3.	4465	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP) di 6 Dinas provinsi dan 26 Dinas kota / kabupaten	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Departemen Pekerjaan Umum	177,2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK YANG BERDAYASAING DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Milyar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS:						
A. BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)						
TOTAL BPLS						**1.193,3**
1	4330	Pembangunan Jalan Nasional	a. Terselesaikannya pengadaan tanah untuk jalur jalan TOL, jalan arteri, dan pipa air (sisa kekurangan TA 2009) sekitar 30 Ha. b. Terselesaikannya konstruksi relokasi Jalan Arteri Raya Siring-Porong (paket 1, 2, 3, dan 4) sepanjang 7,1 km. c. Terbangunnya interchange Fly Over (jalan simpang susun) Kesambi.	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	BPLS	344,9
2	4432	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	a. Terselesaikannya pelunasan jual beli tanah di 3 desa (sebesar 80%). b. Terkendalinya luapan lumpur dan terlaksananya pengaliran lumpur ke Kali Porong, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa pembuang lumpur. c. Terpeliharanya tanggul penahan lumpur sepanjang 14 km. d. Terselesaikannya saluran drainase diseputar tanggul sepanjang 10 km. e. Terpeliharanya kondisi Kali porong dan Muara-nya sepanjnag 500 m untuk untuk menjamin kelancaran pengaliran lumpur ke muara Kali porong/Laut lepas. f. Terpeliharanya spoilbank hasil pengerukan dengan mereklamasi lahan seluas 20 ha, yang berfungsi untuk konservasi dan budidaya hasil laut. g. Tersedianya 4 unit kapal keruk, 1 unit pompa air dan 1 unit pompa lumpur.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	BPLS	831,2

No	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (Milyar Rupiah)
			h. Terlaksananya kegiatan mitigasi luapan lumpur pada tanggul luar.			
3	0016	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data & Informasi	a. Terlaksananya kegiatan pemantauan deformasi geologi yang berupa gerakan tanah (horizontal/vertikal/lateral) dan kondisi subsurface, serta penanganan dampak deformasi di permukaan bumi berupa semburan air/gas yang mengancam keselamatan warga. b. Tersedianya data dan informasi (geologi, semburan dan luapan lumpur, kualitas air dan gas) sebagai dasar penanganaan area terdampak, rencana pemanfaatan gas dan lumpur, serta penentuan daerah rawan terdampak.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	BPLS	5,9
4	0553	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan	a. Terfasilitasinya penyelesaian proses pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga 3 desa (Ds. Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan) seluas 2.000 bidang tanah. b. Meneruskan program bantuan kontrak rumah bagi warga di 3 Desa (Ds. Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan) sebanyak 3.100 KK/10.020 Jiwa dalam situasi dimana pelunasan jual beli tanah dan bangunan di TA. 2009 tidak dapat dilaksanakan. c. Terlaksananya bantuan evakuasi, kontrak rumah dan jaminan hidup penduduk 9 RT yang pemukimannya sudah tidak layak huni (Ds Mindi, Ds Siring,Ds Jatirejo) sebanyak 756 KK/5.428 jiwa. d. Terlaksananya program pelatihan ketrampilan kerja sebanyak 10 angkatan (@ kurang lebih 40 orang). e. Terlaksananya bantuan air bersih, bantuan kesehatan, pemakaman dan pengamanan dari bahaya semburan-semburan air, penurunan tanah dan semburan gas berbahaya.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	BPLS	11,3

BAB 5
POLITIK

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 5
POLITIK

5. 1. Politik Dalam Negeri

A. Kondisi Umum

Selama empat tahun terakhir sejak awal 2005, Indonesia mengalami pasang surut yang cukup dinamis dalam kehidupan dan harmonisasi hubungan antar kelompok. Pada umumnya, melalui kerja keras dan upaya yang terkoordinasi, pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat, sebagai kelanjutan pencapaian akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah-wilayah rawan konflik seperti Poso, Maluku, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Papua terus memperlihatkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat di daerah masing-masing. Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, tidak memihak, proaktif dan berimbang ternyata telah cukup mampu meyakinkan berbagai pihak bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.

Khusus di NAD, stabilitas sosial politik yang terjadi tidak terlepas dari keberhasilan program reintegrasi yang telah dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah dan pemerintah provinsi NAD, serta peran forum komunikasi dan koordinasi yang menjadi wadah bagi penyelesaian masalah berkaitan dengan agenda perdamaian yang telah disepakati. Sedangkan di Papua, situasi yang relatif cukup kondusif merupakan sumbangan dari adanya penguatan implementasi Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU No. 21 tahun 2001 dengan penerapan Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan penerapan *New Deal Policy*. Pada tahun 2008, telah ditetapkan PP No. 64 tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) khususnya yang menyangkut keuangan MRP.

Pada sisi lain, hal yang kurang menggembirakan terlihat dari sisi hubungan antar kelompok masyarakat. Walaupun secara keseluruhan pemenuhan hak-hak warganegara dan kebebasan sipil (*civil liberties*) oleh negara menunjukkan kecenderungan meningkat secara nasional, namun ada insiden-insiden kekerasan antar kelompok masyarakat yang membuat semua prihatin. Pada tahun 2008 masih terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Kelompok yang menjadi sasaran utama adalah kelompok minoritas agama tertentu, berupa tindak perusakan tempat ibadah dan rumah tinggal, gangguan atas kegiatan ibadah dan ritual. Tindakan kekerasan terjadi juga dalam sengketa kepemilikan tempat berusaha, kepemilikan lahan, persoalan ganti rugi lahan untuk proyek pembangunan, persoalan kesukuan, serta perselisihan kelompok politik baik dalam kaitan perselisihan internal di dalam partai politik ataupun antar partai politik.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, masih terlihat adanya kesenjangan antara semangat dan kebebasan yang besar dalam berpolitik masyarakat dengan kemampuan organisasi politik untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara memadai untuk mengakomodasi aspirasi politik masyarakat. Hal ini terlihat dari besarnya semangat dan

potensi partisipasi politik rakyat untuk ikut berorganisasi dalam partai politik dan organisasi masyarakat sipil. Indikasi yang jelas adalah lolosnya 44 partai politik termasuk 6 partai politik lokal di provinsi NAD untuk ikut Pemilu 2009, serta terdapat puluhan ribu organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Pada sisi lain, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berorganisasi tidak diikuti munculnya kemampuan yang cukup untuk melakukan pengawasan, serta belum tersedianya mekanisme dan prosedur yang memadai untuk rakyat dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam berbagai kontak dan komunikasi dengan DPRD, pertemuan dengan pemda, konsultasi pada musrenbang, serta kegiatan partisipasi politik lainnya.

Berkaitan dengan pilkada, sampai dengan akhir tahun 2008, secara umum pelaksanaannya berjalan relatif lancar dan aman. Perselisihan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2008 dapat diselesaikan secara hukum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melalukan pemungutan suara ulang di dua kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Pada daerah lain, meskipun terjadi perselisihan yang cukup tajam sejak akhir 2007 mengenai hasil Pilkada Gubernur Maluku Utara antara pihak-pihak yang bersaing dalam pilkada, namun kasus ini sudah dapat diselesaikan secara politik dengan mempertimbangkan semua aspek hukum melingkupi persoalan pilkada ini. Pemerintah sudah menetapkan pemenang Pilkada Gubernur Maluku dan mengharapkan semua pihak berbesar hati untuk menerima keputusan pemerintah ini, sehingga gubernur yang baru dapat terus melanjutkan tugas-tugasnya secara seksama untuk kepentingan seluruh masyarakat Maluku Utara. Partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sampai dengan akhir tahun 2008 dapat dikatakan cukup tinggi yaitu mencapai 75,28%.

Pada sisi perkembangan kinerja institusi demokrasi, selama empat tahun terakhir sejak awal 2005 sampai dengan 2009 ini, Indonesia telah mengalami proses transformasi politik yang sangat berarti bagi konsolidasi demokrasi. Lembaga-lembaga penyelenggaraan negara yang sudah ada sejak beberapa dekade terakhir ini terlihat bergerak maju secara lebih dinamis dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diberikan konstitusi kepada mereka masing-masing. Pada sisi lain, lembaga-lembaga independen yang relatif baru didirikan pada era reformasi bahkan tidak jarang menunjukkan kinerja yang melebihi harapan banyak kalangan di dalam masyarakat luas.

Sepanjang tahun 2008 sejumlah landasan struktural penting telah berhasil diselesaikan dalam proses perwujudan lembaga demokrasi yang makin kukuh untuk memberikan landasan yang kuat bagi proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan terutama untuk menghadapi penyelenggaran pemilu 2009 yang diharapkan secara kualitas lebih baik dibandingkan dengan pemilu 2004, terutama dalam menghasilkan elit-elit politik yang akan memimpin penyelenggaraan negara untuk lima tahun ke depan. Undang-undang hasil revisi tersebut adalah UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD segera akan diselesaikan pada 2009.

Kemajuan dalam hal pelembagaan demokrasi yang juga perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2008 adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* bagi pembatalan Pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Konsekuensi dari pembatalan ini adalah penetapan calon

anggota legislatif terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, tidak lagi berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik yang ikut di dalam pemilu legislatif bersangkutan. Pada tahun 2007 demokrasi Indonesia juga mencapai kemajuan serupa yakni dengan diperbolehkannya keikutsertaan calon independen dalam pilkada melalui penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* terhadap UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tonggak penting bagi perluasan ruang kebebasan politik masyarakat luas dan peningkatan kualitas proses rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia, karena calon independen diharapkan menjadi pemicu motivasi calon-calon dari parpol untuk mempersiapkan diri secara lebih baik.

B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Pada tahun 2010, pada umumnya permasalahan yang akan dihadapi di wilayah pasca konflik adalah menjaga harmonisasi di dalam masyarakat maupun terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Di wilayah Aceh, hal ini menjadi penting mengingat masih adanya berbagai potensi persoalan yang akan muncul dalam penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan (PP) UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hingga saat ini, sejumlah 10 PP dan 1 Perpres dan pembentukan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum dapat dituntaskan. Isu lain yang akan dihadapi adalah berbagai persoalan pasca selesainya program Reintegrasi damai Aceh termasuk keberadaan warga negara asing dan LSM/NGO asing yang sedang dan masih akan melakukan aktivitasnya di NAD. Sedangkan untuk Papua, permasalahan yang masih akan dihadapi adalah terkait dengan penyusunan PP sebagai penjabaran UU No. 21 tahun 2001 dan berbagai implikasi pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, dukungan penguatan ruang publik untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat menjadi suatu keniscayaan.

Permasalahan lain adalah kinerja dan kredibilitas parpol yang dinilai rendah oleh para konsitutennya terutama pasca Pemilu 2009. Persepsi konstituen masih disekitar peran parpol yang belum akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi agregasi, artikulasi, dan pendidikan politik; dan dari sisi kapasitas organisasinya nya pun masih lemah terutama terkait dengan pola pengkaderan (rekrutmen). Parpol yang mendapat kursi di lembaga legislatif akan dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi nya tersebut.

Organisasi masyarakat sipil secara umum masih akan mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh parpol. Organisasi masyarakat sipil masih akan dituntut untuk dapat melaksanakan perannya untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kelompoknya. Permasalahan tersebut disebabkan beberapa kondisi yang dihadapi hingga saat ini yaitu belum terciptanya iklim yang cukup kondusif untuk mendorong peran optimal organisasi masyarakat sipil dan masih rendahnya kapasitas organisasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah mewujudkan kinerja organisasi masyarakat sipil yang independen dan otonom, dan yang juga penting adalah mencapai kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya. Begitupun dengan organisasi partai politik, tantangannya adalah meraih kepercayaan konstituen melalui peningkatan kinerja parpol yang dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat konstituennya.

Terkait dengan hal ini, pemerintah memiliki kepercayaan bahwa sebagian besar persoalan-persoalan yang di dalam masyarakat lebih baik diatasi melalui proses penguatan pemahaman masyarakat sendiri atas nilai-nilai kehidupan publik yang benar. Organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran dalam memberikan advokasi kepada masyarakat, selain melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah dan aparat negara pada umumnya. Organisasi masyarakat sipil perlu lebih terlibat dalam mencegah eskalasi yang berkaitan dengan potensi-potensi konflik di atas dengan mengutamakan proses-proses komunikasi, dialog, pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), advokasi serta mediasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik kepentingan ataupun terhadap aparat pemerintah dan birokrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan kerangka regulasi yang diperlukan masyarakat sipil untuk meningkatkan kinerja organisasi masyarakat sipil sebagai pelopor-pelopor pemberdayaan masyarakat yang lebih kredibel serta menjadi alat demokratisasi yang lebih matang dibandingkan sebelumnya.

Pada tahun 2010, para anggota legislatif dan eksekutif yang terpilih pada Pemilu 2009 akan dituntut akuntabilitasnya oleh para konstituennya. Keputusan MK yang mengabulkan *judicial review* atas pasal 214 UU No.10 tahun 2008 merupakan langkah yang diharapkan mendukung proses ini karena anggota legislatif yang duduk di lembaga legislatif merupakan individu yang paling dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Hal yang menjadi tantangan besar pada masa depan dalam merespon hasil rekrutmen kepemimpinan politik melalui Pilkada dan Pemilu 2009 adalah meminimalkan dampak-dampak tidak sehat dari kesenjangan elektoral (*electoral disconnection),* yaitu dengan cara mencari mekanisme yang lebih struktural untuk mengoptimalkan hubungan akuntabilitas antara wakil rakyat dengan konstituennya dalam periode antara dua pemilihan umum dan pilkada. Kesenjangan elektoral pasca pilkada dan pasca pelaksanaan pemilu 2009 kemungkinan besar menjadi permasalahan mengingat adanya dampak negatif *money politics* yang menimbulkan politik balas budi sebelum pemilu berlangsung. Tantangan lain adalah mewujudkan kerja sama yang sinergis antara anggota legislatif dan sekretariat internalnya yang pada beberapa kasus mengganggu terlaksananya komunikasi politik dengan konstituennya dan dalam menjalankan fungsi DPR dan DPD; serta peningkatan profesionalitas anggota legislatif hasil Pemilu 2009.

Oleh karena itu, pada tahun 2010 pendidikan politik *(civic education)* masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sipil adalah tantangan utama demokratisasi di Indonesia. Dengan dipelopori oleh media massa, kalangan universitas, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, masyarakat perlu terus dididik dan diajak untuk secara aktif berpartisipasi mengawasi para wakil rakyat dan pemerintah yang mereka pilih dalam Pemilu 2009. Tidak hanya itu, pendidikan politik perlu diberikan kepada para elit politik yang telah terpilih dalam proses seleksi pemilu 2009 dan pilkada yang akan berlangsung pada tahun 2010.

Pada 2010 perlu makin disadari bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu sangat erat kaitannya dengan peningkatan partisipasi politik aktif rakyat dan kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga demokrasi pada masa mendatang. Perlu ditegaskan kembali bahwa kurang berhasilnya Pemilu 2009 dapat merupakan *setback* bagi konsolidasi demokrasi kita yang mungkin sekali akan sulit diperbaiki. Sebaliknya, penyelenggaraan Pemilu 2009 yang sukses akan membawa kita

pada proses konsolidasi demokrasi yang lebih tinggi dan lebih maju. Untuk itu, maka lima tahun berikutnya sampai 2014 akan menjadi ujian penting bagi rezim pemilu Indonesia. Tahun 2010, adalah tahun yang sangat penting untuk menjadi batu ujian pertama, apakah Pemilu 2009 adalah Pemilu yang lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2004.

Pada tahun 2010, permasalahan yang akan dihadapi adalah penyelesaian berbagai persoalan di dalam masyarakat sebagai dampak negatif pemilu 2009 dan penyelesaian kasus sengketa pemilu 2009. Pelembagaan dialog/ruang publik, serta penyelesaian melalui mekanisme hukum merupakan tantangan yang harus diwujudkan. Permasalahan lain adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu menjadi tantangan untuk meraih kepercayaan dari masyarakat sipil terhadap pemerintah dengan melakukan reformasi birokrasi termasuk memberikan pelayanan publik yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk beraktivitas dan berkembang.

Terkait dengan komunikasi dan informasi, permasalahan yang akan muncul adalah masih adanya ketidaksiapan dalam melaksanakan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif. Hal lain adalah akan munculnya potensi gugatan atas ketidaksiapan lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Dalam menghadapi pemilu 2009, media massa diharapkan menjadi pemantau sekaligus pelapor yang dapat menjadi mata dan telinga masyarakat untuk mengawal proses politik yang sangat penting pada Pemilu 2009. Semua pihak berkepentingan terhadap pelembagaan pers yang mendukung transparansi dan akuntabilitas proses penyelenggaraan pemilu.

Dengan permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2010 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik masyarakat;
2. Meningkatnya kinerja lembaga demokrasi, organisasi masyarakat sipil dan parpol
3. Terlaksananya secara efektif UU Keterbukaan Informasi Publik

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Untuk mencapai sasaran pada tahun 2010, langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangannya demokrasi, serta penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik;
2. Mengembangkan pendidikan politik
3. Memantapkan kesiapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi;

5.2. Politik dan Hubungan Luar Negeri

A. Kondisi Umum

Proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia secara konsisten telah mengundang cukup banyak simpati, dukungan, dan kepercayaan internasional yang dapat

menjadi modalitas penting bagi diplomasi internasional Indonesia. Demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang paling modern, dan untuk itu Indonesia dinilai sebagai negara yang fleksibel terhadap perubahan yang baik. Dampak positif dari situasi tersebut adalah bahwa masyarakat Indonesia lebih dapat dipercaya karena mampu berdemokrasi.

Pada tahun 2008, Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menempatkan pemajuan demokrasi dalam agenda kawasan Asia. Penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* menjadi sangat bersejarah dan strategis, karena untuk pertama kalinya negara-negara di kawasan Asia mau dan mampu secara terbuka membicarakan upaya pemajuan demokrasi, sebagai proses yang akan berkelanjutan ke depan di bawah kepemimpinan Indonesia. Forum ini telah mampu menegaskan posisi dan identitas nasional Indonesia yang baru sebagai salah model demokrasi yang cukup stabil di kawasan Asia Tenggara. Apabila Indonesia mampu melanjutkan konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang, maka Indonesia diharapkan mampu memulihkan wibawa dan kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara, bahkan di seluruh Asia di dalam dinamika kawasan yang sudah berubah drastis.

Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, Indonesia telah berhasil memperoleh dukungan *The Pasific Islands Forum (PIF)* dengan dihilangkannya rujukan mengenai Papua di dalam komunike gabungan KTT PIF tahun 2008 di Nieu. Negara-negara seperti Papua Nuigini, Solomon Islands, Tonga, Fiji dan Palau telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung Indonesia dengan cara tidak mendukung gerakan separatisme di Papua. Keberhasilan lain adalah dengan meningkatnya pemahaman beberapa anggota parlemen negara tertentu mengenai otonomi khusus, situasi HAM dan pembangunan di Papua.

Dalam memahami dan menghormati antarsesama umat beragama, Indonesia mengembangkan dan memprakarsai berbagai dialog antar agama dan budaya, yang diusahakan menjadi agenda tetap diplomasi Indonesia pada masa depan. Tindak lanjut atas kegiatan sebelumnya juga dilakukan secara konsisten, termasuk rangkaian *interfaith dialogue* secara bilateral seperti dengan Australia, Vatican, dan Belanda, Spanyol, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya, termasuk dalam kerangka kerja sama regional melalui peran aktif Indonesia dalam 4th ASEM *Interfaith Dialogue* dan *Interfaith Dialogue RI-UE*.

Berkenaan dengan pencucian uang, citra Indonesia telah meningkat sebagai negara yang berkomitmen kuat dalam keanggotaan *Asia Pacific Group on Money Laudering (APG)* dan Egmont Group yang merupakan forum global dalam pemberantasan pencucian uang, sehingga Indonesia tetap tidak termasuk dalam daftar *Non cooperative Countries and Territories (NCCT)* dari FATF KTT G-7. Disamping itu, Pemerintah Indonesia telah menandatangi Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Hongkong SAR pada bulan April 2008.

Pemerintah Indonesia pun telah berhasil menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah Australia dalam pengamanan dan penyelesaian nelayan Indonesia yang bermasalah di Australia dan mengembangkan program bantuan alternatif kesempatan kerja bagi nelayan tradisional Indonesia dengan dukungan Australia.

Dalam merespon isu terorisme, pemerintah Indonesia telah meningkatkan hubungan bilateral dengan Australia dan Arab Saudi. Di samping itu, usulan Indonesia mengenai Intersessional Meeting on Maritime Security sebagai mekanisme baru *ASEAN Regional Forum (ARF)* telah disetujui pada pertemuan tingkat menteri ARF pada Juli 2008 yang lalu. Mekanisme ini berada di luar mekanisme *Intersessional Meeting on Counter-Terrorism and Trans-national Crimes* yang sudah ada saat ini. Indonesia pun telah ditunjuk sebagai tuan rumah APEC *Seminar on Securing Remittance and Cross Border payment from Terrorist* dalam rangka mencegah aliran dana untuk terorisme serta penyalahgunaan oleh kegiatan terorisme.

Indonesia telah pula melakukan kerja sama dengan Australia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pemberantasan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Disamping itu, Indonesia telah menyepakati kerja sama di bidang pengawasan dan penanggulangan *IUU Fishing* dengan Swedia, AS, Malaysia, Vietnam, Tahiland dan Filipina.

Perjalanan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2008 didedikasikan antara lain untuk memperjuangkan kepentingan nasional di daerah perbatasan. Sepanjang tahun 2008, Indonesia secara intensif melakukan *border diplomacy* dengan Filipina, Papua New Guinea (PNG), Malaysia, Singapura dan Timor Leste. Secara khusus dengan Timor Leste, kedua pemimpin negara sepakat untuk membangun *soft border regime* dan *good border management* dalam rangka memelihara suasana perlintasan perbatasan damai, terutama para pelintas batas tradisional, dan keamanan sepanjang wilayah perbatasan. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian setiap sengketa internasional, termasuk sengketa perbatasan adalah dengan menghindari penggunaan kekerasan dan mengedepankan penyelesaian secara damai sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* dan ketentuan hukum internasional lainnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan proses penetapan batas wilayah, pemerintah terus berupaya mengedepankan jalur perundingan sebagai pilihan dalam menciptakan kesepakatan bersama. Hal ini dipegang erat mengingat dalam perundingan, usaha untuk memperjuangkan kepentingan nasional dapat dilakukan secara maksimal.

Terkait dengan WNI dan BHI Indonesia di luar negeri, upaya perlindungan dan pelayanannya telah direalisasikan dengan dibentuknya Unit Pelayanan Publik di beberapa Perwakilan RI seperti Singapura, Bandar Seri Begawan, Damaskus, Amman, Doha dan Seoul serta perundingan mengenai *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara-negara pengguna jasa TKI. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan para TKI.

Dalam konteks mendukung kepentingan Indonesia, terutama untuk membuka dan menjajagi berbagai peluang kerja sama ekonomi, upaya yang telah dilakukan adalah berpartisipasi di berbagai forum kerjasama internasional yang membahas masalah ekonomi, investasi, perdagangan dan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah berupaya membuka peluang dan melakukan promosi di bidang investasi, perdagangan dan pariwisata di wilayah Timur Tengah, Afrika, kawasan Eropa Tengah dan Timur serta Amerika Selatan dan Karibia, disamping meningkatkan kerja sama ekonomi perdagangan dengan pasar tradisional di kawasan Amerika Utara dan Tengah serta Eropa Barat.

Dalam kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia berperan sebagai penggagas *Asean Community*. Sekali pun sejumlah kalangan meragukan peran ASEAN bagi Indonesia, kerja sama ASEAN masih ditempatkan sebagai prioritas dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN diarahkan untuk memperkuat kerja sama ASEAN guna mendorong proses integrasi dan mewujudkan Komunitas ASEAN yang dilandasi ketiga pilarnya, yaitu *ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community* (*AEC*) dan *ASEAN Social-Cultural Community* (*ASCC)*. Indonesia juga terlibat secara aktif dalam perundingan-perundingan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), *Asean-Canada SEOM, Asean Korea Free Trade Area* (AKFTA), dan *Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA).

Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN yang memberikan aturan-aturan hukum yang jelas bagi ASEAN dalam mengambil tindakan dan langkah dalam menyelesaikan berbagai konflik internal yang belum terselesaikan. Ratifikasi Piagam ASEAN tersebut dapat menjadi langkah awal dalam memulihkan peran Indonesia untuk terus melakukan konsolidasi dan kohesivitas organisasi regional ASEAN. Citra Indonesia sebagai negara demokrasi perlu untuk dibuktikan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk menyelesaikan berbagai konflik melalui cara-cara demokratis.

KTT ke-14 di Thailand, 28 Februari – 1 Maret 2009 telah menghasilkan *Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)*. Dokumen tersebut mengesahkan Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk melengkapi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang telah disahkan sebelumnya. KTT juga mengesahkan *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan 2 (2009-2015)* sebagai pengganti *Vientiane Action Programme.*

Salah satu modalitas yang dimiliki Indonesia adalah kenyataan adanya hubungan diplomatik dan hubungan antar masyarakat yang baik dengan sebagian besar negara di dunia. Selain membaiknya hubungan-hubungan pada tingkat bilateral, peranan Indonesia di dalam berbagai organisasi regional dan internasional selama ini juga cukup menonjol, terutama dalam PBB, ASEAN, APEC, ARF, Gerakan Non-Blok dan Organisasi Negara-negara Islam (OIC). Lebih penting lagi, proses demokratisasi yang sekarang berlangsung di Indonesia yang mengundang banyak simpati internasional, terutama dari negara-negara maju yang selama ini aktif memajukan agenda demokrasi tentu juga merupakan modalitas yang menjadi dasar yang sangat penting dalam diplomasi internasional Indonesia.

Dalam konteks ikut serta dalam perdamaian dunia, Indonesia cukup berhasil mempertahankan posisinya yang terhormat sebagai negara yang peka terhadap nilai-nilai keadilan, perdamaian dan kebebasan di dalam hubungan internasional. Pada saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Indonesia berani berbeda pendapat dengan negara-negara besar di PBB dalam kasus Program Nuklir Iran. Indonesia juga berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB sejak tahun 2006. Dalam kasus-kasus konflik tertentu, Indonesia selalu siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, seperti halnya pengiriman pasukan ke Lebanon Selatan untuk mengimplimentasikan UNSC Resolution # 1701 setelah perang Israel-Hezbollah di kawasan itu pada 2006. Indonesia telah berpartisipasi dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) dengan mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-A untuk bergabung dengan *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Peningkatan partisipasi Indonesia dalam OPP didukung dengan pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai forum koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait, termasuk *United Nations Department for Peace Keeping Operations* (UNDPKO). Selain itu, Indonesia juga mengirim satu FPU *(Formed Police Unit)* POLRI ke Darfur, Sudan untuk bergabung dalam *United Nations - African Union Mission in Darfur* (UNAMID) pada tahun 2008. Keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB merupakan *"political investment"* dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

Terkait dengan serangan Israel ke wilayah Jalur Gaza, Palestina, antara Desember 2008 sampai dengan akhir Januari 2009, pemerintah Indonesia telah merespons serangan tersebut dengan segera beberapa hari setelah terjadinya serangan, melalui penyerahan pernyataan

tertulis kepada Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB, dengan substansi pernyataan protes dan keprihatinan bangsa Indonesia atas serangan itu dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengeluarkan resolusi yang menuntut penghentian segera serangan Israel di jalur Gaza. Kepada rakyat dan bangsa Palestina, pemerintah Indonesia memberikan bantuan obat-obatan, serta dana bantuan sejumlah USD 1 juta.

B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Krisis keuangan dunia yang turut berpengaruh pada kondisi perekonomian domestik, menjadi suatu tantangan baru yang harus dihadapi oleh Indonesia. Arah kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk tetap mendukung pulihnya perekonomian nasional, yang diwujudkan melalui kerja sama baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, seperti yang dilaksanakan melalui peran aktif Indonesia dalam KTT G20 di Washington, AS pada 2008 dan London, Inggris pada 2009.

Memasuki tahun 2010, pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sekaligus tantangan dalam mempertahankan citra Indonesia sebagai negara demokratis. Persoalan-persoalan yang terjadi seperti adanya konflik Myanmar serta adanya rejim militer yang semakin menguat dan represif di Myanmar, dan adanya kudeta militer di Thailand sebagai *demoractic backsliding* merupakan ujian bagi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya yang juga mencerminkan sebagai negara demokratis terbesar ke 3 di dunia.

Terkait dengan upaya menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, Indonesia perlu mempercepat penyelesaian sengketa wilayah dan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Agenda ini memerlukan sinergi dengan program pembangunan lainnya, baik di bidang pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar maupun bidang pertahanan. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatisme dan masalah otonomi daerah guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia. Indonesia perlu memperluas interaksi dengan pemerintah negara-negara di kepulauan Pasifik agar tetap mendukung keutuhan wilayah NKRI.

Indonesia pada tahun 2010 mendatang masih akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya ancaman-ancaman non-militer dan masalah-masalah trans-nasional; seperti kejahatan lintas negara (*trans-national crimes*) dalam bentuk masalah perusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, perdagangan anak-anak dan wanita, dan perdagangan narkotika.

Pada 2010 Indonesia juga perlu meningkatkan upaya-upaya pengamanan sumber daya alam nasional secara lebih terkoordinasi. Apabila pada tahun 2009 Indonesia masih sering menjadi sasaran penangkapan ikan illegal, penyelundupan kayu, hasil-hasil tambang dan hasil hutan secara sistematis ke luar negeri, maka mulai tahun 2010, hal ini sudah harus dapat dikurangi secara drastis melalui upaya-upaya pengetatan pengamanan dan penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Dampak serangan terorisme di berbagai belahan dunia semakin meningkatkan kesadaran

perlunya kerja sama antarnegara untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia akan dihadapkan pada pelaksanaan tindaklanjut kerja sama bilateral seperti kerjasama dengan pemerintah Australia yang konsisten dengan tujuan dan prinsip-prinsip Lombok Treaty, serta penuntasan beberapa pembahasan kerjasama pemberantasan terorisme dengan negara bilateral dan organisasi internasional.

Indonesia secara tegas menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Namun disadari bahwa upaya memberantas terorisme dalam jangka panjang perlu dilakukan dengan mengikis akar-akar terorisme yang muncul dari radikalisme dan manipulasi terhadap agama. Dalam kaitan itu, serangkaian kegiatan *interfaith* yang perlu terus dilakukan untuk memperluas pandangan terhadap keberadaan ragam agama dan kepercayaan di suatu negara. Negara-negara dengan paham sekuler akan dapat melihat bahwa membicarakan suatu kepercayaan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus disadari sehingga dapat tercipta rasa saling menghargai dan toleransi.

Persoalan nuklir masih akan tetap menjadi isu berat di tahun 2010. Persoalan yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai salah satu penandatangan rezim *Non-Proliferation Treaty* (NPT) adalah bagaimana Indonesia mempertahankan komitmen Indonesia dalam perjanjian tersebut, namun pada sisi lain tidak akan mengganggu situasi domestik dan hubungan bilateralnya dengan negara-negara yang berkeinginan mengembangkan nuklir baik dalam kerangka NPT atau tidak. Pada lingkaran terdekat dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia tetap akan memperjuangkan dipertahankannya seluruh kawasan sebagai wilayah bebas senjata nuklir.

Penanganan dan penyelesaian permasalahan TKI di negara-negara penerima masih akan tetap menjadi permasalahan yang harus ditangani pada tahun 2010 mendatang. Dalam penanganan kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kendala utama yang dihadapi adalah kurang memadainya dana, selain yang tersebar di beberapa tempat bagi perlindungan yang ada. Kasus-kasus yang menonjol pada umumnya terkait dengan masalah TKI ilegal, dan masalah beberapa individu WNI yang terkait dengan terorisme. Penanganan masalah TKI secara umum menunjukkan pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah dan unsur-unsur masyarakat lainnya dan perlunya memperbaiki pelayanan dan memberikan perlindungan WNI yang sedang menjalani proses hukum di negara lain. Salah satu isu menonjol lainnya yang terus menjadi perhatian masyarakat adalah persoalan kekerasan yang dihadapi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dan penanganan TKI di dalam negeri terkait dengan manajemen pengiriman, perlindungan dan pemulangannya. .

Permasalahan kecenderungan terjadinya kekurangan pangan dunia dan bahkan memburuk di banyak negara berdampak pada peningkatan harga pangan dunia dan arus impor dan ekspor pangan masih akan terjadi secara mengglobal pada tahun-tahun mendatang. Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi pangan dan harga pangan yang tinggi di Indonesia, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik Indonesia; demikian pula dengan persoalan kelangkaan energi.

Posisi Indonesia tidak akan terlepas dari kompleksitas lingkungan strategis dan pergeseran kekuatan regional di kawasan Asia Timur. Pergeseran kekuatan akan ditandai dengan empat kecenderungan, yakni (a) kebangkitan China dalam bidang ekonomi dan militer dan ketidakpastian hubungan China-Jepang akan membawa dilema terhadap hubungan Indonesia dan kedua negara tersebut. Di satu sisi Indonesia perlu meningkatkan hubungan dengan China, di sisi lain Indonesia juga harus menjaga hubungan yang sudah terjalin dengan Jepang; (b) revitalisasi peran Jepang dalam bidang pertahanan dan

keamanan, (c) masih berlanjutnya dominasi dan *supremacy* Amerika Serikat dalam konstelasi politik di Asia Timur/ Tenggara; dan (d) munculnya India sebagai kekuatan baru.

Di tingkat ASEAN, Indonesia masih akan menghadapi berbagai persoalan terkait konsolidasi dan kohesivitas ASEAN yang diakibatkan oleh diversitas anggota, baik dalam hal ekonomi maupun politik; munculnya kasus Myanmar, dan konflik Thailand-Kamboja. Di samping itu, konsolidasi den kohesivitas ASEAN akan diuji dengan masih belum tuntasnya berbagai sengketa perbatasan bilateral termasuk Indonesia..

Dalam kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia akan tetap dihadapkan dengan persoalan peran dan kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan Indonesia belum pulih benar di ASEAN. Meskipun para pemimpin negara-negara Asia Tenggara, melalui prakarsa Indonesia, telah sepakat untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat kohesitas ASEAN melalui komitmen mewujudkan komunitas ASEAN, proses menuju ke arah itu masih sarat dengan ketidak-pastian dan kendala. Sekalipun Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN, namun itu masih merupakan langkah awal ke arah yang tepat dalam memulihkan peran Indonesia.

Pada tahun 2010 prioritas kerjasama ASEAN diletakkan pada komitmen untuk mengimplementasikan *Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community* guna mencapai integrasi komunitas ASEAN secara utuh pada 2015. Proses integrasi ASEAN ini terkait dengan proses integrasi kawasan, baik di Asia Timur maupun Asia Pasifik. Dengan keberhasilan proses integrasi komunitas ASEAN 2015 maka ASEAN dapat memainkan peran sentral dalam proses integrasi di kawasan yang sedang berlangsung secara dinamis. Sebagai anggota ASEAN yang terbesar sekaligus tuan rumah Sekretariat ASEAN, Indonesia dituntut untuk memainkan peran sentral dalam proses integrasi tersebut.

Selain itu *ASEAN Human Rights Body* yang diharapkan telah dapat beroperasi pada akhir tahun 2009 tentunya memerlukan berbagai tindak lanjut pada tahun 2010. Citra Indonesia sebagai negara demokrasi perlu untuk dibuktikan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk menyelesaikan berbagai konflik melalui cara-cara demokratis.

Di sisi lain, kebijakan luar negeri juga diharapkan dapat menangkap peluang dari perkembangan global bagi kepentingan Indonesia. Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam membentuk pola-pola baru hubungan internasional secara aktif; baik melalui upaya formal dalam rangka mereformasi kelembagaan PBB lebih lanjut ataupun pada lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti WTO dan kerja sama multilateral lainnya seperi APEC, ASEM, FEALAC, dan sebagainya. Di samping itu, Indonesia juga diharapkan dapat mulai membangun perkaitan (*linkage*) dan terlibat dalam proses *re-alignment* yang akan mungkin terjadi di Asia-Pasifik.

Di bidang ekonomi, peningkatan ekspor nasional tahun 2010 dapat diwujudkan melalui peningkatan akses pasar, peningkatan daya saing dengan melakukan *market research*, dan kegiatan promosi terpadu *Tourism, Trade, Investment, and Services* (TTIS). Peningkatan Akses investasi dan kerja sama ekonomi internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi internasional perlu terus menerus dilakukan antara lain melalui peningkatan kerja sama strategis Indonesia dengan Brazilia, Cina, Amerika Serikat, Rusia, India, dan Australia, promosi dan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, dan partisipasi Indonesia di berbagai forum kerja sama ekonomi regional dalam kerangka ASEAN, Forum

Asia Timur, APEC, ASEM, FEALAC, RI-UE, dan Timur Tengah, dan kerja sama internasional

Dalam konteks perdamaian dunia, pada tahun 2010 mendatang, permasalahan perdamaian dunia masih terpusat di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Konflik Arab-Israel menyangkut wilayah pendudukan Palestina diduga akan memasuki dinamika yang baru karena makin mengerasnya posisi masing-masing pihak yang bersengketa, baik di pihak Israel maupun di pihak Palestina dengan pendukungnya masing-masing di berbagai belahan dunia. Titik perhatian juga akan ditujukan pada kebijakan AS di bawah Presiden Barack Hussein Obama yang sedang dalam proses menarik pasukan AS dari Irak sejak tahun 2009. Di kawasan yang sama persoalan nuklir Iran dan permasalahan konflik di Afghanistan masih akan mewarnai agenda hubungan antara Barat dan Timur, yang sejak beberapa dasawarsa tidak jarang sudah pula melibatkan sentimen-sentimen keagamaan yang kuat, terutama antara paham demokrasi liberal Barat dan fundamentalisme Islam. Di tengah-tengah dinamika demikian, diplomasi Indonesia diharapkan dapat memainkan peranan yang makin penting, terutama sebagai sebuah negara demokrasi yang penting di Asia dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2010 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya citra positif Indonesia dan efektifnya diplomasi publik;
2. Meningkatnya kerjasama bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik, sosial dan ekonomi;
3. Meningkatnya kesiapan Indonesia menuju pembentukan *ASEAN Community*
4. Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, serta penguatan multilateralisme;

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka arah kebijakan politik dan hubungan luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan diplomasi total Indonesia
2. Memfasilitasi penyelesaian masalah perbatasan
3. Memberikan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri
4. Meningkatkan upaya tindak lanjut agenda pembentukan *ASEAN Community*
5. Memfasilitasi peningkatan kerjasama internasional dalam penanganan krisis keuangan dunia, *energy security* dan *food security*
6. Meningkatkan kerja sama internasional di bidang politik, hukum, dan keamanan internasional
7. Meningkatkan kerjasama dan peluang kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pembangunan
8. Memfasilitasi upaya-upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia
9. Mengoptimalkan implementasi berbagai persetujuan kerjasama bilateral, regional, dan internasional.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010
PRIORITAS BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN DEMOKRASI						
1	0302	Kegiatan Penyelenggaraan Tugas-tugas Konstitusional Majelis dan Alat Kelengkapan Majelis	1. Terselenggaranya sosialisasi UUD dan putusan MPR; 2. Terselenggaranya rapat-rapat majelis dan alat kelengkapan majelis	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Sekretariat MPR;	128,6
	0317	Perencanaan dan Penetapan Prolegnas	30 RUU dapat ditetapkan		Sekretariat DPR	1,0
	0318	Penetapan RUU Usul DPR RI	15 RUU dapat ditetapkan		Sekretariat DPR	111,7
	0319	Pembahasan RUU	30 RUU dapat ditetapkan		Sekretariat DPR	108,6
	0321	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	1. Pelaksanaan kegiatan paripurna komisi dan pansus; 2. Penanganan kasus spesifik; 3. 20 kegiatan *fit and proper test*		Sekretariat DPR	172,3

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
	0324	Penyelenggaraan Kehumasan, Keprotokolan, dan Pemberitaan	Peningkatan pencitraan DPR		Sekretariat DPR	14,1
	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	1. Tersusunnya 1 buah usulan prioritas Prolegnas DPD RI; 2. Tersusunnya 21 hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan RUU tertentu; 3. Tersusunnya 1 buah naskah Litigasi DPD RI dalam rangka uji materi UU tertentu ke Mahkamah Konstitusi; 4. Tersusunnya 12 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI; 5. Tersusunnya 35 pertimbangan dan pandangan/pendapat DPD RI atas RUU tertentu; 6. Tersosialisasikannya lembaga DPD RI di dalam 33 provinsi; 7. Terselenggaranya kerjasama parlemen sejenis di negara-negara sahabat		Sekretariat DPD	124,0
2	6707	Penguatan Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pilkada	1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan KPU dan KPUD di 7 provinsi dan 245 Kab/Kota;	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Sekretariat KPU	25,5

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			2. Terlaksananya evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu 2009 dan perbaikan mekanisme pilkada; 3. Terlaksananya pembangunan pusat pengaduan 4. Pengembangan grand design BAWASLU 20 tahun mendatang 5. Penerapan keterbukaan informasi publik 6. Terfasilitasinya pembentukan panwaslu provinsi/kab/kota dan pengawasannya		Sekretariat Bawaslu (BA 999)	PM
3	0114	Pelayanan dan Bantuan Hukum	1. Terselesaikannya kajian masalah hukum, serta bantuan hukum terhadap gugatan penetapan KPU tentang hasil pemilu 2009 2. Terfasilitasinya penanganan konflik pemilu 2009 di pusat, 33 Propinsi, dan 491 Kab/Kota	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Sekretariat KPU	20,0
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DAN PARTAI POLITIK						

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
1	4701	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat (penyiapan modul dan memulai voters education and information)	1. Terlaksananya pendidikan pemilih bagi masyarakat di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada di tahun 2010; 2. Fasilitasi pembentukan pusat pendidikan pemilih; 3. Fasilitasi pembentukan pusat partisipasi politik rakyat dalam pengawasan pilkada dan pemilu; 4. Fasilitasi peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilu;	Program Perbaikan Proses Politik	Sekretariat KPU Bawaslu (BA 999)	23,5 11,0 PM
2	0762	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah-daerah	Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat di daerah oleh 400 OMS	Program Penyempurnaan dan Penguatan Lembaga Demokrasi	Depdagri	20,0
3	0772	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1. Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada 180 OMS; 2. Fasilitasi pembentukan pusat pendidikan kebangsaan	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan	Depdagri	10,7

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
4	0606	Fasilitasi terhadap Parpol, Eksekutif, Kepala Daerah dan Pemda, dan Masyarakat Sipil	1. Ditetapkannya UU hasil revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Terfasilitasinya forum organisasi masyarakat sipil untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi 3. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan organisasi masyarakat sipil 4. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas FKUB dan FKDM 5. Terlaksananya bantuan keuangan untuk parpol	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Depdagri	23,5
					Bawaslu	BA 999
5	0774	Penguatan ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik	Terfasilitasinya konsultasi dan dialog di 6 wilayah pasca konflik dan perbatasan	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik	Depdagri	9,0
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK						
1	0770	Fasilitasi Pelaksanaan Budaya Politik Demokratis	1. Terlaksananya pendidikan politik bagi aparatur negara, anggota DPRD terpilih, dan bagi masyarakat di 5 daerah;	Program Perbaikan Proses Politik	Depdagri	16,0

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			2. Terfasilitasinya pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi antara lembaga legislatif dan masyarakat			
2	0772	Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi informasi wawasan kebangsaan melalui media massa dan dialog	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional	Kemenko Polhukam	3,0
3	4725	Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik	Berfungsinya sistem kewaspadaan dini sosial politik secara efektif di Maluku dan Maluku Utara		Kemenko Polhukam	2,9
4	4726	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penyelesaian Konflik	Efektifnya pelaksanaan koordinasi penyelesaian konflik oleh: Desk Aceh, Desk Papua, Desk Poso/Sulteng, Desk Wiltas dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Pusat Pemantau Krisis		Kemenko Polhukam	15,0
5	4727	Peningkatan koordinasi penegakan hukum dan HAM	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan RAN PK, RAN HAM, dan penanggulangan pelanggaran HAKI		Kemenko Polhukam	7,0
6	4729	Peningkatan koordinasi pencegahan illegal logging, illegal fishing dan illegali mining serta pengamanan objek vital	Meningkatkanya koordinasi pencegahan dan penanganan SDA secara illegal dan pengamanan objek vital		Kemenko Polhukam	1,7

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
7	4731	Penguatan desk koordinasi pemberantasan terorisme	Efektifnya koordinasi penanganan tindakan terorisme oleh DKPT		Kemenko Polhukam	4,0
8	4732	Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila	Terlaksananya forum dialog Pancasila di NTB, Kalimantan, dan Sumatera		Kemenko Polhukam	0,7
9	0033	Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik	1. Terselenggaranya dialog /forum yang mengkomunikasikan berbagai kebijakan bidang Polhukam (anti korupsi, pilkada, dan keamanan); 2. Terlaksananya penguatan media center dan website		Kemenko Polhukam	3,0
10	0606	Fasilitasi terhadap Parpol, Eksekutif, Kepala Daerah dan Pemda, dan Masyarakat Sipil	Terlaksananya koordinasi pemantapan kelembagaan politik		Kemenko Polhukam	3,8
11	4722	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2010	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian persoalan pasca pemilu 2009 dan proses pilkada		Kemenko Polhukam	3,0
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK						
1	5753	1. Pembangunan dan penguatan *media centre* di daerah	1. a. Tersedianya sarana dan prasarana media centre di 37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kementerian Komunikasi dan	7,8

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			lokasi dan penguatan media centre di 25 lokasi b. Terlaksananya pelatihan bagi pengelola *media centre* di 70 daerah	Informasi Publik	Informatika	
	5784	2. Penyebaran Informasi Publik	2. a. Terlaksananya bantuan dana operasional penyebaran informasi publik untuk 32 provinsi dan 50 kab/kota; b. Tersedianya kendaraan operasional siaran keliling untuk 20 lokasi *media centre*, terutama di daerah perbatasan, terpencil dan pasca/rawan konflik; c. Terlaksananya dukungan komunikasi publik dalam rangka citra positif pemerintah melalui *Government Public Relations (GPR)* d. Terlaksananya sosialisasi PKH dan PNPM; e. Terlaksananya Pekan			64,3

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			Komunikasi dan Informasi Kebijakan Pemerintah; f. Terjalinnya kerjasama kemitraan dengan media pusat dan daerah; g. Terselenggaranya Kegiatan Pemahaman Pemantapan terhadap Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah 2010-2014; h. Terlaksananya pemantapan pemahaman masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik; i. Terlaksananya pengelolaan Isu Publik; j. Terlaksananya penyebaran informasi publik dalam rangka NKRI; k. Terlaksananya penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah; l. Terfasilitasinya kegiatan penyebaran informasi publik			

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			dan dukungan administrasi; m. Terlaksananya monitoring dan evaluasi (monev)			
2	0049	1. Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia	1. a. Terselenggaranya pelatihan budaya dokumentasi bagi 1048 aparatur pemerintah provinsi dan kab/kota; b. 160 SDM bidang komunikasi dan informatika yang memperoleh pendidikan S2 dna S3 di dalam dan LN; c. Terlaksananya pelatihan untuk 524 calon *communication information officer (CIO)* di seluruh provinsi, kab/kota;	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kementerian Komunikasi dan Informatika	44,0
	0104	2. Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga	2. a. Tersosialisasikannya UU KIP dan peraturan pelaksanaannya kepada lembaga/badan publik baik di pusat maupun daerah (sampai ke kabupaten /kota); b. Tersedianya pelayanan informasi; c. Terfasilitasinya peningkatan			62,8

No	MAK	Fokus/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Miliar)
			peran dan fungsi lembaga Kominfo pusat, daerah dan kemasyarakatan, termasuk KPI, Komisi Informasi Daerah, Dewan Pers, Museum Penerangan dan Monumen Pers.			

PRIORITAS BIDANG: POLITIK LUAR NEGERI

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN DIPLOMASI PUBLIK						
1.	1052	Penyelenggaraan Hubungan Diplomatik Di Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional	1. 8 kali pertemuan/sidang ARF mengenai upaya peningkatan keamanan di kawasan, pengamanan energi dan upaya penanggulangan bencana serta endorsement atas berbagai rancangan/ pandangan dan usulan yang melindungi kepentingan RI; 2. 33 kali pertemuan/sidang Organisasi Regional/Intra-regional di kawasan Asia Pasifik- Afrika dan 19 kali pertemuan / sidang organisasi regional / intra regional di kawasan Amerop;	Program Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia	Deplu	277,4

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			3. 10 kali pertemuan/sidang Tindak lanjut High Level Segment UNGASS dan Sesi ke 53 CND di Wina, Sidang Sesi ke 19 Komisi Crime Prevention and Criminal Justice di Wina, Sesi ke-5 Conference of Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Wina, Sidang ke 13 APG di Seoul, Seminar Implementasi UN Global Counter Terrorism Strategy; 4. Terselenggaranya 14 kali pertemuan/sidang dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (poleksosbudkam) antara RI dengan Amerika Serikat, Kanada, Mexico, Costa Rika, Panama, Yunani, Belanda,Trinidad & Tobago, Italia, Comprehensive Partnership RI-AS dan Peace Corps RI-AS, RI-UK Partnership Forum; 5. 1 kali Sidang / Konferensi Internasional di bidang Hukum dan Perjanjian Internasional; 6. Terselenggaranya 14 kali pertemuan/sidang Konsultasi Bilateral/Forum Kerjasama Bilateral RI dengan Inggris, Jerman, Perancis, Swedia, Austria, Denmark, Portugal, Finlandia, Estonia, Ceko, Chile, Guyana,			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Venezuela, Brasil, Romania, Slovakia, Rusia; dan 1 kali Pelaksanaan Joint Action Plan RI - Armenia; 7. Penyelenggaraan 4 kali pertemuan/ sidang Komisi Bersama (SKB) RI dengan Rusia, Belarus, Argentina, Kuba; 8. Penyelenggaraan 40 kali Kunjungan Presiden/ Wapres/Menteri/Pejabat Pemerintah RI ke negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan Amerika Eropa; 9. Terselenggaranya 14 kali kunjungan Presiden/Wapres/ Menteri/Pejabat Pemerintah negaras dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan Amerika dan Eropa; 10. 84 kali pertemuan/sidang Internasional/Pertemuan Bilateral dengan negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; 11. 7 kali pertemuan/sidang Penanganan Selat Malaka dan Pengelolaan Laut China Selatan dengan China, Jamaika, Australia, Malaysia, Singapura, AS, Inggris; 12. 2 kali sidang/pertemuan Implementasi Program Aksi PBB tentang Pencegahan, Penghapusan, dan Penanggulangan			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Perdagangan Gelap Senjata Ringan dan Kaliber Kecil (SALW); 13. 2 kali Pertemuan/sidang sub-regional penanggulangan terorisme; 14. 15 kali Sidang/pertemuan yang diselenggarakan Badan Khusus PBB a.l. IPU, ITU, ICAO, IMO, WMO, CPD, SMU PBB ke-64; 15. 2 kali Pertemuan/pelatihan Internasional di Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam kerangka NAASP; 16. 5 kali kegiatan Implementasi Resolusi 1373; 17. 11 kegiatan Pertemuan Policy Planning Consultation dengan lembaga think-tank pada Kementerian Luar Negeri negara sahabat; 18. Meningkatnya peran diplomasi Indonesia di tingkat regional dan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui 296 sidang/pertemuan; 19. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 melalui 48 kegiatan/pertemuan/sidang.			
	1066	Upaya Peyelesaian Masalah Perbatasan Melalui	1. Terlaksananya 3 kali pertemuan/sidang Perundingan Penetapan Batas Maritim	Program Pemantapan politik luar negeri dan	Deplu	6,0

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
		Diplomasi dan Penguatan Integrasi NKRI	Indonesia-Malaysia; 2. Terlaksananya 2 kali pertemuan/sidang Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia-Filipina; 3. Terlaksananya 2 kali pertemuan/sidang Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia-Singapura; 4. Terlaksananya 1 kali pertemuan/sidang Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia-Timor Leste; 5. Terlaksananya 2 kali pertemuan/sidang Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia-Vietnam; 6. Terlaksananya 2 kali pertemuan/sidang Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia-Palau; 7. Penyelenggaraan 9 kali kegiatan kunjungan kerja dan koordinasi dengan pejabat terkait dalam upaya pencegahan separatisme Papua; 8. Penyelenggaraan 15 kali kegiatan rapat koordinasi Deplu dengan instansi intelijen dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengawasan WNA dan LSM Asing; 9. Penyelenggaraan 10 kali kegiatan	optimalisasi diplomasi Indonesia		

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			pemeriksaan/pengecekan fisik dan non-fisik dalam rangka pengamanan perwakilan RI di LN; 10. 16 kali pertemuan/sidang Forum Kerjasama Bilateral Bidang Politik, Hukum & Bidang Keamanan Perbatasan melalui GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG,JBC Indonesia-Timor Leste & BC Indonesia-Filipina;			
	1069	Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI Di Luar Negeri	1. Terselenggaranya kegiatan perlindungan dan pelayanan WNI dan BHI di luar negeri yang ditandai dengan rencana antisipasi penanganan 3000 kasus dan asistensi pemulangan 30.000 WNI dari luar negeri baik melalui tindakan deportasi maupun repatriasi; 2. Terwujudnya perluasan citizen service di 10 Perwakilan RI; 3. 1 kali kegiatan penciptaan kesamaan pemahaman mengenai Mandatory Consular Notifications (MCN) dengan negara-negara mitra; 4. 1 kali kegiatan pembentukan Satker Tim Teknis dan Crisis Centre perlindungan untuk penanganan dan pemantauan kasus maupun	Program Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia	Deplu	64.6

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			potensi kasus atas WNI dan BHI di luar negeri; 5. 12 kali kegiatan untuk mendukung kinerja penempatan TKI/TKW di Perwakilan RI yang memiliki unit penampungan sementara.			
	1071	Penguatan dan Promosi Identitas Nasional Sebagai Negara Demokrasi melalui Diplomasi Total	1. 1 kali kegiatan penyelenggaraan kunjungan pertemuan tokoh masyarakat negara asing dalam kegiatan Presidential Friends of Indonesia; 2. 8 kali kegiatan penyelenggaraan Diplomatic Gathering, Pejambon Café, dan Diplomatic Tour; 3. Pemberian Beasiswa Seni dan Budaya kepada 100 orang pelajar/mahasiswa asing; 4. 9 kali Kegiatan Public Diplomacy Campaign antara lain: kunjungan ke beberapa negara, Diplomatic Exchange, ASEAN Youth Camp on Democracy, dan simulasi sidang Mahasiswa HI se-Indonesia; 5. Terlaksananya 3 kali kegiatan diskusi Pembekalan Keahlian Intelijen bagi 60 pelaksana diplomasi dan pembuatan buku;	Program Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia	Deplu	25,0

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			6. 1 kali kegiatan Penyelenggaraan Lokakarya Isu-isu Internasional bagi Media Massa; 7. 2 kali kegiatan Kunjungan 86 Duta Belia ke China dan Hong Kong SAR; 8. Penyelenggaraan 3 kali kegiatan seminar untuk perwakilan asing dalam rangka kegiatan Update from the Region; 9. Penyelenggaraan 10 kali kegiatan Annual Lecture di Universitas-universitas di Indonesia; 10. 26 kali kegiatan Penerbitan Tabloid Diplomasi, News Letter, buku Koleksi Benda Seni di Perwakilan RI di Eropa dan pengembangan website Deplu Junior; 11. 3 kali kegiatan Museum Promotion and Community Outreach, peningkatan pelayanan pubik dan peningkatan kapasitas MKAA.			
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA						
No.	**MAK**	**Fokus/Kegiatan Prioritas**	**Keluaran**	**Program**	**Instansi Pelaksana**	**Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)**

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
1.	1056	Peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam Penciptaan perdamaian dunia dan pemajuan HAM	1. 4 kali sidang/pertemuan Sosialisasi Implementasi Sanctions Committes Dewan Keamanan PBB; 2. 6 kali pertemuan/ Sidang Implementasi Komite IV Majelis Umum PBB (SMU); 3. 12 kali sidang/pertemuan Peningkatan Peran Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB; 4. Terlaksananya sosialisasi Implementasi Traktat Non Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan Sosialisasi Traktat Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT) melalui 5 kali sidang/pertemuan; 5. Terselenggaranya 3 kali kegiatan sosialisasi dan Implementasi Konvensi Ottawa tentang Ranjau Darat Anti Personel dan Konvensi tentang Cluster Munitions; 6. 7 kali pertemuan/ Sidang Dewan HAM di Jenewa, Sidang Majelis Umum, New York; 7. 4 kali sidang/pertemuan Pelaksanaan Komitmen Indonesia Dalam Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkelanjutan al :Indonesia - Canada Bilateral Dialogue on Human Rights, Dialog Penghormatan HAM dan	Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia	Deplu	4,2

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Demokratisasi RI - Chile, Dialog HAM RI-Swedia, Dialog HAM RI-Norwegia, Dialog HAM RI-Prancis; 8. Penyelenggaraan 8 kali sidang/ pertemuan Kerjasama Regional Amerika - Eropa di bidang HAM melalui forum ASEM dan UE; dan di bidang counter terrorism dan pertemuan lintas agama dan budaya dalam kerangka FEALAC; 9. 6 kali kegiatan Pemberdayaan RAN-HAM; 10. 7 kali kegiatan Laporan PemRI tentang pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia; 11. Terselenggaranya 10 kali kegiatan sosialisasi laporan KKP ke daerah-daerah; 12. 6 kali pertemuan/ Sidang dalam upaya penggalangan dukungan internasional terhadap upaya HAM Indonesia dan tindak lanjut KKP di persidangan internasional termasuk persidangan PBB di New York dan Jenewa; 13. 6 kali pertemuan/sidang Dialog bilateral RI-Timor Leste mengenai tindak lanjut laporan KKP.			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
	1075	Perluasan diplomasi publik	1. 8 kali kegiatan Penyelenggaraan workshop, Bali Democracy Forum III (BDF III) Experts, Group for Preparatory Meeting (EGPM), BDF III, operasionalisasi sekretariat IPD, pembuatan publkasi IPD dalam rangka kegiatan Bali Democracy Forum; 2. 5 kali kegiatan Penyelenggaraan workshop dan pertemuan bilateral Intermedia Dialogue dalam rangka tindak lanjut Global Intermedia Dialogue; 3. Terlaksananya 21 kali rangkaian kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sidang/konferensi internasional; 4. Terlaksananya 9 kali kegiatan koordinasi dan pertemuan dengan instansi intelijen dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyusunan Protap Pengamanan Sidang-Sidang Internasional; 5. Penyelenggaraan 48 kali kegiatan pertemuan/rapat dalam rangka Forum Clearing House; 6. Terlaksananya 4 kali kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja Tim Clearing House (20 orang) dengan instansi terkait di daerah	Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia	Deplu	4,2

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
	1076	Penyelesaian damai kawasan Timur Tengah	1. Penyelenggaraan 2 kali konferensi ICI membahas evaluasi kinerja misi perdamaian RI; 2. Terlaksananya 4 kali Sidang/Konferensi Internasional wilayah Timur Tengah	Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia	Deplu	3,0
FOKUS PRIORITAS BIDANG: KERJA SAMA INTERNASIONAL						
No.	**MAK**	**Fokus/Kegiatan Prioritas**	**Keluaran**	**Program**	**Instansi Pelaksana**	**Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)**
1.	1058	Penyelenggaraan Hubungan Diplomasi Bidang Ekonomi dan Kerjasama Teknik Luar Negeri	1. Partisipasi dalam 10 kali sidang/ pertemuan-pertemuan ASEM (Asia Europe Meeting) antara lain dalam bentuk The 2nd ASEM Minister Meeting on Transportation, ASEM Linguistic Diversity, ASEM Cooperation of Research and Development on ICT in Strengthening Research Institutions, 2ndASEM Ministerial Conference on Energy Security; 2. Partisipasi di 2 kali sidang/ pertemuan FEALAC (Forum for East Asia and Latin America Cooperation) a.l. melalui kegiatan	Program Peningkatan Kerjasama Internasional	Deplu	108,3

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			FEALAC Journalist Visit Program Indonesia, Seminar Boosting East Asia - Latin America Trade Relations; 3. Pelaksanaan 4 kali sidang/ pertemuan-pertemuan dalam kerangka kerjasama RI-Uni Eropa, yakni Rakor UE Multi Annual Indicative Program 2010, RI-EU Working Group on Trade and Investment, Konsinyering Program Kerjasama Pembangunan RI-UI (MIP), Policy Briefing on New Policies and Regulations of EU; 4. Terlaksananya 11 kali partisipasi pada sidang APEC membahas anggaran pembiayaan proyek, emergency preparedness serta UKM; 5. Terlaksananya partisipasi dalam 14 isu di pertemuan UN-ESCAP, Komisi Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD), SMU-PBB, dan ECOSOC; 6. Terlaksananya partisipasi dalam 23 isu diberbagai Sidang Peningkatan Kerjasama bagi Pembangunan, Implementasi Konvensi-konvensi Lingkungan Hidup, Peningkatan Kerjasama Bidang Ekonomi dan Keuangan Internasional, Pertemuan dalam rangka			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Diplomasi Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional; 7. Terlaksananya SOM antara RI dengan Belanda; 8. Terlaksananya 36 kali pertemuan/ perundingan kerjasama ekonomi, perdagangan, pariwisata & dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; 9. Partisipasi dalam 18 kali sidang/pertemuan yang diselenggarakan OKI dan GNB; 10. Partisipasi dalam 15 kali sidang/pertemuan yang diselenggarakan D-8, G-15, G-77, Kerjasama Selatan-Selatan, G-11, dan Colombo Plan; 11. Partisipasi dalam 4 kali sidang/pertemuan Committee ECOSOC LSM dan kunjungan studi banding ke kantor LSM di Thailand, Inggris dan Brussels; 12. Partisipasi di 51 kali pertemuan/ sidang-sidang dalam kerangka UNIDO, Kerjasama Free Trade Area (FTA), UNCTAD, GSTP, Kerjasama Komoditi Internasional, Kerjasama Badan Pangan Internasional, WTO 2010 dan Kerjasama HKI;			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			13. Peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia melalui 7 kali pertemuan/sidang dalam kerangka Perdagangan, Ekonomi, Investasi, Pendidikan Kebudayaan, Pertanian, Energi, dan pembangunan a.l. : Expert Meeting RI - Rusia on Outer Space, Kerjasama MoU Pariwisata RI - Siprus, Kerjasama Energi RI - Norwegia & RI - Belanda, Dialog on Energy RI-AS, WG on Agriculture RI - Belanda, Perundingan Peluang Kerjasama Pendidikan Kebudayaan RI-Yunani, Perundingan Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPPA) RI-Kanada; 14. Terselenggaranya 18 kali berbagai promosi/kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi antara lain dalam bentuk penyelenggaraan Promosi Terpadu Trade, Tourism and Invesment and Services (TTIS) di negara-negara kawasan Amerika dan Eropa; serta serta penyusunan Buletin Promosi Potensi Ekonomi, Investasi dan Pariwisata edisi Bahasa Inggris untuk Perwakilan RI di kawasan Amerop; dan edisi bahasa Indonesia untuk pemerintah provinsi			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			dan pelaku pasar domestik; 15. Terselenggaranya 4 kali kegiatan kerjasama pembahasan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan kurang lebih 4 negara di kawasan Amerika dan Eropa; 16. Terselenggaranya 6 kali kegiatan perundingan persetujuan perlindungan penanaman modal (P4M) antara Indonesia dengan kurang lebih 6 negara di kawasan Amerika dan Eropa, 17. Terselenggaranya 2 kali kegiatan kerjasama sister city antara RI - AS dan RI - Kanada; 18. Terlaksananya 31 kali Partisipasi/Promosi TTI di Dalam dan Luar Negeri termasuk didalamnya adalah promosi tentang wisata bahari Indonesia; 19. Penyelenggaraan 13 kali kegiatan International Training Programme dan Apprenticeship dalam kerangka kerjasama teknik; 20. Terselenggaranya 21 kali sidang/pertemuan dalam kerangka APEC, NAASP dan IDR-ARC; 21. 14 kali sosialisasi kebijakan Luar Negeri RI/kerjasama kawasan ASPASAF mengenai			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			juklak hubungan RI-Taiwan, polugri di kawasan Aselteng dan pengenalan potensi-potensi negara-negara Afrika dan Timur Tengah ke daerah; 22. 1 kali Penyelenggaraan Konferensi regional krisis global; 23. Penyelenggaraan Sidang UNEP (Jakarta dan Nairobi) februari 2010; 24. 5 kali kerjasama RI-AS mengenai TIC (Trade Investment Council), MCN (Mandatory Consular Notification), MCC (Millenium Challenge Corporation), OPIC (Overseas Private Investment Corporation), Aminef (America Indonesia Exchange Foundation); dan 1 kali perundingan perjanjian NAMRU-2 RI-AS.			
	1059	Penyelenggaraan Hubungan Diplomasi Bidang Sosbud dan Penerangan LN	1. 1 kali kegiatan Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI; 2. 1 kali kegiatan Penyelenggaraan lokakarya kehumasan antar instansi pemerintah, BUMN, dan lembaga-lembaga kehumasan lainnya; 3. 1 kali kegiatan Penyelenggaraan rangkaian kunjungan dan pertemuan sejumlah jurnalis asing ke Indonesia dalam kerangka Journalist	Program Peningkatan Kerjasama Internasional	Deplu	10,0

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Visit Programme; 4. 1 kalikegiatan Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan Luar Negeri RI oleh pimpinan/pejabat terkait Deplu melalui media massa; 5. 1 kali kegiatan Rangkaian koordinasi dan pertemuan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kehumasan; 6. 1 kali kegiatan Penyelenggaraan workshop mengenai isu-isu polugri bagi media massa dan pejabat kehumasan di daerah dalam rangka Counter Information Campaign.			
	1060	Penyelenggaraan kerjasama ASEAN	1. Terlaksananya 4 kali kegiatan/sidang/ Pertemuan Tingkat Tinggi Kelompok Pakar Piagam ASEAN; 2. 14 kegiatan pertemuan/sidang untuk mengintegrasikan sistem kepabeanan ASEAN agar lebih transparan dan memiliki daya dorong untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN; 3. 50 kegiatan/ pertemuan/ sidang untuk melaksanakan MoU, PoA, Work Plan dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh ASEAN dan Mitra	Program Peningkatan Kerjasama Internasional	Deplu	20,0

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Wicara; 4. 11 kali pertemuan/sidang pembahasan penanganan migrasi pengungsi di negara anggota ASEAN; 5. 44 kegiatan/pertemuan/sidang untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik terhadap Cetak Biru Komunitas Politik dan Kemanan ASEAN; 6. Kesepakatan antar instansi dalam mendukung pelaksanaan Piagam ASEAN melalui 44 kegiatan/pertemuan/sidang; 7. Terlaksananya 14 kegiatan/pertemuan/sidang forum-forum terkait dengan ASEAN; 8. 44 kegiatan/pertemuan/sidang untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan partisipasi publik terhadap Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN; 9. 44 kegiatan/pertemuan/sidang untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan partisipasi publik terhadap Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN; 10. 5 kali kegiatan/pertemuan/sidang peningkatan peran Indonesia di negara Timor-Leste khususnya melalui kontribusi Indonesia dalam			

No.	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			membentuk Timor-Leste masuk menjadi anggota ASEAN yang direncanakan ada tahun 2012.			

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 6

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 6
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

A. Kondisi Umum

Kondisi keamanan dalam negeri semakin kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditangani dengan baik sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak yang luar biasa. Ancaman gerakan separatisme semakin dapat ditangani, namun upaya diplomasi internasional harus semakin ditingkatkan terutama menghadapi upaya internasionalisasi Papua. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme telah berhasil meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri. Eksekusi mati 3 (tiga) orang terpidana Bom Bali dan pengungkapan sejumlah rencana aksi teror mampu meredam kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya serangkaian teror lanjutan (balas dendam). Sementara itu, kemampuan pertahanan negara relatif semakin membaik, terutama dari aspek kesiapan OMSP dan kesiapan latihan operasi baik secara matra maupun gabungan. Beberapa ancaman pertahanan dapat diatasi dan tidak sampai membahayakan Kedaulatan dan Kewibawaan NKRI.

Pertahanan

Kondisi umum kemampuan dan kekuatan pertahanan negara hingga penghujung RPJMN 2004-2009 telah menunjukan kemajuan kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan profesionalisme personil TNI. Namun secara keseluruhan kemajuan tersebut baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas dibawah standar tingkat kemampuan penangkalan. Upaya mewujudkan postur pertahanan negara dengan kapabilitas *standard detterence* (standar penangkalan) terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui kapabilitas pertahanan, peningkatan jumlah dan kondisi kesiapan operasional pertahanan dengan pemeliharaan, pengembangan dan penggantian alutsista yang sudah tidak layak, modernisasi alutsista, pengembangan sistem dan strategi pertahanan, serta teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.

Kondisi kesiapan alutsista TNI AD, AL, dan AU hingga saat ini masing-masing mencapai 68,85 persen, 46,27 persen dan 78,93 persen. Pembangunan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) tersebut secara bertahap diupayakan dengan keterpaduan Tri Matra AD, AL, dan AU. Sampai dengan akhir tahun 2008, pemantapan kekuatan TNI AD telah mencapai 1.261 unit berbagai jenis kendaraan tempur (ranpur) dengan tingkat kesiapan 63,36 persen; 537.198 pucuk senjata Infanteri berbagai jenis dengan tingka kesiapan 72,86 persen; 983 pucuk senjata artileri berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 74,97 persen; 59.842 unit kendaraan bermotor (ranmor) berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 87,17 persen; serta 61 unit pesawat terbang berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 45,90 persen. Penambahan alutsista TNI AD berupa senjata Infanteri, senjata Artileri, kendaraan tempur (Ranpur), pesawat udara, secara bertahap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Tabel Organisasi dan Peralatan/Daftar Susunan Personel dan Peralatan (TOP/DSPP).

Adapun dalam upaya pengembangan dan modernisasi kekuatan TNI AL pada skala kekuatan minimum, hingga akhir 2008 telah mencapai: 143 unit kapal perang (KRI) dengan tingkat kesiapan 61,53 persen, 312 unit Kapal Angkatan Laut (KAL) dengan tingkat kesiapan 24,35 persen, 410 unit kendaraan tempur marinir berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 38.29 persen, dan 64 unit pesawat terbang dengan tingkat kesiapan 60,93 persen. Sementara itu, pengembangan dan modernisasi kekuatan TNI AU pada skala minimum hingga akhir tahun 2008 telah mencapai: 233 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 55,79 persen, 16 unit peralatan radar dengan tingkat kesiapan 81 persen, dan 26 set rudal jarak pendek dengan tingkat kesiapan 100 persen. Namun, dengan semakin menurunnya kondisi alutsista TNI yang diakibatkan oleh ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang sangat tua serta dihadapkan pada keterbatasan kemampuan anggaran dalam pengembangan alutsista TNI, kesiapan alutsista TNI tidak meningkat secara signifikan.

Berdasarkan RAPBN tahun 2008, sektor pertahanan berada pada urutan prioritas keempat di bawah fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan ekonomi. Urutan skala prioritas ini juga terjadi pada RAPBN tahun sebelumnya, sehingga anggaran sektor pertahanan relatif tidak mengalami perubahan secara signifikan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Dalam tiga tahun terakhir proporsi anggaran pertahanan terhadap PDB terus menurun yaitu 0,92 persen dari PDB tahun 2007; 0,70 persen dari PDB tahun 2008; dan 0,63 persen dari PDB tahun 2009; dan apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia, menunjukkan terjadinya perimbangan yang semakin melebar di mana negara-negara di Kawasan Asia tersebut justru semakin meningkatkan anggaran pertahanannya sampai melebihi angka 2 persen dari PDB-nya. Dampak dari rendahnya anggaran tersebut adalah tidak tercapainya *minimum essential force*, intensitas latihan yang berkurang, menurunnya upaya pemeliharaan dan perbaikan, dan terbatasnya upaya pengembangan dan modernisasi alutsista.

Upaya mewujudkan profesionalitas prajurit TNI terus dilakukan secara bertahap baik melalui pendidikan di jajaran TNI maupun dalam tugas sehari-hari dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan *werving* prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS. Upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan jiwa juang prajurit dilakukan sejalan dengan menetapkan standar kesejahteraan prajurit kearah yang lebih layak dengan memperbaiki sistem penggajian, layanan kesehatan, perumahan, dan jaminan hari tua. Meskipun belum memenuhi kebutuhan standar kalori prajurit sebesar 3.600 kalori/prajurit/hari, upaya memenuhi kesejahteraan prajurit melalui pemberian uang lauk pauk (ULP) dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan mulai dari Rp. 17.500/hari pada tahun 2005 menjadi Rp. 35.000/hari pada tahun 2008. Disamping itu kepada prajurit yang bertugas aktif diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan ASABRI, program KPR, pemberian santuan resiko kematian khusus (SRKK), pemberian bantuan pendidikan keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun dan keluarga prajurit yang tidak mampu, serta pemberian Dana Kehormatan Veteran RI kepada para veteran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Sejalan dengan reformasi pertahanan negara yang mencakup penataan struktur organisasi, kultur, dan tata nilai penyelenggara pertahanan negara untuk mampu memposisikan diri sesuai peran dan fungsinya, saat ini telah diselesaikan beberapa dokumen strategi yang baru. Beberapa dokumen strategi yang telah selesai disusun diantaranya adalah Postur Pertahanan Negara untuk 20 tahun ke depan sebagai pedoman bagi kegiatan perencanaan pertahanan, anggaran, manajemen, operasi, dan pengembangan teknologi pertahanan. Disamping itu, komitmen TNI dalam mereformasi dirinya diwujudkan dalam kegiatan revisi Doktrin, Strategi, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Saat ini, Mabes TNI telah menerbitkan *Doktrin Tri Dharma Eka Karma* (Tridek) yang menggantikan *Doktrin Catur Dharma Eka Karma* (Cadek) yang tidak sesuai lagi. Pada tingkat Angkatan, juga telah melakukan perubahan terhadap doktrin yaitu TNI AD telah menerbitkan *Doktrin Kartika Eka Paks*i, TNI AL menerbitkan *Doktrin Eka Sasana Jaya,* dan TNI AU menerbitkan *Doktrin Swa Bhuana Paksa.*

Reformasi pertahanan dalam upaya melepaskan TNI dari aktivitas bisnis yang bukan merupakan fungsi utamanya masih terus diupayakan. Kegiatan pengambilalihan unit usaha tersebut telah menghasilkan beberapa penyelesaian antara lain inventarisasi dan verifikasi terhadap semua bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI. Upaya pengambilalihan bisnis TNI tersebut dilaksanakan oleh Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI yang bersifat multidepartemental, yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian BUMN dan beranggotakan Kementerian Negara BUMN, Departemen Keuangan, Depkumham, Dephan, dan TNI.

Kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu tolok ukur kekuatan pertahanan suatu negara. Selama ini ketergantungan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI terhadap luar negeri cukup tinggi dan sangat rentan terhadap faktor politik terutama pemberlakuan embargo atau pembatasan-pembatasan terhadap peralatan tertentu yang berdampak terhadap semakin melemahnya kesiapan dan kemampuan penangkalan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, sejak tahun 2006 Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan meningkatkan peran industri pertahanan nasional guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI.

Pemberdayaan industri strategis nasional bagi pembangunan kemampuan pertahanan ditunjukan oleh semakin beragamnya produksi industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI, diantaranya adalah senjata ringan, senjata berat, amunisi kaliber kecil, amunisi kaliber besar, amunisi khusus, dan kendaraan tempur oleh PT PINDAD; kapal patroli ukuran sedang, galangan pendaratan, tanker, serta dok pemeliharaan kapal perang oleh PT PAL; pesawat transpor sayap tetap, helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat pengintai, simulator pesawat, serta pemeliharaan dan perbaikan pesawat oleh PT DI; sistem kendali peralatan militer, sistem deteksi, radar dan sonar, serta peralatan komunikasi militer produksi PT LEN. Salah satu upaya untuk mendukung pemberdayaan industri pertahanan adalah melalui peningkatan kerjasama diantara tiga pilar industri pertahanan. Ketiga pilar industri pertahanan tersebut adalah perguruan tinggi dan komunitas Litbang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan Iptek pertahanan, industri strategis yang mendayagunakan iptek, serta Dephan dan TNI sebagai pengguna yang juga terlibat dalam pengembangan desain hingga menghasilkan prototype. Hingga akhir Desember 2008, telah terlaksana beberapa kegiatan

penelitian, pengujian, dan pengembangan (Litjianbang) serta pembuatan prototype dalam mendukung kemandirian pertahanan negara, diantaranya prototype payung udara orang (PUO), prototype ranpur pengangkut personel (RPP), prototype badan atas dan bawah Hovercraft versi militer, Litjianbang desain Hovercraft versi militer, pembuatan desain Rotary Wing Tanpa Awak (RWTA), serta rencana pembuatan rancang desain pengembangan korvet nasional.

Indonesia memiliki 92 pulau kecil yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah negara RI. Dari 92 pulau tersebut, 12 pulau di antaranya rawan terhadap konflik perbatasan dengan negara tetangga, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Ke-12 pulau tersebut adalah: P. Rondo berbatasan dengan India; P. Sekatung berbatasan dengan Vietnam; P. Nipa berbatasan dengan Singapura; P. Berhala berbatasan dengan Malaysia; P. Miangas, P. Marampit, dan P. Marore – ketiganya berbatasan dengan Filipina; P. Fanildo, P. Fani, dan P. Brass–ketiganya berbatasan dengan Palau; P. Dana berbatasan dengan Australia; dan P. Batek berbatasan dengan Timor Leste. Meskipun sudah dilakukan gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, serta Timor Leste dan terbangun pos-pos perbatasan di wilayah perbatasan tersebut, upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta pengamanan permasalahan dilaut belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut dikarenakan belum memadainya sarana dan prasarana pertahanan di pos-pos perbatasan, terbatasnya jumlah alutsista dan pilar pembatas (darat) yang belum sebanding dengan panjang garis perbatasan yang ada, belum kuatnya perangkat hukum, serta belum terpadunya pengelolaan wilayah perbatasan yang saat ini masih ditangani secara parsial/sektoral.

Terlaksananya kerjasama pertahanan di kawasan Asia Tenggara dengan negara Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunai, serta dengan AS, Australia, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya meliputi pertukaran perwira dan latihan bersama penanggulangan dampak bencana alam, kerjasama keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian, memerangi terorisme, dan penanganan isu-isu keamanan bersama lainnya yang telah memberikan manfaat besar dalam upaya peningkatan profesionalisme TNI. Disamping itu, partisipasi aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia diantaranya melalui pengiriman Kontingen Garuda hampir ke lebih 20 negara di dunia yang telah meningkatkan citra Indonesia di mata Internasional.

Keamanan

Pencapaian upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas menunjukkan hasil yang semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat menonjol atau luar biasa sepanjang tahun 2008 dan awal tahun 2009. Keberhasilan ini tidak terlepas dari meningkatnya kinerja pemerintah dalam mengantisipasi, menindak, dan mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Serangkaian operasi cipta kondisi keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh aparat keamanan telah berhasil menekan tindak kejahatan terutama untuk kejahatan terhadap kekayaan negara, penyelundupan manusia, perdagangan illegal narkoba, premanisme, perjudian, dan aksi-aksi anarkhis dalam penyampaian pendapat. Selanjutnya tidak adanya gangguan keamanan dalam pelaksanaan

hari raya keagamaan, terutama Hari Raya Natal 2008, merupakan salah satu tolok ukur yang penting mengingat dalam beberapa tahun ini kegiatan keagamaan tersebut rawan aksi-aksi terorisme bom.

Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa upaya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat masih menghadapi berbagai kendala karena tingginya dinamika politik, hukum, sosial dan ekonomi yang berlaku di masyarakat baik karena pengaruh internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri. Pengaruh internal dalam negeri kebanyakan disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kurang memihak kepada masyarakat atau merugikan sejumlah kelompok di masyarakat. Sementara itu, pengaruh eksternal luar negeri disebabkan oleh dominasi kebijakan masyarakat internasional yang berimbas ke dalam negeri seperti krisis global, krisis keamanan kawasan, regional, maupun internasional. Di samping itu, masih besarnya angka penyimpangan profesi aparat keamanan, sikap kritis masyarakat yang kurang dilandasi oleh pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, serta perilaku primordial masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima perbedaan baik etnis maupun keyakinan turut menyokong tingginya angka kriminalitas.

Beberapa kebijakan pemerintah pro pasar yang tidak diikuti oleh kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan tersebut dapat menjadi sumber potensi konflik. Kebijakan perubahan harga BBM yang selalu diikuti aksi spekulasi, memunculkan kelangkaan komoditas strategis ini. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat selain menurunnya daya beli, kelangkaan BBM selalu berujung pada berlipatnya harga dari yang seharusnya. Demikian juga, krisis global yang bertendensi meningkatkan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja secara massal akan memperbesar kondisi dan keinginan sebagian masyarakat untuk berbuat kriminal. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memperbesar simpul-simpul kriminalitas yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik akan meningkatkan kejadian kriminalitas di masyarakat.

Misi pemerintah Indonesia dalam mendukung kawasan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015, masih dibayang-bayangi oleh tingginya tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2008 kasus tindak pidana narkoba meningkat lebih dari 7 kali lipat, dengan kecenderungan tersangka semakin muda usianya. Jika pada tahun 2000 jumlah kasus hanya 3.748 kasus, maka pada tahun 2007 meningkat menjadi 22.630 kasus dan pertengahan tahun 2008 mencapai 13.984 kasus. Sementara itu jumlah tersangka di bawah umur 25 tahun yang berarti golongan muda, pelajar, dan mahasiswa proporsinya rata-rata mencapai 36,48 persen. Kondisi ini akan sangat membahayakan perkembangan generasi bangsa bila tidak mampu dikelola secara lebih baik. Apalagi kesadaran untuk melakukan terapi dan rehabilitasi di kalangan masyarakat masih rendah (berkisar 10 persen) karena dianggap sebagai aib keluarga. Untuk menekan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penindakan dan pencegahan. Dalam 10 tahun terakhir puluhan ribu kasus narkoba berhasil di selesaikan, puluhan produsen gelap narkoba dalam skala kecil dan besar berhasil diungkap, dan lebih dari 70 orang diputus pidana mati, 5 diantaranya telah dieksekusi mati. Sementara itu dalam upaya meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN pelayanannya

semakin ditingkatkan. Namun upaya tersebut tampaknya tidak mengurangi keinginan pelaku kejahatan narkoba untuk berkecimpung di jalur *supply* dan *demand*, mengingat tingginya nilai ekonomi narkoba. Laporan *World Drug Report* tahun 2008 menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terbesar melakukan penyitaan methaphetamine dan memiliki kisaran harga-harga narkoba cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara produsen sekaligus pasar potensial dalam perdagangan narkoba internasional.

Dalam hal mencegah tindak pidana perdagangan orang termasuk anak-anak dan perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan tindak diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of Child* (CRC). Berdasarkan Laporan UNODC 2006, rangking kasus perdagangan manusia Indonesia berada pada skala medium, lebih baik dibandingkan China, Thailand, Philipina, India, Vietnam atau Kamboja. Namun dalam kenyataannya, sepanjang tahun 2008 sebanyak 150.000 anak-anak menjadi korban perdagangan manusia. Angka ini cukup mengkhawatirkan, karena motif perdagangan tidak hanya melalui tipu daya, tetapi ada kecenderungan melalui penculikan secara langsung dan bahkan secara sadar orang tua terlibat langsung dalam tindak kejahatan ini.

Gangguan keamanan di laut, terutama aksi perompakan menunjukan kecenderungan menurun. Secara berturut-turut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir aksi perompakan yang terjadi di perairan teritorial sebanyak 94 kali pada tahun 2004, 79 kali pada tahun 2005, 50 kali pada tahun 2006, dan 43 kali pada tahun 2007. Sementara itu di Selat Malaka terjadi sebanyak 38 kali pada tahun 2004, 12 kali pada tahun 2005, 11 kali pada tahun 2006, dan 7 kali pada tahun 2007. Keberhasilan ini masih diragukan oleh dunia pelayaran internasional dan menempatkan wilayah perairan Indonesia relatif berbahaya. Munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *cooperating states* untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai. Melalui peningkatan kerjasama trilateral antara Indonesia – Singapura – Malaysia serta peningkatan operasi mandiri, diharapkan kekhawatiran dunia pelayaran internasional di perairan Selat Malaka tidak sampai mengundang kekuatan asing untuk turut ambil bagian dalam pengamanan jalur pelayaran ini agar kedaulatan wilayah teritorial tetap terjaga.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, menunjukan kemajuan yang berarti dengan tidak adanya aksi-aksi terorisme yang berdampak secara nasional maupun internasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Terbunuhnya Dr. Azahari pada 9 November 2005 yang diikuti sejumlah pengungkapan jaringan pelaku terorisme dan disertai dengan penggagalan serangkaian rencana aksi terorisme di Indonesia semakin mendukung situasi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan eksekusi mati 3 (tiga) orang terpidana kasus bom Bali I yang sempat menimbulkan kekhawatiran, yaitu Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron alias Mukhlas pada tanggal 9 November 2008, terbukti tidak terjadi aksi balas

dendam. Bahkan pelaksanaan perayaan keagamaan, khususnya perayaan Natal dan Tahun Baru 2008, yang sering dibayangi oleh aksi terorisme bom dapat berjalan aman dan penuh kedamaian.

Sebagai masyarakat dunia, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh aksi-aksi terorisme di negara-negara lain sebagai konsekuensi perang global menghadapi terorisme. Meski secara konstitusi politik luar negeri Indonesia menganut paham bebas aktif yang berarti tidak memiliki posisi konflik terhadap kelompok manapun, namun imbas dari kejadian terorisme internasional kadang mencapai wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah penurunan kunjungan wisatawan asing, khususnya dari kawasan Eropa, Australia, dan Amerika. Untuk menangani dampak terorisme global, Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral. Secara bilateral dengan Polandia melalui *Agreement on Cooperation in Combating Transnational Crime and Other Types of Crime* dan dengan Vietnam melalui *MoU on Cooperation and Combating Crime.* Sedangkan secara multilateral melalui Forum dialog ASEAN melalui *Expert Working Group on ASEAN Convention on Counter Terrorism* (JEWG on ACCT), *ASEAN – Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, ASEAN – Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism,* dan *ASEAN – New Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, dan* Forum APEC melalui *Counter Terrorism Task Force* (CTTF).

Berbagai konflik yang terjadi dalam dua tahun terakhir kebanyakan masih dilatarbelakangi oleh perbedaan suku agama dan ras (SARA), perebutan sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, proses politik di daerah, dan perebutan pengaruh dalam rangka menyongsong Pemilu 2009. Namun, secara umum upaya penanganan konflik di berbagai daerah, khususnya daerah rawan konflik telah menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Di Poso saat ini telah terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, aman, kondusif, dan terciptanya harmoni serta pulihnya sarana sosial. Demikian juga di NAD dan Maluku, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat cukup stabil dan tidak ada lagi konflik yang berdampak serius bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Selanjutnya dalam hal penghormatan atas perbedaan agama dan keyakinan, sepanjang tahun 2008 telah terjadi sebanyak 367 pelanggaran mulai dari intimidasi sampai dengan penyerangan fisik. Salah satu kasus yang menonjol dari konflik berlatar belakang agama dan keyakinan tersebut adalah peristiwa Monas tanggal 1 Juni 2008 antara kelompok Forum Pembela Islam (FPI) dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dalam menyikapi aliran Ahmadiyah.

Pencegahan dan upaya mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan ditempuh dengan penyidikan dan pelindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi represif pengamanan hutan. Operasi intelijen telah menghasilkan informasi terkait dengan modus dan pelaku pembalakan liar, sedangkan operasi represif diupayakan untuk menghentikan kegiatan kejahatan kehutanan. Beberapa hasil operasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh polisi. Dalam rangka mendukung operasi pemberantasan pembalakan liar dan tindak pidana kehutanan, langkah penguatan sarana dan prasarana berupa pengadaan senapan laras panjang, amunisi, dan telepon genggam (handphone) satelit. Di samping itu untuk memperkuat operasi, telah dilaksanakan rekruitmen dan

pelatihan satuan tugas khusus polisi hutan (polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi. Selanjutnya dalam rangka pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal, upaya kerjasama internasional terus ditingkatkan yang diwujudkan dalam forum ASEAN; forum kerjasama Ekonomi Sub Regional, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, *Philippines East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT), Asian Forest Partnership (AFP), dan proyek penegakan hukum *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), serta kerja sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia

Untuk menekan tindak pencurian ikan (*illegal fishing)* di perairan laut Indonesia oleh kapal asing, upaya pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui penerapan sistem *monitoring, controlling, and surveilance* yang diantaranya dengan pemasangan transmitter di kapal-kapal perikanan berukuran lebih dari 100 GT; pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan; kerja sama operasional pengawasan dengan TNI AL, Polri, dan DKP; pembentukan Pokmaswas, dan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan serta menata sistem perijinan bagi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

Dalam rangka mendukung tugas pokok Polri, di setiap Polda telah terbentuk satuan-satuan khusus untuk menangani tindak kejahatan terorisme, narkoba, dan satuan pengamanan pariwisata di Yogyakarta dan Bali. Peningkatan kemampuan Polri juga ditempuh melalui percepatan penambahan jumlah personil dan kualitas personil. Peningkatan jumlah personil diupayakan melalui rekruitmen dengan sasaran 1 : 500 pada akhir tahun 2009, sedangkan peningkatan kualitas personil diupayakan melalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun luar negeri melalui mekanisme latihan bersama dan kerjasama operasional dengan sejumlah negara. Selanjutnya dalam rangka perpolisian masyarakat (Polmas), target pelatihan sebanyak 70.000 petugas Polmas dapat tercapai secara keseluruhan pada tahun 2009, yang berarti seluruh desa/kelurahan Indonesia akan terjangkau oleh program ini. Terkait dengan penyimpangan profesi aparat keamanan, pada tahun 2008 sebanyak 8.836 anggota melanggar disiplin, 198 anggota melanggar kode etik profesi dengan sanksi terberat dipecat sebanyak 162 anggota, dan 440 anggota dipenjara karena berbagai kasus pidana seperti narkoba, penganiayaan, pencurian, perjudian, dan perbuatan tidak menyenangkan. Angka penyimpangan profesi ini mencapai lebih dari 2,5 persen dari total jumlah anggota Polri dan merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan profesionalitas anggota Polri.

B. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Kesenjangan Postur dan Pertahanan Negara. Belum tercapainya postur pertahanan pada skala *minimum essential force* berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini, merupakan resiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat non militer asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan tehnologi dan usia tehnis yang tua. Efek penggentar *(detterent effect*) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari Munisi dan Kendaraan Tempur, Helikopter, dan Alat Angkut Air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60-65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan dari Kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relative tua dengan kesiapan antara 33 – 65 persen, akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya. Sementara itu efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15 – 75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kadaluarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negara-negara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan - Malaysia dengan panjang hampir 2000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste sepanjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua – Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antar pos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, namun sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Sumbangan Industri pertahanan yang belum optimal. Semenjak krisis ekonomi 1997, secara umum kemampuan industri strategis pertahanan mengalami kemunduran atau cenderung mengalami stagnasi. Sebagai industri berteknologi tinggi tetapi masih mengandalkan bahan baku luar negeri dengan pengelolaan perusahaan yang cenderung kurang efisien, menyebabkan produk-produk industri BUMNIS berbiaya tinggi (high cost), tidak mempunyai keunggulan komparatif, dan kurang kompetitif dengan produk-produk luar negeri. SDM-nyapun kurang profesional dan sistem pengawasan kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, banyak kontrak-kontrak produksi tidak dapat memenuhi *delivery time* yang telah ditentukan. Di sisi lain, banyak swasta nasional yang secara potensial dapat dikembangkan untuk mendukung industri pertahanan nasional tidak dapat dioptimalkan perannya.

Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan

prasarana penjagaan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos pertahanan dan keamanan menyebabkan masih banyaknya area-area kosong (*blank spot*) yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Kondisi ini didukung oleh intensitas operasi yang sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Akibatnya banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi NKRI tidak dapat ditangani dan merugikan negara trilyunan rupiah setiap tahunnya. Pembentukan Badan Keamanan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang sampai saat ini belum dapat direalisir, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengamanan dan pengawasan di laut. Sementara itu, Angkatan Laut yang merupakan kekuatan utama di laut, selain dihadapkan pada keterbatasan kapal, fokus operasinya ada di wilayah ZEE dan dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI, sehingga perannya kurang optimal dalam menangani gangguan keamanan dan pelanggaran hokum di wilayah yuridiksi.

Keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI. Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di Selat Malaka, telah terjadi penurunan aksi perompakan yang sangat signifikan yaitu lebih dari 5 kalinya. Namun demikian dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relative berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Di sisi lain, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *cooperating states* untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai dan merupakan tantangan antara Indonesia – Singapura – Malaysia untuk meningkatkan kerjasama trilateral pengamanan Selat Malaka.

Terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Upaya penanggulangan dan pencegahan aksi terorisme mampu meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri yang diindikasikan dengan tidak adanya aksi-aksi terorisme berskala nasional/internasional, khususnya peledakan bom, yang mengganggu kunjungan wisatawan asing. Berbagai penangkapan dan pengungkapan jaringan terorisme serta pelaksanaan eksekusi pelaku terorisme di Indonesia mampu meyakinkan masyarakat internasional akan keseriusan pemerintah Indonesia. Namun belum tertangkapnya tokoh-tokoh utama jaringan Dr. Azahari seperti Noordin M. Top, diperlukan kewaspadaan tinggi agar kondisi aman tetap terjaga. Di samping itu, peran masyarakat dalam pecegahan terorisme masih perlu ditingkatkan mengingat kelihaian jaringan terorisme yang dapat menyusup dan membaur ke segenap aktivitas masyarakat.

Intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi. Tingginya tuntutan hidup dan dihadapkan pada rendahnya daya beli masyarakat sebagai konsekuensi krisis global yang sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian nasional, berdampak pada semakin tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja, kesenjangan kesejahteraan, dan munculnya *enclove* atau kantong-kantong masyarakat yang relatif lebih sejahtera merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik

berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas. Di samping itu, pesatnya teknologi informatika dan telematika turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik melalui foto-foto mesum, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan baik melalui *short message service* (SMS) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telematika yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, handphone, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan.

Trend kejahatan serius "*serious crime*" yang semakin meningkat dan bersifat gunung es. Sebagai bagian masyarakat global dan dengan pintu-pintu perbatasan darat dan laut yang relatif terbuka menjadikan wilayah Indonesia sebagai mata rantai kejahatan lintas negara seperti narkotika, *human trafficking*, atau terorisme. Sementara itu, kejahatan konvensional dan kejahatan yang berimplikasi kontijengensi lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri, intensitasnya cenderung meningkat. Di sisi lain, kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspon dengan cepat dan tepat, yang berujung pada banyaknya kasus-kasus kejahatan tidak dapat dicegah.

Keselamatan (safety) masyarakat yang semakin menuntut perhatian. Dalam berbagai kerumunan massa seperti pertunjukan konser musik, aktivitas keagamaan (pembayaran zakat), event olah raga, atau aksi-aksi demonstrasi masih banyak dijumpai jatuh korban sia-sia akibat ketidakteraturan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam berbagai kasus, koordinasi panitia kegiatan yang menimbulkan kerumunan massal dengan aparat keamanan tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan pada proses pembagian zakat oleh seorang dermawan di Jawa Timur yang menewaskan 21 orang akibat berdesak-desakan, konser music di Gedung Asia Afrika Culture Center (AACC) yang melebihi kapasitas dan menewaskan 10 orang, dan masih banyak lagi kasus yang pada intinya sistem pengamanan tidak dapat disiapkan secara matang. Kasus paling aktual adalah aksi demo menuntut pembentukan Propinsi Tapanuli pada tanggal 3 Februari 2009 yang berujung pada tewasnya Kepala DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat. Kejadian tragis yang menyerang simbol kedaulatan negara dan menodai demokrasi tersebut menunjukkan kekurangsigapan aparat keamanan dalam mengamankan aksi tersebut. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan agar jatuhnya korban sia-sia tidak selalu terulang.

Penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh. Penuntasan perkara kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikas kontijensi rata-rata masih bertengger pada kisaran 52 persen setiap tahunnya. Bahkan apabila dilihat tingkat keberhasilannya, proporsi penuntasan kejahatan konvensional relatif paling rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikas kontijensi yang cenderung memiliki nilai politis relative pencapaiannya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah penuntasan belum secara

maksimal menyentuh keselamatan masyarakat sebagai hak dasar atas keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih dihadapi institusi adalah proses penyelidikan dan penyidikan belum didukung kemampuan sumber daya manusia dan teknologi penyidikan yang memadai. Banyaknya kasus salah tangkap dan kekerasan yang menimpa para tersangka telah menimbulkan keprihatinan akan akuntabilitas penuntasan perkara.

Kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi. Salah satu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas, adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat. Sayangnya sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seringkali masyarakat merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses yang berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, masih banyaknya anggota Polisi yang melakukan tindakan menyimpang dari tupoksinya berupa pelanggaran kode etik dan tindak pidana seperti narkoba, penganiayaan, pencurian, perjudian, dan perbuatan tidak menyenangkan yang pada tahun 2008 kasusnya mencapai hampir 2,5 persen dari total anggota Polri, menjadikan lembaga kepolisian belum sepenuhnya menjadi andalan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya main hakim terhadap penyelesaian kejahatan di masyarakat atau dengan cara menyewa pengamanan swasta yang seringkali bertindak bengis dan anarkhis.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan secara signifikan, terutama dalam hal kasus pengungkapan kasus peredaran gelap dan produksi narkoba. Keberhasilan ini menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin membaik sekaligus menunjukkan besarnya ancaman kejahatan narkotika yang tidak hanya melibatkan pelaku lokal dalam negeri, tetapi sudah menjadi bagian dari jaringan internasional. Di samping itu, untuk pencegahanan dan penanganan korban penyalahgunaan diperlukan advokasi, kampanye, informasi dan edukasi serta sosialisasi tentang bahaya penyelahgunaan narkoba yang lebih intensif yang didukung dengan penelitian dan pengembangan yang memadai. Sedangkan dalam hal penanganan, perlu dibangun pusat-pusat terapi dan rehabilitas narkoba, terutama untuk daerah-daerah dengan kasus kejahatan narkoba yang tinggi.

Keamanan informasi negara yang masih lemah. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun cakupan pengamanan rahasia negara yang baru mencapai 36 %, berpotensi terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (Sisdina), yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis diantar pimpinan pemerintah di pusat dan daerah. Di sisi lain, ketertinggalan

teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data-data gangguan keamanan nasional.

Deteksi dini yang masih belum memadai. Deteksi dini yang pada hakekatnya adalah fungsi intelijen dan kontra-intelijen merupakan kunci utama dan penentu awal penciptaan keamanan nasional yang meliputi pertahanan *(defense)*, keamanan dalam negeri *(Homeland Security)* serta keamanan sosial/ insani (*Social/ Human Security*). Di seluruh dunia, deteksi dini ini merupakan sumber utama pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan negara (*The Mother of information and policy*). Lebih lanjut, di berbagai negara di dunia terutama Amerika Serikat dan Eropa, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, pimpinan negara meminta dan mendengarkan briefing yang terkait dengan deteksi dini dan situasi nasional/ internasional terkini. Dengan semakin derasnya arus informasi dan kondisi informasi yang asimetrik, dalam 5 (lima) tahun mendatang aspek deteksi dini sangat dibutuhkan oleh pimpinan negara dan para pengambil keputusan serta sangat relevan untuk tetap dijadikan prioritas.

Kesenjangan kapasitas lembaga Penyusun kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara. Kemampuan dan peran lembaga-lembaga Keamanan Nasional masih harus ditingkatkan lagi dan diserasikan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin bervariatif, memerlukan pengelolaan secara efektif dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas, terbatasnya kerjasama antar institusi sehinga terkesan bertindak sendiri-sendiri bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tupoksi maupun dalam sinerginya dengan lembaga-lembaga keamanan nasional yang lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang akan dihadapi pada Pembangunan tahun 2010, maka sasaran bidang pertahanan dan keamanan yang akan dicapai adalah :

1. Terwujudnya Postur dan Struktur Pertahanan menuju "*Minimum Essential Force"* yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal.
2. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan.
3. Menurunnya angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut.
4. Terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan Meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
5. Menurunnya angka kejadian criminal (*criminal index*) yang meliputi kejahatan konvensional; trans-nasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender.
6. Meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan (clearance rate: kejahatan konvensional; trans-nasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender).
7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian.
8. Menurunnya angka penyalahgunaan Narkoba dan Menurunnya peredaran gelap narkoba.
9. Terlindunginya informasi negara.
10. Terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional.

11. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang Hankamneg yang tepat waktu.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Berdasarkan permasalahan dan sasaran yang akan dihadapi bidang pertahanan dan keamanan, maka arah kebijakan pembangunan pertahanan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan postur dan struktur menuju *minimum essential force* yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal melalui :
   a. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang terintegrasi.
   b. Pemantapan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga.
   c. Mengembangkan kekuatan dan kemampuan serbu (s*triking force*).
   d. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.
   e. Percepatan pembentukan komponen bela negara.
2. Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui :
   a. Penyusunan Blue Print beserta Road Map.
   b. Peningkatan R & D.
   c. Penyusunan dan penetapan kerangka financial.
3. Peningkatan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat, dan penegakan hukum di laut.
4. Pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen.
5. Penurunan kejadian kriminal *(criminal index*) melalui :
   a. Meningkatkan penjagaan, pengawalan dan patrol rutin di ruang public dan wilayah pemukiman.
   b. Modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk *system emergency* nasional dan penanganan kejahatan secara cepat.
6. Peningkatan penuntasan kejahatan (*clearing rate*), melalui :
   a. Peningkatan SDM dan tehnologi sidik dan lidik
   b. Peningakatan akuntabilitas penuntasan perkara
7. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian melalui :
   a. Peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian;
   b. Perbaikan tata kelola complain resolution dari masyarakat
8. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba, melalui :
   a. Peningkatan upaya interdiksi, pengungkapan, dan penegakan hukum terhadap produsen, jaringan dan pengedar Narkoba
   b. Peningkatan advokasi, kampanye, informasi dan edukasi serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
   c. Penelitian dan pengembangan, diseminasi dan menyelenggarakan Terapi dan Rehabilitasi Narkoba.

9. Peningkatan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi dan penerimaan informasi negara.
10. Peningkatan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi tehnologi intelijen.
11. Meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga Penyusun kebijakan Pertahanan-Keamanan Negara.

D. MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010
PRIORITAS BIDANG 1 : PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN MENCAPAI *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
Fokus 1 : Peningkatan Kemampuan Pertahanan						
a.	1151 1158 1170	Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja TNI	- Penyusunan Bujuk Lintas Tri Matra Tahap 1 - Terselenggaranya updating doktrin dan bujuk Matra Darat - Terselenggaranya updating bujuk pertahanan Matra Udara	- Pengembangan Pertahanan Matra Integratif - Pengembangan Pertahanan Matra Darat - Pengembangan Pertahanan Matra Udara	Dephan/TNI (Mabes, AD, AL, AU)	1,5 14,2 4,0
b.	1186 1207	Pengembangan sistem dan strategi pertahanan	- Pengembangan defense Resource Center, jejaring inter institusi dan civil society serta updating sistem dan strategi pertahanan - Updating Tahunan Strategic Defense Review (SDR) Strategi Raya Pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategi Joint Operation, dan produk strategis lainnya.	- Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan	Dephan	30,8 10,0
c.	1152 1159 1165	Peningkatan profesionalitas personil melalui latihan dan pengembangan kompetensi	- Pelaksanaan Dikma - Penyelenggaraan Minimal Pendidikan Pertama Personil TNI	- Pengembangan Pertahanan Matra Integratif - Pengembangan Pertahanan	Dephan/ TNI (AD, AL, AU)	90,0 324,8 105,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
	1171		AD - Pendidikan Pertama Personil TNI AL - Pendidikan Pertama Personil TNI AU	Matra Darat - Pengembangan Pertahanan Matra Laut - Pengembangan Pertahanan Matra Udara		84,3
d.	1153 1160 1166 1172	Pengembangan Materiil TNI	- Pengadaan MKK, MKB dan Musus Selektif Non – PDN - PLN - Pengadaan MKK dan MKB secara selektif - Pengadaan Munisi Kaliber Besar Non-PDN-PLN - Pengadaan MKB	- Pengembangan Pertahanan Integratif - Pengembangan Pertahanan Matra Darat - Pengembangan Pertahanan Matra Laut - Pengembangan Pertahanan Matra Udara	Dephan/TNI (Mabes, AD, AL, AU)	50,0 41,9 55,5 80,0
e.	1204 4434	Pengembangan Materiil Operasi Bakti TNI dan Penanggulangan tanggap darurat	- Meningkatnya durasi dan cakupan lokasi Bakti TNI di pulau dan daerah terpencil - Dana awal emergensi bencana alam nasional	- Operasi Bakti TNI - Pengembangan Pertahanan Integratif	Mabes TNI	7,7 5,0
f.	1208 1209	Perbaikan/Pemeliharaan/Penggantian Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	- Pembelian suku cadang darurat, alat peralatan, materiil dan senjata serta penunjang operasional Non-PDN-PLN - Perbaikan dan pemeliharaan darurat alutsista Non-PDN-PLN (108,79 M) dan Pengadaan Matsus Anti	- Pengembangan Pertahanan Integratif - Pengembangan Pertahanan Matra Darat - Pengembangan Pertahanan Matra Laut - Pengembangan Pertahanan	Dephan/ TNI (Mabes, AD, AL, AU)	131,6 123,8 394,6 292,3 5.521,3

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Teror Den 81/Kopassus (15 M) - Perbaikan dan pemeliharaan Darurat Alutsista Non-PDN-PLN (235 M) dan Pengadaan matsus Denjaka-Kopaska - Perbaikan dan pemeliharaan Darurat Alutsista Non-PDN-PLN (277,34 M termasuk FMS : belum mencukupi) dan Pengadaan matsus Anti Teror Den Bravo Paskhas (15 M) - Terlaksananya pengadaan Alutsista dalam tahapan mencapai minimum essential force : Sisa Disbursement Blue Print Alutsista 2005 – 2009 melalui PHLN, Pelaksanaan Alokasi 2005 USD 556 jt, 2006 USD 665 jt, dan 2008 USD 646,2 jt.	Matra Udara - Pengembangan Industri Pertahanan		
g.	5405	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Intelijen (Prioritas Nasional)	- Lanjutan modernisasi jaringan komunikasi intelijen strategis	- Pengembangan Pertahanan Integratif	Dephan/ TNI (Mabes)	10,0
h.	0024	Pembangunan fasilitas bekal dan kesatriaan di daerah rawan dan pendukung di perbatasan laut, darat, dan udara	- Rehab kondisi berat sarana dan prasarana Mabes TNI - Rehabilitasi khusus untuk kondisi rusak berat kesatrian tempur dan perumahan prajurit	- Pengembangan Pertahanan Integratif - Pengembangan Pertahanan Matra Darat - Pengembangan Pertahanan	Dephan/ TNI (Mabes, AD, AL, AU)	30,0 154,4 120,0 110,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			- Rehabilitasi khusus rusak berat sarana dan prasarana pelabuhan dan hangar lantamal, lanal, Sional, Denal, Posal, Lanudal dan Lanmar di Hot Area serta ALKI I, II, dan III - Rehabilitasi rusak berat Lanud dan Sarana Prasarana Satuan Radar di wilayah terluar	Matra Laut - Pengembangan Pertahanan Matra Udara		
i.	0024	Pembangunan sarana dan prasarana sistem dan strategi pertahanan	- Rehap kondisi rusak berat sarana dan prasarana Dephan	- Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan	Dephan	25,0
j.	1210	Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan di wilayah perbatasan laut dan darat	- Pembangunan Pos Perbatasan / Pos Pulau terluar	- Penegakkan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI	Dephan/TNI (AL, AD)	45,1
Fokus 2 : Percepatan pembentukan komponen bela negara						
a.	1181	Pengembangan Sistem Bela Negara (Prioritas Nasional)	Pelaksanaan Revitalisasi Bela Negara di daerah konsentrasi penduduk dan daerah rawan, serta pelaksanaan pengembangan sistem pertahanan negara	- Pengembangan Bela Negara	Dephan/ TNI	40,4

PRIORITAS BIDANG 2 : PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
Fokus 1 : Kerjasama Penelitian dan Pengembangan						
a.	1199 1200	Litbang, rekayasa, dan pengembangan kemandirian industri pertahanan.	- Penyusunan produk kerjasama Litbang Dephan-PT-LP Piranti Lunak Pertahanan Modern - Kerjasama Litbang Dephan-PT-BUMNIS- private untuk prototipe alutsista untuk pemberdayaan Industri Pertahanan	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan	Dephan/TNI	11,5 4,0
Fokus 2 : Memberdayakan Industri Pertahanan nasional						
a.	1191	Pengembangan Materiil Industri Pertahanan (Prioritas Nasional)	Pelaksanaan Tahapan Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional di dalam negeri I : MKK dan MKB, Senjata, Kapal, Retrofit, Tank, Simulator Terjun Payung, Pesawat Lanjutan, serta pengadaan materiil lainnya .	Pengembangan Industri Pertahanan	Dephan/TNI	814,6
b.	5856	Pembangunan Materiil dan Fasilitas Polri	- Pelaksanaan Tahapan Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional di dalam negeri untuk mendukung Kesiapan Prasrana dan Sarana Operasional Polri	- Pengembangan Sarana dan Prasarna Kepolisian	POLRI	200,0

PRIORITAS BIDANG 3 : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM DI LAUT

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
Fokus 1 : Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut						
a.	4711	Operasi bersama keamanan laut	- Terlaksananya operasi keamanan laut sebanyak 4 kali, 180 hari operasi mandiri, 17 paket kerjasama operasi, dan 6 paket kebijakan operasi.	- Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	BAKORKAMLA	35,0
Fokus 2 : Meningkatkan sinergi dan koordinasi keamanan laut						
b.	0024	Pembangunan/ pengadaan / peningkatan sarana dan prasrana	- Penyelesaian strategi gelar RCC sebanyak 3 paket termasuk peralatan integrated RCC interface.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	BAKORKAMLA	50,0

PRIORITAS BIDANG 4 : PENINGKATAN RASA AMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
Fokus 1 : Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan dan Tindak Pelanggaran Hukum						

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
a.	5866	Pelayanan Keamanan	- Tercapainya Crime Rate mendekati 60 per 100.000 penduduk (menekan menjadi mendekati 230 ribu kejadian)	- Pemeliharaan Kamtibmas	POLRI	595,0
b.	5864	Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi	- Meningkatnya kapasitas penegakan hukum untuk ketertiban masyarakat di tingkat Polda/Polres	- Pemeliharaan Kamtibmas	POLRI	100,0
Fokus 2 : Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba						
a.	6201	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya kampanye narkoba berbasis masyarakat di 31 provinsi	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	BNN	14,0
b.	6202	Penegakan Hukum bidang Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus narkoba	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	BNN	15,0
c.	6203	Terapi dan Rehablitasi Korban Narkoba (Priorias Nasional)	Meningkatnya peran lembaga terapi dan rehabilitasi di daerah dan didukung oleh laboratorium uji narkoba	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	BNN	25,0
d.	6205	Penguatan Kelembagaan Anti Narkoba	Peningkatan kelembagaan P4GN di pusat dan daerah	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	BNN	25,0
e.	6211	Intensifikasi Kegiatan Intelijen dan Operasi Pencegahan dan Penindakan P4GN (Prioritas Nasional)	Meningkatnya dukungan operasional dan kegiatan P4GN, Prasarana dan sarana supply reduction di 5 Daerah Rawan	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	BNN	100,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
Fokus 3 : Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional						
a.	5869	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Terlaksananya peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian ke arah clearing rate 60%.	- Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	POLRI	100,0
Fokus 4 : Meningkatkan pelayanan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi						
a.	5852	Pengembangan kekuatan personil Polri	- Tercapainya Personil Polri menuju rasio 1 : 600	- Pengembangan SDM Kepolisian	POLRI	100,0
b.	5853	Pengembangan Kemampuan personil Polri	- Meningkatnya profesional/ kompetensi Modern anggota Polri dan PNS Polri	- Pengembangan SDM Kepolisian	POLRI	100,0
c.	5855	Penataan kelembagaan Polri termasuk mekanisme kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian	- Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Polri - Validasi Organisasi (6M) dan Dukungan TI – Masyarakat – Kompolnas (5).	- Pengembangan Sarana dan Prasarna Kepolisian	POLRI	11,0
d.	5856	Pembangunan Materiil dan Fasilitas Polri	- terlaksananya perpanjangan usia pakai sehingga mendukung kesiapan prasarana dan sarana operasionalPolri (termasuk pos keamanan perbatasan dan terselenggaranya Sistem Emergency Kepolisian yang handal; database krimalitas; dan aplikasi teknologi	- Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian	POLRI	2.800,7

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			kepolisian)			
e.	5862	Pemberdayaan Community Policing	- Terlaksananya penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Community Policing di daerah	- Pemberdayaan Potensi Keamanan	POLRI	11,0

PRIORITAS BIDANG 5 : PENINGKATAN PENGGALANGAN DAN KAPASITAS LEMBAGA-LEMBAGA KEAMANAN NASIONAL

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
Fokus 1 : Meningkatkan Kapasitas SDM Intelijen dan Persandian						
a.	5410	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara	- Terpenuhinya SDM intelijen yang profesional dan handal	- Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	5,0
b.	5452 5453	Peningkatan Litbang dan SDM pengamanan rahasia negara	- Litbang lanjutan prototipe Alat Sandi Nasional menuju Full Algoritma Nasional - Peningkatan Kompetensi SDM	- Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	Lemsaneg	7,4 5,9

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Persandian di tingkat Ahli Sandi Tingkat II dan III			
Fokus 2 : Modernisasi Peralatan Khusus Intelijen dan Persandian						
a.	5403	Pengadaan peralatan intelijen	- Terlaksananya modernisasi peralatan intelijen	- Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	111,1
b.	5404	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Intelijen (Prioritas Nasional)	- Terwujudnya arus informasi intelijen yang cepat, tetap, aman, dan terjaga kerahasiaannya (Lanjutan)	- Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	39,2
c.	5405	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Intelijen (Prioritas Nasional)	- Terwujudnya sistem komunikasi Pusat dan Daerah secara cepat, tepat, dan aman (Lanjutan)	- Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	36,5
d.	5451	Pembinaan dan Fasilitasi Sistem Persandian (Prioritas Nasional)	- Pembangunan tahap II pusat Analisa Sinyal Komunikasi sebagai prasyarat pelaksanaan Intelijen Komunikasi dan Kegiatan Operasi Kontra Intelijen	- Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	Lemsaneg	113,8
Fokus 3 : Memperluas Cakupan Operasi Intelijen dan Pengamanan Rahasia Negara						
a.	5454	Peningkatan gelar peralatan sandi	Terlaksananya Percepatan penggelaran lanjutan Jaringan Mobile Sandi SISDINA 2004 – 2009 dan Jaringan	Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	Lemsaneg	285,8

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Sandi Intra/Internet Bases , termasuk di wilayah perbatasan			
b.	5401	Operasi Intelijen Penanggulangan Separatisme	Terlaksananya Operasi Separatisme terbatas (Lanjutan Clandestine)	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional	BIN	70,2
c.	5402	Operasional Intelijen Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban	Terlaksanya operasi penanggulangan keamanan dan ketertiban (Mendukung pengurangan kejahatan transnasional termasuk yang ada di perbatasan)	Pemberdayaan Potensi Keamanan	BIN	29,7
d.	5406	Operasi Intelijen Penanggulangan Transnasional Crime dan Uang Palsu/ Kertas Berharga	Terwujudnya kegiatan dan operasi intelijen penanggulangan transnasional crime	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	24,9
e.	5407	Operasi Intelijen	Terdeteksinya dan tereliminarnya ATHG di dalam dan luar negeri, termasuk di wilayah perbatasan	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	365,5
f.	5408	Operasi Kontra Intelijen	Terselanggaranya daya tangkal intelijen	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	99,9
g.	5409	Operasi Intelijen Strategis	Terdeteknsinya dan tereliminirnya ancaman terorisme di dalam dan luar negeri	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	BIN	69,9
Fokus 4 : Kajian-Kajian Strategis dan Peningkatan Kemampuan Pengambilan Keputusan Pimpinan Negara						
a.	0040	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	- Penelitian 8 Paket wawasan kebangsaan (pengembangan nilai-nilai kebangsaan), Kajian Peraturan Perundanngan dan Kelembagaan	- Penelitian dan Pengembangan IPTEK - Pengembangan Ketahanan Nasional	Lemhannas	10,0 6,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Miliar Rupiah)
			Keamanan Anasional - Pelaksanaan kajian aktual dalam bentuk kajian berlanjut asta-gatra, panca-gatra, catur-gatra)			
b.	0067	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	- Pelaksanaan KRA, KSA, dan Penyegaran kepemimpinan 400 Bupati dan Walikota /DPR Kab/Kota)	- Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Lemhannas	22,5
c.	0089	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung	- Pembangunan tahap akhir laboratorium system pengembangan ketahanan nasional	- Pengembangan Ketahanan Nasional	Lemhannas	70,0
d.	5501	Penyelenggaraan Perumusan Kebijaksanaan Pertahanan Keamanan Nasional	- Kajian Rumusan Kebijakan Tertinggi Tentang Hankamnas sebagai Bahan Pertimbangan Tertinggi Ketahanan Nasional - Terlaksananya Desain Sistem Informasi Real Time, akuisisi dan pengolahan informasi ketahanan nasional	- Pengembangan sistem dan Strategi Pertahanan	Wantannas	17,5

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 7

HUKUM DAN APARATUR

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 7
HUKUM DAN APARATUR

A. Kondisi Umum

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, telah dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi perintah dalam Amandemen UUD Negara Republik Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara hukum yang didukung oleh aparatur negara yang profesional dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Beberapa hasil yang dapat dikemukakan antara lain semakin meningkatnya proses demokratisasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat; meningkatnya pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara yang lebih mengutamakan *check and balances*; jaminan dan perlindungan hak asasi manusia; pengawasan peradilan yang lebih terbuka dan transparan; meningkatnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan khususnya peraturan perundang-undangan, sehingga substansi konstitusi sebagai hukum dasar benar-benar merupakan kristalisasi kehendak masyarakat Indonesia; makin berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance;* kelembagaan pembangunan yang semakin memihak kepada rakyat yang kurang mampu; berkembangnya budaya melayani di lingkungan birokrasi pemerintah; meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur negara; dan meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang didukung sistem pengawasan dan pemeriksaan/audit yang makin efektif.

Pada tahun 2008, pembangunan di bidang hukum dan aparatur negara telah berhasil mencapai berbagai kemajuan yang sangat berarti. Di bidang hukum, ditandai dengan semakin meningkatnya penegakan hukum terutama terkait dengan penanganan kasus penindakan dan pencegahan praktik korupsi, dan kasus-kasus penegakan hak-hak asasi manusia**;** meningkatnya upaya untuk menciptakan sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembenahan berbagai produk peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah dalam rangka menciptakan supremasi hukum.

Namun disadari bahwa pembenahan sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan dan pembentukan hukum tertulis/peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pemenuhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi; sumber daya manusia baik yang mempunyai tugas di bidang penegakan hukum maupun yang bertugas menjaga dan memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan; kelembagaan hukum yang semakin efisien dan mantap serta memahami fungsi sebagai penegak dan pencegah terjadinya penyimpangan hukum; sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya penegakan hukum dan pencegahan penyimpangan hukum, serta pelaksanaan akses terhadap keadilan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan hukum masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan hak-haknya yang dijamin oleh Konstitusi, serta terkandung di dalamnya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu bentuk perwujudan

perencanaan dan pembentukan hukum tertulis, adalah melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diharapkan dapat lebih memberikan arah politik hukum yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang (2010-2014). Pada tahun 2008 telah di sahkan 56 (lima puluh enam) buah Rancangan Undang-Undang (RUU). Namun dari jumlah tersebut tidak semuanya merupakan RUU yang tertuang masuk dalam daftar Prolegnas, karena hampir separuh dari jumlah tersebut merupakan RUU yang terkait dengan pembentukan daerah otonom baru.

Pada tahun 2009, diperkirakan pencapaian dari pelaksanaan Prolegnas sebanyak 80 rancangan undang-undang akan di bahas ditengah-tengah pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan kampanye calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dengan fokus beberapa prioritas rancangan undang-undang yang perlu diselesaikan karena kemendesakannya, antara lain rancangan undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; rancangan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; dan berbagai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban; dan tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Ras dan Etnis. Untuk itu diharapkan pelaksanaan Prolegnas mendatang dapat lebih diperbaiki dengan lebih meningkatkan komitmen agar instansi/lembaga pemerintah yang terkait dengan perencanaan dan pembentukan hukum tertulis dan lembaga Legislatif dapat lebih taat asas kepada Prolegnas yang telah disepakati bersama, baik dalam kerangka mewujudkan pencapaian tujuan jangka menengah (RPJMN) maupun tiap tahun (Rencana Kerja Pemerintah/RKP). Pada tahun 2009, dengan mendasarkan pada kondisi yang dihadapi pada tahun sebelumnya, telah dilakukan evaluasi terhadap peraturan daerah (perda) terkait pajak daerah dan retribusi daerah, serta rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, untuk melihat sejauh mana perda-perda yang diterbitkan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat pada umumnya, dan masyarakat miskin serta terpinggirkan, hak asas manusia, gender pada khususnya. Selain itu upaya untuk lebih meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan, terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang melalui pelaksanaan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan.

Sebagaimana komitmen pemerintah yang telah dilaksanakan pada lima tahun terakhir, upaya pemberantasan korupsi baik melalui langkah penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan percepatannya. Pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2.6 pada tahun 2008, akan terus ditingkatkan kenaikannya melalui pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dari Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Di bidang aparatur negara, pelaksanaan pembangunan aparatur negara salah satu strateginya dilakukan melalui reformasi birokrasi. Keberhasilan pembangunan aparatur negara akan memiliki kontribusi yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan peningkatan daya saing nasional. Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam rangka reformasi birokrasi selama tahun 2008 antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS; meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; menyempurnakan sistem pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah sejalan dengan prinsip *good governance.* Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Pada tahun 2008, Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum*, memperlihatkan posisi Indonesia masih menduduki peringkat 54 pada tahun 2006-2007 dan 2007-2008 dan tidak sebaik posisi Malaysia dan Thailand. Demikian pula pada tahun 2008-2009 Indonesia masih menduduki peringkat 55. Kondisi ini memperlihatkan semakin pentingnya upaya pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi.

Pemerintah juga terus mendorong perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah melalui reformasi birokrasi instansi (RBI). Pelaksanaan reformasi birokrasi pada beberapa instansi seperti Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung, telah memperlihatkan peningkatan kinerja yang cukup baik, walaupun di sadari masih belum sepenuhnya optimal. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat berjalan secara komprehensif, konsisten dan terlembagakan di seluruh instansi pemerintah, maka telah diterbitkan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008. Pedoman umum tersebut mengatur antara lain: (i) arah strategi organisasi yang meliputi program percepatan (*quick wins*), penilaian kinerja organisasi saat ini dan postur birokrasi; (ii) melaksanakan menajemen perubahan yang meliputi proses sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan; (iii) penataan sistem yang meliputi analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan sistem remunerasi; penataan organisasi yang meliputi redefinisi visi, misi, strategi, restrukturisasi, dan analisis beban kerja; (iv) penataan tata laksana yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur dan elektronisasi dokumentasi/kearsipan (*e-archieve*); penataan sistem manajemen SDM; dan (v) penguatan unit organisasi yang meliputi penguatan unit kerja/organiasi kepegawaian, penguatan unit kerja kediklatan dan perbaikan sarana dan prasarana.

Hingga kurun waktu 2009 berbagai pencapaian pembangunan aparatur negara telah berhasil direalisasikan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi dua aspek, yakni (i) pelayanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat yakni pelayanan pangan, kesehatan dan pendidikan, dan (ii) pelayanan yang memberikan dukungan langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, seperti pelayanan perijinan, investasi, pajak, kepabeanan, dan lain-lainnya yang secara bertahap telah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan walaupun belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Selama tahun 2008, pemerintah memprioritaskan ditetapkannya

UU Pelayanan Publik dengan tujuan agar pelayanan publik dapat diselenggarakan secara profesional, efisien dan efektif serta akuntabel. Namun sampai dengan tahun 2009 masih dalam pembahasan di DPR. Selain itu telah disusun standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan, sosial, lingkungan hidup dan pemerintahan dalam negeri, yang ditindaklanjuti dengan upaya meningkatkan kapasitas atau kompetensi aparat pemerintah daerah. Beberapa pencapaian lainnya antara lain: ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; uji coba pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) di Batam dan *e-local government* di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Magelang, dan Kabupaten Solok; perluasan *e-procurement*; penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) *offline* di 471 Kabupaten/Kota; terbentuknya 293 unit pelayanan terpadu satu pintu; tersusunnya rancangan peraturan mengenai standar pelayanan perkotaan sesuai PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional; dan berbagai upaya fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan. Pada tahun 2009, pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi aparat pemerintah daerah dalam penerapan SPM agar standar pelayanan kepada masyarakat makin meningkat; menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan *e-government* pada instansi pemerintah; memperluas penerapan *e-government* dan *e-local government* termasuk *e-procurement;* menyempurnakan sistem administrasi kependudukan; dan membangun sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) secara bertahap di daerah.

Disadari bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur memiliki peran strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Dalam konteks tersebut, upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur, penerapan remunerasi berdasarkan resiko dan beban kerja, serta pemantapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian masih terus diprioritaskan, karena berhubungan langsung dengan upaya membangun sistem manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Langkah-langkah yang berhasil dicapai selama tahun 2008 antara lain: tersusunnya naskah akademik penyempurnaan UU Kepegawaian Negara dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang SDM aparatur; tersusunnya pedoman standar kompetensi jabatan dan pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan; dilaksanakannya rekruitmen CPNS secara transparan, kompetitif dan berbasis kompetensi; diselenggarakannya *assessment center* nasional di BKN dan *assessment center* di beberapa instansi yang dimanfaatkan untuk melakukan penilaian kompetensi jabatan strategis; dan pencapaian lainnya. Pada tahun 2009, upaya untuk menyempurnakan manajemen pendidikan dan pelatihan (Diklat) terus dilakukan yang mencakup sistem dan kurikulum diklat. Di samping itu, diharapkan dapat tersusunnya RPP Sistem Remunerasi PNS berbasis kinerja dan merit; tersusunnya RUU Kepegawaian Negara; dan meningkatnya kompetensi PNS melalui berbagai Diklat baik teknis, fungsional maupun pimpinan.

Sedangkan upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan diarahkan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyempurnaan struktur organisasi pada instansi pemerintah agar dapat berfungsi secara optimal sesuai prinsip *structure follow function*. Terbitnya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan upaya untuk mengatur kelembagaan kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, tanpa mengurangi hak prerogratif Presiden untuk menyusun kabinetnya. Di samping itu, selama tahun 2008 juga telah disusun naskah RUU tentang Badan Layanan Umum (Nirlaba) dan beberapa RUU sebagai

bagian dari landasan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yaitu RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, dan RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Secara bertahap dilakukan penataan atas lembaga non struktural (quasi birokrasi) agar dapat memperjelas kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta hubungan antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pada tahun 2009, diharapkan terus dikembangkannya penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah; dikembangkannya *standard operating procedure* (SOP) dan makin efektifnya kelembagaan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi yang dimandatkannya. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.

Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan/audit, serta penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap penyelenggaraan pemerintahan merupakan upaya perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Reformasi audit di sektor publik (*state audit reform*) telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pada instansi yang memiliki tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan/audit. Terbitnya PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) semakin memperjelas kedudukan dan fungsi auditor internal di lingkungan instansi pemerintah. Di sisi lain, obyek audit yang dilakukan auditor eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin banyak yang meliputi instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan keuangan negara. Tindak lanjut hasil audit BPK juga semakin dioptimalkan sehingga kerugian keuangan negara yang disebabkan tindak KKN dapat diselamatkan, pengelolaan kegiatan pada instansi pemerintah dapat ditingkatkan akuntabilitasnya, dan beberapa kasus penyalahgunaan keuangan negara yang memiliki unsur pidana dapat ditindaklanjuti oleh penegakan hukum bagi para pelakunya. Sedangkan dalam rangka memantapkan akuntabilitas kinerja, terdapat 428 instansi pemerintah atau 73,5% yang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari segi kualitas terdapat peningkatan instansi pemerintah yang dinilai akuntabel, dari sebanyak 30% pada LAKIP 2004 (dinilai tahun 2005) menjadi 60,73% pada tahun 2007 (dinilai tahun 2008). Pada tahun 2009, upaya untuk mempercepat penyusunan naskah RUU Sistem Pengawasan Nasional dan RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara dan berbagai kegiatan bidang pengawasan, audit dan peningkatan akuntabilitas akan tetap dilanjutkan dan diefektifkan pelaksanaannya.

B. Permasalahan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Berdasarkan kondisi umum tersebut, pelaksanaan pembangunan hukum dan aparatur negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih menghadapi berbagai permasalahan pokok. Di bidang hukum, permasalahan pokok yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2010 antara lain: peran instansi/lembaga yang selama ini mempunyai fungsi untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih menghadapi kendala dengan instansi/lembaga lainnya, terutama tumpang

tindih dan disharmoni antar peraturan; penerapan pembagian kewenangan dalam kerangka otonomi daerah; masih besarnya ego kepentingan antar instansi/lembaga dan antar daerah serta antar instansi/lembaga dengan daerah. Hal ini terlihat dari 783 perda yang dibatalkan sampai dengan tahun 2008. Hampir semua perda yang dibatalkan terkait dengan retribusi, namun sedikit sekali perda yang memfokuskan pada bidang non ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya lebih banyak merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan (*disadvantage*). Padahal esensi otonomi daerah adalah untuk lebih mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat di daerah terutama yang tinggal pada daerah terpencil (*remote area*), karena pada era sebelum otonomi daerah perhatian kepada daerah-daerah terpencil belum terlalu besar.

Di samping pemantapan pelaksanaan Prolegnas, pelaksanaan harmonisasi hukum, baik yang tertulis/peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis/hukum kebiasaan/adat, menjadi fokus yang sangat signifikan, terutama pasca penerapan otonomi daerah. Belum dipahaminya esensi otonomi daerah menjadi kendala yang sampai dengan saat ini masih dihadapi terkait dengan berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan, baik antar peraturan di tingkat pusat maupun antara peraturan tingkat pusat dengan daerah, terutama peraturan daerah yang menyangkut pungutan pajak retribusi untuk pendapatan daerah, dan belum optimalnya pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap kebijakan di bidang non ekonomi

Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi/lembaga hukum antara lain disebabkan karena masih lemahnya profesionalisme; integritas; dan penerapan kode etik aparat penegak hukum dan sumber daya manusia di bidang hukum. Adanya pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masih belum optimalnya pelayanan dan bantuanhukum kepada masyarakat.

Praktik korupsi secara tidak langsung memberikan kontribusi yang cukup siginifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, yang perwujudannya tercermin dari masih lemahnya masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Ketidakberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, lebih disebabkan karena sangat minimalnya akses informasi yang dimiliki masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan, untuk mengetahui, memahami dan menggunakan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, dan belum optimalnya mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang baik dan responsif. Oleh karena itu kemendesakan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan pada beberapa prioritas bidang pembangunan menjadi sangat signifikan dilaksanakan pada tahun 2010, melalui rencana aksi Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, yang terfokus pada prioritas di bidang Reformasi Hukum dan Peradilan; Bantuan Hukum; Pemerintahan Daerah; Pertanahan dan Sumber Daya Alam; Perempuan; Anak; Ketenagakerjaan; dan Lintas Bidang (kelompok Miskin dan terpinggirkan). Dalam rangka penegakan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, maka merupakan kewajiban negara untuk terus

mempercepat penyelesaiannya, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Di bidang aparatur negara, meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi beberapa permasalahan pokok yang perlu diselesaikan lebih lanjut. Permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2010 terkait dengan pelayanan publik, antara lain: masih kurangnya pemahaman para aparat terhadap regulasi pelayanan publik; belum tersedianya standar pelayanan minimal (SPM) pada semua jenis pelayanan; masih terbatasnya akses TIK; rendahnya e-literasi aparatur pemerintah; terbatasnya pengembangan aplikasi TIK; masih ditemukannya prosedur pelayanan yang berbelit dan lambat terutama di bidang investasi/penanaman modal; serta pelayanan publik di perkotaan yang masih konvensional. Tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010 adalah meningkatkan manajemen pelayanan publik yang mencakup budaya pelayanan, prosedur pelayanan, kepastian kebijakan, biaya yang terjangkau, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk optimalisasi pemanfaatan TIK.

Sedangkan upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur negara khususnya PNS, masih menghadapi kendala antara lain belum meratanya penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan berbasis kinerja (sesuai risiko dan beban kerja) di seluruh instansi pemerintah, sehingga sistem *reward and punishment* belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kinerja PNS dinilai masih sangat rendah, sehingga masih perlu dioptimalkan melalui pengelolaan manajemen SDM berbasiskan sistem merit. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pada tahun 2010 adalah diperlukannya penyempurnaan manajemen kepegawaian terutama sistem penilaian kinerja pegawai dan sistem remunerasi berbasis kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan negara, serta perlunya upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme PNS dengan didukung sistem manajemen kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Kondisi birokrasi pemerintah masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *structure follow function* karena banyak dijumpai organisasi instansi pemerintah yang justru cenderung semakin besar struktur dan rentang kendalinya, serta mengabaikan aspek fungsi yang diamanatkan. Akibatnya, struktur organisasinya menjadi tambun, lamban bergerak, tumpang tindih tupoksi dan terlalu birokratis, serta tidak optimal dalam pencapaian kinerjanya. Di lingkungan instansi pemerintah belum diterapkannya secara luas sistem manajemen kinerja yang mengatur kelembagaan dan tatalaksana organisasi tersebut. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pusat maupun di daerah, masih bersifat parsial dan terbatas sehingga kurang terkoordinasi dan belum komprehensif dalam implementasinya. Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan birokrasi pemerintah masih belum memiliki kontribusi yang strategis untuk menopang daya saing nasional. Permasalahan yang masih dihadapi tahun 2010 dalam penyelenggaraan pengawasan adalah belum efektifnya hasil pengawasan sebagai perbaikan manajemen pemerintahan. Tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, baik sebagai upaya perbaikan kinerja ataupun upaya penegakan hukum, pada umumnya masih sangat rendah. Akibatnya tujuan pengawasan dan pemeriksaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik sering kurang dapat dicapai karena tidak ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan atas kelemahan dan temuan pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, permasalahan lain yang masih dihadapi adalah

sinergi lembaga intern dan ekstern yang memiliki tugas dalam pengawasan dan audit belum berjalan optimal; masih tingginya opini *disclaimer* dari BPK; dan belum memadainya kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan negara yang dapat mengakibatkan rendahnya akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan pokok yang dihadapi adalah mewujudkan sosok birokrasi pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan meningkatkan daya saing bangsa.

Pada tahun 2010 beberapa sasaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang diharapkan dapat dicapai melalui pembangunan hukum dan aparatur negara adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya tertib peraturan perundang-undangan melalui upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan dan melakukan pembenahan Prolegnas untuk menentukan arah pembangunan hukum ke depan dan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mendorong upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Implementasi Konvensi PBB Tahun 2003 Menentang Korupsi (*UNCAC*).
2. Melanjutkan upaya penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota ke dalam rencana kegiatan Kementerian/Lembaga/ pemerintahan daerah.
3. Tersedianya jaminan penganggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam proses peradilan dengan membangun kemitraan antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan.
4. Tercapainya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai dalam rangka pelaksanaan penegakan; pelayanan; bantuan hukum dan akses terhadap keadilan kepada masyarakat.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mencakup terselenggaranya pelayanan publik yang terjangkau oleh masyarakat, tidak diskriminatif, cepat, responsif, manusiawi, serta mudah dalam mengakses berbagai informasi pelayanan.
7. Mengembangnya sistem peningkatan kinerja pegawai yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi, yang didukung dengan pengelolaan manajemen kepegawaian secara profesional dan perbaikan sistem remunerasi yang adil, layak dan berbasis kinerja.
8. Terwujudnya birokrasi pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel yang ditandai dengan makin tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai kebutuhan dan tugas pokok dan fungsinya (*rightsizing*), terselenggarakannya sistem pengawasan dan pemeriksaan/audit yang efektif, dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka berbagai upaya terus dilakukan baik yang terkait dengan pembangunan bidang

hukum dan aparatur negara terutama diarahkan pada perencanaan dan pembentukan hukum tertulis/peraturan perundang-undangan; kelembagaan hukum; sarana dan prasarana; pemberdayaan hukum masyarakat; akan dapat menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seluruh kelembagaan perbaikan manajemen pelayanan publik; peningkatan profesionalisme SDM aparatur; penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; efektifitas pengawasan dan pemeriksaan, dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Pembangunan hukum dan aparatur negara yang dilakukan secara komperehensif diharapkan negara termasuk lembaga hukum yang ada. Untuk itu arah kebijakan pembangunan bidang hukum dan aparatur negara pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pembenahan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah termasuk pengharmonisasiannya untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi; dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin serta terpinggirkan.
2. Penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia antara lain melalui peningkatan efektivitas penanganan perkara yang dilakukan oleh lembaga peradilan termasuk penyelesaian sengketa HAM melalui mediasi, dan melanjutkan upaya pencegahan korupsi melalui pembentukan strategi nasional Implementasi UNCAC.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Peningkatan profesionalisme, integritas dan penerapan kode etik aparat penegak hukum dan sumber daya manusia hukum, yang didukung melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM hukum; peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan penegakan hukum, pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
5. Meningkatkan kualitas mekanisme penganggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam proses peradilan serta memperkuat masyarakat untuk memperoleh akses keadilan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan manajemen di berbagai bidang pelayanan (*services delivery/management*). Arah kebijakan ini dipandang strategis karena selama ini pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan secara murah, taat prosedur dan akuntabel, serta didukung manajemen yang profesional. Pelayanan publik di lingkungan birokrasi pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berakibat pelayanan yang diberikan kurang optimal. Selanjutnya perlu ditempuh langkah-langkah strategis penyempurnaan manajemen pelayanan publik di berbagai bidang seperti di bidang investasi, perpajakan dan kepabeanan, ekspor impor, pengadaan barang dan jasa publik, kearsipan, dan pelayanan perijinan lainnya, serta modernisasi sistem pelayanan berbasis TIK (*e-services).*
7. Mengembangkan sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS melalui penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian negara, dan perbaikan tingkat kesejahteraan yang layak, adil dan berbasis kinerja. Arah kebijakan ini didasarkan kondisi bahwa aparatur negara merupakan kunci dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Bahkan sumber daya aparatur (PNS) dinilai sebagai inti pendorong (*key leverage*) dari reformasi birokrasi, terutama dalam konteks reformasi kepegawaian (*civil service reform).* Kinerja unit kerja dan kinerja instansi pemerintah

juga sangat tergantung pada kinerja SDM aparaturnya. Selama ini penerapan sistem merit belum berjalan secara konsisten dan optimal, sehingga sulit untuk mewujudkan profesionalisme SDM aparatur. Namun demikian, upaya peningkatan kinerja PNS tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraannya. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, akan ditempuh langkah-langkah antara lain peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui pengembangan sistem diklat, *assessment center*, dan memantapkan penerapan sistem merit yang meliputi proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, mutasi, dan promosi. Perbaikan remunerasi terus dilanjutkan secara bertahap di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan berpedoman pada prinsip *reward and punishment*.

8. Melakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta meningkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam rangka mendorong peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Arah kebijakan ini sebagai upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel. Saat ini, di beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah telah dimulai langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI). Pelaksanaan RBI diharapkan dapat terus diperluas di seluruh instansi pemerintah secara bertahap, komprehensif dan konsisten. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, selanjutnya akan ditempuh langkah-langkah penyusunan, penyelesaian dan pengesahan atas berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi; perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah; penataan kelembagaan sesuai kebutuhan (*rightsizing*); perbaikan sistem ketatalaksanaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); pengembangan manajemen kearsipan berbasis TIK; penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah; peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan/audit; dan memperkuat akuntabilitas kinerja instansipemerintah.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010

PRIORITAS BIDANG : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
Fokus Prioritas Bidang : Pembangunan Peraturan Perundang – undangan						
1)	1273	Perencanaan Hukum Nasional	Daftar prolegnas sejumlah 10 RUU	Program Perencanaan Hukum	Departemen Hukum dan HAM	2,5
2)	0655	Pembentukan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan 12 RUU; Pembahasan 18 RUU; Penyusunan 10 RPP; Harmonisasi/Sosialisasi 90 PP;	Program Pembentukan Hukum	Departemen Hukum dan HAM	26,7

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			Penyusunan 12 naskah RUU; Pengkajian 15 kegiatan; Penelitian 7 kegiatan			
3)	0093	Pemberdayaan biro-biro hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan perundang-undangan)	Sosialisasi peraturan mekanisme proses penyusunan peraturan-perundang-undangan	Program Pembentukan Hukum	Departemen Hukum dan HAM	1,5
4)	0104	Kerjasama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga	Tersusunnya laporan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappenas	0,7
5)	5603	Pengembangan *database*	Database peraturan perundang-undangan nasional yang dapat diakses oleh	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappenas	0,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			masyarakat secara luas			
6)	6601	Pengkajian/Penelitian Peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM, Permasalahan HAM, dan Instrumen HAM	Terselenggaranya 8 kegiatan pengkajian/penelitian dari perspektif HAM, Permasalahan HAM, dan Instrumen HAM	Program Perencanaan Hukum	Komnas HAM	1,8
Fokus Prioritas Bidang : Penegakan Hukum dan HAM termasuk Penanganan Kasus korupsi						
1)	0382	Penanganan Perkara	250.000 perkara	Program Penegakan Hukum dan HAM	Mahkamah Agung	115,8
2)	0408	Penanganan Perkara Pidana Khusus	1200 Perkara	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan Agung	27,7

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
3)	0409	Penanganan Perkara Pidana Umum	11.057 Perkara	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan Agung	199,9
4)	0410	Penanganan Perkara Perdata dan TUN	200 Perkara	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan Agung	5,3
5)	0411	Penanganan Perkara Perkara Pelanggaran HAM	5 Perkara	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan Agung	0,3
6)	0412	Penanganan/Penyelidikan Kasus Intelejen	1006 Kasus	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan Agung	14,3

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
7)	7654	Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	1700 Perkara	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan Agung	146,9
8)	1255	Pembinaan Kepribadian & Ketrampilan Narapidana	464 Lapas/Rutan/Bapas	Program Penegakan Hukum dan HAM	Departemen Hukum dan HAM	34,8
9)	6609	Penyelenggaraan Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM	Terselenggaranya 110 kegiatan pemantauan terhadap kasus-kasus HAM	Program Penegakan Hukum dan HAM	Komnas HAM	3,7
10)	6611	Penyelenggaraan Mediasi Kasus HAM	Terselenggaranya 64 kegiatan mediasi kasus-kasus HAM	Program Penegakan Hukum dan HAM	Komnas HAM	2,4

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
11)	6612	Penyelenggaraan Kegiatan Penyelidikan Pelanggaran HAM	Terselenggaranya 25 kegiatan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM	Program Penegakan Hukum dan HAM	Komnas HAM	3,7
12)	6753	Penanganan Perkara PHPU/Pemilu/Pilkada	Penanganan 560 kasus	Program Penegakan Hukum dan HAM	Mahkamah Konstitusi	22,7
13)	7654	Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	Penyelidikan 60 kasus, penyidikan 55 perkara, penuntutan 45 perkara, eksekusi putusan inkrach 40 perkara, perlindungan saksi 1 paket, kordinasi 52 K/L, pengumpulan bahan keterangan 1 paket	Program Penegakan Hukum dan HAM	Komisi Pemberantasan Korupsi	23,8
14)	1097	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Pemantapan dan sosialisasi Rencana Aksi Strategi	(1) Dokumen Rencana Aksi Stranas Implementasi UNCAC (2) Laporan hasil konsultasi publik,	Program Penataan Kelembagaan dan	Bappenas	1,3

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
		Nasional Implementasi Konvensi UNCAC 2003)	dokumen *leaflet*, dan laporan hasil *talkshow* Rencana Aksi Stranas Implementasi UNCAC 2003 (3) Dokumen Rencana Aksi Instansi pada Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, KPK dan Depag, serta Dokumen Rencana Aksi Daerah pada 4 wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	Ketatalaksanaan		
15)	6614	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Tingkat Nasional dan Provinsi	Terselenggaranya 8 kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka penguatan kapasitas Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional untuk penegakan hak asasi perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Komnas HAM (kegiatan prioritas Komnas Perempuan)	1,3
16)	0092	Peningkatan Pengawasan dan	Jumlah obyek pemeriksaan sejumlah 1.000	Program Peningkatan Pengawasan dan	Departemen Hukum	15,6

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
		Akuntabilitas Aparatur Negara	obrik	Akuntabilitas Aparatur Negara	dan HAM	
17)	0097	Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	1) Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2004 di 3 wilayah regional 2) Tersusunnya 1 laporan hasil koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2004	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Kemeneg. PAN	4,5
Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum						
1)	0383	Peningkatan kemampuan Profesional Aparatur Hakim	3.000 orang	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Mahkamah Agung	31,0

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
2)	0067	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	35 Jenis diklat dengan 2.000 Orang (Pusdiklat KA dan 6 sentra diklat daerah)	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Kejaksaan Agung	47,1
3)	0407	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	450 Jaksa	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Kejaksaan Agung	22,0
4)	0048	Pengembangan Pendidikan Profesional dan keahlian	4 kegiatan (400 orang)	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Mahkamah Konstitusi	2,3
Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat						

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
1)	1260	Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Keimigrasian, HKI dan Administrasi Hukum Umum	3 pusat, 33 kanwil/kantor imigrasi, otomatisasi di bidang HKI 1 paket	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Departemen Hukum dan HAM	51,1
Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat						
1)	0402	Penyuluhan Hukum	Diselenggarakan kegiatan penerangan hukum oleh 31 Kejaksaan tinggi, 378 Kejaksaan negeri, 90 Cabang kejaksaan negeri, 1 Kejagung	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Kejaksaan Agung	11,0
2)	1256	Penyuluhan hukum, koordinasi RAN HAM dan sosialisasi RAN PK	Penyelenggaraan penyuluhan hukum pada 33 Kanwil Dep Hukum dan HAM, BPHN, dan Dirjen HAM	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Departemen Hukum dan HAM	30,4

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
3)	6752	Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi	54 Kali	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Mahkamah Konstitusi	24,4
4)	7652	Penyelenggaraan Pendidikan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan pendidikan anti korupsi	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Komisi Pemberantasan Korupsi	3,2
5)	7657	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	21.000 penyelenggara negara	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Komisi Pemberantasan Korupsi	1,7
6)	7657	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Pengadaan formulir sebanyak 30.000 set;	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan	Komisi Pemberantasan	6,9

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			Pengiriman dokumen sebanyak 7.500 set; Pengolahan data LHKPN sebanyak 1 paket; Sewa *bandwith* selama 12 bulan; dan Pemeriksaan LHKPN di 80 PN	HAM	Korupsi	
7)	7660	Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana	10 kegiatan sosialisasi pencegahan	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Komisi Pemberantasan Korupsi	5,2
8)	0090	Penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/seminar/workshop/publikasi	Terselenggaranya 22 kegiatan sosialisasi/ diseminasi/seminar/workshop/publikasi	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Komnas HAM	1,3

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
9)	6602	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM	Terselenggaranya 28 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan HAM	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Komnas HAM	1,9
10)	6603	Penyelenggaraan Penyuluhan HAM	Terselenggaranya 20 kegiatan Penyuluhan HAM	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Komnas HAM	1,0
Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum						

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
1)	0054	Pengembangan sistem informasi/ ICT	Terselenggaranya 1 paket pengembangan aplikasi dan 1 paket pengembangan operasional ICT	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Mahkamah Konstitusi	10,0
2)	0116	Pembinaan/Pengembangan/Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan	Terwujudnya pengadaan 15.000 buku (7.500 judul x 2 buku)	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Mahkamah Konstitusi	1,5
3)	7354	Penyelenggaraan Konferensi MK se-Asia (24 Negara)	Terselenggaranya konferensi internasional MK se-Asia yang akan diikuti oleh 24 negara	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Mahkamah Konstitusi	3,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
4)	8101	Pengembangan Sistem Informasi dan Data Hakim	Terbangunnya 6 paket sistem informasi data hakim online dengan daerah	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Komisi Yudisial	2,5
5)	8102	Pengawasan terhadap Lembaga Peradilan	(1) Adanya 280 laporan hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan 10 laporan hakim agung (2) Terselenggaranya 10 kegiatan dari tindak lanjut MoU pengawasan terhadap perilaku hakim	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Komisi Yudisial	8,2
6)	0024	Pembangunan/Penyediaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	Renovasi/rehabilitasi gedung 1.500 M2; Pengembangan IT sebanyak 20 unit; dan 1 kegiatan pengadaan sarana perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Komisi Pemberantasan Korupsi	96,0

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
7)	0024	Pembangunan/Penyediaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana di Kejagung, 31 Kejati, 378 Kejari, dan 90 Cabjari	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak hukum lainnya	Kejaksaan Agung	157,2
8)	0054	Pengkajian dan Pengembangan system informasi	Tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang sistem penanganan perkara yang transparan dan dapat diakses masyarakat sebanyak 5 paket	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak hukum lainnya	Kejaksaan Agung	30,0
9)	0079	Pembangunan gedung negara	Pembangunan gedung negara untuk 14 satuan kerja baru, 2 mess, 80 unit rumah dinas termasuk untuk satker baru	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak hukum lainnya	Kejaksaan Agung	141,0

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
10)	0113	Rehabilitasi gedung kantor/sekolah/rumah negara	Tersedianya fasilitas gedung kantor dan rumah dinas sebagai penunjang kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan sebanyak 164 unit	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak hukum lainnya	Kejaksaan Agung	93,2
Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
1)	0102	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya 3 kali sosialisasi UU Pelayanan Publik dan penyusunan 3 PP	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kemeneg. PAN	3,0
2)	0109	Survey/Studi Kelayakan Penyusunan Master Plan/DED/SID	Tersusunnya indeks pelayanan publik dan tersusunnya hasil survey pelayanan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kemeneg. PAN	2,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			publik			
3)	5778	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1) Fasilitasi bantuan teknis *e-government* untuk 8 Pemda 2) Portal layanan publik	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Depkominfo	3,5
4)	0020	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi	(1) Tersusunnya 1 Buku Penerapan Manajemen Pelayanan Inkusif (Berbasis ragam Kebutuhan Masyarakat); (2) Tersusunnya 1 Laporan Kajian tentang Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LAN	1,4

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			Pelayanan Publik			
5)	0102	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	(1) Terlaksananya percepatan pelayanan pengangkatan CPNS Pusat dan Daerah menggunakan ISO 9001-2008 (2) Terlaksananya percepatan penetapan Karpeg, Karis/Karsu menggunakan ISO 9001-2008 (3) Terlaksananya percepatan pelayanan kenaikan pangkat, perpindahan, peninjauan masa kerja dan mutasi kepegawaian PNS menggunakan ISO 9001-2008 (4) Terlaksananya percepatan pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara menggunakan ISO 9001-2008	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BKN	2,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			(5) Terlaksananya peningkatan pelayanan penyelesaian status dan kedudukan kepegawaian menggunakan ISO 9001-2008			
6)	0114	Pelayanan dan Bantuan Hukum	(1) Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis di 150 pemerintah provinsi/kabupaten/kota (2) Terlaksananya kegiatan advokasi di 50 kasus	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	5,6
7)	0114	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Terlaksananya Kegiatan pelayanan sanggah dan pengaduan 150 kasus	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	2,6

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
8)	0114	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Terlaksananya Kegiatan penanganan permasalahan hukum 90 kasus	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	1,8
9)	0114	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Terlaksananya Kegiatan pemberian pendapat hukum dan nasehat terkait sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk 75 kasus	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	1,3
10)	5411	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya Layanan *helpdesk* yang responsif; Aplikasi dan jaringan yang stabil; *Back up* sistem dan *database*; serta Dukungan teknis kepada instansi pusat dan daerah sebanyak 80 instansi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	7,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
11)	5411	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	(1) Tersedianya sewa akses jaringan internet untuk agregasi data dan *clustering* dengan kapasitas 10 Megabyte (2) Tersedianya satu paket infrastruktur IT untuk pengembangan dan implementasi *e-Proc* nasional	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	6,6
12)	5411	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersusunnya 1 pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah jangka menengah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	0,6
13)	5411	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya 100 *account* LPSE Nasional	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	2,0

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
14)	5411	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersusunnya *IT Plan* dan *Roadmap E-procurement* untuk 5 tahun ke depan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	LKPP	1,0
15)	0116	Pembinaan/Pengembangan/ Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan	Terlaksananya bimbingan dan konsultasi pembangunan kearsipan di pedesaan, 578 orang di 7 provinsi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ANRI	0,9
16)	7302	Bantuan Layanan Arsip Keliling Kepada Provinsi/Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan pengadaan mobil ”Masyarakat Sadar Arsip”di 15 provinsi.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ANRI	8,1
17)	7307	Pelaksanaan Citra Daerah dan Citra Nusantara	(1) Tersusunnya 1 naskah sumber arsip Citra Daerah di 4 Kab/Kota (2) Tersusunnya 1 naskah Citra Nusantara jilid V (3) Tersusunnya 1 naskah perjanjian	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ANRI	0,9

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			perbatasan wilayah RI jilid V			
Fokus Prioritas Bidang : Pengembangan Sistem Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS						
1)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya RUU Kepegawaian dan penyusunan 2 PP	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	2,8
2)	5604	Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan SDM Aparatur sesuai Sistem Karir dan Remunerasi	Tersusunnya 1 pedoman dan 1 juknis tentang penerapan harga jabatan (*job grading* dan *job pricing*)	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	1,8

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
3)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya 2 RPP dan 1 PermenPAN untuk pemantapan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	1,8
4)	7358	Pengembangan Karir dan *Assesment Center* PNS	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM PNS melalui *assesment center*	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKN	0,6
5)	0054	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Pengembangan pangkalan data/*database* kepegawaian nasional)	(1) Terbangunnya sistem Database kepegawaian nasional yang lengkap, akurat, terkini, dan aman (2) Terbangunnya sistem jaringan terpadu yang mampu memfasilitasi manajemen pelayanan pegawai dan seluruh unit BKN di Pusat dan di 12 Kanreg yang terintegrasi dengan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	BKN	125,6

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			instansi pusat dan daerah (3) Terbangunnya aplikasi software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung manajemen pelayanan data pegawai dan manajemen informasi (4) Terbangunnya *mail tracking* sistem kepegawaian di seluruh unit kerja yang ada di BKN (5) Terlaksanaya *Basic Training* bagi pegawai BKN dalam rangka operasionalisasi sistem informasi kepegawaian/NCSIS (6) Dihasilkannya tata naskah kepegawaian dalam bentuk elektronik			
6)	7257	Pengembangan sistem pendayagunaan SDM aparatur negara	(1) Tersusunnya juknis kediklatan pola baru (2) Revitalisasi SIDA dalam rangka	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	LAN	1,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			implementasi sistem pembaharuan diklat aparatur (3) Hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sistem diklat aparatur pola baru (4) Sosialisasi Sistem Diklat Aparatur Pola Baru (lanjutan)			
7)	0020	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi	1) Tersusunnya RPP tentang implementasi manajemen kinerja bagi PNS sebagai landasan dalam menerapkan manajemen kinerja bagi PNS pusat dan daerah 2) Tersusunnya laporan kajian tentang model pengukuran dan evaluasi kinerja pengembangan Sumber Daya Aparatur di daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	LAN	1,6

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
8)	7258	Pembinaan Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi	1) Terselenggaranya diklatpim tingkat I sebanyak 2 angkatan 2) Terselenggaranya diklat PEN sebanyak 2 angkatan 3) Terjaring dan terseleksinya calon peserta diklatpim tingkat I yang *qualified* dan kompeten 4) Terselenggaranya re-akreditasi lembaga diklat	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	LAN	3,0
9)	0052	Pengembangan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dengan instrumen *Computer Assisted Test (CAT System)* Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya pedoman/panduan sistem rekruitmen berbasis kompetensi dengan instrumen *Computer Assisted Test (CAT System)* yang telah dikembangkan	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKN	0,35

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
10)	7404	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya diklat aparatur pengawasan dan SPIP untuk 9.000 orang di pusat dan daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BPKP	15,7
11)	0067	Penyelenggaraan diklat aparatur negara	Terselenggaranya 112 paket kegiatan diklat teknis dan fungsional dan 1 paket kegiatan penataan manajemen SDM	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BPK	25,7
12)	0051	Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian	1) Tersusunnya rekomendasi mengenai formasi PNS yang dibutuhkan di seluruh Indonesia (yang merupakan dasar pertimbangan MenegPAN dalam menyusun RPP tentang Penetapan Formasi PNS) 2) Terlaksananya kegiatan Pemetaan dan Penataan Struktur PNS secara nasional 3) Terlaksananya diklat peningkatan kualitas SDM PNS bidang kepegawaian	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKN	2,1

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			4) Tersusunnya Laporan Kajian dan Penelitian atas Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian 5) Tersusunnya 1 laporan Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Diterapkannya Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional pada Setiap Instansi Pemerintah			
13)	0077	Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur	1) Disempurnakan 1 paket sistem penilaian kinerja PNS berdasarkan Standar Kinerja Individu (SKI) dan penerpannya sebagai pengganti DP3 yang lama 2) Terbangunnya 1 paket sistem pola kaderisasi pejabat struktural berbasis kompetensi 3) Terbangunnya sistem Pengangkatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKN	1,4

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			dalam jabatan Struktural dan fungsional di lingkungan PNS 4) Terlaksananya pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian 5) Terlaksananya evaluasi dan analisis kebijakan manajemen kepegawaian dan pemberdayaan PNS			
14)	0093	Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan	(1) Tersusunnya 9 RPP tentang: Gaji Pokok PNS, Gaji Pokok Anggota TNI, Gaji Pokok POLRI, Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya, Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakauri, dan Anggota TNI, Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakauri, dan Anggota TNI, Tunjangan Kehormatan KNIP, Tunjangan Kehormatan Veteran, Tunjangan Kohormatan Perintis Pergerakan Kebangsaan; (2) Tersusunnya 2 Perpres tentang: Gaji	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	BKN	1,0

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			Pokok PNS, dan Gaji Pokok Pensiunan; (3) Tersusunnya 2 Peraturan Kepala BKN tentang: Petunjuk Teknis Gaji Pokok PNS, dan Petunjuk Teknis Pensiunan Pokok PNS			
15)	0101	Pengembangan/Penyelenggaraan/Fasilitasi Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi	Tersedianya 250 pelatih dari pelaksanaan *Training of Trainers* (TOT)	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	LKPP	1,3
16)	0101	Pengembangan/Penyelenggaraan/Fasilitasi Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi	Terselenggaranya 240 instansi ujian reguler (6 kali dalam setahun) di 32 provinsi yang diikuti 25.000 peserta	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	LKPP	9,3
17)	0101	Pengembangan/Penyelenggaraan/Fasili	Terselenggaranya 200 kelas ujian berbasis komputer dengan jumlah peserta yang	Program Pengelolaan	LKPP	0,2

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
		tasi Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi	dapat terlayani sekitar 6.000 peserta	Sumber Daya Manusia Aparatur		
18)	0083	Pengangkatan/ pengadaan CPNS tahun 2009	1) Tersusunnya 1 kebijakan MenPAN tentang rencana kebutuhan CPNS 2010-2014 2) Terpeliharanya database formasi kepegawaian 3) Tersusunnya 1 Permen PAN tentang penetapan formasi CPNS 2010	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	5,0
19)	0051	Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya 4 kegiatan sosialisasi tentang kebijakan netralitas, disiplin, cuti, dan pemberhentian PNS	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	1,2

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
20)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya 1 RPP tentang jabatan fungsional dan 1 PermenPAN tentang pedoman/juknis penjenjangan jabatan fungsional	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kemeneg. PAN	1,2
21)	7304	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Kearsipan	(1) Tersedianya bantuan beasiswa untuk diploma, sarjana dan pasca sarjana sebanyak 100 orang; (2) Terlaksananya diklat teknis melalui dana dekonsentrasi di 39 provinsi, (3) Terlaksananya kursus/*training* dalam negeri: kursus Bahasa Belanda 45 orang, Bahasa Arab Melayu 30 orang, Bahasa Jawa kuno 30 orang, Bahasa Inggris 45 orang, Kursus komputer 10 orang, Kursus internet 30 orang (4) Terlaksananya kursus/*training*	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	ANRI	6,1

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			kearsipan di luar negeri 5 orang			
Fokus Prioritas Bidang : Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas						
1)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LKPP	2,5
2)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Perpres tentang *e-procurement*	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LKPP	0,9

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
3)	0090	Penyelenggaraan Sosialisasi/Desimenasi/Seminar/Workshop/Publikasi	Terselenggaranya sosialisasi Perpres pengganti Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 33 provinsi	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LKPP	3,5
4)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	(1) Terlaksananya pembahasan (lanjutan) RUU Administrasi Pemerintahan dan penyusunan PP (2) Terlaksananya uji materi dan pembahasan RUU Etika Penyelenggara Negara dan penyusunan PP (3) Terlaksananya uji materi RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan penyusunan PP	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Kemeneg. PAN	5,6

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
5)	0109	Implementasi reformasi birokrasi instansi	(1) Terlaksananya penilaian atas 14 instansi dan evaluasi terhadap 6 instansi (2) Terlaksananya sosialisasi, asistensi, dan monitoring terhadap 50 instansi pusat dan daerah	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Kemeneg. PAN	8,0
6)	5354	Penataan kelembagaan instansi pusat (termasuk lembaga non struktural/ komisi-komisi) dan daerah	1) Tersusunnya organisasi dan tata kerja instansi pusat 2) Tersusunnya 1 laporan evaluasi kelembagaan instansi pusat termasuk Lembaga Non Struktural (LNS)	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kemeneg. PAN	2,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
7)	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Dilaksanakannya ujicoba penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah terpilih di 2 instansi di 2 kabupaten di Jawa Barat dan Banten	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LAN	0,8
8)	7306	Penerapan Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1) Implementasi Sistem Kearsipan Statis berbasis TIK (SKSTI) di 12 Provinsi; 2) Implementasi Sistem Kearsipan Dinamis berbasis TIK (SKDTI) di 10 instansi pemerintah pusat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ANRI	4,0
9)	0093	Penyusunan/Penyempurnaa/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	(1) Tersusunnya RUU tentang Sistem Pengawasan Nasional (Siswanas) beserta PP (2) Tersusunnya RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara beserta PP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Kemeneg. PAN	2,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
10)	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan asistensi/monitoring/evaluasi sistem akuntabilitas (LAKIP/SAKIP) di 60 instansi pusat dan 90 instansi daerah	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Kemeng. PAN	2,5
11)	0084	Penyelenggaraan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada instansi pemerintah pusat dan pemda	(1) Tersusunnya SOP Pembinaan SPIP (2) Terselenggaranya sosialisasi SPIP pada 690 entitas/instansi pusat dan pemda	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPKP	18,8
12)	0061	Penataan sistem manajemen/ketatalaksanaan organisasi pemerintah (peningkatan tatalaksana dan SDM)	Tersusunnya 1 pedoman umum pelaksanaan tata naskah berbasis TIK	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kemeneg. PAN	1,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
13)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya RUU Badan Layanan Umum	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kemeneg. PAN	0,9
14)	7255	Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah	(1) Dikeluarkannya SK Kelembagaan Institut Ilmu Administrasi; (2) Tersusunnya laporan kajian tentang penataan jabatan politik dan karir dalam birokrasi (3) Tersusunnya laporan kajian tentang penyusunan pedoman penataan organisasi pemerintah	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LAN	2,6
15)	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Diterapkannya secara bertahap pengembangan kelembagaan dan manajemen pemeriksaan, manajemen kinerja satuan kerja, organisasi dan tata kerja di pusat dan daerah yang efektif dan efisien dan berorientasi pada peningkatan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	BPK	33,5

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			kinerja instansi dan para pegawainya di 35 kantor perwakilan			
16)	0093	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya 1 Peraturan Kepala LKPP tentang Norma, Standar, Pedoman, Manual atas Perpres Pengganti Keppres 80 Tahun 2003.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	LKPP	2,0
17)	0032	Pembinaan Hukum dan Organisasi	1) Tersedianya peraturan yang akan dijadikan data base sebanyak 500 Peraturan Pusat dan Daerah, 70 referensi hukum di 20 unit kerja di lingkungan ANRI 2) Tersusunnya standar prosedur operasional unit kerja di lingkungan ANRI sebanyak 25 Standar Prosedur	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	ANRI	0,4

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			Operasional			
18)	0102	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyelamatan arsip pemilu tahun 2009 di KPU pusat dan KPU provinsi; Terlaksananya penilaian dan akusisi arsip kabinet Indonesia Bersatu di 15 instansi; Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip akibat bencana alam dan penanggulangannya di 6 daerah; Terlaksananya pengamanan arsip melalui	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	ANRI	1,3
19)	0104	Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga	Terlaksananya kerjasama pengembangan kearsipan dengan 5 perguruan tinggi di daerah	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	ANRI	0,2

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
20)	7303	Pengkajian Tentang Pengelolaan Kearsipan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	(1) Tersusunnya 1 naskah norma standar arsip dinamis, dan 2 naskah standar/pedoman arsip statis; (2) Tersusunnya 1naskah hasil kajian penyelenggaraan kearsipan dinamis di kantor desa/kelurahan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	ANRI	0,8
21)	7407	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Investigasi	Tersusunnya 1.477 laporan pemeriksaan dan pengawasan bidang investigasi	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPKP	25,9
22)	7408	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Perekonomian	Tersusunnya 2.064 laporan pemeriksaan dan pengawasan bidang perekonomian	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	BPKP	28,1

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
				Negara		
23)	7409	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Polsoskam	Tersusunnya 1.138 laporan pemeriksaan dan pengawasan bidang polsoskam	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPKP	12,6
24)	7410	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah	Tersusunnya 1.700 laporan pemeriksaan dan pengawasan bidang keuangan daerah	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPKP	24,0
25)	7411	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Akuntan Negara	Tersusunnya 920 laporan pemeriksaan dan pengawasan bidang akuntan negara	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	BPKP	12,9

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
				Negara		
26)	0064	Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan	Terbangunnya pengembangan 3 sistem aplikasi dan prosedur informasi pengawasan (PASs, SIMPIP, sistem keamanan jaringan)	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPKP	6,7
27)	0097	Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 (Percepatan Pemberantasan Korupsi)	Tersusunnya 1 Laporan Kajian tentang Parameter SILAKIP Bagi Instansi Pemerintah	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	LAN	0,5
28)	0019	Kajian pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara	Tersusunnya 1 laporan kajian penetapan instrumen implementasi akuntabilitas nasional	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	LAN	0,7

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
29)	0092	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan di seluruh perwakilan BPK dan kantor pusat sebanyak 2.494 paket kegiatan sinkronisasi LHP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPK	198,4
30)	0042	Pengawasan dan pendayagunaan aparatur	1) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan internal BKN dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian selama tahun 2010 2) Tersusunnya 1 paket rekomendasi penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BKN	2,4
31)	5364	Sosialisasi dan Evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara	Terlaksananya 3 kegiatan sosialisasi dan evaluasi kebijakan bidang PAN melalui	Program Penerapan Kepemerintahan yang	Kemeneg. PAN	2,6

NO	MAK	KEGIATAN PRIORITAS BIDANG	KELUARAN	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA	PAGU INDIKATIF (milyar)
			forum PAN daerah, forum teknis PAN, dan forum PAN nasional	Baik		
32)	0091	Kajian Kepemerintahan yang Baik	Tersusunnya 5 laporan kajian dalam rangka pemantapan penerapan *good governance*	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	LAN	3,3
33)	0003	Pelayanan Publik/Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan sebanyak 2.494 kegiatan	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	BPK	177,5

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 8

WILAYAH DAN TATA RUANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 8

WILAYAH DAN TATA RUANG

Pembangunan Nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong terjadinya transformasi struktural. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 mencapai 6,3 persen, dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan (25,9 persen), perdagangan, hotel dan restoran (18,46 persen) dan pertanian (15,27 persen). Namun demikian pembangunan tersebut ternyata juga menimbulkan dampak kesenjangan antar wilayah serta antara kota – desa.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan sebuah kondisi yang dapat dilihat dari berbagai perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masih berpusat di wilayah Jawa dan Bali, dimana wilayah ini memberikan kontribusi sekitar 64,78 persen terhadap total perekonomian nasional (termasuk migas), diikuti Sumatera (20,44 persen). Dilain pihak Sulawesi dan Kalimantan hanya memberikan kontribusi sebesar sekitar 6 persen, dan Papua, Maluku dan Nusa Tenggara memberikan kontribusi masing-masing kurang dari 2 persen terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi wilayah di luar Jawa dan Bali juga umumnya di bawah rata-rata nasional kecuali untuk Sulawesi dimana pertumbuhan ekonominya mencapai di atas 6 persen. Sementara itu, persentase aliran modal melalui perbankan pun sekitar 67 persen aliran modal lebih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi seperti di Kepulauan Riau dan Papua Barat ternyata belum secara optimal menurunkan angka kemiskinan secara cepat. Persentase penduduk miskin di luar Jawa dan Bali masih berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, kesenjangan juga terjadi antara kota dan desa. Hal ini ditunjukkan antara lain melalui jumlah penduduk miskin yang jauh lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan, khususnya di wilayah luar Jawa – Bali. Proporsi penduduk miskin di Jawa sebesar 43 persen di kota dan 57 persen di desa. Sedangkan di Papua sebesar 4,2 persen di kota dan sebesar 95,8 persen di desa. Peran pusat-pusat pertumbuhan seperti kota-kota menengah yang berjumlah 58 persen dan kota-kota kecil yang berjumlah 12 persen dari jumlah total kota-kota, khususnya untuk mendukung perekonomian di perdesaan, yaitu sebagai lokasi industri pengolah hasil pertanian yang ada di desa, belum tercipta, sehingga keterkaitan antara kota-desa belum terjadi secara optimal.

Permasalahan kesenjangan dalam pembangunan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi, khususnya di wilayah perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal, serta wilayah-wilayah yang rentan dengan adanya kejadian bencana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan di daerah tersebut antara lain: 1. Jaringan prasarana dan sarana yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas; 2. Kualitas sumberdaya manusia

yang terbatas, dimana ada daerah yang kekurangan sumberdaya manusia dan ada daerah yang memiliki sumberdaya manusia yang berlebih tapi memiliki kualitas yang terbatas. 3. Pemanfaatan tata ruang yang belum optimal sehingga alokasi sumberdaya antar wilayah tidak dapat bergerak dengan efisien; 4. Isu pertanahan juga menjadi isu krusial mengingat pengelolaan pertanahan masih disarakan belum optimal; 5. Masih minimnya peran pusat-pusat pertumbuhan untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusi perekonomian di wilayah sekitarnya terutama daerah-daerah tertinggal; 6. Kurangnya keterkaitan antara pusat-pusat kota dan desa serta kurang terciptanya sistem kota-kota. 7. Belum berkembangnya wilayah perbatasan yang berorientasi *outward looking* dan belum optimalnya bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dengan negara tetangga; 8. Masih banyaknya daerah-daerah tertinggal yang perlu tertangani, disebabkan karena minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta miskinnya sumberdaya; 9. Kejadian bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor, puting beliung, ancaman letusan gunung api, kebakaran hutan, serta berbagai bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim global yang mempengaruhi perekonomian pada skala lokal maupun nasional, yang tidak dapat lagi ditangani secara adhoc, namun perlu diantisipasi melalui kebijakan mendasar dalam penanganan bencana; 10. Pelaksanaan otonomi daerah yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah sejak tahun 2000, belum berjalan secara optimal, dengan kurangnya aturan pendukung, standar pelayanan minimum, serta belum sempurnanya sistem perimbangan keuangan pusat-daerah.

Untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah tersebut, perlu dilakukan upaya pengembangan wilayah yang dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor atau bidang. Rencana tersebut harus dijabarkan dan disinkronkan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya. Pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah agar lebih terfokus dilakukan melalui upaya: (1) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah terutama di wilayah luar Jawa, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal; (2) percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat berkembang dan mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain; (3) pengembangan wilayah perbatasan yang berorientasi *outward looking* dan berdasarkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), sehingga dapat menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.; (4) pengembangan kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara seimbang, sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang sesuai dengan sistem perkotaan nasional, dan mendukung pengembangan perdesaan; (5) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan orientasi pada keunggulan komparatif sumber daya lokal (sumber daya alam pertanian, perikanan, kehutanan, sumber daya manusia, kelembagaan dan budaya lokal) dan didukung oleh sektor industri, jasa dan perdagangan, dengan infrastruktur yang menunjang keterkaitan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) keserasian pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta penatagunaan tanah, serta (7) upaya-upaya penyiapan strategi pengurangan resiko bencana yang mandiri dan berkelanjutan pada wilayah-wilayah yang memiliki karakter berdekatan dengan gejala bencana alam dan rentan terhadap perubahan iklim global.

Pada akhirnya, pengembangan wilayah ditentukan pula oleh keberhasilan pembangunan di daerah. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan daerah pada hakekatnya

adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah yang optimal dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Upaya pengembangan kawasan strategis yang dilaksanakan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) hingga saat ini belum mampu mengatasi masalah kesenjangan pembangunan antarwilayah. Meskipun secara relatif telah terjadi perkembangan pelaksanaan program pembangunan, namun pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan tersebut seringkali tidak berkelanjutan dan cenderung terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan ekonomi di kawasan sekitarnya, belum berperan untuk bersinergi dan terintegrasi dengan pembangunan daerah-daerah disekitarnya. Salah satu penyebabnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan belum didasarkan pada potensi unggulan spesifik daerah dan belum memiliki daya saing.

Dalam pengembangan KEK, beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2009 diantaranya: (i) segera diberlakukannya UU KEK beserta peraturan operasionalisasinya terutama RPP tentang penetapan wilayah KEK, RPP Kelembagaan dalam pelaksanaan KEK, RPP fasilitas insentif pengembangan KEK; (ii) dilaksanakannya sosialisasi KEK di 12 Provinsi strategis dan 4 negara; di bidang infrastruktur telah dirancang kegiatan untuk melanjutkan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan capaian antara lain: (i) penyelesaian rencana tata ruang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan (ii) penyelesaian rencana induk dan rencana aksi pembangunan infrastruktur untuk menciptakan keterkaitan antara kabupaten/ kota pusat KAPET dengan kabupaten/kota sekitar.

Sedangkan upaya pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai wilayah yang berhadapan dan berhubungan langsung dengan negara tetangga memerlukan perhatian yang lebih intensif mengingat kondisinya yang masih tertinggal baik wilayah maupun kesejahteraan masyarakatnya. Kawasan perbatasan negara terdiri kawasan perbatasan negara matra darat dan matra laut, dimana matra laut juga meliputi 92 pulau-pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pintu gerbang hubungan dengan negara tetangga serta pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, kondisi pembangunan sebagian besar wilayah di kawasan perbatasan negara masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain maupun dengan wilayah negara tetangga. Hal ini dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Reposisi kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara diarahkan kepada upaya mendorong pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu antar pelaku, antar sektor, dan antar daerah sehingga percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dapat diwujudkan dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Pada tahun 2009, beberapa perkiraan capaian kegiatan yaitu: (i) Tercapainya kemajuan dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara melalui survei dan pemetaan bersama, deliniasi dan demarkasi, pertemuan teknis dan perundingan bilateral, serta pemeliharaan patok batas. (ii)

Meningkatnya kondisi keamanan kawasan perbatasan melalui pelaksanaan kerjasama pertahanan bidang perbatasan dan lintas batas dengan negara tetangga, peningkatan sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan, pelaksanaan operasi keamanan laut dan pengamanan hutan, serta penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan ilegal. (iii) Peningkatan pelayanan PLB serta pembukaan beberapa Pos Pemeriksaan Lintas Batas baru yaitu PLB Aruk (Kabupaten Sambas) dan PLB Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), mengingat semakin intensifnya kegiatan lalu lintas perdagangan masyarakat kedua Negara yaitu antara Indonesia dan Malaysia, sehingga pelayanan kepabeanan akan diperlukan. (iv) Melanjutkan pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat sekitar perbatasan. (v) Terbentuk dan berfungsinya Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat untuk mengefektifkan koordinasi antar sektor.

Untuk pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2008 telah menghasilkan kemajuan yang cukup berarti. Hasil evaluasi pembangunan daerah tertinggal menunjukkan bahwa sebanyak 40 kabupaten (20.1 persen) dari 199 kabupaten yang pada awal pelaksanaan RPJM Nasional dikategorikan sebagai daerah tertinggal berpotensi lepas dari status tertinggal menjadi daerah yang relatif maju dalam skala nasional. Namun seiring dengan maraknya kecenderungan pemekaran daerah, saat ini terdapat 34 kabupaten Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari Daerah Induk yang merupakan daerah tertinggal, sehingga total daerah tertinggal pada tahun 2009 adalah sebanyak 193 Kabupaten. Sedangkan hasil-hasil yang diperkirakan akan dicapai pada tahun 2009 antara lain: (1) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pedesaan di daerah tertinggal; (2) Terbentuknya perkuatan lembaga sosial ekonomi yang ada di daerah tertinggal; (3) Meningkatnya pelayanan sosial dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan); (4) Meningkatnya arus investasi local dan pengembangan sektor swasta di daerah tertinggal; (5) Terciptanya pembangunan kawasan produksi berbasis komoditas unggulan; (6) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal; (7) Terlaksananya pendekatan sinergitas sektoral yang dilakukan secara terkoordinasi melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT)

Selain pengembangan kawasan perbatasan, kawasan strategis dan daerah tertinggal, **kawasan rawan bencana** juga memerlukan perhatian khusus melalui upaya pengurangan resiko bencana. Sejak beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengalami musibah dengan kejadian berbagai jenis bencana alam, sehingga seringkali Indonesia dijuluki sebagai “supermarket bencana”. Hal ini terutama ditunjukkan sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pada bulan Desember 2004, bencana gempa bumi di Kabupaten Alor (NTT) dan Kabupaten Nabire (Papua) pada bulan Februari dan November 2004, bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah bulan Mei 2006, dan tambahan bencana semburan lumpur Sidoarjo, serta bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, serta beberapa bencana lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana seperti membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias sebagai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, membentuk Tim Teknis Nasional pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta mendorong pemerintah provinsi sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah lainnya.

Selain itu, dalam rangka menyikapi kondisi Indonesia yang sangat rawan terhadap bencana tersebut, pemerintah telah merubah paradigma penanganan bencana dari upaya responsif menjadi pengurangan risiko bencana. Karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain dengan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2006-2009. Selanjutnya pemerintah telah mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan

pembangunan, yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 lalu, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, dimana kebijakan pengurangan resiko bencana telah dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional. Kemudian lebih jauh lagi pada RKP 2009, pengurangan resiko bencana telah dimuat secara terintegrasi dengan fokus adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global (*climate change*).

Selanjutnya, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, serta tiga Peraturan Pemerintah turunannya, yaitu: (1) PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; serta (3) PP Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Untuk mengatur kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam hal pengembangan perkotaan, perkembangan perkotaan di Indonesia telah mengalami perubahan didalam pengelolaannya (*urban governance*) semenjak penerapan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001. Terjadi penambahan jumlah kota yang cukup besar yaitu sebanyak 34 kota (semula 64 kota menjadi 98 kota) pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 akibat pembentukan kota-kota baru sebagai daerah otonom baru. Sebagian besar kota otonom baru yang terbentuk adalah kota menengah. Pembangunan kota menengah sangat penting karena kota menengah berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan wilayah dan sebagai kota perantara dari proses produksi di perdesaan dan distribusi hasil produksi di kota besar dan kawasan metropolitan.

Selain itu juga terdapat kecenderungan perubahan evolusi kota-kota besar menjadi kawasan metropolitan, yang disebabkan oleh tingginya urbanisasi ke kawasan perkotaan. Diperkirakan sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan dan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Saat ini terdapat 11 kawasan metropolitan yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur), Gerbangkertosusilo (Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto) Bandung Raya, Kedungsepur (Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi), Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo), Sarbagita (Denpasar-Bangli-Gianyar-Tabanan), Balikpapan -Tenggarong –Samarinda – Bontang, Manado – Bitung, Maminasata (Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros), Pontianak dan sekitarnya, serta Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura. Pengelolaan kawasan-kawasan metropolitan ini tidak saja membutuhkan penanganan dan pengendalian pelayanan publik atau infrastruktur, fasilitas, ekonomi perkotaan, namun juga di bidang penatagunaan lahan, lingkungan hidup, sosial, dan kependudukan. Selain itu juga perlu diwaspadai perkembangan pada kota-kota dengan kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Pada tahun 2008 telah dilakukan usaha-usaha untuk pengendalian kota besar dan kawasan metropolitan. Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2008 adalah penyiapan Kebijakan dan Strategi (Jakstra) penataan ruang pada kota-kota besar dan metropolitan melalui pembaruan data dan informasi penataan ruang pada kota-kota besar dan metropolitan; penyiapan rencana tindak pengembangan kota-kota besar dan metropolitan; pengembangan kawasan permukiman perkotaan melalui penanganan kawasan kumuh berat di kota besar/ kawasan metropolitan di 29 kawasan; pembinaan pengembangan permukiman kawasan metropolitan melalui penyusunan rencana pengembangan

permukiman perkotaan di 32 provinsi; penyiapan RTR kawasan metropolitan; penyusunan NSPM pengembangan kawasan metropolitan; peningkatan kapasitas kelembagaan di kota besar dan kawasan metropolitan; serta mendorong kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan wilayah perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perkotaan Untuk mengembangkan kota kecil menengah, kegiatan yang dilakukan pada tahun 2008 adalah penyiapan kajian, kebijakan, standar, dan rencana tindak termasuk konsep-konsep strategis kawasan/permodelan dalam pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota; pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi, pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta pendampingan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota. Sedangkan, untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota, antara lain: pengkajian dan pengembangan sistem informasi; fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan; penataan lingkungan kawasan perkotaan metropolitan, besar, menengah dan kecil; pengembangan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan melalui penguatan sistem kelembagaan ekonomi di 3 kabupaten; pembangunan sektor perkotaan (USDRP) melalui pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan perkotaan (USDRP) di 5 kota/kabupaten; pembinaan Cipta Karya, penguatan sistem perkotaan nasional, penyusunan, serta pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi.

Sampai dengan tahun 2009, dalam rangka pengendalian kota-kota besar dan metropolitan akan dilakukan penyiapan data dan informasi kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan nasional melalui delineasi kawasan strategis, pengendalian dan pengembalian fungsi kawasan metropolitan dan kota besar melalui peremajaan di 4 kawasan pusat kegiatan perkotaan, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Besar Pekanbaru. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan sektor perkotaan di 8 kota melalui Urban Sector Development Reform Project (USDRP), fasilitasi penguatan sistem perkotaan nasional di 33 ibu kota provinsi, fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan melalui fasilitasi standar pelayanan perkotaan di 11 provinsi, kerjasama kota kembar, kerjasama perkotaan bertetangga di 3 kota metropolitan, evaluasi PSU bermasalah di 10 provinsi, rapat koordinasi di 3 wilayah, dan evaluasi 10 kawasan kumuh perkotaan di 10 provinsi, serta pengembangan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan melalui rencana perbaikan pusat-pusat perekonomian kota (termasuk pasar tradisional) di 10 kota menengah. Sedangkan pada 33 provinsi akan dilakukan pendampingan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah.

Pengembangan kawasan perdesaan juga terus dilakukan. Kawasan perdesaan menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian; termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perdesaan terkonsentrasi sebagai penghasil bahan mentah pertanian, maka kawasan ini dianggap berfungsi sebagai kawasan penghasil, walaupun dapat berkembang menjadi kawasan agroindustri dan kawasan lainnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah perdesaan tersebut. Kawasan perdesaan dapat berkembang menjadi kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mandiri.

Dengan menyadari bahwa 82,31 persen wilayah Indonesia adalah kawasan perdesaan (Podes 2006) atau 73,405 desa dan sebagian besar penduduk miskin masih berada di perdesaan (23,61 juta jiwa dari 37,17 juta jiwa pada tahun 2007) tentunya upaya pembangunan perdesaan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Pembangunan perdesaan terutama ditujukan kepada masyarakat perdesaan yang sebagian besar adalah

petani miskin dan melibatkan program pengembangan yang komprehensif untuk meningkatkan produktifitas dan kondisi kehidupannya. Pembangunan perdesaan tidak dapat dilakukan secara parsial mengingat pembangunan merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan merupakan suatu proses yang dihasilkan dari pemaduan berbagai elemen yaitu tujuan yang didasarkan pada sistem nilai yang ada, sumberdaya (alam maupun manusia), teknologi yang tersedia, dan berbagai bentuk organisasi sosial dan politik. Oleh karena itu, jika salah satu elemen berubah maka keseluruhan sistem akan berubah pula. Pembangunan juga membutuhkan perubahan infrastruktur sosial dan politik, hubungan kemanusiaan, dan khususnya dalam struktur kekuasaan.

Dari berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan infrastruktur di perdesaan, peningkatan akses masyarakat pada lahan, peningkatan ketahanan pangan dan lingkungan hidup bagi masyarakat perdesaan dalam kelembagaan serta pengelolaan dan pegembangan produksi pertanian.

Pada tahun 2008 telah dilakukan usaha-usaha pembangunan perdesaan yang diharapkan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja di perdesaan, terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis *off-farm* dan industri serta jasa berskala kecil dan menengah, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat perdesaan. Pemantapan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta kelembagaan sosial-ekonomi perdesaan dalam mendorong kemajuan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian di perdesaan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal, dalam tahun 2008 telah dibangun sentra pengolahan produksi, fasilitas pergudangan, dan pasar desa. Untuk menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dan non pertanian dengan kawasan perkotaan terdekat telah dibangun dan ditingkatkan jalan perdesaan. Adapun untuk memperlancar arus informasi dan komunikasi di perdesaan disediakan jasa layanan pos di 2.350 kantor pos cabang luar kota melalui program PSO pos, sambungan telpon baru di l0 ribu desa, 37 pusat informasi masyarakat (*community access point*), dan berfungsinya kantor pos sebagai pusat informasi masyarakat.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal di perdesaan, pada tahun 2009 akan ditingkatkan kesiapan aparat kabupaten/kota dan masyarakat dalam mengantisipasi konversi energi bersumber daya alam lokal, berkurangnya lahan kritis melalui peningkatan kelembagaan, supervisi dan monitoring pengembangan desa mandiri energi, serta terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan 180 orang. Untuk meningkatkan usaha ekonomi mikro dan ketahanan ekonomi keluarga rumah tangga miskin serta kelembagaan ekonomi tingkat desa, akan difasilitasi lembaga keuangan perdesaan untuk 16.454 unit di 33 provinsi, terbentuknya jaringan kemitraan antar desa dalam mendukung pemasaran produksi perdesaan di 33 provinsi, terlatihnya usaha ekonomi lokal untuk 12 angkatan, serta terlatihnya para pengelola pasar desa untuk 5 angkatan dan pemberian stimulan 5 desa.

Dalam usaha percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) dilakukan pemberdayaan pada 1.440 kelompok masyarakat di 360 desa tertinggal pada 120 kabupaten. Sedangkan untuk percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal (P4DT) dilakukan pemberdayaan pada 816 kelompok masyarakat di 204 desa tertinggal di 44 kabupaten.

Dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pada tahun 2009 akan dilaksanakan berbagai kelompok kegiatan seperti bimbingan teknis, pelatihan, penyusunan modul pelatihan, pelatihan bagi pelatih dan instruktur Latsitarda Nusantara, orientasi pelaksanaan tugas bagi aparat di daerah, dan sebagainya yang secara rinci adalah sebagai berikut: 1) Bimbingan teknis 12 angkatan, orientasi 7 angkatan, dan pelatihan masyarakat bekerjasama dengan balai pemberdayaan masyarakat di Malang, Yogyakarta dan Lampung; 2) Dalam rangka mengenalkan dan memasyarakatkan penggunaan teknologi tepat guna, secara reguler tiap tahun dilaksanakan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di 33 provinsi, serta pengembangan model pembangunan partisipasi berbasis teknologi pedesaan. Pelatihan dilakukan baik untuk meningkatkan keterampilan 800 orang pembina pos pelayanan teknologi perdesaan maupun 320 orang masyarakat tentang penggunaan teknologi tepat guna; 3) Orientasi bagi pelatih, aparat, fasilitator dan masyarakat di 17 lokasi; 4) Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa, akan diangkat Sekretaris Desa menjadi PNS 22.000 orang, bimbingan teknis peningkatan efektivitas penataan administrasi pemerintahan desa (seperti tata naskah; registrasi administrasi; kearsipan dll) untuk 1.320 orang dan pengelolaan keuangan desa dan alokasi dana desa (600 orang) pengelolaan keuangan desa dan alokasi dana desa (600 orang), sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan tentang pemerintahan desa/kelurahan (1.980 orang), penataan sarana dan prasarana pemerintahan desa (680 orang), dan pelaksanaan *pilot project* pembangunan desa terpadu (17 Desa); 5) Untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi akan dibangun sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat di 1.849 desa; 6) Pelaksanaan PNPM perdesaan di 2.886 kecamatan (BLM dan T/A), PNPM agribisnis (SADI di 4 provinsi). Disamping itu, untuk efektifitas pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat, seperti pelatihan aparat pemerintah daerah dan konsultan pendamping masyarakat di 24 kabupaten, 9 provinsi; 7) Rapat koordinasi nasional dan evaluasi kader pemberdayaan masyarakat di 7 provinsi (mendukung PNPM); serta 8) pelaksanaan unit pengaduan masyarakat terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di 440 kab/kota, dan tertanganinya masalah pengaduan masyarakat yang tersebar di 33 provinsi.

Selain pengembangan di perkotaan dan perdesaan, **keterkaitan antara perkotaan dan perdesaan juga perlu ditingkatkan**. Kondisi keterkaitan ekonomi kota-desa saat ini masih didominasi dengan berbagai permasalahan terkait dengan masih lemahnya pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Hal ini dapat tercermin dari (i) masih kurang kondusifnya iklim

dunia usaha, rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik daerah, rendahnya wawasan pengembangan usaha, serta kemitraan publik dengan dunia usaha sebagai pilar daya saing ekonomi daerah (KPPOD, 2008); (ii) terjadinya penurunan pertumbuhan indusri manufaktur, pada tahun 2004 sebesar 7,2 persen menjadi 4,75 persen pada tahun 2008 (BPS, 2008), akibat rendahnya daya saing produk lokal di pasar domestik yang menyebabkan tingginya konsumsi akan produk impor; (iii) meningkatnya jumlah pekerja informal di sektor pertanian sebesar 20 persen pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2005 akibat menurunnya pertumbuhan industri padat karya yang rata-rata sebesar 20 persen per tahun dan meningkatnya industri berbasis SDA yang rata-rata sebesar 40 persen (BPS, 2007), sementara pengembangan industri berbasis SDA sendiri masih kurang optimal; serta (iv) kurang seimbangnya jumlah kota menengah dibandingkan kota kecil. Berdasarkan data penduduk tahun 2005, dari total 95 kota administratif, sebanyak 12 persen adalah kota kecil, sedangkan kota menengah mencapai 58 persen. Hal ini berakibat pada kurang berperannya kota kecil sebagai penghubung antara desa dengan kota, yaitu sebagai lokasi industri pengolah hasil pertanian yang ada di desa sehingga keterkaitan antara kota-desa belum terjadi secara optimal.

Dalam upaya pengembangan keterkaitan kota-desa, telah dilaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi lokal dan daerah termasuk melalui pembangunan bidang transmigrasi dan agropolitan. Adapun, hasil pencapaian pembangunan bidang transmigrasi pada tahun 2008 antara lain: (i) tersedianya permukiman transmigrasi yang memenuhi persyaratan 2C (Clean and Clear) dan 4L (Layak huni, Layak usaha, Layak berkembang, dan Layak lingkungan) di wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal, serta perbatasan; (ii) pemindahan dan penempatan calon transmigran ke permukiman trasmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal, serta perbatasan, dengan rincian: (a) terbangunnya RTJK sebanyak 6.981 Unit; pembukaan lahan 2.275 Ha, pemindahan 1.451 KK calon transmigran ke permukiman transmigrasi yang dilakukan di 20 Lokasi di 14 Kab di 13 Provinsi di wilayah stratgei da cepat tumbuh; (b) terbangunnya RTJK sebanyak 6.981 Unit dan pembukaan lahan seluas 2.275 Ha, pemindahan 1.451 KK calon transmigran ke permukiman transmigrasi yang dilakukan di 41 Lokasi di 29 Kab di 16 Provinsi di wilayah tertinggal; dan (c) terbangunnya RTJK sebanyak 6.981 Unit , pembukaan lahan seluas 2.275 Ha, dan pemindahan 1.451 KK calon transmigran ke permukiman transmigrasi yang dilakukan di 12 Lokasi di 8 Kab di 5 Provinsi di wilayah perbatasan; (iii) pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di 4 kawasan di 4 kabupaten di 2 provinsi (KTM generasi I) di wilayah tertinggal. Sampai dengan tahun 2009, diperkirakan hasil pencapaian pelaksanaan pembangunan transmigrasi antara lain: (i) terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi sebanyak 52.227 KK yang ada di 227 UPT; (ii) terwujudnya kemandirian dan integrasi masyarakat melalui pengakhiran status bina sebanyak 64 UPT; dan (iii) terwujudnya pembangunan KTM sebanyak 10 kawasan (pelaksanaan untuk 8 kawasan dan persiapan untuk 2 kawasan).

Sedangkan hasil pencapaian bidang pembangunan agropolitan mulai dari 2002 sampai dengan tahun 2008 adalah terfasilitasinya pengembangan prasarana dan sarana pendukung pengembangan desa-desa agropolitan di 180 kawasan yang tersebar di 32 provinsi. Pada tahun 2009 diperkirakan akan mencapai target 215 kawasan agropolitan yang berhasil difasilitasi dari total 238 kawasan pada tahun 2005-2009.

Dalam bidang penataan ruang, sesuai dengan arahan RPJM 2004-2009, pada tahun 2008 telah dicapai beberapa capaian sebagai berikut: a) tersusunnya PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; b) tersusunnya draft 7 Perpres RTR

Pulau, yaitu RTR Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara; c) disahkannya Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diamanatkan dalam PP No. 26 Tahun 2008; d) terlaksananya sosialisasi ke berbagai stakeholders baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN dan Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; e) tersusunnya draft revisi PP 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; f) tersusunnya 5 draft RPP amanat UU No. 26 Tahun 2007 yaitu: (1) RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (2) RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; (3) RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan; (4) RPP tentang Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara dan Penatagunaan SDA lainnya; dan (5) RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat; g) ditetapkannya Permendagri No. 28 tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; h) terselenggaranya forum koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan regional melalui Rapat Koordinasi BKTRN-BKPRD di Gorontalo dan Mataram yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penataan ruang di tingkat pusat dan daerah; i) direvisinya Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), dan j) terbentuknya 22 Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) Provinsi dan 75 BKPRD Kab/Kota.

Perkiraan pencapaian kegiatan pada tahun 2009 adalah: a) disahkannya 33 Perda RTRW Provinsi sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007; b) disahkannya 5 RPP yaitu: (1) RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (2) RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; (3) RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan; (4) RPP tentang Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, dan Penatagunaan Udara; dan (5) RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat; c) disahkannya 7 Perpres RTR Pulau; d) disahkannya 3 Perpres Kawasan Strategis Nasional; e) disahkannya 4 Raperpres Kawasan Strategis Nasional; f) tersusunnya 12 NSPK Penyelenggaraan Penataan Ruang; g) tersedianya peta dasar sebagai basis perencanaan; h) meningkatnya penerapan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif; i) dekonsentrasi kegiatan pembinaan penataan ruang di 32 provinsi; j) diimplementasikannya zoning regulation sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; k) terlaksananya peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi dalam rangka pemantauan evaluasi penataan ruang daerah; l) terwujudnya penegakan RTRW sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral; m) terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang antisipatif terhadap mitigasi bencana; n) penyelesaian konflik pemanfaatan ruang (15 Kasus); o) penguatan koordinasi dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Pusat dan Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKTRN; p) penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; dan q) direvisinya Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) menjadi Keppres No.4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Dalam bidang pengelolaan pertanahan, pada tahun 2008 telah dilakukan peningkatan kinerja pengelolaan pertanahan melalui kegiatan percepatan pendaftaran tanah yang meliputi sertifikasi tanah (Prona, LMPDP) pada 1.051.000 bidang, pembuatan peta dasar pendaftaran tanah (foto udara) pada 500.000 ha, pemasangan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) di 3.072 titik. Disamping itu, untuk memberi akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, telah

diterbitkan sertifikasi tanah untuk kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejumlah 30.000 sertifikat. Selanjutnya, telah dilakukan juga pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) melalui pelaksanaan konsolidasi dan redistribusi tanah sebanyak 310.000 bidang, inventarisasi P4T di 2.000 desa/kelurahan, dan inventarisasi tanah terlantar di 419 kab/kota.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan pertanahan yang optimal telah dilakukan peningkatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dengan merevisi PP No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, peningkatan pelayanan pertanahan melalui penyediaan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) di 124 Kabupaten/Kota, serta penyiapan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pertanahan.

Pada tahun 2009 tetap dilanjutkan upaya akselerasi pelaksanaan pendaftaran tanah serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Total target kegiatan percepatan pendaftaran tanah adalah 1.245.291 bidang tanah, yang dilaksanakan melalui PRONA dan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) sebanyak 1.065.000 bidang, Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS) sebanyak 120.000 bidang, sertifikasi tanah bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 47.500 bidang, bagi petani sebanyak 8.065 bidang, bagi nelayan sebanyak 1.500 bidang, serta bagi peserta Transmigrasi sebanyak 3.226 bidang. Dalam upaya percepatan pendaftaran tanah juga dilakukan pembuatan peta pendaftaran tanah pada 500.000 ha lahan dan pemasangan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) di 3.072 titik.

Kegiatan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) juga tetap dilanjutkan melalui pelaksanaan konsolidasi tanah (di luar DKI) sebanyak 10.000 bidang, redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung Program Pembaharuan Agraria Nasional / PPAN) sebanyak 300.000 bidang, Inventarisasi P4T pada 750.000 bidang, dan pembuatan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT) di 100 kab/kota. Neraca Penatagunaan Tanah merupakan instrumen yang menggambarkan kesesuaian antara penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW.

Upaya-upaya penguatan kapasitas pemerintahan daerah terus dilaksanakan, terutama sejak dimulainya era desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak menghasilkan kemajuan penting, meskipun masih terdapat pula berbagai permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Salah satu kendalanya adalah masih lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, terutama dalam aspek keuangan, aspek kelembagaan, dan aspek sumber daya aparatur pemerintah daerah, serta aspek kerjasama antar pemerintah daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam kerangka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan melalui enam program pembangunan. Program-program tersebut adalah: (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (2) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; (4) Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah; (5) Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; (6) Penataan Daerah Otonom Baru (DOB).

Beberapa pencapaian penting dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada tahun 2008 adalah: (1) telah disusun dan diterbitkannya 5 (lima) Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004, yaitu (i) PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (ii) PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (iii) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan (iv) PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (v) PP No. 45 tentang

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; (2) telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai landasan hukum bagi Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan operasional pemerintahan daerahnya; (3) telah disusun draft RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) telah diterbitkan perubahan terbatas UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 28 April 2008. Selain itu juga telah diterbitkannya beberapa ketentuan teknis diantaranya (1) Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/328/SJ tanggal 11 Februari 2008 perihal Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditujukan kepada Menteri/Kepala LPND Kabinet Indonesia Bersatu, (2) Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD provinsi dan ketua DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia No. 100/344/SJ tanggal 12 Februari 2008 perihal Penetapan Perda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; (3) telah diterbitkannya 4 Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Lingkungan Hidup, SPM Bidang Sosial, SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Sedangkan pengaturan yang berhasil diselesaikan sampai tahap rancangan adalah (1) rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pedoman Persyaratan Jabatan Perangkat Daerah, dan (2) rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.

Beberapa pencapaian penting dalam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada tahun 2008 adalah: (1) meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang menerapkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun kelembagaan pemerintah daerah, (2) tersusunnya Buku Pegangan (Handbook) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2008, (3) telah dimulainya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dasar berdasarkan standar tertentu, (4) tersosialisasikannya PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyampaian permintaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap departemen/LPND sebagai bahan penyusunan Permendagri tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Beberapa pencapaian penting dalam Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah pada tahun 2008 adalah: (1) terselenggaranya penyelenggaraan diklat sebanyak 900 orang dalam 30 angkatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar-lembaga diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional; (2) terselenggaranya berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional; serta (3) terselenggaranya berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional, seperti diklat kepemimpinan pemerintahan daerah sebanyak 210 orang dalam tujuh kegiatan, dan berbagai diklat yang bertujuan untuk menunjang penerapan manajemen SPM sebanyak 630 orang dalam 21 kegiatan.

Beberapa pencapaian penting dalam Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah pada tahun 2008 diantaranya adalah: (1) terbentuknya forum-forum kerjasama antar daerah di bidang pengembangan ekonomi regional dan pelayanan publik; (2) terbentuknya forum-forum kerjasama yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi untuk semua wilayah kabupaten/kota diwilayahnya dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan; (3) terbentuknya forum-forum kerjasama antar kabupaten/kota yang umumnya didasari oleh penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) secara bersama-sama; (4) terbentuknya forum-forum kerjasama dengan pihak ketiga, seperti Kementerian /Lembaga, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pihak swasta yang bergerak di bidang terkait. Beberapa pencapaian penting dalam Program Penataan DOB pada tahun 2008 adalah: (1) telah dilaksanakannya pembangunan sarana dan prasarana kecamatan di 65 daerah kabupaten/kota hasil pemekaran yang meliputi fasilitas kantor, rumah dinas camat, dan aula dinas kecamatan serta telah terselesaikannya beberapa masalah perebutan aset daerah dan kasus batas administrasi daerah di DOB, (2) tersusunnya rancangan awal *grand design* penataan daerah. Beberapa pencapaian penting dalam Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2008, diantaranya adalah: (1) tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Bina Administrasi Keuangan Daerah (SIM BAKD); (2) tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); (3)

meningkatnya penerimaan keuangan pemerintah daerah seiring dengan adanya peningkatan transfer dana perimbangan tiap tahunnya (persentase peningkatan dana perimbangan dari tahun 2007 ke tahun 2008; DAU sebesar 9,1%, DAK sebesar 23%, DBH sebesar 6,7%); (4) telah disusun dan diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (5) telah disusun dan diterbitkannya Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Permendagri No. 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008, Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008; (6) telah dilakukannya evaluasi terhadap 11.401 peraturan daerah (perda) dan 2.150 rancangan perda mengenai pajak dan retribusi daerah, dengan hasil peraturan daerah yang dibatalkan sebanyak 2.398 dan direvisi sebanyak 144, dan Raperda yang dibatalkan sebanyak 267 dan direvisi sebanyak 1.159.

B. Masalah, Tantangan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2010

Pengembangan kawasan strategis nasional untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih menghadapi masalah terkait dengan kewenangan pengelola, profesionalisme sumber daya manusia, pembiayaan, serta kerjasama kelembagaan dan koordinasi, belum optimalnya upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah termasuk daerah tertinggal, masih belum berfungsi sebagai *prime mover* di kawasan maupun bagi wilayah sekitarnya, belum optimalnya upaya peningkatan aktifitas perdagangan internasional atau ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang dan Batam Bintan Karimun. Permasalahan lainnya adalah masih terkendalanya pembangunan kawasan ekonomi khusus sebagai kutub pertumbuhan yang memiliki orientasi bisnis skala internasional (merupakan upaya mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan dan ketimpangan wilayah) oleh berbagai persoalan iklim usaha yang belum kondusif (tenaga kerja, kebijakan yang menghambat pertumbuhan investasi di pusat dan di daerah, regulasi insentif fiskal dan non fiskal belum jelas, pelayanan satu atap, kepastian komitmen jangka panjang pemerintah, kepastian hukum jaminan investasi).

Pengembangan Kawasan Perbatasan pada tahun 2010 masih menghadapi permasalahan yang dapat diklasifikasikan pada beberapa aspek yang penting dan strategi,s yaitu pada a) aspek penetapan batas negara, misalnya belum disepakatinya beberapa segmen batas negara di darat maupun di laut; b) aspek pertahanan dan keamanan, misalnya masih minimnya pelayanan CIQS pada pintu lintas batas, minmnya sarana dan prasarana, maraknya kegiatan ilegal, serta menurunnya wawasan kebangsaan, dan c) aspek pengembangan wilayah, misalnya belum terwujudnya keterpaduan dalam upaya pengelolaan kawasan, degradasi lingkungan hidup, minimnya ketersediaan infrastruktur dasar, rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, penanganan kehidupan sosial budaya yang khas, serta belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan.

Pembangunan Daerah Tertinggal Pada tahun 2010 juga menghadapi permasalahan seperti rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari rendahnya tingkat pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan dan juga rendahnya ketersediaan infrastruktur; belum adanya keselarasan dan keterpaduan diantara pelaku pengembangan daerah tertinggal, yaitu pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah,dan masyarakat serta antara 3 (tiga) level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal; belum optimalnya sikap afirmatif kepada daerah tertinggal dalam aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian; belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan pengembangan potensi ekonomi lokal, terutama dalam hal koordinasi dan kerjasama kelembagaan, baik di pusat maupun di daerah; belum adanya insentif yang memadai bagi para petugas pemerintah dan pelayan masyarakat yang bekerja di daerah

terpencil dan perbatasan; belum optimalnya integrasi pembangunan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan secara sistemik sebagai satu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah; belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan daerah tertinggal; perlunya memperluas pasar dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, salah satunya dengan meningkatkan strategi ekspor; kecenderungan kabupaten-kabupaten tertinggal mengalami pemekaran wilayah menjadi daerah otonom baru (DOB) yang tertinggal.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan dalam pembangunan daerah tertinggal, maka ditetapkanlah **Sasaran Pembanganan Daerah Tertinggal** yaitu Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal yang terintegrasi dan sinergis melalui: terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan di Daerah Tertinggal; terwujudnya penguatan kelembagaan masyarakat dan pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal; terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana dasar air bersih, ekonomi, energi, komunikasi dan infrastruktur penghubung antar daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan; serta terwujudnya upaya pengembangan ekonomi lokal melalui perbaikan iklim investasi, pengembangan sistem informasi keunggulan kawasan, sistem pelayanan publik, dan pengembangan koperasi dan usaha mikro dan kecil.

Tantangan yang dihadapi dalam **pengembangan kawasan rawan bencana** adalah, perubahan paradigma penanganan bencana yang semula terfokus pada penanganan darurat (*response*) menjadi pengurangan risiko bencana (*prevention and preparedness*) seiring dengan dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Besarnya potensi ancaman berbagai jenis bencana alam perlu disikapi dengan peningkatan aspek pengurangan risiko bencana secara keseluruhan dan diperlukan komitmen bersama yang kuat dan sangat jelas dalam menangani kebencanaan di tingkat nasional maupun daerah.

Seperti halnya pembangunan, upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dengan belum memadainya kinerja penanggulangan bencana selama ini; masih rendahnya perhatian terhadap perlunya integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan; rencana tata ruang yang belum berbasis pengurangan risiko bencana dan kurangnya data dan informasi maupun peta wilayah rawan bencana serta belum memadainya sarana dan prasarana sistem deteksi dini bencana alam.

Sasaran yang ingin dicapai pada pembangunan nasional pada tahun 2010 adalah (1) Terkoordinasikannya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional, provinsi dan lokal; (2) Terwujudnya integrasi pengurangan risiko bencana dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global; (3) Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah yang berbasis risiko bencana; (4) Berkurangnya risiko bencana dengan tersedianya sarana dan prasarana sistem deteksi dini kebencanaan, terutama dalam mengimplementasikan sistem deteksi dini bencana alam yang handal sampai di tingkat masyarakat; (5) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di Pusat dan Daerah; (6) Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana; serta (7) Terciptanya budaya keselamatan di masyarakat melalui pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Akar permasalahan **perkotaan** adalah pertumbuhan penduduk yang relatif sangat cepat karena urbanisasi. Urbanisasi selain disumbangkan oleh migrasi penduduk dari desa ke kota serta pertumbuhan penduduk alami, juga disumbangkan oleh terjadinya reklasifikasi wilayah-wilayah yang semula tergolong perdesaan (rural) menjadi wilayah perkotaan (urban) sebagai akibat dari pembangunan dan proses aglomerasi. Adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi ini

dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan internal dan eksternal kota. Kedepan, terkait dengan daya dukung dan daya tampung kota dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, permukiman kumuh, banyaknya penduduk miskin, menurunnya kualitas sarana transportasi dan terjadinya degradasi lingkungan karena peningkatan kapasitas kegiatan ekonomi perkotaan seperti kegiatan industri dan jasa perdagangan. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas/profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan perkotaan dan peningkatan pembiayaan penyediaan PSU.

Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik juga akan menyebabkan memburuknya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan karena belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kota. Permasalahan juga terjadi pada kawasan metropolitan dimana terwujud suatu kawasan metropolitan semu dimana secara kasat mata kota-kota disekitar kawasan metropolitan tersebut memang mengitari kota inti namun tidak ada keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan tersebut dalam satu sistem metropolitan, serta tidak efektifnya bentuk dan lembaga pengelolaan di kawasan metropolitan tersebut.

Keseluruhan permasalahan diatas justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu rendahnya kualitas pelayanan publik perkotaan (terutama pada kawasan metropolitan dan kota besar), terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional, dan lambatnya pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga tidak dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam ‘suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi’ termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya. Selain itu juga penyediaan layanan/prasarana lintas daerah seperti transportasi, air bersih, sewerage dan persampahan yang seringkali tidak dibatasi dalam satu batas administratif daerah otonom tetapi menerus ke wilayah di luar batas administratifnya menyebabkan prasarana kota metropolitan yang lintas daerah sering menimbulkan persoalan dalam perencanaan, pembangunan, pembiayaan dan pengoperasiannya. Masalah ini diperberat dengan belum adanya formulasi mekanisme pengendalian penggunaan lahan yang implementatif.

Sasaran Pembangunan tahun 2010 untuk perkotaan adalah:

1. Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan melalui pelaksanaan kesepakatan Jakstra Pengembangan Perkotaan Nasional sebagai penerapan PP 26/2008 tentang RTRWN dalam hal sistem perkotaan nasional (1 dokumen kebijakan); peremajaan kota (urban renewal) di kawasan kumuh (5 kawasan);
2. Meningkatnya peran dan fungsi kota kecil dan menengah melalui pendampingan penyusunan RPIJM di 32 provinsi;
3. Meningkatnya keterkaitan antar kota melalui pengelolaan pembangunan sektor perkotaan (USDRP) di 11 kota; penyusunan database kota dan kabupaten serta kawasan metropolitan (43 kabupaten/kota), pelaksanaan pemberian penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Award); pelaksanaan inventarisasi dan analisis data di bidang perkotaan (5 kota); pelaksanaan finalisasi dan sosialisasi kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan (7 provinsi); fasilitasi kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga (6 kawasan metropolitan); perumusan rancangan pembentukan lembaga/badan pengelolaan kawasan perkotaan; fasilitasi kerjasama kawasan perkotaan dalam negeri dan luar negeri *(sister city)* (20 kota); fasilitasi jaringan lintas perkotaan (*city sharing)* (10 kota); penyusunan evaluasi penyelenggaran perencanaan di kawasan perkotaan (10 kawasan perkotaan); penyusunan evaluasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah (10 provinsi); penyusunan evaluasi DAK PSU kota (seluruh Indonesia); pelaksanaan sosialisasi kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian IMB dan Pengelolaan Sampah (5 kota); penyusunan Surat Edaran tentang penataan PKL; fasilitasi kelembagaan pengelolaan sanitasi kawasan perkotaan di daerah di 6 kota Indonesia Sanitation Sector Development Program dan 4 kota pengembangan program sanitasi;

fasilitasi dan penyediaan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (10 provinsi); fasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk mendukung program rusuna di kawasan perkotaan (5 provinsi dan 24 kabupaten/kota di Pulau Jawa di kawasan prioritas pembangunan rusuna); penyusunan pedoman penataan batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan non otonom; penyusunan Surat Edaran tentang pedoman pengendalian masalah sosial (gelandangan pengemis, keamanan lingkungan/kriminalitas, kenakalan remaja) dan wabah penyakit di kawasan perkotaan; fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi perkotaan (10 kabupaten/kota) di kawasan perkotaan Gerbangkertosusilo dan Banjarmaskuala).

Pada tahun 2010 **pembangunan perdesaan** masih akan menemui beberapa permasalahan dan tantangan utama. Pertama adalah kurangnya keberdayaan dan kemandirian lembaga dan masyarakat serta kapasitas pemerintah desa sehingga belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang antara lain ditunjukkan dengan (a) belum optimalnya kapasitas aparat kabupaten/kota dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal; (b) kurangnya sumberdaya manusia berkualitas dalam pengembangan dan pelaksanaan teknologi perdesaan juga penerapan inovasi teknologi perdesaan untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sehingga perlu suatu upaya pembangunan terpadu melalui peningkatan peran serta masyarakat; (c) masih rendahnya pelayanan, penguatan dan pemantauan terhadap program pengembangan perekonomian berbasis komunitas. Kedua adalah kurang optimalnya kelembagaan dan peran serta masyarakat di daerah tertinggal. Ketiga adalah kurangnya pemanfaatan lembaga keuangan dan kredit mikro yang dapat memperkuat perekonomian dan modal yang dilihat dari (a) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di perdesaan yang ditandai oleh masih kurangnya akses dan pemanfaatan lembaga keuangan perdesaan seperti lembaga keuangan mikro dan kredit oleh masyarakat desa dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi mikro di perdesaan; (b) kurangnya akses terhadap sarana prasarana pendukung pemasaran produksi dan distribusi barang dan jasa di perdesaan; (c) belum optimalnya pengembangan diversifikasi produk lokal non pertanian sebagai penyangga mata pencaharian bagi masyarakat perdesaan; (d) terbatasnya akses dan pemanfaatan terhadap prasarana dan sarana ekonomi di perdesaan; (e) belum optimalnya hubungan antar daerah untuk bekerjasama menumbuhkan perekonomian masyarakat dalam produksi, pemasaran dan distribusi produk lokal; (f) terbatasnya akses infrasturktur dan transportasi di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan; (g) belum optimalnya fungsi pasar desa karena kondisi fisik yang belum memadai dan kurangnya pemanfaatan teknologi; (h) masih lemahnya tingkat investasi petani dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Keempat adalah masih rendahnya pelayanan infrastruktur di kawasan perdesaan yang ditandai oleh (a) masih kurangnya akses dan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air bersih, air minum, dan permukiman yang layak dan sehat; (b) belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana sumber daya air dalam memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku perdesaan serta pengendalian daya rusak air; (c) rendahnya akses dan pemanfaatan terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan yang terpencil, terisolir, dan perbatasan termasuk sarana dan prasarana transportasi antar pulau kecil; (d) masih rendahnya sarana dan prasarana perdesaan untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan; (e) masih belum memadainya fasilitas sistem ketenagalistrikan, jangkauan penyiaran televisi radio, layanan pos dan telekomunikasi, serta transportasi perdesaan mengingat keterbatasan kemampuan investasi terutama di daerah tertinggal; (f) sulitnya mencari ketersediaan energi primer non BBM yang ekonomis, mudah diperoleh, serta pembangkit yang mudah dikelola. Kelima, masih terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap lahan ditandai oleh (a) masyarakat perdesaan sebagian besar merupakan petani penggarap bukan pemilik lahan sehingga pendapatan yang diterima dari usaha pertanian lebih rendah dibandingkan pemilik lahan; (b) masih rendahnya tingkat sertifikasi tanah yang berakibat pada terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap modal; (c) dan masih tingginya konflik pertanahan akibat aturan hukum yang mengatur pengelolaan pertanahan belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum.

Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka pada tahun 2010 sasaran pembangunan perdesaan adalah :

1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, dilihat dari :
   a. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah; kelembagaan dan organisasi masyarakat perdesaan;
   b. terselenggaranya diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
   c. terfasilitasinya masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi perdesaan;
   d. terfasilitasinya penguatan kelembagaan sosial ekonomi; pemantauan serta peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan termasuk di daerah terisolasi dan tertinggal.
2. Meningkatnya produktivitas pertanian di perdesaan dalam mendukung peningkatan pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian serta peningkatan kegiatan produksi pertanian pasca panen dan pemasaran komoditas pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri perdesaan.
3. Meningkatnya akses masyarakat desa pada lahan.
4. Meningkatnya pelayanan infrastruktur di perdesaan yang ditandai antara lain oleh:
   a. meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi;
   b. meningkatnya ketersediaan air baku, air bersih dan terkelolanya air tanah untuk air minum di perdesaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
   c. meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi partisipatif;
   d. tersedianya sarana prasarana telekomunikasi, komunikasi dan kelistrikan di wilayah terpencil, tertinggal dan perbatasan sehingga potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah dapat berkembang.
5. Berkembangnya usaha ekonomi lokal dan daya saing daerah, dilihat dari :
   a. berkembangnya diversifikasi ekonomi perdesaan;
   b. meningkatnya peran lembaga keuangan dalam meningkatkan perekonomian perdesaan;
   c. berkembangnya diseminasi teknologi tepat guna;
   d. berkembangnya pasar lokal;
   e. berkembangnya kemandirian usaha kecil dan menengah;
   f. berkembangnya promosi ekonomi daerah dan sarana prasarana perekonomian daerah.

Dalam rangka **pengembangan ekonomi lokal dan daerah**, pembangunan bidang transmigrasi dan agropolitan yang telah dilaksanakan sampai saat ini masih belum mampu menangani isu-isu pengembangan ekonomi lokal, terkait dengan upaya pengembangan keterkaitan kota-desa, seperti: (1) masih kurangnya orientasi pembangunan transmigrasi dan agropolitan kepada sumberdaya lokal, sumber daya manusia, dan kelembagaan lokal; (2) masih terbatasnya akses masyarakat di wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan terhadap akses pelayanan publik; (3) belum efektifnya pengembangan keterkaitan antar wilayah berdasarkan rantai produksi akibat belum efektifnya pembangunan transmigrasi dan agropolitan di wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam memberikan pengaruh positif bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya; (4) masih lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial, yaitu antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang (perdagangan, perbankan, dan swasta), sehingga belum optimalnya; (5) belum optimalnya kerjasama antar daerah untuk peningkatan promosi investasi, proses produksi dan pemasaran daerah (*regional marketing*) akibat masih belum terbentuknya pola koordinasi, kerjasama, serta sinkronisasi kebijakan pengembangan wilayah yang harmonis antarsektor dan antarwilayah; (6) masih kurangnya inisiatif daerah secara partisipatif dengan pendekatan pengembangan bisnis; (7) kurang optimalnya pelibatan seluruh stakeholder, dunia usaha, dan pemerintah daerah, dalam sistem perencanaan dan penganggaran akibat masih rendahnya kualitas sumber daya masyarakat, serta peran dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan kelembagaan ekonomi di daerah; serta (8) belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan untuk menuju kemandirian dan keberlanjutan pembangunan transmigrasi dan agropolitan di daerah.

Dalam upaya pengembangan keterkaitan kota-desa, sasaran pengembangan ekonomi lokal dan daerah pada tahun 2010, melalui pembangunan transmigrasi dan agropolitan, antara lain:

a. Fisik yaitu terbangunnya sistem pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan sekitar melalui: 1) pembangunan penempatan transmigrasi baru (PTB) di sekitar pusat pertumbuhan serta 2) pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang berorientasi pada sistem pusat kawasan sekitar yang berbasiskan produk unggulan; terbangunnya pusat pertumbuhan yang baru melalui pembangunan kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terbangunnya prasarana dan sarana pendukung kawasan permukiman transmigrasi dan kawasan agropolitan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi dan kawasan agropolitan.
b. Ekonomi yaitu terlaksananya pemilihan lokasi yang sesuai dengan kompetensinya dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigran untuk mewujudkan daya saing kawasan transmigrasi; meningkatnya produksi hasil pertanian, yang berdaya saing tinggi dan diminati pasar; meningkatnya nilai tambah atas produk hasil pertanian, dari semula hanya berbentuk produk primer menjadi produk olahan, baik *intermediate product* mapun *final product*; tercapainya mata rantai tata niaga perdagangan hasil pertanian, mulai dari input produksi sampai ke sentra pemasaran output akhir (*outlet*) sebagai upaya untuk menunjang pemasaran hasil pertanian.
c. Sosial dan SDM yaitu terciptanya integrasi sosial dan kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi; meningkatnya peran dan kapasitas SDM masyarakat transmigrasi dan pemerintah daerah di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; meningkatnya penelitian pengembangan dan informasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan transmigrasi; terfasilitasnya layak serah pembinaan dan pemberdayaan lokasi transmigrasi kepada pemerintah daerah di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Permasalahan pada bidang **penataan ruang** dari aspek peraturan perundangan adalah: a) Belum lengkapnya peraturan perundangan dan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) di bidang penataan ruang menyebabkan penataan ruang sulit diimplementasikan di lapangan; b) Rencana Tata Ruang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan; c) Rencana Tata Ruang belum dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang; d) Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi antar produk perencanaan tata ruang; dan e) Masih lemahnya kepastian hukum di dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan dari aspek kelembagaan permasalahan yang terjadi adalah: a) belum memadainya kapasitas kelembagaan dikarenakan kurangnya kualitas SDM; b) terjadinya konflik kelembagaan di dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang yang bersifat makro dan mikro; dan c) sulitnya membangun kesepakatan sehingga rencana tata ruang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.

Dari aspek sistem informasi permasalahan yang terjadi adalah masih lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan masih rendahnya kualitas rencana tata ruang ruang yang disebabkan oleh keterbatasan informasi (peta, data geologi dan data daya dukung) mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.

Dalam upaya menangani permasalahan tata ruang, maka sasaran pembangunan tahun 2010 bidang tata ruang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Rencana Tata Ruang yang mengakomodasi mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan melalui percepatan penyelesaian peta dasar dan koordinasi antar institusi penyedia peta, pemantapan sistem informasi yang terpadu, dan pemantapan proses konsultasi substansi teknis dan evaluasi penyusunan RTRW

2. Meningkatnya pemahaman seluruh stakeholders akan penataan ruang melalui sosialisasi, peningkatan peran serta masyarakat dan terbentuknya mekanisme integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
3. Meningkatnya koordinasi Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui pembentukan kelembagaan terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada tahun 2010, permasalahan utama dalam **pengelolaan pertanahan** adalah masih terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat. Berdasarkan data BPN, sekitar 62-87 persen aset ekonomi nasional yang meliputi tanah, tambak, kebun dan properti, hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia. Di sisi lain, rata-rata penguasaan tanah di Jawa saat ini diperkirakan hanya mencapai 0,2 ha per rumah tangga pertanian. Pada tahun 2006, 56,5 persen rumah tangga petani rata-rata hanya menguasai kurang dari 0,5 ha tanah. Sedangkan sebanyak ± 40 persen rumah tangga petani tidak memiliki tanah (*landless*) dan hanya berperan sebagai buruh tani, akibatnya produktivitas dan kesejahteraan petani kian menurun. Ironisnya, mencatat luas tanah terlantar seluas 13,8 juta ha.

Permasalahan lain yang harus diatasi adalah masih rendahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang menyebabkan kurang terlindunginya hak-hak masyarakat atas tanah. Salah satu indikator adalah masih rendahnya tingkat sertifikasi tanah di Indonesia, yang saat ini baru mencapai ± 41 persen dari perkiraan total 85 juta bidang tanah yang ada. Rendahnya jaminan kepastian hukum turut berdampak pada terbatasnya akses kelompok miskin terhadap permodalan (*collateral*) sampai kepada hilangnya sumber daya yang dimiliki. Rendahnya jaminan kepastian hukum ini terutama disebabkan oleh belum memadainya kapasitas kelembagaan pertanahan. Peraturan-perundangan / regulasi yang terkait pertanahan masih belum sinkron satu sama lain. Disamping itu, masih banyak kantor-kantor pertanahan di daerah yang kondisinya jauh dari memadai, dengan kapasitas dan kualitas penyimpanan data /arsip pertanahan yang sangat rendah dan kurang terjamin keamanannya. Ketersediaan peta pertanahan yang saat ini baru mencapai ± 5 persen dari total 188,99 juta ha wilayah Indonesia, selain menghambat percepatan pendaftaran juga turut menyebabkan kurang kuatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah serta adanya ketimpangan dalam P4T menyebabkan banyak terjadinya konflik dan sengketa tanah. Konflik tersebut terjadi antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, antar instansi pemerintah, maupun diantara masyarakat itu sendiri. Untuk itu, dibentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang diharapkan turut membantu mereduksi konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan peraturan perundangan untuk mengurangi potensi sengketa dan mengatasi hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.

Tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2010 adalah perlunya melanjutkan akselerasi pendaftaran tanah dengan ekspektasi pada akhir RPJM 2010-2014 sekitar 55,25 juta bidang atau 65 persen dari total bidang tanah di Indonesia telah disertifikasi. Akselerasi pendaftaran tanah sangat ditentukan oleh: ketersediaan peta dasar, kapasitas SDM serta kelayakan kantor pelayanan dan informasi pertanahan. Oleh karenanya diperlukan akselerasi penyediaan peta pertanahan dengan sasaran akan mencakup 60 persen dari total seluruh wilayah Indonesia pada akhir RPJMN 2010-2014. Tantangan utama lainnya adalah mengurangi ketimpangan penguasaan/ pemilikan tanah. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, direncanakan pada tahun 2010 dapat diredistribusi tanah sejumlah 200.000 bidang.

Dalam upaya menangani permasalahan pertanahan, maka sasaran pembangunan tahun 2010 bidang pertanahan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya percepatan pendaftaran tanah, termasuk akses masyarakat miskin terhadap pemilikan sertifikat dan sumber permodalan.
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pertanahan serta kapasitas SDM yang memadai.
3. Berkurangnya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW).

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya **penguatan kapasitas pemerintahan daerah** terkait Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah, adalah: (1) ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (2) belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena belum tersusun dan tersosialisasikannya peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah tersebut.

Beberapa permasalahan dalam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah adalah: (1) belum diterbitkanya SPM pada seluruh bidang pemerintahan (sampai akhir tahun 2008, baru 4 SPM yang telah diterbitkan, yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Sosial, dan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota); (2) belum optimalnya skema penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan; (3) masih ditemukannya beberapa kelemahan dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung; dan (4) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dapat dilakukan secara optimal karena belum tersusunnya peraturan pelaksana dari PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Beberapa permasalahan dalam Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah antara lain adalah: (1) kemampuan aparat pemda yang belum memadai, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi, keamanan dan ketertiban (tramtib), serta perlindungan masyarakat (linmas); (2) belum tersusunnya norma, standar, prosedur, dan pedoman sistem karier, sistem cuti, sistem asuransi, sistem remunerasi, serta pengelolaan aparatur pemerintah daerah; (3) belum tersusunnya standar kompetensi dalam pola karier dan mutasi; serta (4) belum efektifnya manajemen aparatur pemda, khususnya di dalam penataan jabatan negeri dan negara serta jabatan fungsional dan struktural berdasarkan kompetensi dan keahliannya.

Beberapa permasalahan dalam Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah antara lain adalah: (1) belum optimalnya kerja sama antar pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan penyediaan pelayanan publik dasar; (2) belum tersosialisasinya dengan baik PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah yang diharapkan menjadi payung regulasi penting dalam mendorong sinergi dan integrasi perda yang mengatur kebijakan pengembangan kerja sama antardaerah; (3) belum ada format ideal dan instrumen kerja sama yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; (4) belum ada insentif untuk mendorong daerah dalam melakukan kerja sama; serta (5) rendahnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya oleh pemerintah daerah yang potensial untuk dikerjasamakan.

Beberapa permasalahan dalam Program Penataan DOB, antara lain adalah: (1) belum optimalnya peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di dalam proses pembentukan dan pembangunan daerah otonom baru, (2) sistem proses pengusulan pembentukan daerah otonom baru yang belum baik, (3) sekitar 80% DOB yang sudah terbentuk selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang masih rendah, khususnya untuk aspek perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan

kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan; serta (4) masih adanya kasus sengketa aset antara daerah pemekaran dengan daerah induk.

Beberapa permasalahan dalam Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah antara lain adalah: (1) peningkatan jumlah dan jenis pajak serta retribusi daerah mendorong biaya transaksi ekonomi tinggi; (2) banyak daerah yang belum sepenuhnya melakukan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (3) masih rendahnya jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan termasuk akuntansi dan juga keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi menjadi kendala dalam proses peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah; (4) banyak BUMD yang belum dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bahkan membebani APBD; (5) belum optimalnya manajemen dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah; dan (6) belum optimalnya kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Sasaran pembangunan Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Daerah pada tahun 2010, adalah:

1. Tertatanya peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan antara peraturan daerah (perda), peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan peraturan sektor.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mendukung penerapan SPM di daerah.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama antardaerah di bidang ekonomi, pelayanan publik dan prasarana dasar.
5. Tertatanya sistem pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan keuangan.
6. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan **wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh** didorong untuk dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan berinvestasi di daerah. Untuk mendukung prioritas pembangunan kawasan strategis nasional tahun 2010 diarahkan untuk melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di KEK, KPBPB dan KAPET, melalui penyelesaian UU KEK dan Peraturan operasionalnya; meningkatkan kejelasan aturan perlakuan khusus di bidang insentif fiskal (perpajakan dan kepabeanan); serta meningkatkan kejelasan dukungan dan aturan khusus (NSPM) di bidang infrastruktur;
2. Pengembangan kawasan berbasis kompetensi sumber daya lokal untuk peningkatan dayasaing produk melalui pemanfaatan teknologi dan pengetahuan untuk pengembangan inovasi; pengembangan jaringan pemasarandan aksess terhadap permodalan;

3. Meningkatkan peran dan kerjasama antar sektor dan antar daerah untuk mendukung pengembangan KEK, KPBPB dan KAPET;

4. Percepatan pembangunan infrastruktur di KEK, KPBPB dan KAPET.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perbatasan menjadi *outward looking* maka Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (PP No.26/2008) menjadikan **kawasan perbatasan** sebagai kawasan strategis nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk menjadikan kawasan perbatasan terjadi pertumbuhan maka kota di kawasan perbatasan darahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Dengan demikian, arahan pengembangan kawasan perbatasan diprioritaskan pada:

1. Penyelesaian penetapan dan penegasan batas negara, meliputi:
   a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan, meliputi pengembangan PKSN, sistem hubungan ekonomi, penerapan USO dan PSO;
   b. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan, meliputi pelayanan sosial dasar, pemberdayaan ekonomi dan sarana-prasarana;
2. Peningkatan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi antara kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga;
3. Pemeliharaan kelestarian lingkungan kawasan perbatasan;
4. Peningkatan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum kawasan perbatasan, meliputi: peningkatan kemampuan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan; peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan Keamanan (CIQS) pada Pos Lintas Batas (PLB);
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan perbatasan.

Arah kebijakan percepatan **pembangunan daerah tertinggal dan terisolir** meliputi: (a) pembangunan sumberdaya manusia disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam lokal dan sesuai dengan standar industri, untuk meminimalkan atau menghilangkan konflik antara masyarakat lokal dengan indsutri; (b) setiap daerah harus menentukan sektor unggulan; (c) pengembangan komoditas unggulan secara terfokus; (d) pemberian insentif fisik dan nonfisik bagi pengembangan sektor/komoditas unggulan, diantaranya berupa keringanan pajak dan retribusi, pembangunan prasarana dan sarana, kemudahan perijinan, dan kepastian hukum; (e) pembangunan industri berbasis sumberdaya alam; (f) meningkatkan produktivitas untuk menciptakan daya saing daerah; dan (g) membangun alur pasar yang jelas, terutama UKM, melalui perantara perusahaan besar.

Program-program yang mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal antara lain :

1. Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal antara lain;
   a. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
   b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
   c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal
   a. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
   c. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.
3. Pengembangan infrastruktur air bersih, ekonomi, energi, komunikasi dan infrastruktur penghubung antar daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan;
   a. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP;
   b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
   c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan.

4. Pengembangan Ekonomi Lokal;
   a. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro;
   b. Program Pengembangan Ekonomi Lokal.

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal diarahkan pada aspek-aspek 1) Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal; 2) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal; 3) Pengembangan infrastruktur air bersih, ekonomi, energi, komunikasi dan infrastruktur penghubung antar daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan; 4) Pengembangan Ekonomi Lokal.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian **bencana** beserta tantangan dan permasalahannya di tahun 2010, kebijakan penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana diprioritaskan pada upaya-upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, yang meliputi diantaranya:
   a. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui penyusunan kebijakan pengendalian linkungan;
   b. Pengembangan kerangka peraturan sesuai mandat UU No 24/ 2007 sebagai dasar pedoman pelaksanaan penanggulanan bencana dan khususnya pengurangan risiko bencana;
   c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memformulasikan dan menyusun peraturan daerah terkait aspek penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
   d. Peningkatan dukungan kepada pusat dan daerah dalam memformulasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), serta mendorong agar rencana tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
2. Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana, yang meliputi diantaranya:
   a. Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi kebencanaan;
   b. Penguatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Upaya Pengendalian Penataan Ruang di Pusat dan Daerah;
   c. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan;
   d. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan bahaya kebakaran;
   e. Pemetaan kawasan rawan bencana dan koordinasi penataan ruang di pusat dan daerah;
   f. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.
3. Peningkatan Pendidikan Kebencanaan dan Penyadaran Masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana, yang meliputi diantaranya:
   a. Pengembangan strategi integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam pendidikan sekolah, baik ke dalam kurikulum formal, muatan lokal maupun ekstra kurikulum;

b. Penguatan kepada kementerian/lembaga terkait dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mengembangkan pendidikan kebencanaan di madrasah, pesantren dan sekolah-sekolah keagamaan lainnya;
c. Peningkatan peran media dan kementerian/lembaga terkait dalam memberikan informasi guna peningkatan penyadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana.

4. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana, yang meliputi diantaranya:
   a. Perluasan akses bagi penyelengggaraan penguatan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana;
   b. Pemberdayaan komunitas di tingkat lokal untuk tetap mengedepankan kearifan local (*local wisdom*) dalam mengimplementasikan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
   c. Mitigasi peringatan dini dan tanggap darurat bencana geologi dan meteorology;
   d. Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana dan penanggulangan pascabencana alam dan bencana sosial.

Untuk **bidang perkotaan,** arah kebijakannya adalah mengubah paradigma pembangunan perkotaan dengan melihat kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah. Dengan melihat kota sebagai kesatuan ini, maka kota harus dilihat dari dua sisi, yaitu kota sebagai "mesin" pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang nyaman, layak huni dan berkelanjutan. Mengembangkan kota sebagai mesin pertumbuhan nasional dan regional dapat dilakukan melalui upaya-upaya seperti peningkatan daya saing kawasan perkotaan, pengembangan dan pengoptimalan peran kota kecil dan menengah sebagai pendukung ekonomi perdesaan, peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan perkotaan (Keterkaitan antar kota), peningkatan manajemen perkotaan di kawasan metropolitan serta peningkatan fungsi koordinasi lintas wilayah dan lintas sektoral serta peningkatan dan revitalisasi peran dan fungsi kawasan metropolitan. Sedangkan untuk mengembangkan kota sebagai tempat tinggal yang nyaman, layak huni dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui upaya-upaya seperti peningkatan pelayanan perkotaan, pengendalian pertumbuhan penduduk kota-kota besar dan kawasan metropolitan (tidak hanya dengan mengendalikan kelahiran tetapi juga dengan mengembangkan kota kecil dan menengah untuk mencegah migrasi masuk ke kota besar dan kawasan metropolitan, *Development capacity* pembangunan berkelanjutan kawasan metropolitan, serta peningkatan penataan ruang kawasan metropolitan. Untuk mendukung prioritas pembangunan perkotaan tahun 2010 diarahkan untuk melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Perkotaan
   a. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi melalui Penyusunan Data dan Informasi peran masing-masing kota PKN, PKW, PKL dam PKSN dalam sistem perkotaan nasional
2. Pengembangan Badan Kerjasama Antar Kota
   a. Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan
3. Penyusunan Pedoman, Rencana dan Evaluasi Pedoman Pembangunan Kota /Antar Kota
   a. Penataan Lingkungan Kawasan Perkotaan Metropolitan, Besar, Menengah dan Kecil.
4. Pengembangan Sistem Kelembagaan Ekonomi Perkotaan
   a. Pengembangan dan Revitalisasi Sistem Kelembagaan Ekonomi Perkotaan
5. Pengembangan Infrastruktur Kota
   a. Pembangunan Sektor Perkotaan (USDRP)
6. Pengembangan Ekonomi Kota Kecil dan Menengah
   a. Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota
7. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Kota Besar dan Metropolitan
   a. Penyiapan Jakstra Penataan Ruang pada Kota-kota Besar dan Metropolitan

8. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Pedoman Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Kawasan Metropolitan
    a. Pengendalian dan Pengembalian Fungsi Kawasan Metropolitan dan Kota Besar melalui peremajaan *(urban renewal)* di kawasan strategis perkotaan (pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan).

Pembangunan perdesaan perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat perdesaan melalui upaya penguatan lembaga masyarakat dan kelembagaan pemerintah desa serta fasilitasi lainnya seperti (a) upaya peningkatan kapasitas dan kemudahan dalam pemanfaatan lembaga keuangan terkait bantuan permodalan, meningkatkan kemampuan ekonomi lokal dengan mengelola sumberdaya lokal sehingga tercipta keterkaitan perekonomian antar wilayah; (b) meningkatnya produktivitas dan produksi sehingga tercipta daya saing produk hasil pertanian dan non pertanian baik secara lokal, nasional maupun asing; (c) menguatnya kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan; (d) meningkatkan ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (e) meningkatkan akses masyarakat perdesaan pada lahan; serta (f) meningkatkan pelayanan infrastruktur di desa.

Berbagai kegiatan pembangunan diupayakan melalui pendekatan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal, masyarakat secara sadar dapat mengupayakan sendiri pemenuhan haknya dan dapat meningkatkan kemandiriannya. Peningkatan ekonomi lokal bagi masyarakat perdesaan berperan penting dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku ekonomi sehingga pengelolaan sumberdaya lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat memberikan peluang baik dan dampak positif terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan dalam pembangunan perdesaan tersebut dijabarkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, akan dilakukan berbagai upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan seperti (a) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam pengelolaan sumber daya lokal; (b) pemantapan kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa; (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia/SDM masyarakat melalui peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan dengan mencetak kader – kader pemberdayaan masyarakat, dan (d) penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat;
2. Dalam rangka pengembangan wilayah tertinggal, dilakukan berbagai upaya seperti (a) penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dengan melakukan penerapan teknologi tepat guna; dan (b) penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dan perbaikan infrastruktur perdesaan;
3. Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan melalui peningkatan ekonomi lokal akan dilakukan upaya – upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan melakukan (a) fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan bagi aparat dan dan masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan bidang ekonomi masyarakat; (b) pembinaan lembaga keuangan perdesaan, penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan; (c) koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal; (d) pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan; (e) percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal; (f) percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal; (g) fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah; serta (h) fasilitasi pengembangan promosi ekonomi daerah dan sarana dan prasarana perekonomian daerah. Peningkatan ekonomi lokal juga diusahakan dengan berbagai upaya, diantaranya (a) pengembangan agribisnis, agroindustri pada daerah tertentu yang memiliki potensi melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian serta (b) melakukan pengembangan ekonomi lokal di daerah pesisir berupa pengelolaan sumber daya perikanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir;

4. Untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan, akan dilakukan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam peningkatan nilai tambah pertanian, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal;
5. Dalam peningkatan akses masyarakat perdesaan pada lahan akan dilakukan penertiban secara legal terkait pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk didalamnya redistribusi tanah, percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah;
6. Dalam peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) di wilayah perdesaan, akan dilakukan peningkatan infrastruktur perdesaan skala komunitas berupa rehabilitasi dan pembangunan jalan, pengadaan sarana angkutan transportasi perdesaan; pengembangan prasarana dan sarana agropolitan, percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan di daerah tertinggal, pembangunan/peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa, serta peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif; rehabilitasi; operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.
7. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di perdesaan akan dilakukan melaui pembangunan/peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan, pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan, saluran pembawa dan tampungan air baku. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, komunikasi dan kelistrikan yang merupakan kebutuhan dasar sangat menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat perdesaan.

Dalam mendukung upaya **pengembangan keterkaitan kota-desa**, arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah didorong untuk (i) mendukung pengembangan keterkaitan ekonomi perkotaan dan perdesaan dengan menggunakan pendekatan komprehensivitas pembangunan ekonomi lokal maupun daerah, yaitu : (a) berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal (*locality*); (b) dilakukan sebagai insiatif daerah secara partisipatif dengan pendekatan pengembangan bisnis; (c) melibatkan seluruh stakeholder, dunia usaha dan pemerintah daerah, dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar tercapai keberlanjutan; (d) dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah melalui komoditi unggulan yang berorientasi pasar, berbasis sumber daya alam dan pengetahuan; (e) melibatkan kerjasama antar daerah untuk peningkatan promosi investasi, proses produksi dan wilayah pemasaran; (f) membutuhkan pendampingan dan fasilitasi menuju kemandirian dan keberlanjutan pembangunan; serta (ii) mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan mengutamakan keterkaitan antar wilayah, baik antara perkotaan dan perdesaan, maupun antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*/ tertinggal/ perbatasan) dalam bentuk keterkaitan fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, sosial, penyediaan pelayanan, serta organisasional, administrasi dan politik.

Untuk mendukung prioritas pengembangan keterkaitan kota-desa pada tahun 2010, pengembangan ekonomi lokal dan daerah, melalui pembangunan bidang transmigrasi dan agropolitan, diarahkan untuk melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan keterlibatan stakeholder lokal dalam pengembangan ekonomi lokal:
   a. Meningkatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di daerah dalam upaya pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh.
2. Peningkatan keterkaitan antar daerah/ wilayah dan rantai produksi:
   a. Mengembangkan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh;
   b. Mengembangkan kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh;
   c. Mengembangkan prasarana dan sarana desa agropolitan.
3. Peningkatan pendampingan dan fasilitasi dalam pengembangan ekonomi lokal:
   a. Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi bagi Pemda dalam upaya pengakhiran status bina permukiman lokasi transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh.

4. Peningkatan kapasitas stakeholder lokal dalam pengembangan ekonomi lokal:
   a. Menyelenggarakan penyediaan tanah bagi masyarakat transmigran sebagai areal bermukim dan berproduksi/berusaha di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh;
   b. Meningkatkan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat transmigrasi dalam mengelola kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh;
   c. Membangun permukiman bagi masyarakat transmigran di kawasan transmigrasi yang ada di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh;
   d. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Arah kebijakan prioritas bidang **tata ruang** dalam mencapai sasaran meliputi (1) Peningkatan kualitas implementasi rencana tata ruang, (2) Pemantapan struktur dan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah, (3) Penyelesaian peta dasar dan sistem informasi data spasial dalam upaya mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, dan (4) Peningkatan sosialisasi dan informasi peraturan perundangan mengenai penataan ruang.

Arah kebijakan pembangunan dalam bidang **pertanahan** adalah: (1) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, termasuk mengembangkan strategi percepatan pendaftaran tanah; (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanahan melalui (a) Penyediaan infrastruktur pertanahan yang memadai (sistem informasi, peta, kantor pertanahan), (b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan (sektoral, pusat, dan daerah), (c) Peningkatan kapasitas SDM; (3) Menata struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui: (a) Penyediaan informasi spasial untuk pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*land use monitoring system*), (b) Redistribusi tanah, khususnya bagi petani dan masyarakat perdesaan (*asset reform*), (c) Fasilitasi penyediaan instrumen, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan redistribusi tanah dan sertifikasi lintas kementerian/lembaga (*access reform*).

Untuk mencapai sasaran tahun 2010 sub bidang **penguatan kapasitas pemerintahan daerah**, arah kebijakan yang akan dilakukan adalah :

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi dan otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan daerah dan peraturan sektor baik secara horizontal maupun vertikal.
2. Penyusunan dan penyelarasan peraturan-peraturan pelaksana dari UU hasil revisi UU No.32 Tahun 2004.
3. Peningkatan kualitas penyusunan peraturan daerah.
4. Penyusunan dan pelaksanaan penerapan SPM pada beberapa bidang.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.
6. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah melalui pemanfaatan model-model kerjasama dalam bidang ekonomi, pelayanan publik dan prasarana dasar.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Bina Administrasi Keuangan Daerah (SIM BAKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui penataan kelembagaan sesuai dengan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Meningkatkan dukungan dan peningkatan kapasitas DOB dalam rangka percepatan pembangunan.

D. MATRIKS (TERLAMPIR)

I. SUB-BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
II. SUB-BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
III. SUB-BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
IV. SUB-BIDANG PENGURANGAN RISIKO KAWASAN RAWAN BENCANA
V. SUB BIDANG PERKOTAAN
VI. SUB BIDANG PERDESAAN
VII. SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH (KETERKAITAN KOTA-DESA)
VIII. SUB BIDANG TATA RUANG
IX. SUB BIDANG PERTANAHAN
X. SUB BIDANG PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

D. MATRIKS BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS SUB-BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
FOKUS PRIORITAS BIDANG: PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL						
	4766	Strategi kebijakan percepatan pengembangan KEK	2 (dua) Rumusan kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 5 lap. Pemantauan, 5 Lap. sosialisasi	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kemenko Perekonomian	11,0
	3575	Pengembangan Sarana dan prasarana	17 paket	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. Nakertrans	23,6
	3582	Penyediaan Tanah Transmigrasi	1.936 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. Nakertrans	6,08

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	3610	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1.936 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. Nakertrans	80,8
	3614	Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan trans	1.936 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. Nakertrans	36,4
	3630	Fasilitasi pengakhiran status bina permukiman lokasi transmigrasi	10 UPT	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. Nakertrans	16,7
	3586	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi	14.160 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. Nakertrans	42,5
	3628	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	10 Paket	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Dep. Nakertrans	51,8

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	3571	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat Transmigrasi	14.160 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dep. Nakertrans	67,2
	0823	Pengembangan kebijakan strategi, rencana, standar, dan kriteria serta sistem informasi pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya.	Tersusunnya kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus di 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas [KPBPB], 2 Kawasan Ekonomi Khusus [KEK], 13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu [KAPET], termasuk penyusunan Rencana Tindak dan Rencana Bisnis Kawasan	Program Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh	Depdagri	10,0
	4561	Pembinaan Pengembangan Permukiman di wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya infrastruktur dasar permukiman di kawasan KPBPB, dan KAPET di 9 kawasan	Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Ditjen Cipta Karya, Dep. PU	13,7

PRIORITAS SUB-BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
FOKUS PRIORITAS SUB-BIDANG: PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN						
	0792	Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas	(1) Terfasilitasinya pembangunan/peningkatan PLB di Aruk, Jagoibabang (Bengkayang), Nunukan (Sebatik), Entikong, Kapuas Hulu ; (2) Terbitnya 3 PP Perubahan nama Kab/Kota dan persiapan pembangunan sarana prasarana di perbatasan Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sangau, Nunukan dan beberapa PLB yang dianggap krusial untuk dipersiapkan (5 daerah)	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depdagri	16,0
	0792	Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas	Kegiatan survei dan pengadministrasian hasil survei batas darat di 3 kawasan [Kalimantan, Papua, dan NTT]; Tersusunnya buku kompilasi dokumen perjanjian batas; Terfasilitasinya forum perundingan dan kerjasama sosial ekonomi dengan 3 negara tetangga; Terlaksananya fasilitasi sosialisasi wawasan kebangsaan bagi masyarakat kecamatan perbatasan di 34 kab/kota; Terfasilitasinya pembangunan/peningkatan prasarana	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depdagri	34,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
			pemerintahan umum kecamatan perbatasan [kantor camat, gedung pertemuan warga,dll] di 34 kab/kota; Tersusunnya konsep pembentukan dan landasan hukum badan pengelolaan perbatasan di 34 kab/kota dan 12 propinsi			
	7111	Pemetaan Batas Wilayah	Kajian dan pemetaan batas wilayah negara RI-Malaysia, RI-PNG dan RI-RDTL; Kajian dan pemetaan batas maritim Indonesia RI-Malaysia dan RI-Filipina; Survei, demarkasi dan pemetaan darat dengan PNG, RDTL, dan Malaysia serta pemeliharaan tanda batas negara dan pemetaan etnik perbatasan; Fasilitasi dan penyediaan peta batas dan wilayah pemerintahan daerah serta kajian penyelesaian konflik batas antar daerah; Pengelolaan basis data dan sistem informasi batas wilayah negara dan daerah	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	BAKOSURTANAL	15,6
	3610	Pembangunan Permukiman transmigrasi	1.100 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Nakertrans	47,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	3611	Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan trans	1.100 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Nakertrans	4,1
	3644	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	8 Paket	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Nakertrans	31,1
	3567	Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 Paket	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Nakertrans	1,6
	4660	Pengembangan kawasan perbatasan	Terbangunnya infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan permukiman di 40 kawasan termasuk 7 PKSN perbatasan (Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Merauke)	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Ditjen Cipta Karya, Dep. PU	69,8

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	3565	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat transmigrasi	2.138 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Nakertrans	5,2
	3566	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	2.138 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	4,6
	3561	Penyediaan Tanah Transmigrasi	1.100 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Nakertrans	0,5
	3630	Fasilitasi pengakhiran status bina permukiman lokasi transmigrasi	3 UPT	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Dep. Nakertrans	4,0
	6295	Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)	Terfasilitasinya pengembangan wilayah perbatasan di 24 kabupaten perbatasan (Alor, Belu, Bengkayang, Boven Digoel, Halmahera Utara, Kapuas Hulu, Keerom, Kep. Aru, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Kupang, Kutai Barat, Malinau, Maluku Tenggara Barat,	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kemeneg PDT	34,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
			Merauke, Natuna, Nunukan, Pegunungan Bintang, Raja Ampat, Sambas, Sanggau, Sintang, Supiori, Timor Tengah Utara)			
FOKUS PRIORITAS SUB-BIDANG: PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL						
	6257	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK/SPADA)-PNPM-DTK	Mempercepat Pemulihan Dan Pertumbuhan Sosial Ekonomi Daerah-Daerah Tertinggal Dan Khusus di 32 kabupaten, 186 kecamatan di 4.596 desa	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal	Kemeneg PDT	57,0
	6258	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT)	Terlaksananya pembangunan prasarana perdesaan di 185 kabupaten; Terlaksananya pembangunan energi, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi lokal; Pengembangan keperintisan transportasi udara dan laut	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan	Kemeneg PDT	90,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	6262	Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	Terbangunnya kawasan produksi di daerah tertinggal, dalam rangka usaha budidaya komoditas unggulan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi tinggi di 120 kabupaten (mendukung KAPET)	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Kemeneg PDT	121,0
	6262	Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	Terlaksananya pembangunan infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatnya akses pelayanan sosial dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di 17 Provinsi NAD dan di Pulau Nias (EDFF, LEDP)	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	Kemeneg PDT	230, 8
	6333	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) NAD-Nias	Terpulihkannya kondisi sosial ekonomi di 17 Kabupaten di NAD dan 2 Kabupaten di Nias	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	Kemeneg PDT	113,7
	6326	Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)	Terbangunnya 5 pusat pertumbuhan untuk mendukung pengembangan kawasan lainnya (KAPET, KTM, KEK, Agropolitan)	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Kemeneg PDT	25,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	6260	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di 151 kabupaten di daerah tertinggal	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Kemeneg PDT	41,9
	0783	Fasilitasi pembangunan wilayah tertinggal	Pembinaan peran serta masyarakat di daerah tertinggal, dengan BLM, fasilitasi UE dan TTG di 15 kabupaten di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Kep Maluku dan Nusa Tenggara; Rehabilitasi dan rekonstruksi kecamatan di NAD – Nias dengan pembangunan 5.000 unit rumah, 200 unit sekolah dan infrastruktur publik; IDB – simeulue Reconstruction Project dengan perbaikan 15 unit sekolah, perbaikan puskesmas pembantu (Pustu) 20 unit, perbaikan jalan 37 km, perbaikan jembatan 140 m, perbaikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar ikan, pengadaan peralatan dan mebelair untuk sekolah, rumah sakit, dan Pustu, serta perbaikan infrastruktur lainnya (cold storage, gedung serba guna, packing room, ruang generator,	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Depdagri	222,6

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
			jalan dan parkir, rumah operator); Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (NITP untuk mendukung kegiatan eks BRR yang bersumber dari MDF); Penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan 199 kabupaten tertinggal di 32 propinsi			
	3588	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat transmigrasi	16.420 KK	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	52,3
	3606	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	16.420 KK	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	52,5

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	3600	Penyediaan Tanah Transmigran	6.264 KK	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	12,9
	3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal	6.264 KK	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	224,1
	3603	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi di Wilayah Tertinggal	6.264 KK	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	31,6
	3607	Pengembangan Sarana dan Prasarana	21 Paket	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	31,6
	3630	Fasilitasi Pengakhiran Status Bina Permukiman Lokasi Transmigrasi	3 UPT	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	4,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp Milyar)
	3640	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wil. Tertinggal	24 Paket	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dep. Nakertrans	128,0

PRIORITAS SUB-BIDANG: PENGURANGAN RISIKO KAWASAN RAWAN BENCANA

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (dalam Milyar Rp)
FOKUS PRIORITAS SUB-BIDANG: PENGURANGAN RISIKO BENCANA						
	7108	Penyediaan Kerangka Geodesi Kebencanaan	Laporan pelaksanaan pemantauan Dinamika Bumi untuk Multi Hazard (geoid, marine geodesi, pasut)	Program Perlindugnan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Bakosurtanal	2,0

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (dalam Milyar Rp)
	6718	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan serta pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi: 1) tersajinya 260 informasi kebencanaan 2) terlaksananya pertemuan forum komunikasi 3) teroptimalkannya operasional model pusdalops 4) beroperasinya peralatan teknologi informasi (hardware & software) kebencanaan 5) beroperasinya jaringan komunikasi (LAN & WAN) antara BNPB dengan instansi terkait (pusat & daerah)	Program Penguasaan serta pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	BNPB	13,5
	0752	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana Dan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya kapasitas Pemda dalam upaya-upaya mitigasi bencana, dan pendamping Safer Community Through Disaster Risk Reduction [SCDRR] dan penanganan bahaya kebakaran di 33 propinsi.	Program peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	Dep. Dalam Negeri	16,5

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (dalam Milyar Rp)
	0030	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi	Laporan pelaksanaan Pemantauan Dinamika Bumi untuk TEWS dan Pengoperasian pasut untuk TESW, Peta Rupabumi untuk TEWS	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Bakosurtanal	12,6
	7106	Pemetaan Zonasi Daerah Rawan Bencana Alam Darat dan Laut	Peta Multirawan Bencana Alam Terpadu; Basis Data Rawan Bencana Alam Terpadu; Sistem Informasi Ketahanan Pangan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Bakosurtanal	3,7
	0040	Penelitian dan Pengambangan Iptek	Peta rekomendasi komoditas lahan marjinal, audit sistem informasi spasial sensitif, pengembangan peta tata ruang dan pengembangan peta kebencanaan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Bakosurtanal	1,4
	0552	Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana	Terselenggaranya pengembangan sistem manajemen penanganan bencana sebanyak 7 paket	Program Pemulihan Daerah terkena Bencana Nasional	BNPB	36,4

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (dalam Milyar Rp)
	0553	Penanggulangan Pasca Bencana dan Kerusuhan Sosial	Terlaksananya 2 paket kegiatan penanggulangan pasca bencana dan kerusuhan sosial		BNPB	62,2

PRIORITAS SUB BIDANG : PEMBANGUNAN PERKOTAAN

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS : PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA						
	0054	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	1. Tersusunnya database kota dan kabupaten serta kawasan metropolitan (43 kabupaten/kota) 2. Terlaksananya pemberian penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Award)	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	Departemen Dalam Negeri	3,0
	0785	Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan	1. Terlaksananya inventarisasi dan analisis data di bidang perkotaan (5 kota) 2. Terlaksananya finalisasi dan sosialisasi kebijakan Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (7 provinsi) 3. Terfasilitasinya kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga (6 kawasan metropolitan) 4. Tersusunnya rancangan pembentukan lembaga/badan pengelolaan kawasan perkotaan 5. Terfasilitasinya kerjasama kawasan perkotaan dalam negeri dan luar negeri (*sister city*) (20 kota) 6. Terfasilitasinya jaringan lintas perkotaan (*city sharing)* (10 kota) 7. Tersusunnya evaluasi penyelenggaran perencanaan di kawasan perkotaan (10 kawasan perkotaan)	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	Departemen Dalam Negeri	4,3

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			Tersusunnya evaluasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah (10 provinsi)			
	0819	Penataan Lingkungan Kawasan Perkotaan Metropolitan, Besar, Menengah dan Kecil.	1. Tersusunnya evaluasi DAK PSU kota (seluruh Indonesia) 2. Terlaksananya sosialisasi kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian IMB dan Pengelolaan Sampah (5 kota) 3. Tersusunnya Surat Edaran tentang penataan PKL 4. Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan sanitasi kawasan perkotaan di daerah di 6 kota Indonesia Sanitation Sector Development Program dan 4 kota pengembangan program sanitasi 5. Terfasilitasinya dan tersedianya penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (10 provinsi) 6. Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk mendukung program rusuna di kawasan perkotaan (5 provinsi dan 24 kabupaten/kota di Pulau Jawa di kawasan prioritas pembangunan rusuna) 7. Tersusunnya pedoman penataan batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan non otonom;	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	Departemen Dalam Negeri	4,2

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			Tersusunnya Surat Edaran tentang pedoman pengendalian masalah sosial (gelandangan pengemis, keamanan lingkungan/kriminalitas, kenakalan remaja) dan wabah penyakit di kawasan perkotaan			
	0822	Pengembangan dan Revitalisasi Sistem Kelembagaan Ekonomi Perkotaan	Terfasilitasinya penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi perkotaan (10 kabupaten/kota) di kawasan perkotaan Gerbangkertosusilo dan Banjarmaskuala)	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	Departemen Dalam Negeri	0,4
	0020	Pembangunan Sektor Perkotaan (USDRP)	Terlaksananya pengelolaan pembangunan sektor perkotaan (USDRP) di 11 kota	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	Departemen PU	27,2

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS: PENGEMBANGAN KOTA KECIL DAN MENENGAH						
2.	0035	Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penyusunan RPIJM di 32 provinsi	Program Pengembangan Kota Kecil Dan Menengah	Departemen PU	30,0
FOKUS PRIORITAS: PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN						
3.	4305	Penyiapan Jakstra Penataan Ruang pada Kota-kota Besar dan Metropolitan	1 Tersepakatinya Jakstra Pengembangan Perkotaan Nasional sebagai penerapan PP 26/2008 tentang RTRWN dalam hal sistem perkotaan nasional (1 dokumen kebijakan)	Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar Dan Metropolitan	Departemen PU	2,0
	4470	Pengendalian dan Pengembalian Fungsi Kawasan Metropolitan dan Kota Besar melalui peremajaan *(urban renewal)* di kawasan strategis perkotaan (pasar tradisional,	Terlaksananya peremajaan kota (*urban renewal*) di kawasan Kumuh (5 kawasan)	Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar Dan Metropolitan	Departemen PU	13,0

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
		kawasan pendidikan, kawasan kesehatan)				

PRIORITAS SUB-BIDANG PERDESAAN

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN						
	0710	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi pemberdayaan masyarakat/LPM di 32 Provinsi; Persiapan, bimbingan teknis penilaian lomba desa/kelurahan; Bintek penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan; Publikasi profil desa/kelurahan; Penyusunan pedoman teknis operasional Musrenbang desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); Pengembangan model	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Departemen Dalam Negeri	18,19

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			perencanaan partisipatif; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Permendagri nomor 66 dan 67 tentang Perencanaan Pembangunan Desa di 33 provinsi; Terlaksananya bintek 12 angkatan; Orientasi 7 angkatan; dan Pelatihan masyarakat bekerjasama dengan balai pemberdayaan masyarakat di Malang; Yogyakarta dan Lampung			
	0711	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna di provinsi; Pengembangan model pembangunan partisipasi berbasis teknologi pedesaan; Penyebarluasan informasi inovasi teknologi pedesaan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna di 33 provinsi; fasilitasi, sosialisasi serta penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan tingkat nasional; pelaksanaan hari HIV/AIDS dan terlaksanaanya bulan bhakti gotong royong dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Departemen Dalam Negeri	8,40

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
	0712	Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Perdesaan	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia/SDM melalui pelatihan 10 angkatan; 2. Pelatihan dan orientasi bagi pelatih, aparat, fasilitator dan masyarakat di 17 Kabupaten; 3. Rakornas dan evaluasi kader pemberdayaan masyarakat di 19 provinsi (mendukung PNPM).	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Departemen Dalam Negeri	7,97
	0713	Peningkatan Kapasitas aparat Pemda dan Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PISEW/RISE di 9 provinsi, 32 kabupaten, 237 kecamatan; Terlaksananya *pilot project* pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 3 lokasi; Fasilitasi pengembangan lembaga, aparat dan kader dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 32 prov; Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat; Pelatihan pengelolaan sampah RT berbasis masyarakat di 15 kabupaten; Fasilitasi penyusunan Perda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; Modul pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat di 33 provinsi; Sosialisasi Permendagri tentang Program Masuk Desa di pusat dan daerah; Peyusunan manual	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Departemen Dalam Negeri	56.58

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			desa dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan inventarisasi/pengolahan data dasar potensi desa/kelurahan pesisir dalam mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); Terselenggaranya sosialisasi program PAMSIMAS kepada Pemda dan DPRD; Terselenggaranya workshop perencanaan untuk Pelembagaan Rencana di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota; *Development and Review of Scalling Up Strategy Meeting* untuk Kab/Kota;			
	0714	Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan	Terselenggaranya TOT peningkatan kapasitas pemerintahan 15 angkatan; Bintek tupoksi BPD 5 angkatan; serta pembangunan kantor desa di 20 lokasi, Bintek/pelatihan dan penataan organisasi pemerintahan desa di 50 kabupaten/kota, Penegasan dan penetapan batas desa di 20 kabupaten, Pengembangan *pilot project* pembangunan desa terpadu di 35 desa, Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 15 provinsi (Pamsimas) dengan fokus kegiatan untuk penyusunan pedoman teknis, pelatihan konsultan provinsi, orientasi MPA-PHAST bagi aparat provinsi dan kabupaten;	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Departemen Dalam Negeri	56,03

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			Pembinaan program dan penguatan kelembagaan di 15 provinsi, 110 kabupaten			
	0847	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan	Terlaksananya BLM di 4.590 kecamatan pada 32 provinsi, termasuk: a. Terlaksananya PNPM pedesaan di 4.371 kecamatan; Pelaksanaan kegiatan SADI di 4 Provinsi b. Terlaksananya PNPM-LMP (Lingkungan Mandiri Perdesaan) di 10 Kabupaten (Grant CIDA dan DANIDA) c. Terlaksananya PNPM – RISE di 9 provinsi, dengan keluaran : - Terselenggaranya kegiatan diseminasi dan pelatihan untuk tingkat pusat dan provinsi serta sosialisasi program RISE; - Tersalurkannya dana bergulir kegiatan *pilot project micro credit* perdesaan di 32 kecamatan,32 kabupaten, 9 provinsi	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Departemen Dalam Negeri	8.355,36
	0716	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat	1. Penguatan kelembagaan unit pengaduan masyarakat terpadu dalam penanggulangan kemiskinan 440 kab/kota, 2. Tertanganinya masalah pengaduan masyarakat yang tersebar di 33 Provinsi.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Departemen Dalam Negeri	30,58

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS : PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL[1]						
FOKUS PRIORITAS : PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL[2]						
	0657	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan	Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan tentang rehabilitasi lahan kritis berbasis masyarakat sebanyak 180 orang; Terlatihnya kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan sebanyak 60 orang; Terlaksananya pengembangan diversifikasi produk lokal non pertanian di perdesaan 15 prov; Terlaksananya temu karya pemberdayaan UEM bagi 32 prov; Terfasilitasinya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di 32	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Departemen Dalam Negeri	2,22

[1] Dalam Fokus Pengembangan Wilayah Tertinggal ini terdapat kegiatan di matriks Bidang Wilayah dan Tata Ruang Fokus Pengembangan Daerah Tertinggal kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Tertinggal dengan MAK 0783.

[2] Dalam Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal ini terdapat kegiatan di matriks Bidang Wilayah dan Tata Ruang Fokus Peningkatan Keterkaitan antar Daerah/Wilayah dan Rantai Produksi, kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan dengan MAK 4241

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			Provinsi			
	0659	Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan	Fasilitasi lembaga keuangan perdesaan 16.454 unit di 33 provinsi; Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Badan Kredit Desa (BKD) di 465 kab/kota; Fasilitasi penguatan manajemen lembaga keuangan mikro; Replikasi model Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) dengan pemberian stimulan bagi 19 pokmas; Revitalisasi kelembagaan Badan Kredit Desa (BKD); Fasilitasi manajemen usaha desa/ BUMDes; Penyusunan kebijakan/program Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL)	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Departemen Dalam Negeri	3,83
	0661	Penyelenggaraan Diseminasi Teknologi Tepat Guna bagi Kawasan Perdesaan	Pelatihan TTG bagi pembina tingkat kab./kota dan pengelola Posyantekdes 10 angkatan; Pelatihan bagi pelatih Latihan Integrasi Taruna Dewasa	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Departemen Dalam Negeri	3,6

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			(LATSITRADA) 8 angkatan; Pelatihan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 5 angkatan; Pelatihan bagi masyarakat perdesaan di lokasi Pembangunan Desa Terpadu (PDT) 17 angkatan; Pemetaan kebutuhan TTG untuk pengembangan produk unggulan desa; Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur "Telekomunikasi perdesaan di 32 provinsi"; Pelatihan fasilitator penggerak pelestarian dan pengembangan prasarana perdesaan 5 angkatan; Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan di 32 provinsi			
	0807	Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Lokal	Terlaksananya bimtek pengelolaan pasar desa 12 angkatan dan pemberian stimulan kepada masyarakat; terlaksananya pengembangan pasar desa dengan fokus kegiatan pada fasilitasi, bimbingan teknis dan bantuan langsung masyarakat untuk perbaikan pasar desa di 12 Desa pasca bencana dan terpencil sesuai dengan Permendagri nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa,	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Departemen Dalam Negeri	5,16

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			Meningkatkan jaringan informasi dan jaringan teknologi pasar desa			
	0790	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Tersosialisasinya pedoman umum pengembangan potensi SDM dalam pengembangan PUD di 15 provinsi dan pertemuan pusat dan daerah di Jakarta sebanyak 100 orang; tersusunnya buku hasil informasi peta potensi ekonomi daerah dan 1000 CD movie; Terlaksananya bintek pemetaan potensi ekonomi daerah bagi aparat pusat dan daerah sebanyak 150 orang dalam 3 angkatan di Jakarta ; Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi daerah; Terlaksananya monev pedoman umum pengembangan produk unggulan daerah berbasis klaster di 15 provinsi; Terfasilitasinya kerjasama dalam rangka pertumbuhan ekonomi (Care International Indonesia) di 7 provinsi terpilih; Terfasilitasinya pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat (Plan Internasional) di 20 kab/kota dan 7 provinsi; Terfasilitasinya pelaksanaan kerjasama dalam rangka peningkatan pembangunan sosial ekonomi di 4 provinsi yaitun NTT, NTB, Papua dan Papua Barat (Antara-AusAID); Tersusunnya pedum pengembangan model kerjasama ekonomi daerah; Tersusunnya instrumen	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Departemen Dalam Negeri	3,8

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			fasilitasi kerjasama ekonomi daerah			
	0791	Fasilitasi Pengembangan Promosi Ekonomi Daerah dan Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Meningkatnya pemahamanan dan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di 9 provinsi dan 268 kab/kota; Terfasilitasinya pembinaan sistem informasi penanaman modal daerah di 32 provinsi dan 125 kab/kota; Terselenggaranya pameran investasi dan perdagangan daerah; Meningkatnya kapasitas PTSP untuk penguatan penanaman modal daerah; Terlaksananya pengembangan promosi dan pemasaran produk-produk khas daerah; meningkatnya wawasan kelembagaan dan SDM terkait dengan pelayanan investasi pada pelaku usaha dan masyarakat; Terlaksanannya koordinasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah di 90 kab/kota; Teridentifikasinya data sarana dan prasarana perekonomian daerah di 8 provinsi; Terlaksananya monev pelaksanaan pedoman pengelolaan pasar tradisional di 75 kab/kota; Terlaksanannya monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perekonomian daerah di 10 provinsi dan pertemuan pusat dan daerah sebanyak 120 orang; Terlaksanannya pengembangan sarana usaha pertanian di 10 provinsi; Tersususnnya Pedum pengelolaan sarana prasarana kawasan perbatasan; Tersedianya data kepariwisataan daerah di 11 provinsi	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Departemen Dalam Negeri	3,7

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			dan meningkatnya pengetahuan aparat daerah dalam pengembangan kepariwisataan daerah sebanyak 120 orang; Tersedianya data bahan baku energi terbarukan yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah di 10 provinsi dan terlaksananya workshop sebanyak 130 orang; Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang kondisi sarana dan prasarana perekonomian di wilayah kawasan khusus di 5 provinsi			
FOKUS PRIORITAS : PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN[3]						

[3] Didalam Fokus Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan ini terdapat :
1. Kegiatan di matriks Bidang Wilayah Tata Ruang, Fokus Pengembangan Daerah Tertinggal, Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Daerah Tertinggal (P2IPDT) dengan MAK 6258;
2. Kegiatan di matriks bidang Sarana dan Prasarana Fokus Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Standar Pelayanan Minimal berupa kegiatan :
   a. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku dengan MAK 4442,
   b. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-PNPM) dengan MAK 4312
   c. Pembangunan Tampungan untuk Air Baku dengan MAK 4443,
   d. Rehabilitasi Tampungan untuk Air Baku dengan MAK 4444,
   e. Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku dengan MAK 4445,
   f. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku dengan MAK 4446,
   g. Operasi dan Pemeliharaan Tampungan Air Baku dengan MAK 4447,
   h. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Air Tanah untuk Air Minum Daerah Terpencil/Perbatasan dengan MAK 4458,

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS : PERTANAHAN[4]						

i. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan MAK 4612,

3. Kegiatan di matriks Bidang Sarana dan Prasarana, Fokus Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional berupa kegiatan :
   a. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi dengan MAK 4422,
   b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan MAK 4426.
4. Kegiatan di matriks bidang Sarana dan Prasarana, Fokus Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air berupa kegiatan :
   a. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) dengan MAK 4464,
   b. Kegiatan Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (PISP) dengan MAK 4465,
5. Kegiatan dimatriks Bidang Sarana dan Prasarana, Fokus Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Standar Pelayanan Minimal berupa kegiatan :
   a. Penyediaan Infrastruktur Pos dan Telematika di Daerah Non Ekonomi dengan MAK 5771,
   b. Listrik Perdesaan dengan MAK 2137.

[4] 1. Di dalam Fokus Proritas Pertanahan terdapat kegiatan di matriks Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Fokus Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berupa Kegiatan :
   a. Pengendalian dan Pemberdayaan Kepemilikan Tanah dengan MAK 5676, dan
   b. Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan MAK 5658,

* 2. Di dalam Fokus Proritas Pertanahan terdapat Kegiatan di matriks Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Fokus Penguatan Hak atas Tanah berupa kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah dengan MAK 5657,

*3. Di dalam Fokus Pembangunan Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan terdapat kegiatan di matriks bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Fokus Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berupa kegiatan :
   a. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen dengan MAK 1569
   b. Pengembangan Agroindustri Terpadu dengan MAK 1552

No.	MAK	Kegiatan Prioritas Bidang RKP 2010	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS : PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN*						
FOKUS PRIORITAS : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN*						

PRIORITAS SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH

---

*4. Di dalam Fokus Pembangunan Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan terdapat Kegiatan di matriks bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Fokus Penguatan Ketahanan Pangan berupa kegiatan :
   a. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dengan MAK 1563
   b. Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian dengan MAK 1556
   c. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan dengan MAK 1580

*5. Di dalam Fokus Pengembangan Sumber Daya Perikanan terdapat Kegiatan di matriks bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Fokus Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berupa kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Pertanian dan Masyarakat Pesisir dengan MAK 4108

No.	Mak	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS SUB BIDANG: Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Lokal						
1	3611	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigran	Terlaksananya pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran sebanyak 1.100 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	4,17
2	3603	Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran	Terlaksananya pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran sebanyak 6.264 KK	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	31,6
3	3614	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran	Terlaksananya pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran sebanyak 1.936 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	36,4
FOKUS PRIORITAS SUB BIDANG: Peningkatan Keterkaitan antar Daerah/Wilayah dan Rantai Produksi						
1	3567	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi sebanyak 2 Paket	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	1,65
2	3607	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi sebanyak 21 Paket	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	31,59

3	3575	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi sebanyak 17 Paket	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	23,6
4	3644	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Terselenggaranya pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebanyak 8 Paket	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	31,15
No.	**Mak**	**Kegiatan Prioritas Bidang**	**Keluaran**	**Program**	**Instansi Pelaksana**	**Pagu Indikatif (Rp. Milyar)**
5	3640	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Terselenggaranya pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebanyak 24 Paket	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	128,05
6	3628	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Terselenggaranya pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebanyak 10 Paket	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	51,85
7	4241	Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan	Terselenggaranya pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan di 50 Kawasan	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Departemen Pekerjaan Umun	98,5

FOKUS PRIORITAS SUB BIDANG: Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal						
1	3630	Fasilitasi Pengakhiran Status Bina Permukiman Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya fasilitasi pengakhiran status bina lokasi transmigrasi sebanyak 3 UPT	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	4,0
2	3630	Fasilitasi Pengakhiran Status Bina Permukiman Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya fasilitasi pengakhiran status bina lokasi transmigrasi sebanyak 27 UPT	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	52,9
3	3630	Fasilitasi Pengakhiran Status Bina Permukiman Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya fasilitasi pengakhiran status bina lokasi transmigrasi sebanyak 10 UPT	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	16,7
FOKUS PRIORITAS SUB BIDANG: Peningkatan Kapasitas Stakeholder Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Lokal						
1	3561	Penyediaan Tanah Transmigran	Tersedianya lokasi untuk pembangunan transmigrasi baru sebanyak 1100 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	0,551
2	3600	Penyediaan Tanah Transmigran	Tersedianya lokasi untuk pembangunan transmigrasi baru sebanyak 6264 KK	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	12,91

No.	Mak	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
3	3582	Penyediaan Tanah Transmigran	Tersedianya lokasi untuk pembangunan transmigrasi baru sebanyak 1936 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	6,08
4	3565	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya kapasitas SDM Pemda dan masyarakat transmigrasi sebanyak 2.138 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	5,2
5	3588	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigran	Terselenggaranya kapasitas SDM Pemda dan masyarakat transmigrasi sebanyak 16.420 KK	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	52,37
6	3571	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan masyarakat Transmigran	Terselenggaranya kapasitas SDM Pemda dan masyarakat transmigrasi sebanyak 14.160 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	67,25
7	3610	Pembangunan Permukiman Transmigran	Terlaksananya pembangunan permukiman baru bagi transmigran sebanyak 1.100 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	47,1
8	3601	Pembangunan Permukiman Transmigran	Terlaksananya pembangunan permukiman baru bagi transmigran sebanyak 6.264 KK	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	224,1

9	3610	Pembangunan Permukiman Transmigran	Terlaksananya pembangunan permukiman baru bagi transmigran sebanyak 1.936 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	80,86
Bidang Ekonomi						
1	3566	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 2,138 KK	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Depnakertrans	4,69
No.	**Mak**	**Kegiatan Prioritas Bidang**	**Keluaran**	**Program**	**Instansi Pelaksana**	**Pagu Indikatif (Rp. Milyar)**
2	3606	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 16.420 KK	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	Depnakertrans	52,5
3	3586	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terselenggaranya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 14.160 KK	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Depnakertrans	42,56

PRIORITAS SUB BIDANG TATA RUANG

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS: PENINGKATAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG DALAM BERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN						
a)	4263	Sosialisasi Peraturan Perundangan dan NSPK Bidang Penataan Ruang	Tersosialisasikannya peraturan perundangan (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26/2008 tentang RTRWN, dan Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Rang Kawasan Jabodetabekpunjur) dan NSPK baik di tingkat Nasional, regional, provinsi, dan kab/kota kepada para pelaku pembangunan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang untuk menunjang program prioritas nasional	Penataan Ruang	Dep. PU	4,4
b)	4265	Operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTR Kab/Kota	Terselenggaranya operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, serta terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang oleh pemerintah daerah dan	Penataan Ruang	Dep. PU	74,5

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			masyarakat			
c)	4634	Peraturan Perundangan dan NSPK Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya NSPK dan RPP bidang penataan ruang sebagai tindak lanjut dari UU 26/2007 tentang penataan ruang untuk mendukung program prioritas nasional	Penataan Ruang	Dep. PU	11,3
d)	0846	Penguatan Dukungan Sistem Informasi dan Monitoring Penataan Ruang dalam rangka mendukung Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya keseimbangan, keharmonisan, keselarasan dan keterpaduan pembangunan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota pemekaran melalui program penataan ruang	Penataan Ruang	Depdagri	2,1
e)	0683	Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya NSPM pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan di daerah	Penataan Ruang	Depdagri	1,0
f)	0837	Peningkatan Kualitas Pemanfaatan dan	Terwujudnya tata ruang kawasan yang terpadu dan terintegrasi	Penataan Ruang	Depdagri	0,50

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
		Pengendalian Ruang Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana, Daya Dukung Wilayah dan Pengembangan Kawasan				
g)	7107	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Peta Dasar Rupabumi 1:50K Papua	Penataan Ruang	Bakosurtanal	76,7
h)	7113	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)	Dukungan kegiatan JBIC Loan : Data Utilisasi, Networking, PMO, IGTE dan kerjasama ASEAN Kegiatan Konsultan Service I, Konsultan Service II, Networking, Data Akuisisi dan Produksi	Penataan Ruang	Bakosurtanal	205,0
	7104	Pemetaan dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Peta Resmi untuk Zonasi Tingkat peringatan; Pengelolaan Sistem Informasi dan Basisdata spasial; Perawatan wahana dan peralatan survei laut untuk percepatan pengadaan data spasial pesisir dan laut; survei	Program Pengembangan dan pengelolaan Sumberdaya kelautan	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan	13,9

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			hidrografi pantai Kalimantan; Peta Aeronautical Chart ICAO 1:250K & Peta LBI 1:25K & WAC ICAO 1:1.000.000 Aceh, Riau, Kaltim, Malut, Maluku, Papua, dan NTT; Pengelolaan sistim informasi dan basisdata spasial		Nasional	
	7103	Pemetaan Tematik SDA dan LH Matra Laut	Pengelolaan Basisdata spasial pesisir dan laut; survei dan pemetaan SDA pesisir, laut dan pulau kecil; pemetaan neraca dan valuasi ekonomi SDA PL 1:1000k sampai 1:50k Nasional; Inventarisasi dan pemetaan SDA Mangrove Indonesia, Inventarisasi dan pemetaan SDA Pesisir dan Survei dan Pemetaan Pulau kecil terluar; Neraca ekosistim pesisir dan laut ; Penyusunan dan aplikasi basisdata kelautan; Pengembangan Marine and Coastal Georis Information System; Penyelenggaraan dan pengembangan Lab. Parangtritis	Program Pengembangan dan pengelolaan Sumberdaya kelautan	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	11,6
	7105	Pengembangan Geodesi dan Geodinamika	Pengelolaan Sta Tetap GPS ; Pemantauan Deformasi Kerak Bumi dan Pemeliharaan Kerangka Referensi Geodetik; Penyediaan JKH dan JKV; Pemetaan Geoid	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	Badan Koordinasi Survei dan	4,2

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
			dan Operasionalisasi stasiun pasang surut realtime	SDA dan LH	Pemetaan Nasional	
	7110	Pemetaan Tematik SDA dan LH Matra Darat	Basisdata tematik SDA Darat; Pembaharuan dan pengadaan data SDA dan LH regional; Inventarisasi SDA dan LH; Ekspedisi Geografi Indonesia; Diseminasi dan pencetakan produk	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	7,4
	7109	Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Standarisasi Data Spasial	Penyelenggaraan Fora IDS; Pengembangan dan Peningkatan Upaya Penerapan Metadata Data Geospasial; Pengembangan dan Peningkatan Upaya Penerapan Standar Data Geospasial; Penyiapan sumberdaya manusia Penyusunan regulasi informasi spasial; Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	5,6
	7102	Penyediaan Atlas Sumberdaya, Atlas Publik dan Pengembangan Basis	Atlas sumberdaya dan Atlas Publik serta Basis Data Atlas	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Badan Koordinasi Survei dan	6,4

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
		Data Atlas			Pemetaan Nasional	
FOKUS PRIORITAS : PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
i)	4261	Penguatan Koordinasi dan Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional (BKPRN) dan daerah (BKPRD) dalam rangka peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di pusat dan daerah	Penataan Ruang	Dep. PU	20,9
j)	4268	Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terselenggaranya pembinaan manajemen penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mendukung turbinlakwas penataan ruang	Penataan Ruang	Dep. PU	95,9
k)	9305	Pembinaan Penataan Ruang di Daerah	Terselenggaranya peningkatan pelaksanaan dekonsentrasi bidang penataan ruang untuk pembinaan dan pengawasan teknis penataan ruang di 33 Provinsi	Penataan Ruang	Dep. PU	49,1
l)	0826	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Penataan Ruang di Tingkat	Tersedianya SDM yang memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengelola penataan ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta meningkatnya koordinasi	Penataan Ruang	Depdagri	4,0

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
		Nasional dan Daerah Untuk Mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penyelenggaraan penataan ruang daerah dan pemerintah pusat.			
m)	9296	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang	Penataan Ruang	De. PU	14,4

PRIORITAS SUB BIDANG PERTANAHAN

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatf (Rp. Milyar)
Fokus Prioritas: Penguatan Hak Atas Tanah						
a)	5657	Percepatan Pendaftaran Tanah	Sertifikasi pada 495.620 bidang tanah (Prona sebanyak 139.620 bidang, RALAS 120.000 bidang, LMPDP 150.000 bidang, UKM 30.000 bidang, Pertanian 23.000 bidang, DKP 3.000 bidang, Transmigrasi 30.000 bidang); Larasita di 40 Kab/Kota; Pembinaan dan supervisi LMPDP, RALAS, Inventarisasi dan penertiban tanah instansi pemerintah, perumusan kebijakan penetapan dan pendaftaran tanah.	Pengelolaan Pertanahan	BPN	381,7
b)	5654	Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Operasi tuntas 900 kasus; operasi sidik 1000 kasus; pengkajian 1000 kasus; penanganan perkara dan non perkara 600 kasus.	Pengelolaan Pertanahan	BPN	24,7
c)	5675	Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Peta Pertanahan 1.000.000 ha yang terdiri dari Kerangka Dasar Kadastral Tanah (KDKN) 2.500 titik, Peta Dasar Pendaftaran Tanah 1.000.000 ha, Peta Tematik 3.000.000	Pengelolaan Pertanahan	BPN	78,9

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatf (Rp. Milyar)
			ha, Peta Nilai Tanah 3.000.000 ha; Pembuatan peta potensi tanah, pembinaan dan supervisi.			
Fokus Prioritas : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)						
d)	5658	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaaan Tanah	Pelaksanaan Redistribusi Tanah sebanyak 210.000 bidang tanah; Konsolidasi 10.000 bidang tanah; Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di 200.000 bidang tanah; dan Neraca Penatagunaan Tanah di 100 Kab/Kota	Pengelolaan Pertanahan	BPN	266,5
e)	5676	Pengendalian dan Pemberdayaan Kepemilikan Tanah	Penertiban tanah terindikasi terlantar 115 SP; inventarisasi tanah bekas hak / kawasan kritis 92 SP; Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) sebanyak 201 kelompok; Pembinaan dan sosialisasi sertifikasi UKM, penyusunan juknis dan bahan kebijakan pengendalian, pemberdayaan masyarakat; Kegiatan Pra dan Paska Sertifikasi UKM, POKJA.	Pengelolaan Pertanahan	BPN	20,3

No	MAK	Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatf (Rp. Milyar)
Fokus Prioritas : Penguatan Kelembagaan Pertanahan						
f)	0079	Pembangunan Gedung	Pembangunan 7 gedung kantor; 3 gedung arsip;	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	BPN	8,3
g)	0113	Rehabilitasi Gedung	Rehabilitasi 31 gedung kantor.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	BPN	15,1
h)	0093	Penyusunan Penyempurnaan Pengkajian Peraturan Perundangan	1 paket kerangka kebijakan dan pedoman operasional pengadaan tanah	Pengelolaan Pertanahan	BPN	7,6

PRIORITAS SUB BIDANG PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
FOKUS PRIORITAS : PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH						
1	0762	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Untuk Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Daerah-Daerah	Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat di daerah oleh 500 OMS	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Depdagri	20, 0
2	0606	Fasilitasi terhadap Parpol , Eksekutif, Kepala Daerah dan Pemda, dan Masyarakat Sipil	1) Ditetapkannya UU hasil revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2) Terfasilitasiinya forum organisasi masyarakat sipil untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi; 3) Terfasilitasinya pemantapan sosial budaya kemasyarakatan dengan 33 provinsi.; 4) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Depdagri	27,5

			parpol dan organisasi masyarakat sipil; 5) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas FKUB dan FKDM.			
3	0770	Fasilitasi pelaksanaan budaya politik demokratis	1) Terlaksananya pendidikan politik masyarakat di lima daerah; 2) Terlaksananya pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan anggota DPRP terpilih; (3) Terfasilitasinya pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi antara lembaga legislatif dan masyarakat; (4) Terwujudnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemantapan kesatuan bangsa dan politik dengan 33 provinsi; (5) Terfasilitasinya parpol, eksekutif, kepala daerah, pemda, dan masyarakat sipil terkait perbaikan proses politik	Program Perbaikan Proses Politik	Depdagri	20,0

No.	Mak	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
4	0772	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	(1) Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada180 OMS; (2) Terlaksananya fasilitasi pembentukan pusat pendidikan kebangsaan ; (3) Tersusunnya 3 pedoman terkait identitas dan budaya nasional.	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional	Depdagri	7,5

5	0773	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem, Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan	(1) Tersusunnya model rencana pengembangan kelembagaan (instutional development plan) di 34 Bawasda Provinsi dan Bawasda kab/kota; (2) Tersusunnya model audit dengan standar internasional, dan terlaksanya bimbingan kepada 34 Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota; (3) Terwujudnya pembinaan dan pengawasan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Depdagri di Kabupaten/Kota; (4) Meningkatnya kompetensi aparat pengawas/auditor dilingkungan Inspektorat Jenderal Depdagri; (5) Terlaksananya Evaluasi Institutional Development Plan (IDP) Bawasda/Inspektorat dan Sekretariat DPRD Provinsi, kabupaten/Kota dalam rangka proses closing date dengan menyusun laporan penyelesaian proyek (project completion report).	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Depdagri	1,3
6	0794	Finalisasi dan Sosialisasi UU No. 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah Hasil Penyempurnaan	1) Tersosialisasinya revisi UU No. 32 Tahun 2004; 2) Tersusunnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (Kepmen) Pelaksana Revisi UU No. 32 Tahun 2004; (3) Tersusun dan Tersosialisasinya revisi UU No.32	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Depdagri	3,0

No.	Mak	Kegiatan Prioritas Bidang	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif(Rp. Milyar)
			Tahun 2004 dan UU Tentang Pemilu KDH dan WKDH			
7	0795	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor dengan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi	1) Terfasilitasinya penyesuaian perundang-undangan sektor dengan perundang-udangan desentralisasi pada 5 sektor (Kesehatan, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Penggunaan Lahan, Kahutanan) ; 2) Terfasilitasinya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara peraturan daerah (Perda), peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan peraturan sektor; 3) Terfasilitasinya Implementasi peraturan Perundang-Undangan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, NAD, Papua dan Papua Barat	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Depdagri	7,0
8	0652	Fasilitasi Penataan Kelembagaan di Daerah Otonomi Khusus dan	Terwujudnya Penguatan Kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah daerah di propinsi NAD (AGTP, untuk mendukung kegiatan ax. BRR NAD-Nias yang	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Depdagri	4,5

		Istimewa	bersumber dari MDF)			
9	0649	Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1) Terfasilitasinya penerapan 4 SPM (Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota) di 33 Provinsi (di 457 kab/kota termasuk 199 kabupaten di daerah tertinggal); 2) Terfasilitasinya penyusunan anggaran pemerintahan daerah yang mengakomodasi penerapan SPM; 3) Tersusunnya SPM bidang pendidikan dan 7 SPM pada bidang-bidang lainnya yang belum terselesaikan pada tahun 2009	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Depdagri	10,0
No	**MAK**	**Fokus/Kegiatan Prioritas**	**Keluaran**	**Program**	**Instansi Pelaksana**	**Pagu Indikatif (Rp. Milyar)**
10	0650	Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD	Terselenggaranya workshop untuk meningkatkan kemampuan Pemda dan Anggota DPRD dalam penyusunan Perda, diantaranya workshop tentang RIA (Regulatory Impact Assessment), dan workshop terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Depdagri	5,5

			daerah yang baru			
11	0828	Peningkatan.Kapasitas Aparatur Pemda di dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah	Terlaksananya diklat teknis dalam rangka penerapan penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada 2 bidang, diklat fungsional untuk koordinasi dan sinergi kegiatan diklat, penyusunan kursil diklat, pelaksanaan analisis kebutuhan diklat, diklat penyusunan spm bagi pejabat strategis	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	Depdagri	7,5
12	0788	Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah.	1) Tersusunnya model-model kerjasama antar daerah dibidang Ekonomi, Pelayanan Publik dan Prasarana Dasar; 2) Replikasi model-model kerjasama antar pemerintah daerah di 5 provinsi percontohan;	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Depdagri	1,2
13	0788	Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	1) Tersusunnya model-model kerjasama antar daerah dalam pengembangan ekonomi lokal di pulau Sumatra, Kalimantan, Papua, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara; 2) Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah di 13 KAPET dalam hal pelayanan publik	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Depdagri	10, 0

No	**MAK**	**Fokus/Kegiatan Prioritas**	**Keluaran**	**Program**	**Instansi Pelaksana**	**Pagu Indikatif (Rp. Milyar)**
14	0642	Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka Kerjasama Pembinaan Wilayah	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dalam rangka kerjasama pembinaan wilayah melalui pembinaan Gubernur selaku Wakil Pemerintah	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Depdagri	4,5

15	0654	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbangunnya sistem informasi manajemen Ditjen BAKD dan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah di 171 Daerah terpilih serta tersusunnya Participative Corporate Plan bagi sejumlah BUMD tertentu.	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Depdagri	7,1
16	0655	Fasilitasi Penataan Regulasi Keuangan Daerah	Tersedianya dukungan fasilitasi (meliputi pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan pedoman) di bidang administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah di 33 provinsi	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Depdagri	27,7
17	0079	Pembangunan Gedung	Tersedianya sarana dan prasarana lembaga pendidikan kedinasan di IPDN pada 4 (empat) kampus daerah yaitu: IPDN Kampus Bulittinggi, IPDN Kampus Pekanbaru, IPDN Kampus Makassar dan IPDN Kampus Manado tahap I selama 1 (satu) tahun.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Depdagri	100,0

No	MAK	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Milyar)
18	0625	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya SIAK on-line dan penerapan KTP Tunggal berbasis NIK ber-*chip* dan *biometric* di 33 Provinsi untuk tahun pertama dari yang direncanakan selama 3 tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Depdagri	440,0
19	0656	Fasilitasi Penataan Regulasi Keuangan daerah	Tersusunnya 10 peraturan perundang-undangan bidang anggaran daerah terkait dengan administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah, fasilitasi dana perimbangan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Depdagri	8,9
20	0827	Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik	Terfasilitasinya konsultasi dan dialog di 6 wilayah pasca konflik dan wilayah perbatasan	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik	Depdagri	12,0

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 9

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB 9

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Kondisi Umum

Indonesia merupakan salah satu "*mega diverse*" dunia dengan keunikan dan kekayaan sumber daya hayati yang begitu tinggi. Selain itu, kesuburan lahan dan agroklimat yang mendukung membuat Indonesia juga sanggup menyediakan berbagai kebutuhan, terutama pangan. Perairan Indonesia yang mencakup sekitar dua pertiga luas keseluruhan, bukan saja kaya akan sumber daya perikanan, tetapi juga menjadi alur pelayaran internasional yang penting yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian dunia. Belum lagi dengan berbagai kekayaan tambang dan mineral yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan hutan tropis yang luas dan bentuk wilayah yang berupa kepulauan, Indonesia memegang peranan penting dalam suplai biomasa dan penyerapan emisi karbon yang pada akhirnya akan mempengaruhi dinamika iklim global. Berdasarkan potensi tersebut Indonesia menjadi salah satu titik pertemuan antara berbagai kepentingan nasional, internasional dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia mempunyai peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan melalui penyediaan jasa-jasa lingkungan, seperti keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan ketersediaan air secara alamiah dan lain-lain. Saat ini, pembangunan nasional masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pembangunan ekonomi dan sumber pendapatan serta penciptaan lapangan kerja. Pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi dicerminkan dengan semakin meningkatnya PDB sektor non-migas. Selanjutnya, sektor-sektor di bawah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup juga menyerap tenaga kerja sekitar 60 persen di perdesaan.

Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas sumber daya air, rehabilitasi dan konservasi lahan dan hutan, pengelolaan sumber daya kelautan, peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya isu perubahan iklim global, maka upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terus dilakukan.

Sesuai dengan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal pembangunan dan penopang sistem kehidupan, maka Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di dalam RKP 2010 akan diarahkan pada dua prioritas bidang, yaitu: **(1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dengan fokus prioritas: (a) Peningkatan Ketahanan Pangan; (b) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (c) Peningkatan Ketahanan Energi; dan **(2) Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup** dengan fokus (a) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air, (b) Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam, (c) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, (d) Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup, dan (e) Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

A.1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi

Sebagai modal pembangunan, sumber daya alam menjadi tumpuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penyerapan tenaga kerja, dan nilai ekspor nasional. Total kontribusi PDB nasional dari pemanfaatan sumber daya alam yang dicerminkan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2008 mencapai sekitar 14 persen. Sedangkan persentase penerimaan minyak dan gas bumi terhadap PDB sebesar 6,12 persen. Sektor-sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 40 persen tenaga kerja keseluruhan. Eskpor nasional dari keseluruhan sektor di bawah sumber daya alam dan lingkungan hidup proporsinya juga meningkat terhadap total ekspor nasional. Pada tahun 2009, diperkirakan terjadi peningkatan kontribusi sektor-sektor di bawah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada pertumbuhan ekonomi melalui PDB nasional.

Salah satu peran penting sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional adalah untuk menyediakan pangan bagi penduduk Indonesia. Untuk itu, upaya **peningkatan ketahanan pangan** menjadi agenda yang penting dalam RKP 2010 ini. Ketahanan pangan meliputi upaya untuk meningkatkan produksi, menjaga distribusi dan konsumsi pangan.

Perkembangan pembangunan ketahanan pangan 2005-2008 memperlihatkan kecenderungan yang membaik, yang ditandai oleh: (1) meningkatnya sebagian besar produksi bahan pangan, antara lain: padi, jagung, kedelai, tebu/gula, daging sapi, telur, dan susu; (2) meningkatnya ketersediaan energi dan protein dari tahun ke tahun, dengan peningkatan masing-masing 2,6 persen per tahun dan 2,7 persen per tahun, serta tingkat ketersediaan energi telah mencapai 3.032 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sekitar 76,9 gram/kap/hari; (3) meningkatnya jumlah dan kualitas konsumsi masyarakat yang sudah mencapai Angka Kecukupan Gizi, yang ditandai dengan peningkatan skor PPH; dan (4) stabilnya pergerakan harga pangan dalam negeri.

Produksi bahan pangan nasional pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan. Bahan pangan utama yang mengalami peningkatan cukup tinggi adalah padi yang mencapai 60,3 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung, kedelai, daging sapi, telur, dan susu. Sementara itu, peningkatan produksi juga terjadi pada bahan pangan lainnya seperti ubi kayu yang meningkat 8,03 persen dari tahun 2007 sehingga menjadi 21,59 juta ton.

Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek ketersediaan energi dan protein selama periode 2005–2008, keduanya mengalami pertumbuhan yang positif. Ketersediaan energi meningkat rata-rata 2,6 persen per tahunnya dan ketersediaan protein 2,7 persen per tahun. Di samping itu, selama periode

2005–2008, ketersediaan energi dan protein rata-rata pada periode tersebut masing-masing adalah 3.032 kal/kapita/hari dan 76,9 gram/kapita/hari atau telah melebihi angka kecukupan atau kebutuhan yang direkomendasikan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 yaitu masing-masing sebesar 2.200 kkal/kapita/hari dan 52 gram/kapita/hari. Pencapaian ketersediaan energi tersebut telah berada 36,68 persen di atas angka kecukupan, dan ketersediaan protein telah mencapai 39,65 persen di atas kebutuhan.

Situasi ketersediaan pangan dalam periode tahun 2005-2008 menunjukkan bahwa kontribusi pangan untuk penyediaan protein dan energi masih didominasi dari kelompok pangan nabati. Rata-rata ketersediaan protein dari pangan hewani hanya 13,58 gram/kapita/hari atau 17,06 persen, selebihnya 82,94 persen dari pangan nabati sebesar 66,07 gram/kapita/hari. Demikian pula untuk ketersediaan energi, dari pangan nabati mencapai 2.799 kkal/kapita/hari atau 95,89 persen dan untuk pangan hewani sebesar 120 kkal/kapita/hari atau 4,11 persen. Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH), dianjurkan agar ketersediaan energi dari pangan hewani sebesar 12 persen atau 264 kkal/kapita/hari dari total ketersediaan 2.200 kkal/kapita/hari.

Konsumsi pangan masyarakat juga memperlihatkan peningkatan, yang salah satunya ditunjukkan dengan konsumsi energi pada tahun 2007 yang mencapai 2.015 kkal/kapita/thn. Jumlah konsumsi tersebut telah melebihi rekomendasi konsumsi energi dalam PPH sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Meskipun secara rata-rata tingkat konsumsi pangan telah mencapai angka kebutuhan namun masih terdapat golongan masyarakat tertentu yang konsumsi pangannya belum memenuhi kebutuhan. Hal ini disebabkan masih adanya masalah aksesibilitas pangan baik karena adanya keterbatasan sistem distribusi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan juga permasalahan rendahnya tingkat pendapatan serta daya beli.

Sebagai salah satu sektor yang memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi, **sektor pertanian** berperan strategis baik dalam ketahanan pangan maupun perekonomian nasional. Pada tahun 2008, kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB nasional sekitar 14 persen dengan pertumbuhan PDB sektor pertanian sekitar 4,8 persen, yang terdiri dari pertumbuhan subsektor: Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, serta Peternakan yang masing-masing subsektor tersebut meningkat sebesar 5,9 persen, 3,8 persen, dan 3,9 persen. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut didorong oleh peningkatan produksi komoditas pertanian, antara lain padi yang mencapai 60,3 juta ton GKG; jagung mencapai 16,3 juta ton; dan kedelai mencapai 776,5 ribu.

Pertumbuhan sektor pertanian juga didorong oleh peningkatan produksi komoditas hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Produksi hortikultura secara keseluruhan mengalami peningkatan, khususnya komoditas jeruk dan alpukat yang masing-masing meningkat 37,7 persen dan 30,0 persen. Secara umum, produksi perkebunan pada tahun 2008 juga mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar terjadi pada komoditas lada yang meningkat sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Produksi komoditas perkebunan lainnya yang meningkat adalah kapas, minyak sawit, karet, tebu/gula, cengkeh, dan kakao. Sementara itu, komoditas peternakan dan hasilnya,

seperti daging meningkat menjadi sebesar 2,18 juta ton, telur meningkat menjadi sebesar 1,5 juta ton, dan susu meningkat menjadi sebesar 574 ribu ton.

Pada tahun 2009, sektor pertanian diharapkan dapat terus tumbuh, yang didukung oleh subsektor tanaman bahan makanan sebesar 4,9 persen, perkebunan sebesar 4,4 persen, serta peternakan dan hasilnya sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan sub sektor pertanian tersebut juga didukung dengan peningkatan produksi padi pada tahun 2009 yang diperkirakan dapat mencapai 60,9 juta ton GKG, produksi jagung dan kedelai masing-masing diperkirakan mencapai 16,5 juta ton dan 850,2 ribu ton, produksi gula hablur sebesar 3,3 juta ton, produksi kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng menjadi 0,8 juta ton, dan daging sapi dalam bentuk karkas sebesar 400 ribu ton. Untuk produksi hortikultura diperkirakan juga terus mengalami peningkatan.

Selain mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) telah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008, NTP meningkat menjadi 100,2 dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 100. Selanjutnya pada tahun 2009, NTP diperkirakan meningkat kembali menjadi sekitar 105,0.

Sementara itu, **pembangunan sektor perikanan** saat ini banyak berperan dalam pembangunan nasional melalui PDB, serta perolehan devisa dari produksi perikanan budidaya dan tangkap. Pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2007, PDB perikanan berdasarkan harga berlaku mencapai 2,44 persen. Nilai tersebut meningkat sebesar 2,05 persen pada tahun 2008 sehingga mencapai 2,5 persen dari PDB nasional.

Produksi perikanan pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,71 juta ton dari 8,24 juta ton pada tahun sebelumnya, atau meningkat sekitar 5,7 persen. Kenaikan produksi tersebut diperoleh dari peningkatan produksi pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap terutama untuk komoditas udang, tuna dan rumput laut. Kontribusi perikanan tangkap pada tahun 2008 meningkat 2,78 persen menjadi 5,18 juta ton dari 5,04 juta ton pada tahun 2007. Sementara itu, kontribusi perikanan budidaya pada tahun 2008 meningkat sekitar 10,31 persen menjadi 3,53 juta ton dari 3,20 juta ton pada tahun 2007.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan tersebut di atas, berbagai upaya telah dilakukan antara lain: (1) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap di antaranya melalui pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan sebanyak 968 unit; (2) pengembangan sarana dan prasarana budidaya antara lain mengoptimalkan tambak yang ada dan pembangunan serta penaatan saluran tambak; (3) pemacuan stok ikan di perairan umum; (4) bantuan permodalan dan subsidi benih; (5) optimalisasi unit pembenihan dan pembangunan *broodstock center;* (6) restrukturisasi armada perikanan tangkap; (7) penataan sistem penangkapan ikan; dan (8) pemberian pelatihan dan penyuluhan.

Selanjutnya, meskipun volume ekspor komoditas perikanan pada tahun 2008 meningkat 4,8 persen dari 854 ribu ton pada tahun 2007 menjadi 895 ribu ton pada tahun 2008, namun nilai ekspor perikanan meningkat sebesar 13,3 persen dari US$2,26 miliar pada tahun 2007 menjadi US$2,56 miliar pada tahun 2008. Hal ini terjadi karena meningkatnya harga komoditas perikanan yang cukup signifikan akibat adanya peningkatan mutu ekspor hasil perikanan dan berkurangnya hambatan tarif ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor antara lain Jepang, serta adanya promosi produk perikanan. Negara tujuan ekspor hasil perikanan terbesar adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Sejalan dengan peningkatan produksi komoditas perikanan, jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor perikanan sebagai salah satu alternatif usaha, meningkat sebesar 6,36 persen dari 7,23 juta orang pada tahun 2007 menjadi 7,69 juta orang pada tahun 2008. Tenaga kerja tersebut mencakup nelayan, pembudidaya ikan, pembenih, pengolah, pemasar, dan tenaga kerja pada jasa penunjang kelautan dan perikanan. Penyerapan tenaga kerja perikanan budidaya mencakup 55 persen dari total tenaga kerja kelautan dan perikanan.

Demikian juga, penyediaan ikan untuk konsumsi per kapita pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,01 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Penyediaan ikan konsumsi pada tahun 2007 sebesar 28,28 kg/kapita/tahun menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Peningkatan ini telah didukung oleh perbaikan sarana dan prasarana perikanan, pengembangan informasi dan promosi pemasaran hasil perikanan di dalam negeri, serta peningkatan kampanye gemar makan ikan.

Selain itu, dalam rangka pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, pada tahun 2008 telah dilakukan program pemberdayaan yang mencakup 115 kabupaten/kota, pembangunan *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN) yang sampai dengan tahun 2008 mencapai 225 SPDN yang tersebar di 136 kabupaten/kota, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimasi penangkapan, pelelangan, penanganan ikan serta optimasi 4.370 Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Perkiraan pencapaian tahun 2009 pada sektor perikanan berupa peningkatan PDB perikanan menjadi 2,6 persen. Hal ini karena meningkatnya produksi perikanan menjadi 12,73 juta ton dan volume ekspor sebesar 1,6 juta ton dengan nilai ekspor sebesar US$2,8 miliar. Selanjutnya, penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat menjadi 30,17 kg/kapita/tahun. Kesempatan kerja bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan jasa penunjang pada tahun 2009 sekitar 10,02 juta orang. Demikian juga, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya diharapkan dapat meningkat pula, termasuk terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang mencakup 117 kabupaten/kota.

Selanjutnya, sumber daya alam lainnya yang menjadi modal pembangunan ekonomi adalah **sektor kehutanan**. Beberapa kebijakan pemerintah diluncurkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya hutan, antara lain dengan mendorong pertumbuhan industri kehutanan dalam negeri. Dengan tumbuhnya industri kehutanan dalam negeri diharapkan terjadinya peningkatan nilai

tambah produk kehutanan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sektor kehutanan Indonesia pada periode pembangunan tahun 1980 hingga 1998 menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB dibandingkan negara lain di Asia. Namun satu dekade terakhir pertumbuhan PDB sektor kehutanan terus mengalami penurunan, dan pada tahun 2006 hanya mencapai 0,90 persen.

Supply kayu bulat untuk industri kehutanan meningkat dari 25,19 juta m^3 pada tahun 1980 menjadi 29,5 juta m^3 pada tahun 1997. Dalam kurun waktu yang sama diperkirakan konsumsi kayu bulat jauh lebih besar. Sebagai contoh, FAO pada tahun 1997 melaporkan bahwa produksi kayu bulat di Indonesia mencapai sekitar 45 juta m^3. Mulai tahun 1998, produksi kayu bulat mulai menurun hingga hanya mencapai sekitar 21,8 juta m^3 pada tahun 2006. Sementara itu, kebutuhan industri kehutanan mencapai 13,1 juta m^3 kayu bulat dan 6,3 juta ton kayu serpih (10,7 juta m^3).

Dalam satu ekosistem kawasan hutan, selain hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa-jasa lingkungan (jasling) hutan juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi namun belum dikembangkan secara optimal. HHBK dan jasling antara lain berupa: (1) jasa penyediaan bagi berbagai kebutuhan manusia seperti bahan untuk obat-obatan dan kosmetika, plasma nutfah, air, dan lain-lain; (2) jasa pengaturan bagi kualitas iklim, udara, air, erosi, sedimentasi dan mengontrol berbagai aspek biologis di muka bumi; (3) jasa kultural dalam pembentukan identitas budaya, hubungan sosial, peninggalan pusaka, wisata, dan lain-lain; dan (4) jasa pendukung dalam pembentukan formasi tanah, oksigen, habitat, dan siklus mineral. Jenis jasa lingkungan yang telah dimanfaatkan secara komersial maupun non komersial meliputi jasa lingkungan hutan bagi perlindungan dan pengaturan tata air (sumber daya air), penyerapan dan penyimpanan karbon (perdagangan karbon), konservasi keanekaragaman hayati (plasma nutfah), dan penyediaan keindahan bentang alam (ekowisata).

Saat ini tercatat 90 komoditas HHBK yang dimanfaatkan dan diperdagangkan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Beberapa HHBK yang utama tersebut antara lain adalah rotan, bambu, lebah, sutera serta gaharu. Sementara itu, potensi wisata alam di Indonesia sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan diperkirakan nilai ekonomi dari ekowisata mampu memberikan kontribusi sebesar 7% dari total nilai wisata.

Hingga tahun 2008 capaian dari upaya revitalisasi kehutanan yang meliputi HHK dan HHBK antara lain adalah: (1) terselesaikannya rancang bangun pembentukan unit usaha hak pengusahaan hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada kawasan yang belum dibebani hak/izin seluas 3,2 juta hektar dalam bentuk Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HT-HTR, dan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK); (2) bertambahnya luas HTI menjadi 5 juta hektar dengan potensi 100 m^3/hektar; (3) terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan sebesar 10% dan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10%; (4) terlaksananya pengembangan sentra HHBK (sentra bambu seluas 2.605 hektar di 12 provinsi, sentra sutera alam seluas 160 hektar, sentra rotan seluas 250 hektar, sentra gaharu 800 hektar, sentra madu 12 unit, sentra HHBK unggulan seluas 250 hektar); (5) terselenggaranya kegiatan pembangunan hutan rakyat seluas 100.000 hektar; (6)

meningkatnya kawasan luasan hutan di daerah perkotaan (hutan kota); serta (7) meningkatnya produk tumbuhan dan satwa liar (TSL).

Selanjutnya, penyediaan **energi** juga merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang penting untuk pembangunan eknonomi nasional. Oleh sebab itu, upaya peningkatan **ketahanan energi** terus dilakukan. Ketahanan energi dapat ditinjau dari tiga komponen utamanya yaitu ketergantungan terhadap energi impor, ketergantungan terhadap energi minyak, dan efisiensi pemanfaatan energi. Ketahanan energi yang tinggi ditunjukkan dengan rendahnya ketergantungan terhadap energi impor, rendahnya pemanfaatan minyak serta pemanfaatan energi yang efisien. Dampak fluktuasi harga minyak dunia selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa aspek keamanan energi (*energy security*) memerlukan perhatian serius. Pengelolaan energi memerlukan paradigma baru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, penciptaan nilai tambah pemanfaatan energi di dalam negeri, penekanan penggunaan energi yang lebih hemat, dan pengaturan harga yang lebih mencerminkan nilai keekonomiannya, pengusahaan serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pemanfaatan sumber-sumber energi primer setempat.

Indonesia memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar, diperkirakan cadangan minyak bumi terbukti (*proven reserve*) saat ini (2008) sebesar 3,7 miliar barel; tersedia (*proable reserve*) sebesar 1,7 miliar barel; dan terduga (*possible* reserve) 2,7 miliar barel. Untuk gas bumi cadangan gas terbukti sebesar 112,5 TCF; tersedia sebesar 29,6 TCF; dan terduga 27,9 TCF. Dilihat dari total cadangan minyak dunia, cadangan minyak terbukti ini relatif kecil, yaitu hanya sekitar 0,3-0,4 persen dari cadangan minyak dunia.

Pada awalnya Indonesia adalah salah satu negara eksportir minyak bumi. Akan tetapi sejak tahun 2004, status Indonesia berubah dari *net oil exporter* menjadi *net oil importer*. Produksi minyak sejak tahun 1995 menurun dengan *decline rate* sekitar 10 persen per tahun. Namun demikian, *decline rate* ini dapat diturunkan menjadi sekitar 1 persen pada tahun 2006, sekitar 4 persen pada tahun 2007, dan akhirnya produksi minyak dapat meningkat sekitar 3 persen pada tahun 2008. Meskipun demikian, jumlah produksi pada tahun 2006-2007 hanya berkisar satu juta barrel per hari (MBOPD), bahkan saat ini, produksi minyak mentah berada di bawah 1 juta barrel per hari. Pada tahun 2009, produksi minyak ditargetkan sebesar 960 ribu barrel per hari.

Adapun, produksi gas bumi cenderung terus meningkat, mencapai 7,46 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2008 dan ditargetkan meningkat menjadi 7,53 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2009. Meskipun demikian, kemampuan produksi gas bumi ini belum dapat memenuhi kebutuhan gas bumi yang terus meningkat. Upaya pengembangan lapangan gas baru cenderung menemukan cadangan yang mengecil pada mayoritas temuan lapangan gas. Sementara, upaya pengembangan infrastruktur gas bumi masih sangat terbatas.

Nilai investasi minyak dan gas bumi (migas) terus mengalami kenaikan namun dengan laju pertumbuhan yang terus menurun dibandingkan dengan laju pertumbuhan investasi migas 5 sampai 10 tahun yang lalu. Dalam tahun 2007, nilai investasi migas mencapai sekitar US$11 miliar, dan

dalam tahun 2008 meningkat menjadi sebesar US$12 miliar. Pada tahun 2009, investasi migas ditargetkan akan terus bertambah mencapai sekitar US$13 miliar. Nilai investasi di sektor hulu migas sangat dominan, rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari total investasi migas, sedangkan sisanya merupakan nilai investasi di sektor hilir migas.

Peranan minyak bumi dalam penyediaan energi nasional masih sangat besar. Sampai akhir tahun 2007, sekitar 39,86 persen konsumsi energi nasional di luar listrik (8,12 persen) berasal dari minyak bumi (termasuk impor), sedangkan energi dari batubara sebesar 13,31 persen; gas bumi 8,75 persen; air 2,02 persen; panas bumi 0,93 persen; dan biomasa 29,96 persen. Ketergantungan energi yang sangat besar pada minyak bumi akan cepat menguras cadangan yang ada sehingga jumlah cadangan terus mengalami penurunan. Khusus untuk pembangkitan tenaga listrik, pada tahun 2008, sebesar 39 persen menggunakan batubara; 30 persen bahan bakar minyak (BBM); 20 persen gas bumi; 8 persen tenaga air; dan hanya 3 persen panas bumi.

Dalam rangka diversifikasi energi, pemanfaatan sumber energi terbarukan saat ini dilaksanakan oleh berbagai institusi secara sporadis dan bersifat lokal. Pengembangan energi terbarukan dalam skala besar menghadapi kendala dalam hal regulasi dan harga. Selama harga BBM mendapat subsidi, jenis energi lain akan sulit berkompetisi. Upaya diversifikasi yang belum berjalan dengan baik tersebut dapat diukur dari pangsa energi non BBM yang masih rendah dalam pemanfaatan energi nasional.

Efisiensi pemanfaatan energi dapat digambarkan melalui intensitas energi yang merupakan rasio konsumsi energi final per PDB nilai konstan selama kurun waktu 2004-2006 relatif tetap, bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2004 rasio ini sebesar 0,34 SBM/juta Rp; turun menjadi 0,32 SBM/juta Rp di tahun 2005 dan 0,31 SBM/juta Rp di tahun 2006. Dengan satuan yang berbeda, intensitas energi pada tahun 2008 adalah 393 TOE/Juta US$. Upaya efisiensi dan konservasi energi melalui perilaku dan teknologi hemat energi menjadi kunci utama efisiensi dalam pemanfaatan energi.

Selanjutnya, perubahan bentuk pengelolaan menjadi perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menggantikan UU Pertambangan No. 11 Tahun 1967, menjadi hal paling penting dalam perubahan aturan pertambangan. UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) juga mengakui kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan serta memperjelas desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, investasi sektor pertambangan umumnya mengalami pasang surut, dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kurang mendukungnya iklim investasi sebagai akibat adanya konflik lahan dan ketidakpastian regulasi sehingga menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Pada tahun 2008 sebagian besar produksi mineral mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan terjadi untuk produksi emas yang turun sebesar 47 persen menjadi 62,7 ton. Produksi bijih nikel, tembaga, dan logam timah juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 25 persen (5,3 juta wmt); 18 persen (655 ribu ton); dan 17 persen (53 ribu ton). Meskipun demikian, produksi perak dan batubara mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12 persen (302 ton) dan 2 persen (183 juta ton).

Penurunan produksi tembaga, emas, dan perak terutama disebabkan terjadinya hambatan operasi di daerah kuasa penambangan (KP) penghasil utama dan belum selesainya izin pinjam pakai lahan oleh KP baru. Sementara itu, penurunan produksi bauksit disebabkan merosotnya produksi dari beberapa KP. Walaupun demikian, tidak semua mineral mengalami penurunan produksi. Produksi bijih besi dan bijih nikel mengalami kenaikan di tahun 2008 dengan bertambahnya jumlah KP yang berproduksi.

Sebagai upaya pengembangan sumber daya alam nasional, fungsi informasi geologi sangat penting untuk mengetahui cadangan tambang dan mineral nasional. Hingga saat ini telah diakukan beberapa kegiatan pemetaan bersistem yang meliputi seluruh wilayah nusantara seperti peta geologi skala 1:250.000; peta gaya berat dan berbagai peta lainnya. Kedalaman peta geologi yang dimiliki untuk skala nasional masih belum mampu mengambarkan secara akurat kekayaan alam nasional. Keadaan ini akan sangat menyulitkan posisi indonesia di dalam upaya untuk menarik investasi karena tingkat kepercayaan terhadap cadangan mineral nasional masih kurang meyakinkan para investor.

Dalam rangka mempercepat peningkatan Investasi pertambangan dan penataan ruang nasional, diperlukan peningkatan penyiapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi dan Wilayah Pertambangan (WP) mineral dan batubara. Berdasarkan amanat UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa pemerintah harus menyiapkan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi dan Wilayah Pertambangan (WP) mineral dan batubara serta Wilayah Pencadangan Nasional (WPN). Oleh karena itu diperlukan Peningkatan kegiatan Survei dan Pemetaan Geologi, Geofisika, Geokimia dalam mendukung Promosi Wilayah Kerja Pertambangan.

A.2. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi tidak hanya berupa materi, tetapi juga jasa lingkungan yang di masa yang akan datang akan besar peranannya dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan hidup terus dilakukan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Selain itu, upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dilakukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas dan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian juga upaya mengatasi *illegal logging*, *fishing* dan *mining* dengan cara peningkatan pengawasan, penegakan hukum terus dilakukan secara lebih intensif. Sejalan dengan itu, dilaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih intensif mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan di darat, laut dan udara serta penanganan perubahan iklim global.

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan laut selama ini selain mendatangkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dalam pemanfaatan sumber daya hutan, dampak negatif dapat terjadi apabila kaidah *sustainable forest management* (SFM) tidak dilaksanakan dengan baik. Permasalahan dari tingginya laju kerusakan hutan adalah terganggunya siklus hidrologi yang ditandai dengan makin seringnya terjadinya banjir dan longsor pada musim hujan, makin seringnya terjadinya kekeringan pada musim kemarau sehingga diperlukan **pengelolaan sumber daya air** yang terpadu. Saat ini, terjadi penurunan kemampuan daerah aliran sungai (DAS) sebagai penyangga kehidupan dan lingkungan hidup serta penyangga air, baik air permukaan maupun air tanah dalam.

Penyebab lain dari kerusakan DAS yang tidak kalah penting adalah ketidakterpaduan antarsektor dan antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di dalam DAS. Kurangnya pemahaman filosofi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tersebut. Penyebab lain dalam kerusakan ekosistem DAS adalah adanya penebangan liar dan konversi hutan untuk kepentingan non hutan. Berbagai penyebab kerusakan DAS sebagaimana telah disebutkan di atas menyebabkan meningkatnya jumlah DAS kritis. Jumlah DAS yang berkondisi kritis pada tahun 1984 sebanyak 22 dan meningkat menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 pada tahun 1992 dan tahun 1998, bahkan pada tahun 2005 terdapat lebih kurang 282 DAS dalam kondisi kritis. Kondisi ini merupakan sinyal bahwa keberlanjutan hidup dan kehidupan umat manusia pada DAS terkait sudah terancam karena ada kemungkinan manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu air.

Dalam rangka mengatasi kondisi hutan dari degradasi dan deforestasi, serta sekaligus mengatasi kondisi DAS kritis prioritas beberapa langkah kebijakan **rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam** telah ditempuh, di antaranya melalui rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pengamanan hutan dari pencurian dan kebakaran, serta pengembangan HHBK dan jasling.

Sampai dengan tahun 2007, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam telah menghasilkan berbagai capaian antara lain: (1) terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1,66 juta hektar di 33 provinsi; (2) terwujudnya model pengelolaan mikro DAS di 282 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS; (3) penanaman 844,80 juta batang pohon di 282 DAS dan 33 provinsi;

(4) berkurangnya sekitar 1,5 juta hektar lahan kritis dari total 77,81 juta hektar; (5) terbangunnya hutan rakyat seluas 5.875 hektar; (6) terbangunnya 3.100 hektar hutan tanaman jarak pagar; (7) terwujudnya gerakan penanaman swadaya dan mitra sebanyak 1,5 juta bibit tanaman di 8 provinsi; serta (8) terlaksananya kampanye Indonesia Menanam.

Sementara itu, beberapa hasil yang telah dicapai hingga tahun 2008 dalam pengamanan hutan dari pencurian dan kebakaran hutan antara lain adalah: (1) dilaksanakannya Operasi Pengamanan Hutan pada 77 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional (TN) dan konservasi dumber daya alam (KSDA) serta Dinas Provinsi sebanyak 350 kali; (2) operasi gabungan sebanyak 150 kali di UPT pada provinsi rawan pencurian kayu yang melibatkan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kepolisian; (3) menguatnya kapasitas kelembagaan perlindungan hutan di Pusat dan UPT termasuk Dinas Kehutanan, di antaranya pembentukan Pasukan Pengamanan Hutan (Pamhut) Swakarsa pada UPT; (4) meningkatnya kapasitas sumber daya pengendalian kebakaran hutan melalui peningkatan kesiapsiagaan personil anggota Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) serta revitalisasi peralatan Brigdalkarhut berupa penggantian peralatan yang sudah rusak dan penambahan peralatan baru sesuai dengan standar; (5) pengembangan sistem informasi peringatan dini kebakaran hutan melalui kegiatan *fire watch Indonesia* guna pencegahan kebakaran hutan; serta (6) membangun jejaring kerja dengan para pihak terkait termasuk TNI dan Polri dalam kegiatan pemadaman kebakaran.

Hasil yang telah dicapai hingga tahun 2008 dalam pengembangan HHBK dan jasling adalah: (1) penetapan dan pemantapan 21 TN Model dengan kegiatan meliputi pengukuhan, rencana pengelolaan dan zonasi; (2) Permenhut mengenai kolaborasi manajemen kawasan konservasi, serta terwujudnya model desa konservasi khususnya dalam pengembangan daerah penyangga di 19 Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam (KPA/KSA); (3) terevaluasinya pelaksanaan pinjam pakai di 17 KPA/KSA; (4) tersedianya Atlas Tipe Ekosistem Lahan Basah di 6 lokasi KSA/KPA; (5) penyusunan dan pengesahan Rencana Pengelolaan (RP) dan penataan zona/blok di 191 kawasan konservasi; (6) meningkatnya nilai tambah produk dan pelayanan prima TSL; (7) terwujudnya pengembangan lahan basah di 6 lokasi *marine heritage site*; (8) terselenggaranya monitoring serta evaluasi kondisi Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Buru (TB) di 4 lokasi; serta (9) penyusunan model pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi.

Untuk menangani kerusakan kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 2 tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawaasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Diharapkan Inpres No. 2 tahun 2007 dapat menjadi payung bagi semua sektor dalam konservasi, budidaya, dan pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan eks PLG.

Diperkirakan hingga tahun berjalan pembangunan 2009, telah terlaksana beberapa capaian dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan antara lain: (1) tersedianya sarana prasarana yang mendukung kegiatan perlindungan hutan di 77 UPT TN dan KSDA dan Markas Komando

(Mako) SPORC; (2) berfungsinya Pamhut Swakarsa pada Balai Besar (BB)/Balai TN dan BB/Balai KSDA yang telah dibentuk dan dilatih; (3) menurunnya *hot spot* menjadi 0–10 persen dari tahun sebelumnya; (4) penataan zona/blok KSA/KPA di 8 lokasi dan tersusunnya RP KSA/KPA di 9 lokasi; serta (5) mulai terlaksananya kegiatan *Hearth of Borneo* (HOB).

Pada Tahun 2008, upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam juga dilakukan di sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral, dengan hasil antara lain: pelaksanaan reklamasi lahan pada lebih dari 30.000 hektar, yaitu di lokasi-lokasi lahan Kontrak Karya sekitar 8.000 hektar, lahan PKP2B sekitar 14.000 hektar dan lahan Kuasa Pertambangan sekitar 7.000 hektar.

Untuk tahun 2009 upaya rehabilitasi dan konservasi pada sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral perkiraan pencapaiannya adalah: (1) terselesaikannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; (2) tersedianya kebijakan untuk mendukung pengolahan dan pemurnian produk tambang untuk meningkatkan *added value*; (3) terlaksananya penerapan *good mining practice* pada 38 PKP2B, 14 KK dan 7 WKP; (4) berkurangnya jumlah tingkat kecelakaan tambang, dampak lingkungan atas kegiatan tambang, dan; (4) tercapainya konservasi sumber daya mineral dan batubara, lindungan lingkungan standardisasi dan optimalisasi usaha jasa pertambangan.

Sementara itu, **pembangunan sumber daya kelautan** dalam rangka pelestarian lingkungan difokuskan pada pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, pengembangan jasa kelautan, rehabilitasi dan konservasi.

Pada tahun 2008 dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan (*illegal fishing*) telah dilakukan pengawasan dan penegakan hukum melalui pengadaan kapal hingga menjadi 20 unit, kerja sama patroli, peningkatan jumlah awak kapal pengawas hingga 233 orang, peningkatan hari operasi menjadi 180 hari, dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah mencapai sejumlah 1.369 kelompok di 33 provinsi. Dengan penambahan sarana dan prasarana tersebut, jumlah kapal yang di*ad-hoc* meningkat menjadi 242 dari 184 pada tahun sebelumnya, sementara jumlah tindak pidana terus menurun dari 116 pada tahun 2007 menjadi 62 kasus pada tahun 2008. Pada tahun 2008 ini telah pula berhasil diselamatkannya potensi kerugian negara sekitar Rp556 miliar.

Dalam pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, pada tahun 2008 telah dicapai verifikasi 13.374 pulau yang sudah mempunyai nama dan koordinat yang jelas, dan pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil. Di samping itu juga telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan perda tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 25 kabupaten/kota, pengadaan bantuan sarana/modal usaha mata pencaharian alternatif di Pulau-pulau Kecil, pengembangan tata ruang dan investasi di pulau Batam termasuk P. Nipa, P. Bintan dan P. Berhala; serta pemasangan tanda-tanda zonasi di P. Berhala Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya, untuk mengembangkan jasa kelautan hingga tahun 2008 di antaranya telah dicapai pengembangan 15 lokasi wisata bahari dan 3 lokasi barang muatan kapal tenggelam (BMKT).

Selain mendukung upaya pelestarian, pengkayaan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bahari Indonesia, BMKT diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dan seimbang antara ekonomis dan non ekonomis. Kegiatan yang telah dilakukan (1) pengangkatan 34.793 benda berharga BMKT; (2) pelaksanaan pelelangan oleh Kantor Lelang Kekayaan Negara berdasarkan rekomendasi penjualan/lelang BMKT dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; dan (3) dibangunnya *warehouse* BMKT di Cileungsi-Bogor untuk penyimpanan dan pengamanan hasil-hasil pengangkatan BMKT.

Sementara itu, dalam rangka rehabilitasi dan konservasi telah dibentuk 28 pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLPBM), pelestarian ekosistem mangrove melalui penyusunan rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pedoman Umum Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, dan uji coba model rehabilitasi di kawasan lahan kritis yaitu seluas 249,5 Hektar di Kab. Sidoarjo, Indramayu, Bekasi, Karawang, Tulang Bawang, Maros, Pemalang dan Jepara. Hingga tahun 2008 juga telah dilaksanakan pendeklarasian Kawasan Konservasi Laut daerah (KKLD) melalui SK Bupati/Kota di 31 kawasan pada 19 provinsi seluas 3,92 juta hektar dan kajian calon KKLD seluas 5,84 juta hektar. Di samping itu terdapat pula pencadangan Laut Sawu (4,68 juta hektar) dan Kepulauan Anambas sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, serta *launching* Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kaimana pada tanggal 25 November 2008 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Hingga tahun 2008 telah dicapai sekitar 7,3 juta hektar kawasan konservasi laut.

Kerja sama antardaerah dan tingkat regional juga terus dilaksanakan melalui *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Bismarck Solomon Seas Ecoregion* (BSSE), *Coral Triangle Initiative* (CTI), dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES).

Pelaksanaan pembangunan kelautan pada tahun 2009 diperkirakan semakin meningkat. Pada tahun 2009, untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan diperkirakan terjadi penambahan kapal pengawas menjadi total 23 unit, peningkatan hari operasi menjadi 200 hari, dan pembentukan 88 pokmaswas baru. Dengan peningkatan tersebut, tindak pidana juga diharapkan terus berkurang.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil, perkiraan tahun 2009 pencapaian pembangunan kelautan meliputi pemberdayaan 30 pulau-pulau kecil, pengelolaan 2 pulau-pulau kecil terdepan/terluar, 6 UPT Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, serta 1 lokasi perbatasan wilayah laut. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil dan diperkirakan juga dilaksanakan penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 5 kabupaten/kota.

Sehubungan dengan jasa kelautan, pada tahun 2009 juga diperkirakan peningkatan pengembangan 6 lokasi wisata bahari, pengangkatan benda berharga di 2 lokasi BMKT (Cirebon dan Bangka), serta 7 paket jasa kelautan lainnya. Di samping itu, kawasan konservasi laut terus

berkembang di 10 lokasi KKLD, terumbu karang di 908 lokasi dan kerja sama SSME, BSSE, CTI dan CITES. Diperkirakan pada tahun 2009 luas kawasan konservasi mencapai 8,7 juta hektar.

Selanjutnya, untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan **meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan** telah dilaksanakan berbagai upaya pembangunan bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2009 telah dilakukan upaya penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas kapasitas pengelolaan lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup.

Hingga tahun 2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang mengarah kepada program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas serta akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Melalui program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, seperti: (1) identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) seluas 20 hektar; (2) penyusunan model pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi; (3) penyusunan kajian teknis mengenai akses SDG dan pembagian keuntungan pemanfaatan SDG dan sosialisasi Protokol Cartagena ke berbagai pihak; (4) pembentukan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (BKKH); (5) terlaksananya penandatanganan kerja sama dalam jejaring informasi dengan pemda DIY, Sumatera Utara; (6) pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) melalui Gerakan Aksi Penanaman Serentak Indonesia yang mencapai lebih dari 79 juta pohon, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon sebanyak lebih dari 10 juta pohon, Kegiatan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) melalui Program Indonesia Hijau dan Bersih, Gerakan Bali Hijau dan Gerakan Bangka Belitung Hijau. Berdasarkan pelaksanaan program tersebut, didapatkan hasil tingkatan tutupan vegetasi pada tahun 2006-2007 adalah 37% dari luas Sumatera, 8,2% di Jawa, 39% di Kalimantan, 15-18% di Bali dan Nusa Tenggara, 49% di Sulawesi, 83% di Maluku, 73% di Papua, serta penerapan pendekatan pembangunan berkelanjutan pada kebijakan perencanaan pembangunan dan penataan ruang melalui integrasi pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dalam rencana tata ruang wilayah, rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang pulau berdasarkan daya dukung lingkungan, dan koordinasi penyiapan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk diterapkan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJP/M) dan daerah (RPJPD/MD).

Sedangkan melalui program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan berbagai upaya di antaranya: (1) menyusun/ menyempurnakan/mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup meliputi RUU PSDA, RUU PSDG, Revisi UU No. 23 Tahun 2007 dan 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup; (2) mengembangkan *Debt for Nature Swaps* (DNS) bidang lingkungan hidup sebesar

Rp68,75 miliar dari Pemerintah Jerman untuk menggerakkan Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui bisnis dan investasi lingkungan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pola kemitraan, kegiatan adiwiyata; (3) meningkatkan peran penerima kalpataru hingga mencapai 240 orang/kelompok; (4) kegiatan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan; (5) mengembangkan perangkat ekonomi dan pendanaan lingkungan alternatif dengan penerapan mekanisme pembangunan bersih yang telah berhasil menyetujui 70 usulan proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) melalui Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) hingga tahun 2008, 21 di antaranya telah diregristrasi di *CDM Executive Board;* serta (6) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, program peningkatan kapasitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berbagai kegiatan pengembangan data dan informasi, seperti: (1) disusunnya laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2004 hingga 2007, dan draft SLHI 2008, evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2004 hingga 2006, dan kajian status lingkungan 2002 – 2007; (2) terlaksananya pengembangan struktur metadata keanekaragaman hayati berdasarkan program tematik dan isu lintas tema dari Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui (BKKH); (3) disusunnya database SDG Holtikultura; (4) terbentuknya jejaring dengan pemerintah daerah melalui MoU dalam rangka pertukaran data dan informasi bidang keanekaragaman hayati; (5) disusunnya laporan analisis kualitas sungai dengan metode QUAL2E, Kajian potensi bencana Sumatera Barat, Maluku dan Papua; (6) pembuatan web-site Sistem Informasi Geografis (SIG); dan (7) pembuatan tutorial SIG *open based system* dan konversi data spasial.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan dengan kegiatan di antaranya: (1) pemantauan kualitas air sungai di 30 provinsi, kualitas air laut di 4 lokasi, kualitas air di 6 danau, kualitas lingkungan pasca bencana dan pasca tambang, serta udara di beberapa kota besar; (2) pengendalian dan pengelolaan pencemaran limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) difokuskan dengan metode pengurangan timbulan limbah B3 dengan pendekatan metode *reduce, reuse, recycle* (3R), didukung dengan fasilitasi kepada industri dalam penataan administrasi pengelolaan B3 dan limbah B3, serta penaatan baku mutu pengelolaan limbah B3 dari sumber institusi maupun non-institusi, dengan capaian telah tertangani sebanyak lebih dari 8 juta ton limbah B3; (3) pencegahan dan pengawasan didukung oleh kegiatan peningkatan kualitas

pengkajian dampak lingkungan dengan peningkatan peraturan, peningkatan kualitas metodologi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan tim penilai Amdal, dan dengan terus ditingkatkannya kegiatan penataan dan penegakan hukum lingkungan, yang ditunjukkan dengan telah dicapainya hasil telah diselesaikannya sejumlah 88 (delapan puluh delapan) kasus dari tahun 2005-2008, baik yang penyidikannya dilakukan secara mandiri oleh Penyidik KLH maupun penyidikan gabungan antara POLRI dan KLH; serta (4) penegakan hukum perdata melalui penyelesaian sebanyak 23 kasus terdiri dari 17 kasus diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan dan 6 kasus diselesaikan melalui pengadilan dan terbentuknya 32 Pos Pengaduan/Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH) dengan rincian 21 di provinsi dan 11 di kabupaten/kota.

Selanjutnya, kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan juga dilaksanakan melalui peningkatan sarana pengendali dampak lingkungan dalam bentuk laboratorium uji lingkungan dan metode kalibrasi serta pengujian, pengembangan kebijakan dan penerapan standarisasi lingkungan dengan sistem manajemen lingkungan (SML) ISO 14001. Berbagai program diperkuat pelaksanaannya di daerah seperti kegiatan Adipura untuk 375 kota, Program Peringkat (Proper) pada 667 perusahaan, Program Kali Bersih (Prokasih), Program Langit Biru, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengarusutamakan pengendalian dampak perubahan iklim dan penghapusan pemakaian bahan perusak ozon.

Sebagai bentuk pelaksanaan program pengendalian kerusakan lingkungan, dilakukan upaya pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut, penyusunan model pemulihan ekosistem pesisir dan laut secara terpadu, pemulihan kawasan karst Gunung Sewu, pemulihan kualitas sungai, pembuatan sumur resapan biopori, instalasi biogas, penanaman pohon di Kawasan Lindung dan pemulihan kerusakan danau-danau prioritas, serta bantuan teknis dan pendampingan pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

Selanjutnya, fenomena alam yang terjadi seperti perubahan iklim global yang terjadi saat ini menimbulkan konsekuensi yang memperparah terjadinya penurunnya kualitas hidup. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khususnya sektor sumber daya alam.

Sebagai bentuk **antisipasi mengatasi perubahan iklim global** ini telah dilakukan beberapa upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya **mitigasi** dampak perubahan iklim, serta **adaptasi** perubahan iklim global dengan meningkatkan upaya penyediaan informasi dini cuaca dan iklim.

Untuk memenuhi upaya tersebut, pembangunan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika harus dilakukan secara komprehensif. Kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu di bawah 5 menit. Penayangan informasi cuaca dan kejadian gempa bumi di media massa dan media elektronika merupakan salah satu implementasi kerja sama dengan media massa dan elektronika dalam rangka percepatan penyebarluasan informasi cuaca dan gempa bumi.

Di samping itu, untuk mendukung sektor pertanian, upaya peningkatan ketelitian prakiraan awal musim dan periode panjang musim telah dilakukan dengan menambah jumlah Zona Musim (ZOM). Selain itu, sebagai upaya antisipasi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir pada tahun 2008 telah dibangun 60 unit rumah ramah bencana di 11 lokasi dan dilakukannya uji coba *early warning system* di 2 lokasi, dan pada tahun 2009 dilakukan adaptasi dan mitigasi di 7 wilayah pesisir. Pada sektor kesehatan, telah dilakukan penelitian tentang perubahan iklim dan dampak sosio-ekonomi dalam rentang waktu tahun 1900-2000 serta skenario perubahan iklim pada rentang waktu tahun 2000-2010 untuk skala kabupaten.

Diseminasi informasi banyak dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan serta keterlibatan berbagai instansi–instansi di luar BMG yang mempunyai jaringan informasi komunikasi yang sudah tertata dengan baik. Kerja sama dalam bidang diseminasi informasi meteorologi dengan institusi TNI, POLRI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, televisi, radio, provider sistem telekomunikasi merupakan upaya dalam rangka percepatan penyampaian informasi meteorologi dan geofisika. Penayangan informasi meteorologi dan geofisika melalui *breaking news* di televisi dan radio merupakan salah satu implementasi dari kerja sama dengan media komunikasi dalam rangka percepatan penyebarluasan informasi meteorologi dan geofisika.

B. Permasalahan Dan Sasaran

B.1 Permasalahan

Upaya pemanfaatan sumber daya alam yang masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktek pembalakan liar (*illegal logging*), meluasnya kebakaran hutan dan lahan, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan liar (*illegal fishing*), dan pengeboman, meningkatnya kegiatan praktek penambangan liar (*illegal mining*) juga turut mengancam keberadaan hutan dan lahan produktif lainnya. Meningkatnya perluasan dan konversi

hutan alam, serta alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibandingkan potensinya. Dalam mendorong ketahanan pangan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional, masih kurang efisiensinya kegiatan usaha tani/pertanian, borosnya penggunaan sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan.

Dengan jumlah penduduk terpadat ketiga di dunia, Indonesia menjadi pasar/konsumen yang potensial bagi dunia, kondisi ini selain menjadi peluang tetapi juga bisa menjadi permasalahan jika kita mengingat tingginya jumlah bahan pangan yang perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia. Demikian juga dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan energi, lahan untuk pemukiman dan sebagainya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, tantangan terbesar yang dihadapi dalam bidang SDA dan LH saat ini adalah:

1. terpenuhinya kebutuhan pangan domestik dari produksi dalam negeri dalam upaya menciptakan ketahananan dan kemandirian pangan;
2. terjaganya ketahanan energi dalam negeri dengan orientasi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan peningkatan akses terhadap energi untuk seluruh masyarakat;
3. menjaga kualitas hutan dan tutupan tanah semaksimal mungkin sebagai pendukung sistem kehidupan, penghasil udara bersih dan menjaga keseimbangan siklus hidrologi;
4. menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati baik di wilayah darat maupun lautan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pendekatan keterpaduan darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem;
5. mengurangi dampak negatif dari pembangunan berupa pencemaran dan penurunan daya dukung lingkungan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
6. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global.

B.1.1 Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi

Saat ini kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia sudah semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatannya harus selalu memperhatikan daya dukung dan kemampuan asimilasinya secara ekologi, ekonomi dan sosial. Tekanan terhadap sumber daya alam ini semakin hari semakin meningkat dengan tingginya laju pertambahan penduduk, kebutuhan lahan baik untuk pemukiman maupun untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin meningkat. Tingginya laju konversi yang menyebabkan berkurangnya lahan-lahan produktif, akan mengancam pencapaian produksi pangan dalam negeri. Demikian pula kebutuhan akan energi akan semakin besar dan terus bertambah.

Selanjutnya, dalam pemanfaatan sumber daya alam ini, sumbangan terhadap perekonomian relatif masih rendah mengingat perolehan devisa dari sumber daya alam ini hanya diperoleh dari ekspor bahan baku sehingga nilai tambah dari produk yang berasal dari sumber daya alam tersebut

tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di sekitar sumber daya alam tersebut.

Tantangan yang dihadapi dalam prioritas bidang ini adalah: (1) Penyediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; (2) Penyediaan energi yang sebagian besar dipenuhi dari dalam negeri; (3) Peningkatan efisien dalam pemanfaatan sumberdaya alam; (4) mengembangkan inovasi dan sumberdaya alternatif; (4) Meningkatkan sinergitas hulu-hilir produk-industri sumberdaya alam guna meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

Permasalahan yang akan dihadapi dalam **pembangunan ketahanan pangan** pada tahun 2010 adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan jumlah jumlah penduduk; (2) jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka masih cukup besar dengan daya beli yang semakin menurun; (3) produktivitas usaha-tani yang relatif rendah; (4) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam/lahan yang semakin menurun; (5) konversi lahan pertanian, khususnya pangan, ke penggunaan non pertanian terus berlangsung; (6) kerusakan lingkungan dan pemanasan global (*global warming*) yang dapat mengancam produksi pangan; (7) teknologi pertanian yang relatif tertinggal; (8) masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan; (9) persaingan penggunaan komoditas untuk bahan pangan, pakan, dan energi (*food, feed and fuel*); (10) semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor; (11) persaingan usaha yang cenderung tidak sehat di pasar produk pangan penting (beras, daging ayam dan telur); (12) peningkatan peran daerah dalam ketahanan pangan; dan (13) keterbatasan keterjangkauan pangan terutama pada kelompok masyarakat miskin dan daerah terpencil.

Sementara itu, **pembangunan pertanian** pada tahun 2010 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan, khususnya di dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, yaitu (1) masih tingginya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan, yang ditunjukkan dengan tingginya konversi lahan pertanian sehingga mengancam tingkat produksi pertanian; (2) masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; (3) lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; (4) lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; serta (5) belum optimalnya kelembagaan pertanian, khususnya kelembagaan pemerintah, di dalam mendukung sektor pertanian.

Untuk **pembangunan perikanan**, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah: (1) masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; (2) rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; (3) masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; (4) rendahnya produktivitas akibat rusaknya lingkungan sumber daya dan sentra-sentra perikanan budidaya baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh manusia; (5) masih adanya praktek *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *fishing*; (6) usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; (7) masih rendahnya sarana dan prasarana

perikanan yang ada untuk menjangkau perairan Indonesia yang luas; (8) mahalnya biaya input produksi karena sebagian masih diimpor yang menyebabkan meningkatnya biaya operasional yang tidak selaras dengan kenaikan harga ikan; (9) adanya hambatan non-tarif dari negara importir produk perikanan Indonesia; dan (10) belum tertatanya lahan dan pengusahaan perikanan budidaya masih belum memperhitungkan skala ekonomi, serta kurangnya kegiatan penyuluhan di lapangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada **pembangunan kehutanan** adalah: (1) belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi alam baik kayu, bukan kayu maupun jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional; (2) masih rendahnya jumlah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman yang bersertifikat untuk pengelolaan hutan produksi secara lestari; (3) belum optimalnya produksi kayu dari hutan tanaman untuk memenuhi bahan baku industri perkayuan; (4) belum optimalnya perkembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (5) masih rendahnya efisiensi industri kehutanan; (6) rendahnya pemanfaatan teknologi baru dalam industri kehutanan sebagai upaya meningkatkan efisiensi industri kehutanan; (7) semakin besarnya kesenjangan penyediaan bahan baku dengan kebutuhan industri kehutanan; (8) meningkatnya persaingan dari negara-negara penghasil kayu dan produk kayu; (9) menurunnya daya tarik modal asing dalam investasi di industri kehutanan karena masalah tenurial, tumpang tindih peraturan pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah di atasnya, pungutan daerah, retribusi, pajak daerah, pajak bagi hasil, tata ruang; (10) rendahnya penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal logging* dan *illegal trading* di bidang kehutanan; serta (11) belum berkembangnya unit-unit usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Pada tahun 2010, **pembangunan energi** masih menghadapi sejumlah permasalahan, yaitu: (1) menurunnya produksi minyak bumi hingga di bawah satu juta barel per hari; (2) belum optimalnya pemanfaatan sumber energi selain minyak bumi; (3) peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah sering kali berseberangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha yang sekaligus menghambat laju investasi eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan; (4) tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dengan kawasan hutan lindung telah menghambat laju pertumbuhan investasi eksplorasi dan eksploitasi tambang. Konflik fungsi peruntukan lahan ini telah mengurangi jaminan hukum dan pengusahaan pertambangan; (5) perlunya penerapan teknologi tinggi pada pengurasan sumur-sumur minyak tua yang saat ini memasuki tahap *decline*; (6) percepatan produksi lapangan-lapangan baru minyak bumi yang sudah siap untuk berproduksi, seperti Cepu; (7) perlunya peningkatan upaya eksplorasi cekungan-cekungan baru dan daerah *frontier* untuk menemukan cadangan baru minyak dan gas bumi; (8) perluasan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi; serta (9) percepatan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan energi listrik.

B.1.2 Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Mengingat kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang cenderung semakin menurun dan laju kerusakannya semakin tinggi, maka upaya peningkatan kualitas merupakan hal yang harus dilakukan secara lebih intensif. Upaya peningkatan daya dukung lingkungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumberdaya yang ada agar dapat memberikan manfaat optimal bagi kehidupan manusia saat ini maupun generasi yang akan datang.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam **pengelolaan sumber daya air** adalah: (1) menurunnya kemampuan DAS untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan; (2) masih terbatasnya bangunan pendukung teknis (waduk, bendung, *gully plug*, embung air, sumur resapan) dalam pengendalian kualitas DAS; (3) masih rendahnya kualitas pengelolaan DAS dan belum terwujudnya pendekatan *one river-one plan-one management*; (4) belum sinkronnya kebijakan antarsektor dalam pengelolaan DAS yang berdampak kepada pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien dan saling berbenturan; serta (5) masih rendahnya kesadaran para pihak termasuk masyarakat dalam keberlanjutan sumber daya air.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan **rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam**, permasalahan yang dihadapi di antaranya; (1) meningkatnya deforestasi semakin mengganggu kestabilan ekosistem yang berdampak negatif terhadap peran hutan sebagai sistem penyangga kehidupan; (2) rendahnya kemampuan rehabilitasi hutan dan lahan yang berkisar 500 ribu hektar per tahun dibandingkan dengan laju deforestasi yang mencapai 1,08 juta hektar per tahun; (3) rendahnya pengetahuan dan kepedulian para pengambil keputusan dalam rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi lahan gambut, dan konservasi lahan gambut; (4) masih belum selesainya tata batas kawasan hutan menyebabkan masih sering terjadinya perambahan terhadap kawasan hutan, khususnya hutan konservasi dan hutan lindung; (5) meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat tekanan dunia bisnis yang berbasis sumber daya alam; (6) tingginya laju pertumbuhan penduduk membawa dampak kepada meningkatnya tekanan terhadap keberadaan kawasan hutan; (7) minimnya upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan tujuan untuk memperpanjang usia produktif wilayah tambang; serta (8) perlunya pelembagaan gerakan hemat energi.

Sementara itu, permasalahan peningkatan **pengelolaan sumber daya kelautan** yang dihadapi antara lain: (1) masih banyaknya kegiatan *illegal fishing* yang mengakibatkan kerugian dari segi ekonomi dan kelestarian sumber daya; (2) masih kurang mapannya penataan ruang wilayah laut dan pesisir; (3) rusaknya ekosistem dan menurunnya kualitas lingkungan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (4) masih terbatasnya sarana dan prasarana dasar pendukung (transportasi, air bersih, listrik), khususnya di pulau-pulau kecil; (5) masih kurangnya mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (6) belum memadainya inovasi pengembangan teknologi dan informasi kelautan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan upaya **peningkatan kualitas daya dukung lingkungan** adalah: (1) kemerosotan daya dukung dan daya

tampung lingkungan, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas sumber daya air, penurunan kualitas udara khususnya di kota-kota besar; dan masih tingginya tingkat pencemaran limbah domestik, serta meningkatnya pencemaran limbah B3 karena terjadinya peningkatan produksi limbah B3, belum optimalnya pemulihan media tercemar B3, rendahnya infrastruktur pengelolaan limbah B3 terpadu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta institusi pengelola dan peraturan mengenai B3 dan limbah B3; (2) kelangkaan sumber daya alam akibat krisis lingkungan; (3) kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin parah dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati; (4) fenomena perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya laju kerusakan lingkungan; (5) masih rendahnya kapasitas pengelolaan, keterpaduan pengelolaan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup; (6) belum optimalnya penataan ruang dan lingkungan hidup; (7) lemahnya penerapan standardisasi lingkungan dan insentif bagi pembangunan lingkungan; serta (8) kurangnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Perubahan iklim global sebagai permasalahan lingkungan global juga terkait langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan iklim global membawa pengaruh terhadap ketahanan air, pangan, energi serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan ancaman terhadap sektor-sektor pembangunan lainnya. Fenomena terjadinya pencemaran dan kerusakan serta penurunan ketersediaan air di kala musim kemarau, dan melimpah pada musim hujan yang menyebabkan bencana banjir, kekeringan, longsor, merupakan sebagian kecil pengaruh dari perubahan iklim ekstrim. Perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya pergeseran musim di Indonesia yang menimbulkan implikasi di berbagai sektor pembangunan, yang menuntut perencanaan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan dampak perubahan iklim global.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyediaan informasi terkait dengan perubahan iklim adalah: (1) kurang optimalnya kinerja operasional Sistem Peringatan Dini; (2) kurangnya kalibrasi peralatan operasional secara periodik berdasarkan ketentuan dalam operasional peralatan; (3) kurang optimalnya Sistem Peringatan Dini Cuaca, Iklim dan Tsunami serta Pusat Peringatan Dini Badai (TCWC); (4) belum berlakunya Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Peraturan Pemerintah dari UU tersebut; (5) semakin kritisnya masyarakat terhadap fenomena alam sehingga menuntut pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang semakin cepat, tepat dan akurat, terutama aspek dari perubahan iklim; dan (6) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis untuk mendukung operasional dan pemeliharaan peralatan serta SDM untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan, baik di kantor pusat maupun daerah;

B.2 Sasaran

Sasaran umum pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup difokuskan pada penyediaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan PDB, ketersediaan pangan dan energi, serta

pertumbuhan ekonomi, upaya-upaya peningkatan daya dukung, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga terus dilakukan.

B.2.1 Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi

Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2010 melalui **peningkatan ketahanan pangan** adalah: (1) meningkatnya produksi komoditas utama pertanian, yaitu padi sebesar 65 - 66 juta ton GKG, jagung 19,8 juta ton, kedelai 1,5 juta ton, gula sebesar 2,9 juta ton, serta daging sapi sebesar 414 ribu ton; (2) meningkatnya mutu dan keragaman pangan yang berbasis sumber daya lokal; (3) sasaran komoditas lainnya yaitu Tanaman Pangan: kacang hijau 385 ribu ton, kacang tanah 1,03 juta ton, ubikayu 20,89 juta ton; hortikultura: bawang merah 1,06 juta ton, mangga 2,07 juta ton, jeruk 2,99 juta ton, rimpang 0,54 juta ton, tanaman hias 19,77 juta tangkai; Perkebunan: kelapa sawit 23,20 juta ton, karet 2,75 juta ton, kelapa 3,30 juta ton, kakao 1,02 juta ton; Peternakan: daging ayam ras 1,41 juta ton, total daging ternak 2,64 juta ton, telur 1,57 juta ton, dan susu 624 ribu ton.

Melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, ditargetkan akan terjadi peningkatan produksi, konsumsi, penyerapan tenaga kerja dan perolehan devisa. Sasaran **pembangunan sektor pertanian** adalah: (1) meningkatnya PDB sektor pertanian sebesar 3,5 persen, dengan pertumbuhan sub sektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 3,27 persen, sub sektor Perkebunan 2,97 persen, dan sub sektor Peternakan dan hasilnya 3,28 persen; serta (2) meningkatnya kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan meningkatnya nilai tukar petani menjadi 105-110.

Sasaran **pembangunan sektor perikanan** yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya kontribusi perikanan terhadap PDB nasional menjadi 2,65 persen; (2) meningkatnya produksi perikanan menjadi 12,73-13,36 juta ton; (3) meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 2,9 miliar; (4) meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat menjadi sebesar 30,89 kg per kapita per tahun; (5) meningkatnya penyerapan tenaga kerja kelautan dan perikanan menjadi 10,52 juta orang; (6) meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan; serta (7) terlaksananya program pemberdayaan yang menjangkau 17 persen dari desa pesisir yang miskin.

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka sasaran **pembangunan sektor kehutanan** untuk tahun 2010 adalah: (1) optimalnya pemanfaatan hasil hutan alam baik kayu maupun bukan kayu; (2) terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam secara lestari; (3) meningkatnya produksi hasil hutan kayu dari HTI dan HTR; dan (4) berkembangnya unit-unit usaha dalam pemanfaatan HHBK.

Selanjutnya, dalam **pembangunan energi**, sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2010 adalah: (1) mempertahankan tingkat produksi minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari; (2) menjamin terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri dengan target *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 75 juta ton; dan (3) menurunkan intensitas pemakaian energi menjadi 385 TOE/Juta US$. Sasaran pembangunan mineral dan tambang yang ingin dicapai pada tahun

2010 adalah (1) tercapainya target produksi, penjualan, penerimaan negara dan investasi; dan (2) tercapainya target pengembangan panas bumi.

B.2.2 Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Di samping itu, sasaran **peningkatan pengelolaan sumber daya air** adalah: (1) meningkatnya kualitas DAS dalam rangka mendukung pembangunan yang keberlanjutan; (2) menurunnya luasan lahan kritis terutama di DAS prioritas melalui rehabilitasi hutan dan lahan; dan (3) meningkatnya keterpaduan dalam pengelolaan DAS, baik lintas sektor maupun lintas wilayah.

Dalam rangka **rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam**, sasaran yang akan dicapai antara lain: (1) terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam secara lestari; (2) meningkatnya kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; (3) meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, penjagaan keanekaragaman hayati dan optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan hutan; dan (4) meningkatnya kegiatan pengamanan dan patroli hutan dalam rangka memberantas kegiatan *illegal logging* dan *illegal trading*.

Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai untuk mengatasi permasalahan **pembangunan kelautan** adalah: (1) mengembangkan potensi sumber daya kelautan sebagai arah pembangunan ke depan yang dilakukan dengan pendekatan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (termasuk pula pulau-pulau terluar); (2) meningkatkan pembangunan kelautan sesuai dengan potensi daerah dan dilakukan secara terintegrasi serta pengembangan industri kelautan yang sinergi, optimal dan berkelanjutan; (3) meningkatkan upaya mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) meningkatnya luas kawasan konservasi laut menjadi 10 juta hektar; (5) meningkatnya ketaatan terhadap peraturan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; serta (6) meningkatnya sumber daya riset kelautan dan perikanan dan pemanfaatan diseminasi Iptek.

Secara umum, sasaran pembangunan lingkungan hidup yang ingin dicapai adalah **peningkatan daya dukung lingkungan** melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengendalian pencemaran, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, serta integrasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ke dalam pengambilan keputusan pembangunan. Secara rinci, sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (1) terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di media sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah; (2) terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem; (3) membaiknya pengelolaan udara bersih dan sehat, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); (4) meningkatnya kualitas dan integrasi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam didalamnya, termasuk segi kualitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, data dan informasi lingkungan hidup, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan tingkat kepatuhan masyarakat.

Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai melalui upaya **peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim** adalah sebagai berikut: (1) mendorong upaya-upaya mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim; (2) terjaminnya kontinuitas operasi MEWS, CEWS dan TEWS dengan melakukan pemeliharaan menyeluruh peralatan yang telah terpasang, antara lain sensor, radar, AWS, ARG, AAQMS, peralatan manual lainnya serta sewa jaringan telekomunikasi sampai pengamanan sensor; (3) meningkatnya kecepatan diseminasi informasi peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim kepada masyarakat dengan melanjutkan pembangunan peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim (M/CEWS); (4) terbangunnya Decision Supporting System (DSS) sistem peringatan dini cuaca; (5) meningkatnya akurasi, jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi cuaca penerbangan dan kelautan untuk keselamatan pelayaran dan penerbangan dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan membangun sistem kalibrasi di Kantor Balai Besar; (6) beroperasinya pembangunan Gedung Operasional Utama yang akan mengkomodasi: Pusat Basis Data, Pusat Nasional Perpustakaan MKKuG, Pusat Sistem Telekomunikasi Terpadu dan Pusat Perbengkelan; (7) meningkatnya akurasi prakiraan iklim/musim untuk mendukung kegiatan pertanian dengan penguatan stasiun/pos kerjasama dan penelitian-penelitian dibidang klimatologi; (8) terlaksananya *Workshop International on Climate Information Service in Supporting Mitigation and Adaptation to Climate Change in Infrastructure and Health Sector*, Sidang IPCC tahun 2009, sosialisasi pengembangan dan evaluasi model iklim kepada masyarakat, metode diseminasi informasi potensi tsunami, serta produk informasi MKKuG lainnya; (9) meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pembangunan sarana dan prasarana Diklat untuk mengoptimalkan fasilitas BMKG; (10) terstandarkannya manajemen perencanaan dan sistem keuangan dan akutansi BMN; (11) terbangunannya Sistem Database Server Perencanaan tahap I; (12) terbaharuinya tarif jasa pelayanan informasi MKKuG; (13) meningkatnya sistem operasi pelayanan MKKuG di daerah; dan (14) terbangunnya Pusat Nasional Pustaka MKKuG.

C. Arah Kebijakan

Memperhatikan kondisi sumber daya alam lingkungan hidup yang memprihatinkan tersebut, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan menekankan pada daya dukung dan keberlanjutan fungsi lingkungan dalam menopang pembangunan nasional.

C.1 Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi

Untuk mencapai sasaran **ketahanan pangan dan pembangunan pertanian** seperti tersebut di atas, maka kerangka regulasi pembangunan pangan dan pertanian pada tahun 2010 diarahkan untuk: (1) mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan yang menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi seimbang dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional, daerah maupun rumah tangga; (2) menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan industri di dalam negeri melalui peningkatan produksi dan produktivitas; (3) meningkatkan pertumbuhan PDB sektor pertanian dan sub sektornya; (4) meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan/keterampilan, produktivitas, dan perlindungan dari dampak pasar global yang tidak menguntungkan petani; (5) meningkatkan daya saing produk pertanian, di tingkat domestik maupun global, melalui peningkatan mutu produk pertanian, efisiensi produksi, promosi, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang kondusif; (6) mendorong terbentuknya

kelembagaan permodalan pertanian yang mudah diakses oleh petani; serta (7) meningkatkan pengelolaan sumberdaya pertanian secara lestari dan berkelanjutan.

Sedangkan Arah kebijakan dari sisi kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah **bidang pangan dan pertanian** tahun 2010 adalah: (1) menyediakan bantuan dan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan input produksi komoditas pertanian; (2) membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana pertanian tingkat desa dan tingkat usaha tani; (3) menyediakan prasarana dan fasilitasi penyuluhan pertanian; dan (4) menyediakan dukungan teknologi dan diseminasinya kepada petani, serta menyediakan informasi yang diperlukan oleh petani.

Selanjutnya, dalam mendukung kegiatan revitalisasi, **pembangunan perikanan** diarahkan pada: (1) meningkatkan produksi dan ekspor produk perikanan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; (2) meningkatkan mutu dan nilai tambah produk serta mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif agar nelayan dan pembudidaya memperoleh akses permodalan lebih baik; (3) meningkatkan dan memperbaiki lingkungan perikanan; (4) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia termasuk kelembagaanya serta meningkatkan kegiatan penyuluhan di daerah; (5) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan; (6) meningkatkan konsumsi ikan masyarakat; (7) meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dalam upaya untuk menurunkan biaya produksi; dan (8) menata kembali lahan budidaya serta penyempurnaan perizinan pada sentra-sentra produksi perikanan melalui pendekatan yang terintegrasi.

Arah kebijakan **pembangunan kehutanan** tahun 2010 diarahkan pada revitalisasi kehutanan dengan meningkatkan perlindungan dan konservasi terhadap kawasan hutan, meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembangunan nasional melalui revitalisasi dan restrukturisasi industri kehutanan dari hulu ke hilir, serta mengembangkan hutan tanaman berbasis masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu untuk industri.

Untuk mencapai sasaran, arah kebijakan **pembangunan energi** adalah: (1) meningkatkan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi; (2) menjamin pengamanan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; (3) mendorong pembangunan infrastruktur energi; (4) meningkatkan program diversifikasi energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik; dan (5) meningkatkan implementasi dan penerapan efisiensi energi.

Sedangkan arah kebijakan **pembangunan mineral dan pertambangan** adalah: (1) meningkatkan peluang investasi yang lebih kompetitif untuk kegiatan eksplorasi guna menambah cadangan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi; (2) meningkatkan produksi dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, *good mining practices*, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; (3) menyiapkan wilayah pencadangan mineral dan batubara nasional; (4) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi kandungan mineral, batubara, dan panas bumi; (5) menyempurnakan mekanisme konsultasi publik

dalam proses pemberian izin secara lebih transparan; serta (6) mempromosikan *corporate social responsibility* (CSR).

C.2 Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan **pengelolaan sumber daya air** diarahkan untuk melakukan rehabilitasi DAS dan Sub DAS yang masuk kategori kritis, serta meningkatkan pengelolaan DAS secara terpadu. Sementara itu, arah kebijakan **peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam** adalah untuk meningkatkan: (1) kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan; (2) pemanfaatan keanekaragaman hayati dan tumbuhan dan satwa liar (TSL); (3) perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman, (4) pengembangan penggunaan jasa lingkungan hutan dan wisata alam; dan (5) pengembangan Taman Nasional Model.

Selanjutnya, peningkatan **pengelolaan sumber daya kelautan** diarahkan untuk: (1) meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan; (2) pengembangan potensi sumber daya kelautan melalui pendekatan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu; (3) pembangunan kelautan berkelanjutan yang terfokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis untuk pendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun perikanan, pariwisata bahari, energi, perhubungan laut dan industri maritim; (4) meningkatkan kapasitas SDM, Iptek dan riset kelautan dan perikanan; (5) meningkatnya upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (6) mengembangkan upaya mitigasi bencana laut, pesisir dan pencemaran laut.

Pembangunan lingkungan hidup dalam upaya peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan **kualitas daya dukung lingkungan** diarahkan untuk: (1) meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan untuk memenuhi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan; (2) meningkatkan upaya penataan lingkungan melalui pendekatan pengkajian dampak dan daya dukung lingkungan, dan didukung dengan penataan ruang yang harmonis; (3) meningkatkan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan; (4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup; (5) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sarana teknis pengendalian dampak lingkungan; dan (6) meningkatkan kualitas data dan akses informasi lingkungan hidup secara terpadu sektor dan daerah.

Pembangunan meteorologi, klimatologi dan geofisika dalam upaya **peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim** diarahkan untuk: (1) mendorong upaya penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai kegiatan dalam rangka menanggulangi terjadinya perubahan iklim, serta mendorong upaya-upaya pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terutama di daerah yang rawan perubahan iklim dan bencana alam; melakukan pemeliharaan menyeluruh peralatan yang telah terpasang, antara lain sensor, radar, AWS, ARG, AAQMS, peralatan manual lainnya serta sewa jaringan telekomunikasi sampai pengamanan sensor; (2) meningkatkan kecepatan diseminasi informasi peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim kepada masyarakat dengan

melanjutkan pembangunan peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim (M/CEWS); (3) meningkatkan akurasi, jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi cuaca penerbangan dan kelautan untuk keselamatan pelayaran dan penerbangan dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan membangun sistem kalibrasi di Kantor Balai Besar; (4) melanjutkan pembangunan Gedung Operasional Utama yang akan mengkomodasi: Pusat Basis Data, Pusat Nasional Perpustakaan MKKuG, Pusat Sistem Telekomunikasi Terpadu dan Pusat Perbengkelan; (5) meningkatkan akurasi prakiraan iklim/musim untuk mendukung kegiatan pertanian dengan penguatan stasiun/pos kerja sama dan penelitian-penelitian di bidang klimatologi; (6) melakukan sosialisasi pengembangan dan evaluasi model iklim kepada masyarakat, metode diseminasi informasi potensi tsunami, serta produk informasi MKKuG lainnya; (7) meningkatkan pembinaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pembangunan sarana dan prasarana diklat untuk mengoptimalkan fasilitas BMKG; (8) memperbaharui tarif jasa pelayanan informasi MKKuG; (9) meningkatkan sistem operasi pelayanan MKKuG di daerah; dan (10) membangun Pusat Nasional Pustaka MKKuG.

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2010
PRIORITAS BIDANG 9: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
Prioritas Bidang: Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan **Fokus: Penguatan Ketahanan Pangan**						
1	1580	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Pengelolaan pengembangan lembaga distribusi dan cadangan pangan masyarakat di sentra produksi pangan (750 gapoktan); Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan (33 prop)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	134,4
2	1544	Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pemberdayaan kemandirian pangan di desa rawan pangan (1.374 desa) dan Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat di lahan kering (19 kab)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	169,4
3	1567	Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian	Revitalisasi penggilingan padi kecil milik gapoktan di 54 kabupaten (54 paket); Pengembangan unit pengeringan dan penyimpanan jagung (5 unit); Pengembangan pasar tanaman hias (horti) 5 lokasi; Pengembangan pasar tani 34 unit (34 lokasi);	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	124,5

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			Pengembangan STA dan kemitraan 9 lokasi; Pengembangan pasar ternak 20 lokasi; Pengembangan pasar lelang 5 lokasi; Pengembangan informasi pasar (Insentif petugas dan sarana) di 150 kab/kota (4 sub sektor)			
4	1563	Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur Pertanian	Jariangan Irigasi (135.000 ha); Kelengkapan irigasi lainnya (875 unit); Jalan usahatani/produksi (1.756 km);Pengelolaan lahan (39.100 ha); Pengembangan SRI (100 unit); Pembukaan lahan pertanian (15.200 ha); Perluasan areal perkebunan, horti, dan peternakan (16.000 ha)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	678,7
5	1564	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan	Jumlah operasional BPMPT (1 unit); Jumlah operasional BBPOPT Jatisari (1 unit); Jumlah operasional BPTPH (29 unit); Pengendalian OPT (33 unit); Koordinasi dan pengawalan pestisida (33 unit); Operasional THLPOPT-PHP (1.288 org; Penyelenggaraan SLPHT (300 unit); Penyelenggaraan SL-Iklim (100 unit); Terlaksananya pengelolaan OPT Hortikultura (33 paket); Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hortikultura (1 paket); Terlaksananya Operasionalisasi BPTPH)33 paket);	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	457,3

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			Terselenggaranya Kegiatan Deteksi dini dan mitigasi dampak fenomena iklim (17 paket); Terselenggaranya pembayaran honor POPT PNS (307 org); Pengendalian OPT perkebunan kelapa, karet, jambu mete, lada, kopi, cengkeh (7258 ha); Operasional laboratorium (Lab. Lapangan, lab. Hayati, UPPT)(47 unit); Insentif petugas hama dan penyakit (851 org); pencegahan penyakit : ANTHRAX (250rb ds), RABIES (400rb ds), BRUCELLOSIS (150rb ds), Hog cholera (HC) (100rb ds), JEMBRANA (30rb ds); Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik; Pendampingan pembangunan lab BPMSOH dan operasional BPPV Subang dan Lab lainnya; Fasilitasi Puskeswan (15 unit); Pengamatan Penyakit Hewan Menular (BBV, BPPV dan PUSVETMA) (8 unit); Pengawasan Obat hewan (Fasilitasi BPMSOH dan Pedoman Pendaftaran Obat Yang Baik); Penanggulangan penyakit reproduksi pada sapi potong (30rb ekor); Peningkatan pelayanan keswan; Pembangunan lab AI (bantuan Jerman); Penyediaan pangan asal hewan ASUH (33 prop); Penerapan jaminan keamanan pangan pd mata rantai prod			

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			susu segar (6 unit); Pengembangan GHP pada unit usaha telur (5 prop); Monit & surveilans residu cemaran mikroba pada produk hewan (24 prop); Pengendalian penanggulangan zoonosis (33 prop); Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dan RPU (20 okt); Pengawasan dan Pelayanan Karantina Pertanian (323 wilker); Fasilitasi dan sertifikasi terhadap kegiatan ekspor di 20 lokasi			
6	1565	Pengembangan Pembibitan Sapi	Pengembangan perbibitan sapi/kerbau (22 pkt); Pengembangan perbibitan unggas(23 klp); Perbibitan kambing/domba-babi (17 kel); Peningkatan perbibitan sapi perah (10 klp); Faslitasi UPT Perbibitan (8 klp)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	55,0
7	1566	Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan Mekanisme Subsidi Pupuk	Operasional BBPMBTPH Cimanggis (1 unit); Operasional di BPSBTPH (29 unit);Operasional di BBI (27 unit); Pengembangan perbenihan 33 prop 200 kab; Koordinasi dan pengawalan perbenihan; Pengawas benih/bibit (700 org); Terlaksanya perbanyakan benih hortikultura dan operasional BBH (33 paket); Terselenggaranya Operasional Lab Kultur	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	107,3

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			Jaringan (11 pkt); Penguatan BPSBTPH dan BPMP TPH Cimanggis (32 pkt); Terlaksanaya revitalisasi Perbenihan Hortikultura (bawang merah, jamur, jahe, anggrek, durian, jeruk keprok) (6 pkt); Terlaksananya kegiatan perbenihan hortikultura (1 pkt); Terselenggaranya pembayaran BOP Pengawas Benih (700 orang); Bantuan benih mendukung gerbang ekspor tanaman hias (6 pkt); Bantuan benih di kawasan terintegrasi hortikultura (49 pkt); Akselerasi peningkatan produksi tebu: Pembangunan kebun bibit berjenjang (250 ha), Perluasan tebu rakyat (1.025 ha), Biaya operasional TKP dan pelatihan (71 org), Pengawalan tebu (133.567 Ha)			
8	1571	Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian	Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (85 tek); Varietas unggul baru (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (40 VUB); Bibit unggul ternak (4 jenis); Teknologi pengelolaan (35 tek); Kebijakan pengembangan sumberdaya (10 rekom); Pengembangan suberdaya (5 paket); Rekomendasi kebijakan (30 rekom); Diseminasi dan penjaringan inovasi teknologi (32 prop)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	334,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
9	1570	Peningkatan produksi, produktivitas & mutu produk pertanian	Jumlah satker pengawal SLPTT (400 satker); Jumlah SL-PTT padi non hibrida (80rb poktan); Jumlah SL-PTT padi hibrida (20rb poktan); Jumlah SL-PTT padi lahan kering (12 rb poktan); Jumlah SL-PTT jagung hibrida (10rb poktan); Penyelenggaraan SL-PTT kedelai (25rb poktan); Penyelenggaraan SL-PTT kacang tanah (5rb poktan); Pelatihan PL SL-PTT padi (30 unit); Pelatihan PL SL-PTT jagung (22 unit); Pelatihan PL SL-PTT kedelai (15 unit); Pelatihan PL SL-PTT kacang tanah (5 unit); Pelatihan komoditas non palagungnah (5 unit); Pengembangan komoditas non palagungnah (100 unit); Pengembangan Kawasan Hortikultura terintegrasi berbasis Good Agricultural Practices (GAP) (244 pkt); Terselenggaranya Management Pengembangan Hortikultura (199 pkt); Terselenggaranya Pembayaran Insentif Mantri Tani (2.625 org); Pengembangan inisiasi kawasan hortikultura (75 paket); Produksi semen beku dan pengadaan N2 cair (4jt ds); Fasilitasi Balai Inseminasi Buatan (2 unit); Fasilitasi Pengawasan Mutu Pakan (32 pkt); Budidaya babi dan aneka ternak (28 klp); Penyusunan program dan anggaran keg	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	722,2

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			pembangunan Satker lingkup peternakan (33 prop); Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Satker lingkup Peternakan(33 prop); Pengumpulan Data Statistik Peternakan Nasional (348 kab); Pengembangan ternak sapi (23 klp); Pengadaaan Pejantan (1000 ekor); Pengadaan Bull (50 ekor); Pengawalan dan monev kegiatan (33 prop)			
10	1588	Restrukturisasi Perunggasan	Honor THL Drh dan Paramedik; Restrukturisasi Perunggasan : Pengembangan budidaya unggas melalui VPF (49 klp); Restrukturisasi pemeliharaan unggas (15 unit); Pengembangan pakan lokal (7 unit)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	21,5
11	1592	Diversifikasi Pangan	Promosi penganekaragaman konsumsi pangan pada 132 unit usaha rumah tangga dan PKK, 132 SD/MI/Ponpes, 930 klp wanita tani, dan kerjasama dengan 12 perguruan tinggi dan 7 STPP	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	63,1
12	SUBSIDI	Penyediaan Dana Subsidi Pupuk	Penyediaan pupuk bersubsidi untukpupuk jenis urea (5,5 juta ton), NPK (1,5 juta ton), ZA (740 ribu ton), Superphos 1 juta	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	17.124,7

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			ton, dan organik (450 ribu ton)			
13	SUBSIDI	Penyediaan Dana Subsidi Benih	Penyediaan benih bersubsidi untuk komoditi padi non hibrida 62,5 rb ton, Jagung komposit 2 rb ton, jagung hibrida 3 rb ton, kedelai 2 rb ton; Cadangan Benih Nasional untuk : benih padi non hibrida 10rb ton, jagung komposit 375 ton, jagung hibrida 3,75 rb ton, kedelai 2 rb ton; Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk benih : padi non hibrida 50 rb ton, padi hibrida3 rb ton, padi lahan kering 7,5 rb ton, jagung hibrida 9rb ton, kedelai 12,8 rb ton, kacang tanah 6 rb ton, kacang hijau 250 ton, ubi kayu 20 rb ton, ubi jalar 1,2 rb ton.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	1.563,5
14	DAK	Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	Sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	1.492,2
15	CAD	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah	Pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 750 ribu ton.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Perum BULOG	NA

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
16	1576	Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian, dan Pengembangan Kelompok Tani	Biaya Operasional (BOP) Penyuluh PNS (28.706 org); Honorarium Penyuluh Kontrak (THL-TBPP) (29.170 org); Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan kelompok (33 rop); Fasilitasi Pembangunan/Renovasi BPP dan kegiatan Penyuluhan melalui FEATI; Sekolah Lapangan PLA (365 paket); Pemberdayaan Masyarakat melalui keg. READ Program di Sulteng (365 paket)	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	822,5
17	0021	Koordinasi, monitoring dan evaluasi stabilisasi harga pangan pokok, cadangan pangan dan penanganan pangan strategis	8 rumusan kebijakan koordinasi stabilisasi harga pokok cadangan pangan dan penanganan pangan strategsi (termasuk Timnas Stabilitasi Harga Pangan Pokok)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Kemenko Perekonomian	7,2
Fokus: Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan						
1	1552	Pengembangan Agroindustri Terpadu	Fasilitasi Investasi Terpadu Hortikultura (FATIH) 34 paket; Pengembangan gerbang ekspor tanaman hias 9 paket; Pengembangan komersialisasi kebun buah 29 paket;	Pengembangan Agribisnis	Deptan	150,2

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			Pengembangan sapi perah 2 paket; Roda 2 Inseminator (300 unit); Peningkatan Produksi Pakan Skala Kecil Ruminansia (10 paket) ; Peningkatan Produksi Pakan Skala Kecil Ruminansia (10 paket); Manajemen P2SDS (18 propinsi); UPJA Unggas (30 klp); ULIB (200 unit); Pengembangan agroindustri tepung singkong (MOCAF) (9unit); Pengembangan mutu bokar untuk ekspor (23 unit); Pengembangan mutu biji kopi untuk ekspor (13 unit); Pengembangan agroindustri mete dan minyak atsiri. (10 unit); Pengembangan agroindustri susu sapi (8 unit); Pengembangan agroindustri hortikultura mangga dan jeruk (10 unit)			
2	1553	Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas	Pembuatan rumah kompos (200 unit); Pengembangan sistem penyediaan dan pengawasan pupuk (33 prop); Sistem pengutuhan integasi kelapa sawit-sapi (15 paket); Pengembangan pertanian terpadu kakao-ternak (3 paket); Pengembangan pertanian terpadu kopi-ternak (3 paket); Pengembangan integrasi ternak-Tebu (3 paket); Batamas sapi potong /perah (100 klp); Integrasi tanaman-ternak sapi/kerbau (31 klp); Demplot biogas	Pengembangan Agribisnis	Deptan	40,8

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			babi / unggas/pupuk organik (10 klp)			
3	1554	Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan Perkebunan Komersial (Bahan Baku Bio Energi)	Kegiatan revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet, kapas, jarak, kelapa, teh, rempah) (84.300 Ha); Pengembangan Komoditi Unggulan Non Revit (kelapa sawit, jambu mete, karet, kakao, kopi robusta, kina - 20.985ha); Revitalisasi Perbenihan : Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan (690 ha); Penguatan Kelembagaan Perbenihan (67 paket); Insentif Pengawas Benih Tanaman (233 org)	Pengembangan Agribisnis	Deptan	285,7
4	1558	Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan	Berkembangnya Hortikultura Organik (49 paket); Pengembangan DAS/ Daerah rawan Erosi dan Longsor (21 paket);Pengembangan alternatif development (5 paket); Sertifikasi produk pangan organik sebesar 25% (15 unit); 75 % Pengembangan OKKPD dan pembinaan mutu di(18 unit); Pengembangan usaha pengolahan kompos dan biogas sebsar 50 % (24 unit)	Pengembangan Agribisnis	Deptan	27,7
5	999	Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu	Peremajaan, 20 ribu ha rehabilitasi, 60 ribu ha intensifikasi, 65 ribu ha pemberdayaan petani, 7.250 orang operasional TKP,	Pengembangan	Depkeu/	1.000,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Kakao Nasional	Kegiatan Pendukung, Pembinaan dan Pengawalan di 12 provinsi, 50 kabupaten.	Agribisnis	Deptan	
6	1562	Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan kepada Petani/Pelaku Agribisnis	Penilaian dan pemberian penghargaan kelompok tani, penangkar benih, POPT, PBT, Mantri Tani, UPJA teladan dalam bidang tanaman pangan (1 paket); Terlaksananya partisipasi dan pemasyarakatan hortikultura (6 paket); Pemberian penghargaan kepada para petani, kelompok tani, Gapoktan dan pelaku usaha hortikultura (1 paket); Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan (32 paket); Lomba kelompok ternak dan petugas (1 paket); Meningkatnya kegiatan promosi, pameran untuk mendorong ekdpor produk pertanian primer	Pengembangan Agribisnis	Deptan	42,7
7	1569	Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen	Pengembangan UPJA (350 unit); Koordinasi dan pengawalan (30 unit); Terselenggaranya pengembangan Mekanisasi Pertanian (12 paket); Tersedianya alat dan mesin pertanian bagi pengembangan hortikultura (49 paket); Pengembangan mutu kakao fermentasi untuk ekspor 20 lokasi (20 pkt); Pengembangan pelayanan pengujian mutu alsintan (1 pkt)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan	61,3

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
8	1595	Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)	Fasilitasi Gapoktan (10.000 desa); Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas (10.000 desa);	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	1.105,5
9	1574	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui LM3 dan Pemuda Membangun Desa (PMD)	Bantuan permodalan LM3 Tanaman Pangan (250 LM3); Penguatan LM3 peternakan (755 klp); Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di 200 LM3; Fasilitasi Pemberdayaan/pengembangan kapasitas LM3 (1000 org) : PMD Tanaman (275 org); PMD Hortikultura (370 org); PMD Perkebunan (275 org); PMD Peternakan (663 org)	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	583,9
10	1575	Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian, dan Kewirausahaan Agribisnis	Terselenggaranya Magang dan SL GAP (90 paket); Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan SL GAP (33 pkt); SL- PHT perkebunan (88 klp); Pelatihan penyuluh pertanian dan pendidikan kewirausahaan bagi calon petani (30rb org); Pelatihan petugas dan pelatihan petani dibidang teknis agribisnis (10rb org); Diklat pembekalan bagi calon THL-TB PP (10rb org); Diklat enterpreunership bagi ex THL-TB PP (5.608 org); Pembinaan, pendampingan, managemen PSDMP (33 prop)	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	166,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
11	1579	Kebijakan, Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawaian, Monitoring, dan Evaluasi, Pengembangan Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta Pengarusutamaan Gender dan Penyelesaian masalah-masalah mendesak dan bencana alam	Operasional dan adminsitrasi satuan kerja (400 satker); Kegiatan keuangan/perlengkapan/asset (termasuk insentif petugas SAI) (33 prop); Pembayaran insentif mantri tani (3.100 org); Pengembangan data statistik (termasuk insentif) (33 prop); Koordinasi perencanaan program dan anggaran (33 prop); Terlaksananya kegiatan umum, monev dan pelaporan (33 prop); Pengendalian kebakaran & gangguan usaha perkebunan : Fasilitasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim (527 kec); Sosialisasi PLTB dan peraturan perundangan (60 kab); Pertemuan koordinasi dan pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim (8 kali); Pelatihan pengendalian kebakaran (1 pkt); Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global (1 pkt); Fasilitasi GUP & bencana alam (99kab); Pertemuan koordinasi penanggulangan GUP (16 kali); Fasilitasi Pengendalian kebakaran 91 pkt); Pengawalan dan pendampingan propinsi dan kabupaten lingkup Ditjen. Perkebunan (91pkt); Pembinaan Pengembangan Usaha Peternakan (33 prop); Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Deptan	464,7

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			di daerah tertinggal/ perbatasan/ daerah konflik/ bencana alam serta pelaksanaan Inpres 2 tahun 2007, Inpres 5 tahun 2007 dan Inpres 7 tahun 2008; Tertanganinya rawan pangan transien (350 kab); Peningkatan peran kelembagaan DKP (33 prop); Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ketahanan pangan (33 prop); Penyelesaian masalah-masalah mendesak dan bencana alam; Kebijakan, Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawain, Monitoring, dan Evaluasi, Pengembangan Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta Pengarusutamaan Gender			
12	4108	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	Terlaksananya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui PNPM Mandiri KP di 120 kab/kota; berkembangnya UMK masyarakat pesisir, Pemberdayaan perempuan pesisir; tersusunnya 5 paket SNPM pemberdayaan masyarakat pesisir dan ppk; peningkatan askes modal masyarakat skala mikro secara langsung atau LKM pesisir; dan tersalurkannya subsidi (selisih harga benih) di 33 provinsi.	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	219,2

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
13	4109	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Bertambahnya 200 kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap di 33 provinsi; fasilitasi sertifikasi 3000 bidang tanah nelayan; terbinanya 300 orang nelayan terlatih; terwujudnya jaminan sosial bagi nelayan melalui asuransi di 21 pelabuhan perikanan; terwujudnya pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu berbasis kawasan di Laut Arafura dan Laut Cina selatan; terwujudnya pengembangan diversifikasi usaha perikanan oleh 33 kelompok wanita nelayan; terlaksananya pelayanan perizinan di 33 Provinsi; meningkatnya 100 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) tawar, 50 pokdakan payau dan 100 pokdakan laut yang mampu mengakses permodalan; meningkatnya investasi usaha perikanan budidaya di 33 provinsi; terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha besar dan pembudidaya kecil; terbukanya akses Kredit Modal Kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui sekitar 894 konsultan keuangan mitra bank (KKMB); berkembangnya kemitraan usaha budidaya ikan melalui 14 klaster pengolahan hasil; terbinanya 550 tenaga kerja pengolahan dan pemasaran.	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	51,5

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
14	4110	Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan	Terselenggaranya sistem pengelolaan kesehatan ikan di 33 provinsi dan berkembangnya 46 UPT Karantina Perikanan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana UPT, terbinanya pengelolaan *community based fisheries* (CBF) melalui *restocking*, pengendalian penyebaran penyakit ikan di 33 provinsi, dan pengembangan balai penyidik penyakit ikan (BPPI)	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	107,3
15	4112	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan	Meningkatnya kompentensi 2.000 nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di 6 balai pendidikan dan pelatihan perikanan (BPPP); terakreditasinya 6 sarana pelatihan; 2.350 penyuluh perikanan; 5 Permen dan 1 PP tentang penyuluhan	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	54,8
16	4113	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam negeri dan Ekspor Hasil Perikanan	Terlaksananya gemarikan dan promosi di 33 prov; terbukanya akses pemasaran di Eropa Timur dan Timur Tengah, 5 pameran internasional; tereduksinya hambatan tarif di 1 negara tujuan; dan terbinanya UKM berpotensi ekspor di 11 provinsi; sosialisasi persyaratan ekspor ke negara mitra di 5 provinsi	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	33,3

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
17	4114	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya	Berkembangnya fasilitas di 21 UPT Pelabuhan Perikanan; 8 lokasi *port state measure*; Pusat informasi pelabuhan perikanan di 6 pelabuhan perikanan samudra (PPS), 13 pelabuhan perikanan nusantara (PPN), 45 pelabuhan perikanan pantai (PPP); terlaksananya operasional kesyahbandaran di 41 pelabuhan perikanan (PP); pembangunan PP Jakarta Fishing Port, Belawan dan Sibolga; terlaksananya pembangunan pelabuhan perikanan di 15 pangkalan pendaratan ikan (PPI) lanjutan; tersedianya data alokasi perizinan penangkapan dan sertifikasi ikan di 11 wilayah pengelolaan ikan (WPP); restrukturisasi 40 armada perikanan di 11 WPP; penguatan *broodstock center*, penerapan standar cara perbenihan ikan yang baik (CPIB) di 33 balai benih ikan sentral (BBIS), 23 balai benih ikan payau (BBIP), 10 balai benih udang (BBU), 5 balai benih udang galah (BBUG).	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	541,7
18	4115	Peningkatan Mutu dan pengembangan Pengolahan Hasil	Berkembangnya sentra pengolahan di 10 lokasi, sistem rantai dingin di 33 lokasi; terbinanya 30 UPI; berkembangnya 10 produk bernilai tambah di 10 sentra; tersedianya 20 rancangan	Pengembangan Sumber Daya	DKP	75,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Perikanan	Standar Nasional Indonesia RSNI; terakreditasinya 3 Lab Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan surveilensi di 27 LPPMHP dan pre akreditasi di 9 LPPMHP; tercapainya UPI bersertifikat kelayakan pengolahan dan HACCP untuk 460 UPI; 7 paket metode pengujian dan 7 paket monitoring.	Perikanan		
19	4116	Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan	Terlaksananya percontohan usaha produksi, temu lapang dan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) utk 50 lokasi kawasan budidaya air payau, 100 lokasi kawasan budidaya air tawar, 100 lokasi kawasan budidaya laut; terbangunnya 5 lokasi kawasan usaha perikanan budidaya berkelanjutan (SAFVER); berkembangnya kelembagaan dan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran di 6 PPS, 3 PPN dan 4 PPP; berkembangnya otoritas kompeten hasil perikanan di 7 provinsi, dan terlaksananya verifikasi UPI dalam rangka revitalisasi perikanan terpadu di 8 pelabuhan perikanan	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	213,9
20	4117	Pengembangan	16 paket rekayasa dan alih teknologi pengolahan, 16 paket	Pengembangan	DKP	73,1

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Rekayasa Teknologi Terapan Perikanan	diseminasi teknologi penangkapan; 4 UPT Budidaya air payau, 4 UPT Budidaya air tawar dan 4 UPT Budidaya laut, serta UPT Tambak Pandu Karawang.	Sumber Daya Perikanan		
21	4118	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Secara Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	Tersusunnya rencana pengelolaan perikanan (RPP) di 2 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di Laut Cina Selatan dan Laut Arafura; tertatanya perairan pedalaman; identifikasi sumber daya ikan (SDI) terancam punah; pemacuan stok SDI; koordinasi pengelolaan perikanan melalui forum koordinasi pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan (FKPPS) nasional dan 11 FKPPS regional; rancangan PP bidang pengawasan; pengawasan ketaatan kapal perikanan di 100 pelabuhan/pangkalan	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	DKP	23,9
22	DAK	Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan	Penyediaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, peningkatan mutu, dan pemasaran, pengawasan, penyuluhan serta pemberdayaan ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil		DKP	PM
23	4006	Pengembangan Pengelolaan	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu/HHBK/Jasling sebesar 1% dan meningkatnya unit IUPHHK bersertifikat PHPL sebesar	Pemantapan Pemanfaatan Potensi	Dephut.	39,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Pemanfaatan Hutan Alam	10%	Sumber Daya Hutan		
24	4009	Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Peningkatan PNBP sebesar 5%; Terimplementasinya sistem informasi secara online pada 60 IUPHHK	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut	41,0
25	4011	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Draft final peta penunjukan dan penetapan KH di propinsi Riau dan Kalteng (2 judul); Data penetapan kawasan hutan yang sudah temu gelang di 33 propinsi (33 judul); Sistem informasi pengukuhan KH; Data hasil identifikasi dan tindak lanjut permasalahan kawasan hutan di 20 propinsi (20 buku); Laporan tindak lanjut hasil pencermatan permasalahan perubahan fungsi di 4 lokasi (4 judul); Peta hasil telaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan KH di 20 lokasi (20 judul).	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	46,5
26	4034	Pembangunan KPH	Draft SK penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi (4 judul); Data fasilitasi implementasi pembangunan KPH di 33 propinsi (33 judul); Data monitoring dan evaluasi pembangunan	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut	10,2

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			KPH di 15 propinsi (15 judul).			
27	4026	Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA dan LH	Peta dasar tematik kehutanan secara digital skala 1 : 100.000 (750 lembar); Data hasil pemutakhiran data dan informasi SDH (6 judul); Data inventarisasi SDH dan sosial budaya di 12 lokasi (12 buku); Buku NSDH Daerah/Propinsi dan Nasional (1 buku); Data SDH secara spasial dan non spasial (2 judul); Model penghitungan karbon tegakan hutan di 2 lokasi (2 judul); Basis data citra seluruh Indonesia (2 judul).	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dephut	59,5
28	4038	Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat	Terwujudnya pemberian ijin HTI/HTR kumulatif seluas 12,4 juta ha dan penanaman kumulatif seluas 6 juta ha (tahun 2010 HTI seluas 600.000 ha dan HTR seluas 200.000 ha)	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	27,0
29	4041	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terbentuk dan berfungsinya HHBK solution centre sebanyak 2 unit.	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	18,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
30	4051	Pengelolaan Hutan Produksi yang tidak Dibebani Hak/Izin Pemanfaatan	Tersusunnya rencana pengelolaan 25 unit KPHP; Tersusunnya usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 Provinsi	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	26,4
31	4052	Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan	Evaluasi IPHHK kapasaitas > 6.000 m3/th 40 unit; Meningkatkan produk industri hasil hutan yang bersertifikat 10%; Meningkatnya efisiensi penggunaan bahan baku industri rata-rata 60%	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dephut.	16,5
32	4015	Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB/) dan HL	Terlaksananya pengelolaan 29 TN di luar TN Model yang optimal; Meningkatnya pengelolaan Kawasan Konservasi Lainnya (SM, CA, TB dan TWA); Tersusunnya rencana pengelolaan pada kawasan konservasi (KPA/KSA/TB) dan HL; Terkelolanya kawasan konservasi esensial.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dephut.	110,0
33	4016	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan	Terlaksananya pengelolaan spesies terancam punah ex situ dan in situ; Meningkatnya investasi dalam pemanfaatan TSL yang berdampak pada penambahan penerimaan PNPB dan tenaga	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dephut.	30,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Ekosistemnya	kerja sampai dengan 1% dari tahun 2009;			
Fokus: Ketahanan Energi						
1	8179	Penilaian dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Berdasarkan WP&B KKKS; Evaluasi, Konsultasi & Pengawasan Pealaksanaan POD I ; Pembahasan dan Evaluasi Usulan Perpanjangan dan atau Amandemen Kontrak; Penanganan Masalah Tumpang Tindih Lahan Kegiatan Hulu Migas Dengan Kawasan Hutan dengan kegiatan lain; Fasilitasi Pelaksanaan PI Kepada BUMD Atau Perusahaan Nasional Terkai Dengan POD I; Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Lapangan Kegiatan KKKS dari BP Migas	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	DESDM	4,1
2	8175	Pengelolaan, Penyiapan dan Penilaian Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	Promosi Wilayah Kerja Baru Migas; Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas ; Pengambilan dan Pengumpulan Serta Pengolahan Data Seismik 2D di Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 Km; Studi Kebijaksanaan (Evaluasi dan Interpretasi Potensi Migas Laut Flores)	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	DESDM	50,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
3	8188	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi	Pembuatan surfaktan untuk aplikasi pendesakan minyak dengan injeksi kimia, penyusunan database data fluida reservoir migas, inventarisasi dan analisis data cadangan migas Indonesia, Studi efektifitas penggunaan PPD (Pour Pount Depresant), Penentuan profil pendesakan fuida dengan menggunaka CT Scanner untuk optimasi EOR, Penelitian dan pengembangan oil based mud yang berbasis pada penggunaan base oil dari minyak nabati, Litbang desain formulasi semen untuk mengatasi adanya gas migration, perancangan sistem monitoring sumur-sumur CBM secara online, Studi eksperimental desain untuk mengatasi ketidakpastian perhitungan cadangan pada reservoir rekah alami, Kajian sequestrasi CO2 skala lab pada Coal Bed Reservoir.	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	DESDM	12,9
4	8152	Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi	Pembinaan dan sinkronisasi pengembangan panas bumi, fasilitasi RPP pemanfaatan langsung panas bumi, fasilitasi pelaksanaan pelelanganWKP di daerah, pembinaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan panas bumi.	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	7,4

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
5	8170	Survei pemetaan geologi, Penelitian Eksplorasi	Jumlah Peningkatan wilayah keprospekan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	295,5
6	8166	Penelitian dan Pengembangan Batubara	Usulan paten teknologi kokas, rsni tungku berbahan briket batubara, gasifikasi PLTD 1 MW, prototype plant gas sintesis sistem fluidized bed, katalis pencairan batubara, rancangan UBC skala komersial	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	13,1
7	2192	Pengembangan Investasi dan Kerja sama	Penyusunan kajian rencana dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel, emas, bauksit di Sulawesi Tenggara, Papua, dan Kalimantan Barat, evaluasi kebutuhan infrastruktur dalam peningkatan investasi, penyusunan pedoman dan rencana induk, inventarisasi mafaat tambang dan masyarakat sekitar tambang, promosi pengembangan investasi minerbapabum	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	8,9
8	2116	Penelitian, Penyelidikan, Inventarisasi dan	Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KKS Eksplorasi; Pemutakhiran sumberdaya migas di seluruh cekungan di Indonesia; Penyusunan Standard Operating Procedure pelayanan kegiatan	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	DESDM	27,1

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas	usaha hulu; Pengadministrasian data dan informasi hasil kegiatan usaha hulu migas; Implementasi pengemBalian Wilayah Kerja migas serta penyerahan data hasil kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan survei umum Terselenggaranya Penelitian, Penyelidikan, Inventarisasi dan Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas			
9	8177	Pembinaaan dan Pengawasan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	Pemantauan dan Inventarisasi data lapangan Migas yang tidak /belum diproduksikan (*idle field*); Evaluasi cadangan; Pembinaan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Pemantauan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur-sumur Tua; Monitoring dan Sinkronisasi data Produksi Minyak dan gas Bumi; Pengawasan Mutu; Pengawasan Pelaksanaan Komitmen Pasti 2 Tahun; Monitoring Produksi Minyak Bumi dengan penerapan metode IOR; Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru; Pemantauan dan Evaluasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Lapangan *Existing*; Pemantauan Realisasi Ekspor Minyak Mentah, LNG, Gas Pipa dan LPG; Pemantauan	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	DESDM	11,6

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			Pemboran Sumur Pengembangan; Penawaran Langsung Wilayah Kerja Produksi Migas.			
10	8189	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Proses	Desulfurisasi BBM dengan metode membran dan adsorpsi, Optimasi proses pemanfaatan hasil pencairan batubara, Pembuatan Aditif Combustion Booster dan Pack Kolom untuk mengurangi emisi CO dan CO2 pada kendaraan bermotor, Pengembangan katalis sintesis Fischer-Tropsch untuk pembuatan bahan bakar cair dari gas sintesis, Konversi katalistik limbah plastik menjadi senyawa fraksi gasoline, Optimalisasi proses produksi Biomassa, Purifikasi produk biosurfaktan menggunakan bakteri hidrokarbonoklasik pada reaktor, optimalisasi proses pilot plant biodiesel, Optimalisasi produk ethanol dan butanol melalui proses fermentasi, Konfigurasi kilang baru berbasis crude oil ex-KKKS blended fokus pada keekonomian, Optimalisasi penanggulangan silica carry over di power plant, pengaruh kegiatan industri migas terhadap sumber daya hayati perairan, Evaluasi mutu udara ambient sebagai	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	DESDM	5,2

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			upaya mitigasi perubahan iklim.			
11	0093	Penyusunan dan Pembahasan RPP	Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang baik Perancangan 50 Peraturan per-UU-an; 54 Peraturan Per Undang-undang sektor ESDM; 54 legislasi dan regulasi; 2 Pedoman peraturan daerah sektor ESDM	Pembentukan Hukum	DESDM	39,1
12	0114	Bantuan Hukum	Terselesainya perkara dan masalah, eksistensi hukum, penyelesaian masalah dan penegakan hukum	Pembentukan Hukum	DESDM	2,2
13	0016	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi Bidang Minerbapabum	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengembangan data dan informasi minerba pabum 740 lembar Peta Geologi Skala 1:50.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	DESDM	27,3
14	0020	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan	Perumusan KEN, Penetapan RUEN, Kajian Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi, Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Penyusunan Kajian Teknis Energi, Penyusunan Sistem	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	DESDM	22,8

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Kebijakan dan Strategi	Infornasi DEN			
15	2175	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya penelitian Biodiesel dari algae, manufaktur komponen PLT Angin 100 kW, penelitian sistem *fuel cell* untuk penerangan, desain gasifier untuk pembangkit listrik dari biomassa, analisis lokasi yang cocok dikembangkan untuk PLTP	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi	DESDM	14,2
16	0037	Pendayagunaan/ Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan Produksi, perubahan kepemilikan saham, pembinaan perizinan pengusahaan minerba pabum, pengawasan produksi dan penjualan serta inventarisasi barang modal dan sarana prasarana	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	60,9
17	8153	Pengembangan Investasi Pengusahaan Panas Bumi	Laporan subkegiatan evaluasi dan manfaat, penugasan survei pendahuluan dan pengajuan masterlist panas bumi, draf pedoman pengelolaan panas bumi, monitoring rencana pembangkit listrik tenaga panas bumi dan rencana ketenagalistrikan nasional, pemantauan dan pengawasan tenaga kerja pada kegiatan panas bumi, penyusunan pedoman pengusahaan pertambangan panas bumi	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	12,5

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
18	8178	Pelayanan dan Pemantauan Usaha Gas Bumi	Implementasi Penawaran Wilayah Kerja Gas Methana-B; evaluasi persetujuan harga gas bumi; penanganan masalah tumpang tindih lahan kegiatan pengusahaan Gas Metana-B; monitoring pasokan gas konsumen hulu dalam rangak meningkatkan jaminan pasokan; penyiapan data penyediaan dan kebutuhan gas bumi	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	DESDM	30,0
19	2128	Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan	Pembinaan dan pengusahaan kegiatan pertambangan KP, KK dan PKP2B di seluruh Indonesia; terlaksananya pembinaan mineral dan batubara di 33 provinsi	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	62,3
Prioritas Bidang: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup **Fokus: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air**						
1	4019	Rehabilitasi Lahan Kritis DAS Prioritas	Penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan seluas 100.000 ha di prioritas prioritas I	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut	500,0
2	4020	Perencanaan dan Pembinaan Rehabilitasi	Tersusunnya rencana pengembangan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan	Dephut	21,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Lahan dan Perhutanan Sosial		Sumber Daya Alam		
3	4039	Pengelolaan DAS	Tersedianya kebijakan Pengelolaan DAS yang mempunyai kekuatan hukum sebanyak 1 UU, 1 PP/Permenhut/Perpres dan 1 pedoman; Tersusunnya perencanaan pengelolaan DAS terpadu di 18 unit DAS; Meningkatnya dukungan stakeholders di 10 propinsi; Pembangunan baseline data DAS di 18 unit DAS; Tersedianya model PDAS Terpadu sebanyak 1 unit; Terpantaunya penyelenggaraan PDAS dan kinerja DAS di 36 BPDAS.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut	135,0
4	4040	Perencanaan, Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat	Terbangunnya hutan rakyat di DAS prioritas seluas 50.000 ha.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut	25,0
5	4042	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Penetapan luas areal kerja Hkm seluas 420.000 ha; Fasilitasi 4 kelompok IUPHKM baru; Fasilitasi 10 unit kemitraan HKm;	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan	Dephut	18,8

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Kemasyarakatan	Fasilitasi ketahanan pangan sektor kehutanan di 4 propinsi.	Sumber Daya Alam		
6	2121	Penyediaan Sarana Air Bersih Bersumber Dari Air Tanah dan Sanitasi Dasar	Tersedianya sarana air bersih yang bersumber dari air tanah sebanyak 90 titik pemboran serta 10 sumur pantau kualitas air tanah	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DESDM	60,0
Fokus : Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam						
1	4014	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya hotspot sebesar 10% dari tahun 2008 dan didukung partisipasi masyarakat serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan yang kuat di 10 provinsi rawan kebakaran; Tersedianya sistem peringatan dini di 30 DAOPS	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dephut	100,0
2	4017	Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata alam 12% dan PNBP di bidang Jasling dan Wisata Alam sebesar 20% dari tahun 2009; Terbentuknya 60 unit kelembagaan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui Desa Model Konservasi (MDK); Terbentuknya kader konservasi 750 orang di 77 UPT	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dephut	90,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			PHKA.			
3	4054	Pengelolaan Taman Nasional Model	Terlaksananya pengelolaan TN berbasis resort untuk 20 TN di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Papua; Terlaksananya pengembangan pengelolaan TN dalam rangka Dept Nature Swap (DNS); Terlaksananya sistem monitoring kawasan konservasi dan HL; Terbangunnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Perambahan Kawasan Berbasis GIS/Remote Sensing di 10 TN prioritas	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dephut	90,0
4	4055	Pengamanan Kawasan Hutan	Terselesaikannya kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh Polhut/PPNS sampai dengan P.21 untuk tahun berjalan 50% dan tunggakan kasus tahun sebelumnya 25%; Meningkatnya sarana dan prasarana pengamanan hutan di 77 UPT (TN dan KSDA) dan Kabupaten/Kota; Terlaksananya operasi pengamanan hutan di pelabuhan, di bandara dan di 50 TN serta 27 KSDA sebanyak 924 kali; Meningkatnya kualitas SDM pengamanan hutan bagi 200 orang Polhut dan 120 orang PPNS serta terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 33	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	Dephut	95,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			kelompok/unit			
5	DAK	Penyediaan DAK Konservasi Sumber Daya Hutan, Tanah dan Air	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 20.000 ha yg menjadi tanggungjawab daerah (Kab/Kota); Terlaksananya pengelolaan hutan lindung, Tahura dan Hutan Kota di 100 Kab/Kota; Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) sebanyak 600 unit; Tersedianya sarana pendukung penyuluhan, terlaksananya penyuluhan teknik pembuatan bangunan KTA, serta terlaksananya penyuluhan teknik RHL.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dephut.	PM
6	2126	Penerapan *Good Mining Practise*	Perumusan pedoman teknis bidang minerbapabum, penunjang tugas keteknikan mineral, pedoman teknis dampak lingkungan, pengembangan pedoman teknis pengelolaan cadangan batubara marginal, pengembangan pedoman standarisasi minerbapabum, perumusan rancangan standar nasional Indonesia, penyusunan draft pedoman optimasi pengolahan bijih besi, terlaksananya *good mining practice* pada KP di daerah	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	41,7

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
7	2193	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kerja Pertambangan	Tertatanya wilayah kerja panas bumi dan wilayah usaha pertambangan minerba serta tersedianya informasi minerbapabum, Penyusunan draft dan data WKP panas bumi.	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	14,6
Fokus : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan						
1	0673	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan dan Peraturan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Terbitnya 4 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut UU 31/2004 dan UU 27/2007	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	12,2
2	4103	Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya 180 hari operasi terpadu; terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan di 2 UPT pengawasan; beroperasinya VMS offline 1000 unit secara penuh bagi kapal perikanan di atas 30 GT; meningkatnya kemampuan pengawasan di 3 WPP prioritas (Laut Natuna, laut Sulawesi dan Arafura); meningkatnya ketaatan pelaku terhadap aturan; dan terlaksananya tindak pidana laut dan penyelesaian tindak pidan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	247,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			kelautan dan perikanan.			
3	4104	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan serta Penyebaran Iptek	Terevitalisasinya sarana dan prasarana IPTEK di 15 satker; terakreditasinya kelembagaan riset di 10 UPT dan 5 pusat riset; terakreditasinya laboratorium riset 5 paket; terbangunnya instalasi pemantauan kelautan 5 buah; terselenggaranya IPTEKMAS 15 paket; tersusunnya 1 paket perangkat perundang-undangan Iptek kelautan dan perikanan	Pengembangan dan Penelitian Iptek	DKP	45,0
4	4107	Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tindak lanjut dan fasilitasi pengembangan pengelolaan pesisir (pasca MCRMP) di 42kab/kota; meningkatnya kapasitas daerah non-MCRMP di 10 kab/kota di 5 provinsi; berkembang dan menguatnya kelembagaan di 5 UPT BPSPL, terlaksananya pengembangan pariwisata bahari di 2 ppk, meningkatnya investasi di 5 ppk; terbukanya akses transportasi di 2 kawasan ppk, meningkatnya infrastruktur pendukung dasar di 10 lokasi ppk, meningkatnya kualitas ekosistem ppk di 5 lokasi; tersusunnya 5 paket SNPM pengelolaan ppk.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	23,2

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
5	4105	Perencanaan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Serta Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya perencanaan pengembangan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 20 lokasi; meningkatnya penataan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil (ppk) berbasis masyarakat di 20 kab/kota; dan tersusunnya 5 paket NSPM penataan kawasan laut, pesisir dan ppk	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	11,3
6	4106	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Non Konvensional (Jasa Kelautan)	Terlaksananya pengembangan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 2 lokasi dan operasional Panitia Nasional BMKT, pilot pengembangan pemanfaatan air laut dalam; pilot pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut, pilot pengembangan *mikroalgae* sebagai bahan baku biofuel, dan tersusunnya SNPM pengembangan jasa kelautan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	10,0
7	4120	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria dan Teluk	Membaiknya ekosistem terumbu karang di 23 kab/kota pada 8 provinsi. terehabilitasnya ekosistem pesisir di 5 lokasi.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	DKP	183,3

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
8	4119	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	Terkelolanya kawasan konservasi perairan seluas 4 juta ha; berkembangnya konservasi jenis dan genetik ikan di 8 lokasi; berkembang dan menguatnya kelembagaan konservasi sumber daya ikan di 2 UPT balai konservasi kawasan perairan nasional (BKKPN); kerja sama *Sulu Selawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Bismarck Solomon Seas Ecoregion* (BSSE), *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); 6 paket SNPM konservasi SDI.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DKP	20,8
9	4101	Penyelenggaraan riset, eksplorasi dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan	Kajian sumber daya ikan laut di 3 wilayah pengelolaan perikanan (WPP); kajian ekosistem, habitat di 5 ekosistem; pemahaman fenomena alam kelautan 3 paket dan dukungan kerja sama riset internasional; pemetaan kerentanan pesisir di 2 kawasan; pengembangan teknologi budidaya ikan; invensi, inovasi dan pengkajian teknologi kelautan; invensi, inovasi dan pengembangan teknologi pengolahan; berkembangnya teknologi budidaya ikan 5 komodiatas utama dan komoditas penting lainnya di 1 Pusat dan 5 UPT Riset Budidaya; dokumen hasil	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	DKP	69,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			analisis isu terkini kelautan dan perikanan 12 paket; rekomendasi/rumusan kebijakan kelautan dan perikanan 5 paket.			
10	0094	Pembinaan/pembuatan/ pengembangan sistem, data dan informasi	Tersajinya data statistik kelautan dan perikanan di 33 provinsi	Penguasaan serta pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	DKP	36,9
Fokus : Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup						
1	5053	Pengembangan Debt for Nature Swaps (DNS) Bidang Lingkungan Hidup	Terserapnya dana yang tersedia pada program DNS sebesar Rp18 miliar untuk 190 UMK bagi investasi lingkungan dalam rangka mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	18,5
2	5055	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Menurunnya potensi dan/atau beban pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebesar 10 juta ton yang berasal dari minimisasi penggunaan B3, pengelolaan limbah B3 termasuk	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	KLH	26,8

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			3R, pemulihan media terkontaminasi, penanganan *illegal traffic* limbah B3, pengelolaan POPs dan bahan kimia lainnya serta pengelolaan limbah industri non B3.	Lingkungan Hidup		
3	5057	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Penyelesaian dan penanganan 20 kasus pidana, 20 kasus pengenaan sanksi administrasi lingkungan dan 20 kasus perdata lingkungan, penyelesaian 20-30% pengaduan dan sengketa lingkungan, 10 pos P3SLH, meningkatnya kemampuan SDM PPLH/D dan PPNS-LH, dan evaluasi 8 peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional bidang LH	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KLH	14,6
4	5068	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Menurunnya beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa, pengelolaan air limbah domestik dan sampah melalui implementasi kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*) di 5 kota, pengembangan 2 IPAL Terpadu Biogas untuk sentra industri kecil, pelaksanaan Program Adipura di 26 kota, Program Langit Biru di 20 kota, pembinaan pengendalian pencemaran di Kabupaten/Kota, pengelolaan limbah industri	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KLH	31,5

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			skala kecil, 6 kota supervisi Prokasih dan penanganan kasus pencemaran lingkungan			
5	DAK	Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas air dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Lingkungan Hidup di 465 Kab/Kota	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KLH	PM
Fokus : Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim						
1	4102	Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir	Terlaksananya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di 2 lokasi; Peningkatan kapasitas perencanaan mitigasi bencana di 2 lokasi prioritas dan kapasitas perencanaan adaptasi perubahan iklim di 2 lokasi; green belt kawasan pesisir di 3 lokasi; Pengendalian pencemaran perairan darat, pesisir dan laut secara terpadu di 3 lokasi; 1 paket analisis resiko bencana dan 1 paket analisis adaptasi perubahan iklim; *Pilot Project* mitigasi bencana di 2 lokasi ; 5 paket standar, norma, prosedur dan manual (SNPM) mitigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP	14,8

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
2	5069	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan untuk menurunkan laju kerusakan lingkungan di 11 daerah aliran sungai, 6 lokasi pemantauan ekosistem pesisir dan laut, 7 lokasi pengembangan model pemulihan lingkungan pesisir dan laut, 6 provinsi pengelolaan pesisir terpadu, pengendalian kerusakan hutan dan lahan di 8 provinsi di Sumatera dan Kalimantan yang rawan kebakaran, 4 lokasi pengelolaan kawasan karst, 3 daerah longsor, perlindungan lapisan ozon melalui perhitungan jejak emisi karbon di 3 lokasi, pengembangan mitigasi kampung iklim di 3 lokasi, montoring dan evaluasi 16 proyek CDM, 30 ton ozon depleting potential (ODP), serta pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KLH	33,8
3	6289	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dengan tersedianya strategi pembangunan berkelanjutan rendah emisi di 4 sektor, kebijakan dan strategi perubahan iklim di bidang adaptasi, mitigasi, alih teknologi, pendanaan, post 2012, land use change and forestry, serta basis ilmiah dan inventarisasi GRK; Koordinasi implementasi kebijakan, pemantauan dan	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DNPI	19,7

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			evaluasi implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim; serta menguatnya posisi Indonesia di fora-fora internasional dalam pengendalian perubahan iklim			
4	…..	Penyelenggaraan Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DNPI	Terkelolanya honorarium dan penyelenggaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	DNPI	10,3
5	…..	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS)	Terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) meliputi antara lain, Radar Cuaca 12 lokasi, AWS 54 lokasi, ARG 20 lokasi, Wedis dan Synergie 12 set, GSR 6 lokasi, sewa telekomunikasi 12 bulan. Terpasangnya 1 lokasi Radar Cuaca, Terintegrasinya sistem MEWS. Terlaksananya Konggres dan sosialisasi TCWC 1 laporan. Terbangunannya persiapan operasional NWP 1 paket, terlaksanannya workshop teknisi Radar Cuaca 1 laporan.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	43,9

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
6	…..	Pengembangan Meteorologi Penerbangan dan Maritim	Terpasangnya AWOS 1 lokasi, AWS Maritim 1 lokasi dan AWS kapal 2 unit. Terbangunnya sistem pertukaran data Opmet Pusat dan UPT 11 lokasi, terbangunannya Pusat Prosesing Data Meteorologi Penerbangan 1 lokasi.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	13,5
7	…..	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS)	Terbangunnya Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) yang meliputi antara lain, terpasangnya AWS 10 lokasi, ARG 10 lokasi, penakar hujan 1.000 lokasi. Tersusunnya Peta dan Atlas mengenai Iklim sebanyak 3 peta, serta tersusunnya informasi nomor-nomor Pos Hujan Kerjasama Tahap I sebanyak 1 laporan.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	9,4
8	…..	Pengembangan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	Terlaksananya Workshop International on Climate Information Service in Supporting Mitigation and Adaptation to Climate Change in Infrastructure and Health Sector (2 laporan), Workshop International Global Atmosphere Watch (GAW) (1 laporan), dan diseminasi informasi iklim (5 laporan).	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	3,6
9	…..	Pengembangan Sistem Peringatan Dini	Terkelolanya Sistem Operasional TEWS yang meliputi antara lain, Sensor Seismik 1 paket, Sistem Sirine 1 paket, Sistem	Pengembangan dan Pembinaan	BMKG	84,6

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
		Tsunami (TEWS)	Komunikasi dan Integrasi 1 paket, Sistem Prosesing 1 paket, DSS 1 paket. Terbangunnya Sistem Monitoring CCTV 10 unit, Sistem Sirine 6 Unit, terpasangnya Accelerometer 35 Unit, Sistem Diseminasi Nasional 25 paket. Terselenggaranya koordinasi dengan Universitas. Meningkatnya fasilitas operasional di NSC. Meningkatnya fasilitas pelayanan AEIC. Workshop Internasional TEWS 2 laporan.	Meteorologi dan Geofisika		
10	…..	Pengembangan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi (ISEWS)	Terbangunnya Laboratorium Kalibrasi 1 lokasi, Standarisasi Lab. Geofisika dan Balai Besar Wilayah I dan III dan Koordinasi Implementasi Kalibrasi Peralatan 1 paket. Terlaksananya perekayasaan Accelerograph 1 set, terbangunnya sistem pemantauan cuaca pertanian 1 paket.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	13,6
11	…..	Pengembangan Jaringan Komunikasi	Meningkatnya kapasitas Bandwidth Internet 1 lokasi, Terlaksananya pemindahan peralatan komunikasi 1 paket, terlaksananya standarisasi sistem informasi berbasis Internet 1 paket. Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan jaringan LAN. Terlaksananya Workshop Teknisi Komunikasi 1 laporan.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	5,4

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
12	…..	Pengembangan Database	Tersusunnya Disain Sistem Database 1 laporan. Terbangunnya Database tahap I 1 paket. Terlaksananya koordinasi dan adaptasi Manajemen Database 1 paket, meningkatnya kapasitas operasional Sistem database BMKG 1 laporan.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	3,2
13	6653	Penelitian dan Pengembangan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan di bidang Meteorologi 5 penelitian, Klimatologi 6 penelitian dan Geofisika 5 penelitian.	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	5,8
14	6657	Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Terselenggaranya dan terjaganya pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Balai Besar 5 unit pelaksaan teknis (UPT), stasiun meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika di 33 propinsi sebanyak 173 unit pelaksaan teknis (UPT) BMKG	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMKG	118,0
12	0079	Pembangunan Gedung	Terselesaikannya gedung operasional utama kantor pusat BMKG 23.660 m^2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	BMKG	110,0

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
13	2120	Penataan Ruang Berbasis Geologi	Studi peningkatan status dan prospektif cekungan berpotensi migas di daerah perairan Sula Utara Tersusunnya rekomendasi penataan ruang berbasis geologi	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	DESDM	14,0
14	2107	Penyelidikan Geologi Teknik dan Geodinamik	Meningkatnya data dan informasi bencana letusan gunungapi dan bencana geologi lainnya dalam mitigasi bencana	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DESDM	19,6
15	8209	Penelitian, Penyelidikan, Pemetaan dan Pengamatan Kawasan Rawan Bencana Geologi	Meningkatnya data dan informasi karakteristik gunungapi dan kawasan rawan bencana	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DESDM	15,9

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
16	8169	Pemetaan Geologi Kelautan Kontinen dan Regional	Atlas potensi ESDM di pulau-pulau kecil terluar tahap I, kompilasi data geologi kelautan lintas sektoral terkini untuk mendukung kebijakan dan pengembangan wilayah, penyusunan kembali klasifikasi pulau-pulau kecil berdasarkan proses tektogenesa, Pengukuran jejak-jejak perubahan muka laut serta kaitannya dengan isu pemanasan global, penyusunan kembali wilayah pertambangan berdasarkan implementasi kebijakan pengelolaan mineral batubara, kompilasi data geologi kelautan regional dan daya dukung untuk rencana tapak PLTN Bojonegara, Banten, Kompilasi peta geologi regional SA47 perairan kepulauan Mentawai, Penyelidikan geologi dan geofisika dengan Kapal Geomarin III Perairan lembar peta 2212, 2213, 2312, 2313, 1911, 1912, 1913 dan 2011, penyelidikan geologi dasar laut perairan Selat Madura lembar peta 1608, Penyelidikan geologi dan geofisika dengan Kapal Geomarin I perairan lembar peta 1210, 1309, Penelitian potensi arus laut sebagai pembangkit energi baru terbarukan di Selat Pantar NTT, Optimalisasi potensi gas biogenik sebagai energi alternatif	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DESDM	46,5

No.	MAK	Fokus / Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
			masyarakat kawasan pesisir Tanjung Pontang, Banten, Penelitian gas biogenik di Sungai Purba Kali Brantas, Kajian Stratigrafi batuan reservoir gas hidrat sebagai terminasi reinjection CO2.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010

BUKU III:

PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA PENULISAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2010
BUKU III: PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

1. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010
- 1.1 Pendahuluan
- 1.2 Arahan RTRWN
- 1.3 Arahan RPJMN 2010-2014
- 1.4 Perkembangan Kesenjangan Antarwilayah Saat Ini
- 1.5 Prioritas Pengembangan Ekonomi Daerah

2 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA TAHUN 2010
- 2.1 Kondisi Saat Ini
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera
- 2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

3 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI TAHUN 2010
- 3.1 Kondisi Saat Ini
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali
- 3.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali

4 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN TAHUN 2010
- 4.1 Kondisi Saat Ini
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan
- 4.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

5 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI TAHUN 2010
- 5.1 Kondisi Saat Ini
- 5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi
- 5.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sulawesi

6 PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2010
- 6.1 Kondisi Saat Ini
- 6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- 6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

7 PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU TAHUN 2010
- 7.1 Kondisi Saat Ini
- 7.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku
- 7.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

8 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA TAHUN 2010
- 8.1 Kondisi Saat Ini
- 8.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Papua
- 8.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Papua

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Indikator Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2007
Gambar 1.2. Indikator Prioritas Pengembangan Ekonomi

Gambar 2.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera
Gambar 2.2. Peta Isu Strategis Wilayah Pulau Sumatera
Gambar 2.3. Peta Arah Pengembangan Strategis Wilayah Pulau Sumatera

Gambar 3.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali
Gambar 3.2. Peta Isu Strategis Wilayah Pulau Jawa-Bali
Gambar 3.3. Peta Arah Pengembangan Strategis Wilayah Pulau Jawa-Bali

Gambar 4.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan
Gambar 4.2. Peta Isu Strategis Wilayah Pulau Kalimantan
Gambar 4.3. Peta Arah Pengembangan Strategis Wilayah Pulau Kalimantan

Gambar 5.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi
Gambar 5.2. Peta Isu Strategis Wilayah Pulau Sulawesi
Gambar 5.3. Peta Arah Pengembangan Strategis Wilayah Pulau Sulawesi

Gambar 6.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Nusa Tenggara
Gambar 6.2. Peta Isu Strategis Wilayah Pulau Nusa Tenggara
Gambar 6.3. Peta Arah Pengembangan Strategis Wilayah Pulau Nusa Tenggara

Gambar 7.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Maluku
Gambar 7.2. Peta Isu Strategis Wilayah Pulau Maluku
Gambar 7.3. Peta Arah Pengembangan Strategis Wilayah Pulau Maluku

Gambar 8.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Papua
Gambar 8.2. Peta Isu Strategis Wilayah Pulau Papua
Gambar 8.3. Peta Arah Pengembangan Strategis Wilayah Pulau Papua

BAB 1
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010

1.1. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap pembangunan jangka menengah kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 untuk mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berbagai keberhasilan pembangunan telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Seiring dengan keberhasilan pembangunan, masyarakat menuntut adanya perbaikan mutu kehidupan, perlakuan adil dan jaminan hukum, dan perwujudan kesetaraan dalam seluruh tatanan kehidupan. Dengan latar belakang struktur demografi, geografis, infrastruktur dan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya manusia yang berbeda, maka muncul kesenjangan kinerja pembangunan antarwilayah yang selanjutnya menyebabkan perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah terutama masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, kawasan perdesaan, daerah pedalaman, dan daerah kepulauan terdepan.

Masyarakat di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pengurangan kasus pembalakan hutan dan pencurian ikan, pencegahan kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta pengurangan konflik. Masalah lain yang dihadapi adalah belum memadainya jaringan prasarana penunjang keterkaitan ekonomi wilayah, terbatasnya investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. Permasalahan ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya saing nasional.

Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut memerlukan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pemecahan berbagai masalah di daerah juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2010 Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan merupakan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2010.

Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian tujuh (7) wilayah, yaitu: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera.

Penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2010 mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antarwilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) potensi dan isu strategis di setiap wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, (4) strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) memperhatikan keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.

1.2. Arahan RTRWN

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: (1) ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (2) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (3) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (4) keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (5) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (6) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (7) keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; (8) keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan (9) pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi: (1) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi: (a) menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; (b) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; (c) c. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan (d) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. Sedangkan, strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: (a) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; (b) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi; (c) meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; (d) meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan (e) meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi: (1) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; (2) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi: (1) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (2) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi: (a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan (c) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi: (a) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; (b) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; (c) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; (d) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; (e) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (f) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan (g) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Kebijakan pengembangan kawasan budi daya meliputi: (1) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan (2) pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi: (a) menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; (b) mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; (c) mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (e) mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan (f) mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi: (a) membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; (b) mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak; (c) mengembangkan

ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 persen dari luas kawasan perkotaan; dan (d) membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; (e) mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional meliputi: (1) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional; (2) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; (3) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional; (4) pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; (6) pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan (7) pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan. Sedangkan strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung; (b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; (c) membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; (d) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; (e) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan (f) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; (b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan (c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional meliputi: (a) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; (b) menciptakan iklim investasi yang kondusif; (c) mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; (d) mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; (e) mengintensifkan promosi peluang investasi; dan (f) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi: (a) mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi; (b) meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan (c) mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa meliputi: (a) meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur; (b) mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan (c) melestarikan situs warisan budaya bangsa.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia meliputi: (a) melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya; (b) meningkatkan kepariwisataan nasional; (c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi: (a) memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan; (b) membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah; (c) mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat; (d) meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan (e) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

1.3. Arahan RPJMN Tahun 2010-2014

Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2010-2014, maka pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari penjabaran skala prioritas dalam RPJMN 2010-2014, maka strategi pengembangan wilayah diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; (2) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; (3) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan

lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; (5) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan; (6) menciptakan kesatuan dan keutuhan wilayah darat, laut dan udara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4. Perkembangan Kesenjangan Antarwilayah Saat Ini

1.4.1. Perekonomian Daerah

- ***Pertumbuhan Ekonomi Daerah***

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2007 adalah sebesar 6.28 persen dan tahun 2008 diperkirakan akan tumbuh sebesar 6.06 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagian besar masih ditopang oleh pertumbuhan dari sisi konsumsi baik dari sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah yaitu rata-rata sekitar 66,3 persen selama 2005-2007. Sementara itu, dari sisi sektoral, kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Bruto sebagian besar masih didominasi oleh sektor industri pengolahan sekitar 27,7 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 17 persen dan sektor pertanian sebesar 14,17 persen.

Sektor utama yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi adalah (1) sektor pengangkutan dan komunikasi, (2) sektor perdagangan, hotel dan restoran, (3) sektor bangunan, (4) sektor keuangan dan jasa perusahaan, (5) sektor jasa-jasa, dan (6) sektor industri pengolahan. Pusat pengembangan sektor-sektor tersebut sebagian besar di Jawa dan Bali.

Dalam periode 2006-2007, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,91 persen dan Sulawesi Tenggara sebesar 7.82 persen dan pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (-0,33 persen) dan Provinsi Papua (-6.46 persen). Provinsi yang termasuk mengalami pertumbuhan ekonomi positif (melebihi dari 6 persen) dan meningkat adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

- ***Pendapatan Perkapita***

PDRB perkapita rata-rata antarpulau menunjukan adanya perbedaan yang cukup tinggi antara Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Papua dengan pulau-pulau lainnya. Rata-rata PDRB perkapita tahun 2007 untuk Pulau Sumatera sebesar Rp. 4.818 ribu, Pulau Jawa-Bali sebesar Rp. 18.665 ribu, Pulau Kalimantan sebesar Rp. 16.595 ribu, dan Papua sebesar 18.938 ribu, sedangkan untuk Pulau Sulawesi, Kep. Maluku, dan Nusa Tenggara rata-rata PDRB perkapita lebih kecil dari Rp. 10.000 ribu dan paling rendah adalah PDRB perkapita di Kepulauan Maluku yaitu sebesar Rp. 3.855 ribu.

Perkembangan PDRB perkapita (tanpa migas) atas dasar harga berlaku menurut provinsi, dalam kurun waktu 2005-2007 PDRB perkapita provinsi mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi berdasarkan nilai PDRB perkapita menunjukan adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarprovinsi terutama untuk provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Ketimpangan ini disebabkan adanya beberapa provinsi dengan nilai PDRB perkapita yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu diantaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur Rp. 67.125 ribu per jiwa, DKI Jakarta sebesar Rp. 55.812 ribu per jiwa, Riau sebesar Rp. 35.616 ribu per jiwa. dan beberapa provinsi dengan nilai PDRB perkapita paling rendah, yaitu Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 3.111 ribu per jiwa dan Nusa Tenggara Timur

sebesar Rp. 3.886 ribu per jiwa.

Perbandingan PDRB perkapita antarprovinsi di Pulau Sumatera yaitu PDRB perkapita teringgi berada adalah di Riau yaitu sebesar Rp. 35.616 ribu per jiwa dan Kepulauan Riau sebesar Rp. 34.633 ribu per jiwa, sedangkan PDRB perkapita terendah adalah di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 6.972 ribu per jiwa. Namun dilihat dari perkembangannya selama periode 2005-2007, rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi adalah di Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,87 persen dan Jambi sebesar 4,57 persen, untuk pertumbuhan terendah bahkan negatif adalah di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar -4,67 persen. Untuk Pulau Jawa-Bali, PDRB perkapita tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 55.812 ribu per jiwa dan terendah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 8.581 ribu jiwa. Dilihat pertumbuhan rata-rata selama tahun 2005-2007, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,61 persen dan Jawa Timur sebesar 5,52 persen, sedangkan untuk pertumbuahan terendah adalah di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 2,01 persen. Sedangkan perbandingan PDRB perkapita antarprovinsi di luar Pulau Jawa-Bali dan Sumatera, PDRB perkapita tertinggi adalah di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 67.125 ribu per jiwa bahkan tertinggi secara nasional, selanjutnya Provinsi Papua sebesar Rp. 24.828 ribu jiwa dan PDRB perkapita terendah di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 3.111 ribu jiwa juga merupakan terendah secara nasional. Menurut pertumbuhan rata-rata per tahun (2005-2007), pertumbuhan tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan denga rata-rata pertumbuhan sebesar 7,55 persen dan terendah bahkan pertumbuhannya negatif adalah Provinsi Kalimantan Timur yaitu -0,61 persen.

- ***Ekspor***

Perkembangan ekspor nasional dari tahun 2000-2007 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan nilai ekspor terbesar berasal dari kelompok non migas. Pada tahun 2007 nilai ekspor nasional non migas mencapai 91.927 juta US$ atau sebesar 80,08 persen dari total nilai ekspor nasional, dan untuk ekspor migas sebesar 21.772 juta US$ atau sebesar 18,7 persen. Perkembangan nilai ekspor untuk migas dari tahun 2002-2007 meningkat, rata-rata peningkatan per tahun sebesar 6,71 persen, begitu juga dengan nilai ekspor non migas meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 10,27 persen. Pertumbuhan ekspor migas terbesar terjadi pada tahun 2005, yaitu mencapai pertumbuhan sebesar 22,29 persen, untuk pertumbuhan non migas terbesar pada tahun 2006, yaitu sebesar 19,81 persen.

Perkembangan volume dan nilai ekspor nasional menurut pelabuhan penting tahun 2002-2006 mengalami peningkatan setiap tahunnya, volume ekspor tahun 2002 sebesar 222.910 ribu m.ton dengan nilai ekspor sebesar $ US 57.158 juta meningkat hingga tahun 2006 mencapai 317.172,3 ribu m.ton dengan nilai ekspor sebesar $ US 100.798,7 juta. Volume ekspor terbesar pada tahun 2006 berasal dari Wilayah Kalimantan sebesar 66,02 persen (209.388 ribu m.ton) ekspor dari wilayah Kalimantan sebagian besar berasal dari pelabuhan Banjarmasin, Pontianak, Tanjung Sangata dan Bontang. Sedangkan ekspor dari wilayah Sumatera sebagian besar berasal dari Pelabuhan Dumai (16.295,1 rb m,ton), Pelabuhan Belawan (6.726 ribu m.ton), dan pelabuhan lainnya sebesar 25.800,2 ribu m,ton. Sedangkan volume ekspor terkecil berasal dari pelabuhan di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara hanya 0,32 persen (1.007,7 ribu m.ton) dan Wilayah Sulawesi sebesar 1,19 persen (3.772,8 ribu m.ton).

Selanjutnya, nilai ekspor nasional tertinggi pada tahun 2006 berasal dari pelabuhan di Wilayah Jawa dan Madura sebesar 43,24 persen ($ US 43.586,1 juta), yaitu berasal dari

Pelabuhan Tanjung Priok sebesar $ US 26.076 juta (59,83 persen) dan Pelabuhan Tanjung Perak sebesar $ US 8.145,8 juta. Sedangkan untuk pelabuhan di Wilayah Sumatera sebesar $ US 29.302,7 juta (29,07 persen) sebagian besar berasal dari Pelabuhan Dumai sebesar $ US 6.582,2 juta, Pelabuhan Belawan sebesar $ US 4.580,4 juta, dan Pelabuhan lainnya sebesar $ US 7.208,3 juta. Sementara untuk Wilayah Kalimantan sebesar $ US 19.642,4 juta (19,49 persen), yang berasal dari Pelabuhan Bontang sebesar $ US 9.074,5 juta (46,20 persen) dan Pelabuhan Balikpapan sebesar $ US 2.114,7 juta (10,77 persen). Wilayah dengan nilai ekspor terkecil adalah Bali dan Nusa Tenggara sebesar $ US 1.530 juta (1,52 persen) dan Wilayah Sulawesi sebesar $ US 2.632,7 juta (2,61 persen) dari total nilai ekspor nasional.

- ***Penanaman Modal dan Investasi***

Penanaman modal atau investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. Oleh sebab itu pemerintah melakukan upaya secara intensif untuk menarik para investor dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia antara lain dengan mempertahankan stabilitas nasional.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah selama periode 2002-2007 terlihat bahwa nilai investasi terpusat di Pulau Jawa-Bali dan Sumatera. Pada tahun 2007, besaran nilai realisasi investasi PMDN di Pulau Jawa-Bali sebesar 17.592 miliar rupiah atau sebesar 53,51 persen dari total realisasi PMDN nasional yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 11.206 miliar rupiah dan DKI Jakarta sebesar 3.821 miliar rupiah, selanjutnya di Pulau Sumatera sebesar 10,362 miliar rupiah (31,52 persen) yang terkonsentrasi di Provinsi Jambi sebesar 4.474 miliar rupiah dan Riau sebesar 3.095 miliar rupiah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam distribusi PMDN cukup tinggi terutama untuk provinsi-provinsi di Bagian Timur Indonesia, khususnya Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui oleh pemerintah periode 2005-2007 juga mengalami fluktuasi. Berdasarkan data tahun 2002-2007, pola investasi yang bersumber dari PMA terjadi ketimpangan antar wilayah dalam realisasi ivestasi, hal ini terlihat dari tahun ke tahun investasi terpusat di Pulau Jawa-Bali. Nilai investasi PMA tahun 2007 hampir 86 persen terpusat di Pulau Jawa-Bali, dikuti Pulau Sumatera sebesar 10,58 persen, sedangkan untuk Pulau lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua nilai realisasi untuk investasi PMA sangat kecil. Realisasi investasi PMA di Pulau Jawa- Bali dari tahun ke tahun menempati urutan tertinggi, khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Nilai realisasi investasi PMA tahun 2007 (September) untuk DKI Jakarta mencapai 4.383,4 US$ juta, Jawa Barat sebesar 944,1 US$ juta, dan Jawa Timur sebesar 1.662 US$ juta.

Total nilai realisasi investasi PMA di Pulau Sumatera tahun 2007 sebesar 902 US$ juta, provinsi dengan realisasi PMA terbesar adalah terbesar Provinsi Riau sebesar 460.6 US$ juta (51,06 persen)n dari totat nilai PMA pulau, selanjutnya diikuti provinsi sumatera utara sebesar 159,9 US$ juta (17,73 persen), dan Sumatera Selatan sebesar 95,7 US$ juta (10,61 persen). Sedangkan untuk provinsi dengan nilai realisasi PMA rendah adalah Provinsi Jambi dan Nanggroe Aceh Darussalam, masing-masing sebesar 1,72 US$ juta dan 1,93 US$ juta. Total nilai realisasi investasi PMA di Pulau Kalimantan sebesar 203,2 juta US$ menurun dibandingkan nilai investasi tahun sebelumnya. Investasi terbesar di Pulau

Kalimantan adalah provinsi Kalimantan Tengah sebesar 77,2 US$ juta dan Kalimantan Timur sebesar 65,7 US$ juta.

- ***Inflasi***

Dalam periode Januari-Juni tahun 2008, tingkat inflasi teertinggi berada di Kota Palu sebesar 7,99 persen, Kota Kendari sebesar 7,96 persen, Kota Gorontalo sebesar (7,51 persen), dan Kota Mamuju sebesar 7,43 persen serta Kepulauan Riau sebesar 7,01 persen. Selain itu, beberapa provinsi mempunyai potensi peningkatan inflasi yang disebabkan antara lain: (1) meningkatnya harga pangan terutama beras akibat kegagalan panen, banjir, dan perubahan musim; (2) meningkatnya harga minyak goreng akibat terganggunya jalur distribusi, dan meningkatnya ekspor; (3) meningkatnya biaya transportasi akibat kerusakan infrastruktur transportasi dan terjadinya gelombang laut yang tinggi.

- ***Kredit Perbankan***

Pada Juni 2008, total kredit rupiah bank umum secara nasional adalah Rp. 929.946 miliar. Posisi tertinggi untuk perkembangan kredit rupiah bank umum adalah di Pulau Jawa sebesar 664.878 miliar rupiah atau 71,50 persen dari total nasional yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan total kredit rupiah sebesar Rp. 312.825 miliar dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp. 116.152 miliar. Selanjutnya di Pulau Sumatera sebesar Rp. 148.332 miliar atau 15.95 persen yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 48.136 miliar dan Riau sebesar Rp. 28.566 miliar. Jumlah kredit di Pulau Sulawesi sebesar Rp. 50.083 miliar yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 30.189 miliar dan Sulawesi Utara sebesar Rp. 8.777 miliar.

Posisi kredit rupiah bank umum terendah berada di Provinsi Maluku Utara sebesar 1.223 miliar rupiah dan Gorontalo sebesar 1.797 miliar rupiah. Selama periode 2003-2008 pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,21 persen per tahun, pertumbuhan terbesar berada di Provinsi Bangka Belitung sebesar 38,22 persen pert tahun dan Bengkulu 36,02 persen per tahun. Sedangkan untuk pertumbuhan terendah untuk kredit rupiah bank umum berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 20,49 persen per tahun dan Sumatera Barat sebesar 20,83 persen per tahun.

Perkembangan posisi kredit usaha kecil rupiah nasional menunjukkan pergerakan positif dan meningkat dari tahun ke tahun. Secara nasional total kredit usaha kecil rupiah pada tahun 2008 sebesar Rp. 103.694 miliar. Nilai kredit rupiah bank umum tertinggi tahun 2008 berada di Pulau Jawa-Bali sebesar 61,11 persen atau sebesar 63,638 miliar rupiah dan sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Jawa Timur sebesar 18.964 miliar rupiah, DI Yogyakarta sebesar 18.781 miliar rupiah, dan Jawa Tengah sebesar 13,643 miliar rupiah. Selanjutnya di Pulau Sumatera sebesar 22,31 persen atau sebesar 23.134 miliar rupiah yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 6.603 miliar rupiah dan Riau sebesar 4.749 miliar rupiah.

Di Pulau Sulawesi sebesar 7,37 persen atau sebesar 7,644 miliar rupiah yang terkonsentrasi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3.660 miliar rupiah dan Sulawesi Utara sebesar 1.887 miliar rupiah. Pulau Kalimantan sebesar 5.726 miliar rupiah (5,52 persen) sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1.580 miliar rupiah dan Kalimantan Selatan sebesar 1.197 miliar rupiah. Sedangkan untuk nilai kredit usaha kecil

di Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua relatif kecil yaitu masih dibawah 3 persen dari total nasional. Untuk nilai kredit usaha kecil terrendah berada di Provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung masing-masing sebesar 171 milir rupiah dan 250 miliar rupiah.

Pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode 2003-2008 untuk kredit usah kecil bank umum terbesar adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebesar 25,63 persen per tahun, Bengkulu sebesar 19,86 persen, Sumatera Utara sebesar 19,712 persen dan pertumbuhan terendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,72 persen pertahun dan Kalimantan Barat denagn pertumbuhan rata-rata sebesar 0,97 persen per tahun.

1.4.2. Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan

- ***Pengangguran***

Jumlah pengangguran terbuka Nasional pada Agustus 2008 adalah 9,39 juta orang atau 8,39 persen dari total angkatan kerja. Persebaran menurut provinsi menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi di beberapa provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Banten (14,15 persen), Sulawesi Utara (12,35 persen), Jawa Barat (12,28 persen), Kalimantan Timur (11,41 persen), DKI Jakarta (11,06 persen), Maluku (11,05), Sulawesi Selatan (10,49 persen), dan Sumatera Barat (9,73 persen). Upaya mengatasi pengangguran perla diarahkan pada provinsi tersebut.

Beberapa provinsi mengalami pertumbuhan rata-rata jumlah pengangguran terbuka yang cukup tinggi selama tahun 2005-2008 yaitu Sulawesi Barat (15,08 persen), Sulawesi Utara (7,80 persen), dan Maluku Utara (6,80 persen). Sementara itu, beberapa provinsi mengalami penurunan pada rata-rata jumlah pengangguran yang relatif cepat yaitu Lampung (-14,23 persen), Bengkulu (-13,88 persen), dan NTB (-11,99 persen). Beberapa provinsi yang lain juga mengalami penurunan rata-rata jumlah pengangguran, namun tidak terlalu signifikan yaitu Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur.

- ***Kemiskinan***

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2004 mengalami penurunan. Pada periode 2004-2008, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, yaitu pada tahun 2004 sebesar 3,61 juta jiwa, tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa, dan pada tahun 2006 kembali meningkat mencapai 39,05 juta jiwa. Selanjutnya pada tahun 2008 penduduk miskin menurun menjadi sekitar 34,96 juta jiwa atau berkurang sebanyak 4,1 juta jiwa atau 15,4 persen dari total penduduk.

Konsentrasi penduduk miskin menurut pulau, distribusi penduduk miskin tertinggi berada di Pulau Jawa-Bali, yaitu sebanyak 57,75 persen (20,2 juta jiwa) yang tersebar sebanyak 8,7 juta jiwa di daerah perkotaan dan 11,5 juta jiwa di daerah perdesaan, berikutnya berada di Pulau Sumatera sebanyak 20,86 persen (7,29 juta jiwa) yang tersebar 2,56 juta jiwa di perkotaan dan 4,73 juta jiwa di daerah perdesaan, dan di Pulau Sulawesi sebesar 7,5 persen (2,6 juta jiwa) tersebar sebanyak 0,4 juta jiwa di perkotaan dan 2,2 juta jiwa di perdesaan, Sedangkan distribusi terendah penduduk miskin berada di Maluku yaitu sebesar 1,42 persen yang tersebar di perkotaan sebanyak 0,42 persen daerah perkotaan dan 1,99 persen di daerah perdesaan.

Sedangkan untuk gambaran jumlah dan persentase penduduk miskin antarprovinsi, maka jumlah penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Jawa Timur sebesar 6.651,3 ribu jiwa, Jawa Tengah sebesar 6.189,6 ribu jiwa, Jawa Barat sebesar 5.322,4 ribu jiwa, dan Sumatera Utara sebesar 1.613,8 ribu jiwa, untuk jumlah penduduk miskin terrendah berada di Provinsi Bangka Belitung sebesar 8,09 ribu jiwa, Maluku Utara sebesar 4,29 ribu jiwa, dan Kepulauan Riau sebesar 10,08 ribu jiwa. Sedangkan berdasarkan persentase, kantong-kantong kemiskinan terdapat di Provinsi Papua (37,08 persen), Papua Barat (35,12 persen), Maluku (29,66 persen), Nusa Tenggara Timur (25,56 persen), Gorontalo (24,88 persen), Nusa Tenggara Barat (23,81 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (23,53 persen), Lampung (20,98 persen), Sulawesi Tengah (20,75 persen), Bengkulu (20,64 persen), Sulawesi Tenggara (19,53 persen), Jawa Tengah (19,23 persen), Jawa Timur (18,51 persen), dan D.I Yogyakarta (18,32 persen). Permasalahan kemiskinan yang terjadi di beberapa provinsi tersebut perlu diatasi secara terpadu dengan memperhatikan potensi wilayah dan koordinasi yang solid antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

- ***Persebaran dan Kepadatan Penduduk***

Pola persebaran penduduk Indonesia sampai tahun 2007 masih terpusat di pulau Jawa-Bali. Pada tahun 2007, jumlah penduduk di pulau Jawa-Bali diperkirakan sekitar 135,2 juta jiwa atau 59,65 persen dari total penduduk nasional, dengan tingkat kepadatan 1.008 jiwa per Km2. Tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Jika dilihat TFR per provinsi di Pulau Jawa-Bali, maka masih terdapat satu provinsi yang TFR-nya lebih besar dari TFR nasional yaitu Provinsi Banten (2,7). Sedangkan TFR di provinsi lainnya sudah sama atau lebih kecil dari nilai TFR nasional. Provinsi Jawa Barat mempunyai TFR 2,6; Provinsi Jawa tengah 2,3; Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali sebesar 2,1; dan Provinsi Jogjakarta mempunyai TFR paling rendah di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 1,8. Pencapaian TFR yang sudah relatif baik di provinsi-provinsi Pulau Jawa-Bali tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan agar pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Jumlah penduduk di pulau Jawa-Bali tahun 2007 sebanyak 135.206.580 jiwa atau 59,65 persen dari total penduduk nasional dengan tingkat kepadatan 1.008 jiwa per Km2. Jumlah penduduk di Pulau Sumatera sebanyak 48,64 48.644.122 jiwa (21 persen) dengan kepadatan sebesar 101 jiwa per Km2, penduduk Pulau Kalimantan sebanyak 12.680.170 jiwa (5,59 persen) dengan tingkat kepadatan sebesar 23 jiwa per Km2, penduduk di Pulau Nusa Tenggara sebesar 8.594.169 jiwa (3,78 persen) dengan tingkat kepadatan terbesar ke dua setelah pulau Jawa-Bali yaitu 120 jiwa per Km2 , jumlah penduduk Pulau Sulawesi sebanyak 16.327.201 jiwa (7,20 persen) dengan tingkat kepadatan 87 jiwa per Km2. Jumlah penduduk Pulau Papua dan Kepulauan Maluku masing-masing sebanyak 2.843.172 jiwa dan 2.378.364 jiwa dengan kepadatan masing-masing 7 jiwa per Km2 dan 30 jiwa per Km2.

Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 40.707.250 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.151 Km2, Jawa Timur sebanyak 37.872.044 dengan kepadatan 792 jiwa per Km2, dan provinsi Jawa tengah sebesar 32.862.087 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.037 jiwa per Km2. sedangkan populasi penduduk terendah berada adalah provinsi-provinasi pemekaran baru yaitu di Gorontalo sebesar 945.001 jiwa, Maluku Utara sebesar 970.443 jiwa, dan Papua Barat sebesar 690.349 jiwa.

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali pada tahun 2007 mencapai 1.008 jiwa per km2. Sementara itu, kepadatan penduduk di luar Pulau Jawa-Bali relatif rendah, terutama di

Kalimantan dengan luas wilayah daratan sebesar 28,49 persen dari luas indonesia hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 23 jiwa per Km2 dan Papua dengan luas wilayah daratan sebesar 21,78 persen dari luas Indonesia hanya memiliki kepadatan sebesar 7 jiwa per Km2. Sebagai perbandingan, Provinsi DKI Jakarta dengan luas hanya 0,04 persen memiliki kepadatan penduduk sebesar 11.606 jiwa per km2.

- ***Kesehatan***

Derajat kesehatan penduduk Indonesia berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukan perbaikan. Jumlah provinsi dengan nilai AHH pada tahun 2006 yang berada di atas rata-rata sebanyak 19 provinsi dan dibawah rata-rata sebanyak 14 provinsi. Peringkat tertinggi AHH tertinggi tahun 2006 adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 73 tahun, DKI Jakarta 72,6 tahun, dan Sulawesi Utara 71,8 tahun. Sedangkan untuk peringkat AHH terendah adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (60,9 tahun), Kalimantan Selatan (62,4 tahun), dan Banten (64,3 tahun).

Berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun 2005 peringkat nilai rata-rata AKB terbaik adalah di pulau Jawa-Bali yaitu dengan nilai AKB sebesar 25 per 1000 kelahiran hidup, diikuti oleh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan nilai AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan peringkat terendah ditunjukan dengan nilai AKB tertinggi, yaitu di Pulau Nusa Tengga sebesar 43 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan jika dilihat perbandingan nilai AKB antar Provinsi, provinsi-provinsi dengan peringkat terbaik yang ditunjukan dengan nilai AKB paling rendah adalah Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta dengan nilai AKB sebesar 14 per 1000 kelahiran hidup dan peringkat terburuk ditunjukan dengan nilai AKB yang paling tinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (51 per 1000 kelahiran hidup).

Pola penyebaran status gizi antarprovinsi terlihat bahwa penyebaran provinsi yang memiliki balita dengan status gizi buruk di atas rata-rata nasional adalah sebanyak 13 provinsi dan sebagian besar berada di bagian Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, NTT, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan provinsi dengan persentase status gizi buruk paling rendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan persentase dibawah 6 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi atau diatas rata-rata nasional untuk status gizi kurang adalah Provinsi Maluku, Banten, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, sedangkan persentase terendah untuk status gizi kurang adalah di Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan NTB dengan persentase kurang dari 16 persen.

Berdasarkan tingkat perkembangannya selama periode 2002-2005, provinsi dengan peningkatan tertinggi status gizi buruk dan kurang berada di provinsi Kep. Riau (17,06 persen), Maluku (15,02 persen), Papua (14,78 persen), dan Maluku Utara (11,77 persen), sedangkan penurunan ppersentase untuk status gizi buruk dan kurang terbesar berada di provinsi NTB (4,63 persen), Bali (4,46 persen), dan Sulawesi Selatan (3,77 persen). Peningkatan status giji normal tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah (3,77 persen), Banten (3,40 persen), Kalimantan Barat (2,66 persen), dan Papua Barat (1,26 persen). Sedangkan persentase penurunan status gizi normal terbesar berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (11,19 persen), Kalimantan Selatan (7,31 persen), dan Kep. Riau (6,58 persen).

- ***Pendidikan***

Gambaran yang sangat mendasar dari hasil pendidikan diantaranya adalah kemampuan baca-tulis dari penduduk dewasa. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dicerminkan dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Presentase penduduk usia di atas 15 tahun yang mampu membaca huruf latin dan lainnya (Angka Melek Huruf) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kondisi AMH dan RLS antarprovinsi pada tahun 2006 menunjukkan bahwa sebagian besar AMH wilayah provinsi berada di atas AMH rata-rata nasional yaitu sebanyak 21 provinsi, sedangkan wilayah provinsi dengan AMH dibawah rata-rata nasional sebanyak 12 provinsi. Untuk AMH tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 99,3 persen, DKI Jakarta sebesar 98,4 persen, dan Maluku sebesar 98 persen. Sedangakan untuk AMH terendah berada Provinsi Sulawesi Selatan (85,7 persen), NTB (80,1 persen) dan Papua (75,4 persen). Untuk angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi berada di provinsi Provinsi DKI Jakarta (10,8 tahun), Sulawesi Utara (8,8 tahun, dan Kalimantan Timur (8,8 tahun), sedangkan RLS terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (6,4 tahun), Sulawesi Barat (6,3 tahun), dan Papua (6,3 tahun).

- ***Kebudayaan***

Terkait dengan pembangunan kebudayaan, berbagai upaya meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditandai dengan makin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari makin meningkatnya berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya.

- ***Pemuda dan Olahraga***

Di bidang pemuda dan olahraga, berbagai kegiatan pembangunan telah meningkatkan peran dan partisipasi pemuda serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat. Hal ini antara lain ditandai dengan peningkatan kualitas dan kemandirian pemuda, kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi pemuda, partisipasi pemuda terdidik dalam pembangunan perdesaan, pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan internasional, pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, serta peningkatan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana.

- **Pemberdayaan Perempuan**

Salah satu indikator untuk melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah GDI, yang merupakan indikator komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada tahun 2007, GDI Indonesia adalah 65,8, dan satu-satunya provinsi yang memiliki GDI di atas skor tersebut adalah Kalimantan Tengah. Sementara ke-32 provinsi lainnya memiliki GDI yang berkisar antara 43,6 sampai dengan 65,2.

Indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan adalah GEM, yang merupakan indikator komposit spesifik untuk perempuan, dan meliputi partisipasi perempuan di parlemen, jabatan publik, angkatan kerja, dan ekonomi. Pada tahun 2007, GEM nasional adalah 62,1, dan terdapat 18 provinsi yang memiliki skor yang lebih tinggi atau sama dengan itu. Adapun 15 provinsi lainnya memiliki nilai yang lebih rendah, dan berkisar antara 50,9 sampai dengan 62,0.

Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih terdapat di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan di daerah hendaknya lebih memperhatikan kesetaraan pemenuhan hak-hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memanfaatkan sumber daya dan hasil-hasil pembangunan secara optimal.

1.4.3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- ***Penggunaan Lahan***

Berdasarkan proporsi penggunaan lahan tahun 2005 menurut pulau, maka pola penggunaan lahan di Pulau Sumatera didominasi oleh jenis penggunaan lahan perkebunan seluas 10.350.867 hektar atau sekitar basar 37,76 persen, selanjutnya kebun campuran seluas 5.529.217 hektar atau 20,17 persen, dan lahan untuk kayu-kayuan seluas 3.505.440 hektar atau 12,79 persen. Pola penggunaan lahan di Pulau Jawa-Bali sebagian besar didominasi dengan sawah yaitu seluas 3.315.757 hektar atau sekitar 33,35 persen, selanjutnya kebun campuran seluas 3.218.528 hektar (32,37 persen), dan pekarangan/lahan untuk bangunan seluas 1.816.607 hektar (18.27 persen); di Pulau Kalimantan pola penggunaan lahan didominasi dengan lahan sementara tidak diusahakan seluas 6.216.100 hektar (32,70 persen), perkebunan seluas 4.834.965 hektar (25,44 persen), dan lahan untuk kayu-kayuan seluas 1.942.226 hektar (14,60 persen); Pola penggunaan lahan di Pulau Sulawesi sebagian besar didominasi dengan kebun campuran seluas 2.225.901 hektar (23,34 persen), perkebunan seluas 2.089.394 hektar (21,91 persen), dan lahan untuk kayu-kayuan seluas 1.942.226 hektar (20,36 persen); dan di Pulau Nusa Tenggara pola penggunaan lahan didominasi dengan kebun campuran seluas 984.582 hektar (22,86 persen), padang rumput seluas 936.812 hektar (21,75 persen), dan lahan sementara tidak diusahakan seluas 789.582 hektar (18,33 persen).

Pola sebaran penggunaan lahan antarprovinsi berdasarkan data BPS 2005, terlihat bahwa pola pemusatan penggunaan lahan sawah berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Lampung, seluruh provinsi di Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pola pemusatan penggunaan lahan kebun campuran berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, lampung, Bangka Belitung, dan bengkulu, Seluruh provinsi di Pulau Jawa-Bali, NTT, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selawesi Tengah, dan Gorontalo.Sedangkan untuk lahan sementara yang tidak diusahakan terkonsentrasi di Provinsi Jambi, Bangka Belitung, Nusa Nenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tmur.

Pola penggunaan lahan perkebunan terkonsentrasi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Bali, kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Nusa tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Luas lahan penggembalaan/padang ramput terkonsentrasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Pulau Sulawesi kecuali Provinsi Sulawesi Barat. dan Grontalo. Luas Penggunaan Lahan untuk kolam terkonsentrasi di Provinsi Nangroe Aceh Darusslam, Sumatera Selatan, di Pulau Jawa-Bali kecuali di Bali, NTB, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Penggunaan lahan untuk kayu-kayuan, terkonsentrasi di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, kepulauan Riau, ,Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah,

Pemusatan Lahan pekarangan memusat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan seluruh provinsi di Pulau Jawa-Bali.

- ***Hutan***

Hutan di Indonesia merupakan sumberdaya sangat penting dan memiliki fungsi beragam, baik sebagai fungsi ekonomis maupun fungsi ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, kawasan hutan dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu Hutan Lindung (HL), Suaka Alam dan Pelestarian Lingkungan, Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap, dan Hutan yang dapat dikonversi. Menurut data Statistik Planalogi Kehutanan 2007, luas Hutan Lindung seluas 31.604.032 ha atau 23,05 persen dari total nasional, kawasan suaka alam perairan seluas 3.395.783 hektar (2,48 persen), kawasan suaka alam daratan seluas 19.908.234 hektar (14.52 persen), luas hutan produksi terbatas seluas 22.502.724 hektar (16,41 persen), hutan produksi tetap 36.649.918 hektar (26,73 persen), hutan produksi yang dapata dikonversi seluas 22.795.961 (16,63 persen), dan luas taman buru 233.814 hektar (0,17 persen).

Proporsi luas penggunaan lahan hutan antarprovinsi, menunjukan proporsi terbesar untuk luas hutan lindung berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 10.619.090 hektar, Kalimantan Timur seluas 2.751.702 hektar, dan Kalimantan Barat seluas 2.307.045 hektar, sedangkan luasan hutan lindung terendah berada di Provinsi Banten, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Sebaran terluas untuk hutan produksi terbatas yaitu di Provinsi Kalimantan Timur seluas 4.612.960 hektar, Kalimantan Tengah seluas 3.400.000 hektar, dan Kalimantan Barat seluas 2.445.985 hektar, sedangkan luasan terkecil di provinsi Bali seluas 6.719 hektar. Proporsi luas lahan Hutan Produksi Tetap terbesar berada di Provinsi Papua seluas 10.585.210 hektar, Kalimantan Tengah seluas 6.068.000 hektar, dan Kalimantan Timur seluas 5.121.688 hektar, sedangkan luasan terkecil berada di Provinsi DKI Jakarta, Bali dan DI Yogyakarta. Luas Hutan yang dapat dikonversi terbesar berada di Provinsi Papua seluas 9.262.130 hektar, Riau seluas 4.770.085 hektar, dan Kalimantan Tengah seluas 4.302.581 hektar.

- ***Lahan Kritis***

Perkembangan kondisi lahan kritis di Indonesia berdasarkan data Departemen Kehutanan menunjukan luasan lahan kritis pada tahun 2006 sebesar 77.806.881 hektar atau meningkat sebesar 5,13 persen dari tahun 2004. Pola sebaran lahan kritis paling besar berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 10.060.191 hektar, Kalimantan Timur sebesar 9.579.839 hektar dan Riau sebesar 7.116.530 hektar. Sedangkan sebaran luas lahan kritis paling rendah berada di Provinsi DI Yogyakarta seluas 138.722 hektar, Bali seluas 170.151 hektar dan Banten seluas 209.521 hektar.

Berdasarkan tingkat kekritisan, kondisi lahan kritis dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu: lahan sangat kritis, kritis, dan agak kritis. Luas lahan kritis dengan kategori sangat kritis seluas 47.610.081 hektar (61,17 persen) dan meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2004 (13.497.449 hektar), menurut persebarannya untuk kategori sangat kritis terbesar berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesare 1.811.004 hektar, Kalimantan Timur sebesar 824.968 hektar, dan Riau sebesar 256.907 hektar. Sedangkan untuk kategori kritis sebesar 23.306.233 hektar (29,95 persen) atau meningkat sebesar 16 persen dari tahun 2004, dengan sebaran paling luas berada di Provinsi Papua sebesar 2.659.383 hektar, Riau sebesar 2.306.658 hektar, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 2.234.587 hektar. Kondisi

lahan kritis yang termasuk kategori agak kritis sebesar 40.437.829 hektar (8,86 persen) atau menurun sebesar 82,69 persen dari tahun 2004, sebaran lahan dengan kategori agak kritis terbesar berada di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.267.743 hektar, Nusa Tenggara Timur seluas 985,223 hektar, dan Sumatera Selatan seluas 739.484 hektar.

- ***Sumber Energi***

Sumber bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia tersedia potensi sumberdaya yang cukup. Jenis sumberdaya tersebut terdiri dari batu bara, gas alam, minyak bumi, panas bumi dan air. Potensi batu bara di dalam negeri cukup memadai dan potensinya cukup besar. Potensi untuk pembangkit listrik menurut pulau menunjukkan bahwa potensi terbesar batu bara berada di Pulau Sumatera, yaitu sebanyak 104.820 juta ton atau sebesar 65,67 persen dari total nasional yang tersebar di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, dan di Pulau Kalimantan sebanyak 54.405 juta ton (34,08 persen) yang terpusat di Kalimantan Timur. Potensi gas alam terbesar berada di Pulau Sumatera, yaitu sebesar 93 TSCF atau 56,20 persen dari total nasional yang sebagian besar berada di Provinsi Kepulauan Riau (Kep. Natuna) sebanyak 53 TSCF, dan Sumatera Selatan sebesar 27 TSCF, selanjutnya di Kalimantan Timur sebesar 21 TSCF (13 persen), dan Papua Barat sebesar 24 TSCF (14 persen). Potensi Minyak Bumi terbesar berada di Sumatera sebesar 5.669 MMSTB atau 67,46 persen dari total potensi minyak bumi nasional yang tersebar di Kepulauan Riau dan Riau, Sumatera Selatan, Pulau Jawa-Bali sebesare 19 persen (Jawa Barat dan Jawa Timur), dan di Kalimantan sebesar 9 persen (Kalimantan Timur). Potensi Panas Bumi terbesar berada di Pulau Sumatera dan Jawa, masing-masing sebesar 13.419 Mwe (48,78 persen) dan 9.852 Mwe (35,81 persen). Di Pulau Sumatera potensi terbesar berada di Sumatera Utara (3.345 Mwe), Lampung (2.855 Mwe), Sumatera Selatan (1.911 Mwe), dan Sumatera Barat (1.656 Mwe), Pulau Jawa-Bali potensi terbesar di Jawa Barat (5.966 Mwe), Jawa Tengah (1.629 Mwe). Di Pulau Sulawesi potensi panas bumi sebesar 7,38 persen dan terbesar berad di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 793 Mwe. Potensi Air terbesar berada di Pulau Papua sebesar 24,119 MW (57,92 persen), Kalimant sebesar 7.547 MW (17,5 persen), dan Sumatera sebesar 5.490 MW (12.73 persen).

1.4.4. Perkembangan Sarana dan Prasarana

- ***Jaringan Irigasi***

Pada tahun 2005, daerah irigasi yang memiliki jaringan utama (fungsional) terluas berada di Pulau Jawa, yaitu di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara daerah irigasi terluas di luar Pulau Jawa berada di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Sumatera Barat. Berdasarkan perkembangannya antara tahun 2004-2005, peningkatan luas daerah irigasi yang menonjol terjadi di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Lampung.

Pada tahun 2006, telah dilakukan peningkatan jaringan irigasi seluas 219,4 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 817,6 ribu hektar, operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi dan rawa seluas 2,16 juta hektar yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (lebih dari 3.000 hektar), rehabilitasi/ peningkatan jaringan rawa seluas 174 ribu.

- ***Transportasi***

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan untuk tingkat provinsi, kerapatan jalan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta

sebesar 1,68 km/km2, D.I. Yogyakarta sebesar 1,47 km/km2, dan Jawa Tengah sebesar 0,72 km/km2. Sementara kerapatan jalan terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,04 km/km2, Kalimantan Timur sebesar 0,05 km/km2, dan Kalimantan Tengah sebesar 0,06 km/km2, dan Kalimantan Barat sebesar 0,08 km/km2. Berdasarkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan roda empat yang mengindikasikan kapasitas jalan, tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara sebesar 17,3 km/unit kendaraan, Gorontalo 0,587 km/unit kendaraan. Dan Papua sebesar 0,284 km/unit kendaraan. Sementara untuk kapasitas jalan terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,0004 km/unit kendaraan, Bali sebesar 0,0141 km/unit kendaraan, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,0190 km/unit kendaraan.

Pada tahun 2006 dan 2007, perkembangan panjang jalan dengan kondisi rusak ringan meningkat sepanjang 860,9 km (2,5 persen), dan kondisi jalan rusak berat berkurang sepanjang 1.649,4 km (4,8 persen). Meningkatnya kondisi jalan rusak ringan pada periode 2006-2007 tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada tahun 2007, persentase jalan rusak berat sebagian besar berada di wilayah Maluku sebanyak 27,2 persen (392,9 km), Papua sebanyak 23,3 persen (536,5 km), dan Kalimantan sebanyak 12 persen (690,5 km). Berdasarkan perbandingan kondisi Jalan Provinsi, tiga provinsi yang memiliki kondisi jalan rusak berat tertinggi meliputi Provinsi Kalimantan Tengah (76 persen), Provinsi Gorontalo (59,9 persen), dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (56,7 persen).

- ***Kelistrikan***

Total energi terjual pada tahun 2007 sebesar 171.733,29 GWh. Jumlah penjualan listrik terbesar adalah di Pulau Jawa Bali yaitu sebesar 140.117,20 GWh dengan penjualan terbesar adalah di wilayah Jawa Barat (termasuk banten), DKI Jakarta sebesar 27.777,10 GWh, dan terendah di Provinsi Bali sebesar 2.366,GWh. Selanjutnya di Pulau Sumatera yaitu sebesar 19.988,40 GWh dengan penjualan terbesar adalah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5.139,40 GWh, Sumatera Selatan (termasuk Jambi dan Bengkulu) sebesar 2.763 GWh, dan penjualan terendah adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 318,10 GWh. Sedangkan untuk wilayah luar Pulau Jawa-Bali dan Sumatera, penjualan terbesar adalah di Provinsi Kalimantan Tengah (termasuk Kalimantan Selatan) sebesar 1.531,20 GWh, dan terendah Sulawesi Selatan sebesar 27,53 GWh.

Komposisi energi terjual menurut kelompok pelanggan, sebagian besar untuk kelompok pelanggan di sektor rumah tangga yaitu sebesar 71.203 GWh (40 persen), berikutnya pelanggan untuk sektor industri sebesar 69.719 GWh (39 persen), sektor bisnis sebesar 25.940 GWh (15 persen). Perbandingan kelompok pelanggan energi listrik menurut pulau besar. Di Pulau Sumatera sebagian besar pelanggan energi listrik adalah di sektor Rumah Tangga sebesar 56,20 persen selanjutnya diikuti oleh pelanggan di sektor bisnis sebesar 17,45 persen, sektor industri sebesar 14,81 persen, dan terendah pelanggan di sektor soaial sebesar 4,68 persen. Di Pulau Jawa-Bali sebagian besar pelanggan energi listrik di sektor Industri sebesar 45,70 persen, selanjutnya diikuti oleh sektor rumah tangga sebesar 35,93 persen, sektor bisnis sebesar 13,38 persen, dan terendah pelanggan di sektor sosial sebesar 2,12 persen. Perbandingan pelanggan energi listri di luar Pulau Jawa-Bali dan Sumatera, sebagian besar di sektor rumah tangga sebesar 57,34 persen, sektor bisnis sebesar 20,70 persen, sektor publik 11,93 persen dan terendah di sektor sosial sebesar 2,99 persen.

1.5. Prioritas Pengembangan Ekonomi Daerah

1.5.1. Wilayah Sumatera

Daya saing Sumatera ditentukan oleh sektor unggulan yang ada di wilayah Sumatera. Dari sembilan sektor dalam struktur perekonomian daerah, wilayah Sumatera memiliki sektor unggulan yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa. Sektor-sektor unggulan di tersebut sangat penting dan memerlukan perhatian yang khusus dalam perencanaan sehingga dapat memperkuat perekonomian di masing-masing provinsi dan wilayah.

Secara lebih rinci beberapa sektor yang menjadi sektor unggulan di setiap provinsi di wilayah Sumatera yaitu :

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sektor unggulan pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa.
- Provinsi Sumatera Utara memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa keuangan; serta sektor jasa.
- Provinsi Sumatera Barat memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa keuangan; serta sektor jasa.
- Provinsi Riau memiliki sektor unggulan ada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan.
- Provinsi Bengkulu memiliki keunggulan pada sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa keuangan; serta sektor jasa-jasa.
- Provinsi Jambi memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, Keuangan, persewaan, dan jasa keuangan dan sektor jasa.
- Provinsi Sumatera Selatan memiliki keunggulan pada sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan.
- Provinsi Lampung memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pegangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan; serta sektor jasa.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian; sektor industri dan pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; dan sektor perdagangan; hotel dan restoran.
- Provinsi Kepulauan Riau memiliki sektor unggulan pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa keuangan.

Sektor kunci di wilayah Sumatera juga memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Sektor kunci ini ditentukan berdasarkan bahwa sektor tersebut memiliki daya dorong yang lebih kuat dan sektor tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain. Sektor kunci di wilayah Sumatera adalah industri makanan

dan minuman, industri kelapa sawit, industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi dan industri pulp dan kertas.

Selanjutnya, wilayah Sumatera perlu dikembangkan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian, baik dilihat dari perspektif provinsi maupun pulau, yaitu :

- Industri makanan dan minuman di hampir seluruh Provinsi di Sumatera;
- Sektor bangunan di hampir seluruh Provinsi di Sumatera;
- Industri kelapa sawit di hampir seluruh Provinsi di Sumatera;
- Industri barang kayu, rotan dan bamboo di Provinsi Riau, Jambi, Babel, Bengkulu dan Lampung;
- Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Bangka Belitung; dan
- Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau.

Sementara itu, sektor perekonomian di wilayah Sumatera yang memiliki nilai penganda pendapatan terbesar di tiap provinsi yaitu:

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Industri makanan minuman; Angkutan Udara; Industri pengolahan hasil laut; Industri karet dan barang dari karet; Industri kelapa sawit; Industri tekstil dan produk tekstil; Listrik, gas dan air bersih; Angkutan darat; Angkutan Air; Hotel dan Restoran; Industri barang kayu, rotan dan bambu; Bangunan; Industri lainnya; dan Industri pulp dan kertas.
- Provinsi Sumatera Utara yaitu Angkutan Udara; Industri makanan minuman; Industri lainnya; Industri kelapa sawit; Industri pengolahan hasil laut; Angkutan Air; Industri karet dan barang dari karet; Hotel dan Restoran; Peternakan dan hasil-hasilnya; Industri barang dari logam; Angkutan darat; Industri barang kayu, rotan dan bambu; Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi.
- Provinsi Sumatera Barat yaitu Angkutan Udara, Industri barang dari logam, Angkutan Air, Industri makanan minuman, Industri pulp dan kertas, Listrik, gas dan air bersih, Industri semen, Hotel dan Restoran, Industri lainnya, Industri karet dan barang dari karet, Industri pengolahan hasil laut, dan Industri tekstil dan produk tekstil.
- Provinsi Riau yaitu Industri lainnya, Industri karet dan barang dari karet, Industri kelapa sawit, Industri pengolahan hasil laut, Industri mesin listrik dan peralatan listrik, Industri tekstil dan produk tekstil, Angkutan Udara, Industri pulp dan kertas, Angkutan Air, Hotel dan Restoran, Industri makanan minuman, Industri barang kayu, rotan dan bambu, dan Industri petrokimia.
- Provinsi Jambi yaitu Industri makanan minuman, Industri lainnya, Industri pengolahan hasil laut, Angkutan Udara, Industri tekstil dan produk tekstil, Angkutan Air, Industri kelapa sawit, Angkutan darat, Industri barang kayu, rotan dan bambu, Industri karet dan barang dari karet, Bangunan, Industri petrokimia, dan Hotel dan Restoran.
- Provinsi Sumatera Selatan yaitu Industri kelapa sawit, Industri pengolahan hasil laut, Industri lainnya, Angkutan Udara, Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, Industri karet dan barang dari karet, Industri makanan minuman, Industri semen, Angkutan Air, Industri tekstil dan produk tekstil, Industri barang dari logam, Hotel dan Restoran, Industri barang kayu, dan rotan dan bambu.
- Provinsi Bangka Belitung yaitu Industri makanan minuman, Industri pengolahan hasil laut, Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, Angkutan Udara, Industri kelapa sawit, Listrik, gas dan air bersih, Angkutan Air, Industri barang dari

logam, Industri alat angkutan dan perbaikiannya, Industri petrokimia, Industri barang kayu, rotan dan bambu, Hotel dan Restoran, dan Bangunan.

- Provinsi Bengkulu yaitu Industri pengolahan hasil laut, Angkutan Udara, Listrik, gas dan air bersih, Industri lainnya, Industri kelapa sawit, Industri makanan minuman, Industri barang kayu, rotan dan bambu, Industri tekstil dan produk tekstil, Peternakan dan hasil-hasilnya, Angkutan Air, Angkutan darat, Industri pulp dan kertas, Industri karet dan barang dari karet.
- Provinsi Lampung yaitu Angkutan Udara, Industri kelapa sawit, Industri makanan minuman, Industri pengolahan hasil laut, Angkutan Air, Listrik, gas dan air bersih, Industri pulp dan kertas, Industri barang kayu, rotan dan bambu, Industri lainnya, Hotel dan Restoran, Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, Industri karet dan barang dari karet, dan Industri tekstil dan produk tekstil.

1.5.2. Wilayah Jawa-Bali

Daya saing Jawa Bali ditentukan oleh sektor unggulan yang ada di wilayah Jawa Bali. Secara umum, sektor pertanian masih menjadi basis bagi provinsi-provinsi di kawasan Jawa-Bali yang diikuti dengan keunggulan sektoral di masing-masing provinsi. Secara lebih rinci beberapa sektor yang menjadi sektor unggulan di setiap provinsi di wilayah Jawa Bali yaitu :

- Provinsi DKI Jakarta memiliki sektor unggulan pada sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa.
- Provinsi Jawa Barat memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; serta sektor listrik gas dan air.
- Provinsi Jawa Tengah memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian; industri pengolahan dan sektor jasa.
- Provinsi D.I Yogyakarta memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian; sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.
- Provinsi Jawa Timur memilki sektor unggulan pada sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- Provinsi Bali memiliki keunggulan pada sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa.
- Provinsi Banten memiliki sektor unggulan pada sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Disamping sektor unggulan, sektor kunci di wilayah Jawa Bali juga memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Sektor kunci untuk masing-masing provinsi antara lain yaitu:

- Provinsi DKI Jakarta: sektor utama meliputi industri pengolahan (industri barang dari logam, industri alat angkutan dan perbaikannya, dan industri lainnya), sektor bangunan, dan sektor angkutan darat;
- Provinsi Banten: sektor utama meliputi sektor industri pengolahan (industri tekstil dan produk tekstil, industri pulp dan kertas, industri mesin listrik dan peralatan listrik, industri makanan minuman) dan sektor angkutan (angkutan udara dan angkutan darat);

- Provinsi Jawa Tengah: sektor utama meliputi sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor angkutan (angkutan darat);
- Provinsi DIY: sektor utama meliputi sektor pertanian (peternakan dan hasil-hasilnya), sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, dan Industri pengolahan;
- Provinsi Jawa Timur: sektor utama meliputi sektor listrik, gas dan air bersih, Indutri pengolahan (industri pulp dan kertas, industri makanan minuman, industri dasar besi, baja dan liogam dasar bukan besi, industri barang kayu, rotan dan bambu), sektor hotel dan restoran, dan sektor bangunan;
- Provinsi Bali: sektor Pertanian (peternakan), Perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan (tekstil dan produk tekstil, makanan minuman, baarang kayu, rotan dan bambu), dan sektor angkutan (angkutan udara).

Sedangkan berdasarkan nilai pengganda untuk masing-masing sektor, maka sektor perekonomian yang memiliki nilai multiplier pendapatan terbesar adalah sebagai berikut:

- DKI Jakarta : industri pengolahan hasil laut, angkutan udara, industri lainnya, industri barang kayu, rotan dan bambu, industri kelapa sawit, Industri tekstil dan produk tekstil, angkutan air, bangunan, industri makanan dan minuman, industri barang dari logam, dan listrik, gas dan air bersih.
- Jawa Barat: industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, angkutan udara, industri pengolahan hasil laut, industri barang dari logam, industri barang kayu, rotan dan bambu, industri mesin listrik dan peralatan listrik, angkutan Air, industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan minuman, industri kelapa sawit, industri pulp dan kertas, industri semen, industri karet dan barang dari karet, industri alat angkutan dan perbaikannya, peternakan dan hasil-hasilnya, dan industri alas kaki.
- Banten: angkutan udara, industri pengolahan hasil laut, industri lainnya, angkutan air, industri makanan dan minuman, industri pulp dan kertas, industri barang kayu, rotan dan bambu, industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, Industri mesin listrik dan peralatan listrik, listrik, gas dan air bersih, industri tekstil dan produk tekstil, dan industri alat angkutan dan perbaikannya.
- Jawa Tengah: industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, angkutan udara, industri pengolahan hasil laut, listrik, gas dan air bersih, industri makanan dan minuman, industri pulp dan kertas, angkutan air, industri karet dan barang dari karet, industri barang kayu, rotan dan bambu, industri tekstil dan produk tekstil, industri mesin listrik dan peralatan listrik, industri alas kaki, dan industri barang dari logam.
- DIY: industri lainnya, angkutan udara, peternakan dan hasil-hasilnya, angkutan darat, kehutanan, industri barang dari logam, hotel dan restoran, tanaman perkebunan, industri makanan dan minuman, komunikasi, industri pengolahan hasil laut, industri tekstil dan produk tekstil, industri alat angkutan dan perbaikannya, dan industri mesin listrik dan peralatan listrik.
- Jawa Timur: industri pengolahan hasil laut, industri makanan dan minuman, industri kelapa sawit, industri barang kayu, rotan dan bambu, hotel dan restoran, industri barang dari logam, angkutan udara, industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, industri tekstil dan produk tekstil, industri lainnya, listrik, gas dan air bersih, industri pulp dan kertas, dan bangunan.

- Bali: industri pengolahan hasil laut, angkutan udara, industri makanan dan minuman, angkutan air, industri pulp dan kertas, industri tekstil dan produk tekstil, industri barang kayu, rotan dan bambu, listrik, gas dan air bersih, hotel dan restoran, angkutan darat, bangunan, industri kelapa sawit, industri lainnya, peternakan dan hasil-hasilnya, dan industri alas kaki.

1.5.3. Wilayah Kalimantan

Sektor basis yang menjadi unggulan di wilayah Kalimantan relatif sama dengan sektor basis yang menjadi unggulan di tiap provinsi di wilayah Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan memiliki sektor basis yang sama yaitu: sektor pertanian; listrik gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa. Sedangkan untuk sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan.

Namun jika dibandingkan terhadap perekonomian nasional, masing-masing provinsi memiliki keunggulan komparatif sektor ekonomi yang berbeda, yaitu:

- Kalimantan Barat memiliki keunggulan pada sektor pertanian; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa.
- Kalimantan Tengah memiliki keunggulan pada sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa
- Kalimantan Selatan memiliki keunggulan pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan jasa;
- Kalimantan Timur memiliki keunggulan pada sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan.

Sementara itu, sektor-sektor yang memberikan penciptaan dampak pendapatan adalah sebagai berikut:

- Kalimantan Barat: Industri tekstil dan produk tekstil, Industri lainnya, Angkutan Air, Angkutan Udara, Industri pulp dan kertas, Angkutan darat, Industri petrokimia, Tanaman perkebunan, dan Perdagangan.
- Kalimantan Tengah:Angkutan Udara, Industri tekstil dan produk tekstil, Industri lainnya, Industri *pulp* dan kertas, Listrik, gas dan air bersih, Angkutan Air, Industri alat angkutan dan perbaikiannya, Angkutan darat, Bangunan, Industri karet dan barang dari karet, Jasa-jasa lainnya, Tanaman perkebunan, dan Perdagangan.
- Kalimantan Selatan: Angkutan Udara, Angkutan Air, Industri alat angkutan dan perbaikiannya, Industri *pulp* dan kertas, Industri lainnya, Listrik, gas dan air bersih, Angkutan darat, Perdagangan, Industri makanan minuman, dan Bangunan.
- Kalimantan Timur: Industri alat angkutan dan perbaikiannya, Industri makanan minuman, Hotel dan Restoran, Industri tekstil dan produk tekstil, Angkutan Air, Angkutan Udara, dan Peternakan dan hasil-hasilnya.

1.5.4. Wilayah Sulawesi

Daya saing Sulawesi ditentukan oleh sektor unggulan yang ada di wilayah Sulawesi. Dari sembilan sektor dalam struktur perekonomian daerah, secara umum wilayah Sulawesi memiliki sektor unggulan yaitu sektor jasa, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel

dan restoran. Secara lebih rinci beberapa sektor yang menjadi sektor unggulan di setiap provinsi di wilayah Sulawesi yaitu antara lain :

- Provinsi Sulawesi Utara memiliki sektor unggulan pada sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa.
- Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keunggulan di sektor pertanian dan sektor jasa.
- Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif pada sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
- Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- Provinsi Sulawesi Barat memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian dan sektor jasa.
- Provinsi Gorontalo memiliki keunggulan pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan , persewaan dan jasa; serta sektor jasa.

Sedangkan sektor kunci yaitu sektor ekonomi dengan keterkaitan kebelakang langsung dan tidak langsung cukup kuat adalah sebagai berikut:

- Sulawesi Utara: Angkutan Udara, Industri barang kayu, rotan dan bambu, Industri makanan minuman, Industri kelapa sawit, Industri lainnya, Bangunan, Kehutanan.
- Sulawesi Tengah : Bangunan, Angkutan Udara,
- Sulawesi Selatan : Angkutan Air, Industri makanan minuman, Industri barang kayu, rotan dan bambu, Industri tekstil dan produk tekstil, Industri karet dan barang dari karet, Perikanan, Industri kelapa sawit
- Gorontalo : Industri lainnya, Komunikasi, Angkutan Udara, Industri pulp dan kertas, Industri lainnya.
- Sulawesi Tenggara : Bangunan, Perdagangan, Industri makanan minuman, Industri pulp dan kertas, Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, Industri tekstil dan produk tekstil.

Sedangkan ativitas ekonomi yang memberikan output terbesar terhadap penggandaan pendapatan adalah sektor industri makanan dan minumaran, sektor bangunan, sektor industri kelapa sawit, sektor perdagangan, sektor angkutan udara, dan sektor industri dasar besi baja.

1.5.5. Wilayah Nusa Tenggara

Sektor ekonomi unggulan di Wilayah Nusa Tenggara dengan menggunakan angka Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) riil masing-masing sektor (lapangan usaha) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur selama periode 2000-2005 menunjukkan empat sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan serta Pengangkutan & Komunikasi. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lima sektor unggulan yaitu sektor Jasa-jasa, sektor Pertanian, sektor Listrik, Gas & Air Bersih, sektor Bangunan serta sektor Perdagangan, Hotel & Restoran.

Sektor kunci atau sektor yang memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di masing-masing provinsi di Pulau Nusa Tenggara, antara lain adalah: (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat sektor utama diantaranya meliputi sektor perdagangan, listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan (makanan-minuman, industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, dan industri barang kayu, rotan dan bambu), dan (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur sektor utama antara lain meliputi sektor pertanian, (perkebunan dan peternakan), sektor Perdagangan, sektor jasa, sektor bangunan, dan angkutan darat. Apabila dilihat dari Pulau Nusa Tenggara secara umum, maka sektor kunci di Pulau Nusa Tenggara adalah sektor industri makanan dan minuman, disebabkan karena sektor tersebut menjadi sektor kunci di kedua wilayah tersebut. Dengan demikian, di Pulau Nusa Tenggara perlu dikembangkan pembangunan sektor industri makanan dan minuman sebagai sektor kunci.

Berdasarkan nilai multiplier masing-masing sektor, sektor perekonomian yang memiliki nilai multiplier pendapatan terbesar di Nusa Tenggara Barat adalah sektor Hotel dan Restoran, Perdagangan, Industri pengolahan hasil laut, Angkutan Udara, Listrik, gas dan air bersih, Industri lainnya, Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi, Angkutan Air, Industri kelapa sawit, Industri karet dan barang dari karet, dan Industri makanan minuman. Sementara, sektor perekonomian yang memiliki nilai multiplier pendapatan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Industri pengolahan hasil laut, Industri makanan minuman, Angkutan Air, Industri pulp dan kertas, Angkutan Udara, Hotel dan Restoran, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan, Industri barang kayu, rotan dan bambu, dan Angkutan darat.

1.5.6. Wilayah Maluku

Sektor unggulan berdasarkan data PDRB Riil untuk masing-masing sektor (lapangan usaha) di wilayah Maluku selama periode 2000-2005 menunjukkan bahwa sektor unggulan di Provinsi Maluku adalah sektor jasa-jasa, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas dan air bersih. Sementara untuk Provinsi Maluku Utara, sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan serta sektor pertanian.

Sementara itu, pembangunan sektor-sektor yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian, baik dilihat dari perspektif provinsi maupun pulau, yaitu: (i) industri makanan & minuman di setiap provinsi; (ii) industri barang kayu, rotan dan bambu; (iii) sektor bangunan di setiap provinsi; (iv) sektor angkutan udara di setiap provinsi; sektor angkutan air di setiap provinsi; (v) sektor peternakan dan hasil-hasilnya di Provinsi Maluku; dan (vi) sektor angkutan darat di Provinsi Maluku.

Berdasarkan nilai multiplier masing-masing sektor, sektor perekonomian yang memiliki nilai multiplier pendapatan terbesar di Provinsi Maluku adalah sektor peternakan dan hasil-hasilnya, Industri pengolahan hasil laut, Angkutan Udara, Listrik, gas dan air bersih, Industri makanan minuman, Industri barang ayu, rotan dan bambu, Hotel dan Restoran, Industri kelapa sawit, Bangunan, Industri lainnya, Industri alat angkutan dan perbaikiannya, Industri pulp dan kertas, dan Angkutan Air. Sedangkan di Provinsi Maluku Utara, sektor yang memiliki multiplier tertinggi adalah sektor industri pengolahan hasil laut, Angkutan Udara, Listrik, gas dan air bersih, Industri makanan minuman, Angkutan Air, Hotel dan Restoran, Bangunan, Angkutan darat, dan Industri barang kayu, rotan dan bambu.

1.5.7. Wilayah Papua

Secara umum di wilayah Papua, Provinsi Papua Barat memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dibanding provinsi Papua di pulau tersebut. Hal ini diindikasikan bahwa hampir seluruh sektor di Papua Barat dapat menjadi sektor basis bagi pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun pulau. Selama kurun waktu 2000-2005, perekonomian sektoral di Provinsi Papua Barat menunjukkan kinerja keunggulan komoditas yang dapat dipertahankan secara konsisten. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut dapat menjadi sektor basis atau unggulan bagi pengembangan sektor lainnya. Sektor basis utama di provinsi ini adalah industri pengolahan, sektor listrik gas dan air dan sektor pertanian. Kontradiksi dengan Provinsi papua Barat yang memiliki keunggulan relatif dihampir seluruh sektor kecuali pertambangan, Provinsi Papua hanya memiliki sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan. Akan tetapi, sektor jasa menunjukkan kecenderungan yang meningkat sehingga merupakan sektor yang potensial untuk ditingkatkan dimasa depan sejalan dengan peningkatan kebutuhan pelayanan jasa yang mendukung kegiatan disektor pertambangan.

Pulau Papua memiliki 4 sektor kunci, terutama sektor peternakan dan hasilnya serta pengilangan minyak bumi. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB provinsi Papua. Subsektor peternakan dari sektor pertanian memiliki kecenderungan yang terus meningkat outputnya tehadap perekonomian lokal, yang pada gilirannya menentukan perkembangan industri makanan. Lebih lanjut, industri makanan dan minuman termasuk kedalam salah satu sektor kunci yang didukung oleh perkembangan sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan dan perkebunan.

Sektor pengilangan sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian menentukan sektor ini sebagai salah satu sektor kunci. Industri kayu, rotan dan bambu juga termasuk sebagai sektor kunci mengingat subsektor kehutanan juga merupakan sektor yang paling penting berkontribsi dalam sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keterkaitan yang besar antara sektor kehutanan dengan industri barang kayu. Oleh karena itu, industri utama yang penting untuk dikembangkan di Pulau Papua adalah industri peternakan, industri makanan dan barang kayu dan rotan.

Nilai pengganda output menurut sektor ekonomi, sektor perekonomian yang memiliki angka multiplier pendapatan terbesar di wilayah Papua adalah industri pengolahan hasil laut, angkutan udara, angkutan air, industri barang kayu, rotan dan bambu, industri makanan minuman, industri kelapa sawit, Industri lainnya, dan Bangunan.

Peta Distribusi Indikator Makro Pulau Tahun 2007

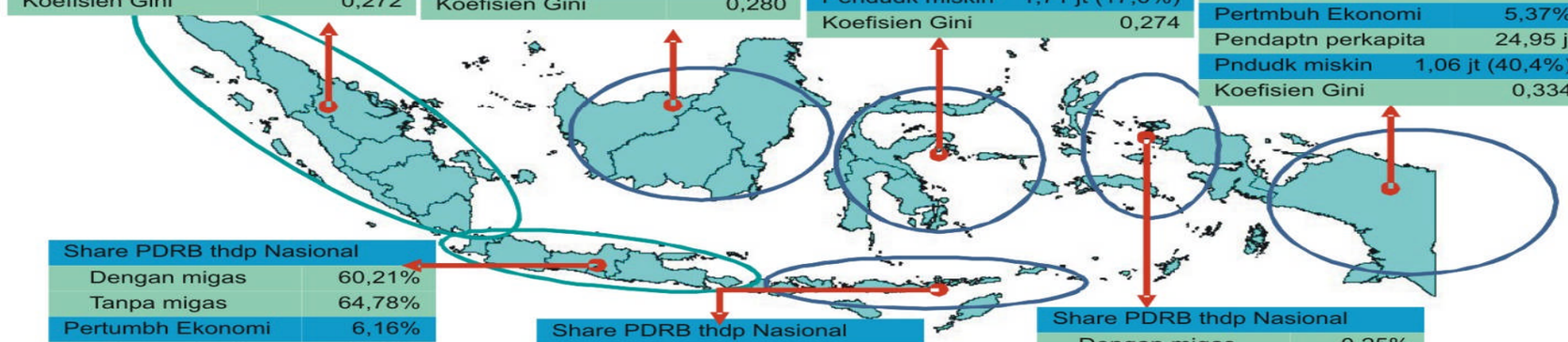

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	23,02%
Tanpa migas	20,44%
Pertumb. Ekonomi	4,9%
Pendaptn perkapita	16,65 jt
Penduduk miskin	2,0 jt (16,5%)
Koefisien Gini	0,272

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	9,13%
Tanpa migas	6,40%
Pertumb. Ekonomi	3,14%
Pendaptn perkapita	24,58 jt
Pendudk miskin	1,35 jt (10,4%)
Koefisien Gini	0,280

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	4,06%
Tanpa migas	4,49%
Pertmbh Ekonomi	6,88%
Pendapt perkapita	8,72 jt
Pendudk miskin	1,71 jt (17,0%)
Koefisien Gini	0,274

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	1,17%
Tanpa migas	1,25%
Pertmbuh Ekonomi	5,37%
Pendaptn perkapita	24,95 jt
Pndudk miskin	1,06 jt (40,4%)
Koefisien Gini	0,334

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	60,21%
Tanpa migas	64,78%
Pertumbh Ekonomi	6,16%
Pendapt perkapita	15,86 jt
Pendudk miskin	2,17 jt (16,0%)
Koefisien Gini	0,334

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	1,56%
Tanpa migas	1,62%
Pertmbuh Ekonomi	4,55%
Pendapt perkapita	5,88 jt
Pendudk miskin	0,23 jt (26,2%)
Koefisien Gini	0,289

Share PDRB thdp Nasional	
Dengan migas	0,25%
Tanpa migas	0,28%
Pertumbh Ekonomi	5,75%
Pendaptn perkapita	4,50 jt
Pendudk miskin	0,52 jt (23,2%)
Koefisien Gini	0,300

Peta Prioritas Pengembangan Ekonomi Daerah

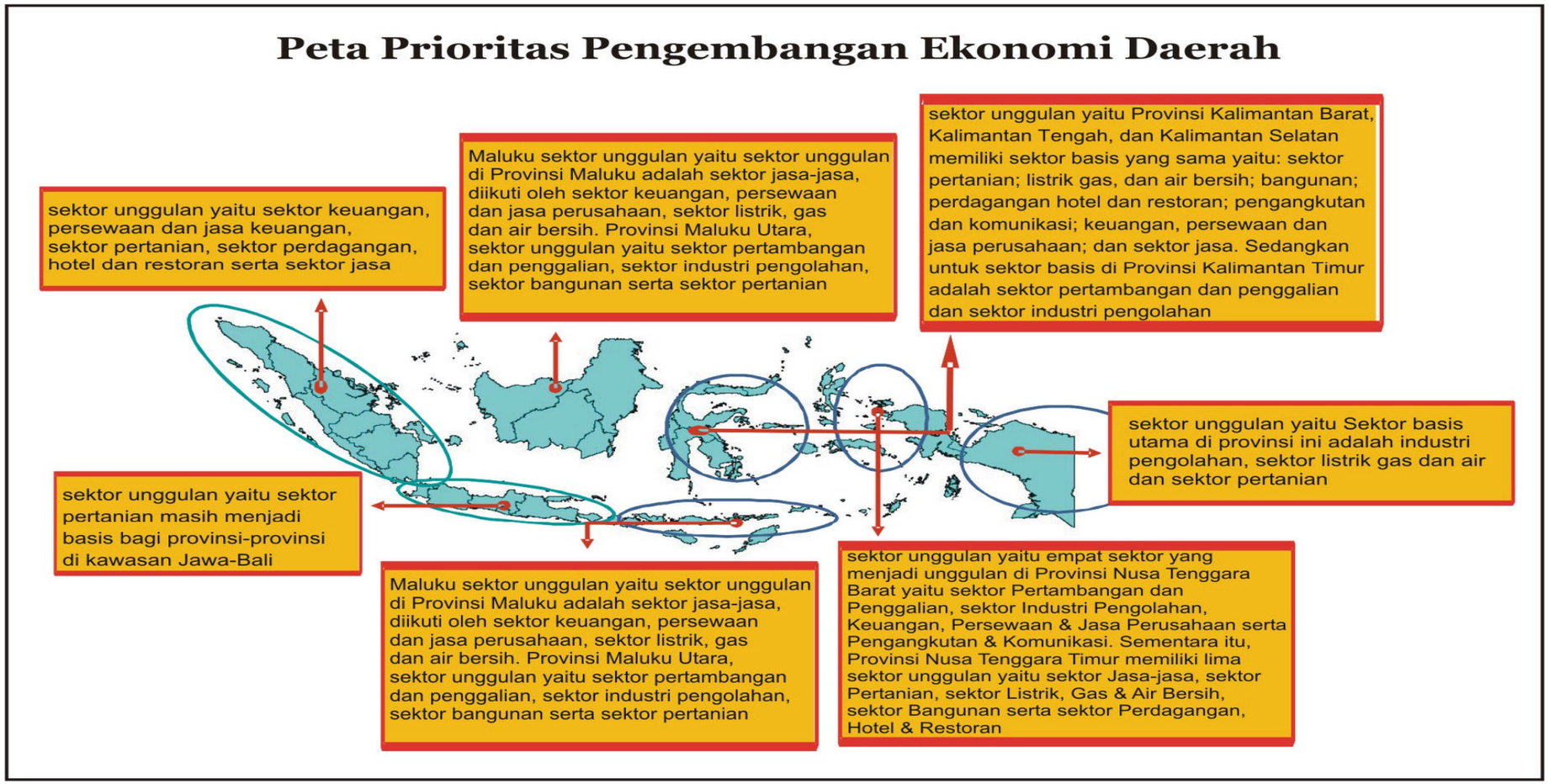

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA TAHUN 2010

BAB 2
PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

2.1 Kondisi Saat Ini

Pengembangan wilayah pulau Sumatera, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Pulau Sumatera memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah pusat perekonomian dunia. Wilayah Pulau Sumatera berada pada posisi strategis nasional karena dari arah tenggara sampai timur pulau ini dilintasi oleh ALKI yang memanjang mulai dari Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Alur laut ini terbuka bagi pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya. Sementara Pulau Sumatera bagian timur dan utara juga terbuka bagi pelayaran menuju kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Eropa. Dengan demikian, Wilayah Pulau Sumatera berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Selain itu, wilayah Pulau Sumatera memiliki akses perdagangan paling strategis dibanding pulau besar lain di Indonesia dengan sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Wilayah Pulau Sumatera juga memiliki letak geografis dan hubungan interaksi paling dekat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Berbagai prasarana dan sarana, peluang usaha dan ketersediaan sumberdaya manusia di wilayah Sumatera tersedia secara cukup memadai. Wilayah Pulau Sumatera diharapkan menjadi wilayah penopang utama dalam menghadapi persaingan global terutama dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengembangan wilayah Pulau Sumatera akan menghadapi berbagai isu strategis: (1) peningkatan jumlah penduduk perkotaan, (2) menurunnya daya dukung sumber daya alam dan rusaknya lingkungan ekosistem sebagai akibat ekploitasi yang berlebihan, (3) konversi lahan yang tidak terkendali tanpa mengikuti rencana tata ruang, (4) meningkatnya klas menengah yang disertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak-hak dasar, (5) pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal.

Tantangan yang akan dihadapi wilayah Sumatera adalah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi pada tataran global dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan lokal. Tantangan ini tidak hanya menyangkut perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi informasi, tetapi juga perubahan cara pandang, nilai dan gaya hidup. Tantangan hanya dapat diatasi dengan terus meningkatkan mutu sumberdaya manusia, mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain melalui perbaikan jangkauan dan kualitas layanan publik, penguatan ketahanan budaya, peningkatan kemandirian, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan daya saing.

Upaya menjawab berbagai tantangan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya dalam peningkatan kualitas, proses dan kinerja politik dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat; pemantapan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi rakyat; penegakan hukum secara adil dan tanpa diskmrinasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat dalam memberikan layanan kepada rakyat. Tantangan yang tidak kalah

pentingnya adalah peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di pelosok daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan; pengembangan wilayah dan penataan ruang secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, zonasi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Rekayasa, pengembangan dan penyebaran teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman juga menjadi tantangan wilayah Sumatera. Oleh sebab itu, pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing wilayah Sumatera menjadi kian penting dan mendesak.

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Di bidang kependudukan, Pulau Sumatera menempati urutan kedua berpenduduk terbanyak setelah Jawa-Bali yaitu sekitar 48,6 juta jiwa atau 21 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dengan kepadatan sebesar 101 juta jiwa per km2. Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Lampung (193 jiwa per Km2) dan Sumatera Utara (177 jiwa per Km2). Jika dilihat TFR per provinsi, di Pulau Sumatera terdapat 3 provinsi yang TFR-nya sudah lebih rendah dibandingkan nasional, yaitu Provinsi Bengkulu (2,4) dan Lampung serta Bangka Belitung masing-masing 2,6. Tiga provinsi lainnya mempunyai TFR sedikit lebih tinggi dari TFR nasional, yaitu Provinsi Riau dan Sumatera Selatan masing-masing 2,7 dan Provinsi Jambi sebesar 2,8. Sedangkan empat provinsi lainnya mempunyai TFR lebih besar dari 3, yaitu NAD 3,1; Sumatera Utara 3,8; Sumatera Barat 3,4; dan Kepulauan Riau 3,1 (SDKI 2007).

Tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di Sumatera. Jumlah penduduk miskin di perdesaan kurun dalam weaktu 2002-2008 menurun setiap tahunnya, sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan terus meningkat. Jumlah penduduk miskin tahun 2000 sebanyak 7.148 ribu jiwa (5.082 ribu jiwa di perdesaan dan 2.065 ribu jiwa di perkotaan), pada tahun 2008 sebanyak 7.294 ribu jiwa. NAD, Bengkulu, Nias, Sumatera Selatan, dan ujung selatan pulau Sumatera, merupakan daerah-daerah yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan paling parah. Sementara Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung tingkat kedalaman kemiskinannya relatif lebih baik. Persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (23,53 persen), Lampung (20,98 persen) persen, dan Bengkulu (20,64 persen). Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan adanya ketimpangan pendapatan antarwilayah baik dalam Provinsi maupun antarwilayah (antarprovinsi) yaitu terkait dengan adanya disparitas tingat pendapatan antar golongan di wilayah Sumatera.

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendidikan tingkat partisipasi sekolah menengah yang rendah yaitu rata-rata 350 siswa per sekolah, rata-rata lama sekolah (RLS) di Sumatera rata-rata 7,08 tahun, dengan RLS tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yaitu 8 tahun dan terendah di Provinsi Lampung yaitu 6,4 tahun. Selain itu, permasalahan lainnya adalah infrastruktur ruang kelas yang kurang untuk tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA) dan rendahnya aksesibilitas terhadap sekolah (terutama di tingkat pendidikan menengah), dan tingginya biaya pendidikan. Meskipun demikian, Angka Melek Huruf (AMH) tahun 1999-2006 meningkat rata-rata 0,69 persen, AMH tertinggi di Provinsi Sumatera Utara (95,8 persen) dan terendah Provinsi Lampung (91,8 persen).

Dalam hal pelayanan kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 1999-2006 meningkat 1,35 tahun per tahun, AHH tertinggi di Provinsi Riau (70,8 persen) dan terendah di NAD dan Bangka Belitung (68,3 persen) Namun, masih terdapat permasalahan utama dalam bidang pendidikan di wilayah Sumatera, khususnya menyangkut rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya di Lampung dan Jambi Selain itu, permasalahan kesehatan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan gizi terutama Ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin.

Di bidang kependudukan, Pulau Sumatera menempati urutan kedua setelah Jawa-Bali untuk jumlah penduduk yaitu 49.246 ribu jiwa. Hal ini berdampak pada tingginya kepadatan penduduk terutama di Provinsi Lampung dan Sumatera Utara. Kondisi ini juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja tahun 2008 mencapai 22.433.030 jiwa, perkembangan selama kurun waktu 2004-2008 meningkat sebesar 1,92 persen per tahun atau bertambah 403.492 jiwa setiap tahunnya.

Terkait dengan jumlah angkatan kerja yang ada, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 20.572.669 jiwa dengan peningkatan sebesar 2,4 persen per tahun, tertinggi di Sumatera Utara. Di lain sisi, kondisi jumlah pengangguran terbuka tahun 2008 sebanyak 1.860.361 jiwa atau menurun sebesar 10,46 persen dari tahun 2004, tertinggi di Sumatera Utara. Perkembangan pengangguran terbuka rata-rata menurun sebesar 7,24 persen per tahun atau bertambah 54.320 jiwa per tahuan. Jumlah pengangguran terbesar di Sumatera Utara. Jumlah pengangguran tersebut terkonsentrasi daerah pusat pertumbuhan (perkotaan), hal ini akan berdampak terhadap munculnya masalah sosial yang terkait dengan kriminalitas dan kerawanan sosial di perkotaan.

Di bidang kebudayaan, Pulau Sumatera memiliki 1.500 Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs, 3 Taman Nasional yang tercatat sebagai warisan dunia (Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Kerinci Seblat), 3 Kawasan yang dinominasikan sebagai warisan dunia (Kawasan Permukiman Tradisional Nias Selatan, Kawasan Komplek Percandian Muara Takus, dan Kawasan Komplek Percandian Muaro Jambi), serta berbagai kekayaan dan keragaman seni budaya tradisional yang berakar pada budaya melayu. Namum masih terdapat permasalahan pembangunan kebudayaan karena dinamisnya kehidupan masyarakat yang dissertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu belum optimalnya kualitas pengelolaam seni dan budaya yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas fiskal, kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah. Selain itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya dalam negeri masih rendah, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan informasi. Dilain pihak, semakin maraknya kasus pencurian berbagai benda sejarah (purbakala) untuk berbagai kepentingan harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh *stakeholders* terkait.

Terkait dengan pemuda, Sumatera merupakan pulau terpadat pemudanya kedua setelah pulau Jawa. Berdasarkan data Susenas 2006, pemuda yang tinggal di pulau Sumatera sebanyak 17,77 juta atau 22 persen dari total pemuda. Pada satu sisi banyaknyajumlah pemuda di Pulau Sumatera dapat dioptimalkan sebagai tenaga penggerak pembangunan, tapi pada sisi lain banyaknya jumlah pemuda dapat menyebabkan kepadatan pemuda di pulau tersebut yang memicu pengangguran pemuda dan kerawanan sosial. Hal ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka pemuda dan kerawanan sosial. Hal ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka pemuda di Pulau Sumatera masih tinggi, yaitu di atas 10

persen. Sementara tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda yang terbesar berada pada posisitingkat sekolah dasar, bahkan di beberapa propinsi masih banyak pemuda yang tidak punya ijazah.

Di bidang olahraga, Pulau Sumatera sudah menunjukkan prestasi olahraga yang membanggakan meskipun masih belum dapat mengungguli prestasi olahraga Pulau Jawa Bali. Selain itu, pulau Sumatera juga memiliki potensi di beberapa cabang olahraga unggulan, seperti atletik, angkat besi/angkat berat, renang, pencak silat, dayung dan tinju. Selain itu, Pulau Sumatera memiliki olahraga tradisional Sepak Takraw yang potensial dijadikan cabang olahraga internasional.

(2) Bidang Ekonomi

Kontribusi PDRB Sumatera terhadap Nasional dapat ditunjukkan dengan total PDRB wilayah Sumatera sebesar 20.91 persen dan PDRB Non Migas sebesar 18.56 persen terhadap total PDB Nasional. Kontribusi terbesar perekonomian Sumatera adalah dari sektor pertanian sebesar 28.2 persen, pertambangan sebesar 24.1 persen, serta industri pengolahan sebesar 25,6 persen sedangkan sektor kunci wilayah Sumatera pada industri makanan dan minuman, industri kelapa sawit, industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi dan industri pulp dan kertas. Sementara dari kontribusi provinsi, kontribusi terbesar PDRB Sumatera berasal dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau sebesar 25 persen, Sumatera Utara sebesar 22,40 persen, Sumatera Selatan sebesar 13,54 persen dan kontribusi terendah dari Provinsi Bengkulu sebesar 1,57 persen.

Wilayah Sumatera terjadi disparitas pendapatan antaprovinsi yang sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2001-2007 seluruh provinsi di wilayah Sumatera tumbuh positif, kecuali NAD dengan laju pertumbuhan negatif. Sedangkan pertumbuhan tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,7 persen. Ketimpangan Perkapita di wilayah Sumatera semakin tinggi yang disebabkan dengan besarnya perkapita di Kepri dan Riau, dan terendah di Lampung.

Di bidang produksi pertanian dalam kurun waktu 2002-2006 perkembangan luas panen padi menurun (padi sawah berkurang menjadi 21.55 persen dan padi ladang berkurang menjadi 12.06 persen). Meskipun demikian, produksi padi sawah meningkat sebesar 5.62 persen. Wilayah Sumatera merupakan basis pengembangan tanaman perkebunan, terutama Kelapa sawit dan Karet dan merupakan kedua terbesar di Indonesia. Isu strategis di bidang produksi pertanian dan perkebunan adalah dari luasan lahan kritis di wilayah Sumatera yang mencapai 54 persen dari total lahan, selama kurun waktu 2002-2007 terjadinya alih fungsi lahan sebesar 22,46 persen (Pertanian sebesar 31.49 persen dan lahan perkebunan sebesar 18.75 persen).

Produksi peternakan di wilayah Sumatera didominasi oleh produksi sapi perah, kambing, peterenakan unggas meliputi, ayam kampung, ayam kampung, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging. Di bidang perikanan, sentra produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) berada di Provinsi Sumatera Utara, sentra produksi perikanan budidaya terdapat di Lampung dan Sumatera Selatan. Isu strategis dari bidang produksi perikanan adalah sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional dan struktur armada perikanan didominasi oleh skala kecil. Sementara sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, *cold storge*, dan jenis alat tangkap, sangat terbatas.

Kinerja Perdagangan di wilayah Sumatera masih didominasi oleh provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Lampung. Pertumbuhan ekspor rata-rata pada tahun 2003-2008 adalah sebesar 6,92 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan impor sebesar 30,40 persen pertahun. Ekspor terbesar dikontribusikan oleh Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebesar 53,74 persen dan impor terbesar di Lampung sebesar 41,25 persen. Isu strategis yang muncul di bidang perdagangan adalah adanya hambatan perdagangan intra wilayah yang disebabkan oleh birokrasi yang kurang mendukung investasi dan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan masih lemahnya sistem kerjasama untuk pengembangan sektor/komoditi unggulan daerah serta terbatasnya infrastruktur transportasi darat baik kualitas maupun kuantitas untuk mendorong sistem distribusi barang dan meningkatkan perdagangan intra wilayah di pulau Sumatera.

Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di wilayah Sumatera adalah provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Sumatera Selatan. Sedangkan penerimaan PAD terendah adalah di Provinsi Bengkulu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal antarprovinsi yang disebebabkan adanya perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah. Provinsi NAD memiliki defisit terbesar dalam anggaran pembangunan, sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat memiliki surplus terbesar dalam anggaran pembangunan daerah. Isu yang tidak kalah penting dalam keuangan daerah yaitu terutama dalam efektivitas dan efisiensi anggaran daerah, belum optimalnya anggaran berbasis kinerja, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran di daerah.

Isu strategis bidang ekonomi antara lain terhambatnya investasi sebagai akibat ketidakpastian dalam memperoleh ijin usaha, rendahnya produktivitas pertanian, rusaknya infrastruktur pendukung, terbatasnya pasokan energi dan listrik, dan terlambatnya proses pencairan anggaran. Permasalahan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Masalah lain yang terjadi di daerah adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Isu strategis dalam pengembangan ekonomi daerah adalah (1) revitalisasi pertanian secara terpadu, sistematik, dan konsisten; (2) pengembangan sektor dan komoditas keunggulan; (3) diversifikasi kegiatan ekonomi; (3) optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM.

(3) Bidang Prasarana

Isu dan permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana di sebagian besar daerah menyangkut rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Sedangkan provinsi yang memiliki permasalahan tentang prasarana listrik, air minum, dan telekomunikasi. Untuk permasalahan yang menyangkut prasarana pengairan dan irigasi, diantaranya termasuk pengendalian masalah banjir dan daerah aliran sungai (DAS).

Sistem transportasi di Sumatera didukung dengan sistem transportasi darat, laut, udara, dan sungai. Kondisi jalan jalan nasional sebesar 78,52 persen beraspal dan 21,48 persen belum beraspal, jalan Provinsi sebesar 65 persen beraspal dan 35 persen belum beraspal, sedangkan jalan Kabupaten sebesar 46 persen beraspal dan 54 persen belum beraspal.

Terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah kepulauan dan pulau terluar di bagian barat wilayah Sumatera, serta masih adanya desa terisolir yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat menjadi isu utama. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur transportasi antarprovinsi dan tingginya tingkat kerusakan jalan di Jalur Lintas Sumatera.

Selain itu, sistem pelayanan transportasi laut dan udara untuk mendukung sistem transportasi antar pulau-pulau kecil, dan pulau terluar yang merupakan wilayah hinterland Sumatera masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan investasi dalam mendukung pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut, udara dan sungai.

Untuk penyediaan kebutuhan listrik di wilayah Sumatera tersedia 4 unit Pembangkit listrik utama dengan kapasitas 4.278 MW. Untuk penyediaan listrik, terbesar masih menggunakan Pembangkit listrik Tenaga Uap. Sementara itu, produksi energi listrik tahun 2005 sebesar 14.093 MW menurun dibandingkan produksi tahun 2003 (14.187 MW). Sedangkan di sisi lain, kebutuhan listrik di wilayah Sumatera masih cukup besar. Wilayah Sumatera memiliki cadangan sumber daya alam (seperti: Batu bara, migas) yang cukup besar untuk pembangkit energi listrik yang berlokasi di Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Riau, namun pada penerapannya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangkit energi listrik masih belum optimalnya.

Wilayah Sumatera memiliki potensi cadangan gas dan fasilitas untuk pengembangan migas, namun cadangan minyak dan gas bumi serta produksi minyak dan gas bumi terus mengalami penurunan. Di lain sisi pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di wilayah Sumatera masih sangat terbatas.

(4) Bidang SDA dan LH

Isu dan permasalahan yang paling penting dan perlu untuk segera ditangani di berbagai daerah adalah masalah kehutanan, baik itu menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, maupun kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti kegiatan penambangan, eksploitasi sumberdaya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai juga menyebabkan masalah.

Tingginya konversi lahan sawah juga berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi dari nilai kualitasnya, yaitu lahan sawah dengan kesuburan tinggi, di daerah yang dekat dengan konsentrasi penduduk akan kalah bersaing dengan keuntungan lokasinya. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah.

Masalah air di Indonesia ditandai dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali sehingga luas lahan kritis semakin bertambah.

Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya di wilayah Sumatera, diantaranya adalah Rencana Kawasan Lindung Nasional 88 Lokasi, Rencana Kawasan Andalan Darat 31 Lokasi serta Rencana Kawasan Andalan Laut 12 Lokasi. Namun, kondisi yang terjadi adalah semakin berkurangnya kawasan lindung dengan penggunaan lahan sebagai hutan akibat meluasnya kegiatan budidaya, khususnya pada lahan potensi untuk pengembangan perkebunan di Riau dan Sumatera Utara. Selain itu juga meningkatnya kebutuhan ruang untuk kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang berdampak pada konversi lahan di kawasan lindung dan kawasan produksi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perubahan penggunaan lahanPertanian (hutan, perkebunan dan sawah) ke non pertanian tahun 2002-2007sebesar 8.924.020 hektar (22,46 persen).

Di bidang sumberdaya mineral, Wilayah Sumatera memiliki potensi cadangan sumber energi sumberdaya energi batubara sebesar 104.820 juta ton, gas alam sebesar 93 TSCF, minyak bumi sebesar 5.669 MMS TB, serta panas bumi sebanyak 84 lokasi (13.419 MWe), dan sumber daya air sebesar 5.490 MW.

Luas lahan kritis di sumetera mencapai 25.898.972 hektar atau sekitar 33,29 persen dari luas lahan kritis di Indonesia. Luas lahan kritis terbesar di Provinsi Riau seluas 7.116.530 hektar dan terkecil Kep. Bangka Belitung seluas 672.214 hektar. Di sisi lain, terjadi alih fungsi hutan yang sangat cepat 2002-2007 mencapai 19.1 persen. Tingginya tingkat deforestasi diakibatkan ilegal loging, ladang berpindah, dan perambahan hutan, yaitu: mencapai 5.1 persen di tahun 2007 untuk seluruh kawasan (Jambi: 20.82 persen, Bengkulu: 46.5 persen, Riau: 15.03 persen). Kerusakan lahan hutan dan pertanian akibat kebakaran Hutan dan lahan setiap tahun mengakibatkan polusi yang tinggi hingga ke negara tetangga.

Isu di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah (1) belum optimalnya pengelolaan sumberdaya energi dan pengembangan infrastruktur (khusunya minyak dan gas bumi) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sektor industri rumah tangga, bisnis, dan publik; (2). Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian dan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian, serta luasnya lahan kritis yang mengancam keseimbangan lingkungan; (3). Gangguan lingkungan hidup akibat meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara khusunya di daerah Perkotaan; (4). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun; (5). Tingginya laju deforestasi dan degradasi sumberdaya lahan, serta terancamnya kelestarian keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia; serta (5). Kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati akibat Konversi habitat alami, pencemaran, dan Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang keanekaragaman hayati (khususnya Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Riau

(5) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Isu dan permasalahan yang timbul dalam bidang pertahanan di wilayah Sumatera adalah situasi keamanan di wilayah perbatasan Selat Malaka yang belum stabil dari kriminalitas perairan. Hal ini dikarenakan prasarana pertahanan yang belum memadai untuk menjaga wilayah perbatasan laut (kapal patrol keamanan). Selain itu alutsista untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan Selat dan pengamanan pulau terluar juga masih belum optimal.

Peraturan perundang-undangan yang inkonsisten, tidak harmonis antara yang satu dengan yang lain menjadi kendala bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan negara di daerah dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Disamping itu, akses yang terbatas terhadap informasi tentang peraturan perundang-undangan mengakibatkan kesulitan bagi para penyelenggara negara di daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat masih sering dijumpai konflik horizontal seperti perkelahian massal, perkelahian antar kelompok warga, warga dengan aparat keamanan, dan perkelahian antar suku, ~~dan~~ serta tindak kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, kegiatan illegal logging, dan perambahan pada kawasan hutan khususnya di Propinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya peran aparat keamanan dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban serta kriminalitas (narkoba, illegal logging, kejahatan pada kawasan hutan, dan pekelahian warga).”

Di bidang hukum, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berkisar antara 4.43 hingga 5.66 (IPK Nasional 4.57). Nilai IPK tertinggi di Sumatera tercatat di Tanah Datar dan terrendah di Pekan Baru.Tingkat korupsi yang relatif rendah (dibandingkan dengan rata-rata nasional) ada di Banda Aceh, Medan, Solok, Tanah Datar, Padang dan Palembang. Sedangkan Batam dan Pekan Baru memiliki tingkat korupsi yang relatif tinggi.

Sedangkan dalam bidang politik, masih belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemekaran daerah.pemerintahan (pusat dan provinsi/kab/kota), dan antar sektor serta belum optimalnya kelembagaan intermediasi untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat di NAD dan wilayah pedalaman.

Pada tahun 2010, konsolidasi demokrasi akan kembali diuji dengan pelaksanaan pilkada provinsi/kabupaten/kota di semua wilayah Sumatera, kecuali NAD. Pengalaman pelaksanaan pilkada dari tahun 2005 hingga 2008 masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu menjadi pelajaran bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Kapasitas yang kurang baik dari penyelenggara pilkada seringkali menimbulkan berbagai konflik yang tidak perlu di antara peserta serta pendukung. Selain itu, kesadaran berdemokrasi yang rendah dari masyarakat seringkali menciderai proses politik, karena persoalan seringkali tidak diselesaikan melalui proses hukum, melainkan dengan cara-cara kekerasan, sehingga menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan pendidikan pemilih sangat penting untuk meningkatkan kualitas pilkada di seluruh wilayah Sumatera.

2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Sumatera pada tahun 2010 antara lain adalah :

(1) Meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera;
(2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di Sumatera;
(3) Mengembangkan jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;
(4) Mengembangkan Sumatera bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;
(5) Mengembangkan Sumatera bagian tengah dan Sumatera bgaian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;
(6) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara dan bagian selatan, dan pesisir pantai;

(7) Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran;
(8) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
(9) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga.

Sasaran pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera
   a. Meningkatnya pendapatan per kapita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meningkat menjadi Rp.7,972.22 ribu, Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi Rp.8,425.00 ribu, Provinsi Sumatera Barat meningkat menjadi Rp.7.926,09 ribu, Provinsi Riau meningkat menjadi Rp.21,137.34 ribu, Provinsi Jambi meningkat menjadi Rp.5,853.36 ribu, Provinsi Sumatera Selatan meningkat menjadi Rp.8,292.60 ribu, Provinsi Bengkulu meningkat menjadi Rp.4,752.32 ribu, Provinsi Lampung meningkat menjadi Rp.4,809.39 ribu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat menjadi Rp.8,680.22 ribu, Provinsi Kepulauan Riau meningkat menjadi Rp.26,270.96 ribu.
   b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 6,42 persen,Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,29 persen, Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,60 persen, Provinsi Riau sebesar 3,84 persen, Provinsi Jambi sebesar 4,21 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,34 persen, Provinsi Bengkulu sebesar 5,43 persen , Provinsi Lampung sebesar 4,53 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,35 persen, Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,07 persen.
   c. Menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 22,79 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 13,03 persen, Provinsi Sumatera Barat sebesar 10,77 persen , Provinsi Riau sebesar 10,49 persen, Provinsi Jambi sebesar 9,39 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 17,26 persen, Provinsi Bengkulu sebesar 21,72 persen, Provinsi Lampung sebesar 21,33 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 9,13 persen, Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,13 persen.
   d. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 7,81 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,89 persen, Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,86 persen, Provinsi Riau sebesar 6,14 persen, Provinsi Jambi sebesar 4,46 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 8,29 persen, Provinsi Bengkulu sebesar 2,74 persen, Provinsi Lampung sebesar 5,67 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,90 persen, Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,52 persen.
   e. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 8,90 tahun, Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,88 tahun, Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,28 tahun, Provinsi Riau sebesar 8,44 tahun, Provinsi Jambi sebesar 7,84 tahun, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 7,84 tahun, Provinsi Bengkulu sebesar 8,08 tahun, Provinsi Lampung sebesar 7,86 tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,10 tahun, Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,60 tahun.
   f. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 34,86 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,47 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Sumatera Barat sebesar 27,31 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Riau sebesar 24,47 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi

Jambi sebesar 28,46 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 26,88 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Bengkulu sebesar 28,88 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Lampung sebesar 24,47 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Kep.Bangka Belitung sebesar 28,46 per 1000 kelahiran hidup,Provinsi Kepulauan Riau sebesar 24,47 per 1000 kelahiran hidup.

(2) Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di Sumatera
(3) Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera
(4) Berkembangnya Sumatera bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi.
(5) Berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bgaian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis.
(6) Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara dan bagian selatan, dan pesisir pantai.
(7) Terwujudnya jati diridan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya;
(8) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
(9) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera, pengembangaan wilayah Sumatera diarahkan untuk: (1) memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal; (2) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (3) mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40 persen dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (5) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya dalam rangka mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga; (6) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; (7) Meningkatkan upaya pendukungan pengembangan nilai budaya daerah; (8) Meningkatkan upaya pengelolaan peninggalan kepurbakalaan; (9) Meningkatkan upaya pengembangan pemahaman kekayaan budaya daerah; (10) Meningkatkan pendukungan pengelolaan museum daerah; (11) Meningkatkan upaya pengembangan dan Pelestarian Kesenian; (12) Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (13) Memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (14) Meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (15) Meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat

nasional; (16) Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga; (17) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Sumatera ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKN di Wilayah Sumatera diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan kota Padang di wilayah Barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dan sekitarnya, dan Palembang dan sekitarnya, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder. Pengembangan PKW di Wilayah Sumatera diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota-kota Takengon, Banda Aceh, Sidikalang, Tebingtinggi, Pematang Siantar, Balige, Rantau Prapat, Kisaran, Padang Sidempuan, Pariaman, Bagan Siapiapi, Bangkinang, Bengkalis, Tembilahan, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pasir Pangarayan, Tanjung Pinang, Taluk Kuantan, Terempa, Daik Lingga, Dabo/Singkep, Muara Bulian, Sarolangun, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Enim, Lahat, Kayuagung, Sekayu, Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan, Manggar, Manna, Muko Muko, Baturaja, Prabumulih, Metro, Kalianda, Menggala, Kota Agung, dan Kotabumi; (2) mengendalikan pengembangan kota-kota Sabang, Meulaboh, Langsa, Sibolga, Gunung Sitoli, Muarasiberut, Sawahlunto, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Bengkulu dan Liwa sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan PKL di Wilayah Sumatera ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Wilayah Sumatera. Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara di Sumatera diarahkan untuk mendorong pengembangan mendorong pengembangan Kota Sabang, Medan, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Ranai, dan Tanjung Pinang.

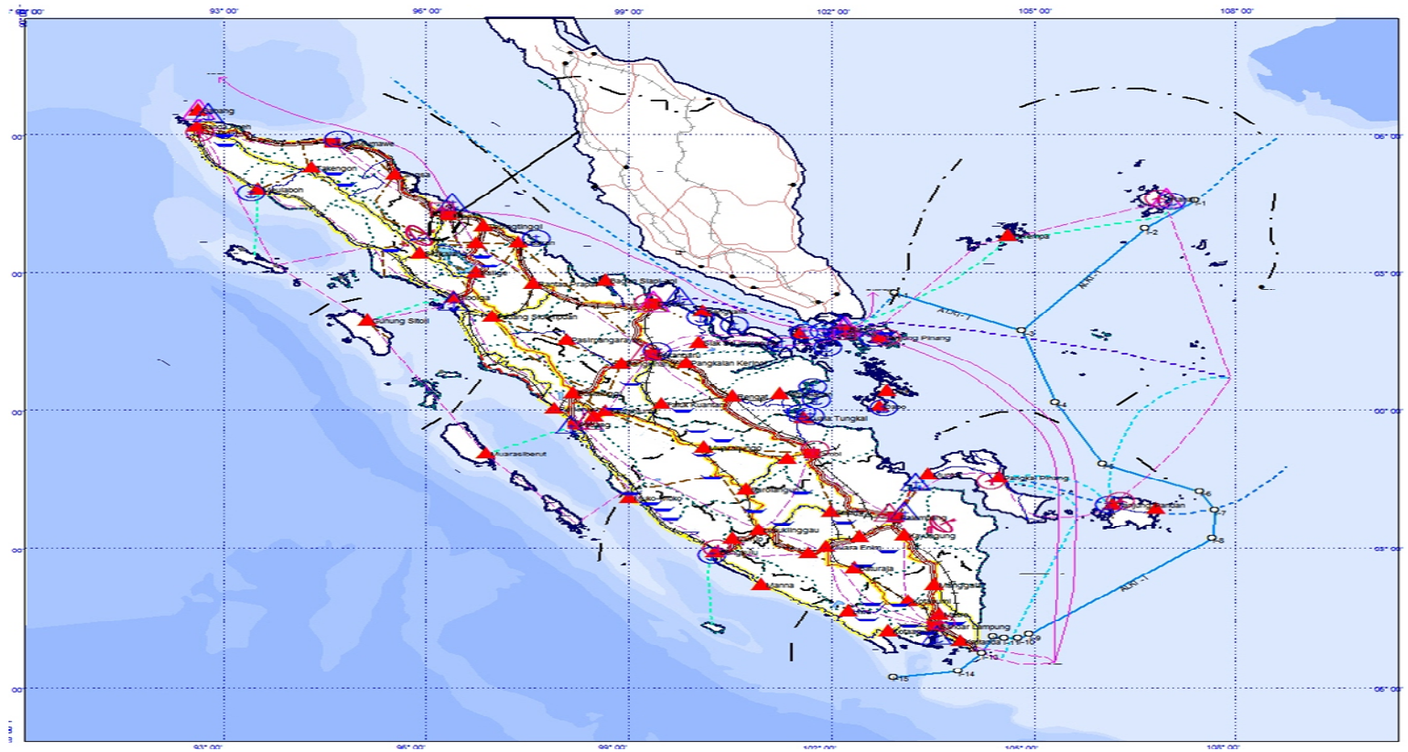

GAMBAR 2.1

PETA RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA

Rencana Tata Ruang Pulau:

- Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur,kawasan tengah dan kawasan pesisir barat sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat,laut,dan transportasi udara litas sumatera yang handal
- Mendorong berfungsinya pusat-pusat pemukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di pulau Sumatera
- Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata,minyak dan gas bumi kepusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara.
- Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi,lintas wilayah kabupaten dan kota.
- Memantapkan keterkaitan antara kawasa andalan,kawasan budidaya lainnya,berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional,serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya
- Mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.

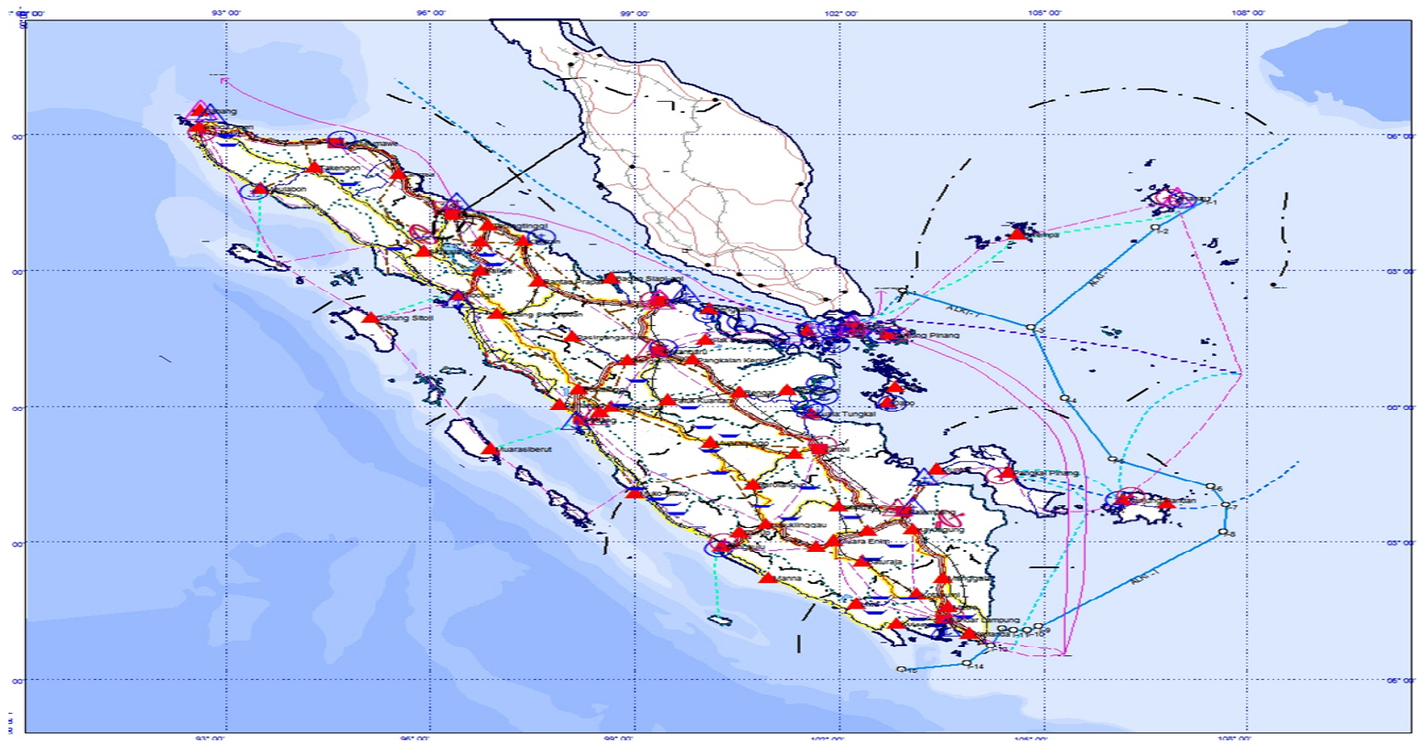

GAMBAR 2.2

ISU STRATEGIS PULAU SUMATERA

Isu Strategis Bidang Ekonomi:
- Kesenjangan ekonomi antar wilayah (Utara, Tengah, dan Selatan)
- Belum optimalnya kinerja ekspor komoditi berbasis agroindustri dan sektor basis daerah

Isu Strategis Sosial Budaya dan Kependudukan:
- Rendahnya akses masyarakat thd air bersih, listrik dan sanitasi, serta berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan

Isu Strategis Bidang PolhukHanKam:
- Situasi politik yang belum benar-benar kondusif pasca MoU
- Kerawanan keamanan di wilayah perbatasan (Selat Malaka) dan keterbatasan sarana pertahanan

Isu Strategis Bidang Infrastruktur:
- Kerusakan prasarana transportasi darat
- Kendala perhubungan antara pulau-pulau kecil dengan *hinterland*nya dan belum optimalnya sarana transportasi sungai

Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Belum sinkronnya RTR Pulau dengan RTRW Prov dan Kab/Kota
- Masih lemahnya peta batas wilayah
- Masih lemahnya impelementasi kawasan khusus, kawasan lindung dsb

Isu Strategi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Perkembangan alih fungsi lahan yang cepat dan tidak terkendali
- Meningkatnya kejadian bencana: tsunami, gempa bumi, longsor, banjir dan kekeringan.

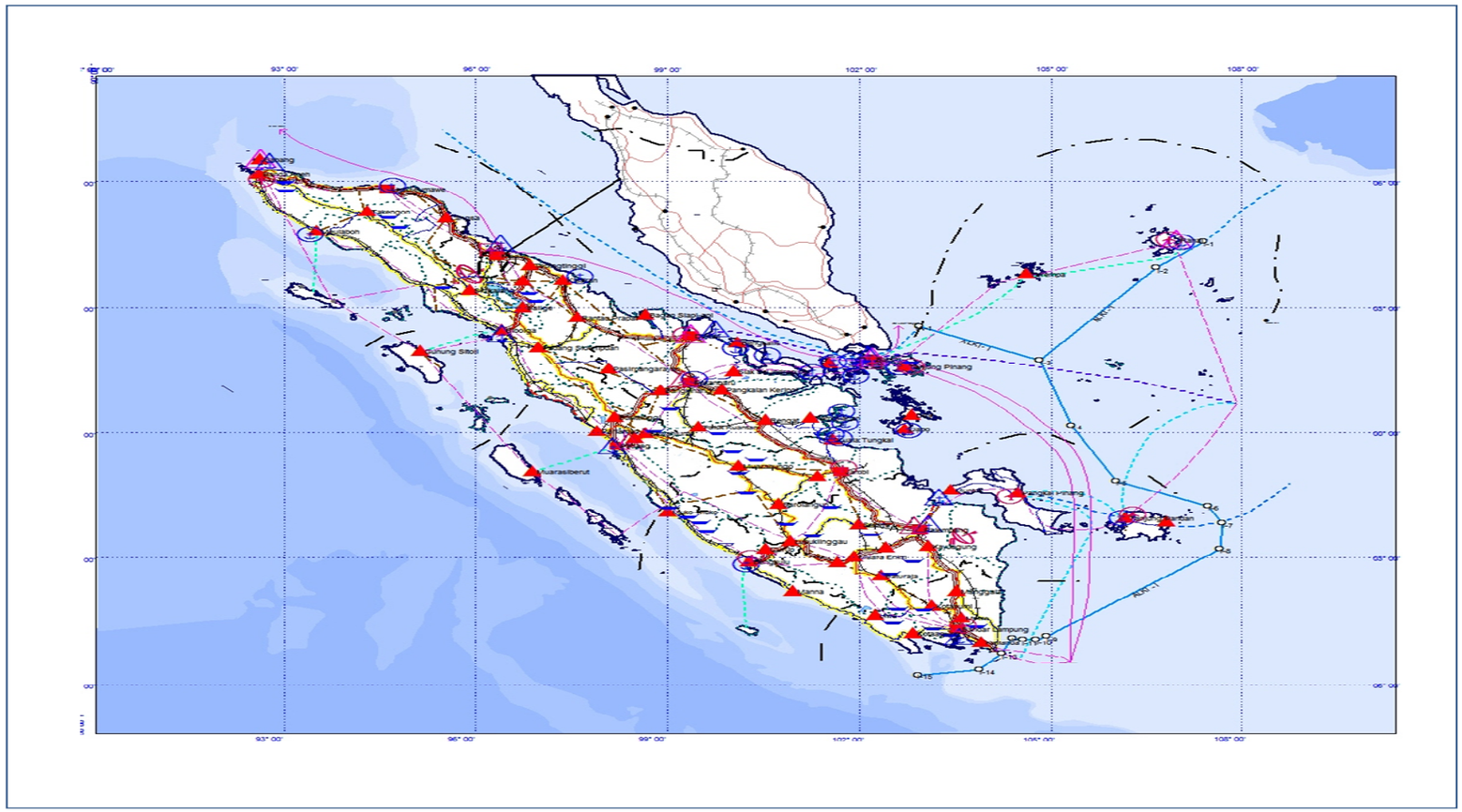

GAMBAR 2.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PULAU SUMATERA

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Ekonomi:
- Pengembangan Industri agroindustri perkebunan & industri perikanan;
- Pembangunan sumber energi listrik industri yg terkoneksi dg jaringan listrik sumatera.
- Pengembangan industri berbasis SDA Mineral dan industri pengolahan hasil pertanian;
- Pemanfaatan SDA Mineral untuk pembangkit tenaga listrik.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Sosial,Budaya dan Kependudukan:
- Peningkatan akses air bersih dengan pendekatan komunal;
- Peningkatan pemanfaatan sumber energi alternatif untuk kebutuhan listrik masyarakat;

Strategi & Arah Kebijakan Bidang PolHukHanKam:
- Kerjasama antar negara (Malaysia, Singapura, Jepang) untuk pengamanan Selat Malaka;
- Koordinasi lintas instansi;
- Peningkatan sarana dan personel untuk pengamanan jalur perdagangan.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur:
- Pembangunan jalur kereta api di wilayah Aceh dan Sumatera utara
- Pembukaan & pembangunan jalan yg menghubungkan pantai barat dan pantai timur Sumatera.
- Pembangunan & pemeliharaan jalan - jembatan utk membuka daerah terisolir;
- Pembangunan jalur kereta apa yg menghubungkan antar propinsi.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Sinkronisasi RTRW Prov dan Kab/Kota
- Pemetaan ulang batas-batas wilayah
- Pengembangan PKSN, PKW, Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Strategi & Arah Kebijakan Bidang SDA dan LH:
- Mengendalikan perkembangan kota-kota yang berada pada kawasan rawan bencana;
- Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi wilayah;
- Reklamasi pulau-pulai kecil yang terancam tenggelam.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI TAHUN 2010

BAB 3
PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI

3.1 Kondisi Saat Ini

Wilayah Jawa Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya. Berbagai prasarana dan sarana, peluang usaha dan ketersediaan sumberdaya manusia tersedia secara cukup memadai. Wilayah Jawa Bali diharapkan menjadi penopang utama dalam menghadapi persaingan global terutama dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun, dalam 20 tahun ke depan wilayah Jawa Bali akan menghadapi berbagai isu strategis. *Pertama*, peningkatan jumlah penduduk perkotaan. *Kedua*, perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada peningkatan sektor jasa. *Ketiga*, menurunnyya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. *Keempat*, meningkatnya klas menengah yang disertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak-hak dasar. *Kelima*, pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal. Berbagai isu strategis tersebut akan mempunyai implikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumberdaya, tata ruang, budaya dan politik.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan daya dukung sumberdaya yang memadai. Pasokan energi listrik yang sangat dibutuhkan untuk mendukung dinamika ekonomi di Jakarta ternyata tidak diimbangi dengan pasokan bahan bakar (minyak dan batubara) yang memadai untuk pembangkit yang dikembangkan di Pulau Jawa dan Bali. Tekanan atas sumberdaya alam akibat aktivitas penduduk yang semakin meningkat tanpa pengaturan ruang yang tepat telah menyebabkan kerusakan alam yang cukup berat. Namun dengan daya tarik infrastruktur yang lebih memadai dan posisi sebagai pusat pemerintahan membuat Jawa-Bali tetap pling diminati untuk investasi dan datangnya penduduk.

Pulau Jawa dan Bali juga memiliki persoalan klasik akibat sumberdaya yang tidak menyebar merata dan kondisi geografis yang bervariasi. Pertumbuhan dan perkembangan yang tidak seimbang antara wilayah utara dengan selatan, inefisiensi alokasi sumberdaya dalam mendukung pembangunan pulau dan kerusakan sumberdaya pada beberapa wilayah muncul sebagai akibat program-program pembangunan sektoral yang berdiri sendiri maupun ego daerah otonomi dalam mengekploitasi sumberdaya yang dimiliki. Keterpaduan program pembangunan tidak berlangsung dengan baik meskipun wilayahnya relatif lebih kecil. Ekspansi industri dan perkembangan kota yang membutuhkan ruang telah menyebabkan lahan pertanian produktif semakin berkurang dan menimbulkan ancaman terhadap ketahanan pangan. Ketidaksiapan sumberdaya manusia dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi menimbulkan persoalan pengangguran dan kantong-kantong kemiskinan baru.

Pulau Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk tertinggi dalam pengembangannya juga harus dilakukan dengan keterpaduan program untuk mendukung alokasi sumberdaya yang efisien dan pertumbuhan yang lebih seimbang. Pengembangan pulau Jawa selain harus merupakan satu kesatuan dalam konsepsi pembangunan Indonesia juga harus memiliki sinergi dan pengembangan pulau-pulau besar terdekat (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) terutama dalam menjaga ketersediaan sumberdaya pendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa. Oleh karena itu, pengembangan pulau Jawa dan Bali juga selayaknya dilakukan dengan kerangka pengembangan yang

memiliki keterpaduan program pulau Jawa dan Bali sebagai satu kesatuan tata ruang wilayah. Dengan demikian, pengembangan pulau Jawa dan Bali harus dilandaskan peran dan fungsi yang jelas dari masing-masing daerah didalamnya berdasatrkan potensi yang dimiliki dan tidak semata persoalan yang dihadapi daerah namun juga permasalahan yang dihadapi pulau sebagai satu kesatuan.

Pulau Jawa dan Bali sendiri memiliki karakteristik yang khas dengan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata Indonesia dan lokasi pusat pemerintahan. Perkembangan kegiatan ekonomi khususnya industri dan jasa ditengah keterbatasan ruang (lahan) menjadikan ruang menjadi isu yang sangat krusial disamping ketersediaan energi. Konversi lahan pertanian dan hutan sulit dihindarkan sementara bencana alam juga terus mengancam akibat kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Perkembangan Jawa dan Bali harus mulau memikirkan dukungan dari pulau besar disekitarnya baik untuk dukungan sumber energi dan pangan maupun untuk penyebaran pertumbuhan ekoniomi agar tidak terpusat di Jawa. Pada saat yang sama, jawa dan Bali juga harus mampu mengatasi persoalan ketimpangan dan degradasi lingkungan yang terjadi melalui penataan ruang yang lebih baik dalam pengembangan ekonomi.

Peningkatan daya saing ekonomi wilayah Jawa Bali dalam 20 tahun ke depan akan ditentukan oleh rekayasa, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu, pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing wilayah menjadi kian penting dan mendesak. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di pelosok daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan; pengembangan wilayah dan penataan ruang secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, zonasi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Dalam kehidupan sosial, budaya dan politik, kita juga dituntut untuk meningkatkan kualitas, proses dan kinerja politik dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat; menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi rakyat; menegakan hukum secara adil dan tanpa diskmrinasi, serta meningkatkan kapasitas dan integritas aparat dalam memberikan layanan kepada rakyat.

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Wilayah Jawa-Bali merupakan wilayah terpadat dan ditempati 60 persen penduduk Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan jumlah pengangguran terbuka dan penduduk miskin sebagian besar berada di wilayah di Jawa-Bali. Tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di wilayah Jawa Bali. Penyebaran penduduk miskin sebagian besar berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yakni masing-masing sebanyak 6.7 juta jwa, 6,2 juta jiwa, dan 5,3 juta jiwa. Penyebaran terendah berada di Provinsi Bali dan DKI Jakarta masing-masning sebanyak 215,7 ribu jiwa dan 379,6 ribu jiwa. Sementara berdasarkan persentase penduduk miskin, 3 provinsi tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah (19,2 persen), Jawa Timur (18,5 persen), dan DI. Yogyakarta (18,3 persen). Persentase terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan Bali, masing-masing sebesar 4,29 persen, dan 6,17 persen.

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan berbagai isu strategis yang perlu diatasi melalui prorgam dan kegiatan pembangunan antara lain, *pertama*, ketersediaan dan

ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan. *Kedua*, kenaikan harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu. *Ketiga*, kenaikan biaya transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan terjadinya hambatan gelombang laut yang tinggi.

Kondisi yang sama untuk penyebaran pengangguran terbuka sebanyak 65,9 persen (tahun 2000) berada di wilayah Jawa Bali, dan sedikit berkurang menjadi 64,4 persen pada tahun 2008. Sementara itu, berdasarkan ukuran persentase pengangguran terbuka, di wilayah Jawa Bali sebesar 6,4 persen (tahun 2000), meningkat menjadi 10 persen (tahun 2004), dan menurun menjadi 8,8 persen pada tahun 2008. Kondisi tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka di luar Jawa Bali. Penyebaran pengangguran terbuka pada dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 sebagian besar berada di provinsi Jawa Barat, dengan kondisi terakhir (tahun 2008) adalah sebanyak 2,26 juta, dan di Jawa Timur sebanyak 1,26 juta jiwa.

Parameter keberhasilan pendidikan adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas serta semakin rendahnya persentase masyarakat buta huruf. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan persentase angka melek huruf di wilayah Jawa dan Bali sejak tahun 1996 hingga tahun 2006, sebesar 1,6 - 9,4 persen. Peningkatan terendah terjadi di DKI Jakarta, karena telah mencapai Angka Melek Huruf yang tinggi, sementara peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Baik atau buruknya tingkat pendidikan di suatu wilayah ditentukan oleh lamanya masa sekolah yang ditempuh oleh masyarakat di wilayah tersebut. Perkembangan rata-rata lama sekolah yang ditempuh masyarakat di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan bahwa terjadi perbaikan tingkat pendidikan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali sejak tahun 1996 hingga tahun 2006 yang ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata lama sekolah secara bertahap sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Pada Tahun 1996, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki tingkat pendidikan terbaik dengan rata-rata lama sekolah 9.5 tahun, sementara wilayah yang memiliki tingkat pendidikan terendah di tahun yang sama adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan rata-rata lama sekolah 5.5 tahun. Gencarnya program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, telah meningkatkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2006 menjadi 10,8 tahun di DKI Jakarta dan terendah di Provinsi Jawa tengah 6,8 tahun.

Dari sisi rasio murid terhadap guru, terdapat perkembangan yang berarti untuk beberapa daerah dan level, yang ditandai dengan semakin rendahnya rasio tersebut dari tahun ke tahun. Untuk level SMP, SMA, dan SM kejuruan, setiap provinsi mengalami penurunan rasio dalam kurun tahun 2004-2006. Akan tetapi, hal yang sama tidak diikuti oleh tingkat SD dimana beberapa provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali mengalami pertambahan rasio. Artinya, kenaikan partisipasi penduduk untuk bersekolah di tingkat SD tidak diimbangi oleh pertambahan tenaga pengajar yang seimbang.

Di bidang kesehatan, tampaknya fasilitas kesehatan yang dimilliki oleh wilayah Jawa-Bali semakin bertambah. Dari tiga parameter fasilitas kesehatan, hampir seluruh provinsi mengalami kecenderungan adanya pertambahan fasilitas. Keberadaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan harapan hidup penduduk.

Meningkatnya jumlah fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan di beberapa provinsi Jawa-Bali menyebabkan meningkatnya tingkat harapan hidup penduduknya. Gambar 2.10. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan harapan hidup masyarakat Jawa-Bali, dari kisaran 62,9-70,2 tahun (tahun 1996) menjadi 64,3-73 tahun pada tahun 2006. Persentase kenaikan tertinggi pada kurun 1996-2006 terjadi di Jawa Tengah, yakni sebesar 6 tahun, sedangkan peningkatan terendah terjadi di DKI Jakarta dan Bali sebesar 2,4 tahun

Meskipun telah memiliki jumlah dan mutu fasilitas kesehatan yang relative baik dibandingkan wilayah yang lain, namun di bidang kesehatan wilayah Jawa-Bali masih memiliki permasalahan khususnya dalam hal keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin, munculnya berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Selain itu, permasalahan kesehatan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan gizi terutama Ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

Di bidang kebudayaan, dengan kondisi yang relatif lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lainnya, kualitas pengelolaan seni dan budaya relatif lebih baik karena tingginya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai upaya pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan berbagai Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang tersebar di seluruh daerah Jawa dan Bali mencapai jumlah 4,28 buah dan 4 warisan dunia (Taman Nasional Ujung Kulon, Candi Borubudur, Candi Prambanan, serta Situs Sangiran), 2 kawasan yang dinominasikan sebagai warisan dunia (Kawasan Bekas Perkotaan Majapahit di Trowulan dan Kawasan Lanskep Budaya di Bali), serta banyak kawasan dan benda peninggalan lainnya yang kaya akan nilai luhur budaya. Namun kemajuan kawasan teknologi komunikasi dan informasi sebagai akibat dari globalisasi telah menciptakan interaksi budaya yang disatu sisi berpengaruh positif terhadap perkembangan orientasi tata nilai dan prilaku masyarakat Jawa-Bali, namun di sisi lain dapat menimbulkan pengaruh pengaruh negatif, seperti munculnya identitas dan perilaku baru yang tidak sesuai dengan nilai, tradisi dan budaya lokal-tradisional. Selain itu, berbagai kasus pencurian dan penyeludupan berbagai benda sejarah (purbakala) yang semakin marak perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh *stakeholder* terkait.

Terkait dengan pemuda, dari total jumlah penduduk muda di Indonesia, persebaran yang paling banyak tinggal di Pulau Jawa-Bali sebesar 57,3 persen, banyaknya jumlah pemuda di Pulau Jawa menyebabkan kepadatan pemuda di pulau tersebut menjadi sangat tinggi yaitu sebanyak 363 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan pemuda tertinggi di DKI Jakarta mencapai 5.949 pemuda per kilometer persegi. Tingkat pengangguran terbuka pemuda du Pulau Jawa masih cukup tinggi, seperti terlihat pada Propinsi Banten sebesar 27.71 persen dan Propinsi Jawa Barat sebesar 24.24 persen, sementara tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda yang besar berada pada posisi tingkat sekolah dasar dan menengah, sedangkan tingkat perguruan tinggi masih kecil. Selain itu pemuda di Pulau Jawa-Bali dihadapkan pada masalah sosial pemuda seperti krisis mental, krisis eksistensi dan lunturnya jatidiri bangsa. Hal ini terlihat dari maraknya pemakaian narkoba, pergaulan bebas dan kriminalitas di kalangan pemuda, utamanya pemuda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.

Di bidang olahraga, prestasi olahraga di Pulau Jawa-Bali menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pulau Jawa-Bali memiliki unggulan hampir pada semua cabang

olahraga, seperti atletik, pencak silat, karate, taekwondo, balap sepeda, balap motor, basket, senam, loncat indah, menembak, biliar, renang dan bulutangkis. Pulau Jawa-Bali memiliki keunggulan pada ketersediaan bibit dan atlet unggulan, serta pelatih dan wasit handal. Meskipun demikian, olahraga di Pulau Jawa-Bali masih menghadapi beberapa kendala yaitu semakin berkurangnya ruang terbuka dan sarana dan prasarana olahraga akibat tergusur oleh kepentingan ekonomi.

(2) Bidang Ekonomi

Antarprovinsi di wilayah Jawa Bali masing-masing memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan sektor ekonomi. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Provinsi Bali. Provinsi D.I Yogyakarta memiliki kontribusi terbesar di sektor Bangunan. DKI Jakarta bercirikan provinsi dengan basis sektor tersier. Sedangkan Banten sebagai provinsi baru mengalami pertumbuhan paling pesat pada sektor-sektor sekunder seperti bangunan, pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Dari berbagai keunggulan sektor di masing-masing provinsi, maka prioritas pengembangan sektor disetiap provinsi adalah sebagai berikut yaitu: (a) industri makanan dan minuman di hampir setiap provinsi, kecuali DKI; (b) industri tekstil dan produk tekstil, kecuali DKI dan Jatim; (c) industri barang kayu, rotan dan bambu, kecuali DKI dan Jabar; (d) industri mesin listrik dan peralatan listrik di Jabar dan Banten; dan (e) industri alat angkutan dan perbaikannya di DKI dan Jabar.

Wilayah Jawa Bali merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi pangan tertinggi (padi sebesar 56,6 persen, kedele sebesar 70,8 persen, dan jagung sebesar 58,3 persen). Namun selama rentang waktu tahun 2002-2006 menunjukkan kecenderungan menurun. Sedangkan, produksi tanaman perkebunan dominan di wilayah Jawa-Bali dilihat pada empat jenis tanaman yaitu Kakao, Karet, Kopi dan Kelapa Sawit.

Isu strategis bidang ekonomi antara lain terhambatnya investasi sebagai akibat ketidapastian dalam memperoleh ijin usaha, rusaknya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi dan listrik. Permasalahan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Masalah lain yang terjadi di daerah adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Untuk pengembangan ekonomi daerah perlu dilakukan berbagai upaya (1) revitalisasi pertanian secara terpadu, sistematik, dan konsisten; (2) pengembangan sektor dan komoditas keunggulan; (3) diversifikasi kegiatan ekonomi; (3) optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM. Pulau Jawa-Bali merupakan wilayah yang padat penduduk dan potensial karena terdapat berbagai macam kegiatan sektor industri. Untuk membantu percepatan investasi pada skala usaha besar, dapat dikembangkan skim inti-plasma dengan menumbuhkan UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan usaha UKM karena secara langsung dapat berdampingan dengan jaringan usaha formal dan bernilai tambah. Isu yang tidak kalah penting adalah dalam keuangan daerah, terutama dalam efektifitas dan efisiensi anggaran daerah, belum optimalnya anggaran berbasis kinerja, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran di daerah. Selain perluasan akses pada faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar diperlukan juga

akses terhadap sumber pembiayaan yang kontinu. Dalam hal ini, dapat dikembangkan kelembagaan koperasi sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

Di bidang keuangan daerah, Provinsi DKI menjadi provinsi dengan kapasitas fiskal terbesar yaitu 30 persen atau hampir 5-9 kali lipat dibandingkan provinsi lain. Di lain pihak, provinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal terendah sebesar 3.78 persen. Secara umum, derajat desentralisasi fiskal berdasarkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan di wilayah Jawa-Bali dengan nilai lebih dari 60 persen mengindikasikan tingkat kemandirian yang cukup baik. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal tertinggi.

(3) Bidang Prasarana

Isu dan permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana di sebagian besar daerah menyangkut rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Sedangkan provinsi yang memiliki permasalahan tentang prasarana listrik, air minum, dan telekomunikasi. Untuk permasalahan yang menyangkut prasarana pengairan dan irigasi, diantaranya termasuk pengendalian masalah banjir dan daerah aliran sungai (DAS).

Kerapatan jalan berdasarkan rasio panjang jalan per luas wilayah antarprovinsi, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,68 km/km^2, D.I. Yogyakarta sebesar 1,47 km/km^2, dan Jawa Tengah sebesar 0,72 km/km^2. Namun sebagian jalan di wilayah Jawa mengalami kerusakan. Pulau Jawa, Madura dan Bali telah terinterkoneksi, sehingga kebutuhan kelistrikan pada sistem ini disuplai dari pembangkit se JAMALI dengan beban puncak yang telah dicapai adalah sebesar 15.896 MW pada tahun 2007. Hampir 70 persen pasokan energi listrik nasional didistribusikan di Pulau Jawa.

Tersedia potensi pengembangan sumber ketersediaan sumber energi listrik, khususnya panas bumi masih potensial untuk dikembangkan. Sistem kelistrikan di Jawa-Madura-Bali dan Sumatera merupakan sistem yang telah berkembang dan merupakan sistem kelistrikan yang terinterkoneksi melalui jaringan transmisi tegangan tinggi dan jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi. Keberlangsungan penyediaan suplai listrik melalui Pembangkit se JAMALI belum dapat mengantisipasi kerusakan/perbaikan dari sistem pembangkit. Untuk itu, perlu optimalisasi sumber daya energi alternatif sebagai penyedia listrik untuk menyokong pengembangan berbagai pusat industri pengolahan.

(4) Bidang SDA dan LH

Isu dan permasalahan yang paling penting dan perlu untuk segera ditangani adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti eksploitasi sumberdaya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai juga menyebabkan masalah.

Tingginya konversi lahan sawah juga berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi dari nilai kualitasnya, yaitu lahan sawah dengan kesuburan tinggi, di daerah yang dekat dengan konsentrasi penduduk akan kalah bersaing dengan keuntungan lokasinya. Selain itu

perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah. Wilayah Jawa Bali merupakan wilayah yang memiliki lahan tersempit untuk perluasan areal pertanian.Pada periode tahun 1999-2002 telah terjadi alih fungsi lahan sawah produktif menjadi peruntukan lainnya rata-rata 16.715 ha/tahun

Masalah air ditandai dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali sehingga luas lahan kritis semakin bertambah. Penyedotan air tanah terutama yang melebihi kemampuan alami untuk mengisinya kembali makin tidak terkendali sejalan dengan perkembangan permukiman dan pertumbuhan kegiatan ekonomi penduduk yang pada akhirnya menyebabkan permukaan tanah turun, muka air tanah menurun, dan terjadinya intrusi air laut. Penurunan muka air tanah tersebut telah menyebabkan turunnya permukaan tanah dengan laju 2,3 sampai dengan 34 centimeter per tahun sehingga meningkatkan kerentanan wilayah-wilayah tersebut terhadap banjir.

Isu yang mundul dari bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah (1) Semakin berkurangnya kawasan lindung dengan penggunaan lahan sebagai hutan akibat meluasnya kegiatan budidaya, khususnya di Pulau Jawa bagian Selatan dan Pulau Bali bagian Tengah. (2) Semakin meningkatnya kebutuhan ruang untuk kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang berdampak pada konversi lahan di kawasan lindung dan kawasan produksi pangan. (3) Lahan terbuka hijau yang terus turun seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi; (4) Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi yang tersedia di wilayah Jawa Bali; (5) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pengembangan intensifikasi pertanian; (6) Terancamnya kelestarian sumber-sumber air dan daerah resapan air, sehingga berdampak pada berkurangnya ketersedian air. (7) Tingginya kerusakan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kejadian bencana alam (banjir, longsor, kekeringan); (8) Tidak terkendalinya pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (9) Belum terintegrasinya pengembangan kawasan konservasi; (10) Terancamnya kelestarian kawasan cagar budaya.

(5) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Isu dan permasalahan yang timbul dalam bidang politik adalah pelaksanaan pilkada kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali, kecuali DKI Jakarta. Dengan demikian, agar dapat menghasilkan kepemimpinan politik yang berkualitas, dan angka partisipasi politik dalam pilkada cukup tinggi, peningkatan kapasitas lembaga KPU Kabupaten/Kota dan pendidikan pemilih perlu mendapatkan perhatian. Persoalan lain, kebebasan sipil di wilayah Jawa Bali relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Isu lain yang berkaitan adalah masih sensitifnya hubungan antar kelompok yang berbeda, serta kurangnya sikap toleran dari sejumlah penganut kepercayaan tertentu di dalam masyarakat. Semua ini diharapkan dapat dihilangkan secara perlahan-lahan melalui penanaman kesadaran bahwa penegakan hukum dan demokrasi tidak bisa mentoleransi tindakan-tindakan mau menang sendiri. Pilkada harus mampu menjadi alat untuk memainkan peran mendidik masyarakat bahwa berdemokrasi berarti harus siap menang dan siap kalah.

Di bidang keamanan masih adanya tindakan ambigu dari pemerintah dan aparat keamanan terkait dengan isu social yang berkembang di masyarakat, misalnya judi, minuman keras dan pelacuran. Permasalahan keamanan untuk tidak kejahatan diwilayah Jawa Bali menunjukkan angka persentase kejadian yang tinggi. Sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase tertinggi untuk tindak kejahatan perampokan, narkoba, dan pembunuhan. Selain itu, masih terjadi sejumlah insiden kekerasan di berbagai daerah berkaitan dengan pilkada dan agama; ancaman solidaritas dan atau fundamentalisme agama yang sempit; serta ancaman nilai individualisme yang mengarah kepada ketidakpedulian sosial.

Di bidang hukum masih belum optimalnya kinerja penyelenggara negara sebagai akibat belum adanya kepastian hukum dalam hal perundang-undangannya (materi hukum), penerapan dan penegakan; belum berjalannya pembangunan hukum yang ber-orientasi kepada Akses terhadap Keadilan (Legal Empowerment) serta tingginya tindak kejahatan diwilayah Jawa Bali yang dipicu permasalahan tingginya jumlah pengguran,urbanisasi, serta rendahnya rasio petugas keamanan dengan jumlah penduduk.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Tujuan pengembangan wilayah Pulau jawa-Bali dalam kurun waktu 2010 antara lain adalah

(1) Meningkatkan standar hidup masyarakat Jawa-Bali
(2) Mempertahankan wilayah Jawa sebagai lumbung pangan nasional.
(3) Mengembangkan wilayah Jawa-Bali sebagai wilayah utama dalam menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN
    a. Mengembangkan wilayah Jawa-Bali sebagai pusat layanan jasa kesehatan dan pendidikan dengan standar internasional.
    b. Mengembangkan wilayah Jawa sebagai pusat layanan perbankan dengan standar internasional.
    c. Mengembangan wilayah bali sebagai pusat pariwisata dengan standar internasional.
    d. Mengembangakan jaringan transportasi dengan standar internasional.
(4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Jawa bagian utara dan bagian selatan, dan keseimbangan wilayah Bali bagian utara dan selatan.
(5) Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran.
(6) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
(7) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga.

Sasaran pengembangan wilayah Jawa-Bali dalam kurun waktu 2010 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali
    a. Meningkatnya pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta menjadi sekitar Rp 41.394.400, Provinsi Jawa Barat menjadi sekitar Rp 7.535.00, Provinsi Jawa Tengah menjadi sekitar Rp. 6.183.000, Provinsi DI. Yogyakarta: menjadi sekitar Rp 5.346.400, Provinsi Jawa Timur menjadi sekitar Rp 9.458.600, Provinsi Banten menjadi sekitar Rp 8.665.000, dan Provinsi Bali menjadi sekitar Rp 8.096.200.
    b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sekitar 5,90 persen, Jawa Barat sekitar 6,05 persen, Jawa Tengah sekitar 5,22 persen, DI.Yogyakarta

sekitar 4,08 persen, Jawa Timur sekitar 5,77 persen, Banten sekitar 5,61 persen, Bali sekitar 5,10 persen.

c. Menurunnya jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta menjadi sekitar 4.83 persen, Jawa Barat menjadi sekitar 13,03 persen, Jawa Tengah menjadi sekitar 22,48 persen, DI. Yogyakarta menjadi sekitar 20,76 persen, Jawa Timur menjadi sekitar 20,13 persen, Banten menjadi sekitar 10,08 persen, Bali menjadi sekitar 8,61 persen.
d. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menjadi sekitar 10,89 persen, Jawa Barat menjadi sekitar 10,93 persen, Jawa Tengah menjadi sekitar 7,43 persen, DI. Yogyakarta menjadi sekitar 5,78 persen, Jawa Timur menjadi sekitar 6.84 persen, Banten menjadi sekitar 16,19 persen, dan Bali menjadi sekitar 3,59 persen.
e. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta menjadi sekitar 11,6 tahun, Jawa Barat menjadi sekitar 8,1 tahun, Jawa Tengah menjadi sekitar 7,44 tahun, DI. Yogyakarta menjadi sekitar 8,98 tahun, Jawa Timur menjadi sekitar 7,46 tahun, Banten menjadi sekitar 8,5 tahun, dan Bali menjadi sekitar 8,24 tahun.
f. Menurunya angka kematian bayi di Provinsi DKI Jakarta menjadi sekitar 12,81 per 1000 kelahiran hidup, Jawa Barat menjadi sekitar 27,88 per 1000 kelahiran hidup, Jawa Tengah menjadi sekitar 22,05 per 1000 kelahiran hidup, DI. Yogyakarta menjadi sekitar 12,81 per 1000 kelahiran hidup, Jawa Timur menjadi sekitar 24,47 per 1000 kelahiran hidup, Banten menjadi sekitar 34,28 per 1000 kelahiran hidup, dan Bali menjadi sekitar 17,64 per 1000 kelahiran hidup.

(2) Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan di Jawa.
(3) Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di Jawa-Bali
(4) Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di Jawa-Bali.
(5) Merwujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.
(6) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
(7) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional
(8) Meningkatnya mutu layanan perbankan dengan standar internasional.
(9) Meningkatnya mutu layanan pariwisata dengan standar internasional.
(10) Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi dengan standar internasional.
(11) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Jawa bagian utara dan bagian selatan.
(12) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Bali bagian utara dan bagian selatan.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali, pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30 persen dari keseluruhan luas wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian Selatan dan Pulau Bali bagian Tengah; (3) mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersedian air sepanjang tahun; (4) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam

keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali; (8) mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; (9) Meningkatkan upaya pendukungan nilai budaya daerah; (10) Meningkatkan upaya pengembangan kekayaan budaya daerah; (12) Meningkatkan pendukungan pengelolaan museum daerah; (13) Meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (14) Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (15) Memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (16) Meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (17) Meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (18) Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Jawa-Bali ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di kawasan perbatasan negara.

Pengembangan PKN di wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan Perkotaan Jabodetabek, Perkotaan Bandung, Gerbangkertosusila, dan Perkotaan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan perkotaan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota-kota Pandeglang, Rangkas Bitung, Cianjur, Purwakarta-Cikampek, Sumedang, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, Boyolali, Klaten, Salatiga, Pekalongan, Kudus, Cepu, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Bantul, Sleman, Jombang, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Tulung Agung, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Sampang, Sumenep, Singaraja, Negara, dan Semarapura sebagai pusat pelayanan sekunder; (2) mengendalikan pengembangan kota-kota Cilegon, Sukabumi, Kuningan, Tegal, Kebumen, dan Situbondo sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan PKL di wilayah Jawa-Bali ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Wilayah Jawa-Bali.

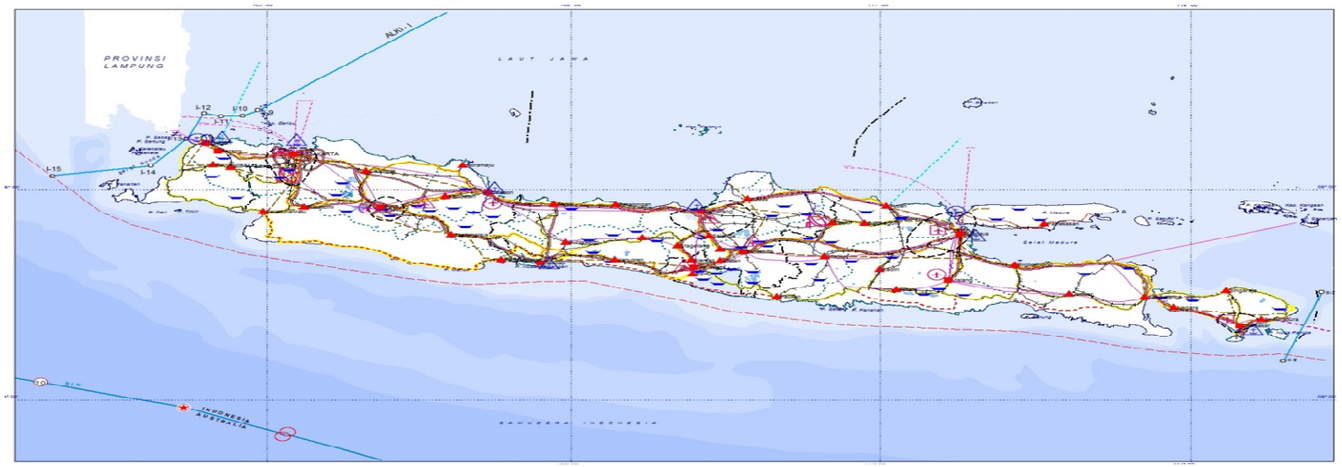

GAMBAR 3.1

PETA RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA - BALI

Rencana Tata Ruang Pulau:

- Mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan.
- Mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana.
- Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30 persen dari keseluruhan luas Pulau Jawa dan Bali.
- Mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan
- Mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitas daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.
- Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan, mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali

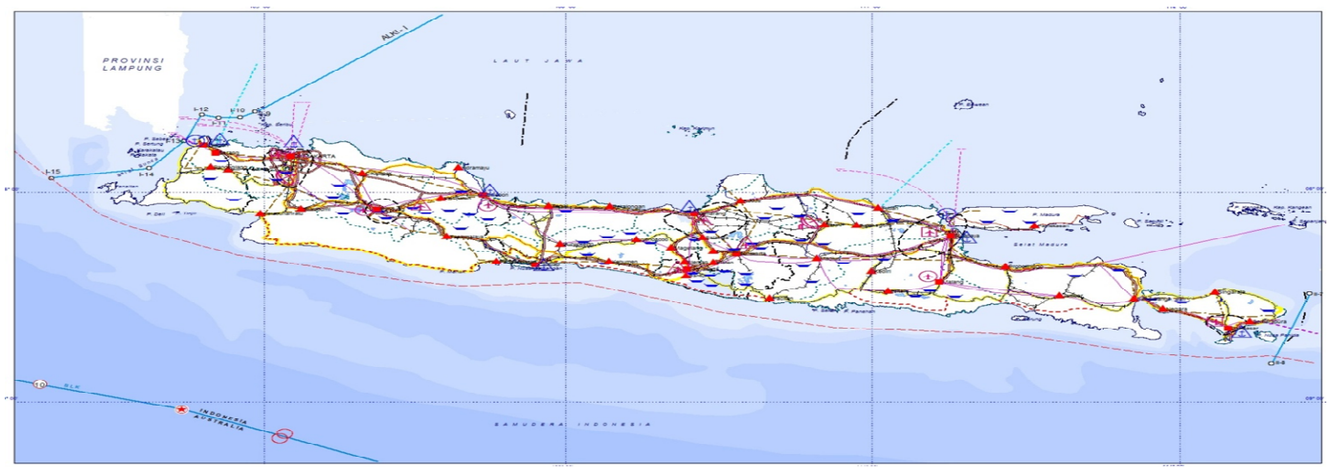

GAMBAR 3.2

ISU STRATEGIS PULAU JAWA - BALI

Isu Strategis Bidang Ekonomi:
- Tingginya Kesenjangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan.
- Tingginya tingkat pengangguran.
- Tingginya konsentrasi pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan.

Isu Strategis Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan:
- Terkonsentrasinya penduduk dan penduduk miskin di Jawa.
- Tidak optimalnya penggunaan kapasitas pembangkit tenaga listrik akibat sumber bahan bakar pembangkit yang terbatas.
- Tumbuhnya kantong kemiskinan pada wilayah urban dan lahan-lahan kosong di kota.

Isu Strategis Bidang PolhukHanKam:
- Masih munculnya ancaman terorisme terhadap obyek vital.
- Meningkatnya kasus tindak korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

Isu Strategis Bidang Infrastruktur:
- Rendahnya kualitas infrastruktur jalan pendukung konektivitas utara dan selatan.
- Rendahnya kualitas infrastruktur jalan pendukung konektivitas utara dan selatan.
- Kurangnya manajemen dan kapasitas jaringan pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut.

Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Belum optimalnya pemanfaatan struktur ruang.
- Belum optimalnya pemanfaatan pola ruang.

Isu Strategi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Kurang optimalnya pemberdayaan sektor perikanan di wilayah selatan.
- Terancamnya kawasan hutan lindung dan peningkatan lahan kritis oleh pembangunan permukiman dan industri.
- Tidak meratanya keseimbangan air di sepanjang tahun dimana terjadi defisit pada musim kemarau dan surplus pada musim penghujan.
- Peningkatan intensitas banjir pada DAS besar.

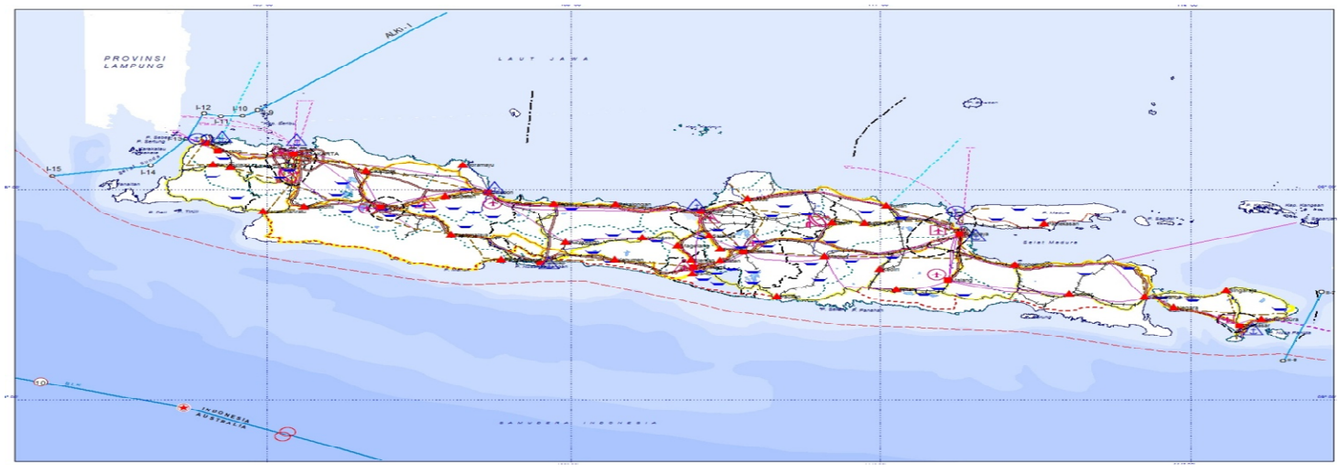

GAMBAR 3.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PULAU JAWA - BALI

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi:
- Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah pedesaan.
- Pemberian insentif bagi investor yang masuk di kawasan pedesaan.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang KepSosBud:
- Pemerataan program-program pembangunan di daerah pedesaan dan luar Jawa.
- Keterpaduan program kemiskian pusat dan daerah serta lintas departemen.
- Implementasi SPM di setiap daerah.
- Pengembangan pusat-pusat perekonomian di luar Jawa.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang PolhukHanKam:
- Dilakukannya review terhadap peraturan yang potensial bermasalah dan menghambat kegiatan sosial ekonomi publik.
- Peningkatan partisipasi organisasi pengusaha dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam memantau dan mengevaluasi Perda.
- Peningkatan kapasitas eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur:
- Pembangunan jalan lintas selatan yang terhubung dengan utara.
- Perluasan konektivitas lintas utara dan selatan.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Pemanfaatan ruang pada berbagai kawasan sesuai peruntukan.
- Penyusunan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan perencanaan tata ruang.
- Peningkatan sumber daya dan manajemen perencanaan tata ruang.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Peningkatan pengawasan areal hutan dan penegakan hukum.
- Penataan kembali kawasan hutan dan mengembalikan fungsi status hutan, terutama hutan lindung.
- Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis secara berkelanjutan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN TAHUN 2010

BAB 4
PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN

4.1 Kondisi Saat Ini

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Tingkat kemisikinan di Wilayah Kalimantan masih relatif tinggi. Namun dilihat dari perkembangannya, jumlah dan persentase penduduk miskin setiap provinsi mengalami penurunan, Berdasarkan data tahun 2008 dari BPS, maka jumlah penduduk miskin di Wilayah Kalimantan ada sebanyak 3,4 persen dari keseluruhan penduduk miskin Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Wilayah Kalimantan, maka jumlah penduduk miskin ini mencapai 9 persen dari keseluruhan penduduk di Kalimantan. Beradasarkan penyebarannya, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Pada tahun 2008, pengangguran terbuka tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat masing-masing sebanyak 142.506 jiwa dan 140.561 jiwa, sedangkan angka pengangguran terendah berada di Provinsi Kalimantan tengah yaitu sebanyak 51.620 jiwa.

Gambaran kemiskinan antarprovinsi di Kalimantan tahun 2008 menunjukkan jumlah penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 508,8 ribu jiwa (11,07 persen), diikuti Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 324,8 ribu jiwa (9,51 persen). Jumlah penduduk miskin terkecil tahun 2007 berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 210,3 ribu jiwa (8,71 persen). Jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi Wilayah Kalimantan dari data tahun 2005-2007 cenderung menurun dengan penurunan terbanyak dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat sebesar 45,6 ribu jiwa. Pengecualian terlihat di Provinsi Kalimantan Timur yang justru angka penduduk miskinnya meningkat sebesar 25,7 ribu jiwa, yaitu 299,1 ribu jiwa tahun 2005 menjadi 324,8 ribu jiwa tahun 2007.

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan berbagai isu strategis yang perlu diatasi melalui progam dan kegiatan pembangunan antara lain, *pertama*, ketersediaan dan ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan. *Kedua*, kenaikan harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu. *Ketiga*, kenaikan biaya transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan terjadinya hambatan gelombang laut yang tinggi.

Dalam bidang pendidikan, masih terdapat ketimpangan pencapaian angka melek huruf yang diindikasikan dari angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 97,5 dan Kalimantan Barat sebesar 89,0 persen. Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendidikan menyangkut mahalnya biaya pendidikan, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan rendahnya mutu pendidik. Isu strategis dalam pelayanan pendidikan antara lain adalah (1) optimalisasi mekanisme pembiayan yang ada dengan mengutamakan perhatian terhadap anak murid sekolah dari keluarga miskin, (2) pengelolaan DAK, (3) koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah serta(4) minimbya sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam pelayanan kesehatan, permasalahan utama menyangkut keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit, serta adanya berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Selain itu, permasalahan kesehatan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan gizi terutama Ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Kondisi ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup diwilayah Kalimantan dari tahun 1999-2006 berada di bawah rata-rata AHH nasional, dengan AHH tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 70,8 tahun, dan terendah di Kalimantan Barat sebesar 66 tahun.

Di bidang kebudayaan, Pulau Kalimantan memiliki akar budaya yang kuat dengan berbagai seni tradisional yang relatif masih terpelihara didukung dengan kondisi demografis yang kaya dengan berbagai suku (etnis). Dilihat dari kekayaan seni budaya, Pulau Kalimantan juga memiliki 839 Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang tersebar diberbagai daerah, serta berbagai kekayaan dan keragaman seni budaya tradisional lainya. Namun kondisi geografis yang sulit dengan masih rendahnya akses transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya menjadi kendala dalam mengoptimalkan kualitas pengelolaan seni dan budaya. Selain itu, rendahnya kapasitas fiskal, kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah akibat keterbatasan informasi juga menjadi faktor kendala pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya. Dilain pihak, semakin maraknya kasus pencurian berbagai benda sejarah (purbakala) untuk berbagai kepentingan harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh *stakeholder* terkait.

Terkait dengan pemuda, jumlah pemuda di Pulau Kalimantan sebanyak 47,6 juta atau sekitar 5,9 persen dari total pemuda Indonesia. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, kepadatan jumlah pemuda di Pulau Kalimantan belum tergolong padat. Tingkat partisipasi sekolah pemuda di Pulau Kalimantan masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda sebagian besar tamat sekolah dasar. Sementara tingkat pengangguran terbuka pemuda di Pulau Kalimantan masih tinggi. Propinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah pengangguran terbuka pemuda paling banyak dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Kalimantan dengan jumlah pengangguran terbuka paling sedikit, yaitu sebesar 10,54 persen.

Di bidang olahraga, Propinsi Kalimantan Timur memiliki prestasi olahraga yang dapat dbanggakan. Pada PON ke-XVII tahun 2008, Propinsi Kalimantan Timur meraih peringkat ketiga dengan menyabet 115 medali emas, 111 medali perak dan 115 medali perunggu. Meskipun demikian, prestasi olahraga di Pulau Kalimantan belum merata. Selain itu, pulau Kalimantan memiliki beberapa cabang olahraga unggulan, seperti Angkat Besi/ Angkat Berat, Anggar, Atletik, Dayung, Panahan, Tinju, Gulat, Sepak Takraw, dan Drum Band. Pengembangan prestasi olahraga di Pulau Kalimantan menghadapi kendala masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.

(2) Bidang Ekonomi

Secara umum, struktur perekonomian Pulau Kalimantan di dominasi oleh sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan, kontribusi dalam pembentukan PDRB Pulau Kalimantan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 30,86 persen, selanjutnya sektor industri pengolahan sebesar 27,40 persen, dan sektor pertanian sebesar 12,95 persen. Aktivitas ekonomi untuk sektor pertambangan di

Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sedangkan untuk sektor pertanian terpusat di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

PDRB untuk masing-masing provinsi di Pulau Kalimantan terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarprovinsi, hal ini disebabkan PDRB Kalimantan Timur cukup besar dibandingkan 3 provinsi lainnya. Sedangkan tingkat pendapatan perkapita dengan migas atas dasar harga konstan di Pulau Kalimantan, terlihat adanya ketimpangan PDRB perkapita dengan migas maupun tanpa antarprovinsi, ketimpangan ini disebabkan oleh tingkat perkapita Kalimantan Timur yang jauh lebih tinggi dibandikan terhadap provinsi lainnya. Berdasarkan data PDRB perkapita 2007, PDRB perkapita Kalimantan Timur sekitar Rp. 32.344 ribu, sedangkan untuk provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masing-masing sekitar Rp. 6.284 ribu, Rp. 7.631 ribu, dan Rp. 7.761 ribu. Tingginya PDRB perkapita di Kalimantan Timur sebgaian besar berasal tingginnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (khusunya pertambangan minyak dan gas bumi) dan sektor industri pengolahan. Sedangkan untuk provinsi lainnya potensi pertambangan relatif kecil dan dominan adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Banyaknya sumberdaya bahan tambang dan galian dapat dimaksimalkan dengan memberikan keterampilan teknis dan alih teknologi dalam industri pengolahan, misalnya industri kerajinan dan perhiasan batu-batuan. Selain itu, diperlukan juga pendampingan dan pelatihan teknis untuk menciptakan daya saing baik bagi pasar domestik maupun pasar ekspor. Lebih jauh, diperlukan pula penguatan kembali lembaga koperasi didaerah-daerah, terutama yang memiliki klaster industri unggulan daerah.

Isu strategis bidang ekonomi antara lain terhambatnya investasi sebagai akibat ketidapastian dalam memperoleh ijin usaha, rendahnya produktivitas pertanian, rusaknya infrastruktur pendukung, terbatasnya pasokan energi dan listrik, dan terlambatnya proses pencairan anggaran. Permasalahan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Masalah lain yang terjadi di daerah adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Isu strategis dalam pengembangan ekonomi daerah adalah (1) revitalisasi pertanian secara terpadu, sistematik, dan konsisten; (2) pengembangan sektor dan komoditas keunggulan; (3) diversifikasi kegiatan ekonomi; (3) optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM. Isu yang tidak kalah penting adalah dalam keuangan daerah, terutama dalam efektifitas dan efisiensi anggaran daerah, belum optimalnya anggaran berbasis kinerja, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran di daerah.

(3) Bidang Prasarana

Isu dan permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana di sebagian besar daerah menyangkut rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Sedangkan provinsi yang memiliki permasalahan tentang prasarana listrik, air minum, dan telekomunikasi. Untuk permasalahan yang menyangkut prasarana pengairan dan irigasi, diantaranya termasuk pengendalian masalah banjir dan daerah aliran sungai (DAS).

Prasarana perhubungan darat yang paling penting adalah ketersediaan jalan dan jenis sarana angkutan. Ketersediaan infrastruktur jalan ini akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas/aliran barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketersediaan panjang jalan di Wilayah Kalimantan dibedakan menurut statusnya, terdiri dari: (1) jalan nasional sepanjang 5.706 km yang terdiri dari 2.501,2 km jalan dengan kondisi baik, 1.269,6 km kondisi sedang, 541,9 km kondisi rusak ringan, dan 1.393,2 km kondisi rusak berat; (2) jalan Provinsi sepanjang 2.776 km, yang terdiri dari 662,7 dengan kondisi baik, 844,4 km kondisi sedang, 254,9 km kondisi rusak ringan, dan 1013,9 km kondisi rusak berat; dan (3) jalan Kabupaten/Kota sepanjang 23.466,3 km, yang terdiri dari 5.348,7 dengan kondisi baik, 6.052,9 km kondisi jalan sedang, 7.973,7 km kondisi rusak ringan, dan 4.090,9 km dengan kondisi rusak berat. Jika dirinci jalan yang memiliki kondisi rusak berat pada jalan nasional dan jalan Provinsi terdapat pada Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi rusak berat pada jalan Kabupaten terdapat pada Kalimantan Barat.

Transportasi udara merupakan sarana yang sangat penting di Wilayah Kalimantan, khusunya untuk penggunaan angkutan barang dan penumpang antar provinsi dan antar Wilayah. Untuk menunjang kelancaran transportasi udara, provinsi-provinsi di Kalimantan telah memiliki bandar udara yang cukup memadai. Jumlah bandar udara di Kalimantan sebanyak 27 bandar udara yang tersebar sebanyak 5 bandar udara di Kalimantan Barat, 4 bandar udara di Kalimantan Selatan, 10 bandar udara di Kalimantan Timur, dan 8 bandar udara di Kalimantan Tengah.

Transportasi laut dan sungai sangat penting peranannya dalam menunjang pergerakan penumpang dan barang di Wilayah Kalimantan. Keberadaan transportasi laut dan sungai sangat strategis untuk angkutan barang dan penumpang antar provinsi, antar Wilayah dan juga untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak dapat diakses melalui darat. Untuk menunjang mobilitas angkutan barang antar provinsi, antar wilayah dan bahkan untuk kepentingan ekspor–impor, Wilayah Kalimantan memiliki beberapa pelabuhan utama, yaitu di Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Lingkas Tarakan, Pontianak, Bontang, dan Sanipan. Sedangkan untuk tranportasi antar daerah dalam satu provinsi biasanya menggunakan transportasi sungai dan tersedia pelabuhan-pelabuhan angkutan penumpang dan barang yang kapasitasnya lebih kecil. Alat transportasi laut dan air untuk angkutan barang dan penumpang (lokal) yang sering digunakan adalah perahu tanpa motor, perahu motor tempel, kapal motor dan untuk keperluan jarak yang relatif jauh menggunakan kapal kayu dengan PK yang cukup besar.

Dalam hal ketersediaan listrik, berdasarkan rasio elektrifikasi tahun 2007, provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki rasio elektrifiksi lebih rendah dibandingkan rasio elektrifikasi nasional (57,44), yaitu masing-masing sebesar 45,65 persen dan 44,33 persen, sedangkan untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur memiliki rasio elektrifikasi berada di atas rasio elektrifikasi nasional, yaitu masing-masing sebesar 71,39 persen dan 68,37 persen. Kondisi daerah perdesaan di Kalimantan dapat ditunjukan dengan rasio desa berlistrik, provinsi dengan rasio desa berlistrik tertinggi terdapat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing sebesar 99,70 persen dan 95,60 persen, sedangkan rasio desa berlistrik terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 87,90 dan bahkan berada di bawah rata-rata nasional (93,63 persen)

Isu strategis bidang infrastruktur di wilayah Kalimantan antara lain adalah (1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana jalan antar wilayah dan wilayah perbatasan. (2)

Adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur transportasi terutama daerah-daerah pemekaran wilayah, wilayah pengembangan ekonomi dan daerah terpencil, (3) Masih rendahnya penyediaan transportasi air/sungai untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolir; (4) Masih rendahnya ketersediaan dan persebaran infrastruktur telekomunikasi; (5) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya dan potensi energi yang dimiliki wilayah Kalimantan seperti batubara dalam upaya peningkatan penyediaan energi listrik; (6) Masih minimnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih; (7) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan wilayah; serta (8) Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik (transportasi, pendidikan dan kesehatan) terutama didaerah terpencil dan perbatasan.

(4) Bidang SDA dan LH

Isu dan permasalahan yang paling penting dan perlu untuk segera ditangani di berbagai daerah adalah masalah kehutanan, baik itu menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, maupun kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti kegiatan penambangan, eksploitasi sumberdaya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai juga menyebabkan masalah.

Tingginya konversi lahan sawah juga berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi dari nilai kualitasnya, yaitu lahan sawah dengan kesuburan tinggi, di daerah yang dekat dengan konsentrasi penduduk akan kalah bersaing dengan keuntungan lokasinya. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah.

Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya energi (batu bara, gas alam, minyak bumi dan panas bumi dan air) yang belum termanfaatkan secara optimal. Lahan terbuka hijau yang tersedia terus turun seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi. Pulau Kalimantan memiliki kawasan lindung terluas di Indonesia dengan luas 6.412 ribu hektar (47 persen) total kawasan lindung di Indomesia Memiliki kawasan suaka alam dan pelestarian alam darat dan perairan yang cukup luas dan kaya dengan kenekaragaman hayati (flora dan fauna). Memiliki potensi sumberdaya lahan sesuai untuk pengembangan pertanian sebesar 34 persen dari lahan sesuai pertanian di Indonesia. Luas lahan kritis sebesar 27.918.049 hektar atau 35,8 persen dari total lahan kritis di Indonesia. Disamping itu, laju deforestasi yang meningkat juga berdampak semakin tingginya tingkat kerusakan sumberdaya hayati dan non hayati, serta meningkatnya kerusakan DAS dalam kondisi kritis yang mengancam terhadap kelangkaan sumber daya air bersih.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah (1) Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan; (2) Belum optimalnya pemanfaatan energi batu bara dari yang tersedia sebanyak 3.389,29 juta ton dan gas bumi. (3) Pemanfaatan lahan potensial yang belum optimal untuk pengembangan pertanian sebesar 34 persen dari total luas lahan pertanian nasional; (4) Belum optimalnya pemanfaatan keanekaragan hayati untuk sumber penghasilan masyarakat (bahan obat-obatan, bahan serat, sumber energi, dll); (5) Terjadinya penurunan luasan hutan (deforestasi) hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan yang mencapai sekitar 1.212,63 ribu ha per tahun pada periode tahun 1997-

2000 dari luas hutan dipulau Kalimantan sekitar 40.775,83 ribu hektar; (6) Meningkatnya penyusutan luas hutan sekitar 1,6 juta ha/tahun (data tahun 2001) di seluruh fungsi hutan terutama hutan produksi yang dialihfungsikan untuk sektor perkebunan, transmigrasi, pertambangan akibat kebakaran hutan serta pembalakan illegal; (7) Terjadinya peningkatan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kalimantan.

(5) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Dalam bidang politik dan pertahanan keamanan, terdapat dua masalah utama yang dihadapi oleh wilayah Kalimantan, yakni permasalahan terkait dengan daerah perbatasan serta permasalahan yang menyangkut konflik horisontal. Meskipun kedua masalah ini tidak terjadi di semua wilayah provinsi di kalimantan, namun demikian permasalahan ini harus menjadi perhatian utama dalam upaya pengembangan wilayah Kalimantan secara terintegrasi. Perhatian yang tidak memadai akan kedua permasalahan ini, akan menyebabkan kedua masalah tersebut menjadi hal yang mengganggu dalam upaya pengembangan kalimantan. Padahal kedua permasalahan tersebut memiliki nilai strategis baik dilihat dari potensi positif maupun negatif yang dimilikinya.

Dalam hal permasalahan daerah perbatasan misalnya, wilayah ini memanjang dari Kalimantan Barat (dengan garis batas sepanjang ± 870 km) hingga Kalimantan Timur (dengan garis batas sepanjang ± 1200 km). Secara keseluruhan, dengan luas kawasan perbatasan mencapai ± 3200 km2, kawasan ini mengandung potensi konflik dengan negara tetangga serta kerawanan sosial yang tinggi – seperti penyelundupan – akibat belum ditanganinya kawasan ini secara optimal sebagai ‘kawasan depan’ atau *gateway* NKRI menuju lokasi pasar regional maupun global.

Selama ini dapat dikatakan bahwa penanganan kawasan perbatasan antarnegara, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut belum diatur dan diarahkan melalui kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat nasional dan menyeluruh. Penanganan beberapa kasus atau masalah antara kedua negara yang terjadi selama ini dilakukan melalui pembicaraan bilateral oleh instansi terkait. Namun untuk pengembangan kawasan perbatasan yang melibatkan semua *stakeholders* (pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha), masih belum terkoordinasi. Masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai dengan kebijakan sektor masing-masing.

Padahal, mengingat potensi yang dimilikinya baik secara ekonomi maupun keamanan, kawasan perbatasan harus dikembangkan dengan arahan yang didasarkan pada faktor-faktor lingkungan dominan yang strategis dan diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan kawasan perbatasan dimasa yang akan datang sehingga diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang yang tercipta akibat adanya perubahan internal, regional dan global.

Sejumlah faktor penentu baik internal maupun inetranl harus dipertimbangkan secara matang dalam pengembangan kawasan perbatasan, seperti pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten; konflik horisontal dan vertikal serta fanatisme kedaerahan yang mengarah pada gerakan separatisme; kesepakatan perdagangan bebas antarnegara di kawasan Asia-Pasifik (APEC); kerjasama ekonomi sub-regional; perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat; perkembangan teknologi transportasi yang memicu pesatnya perpindahan orang dan barang

lintas negara; serta kejahatan terorganisir lintas negara (terorisme internasional, penyelundupan, perdagangan manusia).

Menyangkut permasalahan konflik dapat terlihat bahwa konflik yang terjadi merupakan kerusuhan komunal atau disebut juga konflik horizontal. Kerusuhan ini telah menimbulkan masalah diantaranya: politik keamanan, sosial, ekonomi, dan psikologis bagi pihak-pihak yang bertikai, khususnya keluarga dan anak-anak. Konflik akibat kerusuhan horizontal ini telah mengakibatkan segregasi (fisik) dan disintegrasi (sosial) pada kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai. Sementara itu, pola penanganan konflik sebagian besar telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun baru pada tingkatan tertentu. Untuk menghindari berulangnya kejadian sejenis yang dapat menghambat upaya pengembangan wilayah Kaliamantan maka pemerintah daerah di Kalimantan harus mampu menjamin bagi terciptanya keamanan, dan terwujudnya rekonsiliasi dan antar pihak-pihak yang bertikai. Pemerintah juga harus mampu melakukan upaya-upaya agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, menjaga agar tidak timbul kembali kerusuhan melalui kerjasama antar masyarakat. Karenanya, pemerintah juga perlu menstimulasi perubahan dari bawah (*change from below*) melalui kerjasama dengan berbagai *change agent profesional* untuk bekerja bersama, membentuk sebuah tim, bekerja secara simultan melakukan berbagai aktivitas dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, terkait pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya.

Sebagaimana halnya di wilayah lain, pada tahun 2010 wilayah Kalimantan akan juga melaksanakan pilkada di beberapa provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan pendidikan pemilih sangat penting untuk meningkatkan kualitas pilkada agar lebih baik dibandingkan dengan pilkada tahun 2005.

Berkenaan dengan pemenuhan hak-hak politik, wilayah Kalimantan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam proses penyusunan kebijakan publik dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran terkait hak dan kewajiban politik rakyat, serta disatu sisi mendorong aparatur pemerintah untuk memahami dan melaksanakan demokrasi secara lebih nyata merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan pada tahun 2010 mendatang.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan dalam kurun waktu 2010-2014 antara lain adalah:

(1) Meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Kalimantan
(2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di Kalimantan
(3) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut dan udara.
(4) Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).
(5) Menigkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Pulau Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar.
(6) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur dengan wilayah Kalimantan bagian Barat , Tengah dan Selatan

(7) Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha.
(8) Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran.
(9) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
(10) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga.

Sasaran pengembangan wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya standar hidup masyarakat Pulau Kalimantan

a. Meningkatnya pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Barat sekitar Rp.6,763.97 ribu, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar Rp.8,244.58 ribu, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar Rp.8,224.03 ribu, dan Provinsi Kalimantan Timur sekitar Rp.32,103.57 ribu.

b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,92 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,85 persen, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,24 persen dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,94 persen

c. Menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 10,83 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 9,85 persen, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 6,56 persen dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,65 persen.

d. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,95 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,08 persen, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,37 persen, dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 8,64 persen.

e. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,06 tahun, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 8,28 tahun, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,24 tahun.

f. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 29,87 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 25,04 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 34,70 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Kalimantan Timur sebesar 20,06 per 1000 kelahiran hidup.

(2) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut dan udara.
(3) Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).
(4) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Pulau Kalimantan terhadap pelayanan publik dasar.
(5) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur dengan wilayah Kalimantan bagian Barat , Tengah dan Selatan
(6) Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha.
(7) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.
(8) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

(9) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional

4.3: Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan, pengembangaan wilayah Kalimantan diarahkan untuk: (1) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA; (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup; (7) mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan. (8) Meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (9) Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (10) Memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (11) Meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (12) Meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (13) Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Kalimantan ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKN di Pulau Kalimantan diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; (2) mendorong pengembangan kota Palangka Raya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder. Pengembangan PKW di Pulau Kalimantan diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau, Sampit, Kuala Kapuas, Tanjung Redeb, Sangata, Tanjung Selor, Malinau, Nunukan, dan Tenggarong dan sebagai pusat pelayanan sekunder; (2) mendorong pengembangan kota Mempawah, Putussibau, Entikong, Pangkalan Bun, Buntok, Muarateweh, Amuntai, Martapura, Marabahan, Kotabaru, Tanlumbis, Sungai Nyamuk, Sangasanga, Tanah Grogot, dan Sendawar, dan sebagai pusat pelayanan tersier. Pengembangan PKL di Pulau Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Kalimantan. Pengembangan PKSN di Pulau Kalimantan terutama kawasan perbatasan negara diarahkan untuk mendorong

pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai.

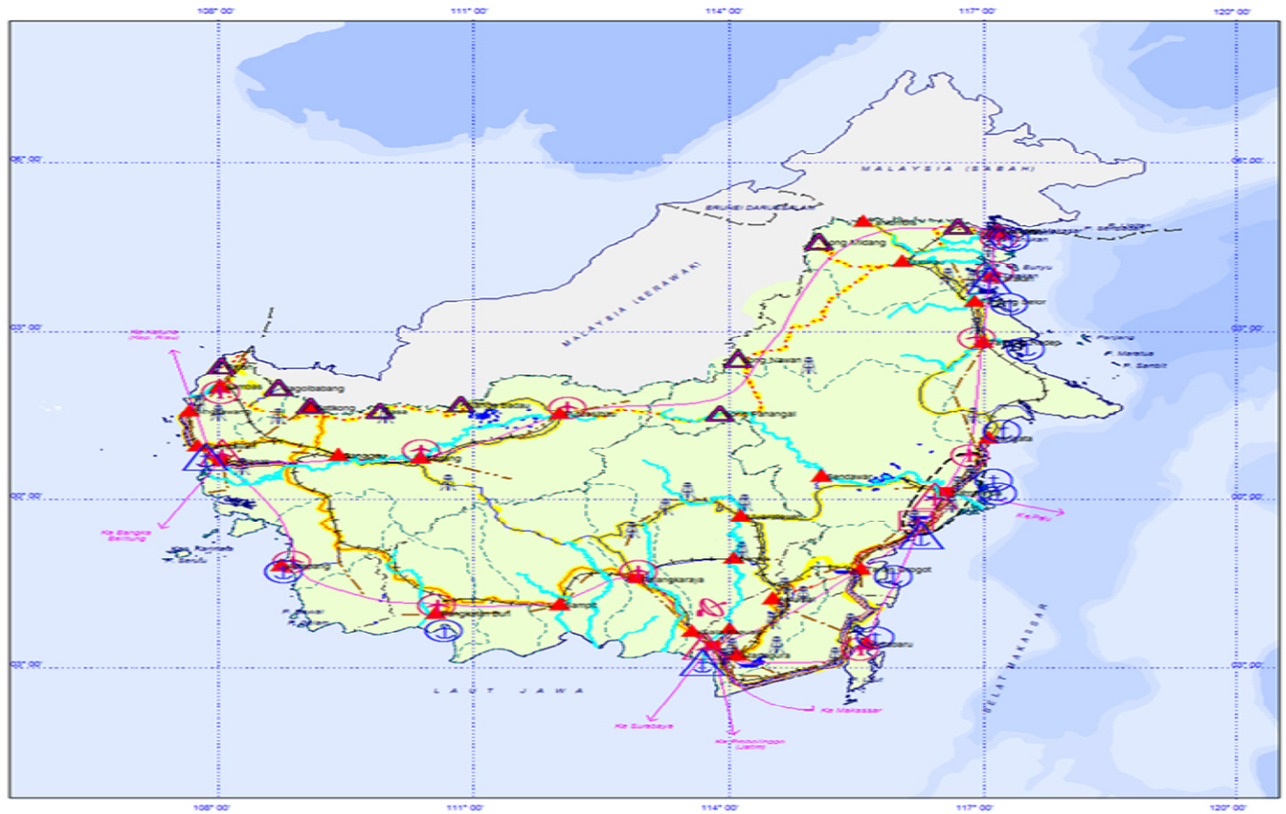

GAMBAR 4.1
PETA RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN

Rencana Tata Ruang Pulau:

- Memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemnfaatan sumbe daya.
- Mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia di Serawak dan Sabah dalam kerangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA.
- Mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar negara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan.
- Meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah.
- Mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan.
- Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan.
- Mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Kalimantan.

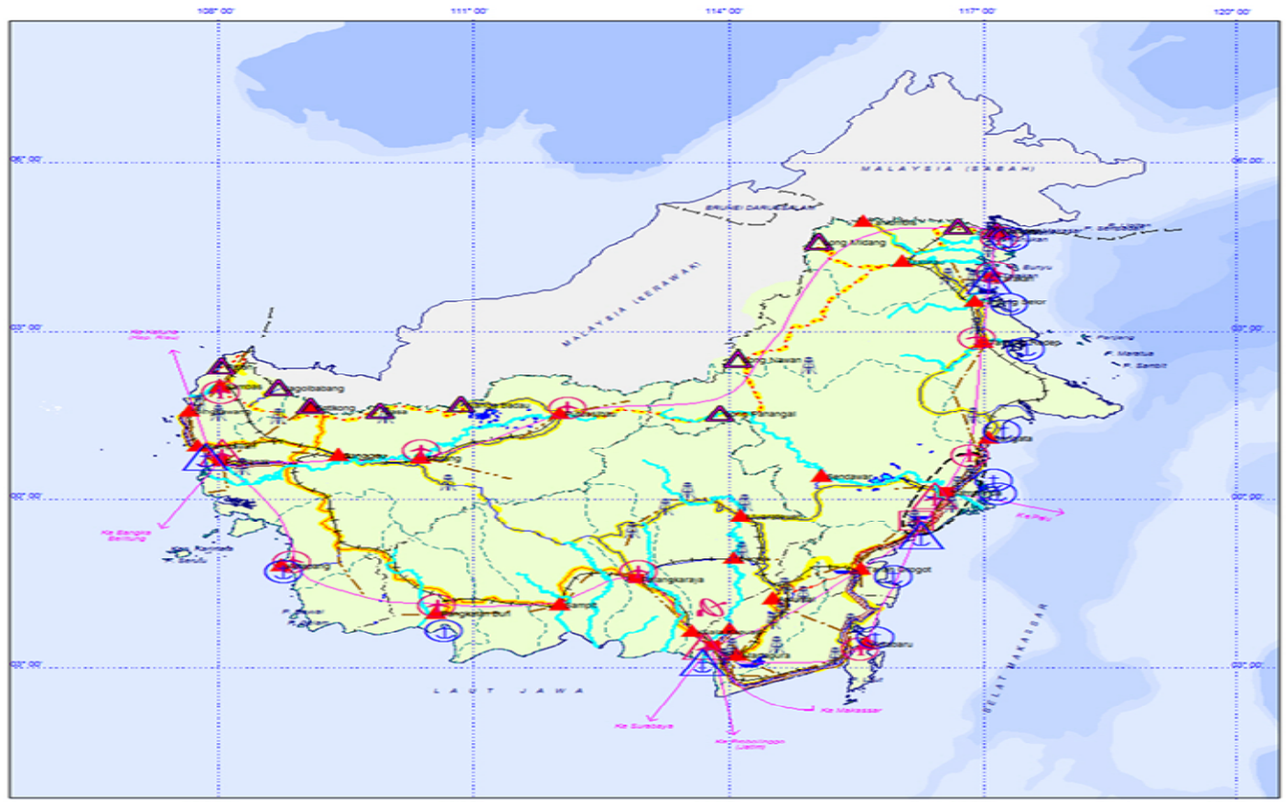

GAMBAR 4.2
ISU STRATEGIS PULAU KALIMANTAN

Isu Strategis Bidang Ekonomi:
- Investasi yang masih rendah, industrialisasi yang terbatas, interaksi antar wilayah belum berkembang, perekonomian masih terpusat di kota-kota besar, dan banyaknya aktivitas ekonomi yang sifatnya enclave (tidak berdampak terhadap pengembangan ekonomi lokal) dan menimbulkan kebocoran wilayah;

Isu Strategis Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan:
- Kualitas Sumber Daya Manusia di Wilayah Kalimantan yang masih kurang untuk membangun dan mengelola Sumber Daya yang dimiliki
- Masih rendahnya pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Isu Strategis Bidang PolhukHanKam:
- Disparitas pembangunan yang sedemikian tinggi antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga.
- Masih adanya pertikaian antar warga dan suku.

Isu Strategis Bidang Infrastruktur:
- Masih minimnya sarana dan prasarana infrastruktur untuk mempermudah interaksi antar wilayah-wilayah di Kalimantan

Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Banyaknya status penguasaan lahan di wilayah Kalimantan yang belum jelas serta belum serasinya antara RTRW Prov dengan RTRW di Kabupaten dan Kota

Isu Strategi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Kerusakan dan degradasi (penurunan) lingkungan di wilayah kalimantan yang disebabkan oleh alam dan manusia.
- Masih tingginya illegal fishing.

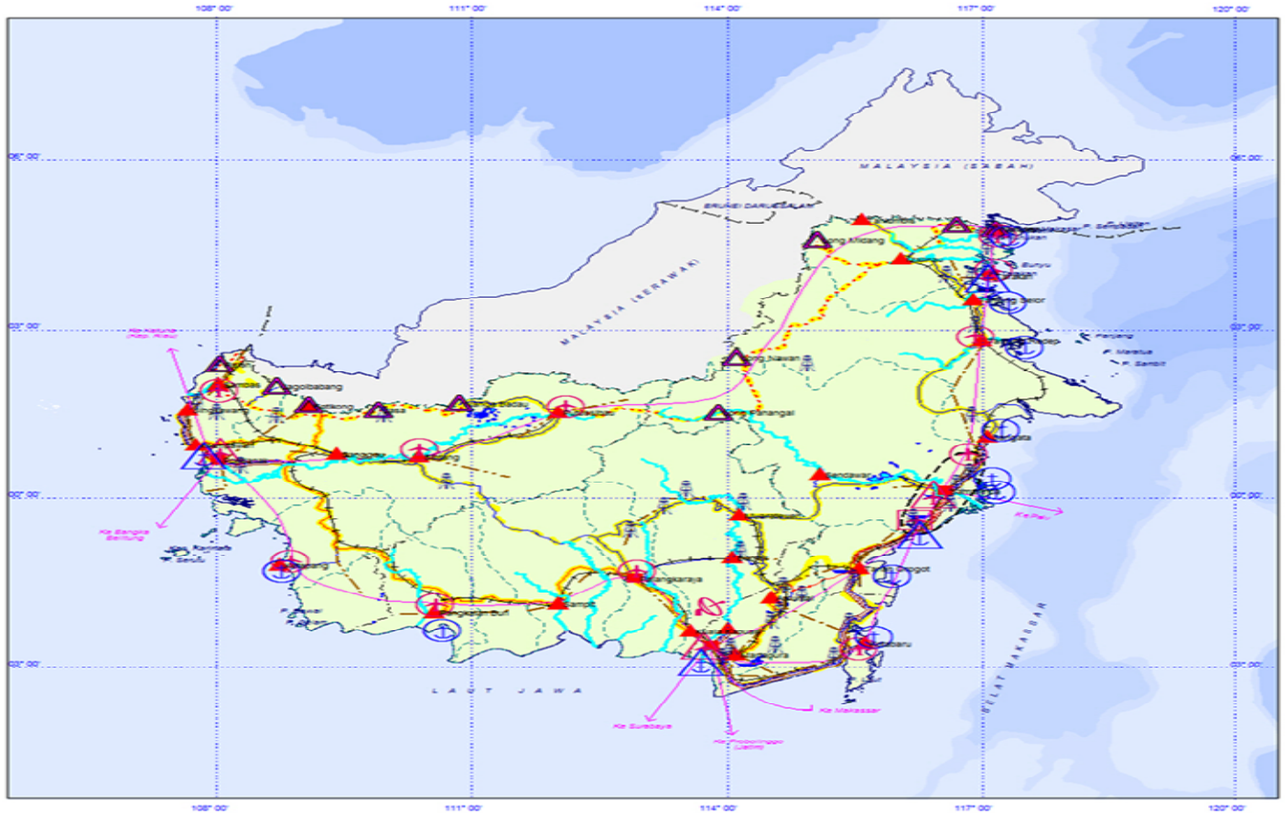

GAMBAR 4.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PULAU KALIMANTAN

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi :
- Kerjasama langsung dengan produsen barang-barang konsumsi
- Mengembangkan industri-industri pengadaan barang konsumsi di Kalimantan

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang KepSosBud:
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat desa
- Peningkatan pelayan kesehatan di tingkat desa
- Pendidikan murah/gratis untuk masyarakat miskin.
- Pengembangan ketrampilan teknis
- Kerjasama denagn perusahaan yang memiliki dana CSR

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang PolHukHanKam:
- Peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan sebagai wilayah tertinggal dan terisolir
- Percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonmi dan pintu gerbang internasional
- Rekonsiliasi antar pihak yang bertikai

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur:
- Mempercepat perubahan iklim investasi
- Peningkatan sarana-prasarana dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah dan swasta atau swasta melalui dana CSR

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Peninjauan kembali sistem kepemilikan lahan di wilayah Kalimantan
- Peningkatan komunikasi antar sektor dan antar instansi baik di tingkat kab/kota maupun provinsi

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang SDA dan LH:
- Penegakan hukum yang adil terhadap para pelaku penambang ilegal, ilegal logging dan ilegal fishing
- Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengawsan penggunaan SDA
- Pembentukan daerah konservasi SDA dan lingkungan berbasis masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 5
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI TAHUN 2010

BAB 5
PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI

5.1. Kondisi Saat Ini

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di wilayah Sulawesi. Tingkat kemisikinan di Wilayah Sulawesi masih relatif tinggi dan secara umum menunjukkan persentase di atas rata-rata nasional, dengan penyebaran antarprovinsi, sebagian besar berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1,03 juta jiwa, dan berdasarkan persentasenya sebesar 24,88 persen berada di Provinsi Gorontalo. Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan berbagai isu strategis yang perlu diatasi melalui prorgam dan kegiatan pembangunan antara lain, pertama, ketersediaan dan ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan. Kedua, kenaikan harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu. Ketiga, kenaikan biaya transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan terjadinya hambatan gelombang laut yang tinggi.

Jumlah penduduk di Pulau Sulawesi sekitar 16,3 juta jiwa atau 7,2 persen dari total penduduk nasional. Kepadatan penduduk di Pulau Sulawesi sekitar 87 jiwa per Km2. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di wilayah Sulawesi, yaitu sekitar 7,6 juta jiwa (46,59 persen), dan dengan kepadatan sebesar 163 jiwa perKm2. Komposisi penduduk Sulawesi berdasarkan tipe daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya peningkatan proporsi penduduk perkotaan di seluruh provinsi. Penduduk perkotaan selama kurun waktu 2000-2005 meningkat antara 1,65-6,72 persen di tiap-tiap provinsi. Tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Jika dilihat TFR per provinsi di Pulau Sulawesi, Propinsi Gorontalo, mempunyai TFR sama dengan nasional sebesar 2,6. Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan TFR-nya masing-masing 2,8. Sedangkan tiga provinsi lainnya mempunyai TFR lebih dari 3, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing 3,3; serta Sulawesi Barat sebesar 3,5.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di wilayah Sulawesi, yaitu sebanyak 7.606.500 jiwa (46,59 persen), dan dengan kepadatan sebesar 163 jiwa/Km2. Komposisi penduduk Sulawesi berdasarkan tipe daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya peningkatan proporsi penduduk perkotaan di seluruh Provinsi. Penduduk perkotaan selama kurun waktu 2000-2005 meningkat antara 1,65-6,72 persen di tiap-tiap provinsi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan, namun masih memiliki disparitas antarprovinsi cukup tinggi sebesar 15,9 persen untuk AMH, dan sebesar 2,8 tahun untuk RLS. Permasalahan ini menyangkut mahalnya biaya pendidikan, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan rendahnya mutu pendidik. Isu strategis dalam pelayanan pendidikan antara lain adalah

(1) optimalisasi mekanisme pembiayan yang ada dengan mengutamakan perhatian terhadap anak murid sekolah dari keluarga miskin, (2) pengelolaan DAK, (3) koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam pelayanan kesehatan, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan indikator AHH, AKB, dan status gizi buruk/kurang dibanding periode waktu sebelumnya, namun masih lebih buruk dibanding rata-rata nasional. Hal ini disebabkan masih belum meratanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Permasalahan utama di bidang kesehatan adalah menyangkut keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit, serta adanya berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Selain itu, permasalahan kesehatan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan gizi terutama Ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

Di bidang kebudayaan, seiring dengan pesatnya kemajuan pembangunan di berbagai sektor dewasa ini yang diikuti oleh kemajuan teknologikomunikasi dan informasi akibat dari globalisasi telah menciptakan interaksi antara budaya tradisional dan budaya moderen. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada kualitas pengelolaan seni dan budaya relatif labih baik karena tingginya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat. Kebudayaan telah dipahami sebagai salah satu sektor strategis dalam mendapatkan devisa dari kemasan kekayaan dan keragaman seni budaya dengan pariwisata. Dilihat dari potensi kekayaan seni budaya, Pulau Sulawesi memiliki 934 Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang tersebar di berbagai daerah, 2 kawasan yang didominasi sebagai warisan dunia (Kawasan Permukiman Tradisional Tanah Toraja dan Kawasan Gua-Gua Prasejarah Maros Pangkep), serta berbagai kekayaan dan keragaman seni budaya tradisional lainnya. Namun masih terdapat perkembangan orientasi tata nilai dan perilaku masyarakat Jawa-Bali, namun disisi lain dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti munculnya identitas dan perilaku baru yang tidak sesuai dengan nilai, tradisi dan budaya lokal-tradisional. Permasalahn lainnya adalah belum optimalnya kualitas pengelolaan seni dan budaya yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas fiskal, kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah. Selain itu berbagai kasus pencurian dan penyeludupan berbagai benda sejarah (purbakala) yang semamakin marak perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh *stakeholder* terkait.

Terkait dengan pemuda, jumlah pemuda di Pulau Sulawesi terbesar ketiga setelah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu sebesar 5.891.705 jiwa atau sekitar 7,3 persen. Tingkat partisipasi pendidikan di Pulau Sulawesi tergolong masih rendah. Berdasarkan data Susenas tahun 2006, pemuda di Pulau Sulawesi masih banyak yang tidak punya ijazah. Adapun tingkat pengangguran terbuka pemuda di Pulau Sulawesi tergolong tinggi. Beberapa Propinsi dengan tingkat pengangguran tinggi terdapat pada Propinsi Sulawesi Utara (25,48 persen) dan Propinsi Sulawesi Selatan (20,34 persen). Sedangkan Propinsi dengan tingkat pengangguran terendah terdapat pada Propinsi Sulawesi Barat (10,81 persen).

Di bidang olahraga, prestasi olahraga di Pulau Sulawesi tidak merata. Ada beberapa propinsi yang memiliki prestasi olahraga bagus seperti Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Utara, tapi ada juga yang memiliki prestasi olahraga yang kurang

bagus seperti Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Gorontalo. Selain itu pulau sulawesi memiliki beberapa cabang olahraga unggulan daerah, seperti pada Propinsi Selatan memiliki 10 cabang olahraga unggulan, yaitu : Panjat Tebing, Karate, Sepak Takraw, Pencak Silat,Tinju, Anggar, Atletik, Dayung, Layar, dan Renang Indah. Sementara Propinsi Sulawesi Utara memiliki 6 cabang olahraga, yaitu Atletik, Pencak Silat, Angga, Tinju, Bridge, Dan Terjun Payung.

(2) Bidang Ekonomi

Kontribusi PDRB Wilayah Sulawesi pada tahun 2007 secara nasional hanya berkontribusi 4,1 persen terhadap PDB Nasional. Provinsi Sulawesi Selatan menyumbangkan PDRB paling besar di Wilayah Sulawesi yaituRp.69.271,92 milyar atau 48 persen PRDB total di Wilayah Sulawesi. Sementara itu, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2004-2007, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,6 persen menjadi 7,4 persen pada tahun 2007, dan sektor primer memberikan kontribusi 22 persen sampai 53 persen PDRB atau sekitar 15 persen dari rata-rata PDRB nasional. Kesenjangan pendapatan perkapita juga terjadi di wilayah Sulawesi, berdasarkan PDRB per Kapita (2007), Sulawesi Utara memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 11,09 juta, dan terendah di Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 4,96 juta

Sulawesi Selatan memproduksi 63 persen padi di Sulawesi, dan mengekspor beras ke provinsi lainnya di Sulawesi dan Jawa, sementara Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah masih mengimpor beras dari luar. Dari sektor perkebunan, Komoditas Kakao di Pulau Sulawesi mamasok Sekitar 71 persen dari produk nasional, dan memberikan kontribusi pendapatan daerah(PAD) terbesar khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah yang menyumbang 88 persen pendapatan total dari ekspor pertanian dan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyumbangkan 38 persen. Produksi Komoditas jagung di Pulau Sulawesi hampir 50 persen berasal dari Provinsi Gorontalo dan memberikan kontribusi sekitar55 persen dari pendapatan ekspor total. Sementara itu, produksi perikanan di Sulawesi mencapai 18 persen dari total produksi nasional, dan komoditas perikanan yang dapat dikembangkan dan memegang peranan penting dalam pendapatan ekspor di Sulawesi antara lain Ikan Tongkol, Kerapu, Tuna, udang, rumput laut, teripang, dan mutiara juga. Potensi kelautan yang dimiliki Sulawesi juga dapat dimaksimalkan pada pemberian nilai lebih pada industri pengolahan perikanan. Sektor ekonomi yang memberikan dampak cukup kuat terhadap aktivitas perekonomian disektor hulu, antara lain adalah: sekor industri makanan dan minuman, sekor bangunan, sector industri pulp dan kertas, sector perdagangan, sector angkutan udara, dan industri kelapa sawit. Sulawesi sebagai pulau yang kaya akan hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kakao berpotensi besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam membantu usaha kecil perlu dilakukan penguatan kelembagaan koperasi yang dapat menjadi wadah dalam mempermudah masyarakat memperoleh berbagai akses yang diperlukan, terutama pembiayaan. Demikian pula, perlu dipertimbangkan realisasi dari pembangunan sistem pendukung "resi gudang".Sementara itu, dari segi pariwisata, dengan melihat potensi bahari dan pariwisata yang besar, perlu dilakukan pelatuhan kewirausahaan dan jasa sebagai fokus utama.

Kontribusi dana perimbangan di wilayah Sulawesi masih menunjukkan persentase cukup tinggi (di atas 50 persen), kecuali di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkisar antara 38,7 persen – 45,8 persen, dan kontribusi dana perimbangan tertinggi adalah di Provinsi Gorontalo sebesar 88,3 persen dari total APBD. Derajat desentralisasi antarprovinsi di wilayah Sulawesi belum menunjukkan peningkatan tingkat kemandirian

selama periode 2002-2006. Tingkat kemandirian tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan terendah berada di Provinsi Gorontalo. Tingkat kebutuhan fiskal untuk pelayanan publik berdasarkan indeks pelayanan publik per kapita tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Utara. Kapasitas fiskal berdasarkan ukuran besarnya potensi penerimaan PAD suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya, tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara dan terendah di Provinsi Gorontalo.

Isu Strategis Bidang Ekonomi di wilayah Sulawesi adalah (1) Masih terjadi kesenjangan perekonomian antarprovinsi di wilayah Sulawesi; (2)Belum optimalnya pengembangan potensi industri pengolahan dan jasa finansial; (3) Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam peningkatan PAD; (4) Diperlukan revitalisasi sebagai lumbung pangan nasional; (5) Masih rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi produtif; (6) Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan di beberapa wilayah potensial.

Isu strategis bidang ekonomi lainnya adalah terhambatnya investasi sebagai akibat ketidapastian dalam memperoleh ijin usaha, rendahnya produktivitas pertanian, rusaknya infrastruktur pendukung, terbatasnya pasokan energi dan listrik, dan terlambatnya proses pencairan anggaran. Permasalahan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Masalah lain yang terjadi di daerah adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Isu strategis dalam pengembangan ekonomi daerah adalah (1) revitalisasi pertanian secara terpadu, sistematik, dan konsisten; (2) pengembangan sektor dan komoditas keunggulan; (3) diversifikasi kegiatan ekonomi; (3) optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM. Isu yang tidak kalah penting adalah dalam keuangan daerah, terutama dalam efektifitas dan efisiensi anggaran daerah, belum optimalnya anggaran berbasis kinerja, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran di daerah.

(3) Bidang Sarana dan Prasarana

Isu dan permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana di sebagian besar daerah menyangkut rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Sedangkan provinsi yang memiliki permasalahan tentang prasarana listrik, air minum, dan telekomunikasi. Untuk permasalahan yang menyangkut prasarana pengairan dan irigasi, diantaranya termasuk pengendalian masalah banjir dan daerah aliran sungai (DAS).

Sarana perhubungan di wilayah Sulawesi terdiri dari sarana transportasi darat. transportasi udara dan transportasi laut.Aspek transportasi antar Provinsi di wilayah Sulawesi cukup memadai dengan adanya dua bandara bertaraf internasional, yaitu Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, disamping empat Provinsi lainnya masing-masing terdapat Bandar udara. Jalur transportasi darat juga sudah berupa jalan sudah cukup memadai yang menghubungkan antara Provinsi di Sulawesi.Sementara sarana laut juga cukup memadai dengan adanya pelabuhan barang dan penumpang di tiap Provinsi.

Prasarana perhubungan darat yang paling penting adalah ketersediaan jalan dan sarana angkutan. Ketersediaan infrastruktur jalan ini akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas/aliran barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketersediaan panjang jalan di Wilayah Sulawesi dibedakan menurut statusnya, yaitu terdiri dari: (1) jalan nasional sepanjang 7.091,5 km yang terdiri dari 3.669,2 km dengan kondisi baik. 2.123,2 km kondisi sedang. 610,5 km kondisi rusak ringan, dan 658,6 km kondisi rusak berat; (2) jalan Provinsi sepanjang 3.993,1 km; yang terdiri dari 552,0 dengan kondisi baik; 1.345,4 km kondisi sedang; 792,3 km kondisi rusak ringan; dan 1.303,3 km kondisi rusak berat; dan (3) jalan Kabupaten/Kota sepanjang 33.169,1 km; yang terdiri dari 6.974.6 dengan kondisi baik; 7.154,4 km kondisi jalan sedang. 10.651,7 km kondisi rusak ringan; dan 8.388,4 km dengan kondisi rusak berat.

Transportasi udara merupakan sarana yang sangat penting di Wilayah Sulawesi, khususnya untuk penggunaan angkutan barang dan penumpang antar Provinsi dan antar pulau. Untuk menunjang perhubungan antar pulau dan antar Provinsi, Wilayah Sulawesi memiliki bandar udara yang cukup memadai. Jumlah bandar udara di Sulawesi sebanyak 24 bandar udara yang tersebar 1 bandar udara di Gorontalo, 7 bandar udara di Sulawesi Selatan, 1 bandar udara di Sulawesi Barat, 4 bandar udara di Sulawesi Tengah, 3 bandar udara di Sulawesi Tenggara, 4 bandar udara di Sulawesi Utara.Bandar udara di Sulawesi yang sering dipergunakan untuk mobilitas angkutan barang dan penumpang antar provinsi-antar pulau adalah bandar udara Djalaludin (Gorontalo), bandar udara Hasanudin (Sulawesi Selatan), bandar udara Juwita (Sulawesi Tengah), dan bandar udara Wolter Monginsidi (Sulawesi Tenggara), dan bandar udara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara. Transportasi laut sangat penting peranannya dalam menunjang pergerakan penumpang dan barang di Wilayah Sulawesi. Keberadaan transportasi laut sangat strategis untuk angkutan barang dan penumpang antar provinsi, antar pulau dan juga untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak dapat diakses melalui darat. Untuk menunjang mobilitas angkutan barang antar provinsi, antar pulau dan bahkan untuk kepentingan ekspor – impor. Sedangkan untuk tranportasi antar daerah dalam satu provinsi biasanya menggunakan transportasi sungai dan tersedia pelabuhan-pelabuhan angkutan penumpang dan barang yang kapasitasnya lebih kecil. Melihat kondisi geografis Sulawesi, maka kebutuhan akan sarana transportasi udara dan laut sangat dibutuhkan.

Kebutuhan tenaga listrik untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat dilayani oleh Kelistrikan Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang pasokan tenaga listriknya diperoleh dari satu sistem interkoneksi jaringan transmisi. Rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk masing-masing provinsi adalah sebagai berikut Provinsi Sulawesi Utara 66,62 persen; Provinsi Sulawesi Tengah 47,64 persen; Provinsi Gorontalo 48,70 persen; Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat 54,90 persen; Provinsi Sulawesi Tenggara 38,21 persen.

(4) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Isu dan permasalahan yang paling penting dan perlu untuk segera ditangani di berbagai daerah adalah masalah kehutanan, baik itu menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, maupun kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti kegiatan

penambangan, eksploitasi sumberdaya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai juga menyebabkan masalah.

Tingginya konversi lahan sawah juga berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi dari nilai kualitasnya, yaitu lahan sawah dengan kesuburan tinggi, di daerah yang dekat dengan konsentrasi penduduk akan kalah bersaing dengan keuntungan lokasinya. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah.

Masalah air di Indonesia ditandai dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali sehingga luas lahan kritis semakin bertambah.

Penyedotan air tanah terutama di beberapa kota besar di Indonesia yang melebihi kemampuan alami untuk mengisinya kembali makin tidak terkendali sejalan dengan perkembangan permukiman dan pertumbuhan kegiatan ekonomi penduduk yang pada akhirnya menyebabkan permukaan tanah turun, muka air tanah menurun, dan terjadinya intrusi air laut. Penurunan muka air tanah tersebut telah menyebabkan turunnya permukaan tanah dengan laju 2,3 sampai dengan 34 centimeter per tahun sehingga meningkatkan kerentanan wilayah-wilayah tersebut terhadap banjir.

Laju kerusakan semakin parah dan tidak terkendali pada era otonomi daerah terutama disebabkan oleh aktivitas penebangan liar, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan. Sementara itu, kemampuan rehabilitasi hutan hanya mencapai 400-500 Ha/tahun. Kondisi ini merupakan isu strategis bidang penataan ruang, dan perlu penanganan serius secara berkelanjutan.

Pulau Sulawesi memiliki wilayah seluas 193.847,11 Km2 yang terbagi menjadi beberapa fungsi penggunaan lahan. Berdasarkan tabel 3.34 diketahui bahwa luas total penggunaan lahan di Pulau Sulawesi adalah sebesar 9,347 juta Hektar atau 48,2 persen dari luas daratan secara keseluruhan. Luas penggunaan lahan tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsi penggunaan lahan, antara lain sawah; pekarangan; tegal/kebun; ladang/huma; padang rumput; rawa; tambak; kolam; lahan yang sementara tidak diusahakan; lahan tanaman kayu/hutan rakyat; dan perkebunan. Luas penggunaan lahan di Pulau Sulawesi mencakup 12,5 persen dari luas penggunaan lahan di seluruh Indonesia yang mencapai 74,7 juta Ha.

Penggunaan lahan di Pulau Sulawesi sebagian besar merupakan fungsi perkebunan yang mencapai 2,5 juta Ha atau 26.8 persen dari total luas penggunaan lahan.Fungsi penggunaan lahan kedua yang terbesar adalah tegal/kebun dengan luas mencapai 1,4 juta Ha, diikuti oleh fungsi penggunaan lahan yang sementara tidak diusahakan dan hutan rakyat masing-masing seluas 1,24 Ha dan 1,27 Ha. Penggunaan lahan fungsi perkebunan yang paling luas terletak di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 35,55 persen dari luas perkebunan di Pulau Sulawesi sedangkan luas perkebunan yang terkecil terletak di Provinsi Gorontalo (3,81 persen). Hal ini dipengaruhi oleh sejarah terbentuknya Provinsi Gorontalo yang merupakan pemekaran dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001 dan pesatnya perkembangan di provinsi tersebut.

Penggunaan lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sawah di Pulau Sulawesi menduduki peringkat kelima dengan luas 830 ribu Ha. Penggunaan lahan sawah terluas terletak di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 66,02 persen dari luas sawah di seluruh pulau. Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan provinsi dengan penggunaan lahan tegal/kebun terluas di Pulau Sulawesi (44,35 persen).Selain itu, penggunaan lahan sebagai fungsi lahan yang sementara tidak diusahakan dan lahan tanaman kayu/hutan rakyat dengan persentase tertinggi masing-masing 39,85 persen dan 38,72 persen juga terletak di Provinsi Sulawesi Selatan

Seperti halnya wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi juga sangat kaya dengan sumber daya alam baik itu berupa hutan, tambang maupun perikanan. Namun demikian eksploitasi yang belebihan mulai menimbulkan berbagai masalah dan gangguan berupa bencana alam. Konversi hutan terjadi secara besar-besaran baik itu karena pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, maupun karena kebakaran hutan dan lahan. Karena itu bencana banjir dan longsor juga menjadi peristiwa yang kemudian sering menimpa wilayah Kalimantan. Hilangnya sumber daya alam dan meningkatnya gangguan alam karena kerusakan lingkungan juga akan berdampak negatif terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Potensi berikutnya yang juga belum termanfaatkan secara optimal untuk mendorong perkembangan wilayah adalah pertambangan. Meskipun tidak sebesar Kalimantan, wilayah Sulawesi memiliki potensi tambang yang cukup besar berupa nikel, emas, minyak dan gas serta batu gamping/kapur. Seperti halnya Kalimantan multiplier effect sektor tambang terhadap wilayah sekitar relatif kurang. Ke depannya ini harus diperbaiki agar nilai tambah dari sektor tambang juga mengalir ke wilayah sekitarnya. Sumber daya mineral pertambangan di Pulau Sulawesi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi regional. Pulau Sulawesi memiliki cukup banyak sumber daya mineral seperti minyak dan gas bumi, emas, nikel, marmer, gatu gamping/kapur, dan tembaga.

(5) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sejak tahun 2002 lima gubernur se-Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara) membentuk Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dan sepakat melakukan interkoneksi program pengembangan komoditas guna mengatasi kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Visi pembangunan industri di kawasan Sulawesi pada tahun 2010 yang diarahkan kepada pengembangan industri yang berbasis agribisnis, perikanan dan industri prospektif. Misalnya Provinsi Gorontalo dengan potensi jagung, sapi dan ikan, Sulawesi Utara dengan komoditi cengkeh dan kelapa, Sulawesi Tengah komoditi cacao, Sulawesi Selatan cacao dan kopi, potensi lainnya di Sulawesi Tenggara. Dalam upaya mempercepat implementasi sistem kerjasama antar daerah tersebut, pemerintah pada bulan Agustus 2007 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Kerja Sama Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Sulawesi. Secara geografis wilayah Sulawesi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud). Provinsi Sulawesi Utara berada di ujung utara NKRI dan berada diperbatasan antara Republik Indonesia dengan negara. Namun sarana dan prasarana

yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan masih sangat minim.

Isu Strategis Bidang politik, pertahanan dan keamanan di Wlayah Pulau Sulawesi adalah (1) Belum optimalnya kinerja penyelenggara negara sebagai akibat belum adanya kepastian hukum dalam hal perundang-undangannya (materi hukum), penerapan dan penegakan; (2) Belum berjalannya pembangunan kerjasama pembanguna antardaerah secara terpadu; (3) Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan; serta (4) Masih tingginya potensi konflik horizontal di beberapa wilayah.

Pada tahun 2010, wilayah Sulawesi akan juga melaksanakan pilkada provinsi/ kabupaten/kota. Dengan demikian, sebagaimana halnya di wilayah lain, peningkatan kapasitas lembaga KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan pendidikan pemilih sangat penting untuk meningkatkan kualitas pilkada. Di wilayah-wilayah rawan konflik, para calon pemilih harus ditingkatkan kesadarannya, bahwa demokrasi melalui pilkada, berparlemen, dan kebebasan berwacana adalah satu-satu cara memperbaiki kualitas kehidupan bersama, sedangkan cara-cara kekerasan tidak dapat diterima. Para pelakunya akan berhadapan dengan hukum tanpa kecuali.

5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi pada tahun 2010 antara lain adalah:

(1) Meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Sulawesi
(2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di Sulawesi
(3) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut dan udara.
(4) Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).
(5) Menigkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Pulau Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar.
(6) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sulawesi Bagian Selatan, Sulawesi Bagian Tengah dan Sulawesi Bagian Utara
(7) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran
(8) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
(9) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga

Sasaran pengembangan wilayah Pulau Sulawesi dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya standar hidup masyarakat Pulau Sulawesi

a. Meningkatnya pendapatan per kapita di Provinsi Sulawesi Utara sekitar dari Rp.7,190.51 ribu, Provinsi Gorontalo sekitar Rp.2,693.88 ribu, Provinsi Sulawesi Tengah sekitar Rp.6,377.82 ribu, Provinsi Sulawesi Barat sekitar dari Rp.3,789.52 ribu, Provinsi Sulawesi Selatan sekitar Rp.6,102.59 ribu, Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp. 5,126.63 ribu.
b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 5,99 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 7,25 persen, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 10,17 persen , Provinsi Sulawesi Barat sebesar 10,54 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,95 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,73 persen .

c. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 9.89 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 28,68 persen, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 21,53 persen, Provinsi Sulawesi Barat sebesar 17,11 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 14,65 persen pada tahun 2010, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 20,23 persen.

d. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 10,47 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 4,80 persen, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 6,76 persen, Provinsi Sulawesi Barat sebesar 4,29 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,20 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 3,87 persen.

e. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,96 tahun, Provinsi Gorontalo sebesar 7,10 tahun, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,98 tahun, Provinsi Sulawesi Barat sebesar 7,50 tahun, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,00 tahun, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,90 tahun.

f. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 14,23 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Gorontalo sebesar 28,88 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Sulawesi Barat sebesar 28,30 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 35,28 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 28,30 per 1000 kelahiran hidup, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 28,46 per 1000 kelahiran hidup.

(2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di Sulawesi

(3) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut dan udara.

(4) Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).

(5) Menigkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Pulau Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar.

(6) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sulawesi Bagian Selatan, Sulawesi Bagian Tengah dan Sulawesi Bagian Utara

(7) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.

(8) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

(9) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional

5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sulawesi

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi, pengembangaan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) Mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya,

berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya, dengan kawasankawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8) Meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (9) Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (10) Memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (11) Meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (12) Meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (13) Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga. (14) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; (15) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Sulawesi ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKN di Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado-Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya, (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, dan Kendari sebagai pusat pelayanan sekunder. Pengembangan PKW di Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) Mendorong pengembangan kota-kota Tomohon, Kotamobagu, Tondano, Isimu, Marisa, Kwandang, Luwuk, Parepare, Kolonodale, Palopo, Watampone, Bulukumba, Jeneponto, Pangkajene, Barru, Lasolo, Rarowatu, Raha, Baubau, dan Kolaka sebagai pusat pelayanan sekunder; (2) mengendalikan pengembangan kota-kota Mamuju, Poso, Buol, Donggala, Toli-Toli, Tondano, dan Unaaha sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan PKL di Pulau Sulawesi diarahkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN. Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara diarahkan pada pengembangan kota Melonguane dan Tahuna.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

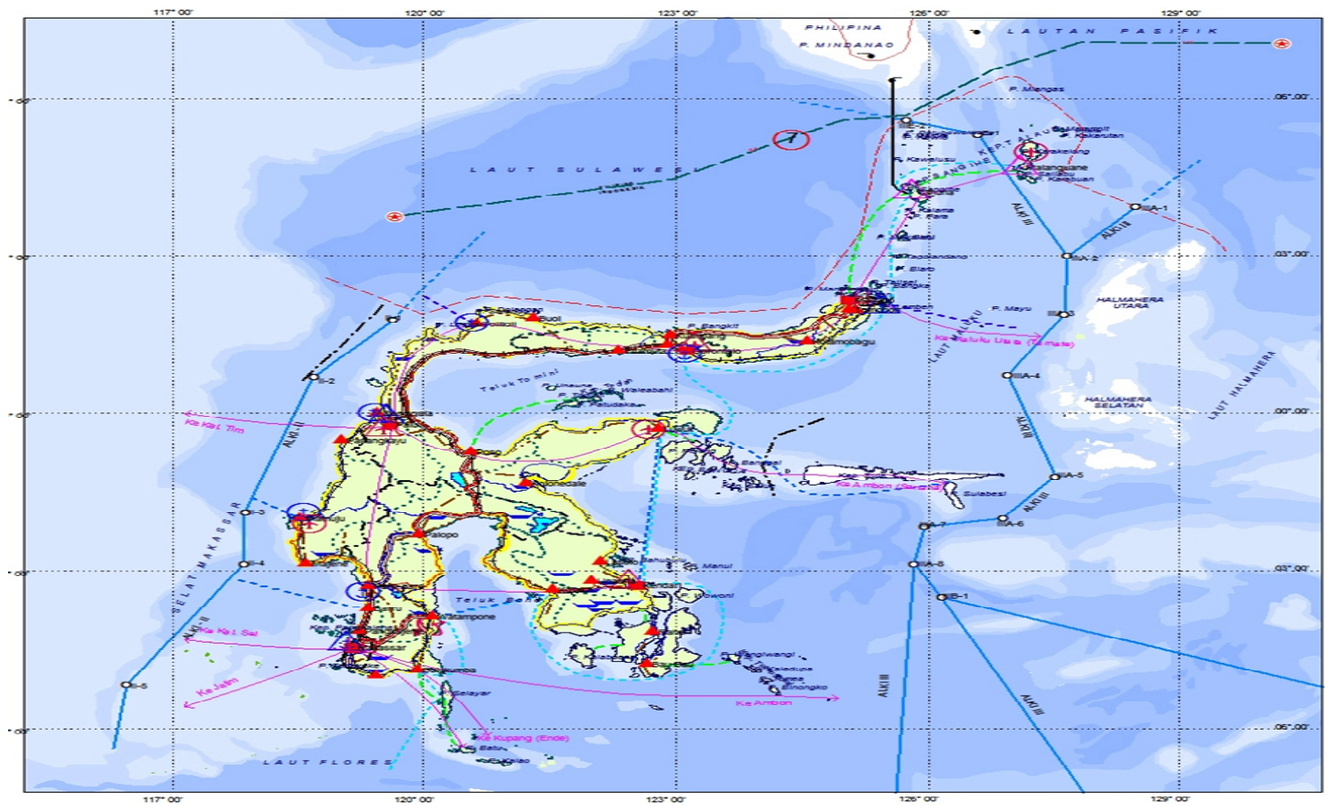

GAMBAR 5.1

PETA RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI

Rencana Tata Ruang Pulau:

- Mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi
- Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Pulau Sulawesi
- Memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah
- Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan
- Memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan
- Mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya
- Mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan
- Memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya.

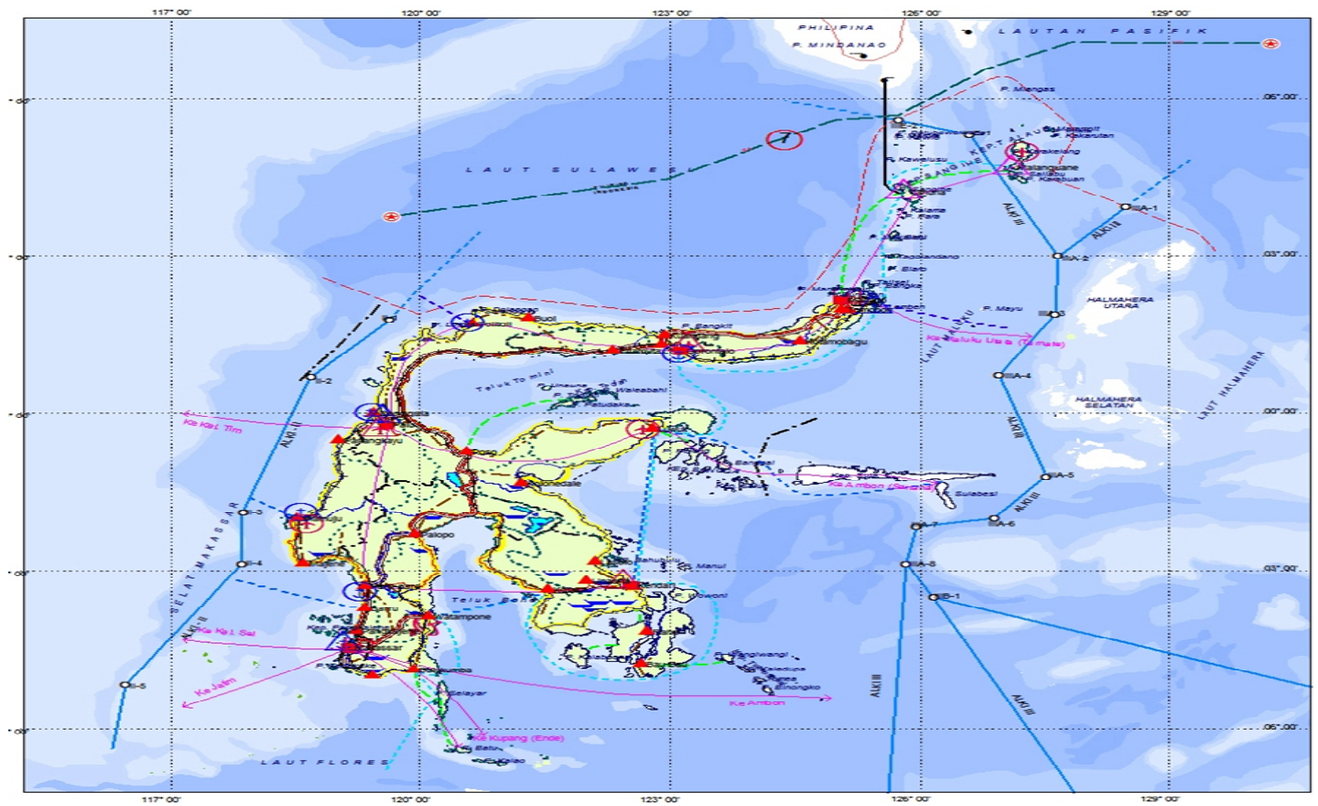

GAMBAR 5.2

ISU STRATEGIS PULAU SULAWESI

Isu Strategis Bidang Ekonomi:
- Rendahnya nilai investasi dan PAD.
- Terpusatnya perekonomian di wilayah tertentu(PKN / Kota Besar dan Ibukota provinsi).
- Rendahnya interaksi antar wilayah.
- Mendorong pertumbuhan nilai investasi di wilayah Sulawesi.

Isu Strategis Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan:
- Belum meratanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di pedesaan.
- Adanya disparitas Angka Harapan Hidup antar kabupaten/kota dan antar provinsi.
- Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dibanding rata-rata nasional.
- Adanya disparitas IPM antar provinsi
- Adanya disparitas AMH dan RLS antar kabupaten/kota dan antarprovinsi.
- Masih rendahnya partisipasi sekolah terutama tingkat menengah ke atas dan tinggi.

Isu Strategis Bidang PolhukHanKam:
- Adanya konflik horisontal.
- Maraknya isu pemekaran wilayah.

Isu Strategis Bidang Infrastruktur:
- Kondisi dan ketersediaan infrastruktur (jaringan jalan, air bersih, listrik, irigasi dan telekomunikasi) yang masih terbatas.

Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Terjadinya konflik sektoral dan regional terkait status lahan atau ruang.

Isu Strategi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Penurunan kualitas SDA dan LH.
- Belum optimalnya pemanfaatan SDA yang tersedia.

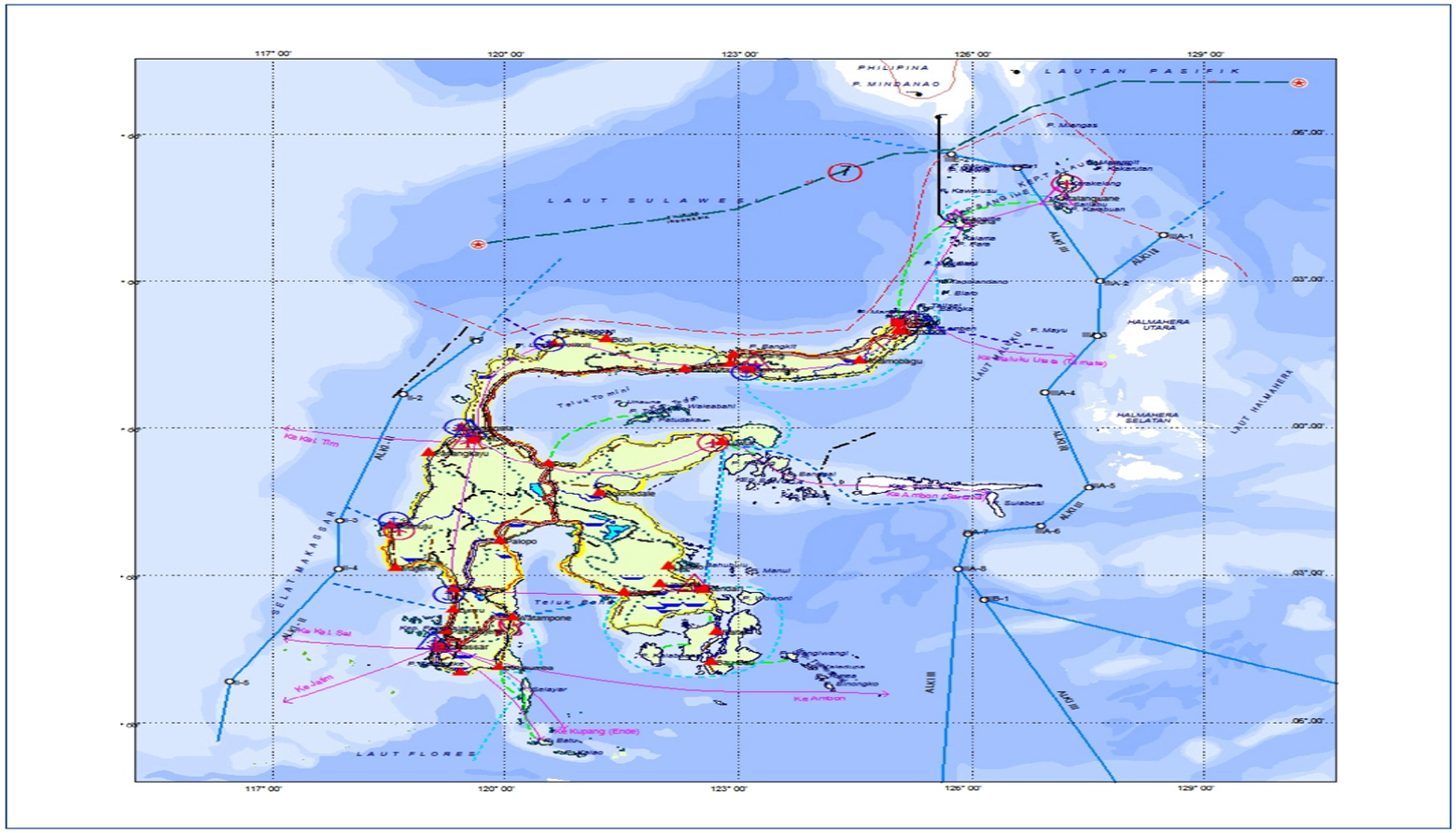

GAMBAR 5.3
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PULAU SULAWESI

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi :
- Pembenahan sistem perijinan
- Meningkatkan kinerja pemasaran potensi ekonomi Sulawesi kepada investor
- Menjamin keamanan investasi para pemilik modal

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang KepSosBud:
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat desa
- Peningkatan pelayan kesehatan di tingkat desa
- Pendidikan murah/gratis untuk masyarakat miskin.
- Pengembangan ketrampilan teknis

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang PolhukHanKam:
- Melakukan resolusi konflik melalui : negosiasi langsung, konsiliasi, fasilitasi, mediasi, abritasi, dan sebagainya.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Peningkatan akses pelayanan dasar oleh

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur:
- Meningkatkan sarana prasarana yang vital bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan sarana-prasarana dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah dan swasta atau swasta melalui dana CSR

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- Revitalisasi penataan status lahan dan tata ruang
- Penyusunan RTRW Provinsi yang disesuaikan dengan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota untuk mencapai keterpaduan perencanaan tata ruang
- Menerapkan teknologi pengolahan lahan yang baik untuk meningkatkan produksi pertanian
- Prioritas program pemerintah dalam pengadaan lahan abadi untuk sektor pertanian.

Strategi dan Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Penegakan hukum yang adil terhadap para pelaku penambang ilegal, ilegal logging dan ilegal fishing
- Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan SDA
- Pembentukan daerah konservasi SDA dan lingkungan berbasis masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 6
PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2010

BAB 6
PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA

6.1: Kondisi Saat Ini

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Permasalahan tersebut antara lain: (1) tingginya angka kemiskinan, (2) rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan, (3) tingginya angka pengangguran, dan (4) terjadinya ganggguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial. Berbagai permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) rendahnya akses terhadap layanan jasa pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, (2) terbatasnya kegiatan ekonomi produktif yang menyerap angkatan kerja, (3) rendahnya investasi, (4) terbatasnya prasarana dasar seperti air minum dan sanitasi, jalan, pelabuhan, dan listrik, (5) terbatasnya akses terhadap layanan transportasi yang menghubungkan antarwilayah.

Selain itu, wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang tersebar dan dipisahkan perairan menyebabkan program pembangunan cenderung hanya terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Program pembangunan yang bersifat sektoral dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seperti sektor pariwisata, peternakan dan pertambangan cenderung parsial, berjalan sendiri-sendiri, dan kurang koordinasi sehingga tidak mampu menciptakan dampak berganda bagi pengembangan wilayah. Wilayah Keplauan Nusa Tenggara yang tersebar juga menghambat mobilitas sumberdaya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta munculnya potensi konflik dan politik-keamanan dengan penduduk Timor Leste. Dengan kondisi wilayah yang tersebar dan berbagai hambatan, perencanaan pembangunan perlu memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai suatu satu kesatuan wilayah yang saling berhubungan termasuk optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan sektoral.

Sebagai satu kesatuan wilayah, Kepulauan Nusa Tenggara sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumberdaya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumberdaya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Potensi sumberdaya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya tetap harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah ekploitasi yang berlebihan, dan mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah.

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Pada tahun 2008, populasi penduduk di Nusa Tenggara mencapai 8,86 juta jiwa. Penduduk terbagi hampir merata di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Populasi penduduk Nusa Tenggara Timur meningkat lebih cepat dibandingkan Nusa Tenggara Barat. Enam tahun sebelumnya, populasi penduduk Nusa Tenggara Timur masih sekitar 3,8 juta jiwa, sedangkan Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 4 juta jiwa.

Kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur seperti di perlihatkan pada grafik di bawah ini. Kepadatan di Nusa Tenggara Barat tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 246 jiwa per km^2. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur, di mana kepadatan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 89 jiwa per km^2. Kepadatan penduduk terendah, baik di Nusa Tenggara Barat maupun di Nusa Tenggara Timur, terjadi pada tahun 2000, sebesar 216 jiwa per km^2 di Nusa Tenggara Barat dan 78 jiwa per km^2 di Nusa Tenggara Timur.

Jumlah penduduk di Kepulauan Nusa Tenggara sekitar 3,78 persen dari total penduduk nasional. Kepulauan Nusa Tenggara merupakan pulau terpadat kedua setelah Pulau Jawa-Bali, yaitu sebesar 120 jiwa per Km2. Tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, selain tingkat kematian dan migrasi. Jika dilihat TFR per provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai TFR paling tinggi seluruh Indonesia yaitu sebesar 4,2. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai TFR sebesar 2,8 per perempuan (SDKI 2007).

Wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan memiliki konsentrasi angkatan kerja sebesar 45,3 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2005. Persentase angkatan kerja di wilayah Nusa Tenggara tersebut meningkat pada tahun 2008 menjadi 46,2 persen dari jumlah penduduk total. Peningkatan persentase angkatan kerja di Wilayah Nusa Tenggara mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif semakin bertambah sehingga kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan juga akan semakin meningkat.

Jumlah angkatan kerja tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terjadi pada tahun 2008 yaitu masing-masing sebesar 1,96 juta jiwa dan 2,1 juta jiwa. Meskipun jumlah angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Barat, sebaliknya berdasarkan persentase tingkat pengangguran Nusa Tenggara Timur memiliki angka lebih rendah dibandingkan Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan pemenuhan terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memadai.

Tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Penduduk miskin daerah pedesaan di provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 8 tahun (2000-2008) mengalami penurunan jumlah meskipun dari tahun 2001 mencapai jumlah tertinggi yaitu sebesar 863,3 ribu jiwa (35,4 persen). Sebaliknya penduduk miskin di daerah perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan berdasarkan jumlahnya yang semula berjumlah 340,4 ribu jiwa (tahun 2000) menjadi 560,4 ribu jiwa (tahun 2008). Jumlah penduduk miskin tertinggi daerah perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 575.3 ribu jiwa. Sedangkan berdasarkan persentasenya, penduduk miskin daerah perkotaan di Provinsi NTB mencapai nilai tertinggi pada tahun 2003 yaitu sebesar 34,64 persen, kemudian menurun setiap tahunnya hingga 2008.

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan berbagai isu strategis yang perlu diatasi melalui prorgam dan kegiatan pembangunan antara lain, *pertama*, ketersediaan dan ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan. *Kedua*, kenaikan harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu. *Ketiga*, kenaikan biaya transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan terjadinya hambatan gelombang laut yang tinggi.

Masih rendahnya akses masyarakat miskin terutama di NTT (2006 66,6 persen penduduk NTT adalah orang miskin) terhadap pendidikan formal dan nonformal. Selain itu, dalam hal pendidikan, masih terdapat daerah di Nusa Tenggara yang sulit di jangkau oleh pendidikan, daerah pelosok seperti nelayan dan masyarakat pesisir. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akses pendidikan di daerah tertinggal, terutama di NTT (Data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal: seluruh kab/kota di NTT adalah daerah tertinggal). Dari sisi tenaga pengajar, penyebaran guru belum merata terutama guru SD di Nusa Tenggara, lebih banyak di daerah perkotaan di bandingkan di pedesaan atau daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan dikarenakan rendahnya kualifikasi guru terutama di tingkat pendidikan dasar, dan belum meratanya sarana pendidikan serta pemenuhan tenga pengajar yang masih kurang.

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendidikan di Nusa Tenggara menyangkut mahalnya biaya pendidikan, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan rendahnya mutu pendidik. Isu strategis dalam pelayanan pendidikan antara lain adalah (1) optimalisasi mekanisme pembiayan yang ada dengan mengutamakan perhatian terhadap anak murid sekolah dari keluarga miskin, (2) pengelolaan DAK, (3) koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam pelayanan kesehatan, permasalahan utama menyangkut keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit, serta adanya berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Selain itu, permasalahan kesehatan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan gizi terutama Ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kelahiran pada penduduk miskin dan Angka Harapan Hidup NTB sebesar 60,9 tahun dan NTT sebesar 66,5 tahun. Kondisi ini juga dikarenakan kurang optimalnya pelayanan kesehatan dikarenakan faktor letak geografis yang jauh dan kurangnya sarana transportasi, kurang memadainya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

Di bidang kebudayaan, kepulauan Nusa Tenggara memiliki potensi seni budaya yang sangat kaya dengan berbagai seni tradisional yang relatif masih terpelihara. Dilihat dari kekayaan seni budaya, kepulauan Nusa Tenggara memiliki 379 Benda Cagar Budaya (BCB). Situs yang tersebar di berbagai daerah, Taman Nasional Pulau Komodo yang menjadi dalah satu warisan dunia, serta berbagai kekayaan dan keragaman seni budaya tradisional lainnya. Permasalahannya yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan dewasa ini adalah kondisi Geografi yang solit dengan masih rendahnya akses transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya menjadi kendala dalam mengoptimalkan kualitas pengelolaan seni dan budaya. Selain itu, rendahnya kapasitas fiskal, kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah

akibat keterbatasan informasi juga menjadi faktor kendala pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya. Dilain pihak, semakin maraknya kasus pencurian benda sejarah (purbakala) untuk berbagai kepentingan harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh *stakeholder* terkait.

Terkait dengan pemuda, jumlah pemuda di kepulauan Nusa Tenggara sebesar 3 juta jiwa atau sekitar 3,7 persen dari jumlah pemuda di Indonesia. Tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan di kepulauan Nusa Tenggara masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya pemuda yang tidak punya ijazah. Berdasarkan data susenas tahun 2006, jumlah pemuda yang tidak punya ijazah di propinsi NTT sebesar 22,4 persen dan di Propinsi NTB 18,01 persen, meskipun partisipasi pemuda masih rendah, tingkat pengangguran terbuka pemuda di Propinsi NTT paling rendah dibandingkan dengan Propinsi lain di Indonesia.

Di bidang olahraga, prestasi olahraga di kepulauan Nusa Tenggara masih rendah. Rendahnya prestasi olahraga di kepulauan Nusa Tenggara disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, atlet yang berkualitas pelatih dan wasit yang profesional. Dilihat dari potensi, propinsi NTB memiliki 8 cabang olahraga unggulan daerah, yaitu Atletik, Tarung Derajat, Pencak Silat, Bola Voli, Kempo, Wushu, Dan Panjat Tebing. Sementara Propinsi NTT memiliki 4 cabang olahraga unggulan daerah yaitu Atletik, Kempo, Tinju Dan Taekwondo.

(2) Bidang Ekonomi

Kedua provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Pertumbuhan sektoral tertinggi dalam perkembangan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimiliki oleh Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; dan SektorKeuangan, Persewaan Jasa Perusahaan .

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain ditopang oleh sektor pertanian juga memiliki keunggulan pada sektor pertambangan dan penggalian yang ditandai oleh tingginya kontribusi sektor tersebut.Selain sektor pertanian, Nusa Tenggara juga memiliki potensi di sektor perikanan. Oleh karena itu, perlunya penguatan sektor perikann di wilayah Nusa Tenggara selain di sektor industri pengolahan berbasis pertanian (tanaman bahan makanan dan peternakan).

Dalam hal perdagangan, data perdagangan antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara selama 2002-2007 menampakkan dominasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan intensitas perdagangan terbesar. Wilayah Jawa Bali menjadi mitra dagang utama bagi Nusa Tenggara. Namun kondisi ini masih mengalami hambatan, khsusnya masalah sarana pendukung yaitu belum adanya pelabuhan laut atau bandar udara internasional untuk memperlancar arus keluar-masuk barang. Hal ini menyebabkan perdagangan Nusa Tenggara masih tingginya ketergantungan kepada Bali dan Jawa Timur untuk mengirimkan barang ekspor. Kondisi ini pula yang mengakibatkan adanya ketimpangan hubungan perdagangan antara Nusa Tenggara dan Jawa-Bali dibandingkan dengan Nusa Tenggara dan pulau-pulau lainnya.

Dalam hal investasi, daya tarik investasi di Nusa Tenggara masih rendah.Hal ini dikaibatkan masih adanya gangguan keamanan, terutama konflik antar warga atau perkelahian massal di kedua provinsi yang mengurangi rasa aman bagi calon investor berinvestasi di Nusa Tenggara. Selain itu masih tergantungnya pariwisata Nusa Tenggara

kepada kondisi pariwisata Bali, padahal pariwisata Bali sangat rentan pada isu-isu gangguan keamanan.

Dalam hal Pendapatan Asli Daerah, PAD standar wilayah Nusa Tenggara masih lebih kecil daripada rata-rata nasional PAD standar. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini akan lebih sulit menghimpun dana dari PAD dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali dan Papua. Pada tahun 2004, tingkat kemandirian Nusa Tenggara Barat berdasarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih lebih rendah daripada tingkat kemandirian Nusa Tenggara Timur, namun pada tahun 2006, tingkat kemandiriannya meningkat lebih dari dua kali sehingga lebih tinggi dibanding tingkat kemandirian Nusa Tenggara Timur.

Isu strategis bidang ekonomi antara lain terhambatnya investasi sebagai akibat ketidapastian dalam memperoleh ijin usaha, rendahnya produktivitas pertanian, rusaknya infrastruktur pendukung, terbatasnya pasokan energi dan listrik, dan terlambatnya proses pencairan anggaran. Permasalahan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Masalah lain yang terjadi di daerah adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Isu strategis dalam pengembangan ekonomi daerah adalah (1) revitalisasi pertanian secara terpadu, sistematik, dan konsisten; (2) pengembangan sektor dan komoditas keunggulan; (3) diversifikasi kegiatan ekonomi; (3) optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM. Isu yang tidak kalah penting adalah dalam keuangan daerah, terutama dalam efektifitas dan efisiensi anggaran daerah, belum optimalnya anggaran berbasis kinerja, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran di daerah.

(3) Bidang Prasarana

Isu dan permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana di sebagian besar daerah menyangkut rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Sedangkan provinsi yang memiliki permasalahan tentang prasarana listrik, air minum, dan telekomunikasi. Untuk permasalahan yang menyangkut prasarana pengairan dan irigasi, diantaranya termasuk pengendalian masalah banjir dan daerah aliran sungai (DAS).

Hambatan pergerakan ekonomi di desa-desa dan daerah terisolir , karena kurangnya sarana transportasi darat. Hal ini disebabkan masih rendahnya akses layanan terhadap transportasi darat, laut, dan udara terutama pada daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.Selain itu, pertumbuhan produktivitas dan kapasitas terpasang sarana kelistrikan yang masih rendah baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditunjukkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai 24,24 persen .Permasalahan yang muncul adalah relatif terbatasnya penyediaan listrik bagi masyarakat di NTB serta adanya permasalahan transmisi dan gangguan sistem pembangkit di NTT

Isu Strategis Bidang Infrastruktur di Wilayah Nusa Tenggara antara lain adalah (1) Perlunya Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem

jaringan transportasi laut meliputi prioritas tinggi untuk Pelabuhan Internasional di Kupang, Prioritas sedang untuk Pelabuhan Nasional di Labuhan Lombok, Maumere, Waingapu, Lembar, dan Bima; (2) Perlunya pengembangan sistem jaringan transportasi udara dilakukan secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional dengan prioritas penanganan; (3) Belum adanya pemanfaatan potensi pembangkit listrik berbasis energi lokal seperti panas bumi, air dan angin

(4) Bidang SDA dan LH

Isu dan permasalahan yang paling penting dan perlu untuk segera ditangani di berbagai daerah adalah masalah kehutanan, baik itu menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, maupun kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti kegiatan penambangan, eksploitasi sumberdaya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai juga menyebabkan masalah.

Tingginya konversi lahan sawah juga berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi dari nilai kualitasnya, yaitu lahan sawah dengan kesuburan tinggi, di daerah yang dekat dengan konsentrasi penduduk akan kalah bersaing dengan keuntungan lokasinya. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah.

Masalah air di Indonesia ditandai dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali sehingga luas lahan kritis semakin bertambah.

Permasalahan terkait masalah lingkungan di Nusa Tenggara antara lain adalah (1) Adanya pencemaran pesisir dan laut karena kegiatan perhubungan laut dan kepelabuhan, rumah tangga, serta pariwisata, seperti minyak dan sampah; (2) Meningkatnya perambahan hutan, perladangan berpindah dan penebangan liar; (3) Menurunnya luas lahan untuk perkebunan dan sawah menurun dan menurunnya luas hutan; (4) Pemanfaatan sumber daya hutan yang cenderung eksploitatif dan kurang berwawasan lingkungan karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi; (5) Penerapan rehabilitasi lahan dan konservasi lingkungan belum berjalan efektif; (6) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya laut sehingga tingkat pembudidayaan hasi llaut masih rendah. Hal ini dikarenakan tingkat penguasaan dan penerapan teknologi pasca panen yang masih rendah; (7) Meningkatnya penambangan tanpa ijin atau penambangan liar sebagai mata pencaharian masyarakat; serta (8)Emisi kendaraan bermotor yang terbanyak dihasilkan di Nusa Tenggara adalah karbon monoxida, setelah itu diikuti oleh hidro karbon dan nitrogen oksigen

(5) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kondisi di Nusa Tenggara sejak reformasi 1998 memunculkan dampak yang luar biasa, berbagai konflik terjadi yang umumnya disebabkan oleh krisis ekonomi, politik, sosial budaya hingga keagamaan. Nusa Tenggara Barat termasuk wilayah dengan tingkat eskalasi

konflik antar kelompok warga tinggi sebesar 30 kali atau 4,42 persen, sedangkan konflik lainnya relatif lebih rendah. Demikian juga dengan Nusa Tenggara Timur tingkat konflik perkelahian antar kelompok warga cukup tinggi sebanyak 86 kali atau 3.71 persen. Konflik lain yang terjadi di wilayah ini adalah perkelahian warga dan aparat keamanan, perkelahian antar suku sebanyak 6 kali. Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini potensi konflik juga terdapat di perairan di perbatasan dengan Timor Timur yang dapat mengancam pertahanan negara, karena belum ada kesepakatan tentang garis batas laut kedua negara, juga adanya eksodus pengungsi dari Timor Timur yang juga masih jadi masalah serius bagi Indonesia dan Timor Timur. Oleh karena itu, kondisi keamanan di wilayah Nusa Tenggara harus menjadi perhatian terkait dengan banyaknya konfilk horizontal. Sehingga perlu adanya early warning system untuk pencegahan konflik. Selain itu perlu adanya upaya peningkatan dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan di NTT dan wilayah terluar di bagian selatan

Selain masalah konflik horizontal dan masalah perbatasan, berbagai isu strategis di Bidang politik, pertahanan dan keamanan di Wilayah Nusa Tenggara antara lain yaitu (1) Belum optimalnya dalam memanfaatkan situasi devided goverment untuk penguatan fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif; (2) Belum optimalnya peningkatan prasarana pertahanan dan alutsista untuk pengamanan wilayah perbatasan dan wilayah terluar; (3) Belum berjalannya sinergi dan sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah dan antar sektor pembangunan di daerah; (4) masih rendahnya kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik rakyat terutama untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan; serta (5) pelaksanaan pilkada di provinsi dan beberapa di kabupaten/kota yang dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan pemimpin politik yang lebih berkualitas.

6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Tujuan pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara pada tahun 2010 antara lain adalah:

(1) Meningkatkan standar hidup masyarakat Kepulauan Nusa Tenggara
(2) Menigkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terhadap pelayanan publik dasar.
(3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara bagian barat dan timur.
(4) Meningkatkan kontribusi Kepulauan Nusa Tenggara dalam perdagangan internasional
(5) Mengoptimalkan sektor unggulan di Kepulauan Nusa Tenggara.
(6) Meningkatkan jariangan transportasi antarwilayah.
(7) Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).
(8) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran
(9) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
(10) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga

Sasaran pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya standar hidup masyarakat Kepulauan Nusa Tenggara

a. Meningkatnya pendapatan per kapita dari Rp 4.070.931 pada tahun 2010 menjadi Rp 4.442.833 pada tahun 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur diharapkan terjadi kenaikan pendapatan per kapita dari Rp 2.466.904 pada tahun 2010 menjadi Rp 2.487.902 pada tahun 2014.
b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,90 persen per tahun dalam kurun waktu 2010-2014 untuk Kepulauan Nusa Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,59 persen pada tahun 2010 menjadi 3,80 persen pada tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,98 persen sehingga pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,07 persen.
c. Menurunnya jumlah tingkat kemiskinan dari 23,12 persen pada tahun 2010 menjadi 17,98 persen pada tahun 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan tingkat kemiskinan berkurang dari 26,91 persen pada tahun 2010 menjadi 20,12 persen pada tahun 2014.
d. Menurunnya angka pengangguran dari 3,74 persen pada tahun 2010 menjadi 2,33 persen pada tahun 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan angka pengangguran menurun 1,80 persen pada tahun 2010 menjadi 1,06 persen pada tahun 2014.
e. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari 7,06 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,42 tahun pada tahun 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari 6,68 tahun pada tahun 2010 menjadi 6,96 tahun pada tahun 2014.
f. Menurunnya angka kematian bayi dari 43,95 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 34,22 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan angka kematian bayi menurun dari 30,29 per seribu kelahirann hidup pada tahun 2010 menjadi 23,81 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2014.

(2) Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.
(3) Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.
(4) Berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur.
(5) Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya industri pengolahan hasil laut di Kepulauan Nusa Tenggara.
(6) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.
(7) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
(8) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa

Tenggara

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, pengembangaan wilayah kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai Pusat Pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh–Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan keterkaitan pengembangan antar kawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana Toraja; (5) menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama antarwilayah maupun antarkawasan; (6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; (8) mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai ‘beranda depan’ Negara Kesatuan Republik Indonesia. (9) Meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (10) Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (11) Memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (12) Meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (13) Meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (14) Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di kawasan perbatasan negara.

Pengembangan PKN di Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pengembangan PKW di Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berperan juga sebagai pusat industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung; (2) mendorong pengembangan kota Praya, Raba, Sumbawa Besar, Ende, Kefamenanu, dan Labuhan Bajo sebagai pusat pelayanan sekunder dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus sebagai pusat perkembangan industri maritim dan kelautan; (3) mengendalikan pengembangan kota Soe, Waingapu, Maumere, dan Ruteng sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pengembangan PKSN di Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong perkembangan kota Atambua dan Kupang yang terletak di kawasan perbatasan negara.

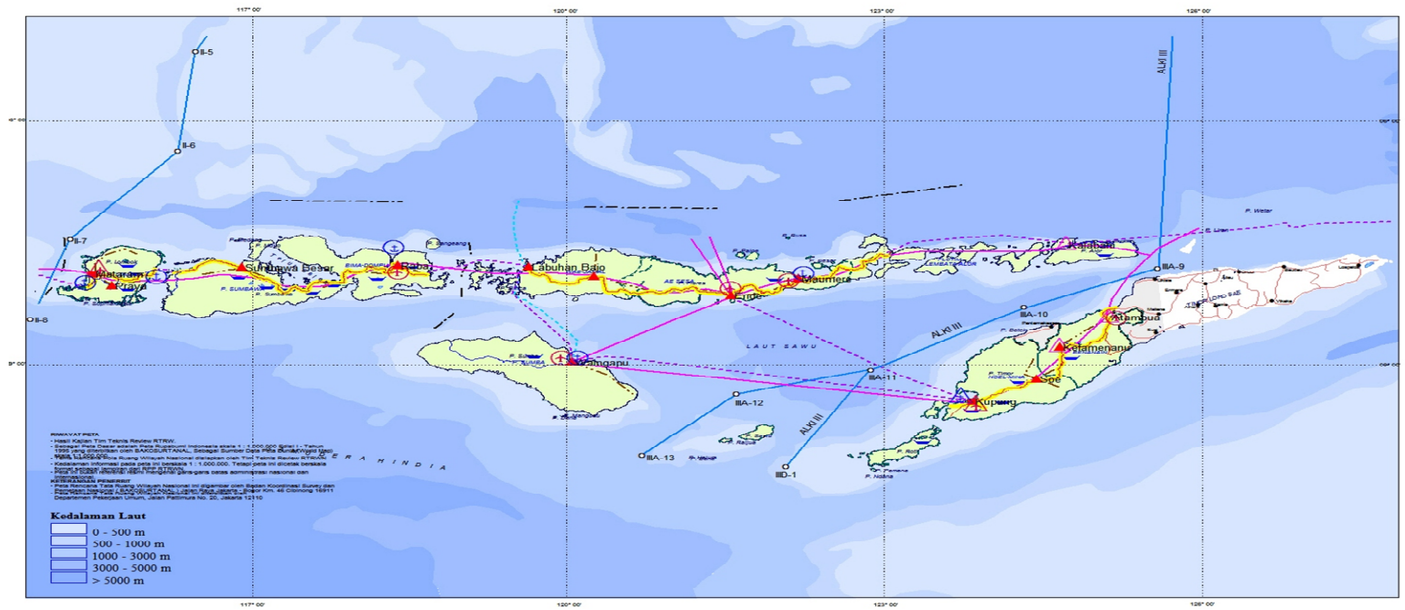

GAMBAR 6.1
PETA RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Rencana Tata Ruang Pulau:

- Mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai Pusat Pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu.
- Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.
- Meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh – Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat.
- Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara.
- Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- Meningkatkan keterkaitan pengembangan antar kawasan, menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dan multilateral.

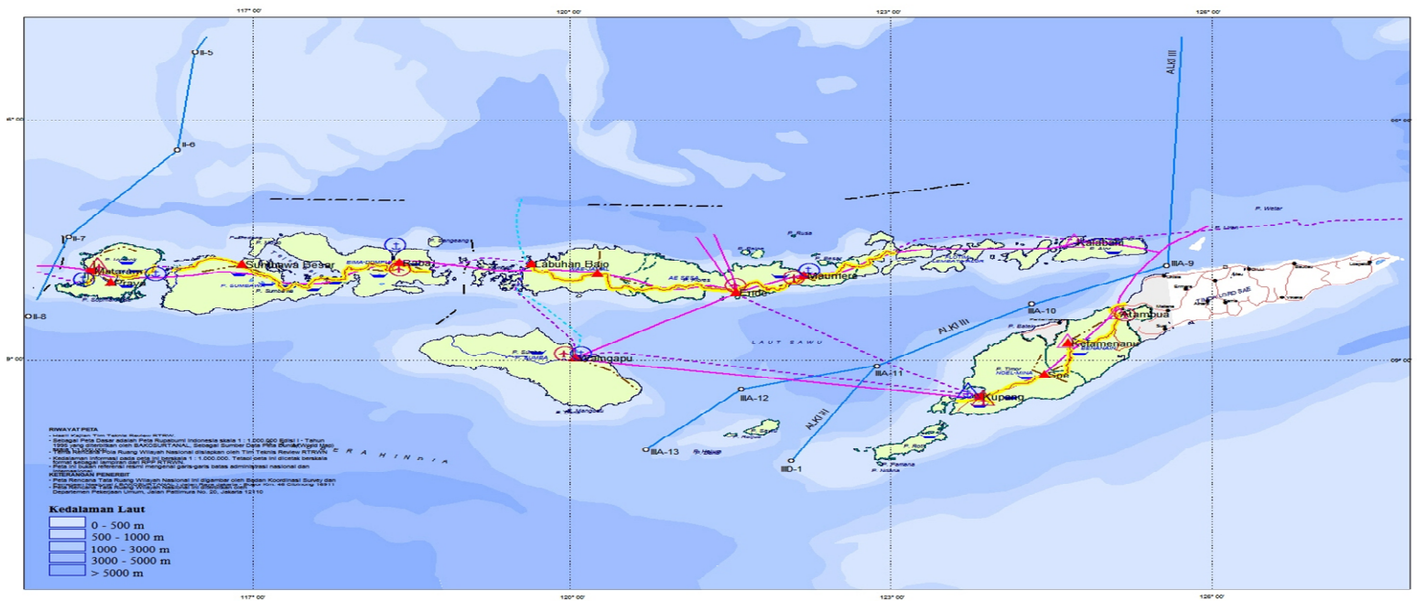

GAMBAR 6.2

ISU STRATEGIS KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Isu Strategis Bidang Ekonomi:

- Kesenjangan barat (NTB) dan timur (NTT).
- Pertumbuhan dan realisasi investasi yang rendah.

Isu Strategis Sosial Budaya dan Kependudukan:

- Pertumbuhan penduduk dan konsentrasi penduduk di kota besar.
- Pencapaian pendidikan formal serta partisipasi sekolah di perdesaan dan partisipasi perempuan dalam bersekolah.
- Kematian bayi dan balita, serta balita bergizi buruk yang tinggi.

Isu Strategis Bidang PolhukHanKam:

- Konflik sipil antar kelompok masyarakat.
- Divided government sebagai hasil Pilkada.

Isu Strategis Bidang Infrastruktur:

- Kualitas dan kuantitas transportasi darat.
- Konektivitas antar wilayah melalui tranportasi ASDP dan laut.

Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- Implementasi Perda terkait dengan penambangan emas.

Isu Strategi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

- Kualitas dan kuantitas sumber daya air serta ancaman krisis air.
- Kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

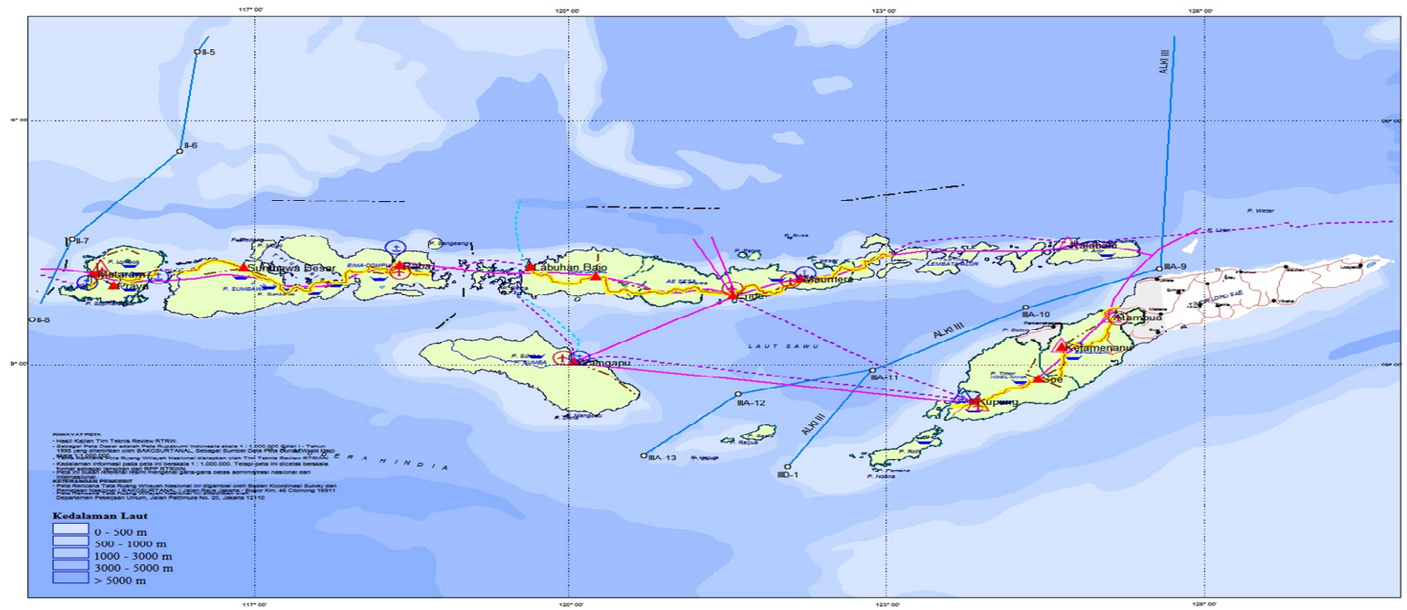

GAMBAR 6.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi:
- Pengembangan industri pariwisata dan kerajinan.
- Perbaikan iklim investasi dan kapasitas pemerintah.
- Peningkatan produksi hasil laut.
- Revitalisasi peternakan sapi.
- Peningkatan peran pariwisata laut.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang KepSosBud:
- Pengendalian pertumbuhan penduduk terutama di daerah miskin.
- Pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di perdesaan dan kantong kemiskinan.
- Pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang PolhukHanKam:
- Pembangunan simpul-simpul rekonsiliasi
- Penanganan konflik sosial.
- Penegakan hukum yang adil.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur:
- Peningkatan sarana tranportasi untuk melayani rute daerah tertinggal.
- Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan Labuhan, Maumere, Waingapu.
- Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan Bima dan Lembar.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Peninjauan kembali Perda No 11 tentang Tata Ruang yang mengaatur kegiatan pertambangan dan penggalian.

Strategi dan Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Optimalisasi pengelolaan sumberdaya air.
- Peningkatan konservasi lahan, daerah tangkapan air, dan sumberdaya air.
- Pengaturan kelembagaan pengelola sumberdaya air.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 7
PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU TAHUN 2010

BAB 7
PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

7.1 Kondisi Saat Ini

Pengembangan wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau kecil yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan prorgam yang terpadu dan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau, dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. Posisi kepulauan yang tersebar seringkali membuat program pembangunan yang dibuat hanya memfokuskan pada satu pulau tertentu dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan program dalam satu kesatuan tata ruang.

Wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Permasalahan tersebut antara lain: (1) tingginya angka kemiskinan, (2) rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan, (3) tingginya angka pengangguran, dan (4) terjadinya gangggguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial. Berbagai permasalahan tersebut disebabkan antara laian oleh: (1) rendahnya akses terhadap layanan jasa pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, (2) terbatasnya kegiatan ekonomi produktif yang menyerap angkatan kerja, (3) rendahnya investasi, (4) terbatasnya prasarana dasar seperti air minum dan sanitasi, jalan, pelabuhan, dan listrik, (5) terbatasnya akses terhadap layanan transportasi yang menghubungkan antarwilayah.

Selain itu, wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara yang tersebar dan dipisahkan perairan menyebabkan program pembangunan cenderung hanya terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Wilayah yang tersebar juga menghambat mobilitas sumberdaya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta munculnya potensi konflik dan politik-keamanan (separatisme). Dengan kondisi wilayah yang tersebar dan berbagai hambatan, perencanaan pembangunan perlu memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara sebagai suatu satu kesatuan wilayah yang saling berhubungan termasuk optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan sektoral.

Sebagai satu kesatuan wilayah, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumberdaya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumberdaya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Potensi sumberdaya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya tetap harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah ekploitasi yang berlebihan, dan mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah.

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk di Kepulauan Maluku sekitar 2,4 juta jiwa atau 1,1 persen dari total penduduk nasional, dengan kepadatan 30 jiwa perKm2. Persebaran penduduk di Kepulauan Maluku tidak merata dimana pada wilayah pulau-pulau kecil cenderung padat sedangkan di pulau besar penduduknya jarang. Sebagian besar masih tersebar di perdesaan. Tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, selain tingkat kematian dan migrasi. Jika dilihat TFR per provinsi di Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku TFR-nya masih sangat tinggi yaitu 3,9 dan Provinsi Maluku Utara sebesar 3,1.

Hingga tahun 2008, Beberapa isu strategis yang penting untuk diatasi diantaranya: (1) Belum meratanya penyebaran penduduk antar pulau (2) Masih terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha dalam menampung angkatan kerja yang menganggur (3) Masih rendah dan belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, terisolir, dan daerah yang berkebutuhan khusus (4) Masih besarnya tantangan dalam memperkuat solidaritas antar etnis dan agama.

Terkait dengan kependudukan dan tingkat pengangguran pada tahun 2008, jumlah .pengangguran di Provinsi Maluku sejumlah 61.231 jiwa, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 29,339 jiwa. Disamping masih tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan pun memunjukkan hal serupa walaupun mengalami penurunan dari rentang waktu tahun 2000-2008. Hingga tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Pulau Maluku sejumlah 496,4 ribu jiwa. Tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di Pulau Maluku.

Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Kepulauan Maluku sebanyak 891,7 ribu jiwa yang tersebar 765,5 ribu jiwa di perdesaan dan 126,2 ribu jiwa di perkotaan, menurun pada tahun 2008 mejadi 496,4 ribu jiwa yang tersebar 442,7 ribu jiwa di daerah perdesaan dan 53,7 ribu jiwa di daerah perkotaan. Masing tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah Maluku, yaitu sebanyak 391,3 ribu jiwa (29,66 persen)di Provinsi Maluku, dan sebanyak 105,1 ribu jiwa (11,28 persen) di Provinsi Maluku Utara.

Permasalahan kemiskinan tersebut terutama berkaitan dengan berbagai isu strategis yang perlu diatasi melalui program dan kegiatan pembangunan antara lain: (1) Ketersediaan dan ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan. (2) Kenaikan harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu. (3) Kenaikan biaya transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan terjadinya hambatan gelombang laut yang tinggi.

Dalam bidang pendidikan, kepulauan Maluku mencapai perkembangan yang cukup signifikan, diantaranya: angka melek huruf yang menunjukkan perkembangan yang positif, secara garis besar angka partisipasi sekolah (APS) pun meningkat, begitu pula dengan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan perkembangan positif. Dibalik perkembangan yang menunjukkan trend positif tersebut, telah diidentifikasi pula beberapa permasalahan yang signifikan, diantaranya: terkait dengan: (1) Mahalnya biaya pendidikan, (2) Belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan khususnya pada daerah tertinggal, terpencil, terisolasi, serta wilayah perbatasan (3) Rendahnya mutu pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pendidik, serta keterbatasan guru pada sebagian wilayah kepulauan di Wilayah

Maluku. (4) Minimnya sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah-wilayah terpencil, kepulauan, tertinggal, dan terisolasi, serta pulau terluar. Sedangkan isu strategis dalam pelayanan pendidikan antara lain adalah (1) optimalisasi mekanisme pembiayan yang ada dengan mengutamakan perhatian terhadap anak murid sekolah dari keluarga miskin, (2) pengelolaan DAK, (3) koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam pelayanan kesehatan, secara garis besar Kepulauan Maluku mencapai beberapa perkembangan hingga tahun 2006, diantaranya: meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan, diantaranya terkait dengan: (1) keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit. Ketimpangan dalam mengakses pelayanan kesehatan tersebut khususnya dirasakan oleh penduduk kaya-miskin, desa-kota, terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, terisolir, berkebutuhan khusus; (2) adanya berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. (3) Rendahnya pemenuhan gizi terutama Ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

Di bidang kebudayaan, Kepulauan Maluku memiliki potensi alam dan seni budaya yang sangat kaya dengan berbagai seni tradisional yang masih dijaga dan dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat. Dilihat dari kekayaan seni budaya, kepulauan Maluku memiliki 379 cagar Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs bersejarah yang tersebar di berbagai daerah, serta berbagai kekayaan dan keragaman seni budaya tradisional lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan dewasa ini adalah kondisi topografis dan geografis yang sulit dengan daerah kepulauan yang mengakibatkan rendahnya akses transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya . Hal ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan kualitas pengelolaan seni dan budaya, Selain itu, rendahnya kapasitas fiskal, kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah akibat keterbatasan informasi juga menjadi faktor kendala pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya. Dilain pihak, semakin maraknya kasus pencurian berbagai benda sejarah (purbakala) untuk berbagai kepentingan harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh stakeholders terkait.

Terkait dengan pemuda, jumlah pemuda di Kepuluan Maluku sebesar 794 ribu jiwa atau sekitar 0,98 persen dari jumlah pemuda Indonesia, dengan rincian jumlah pemuda di Provinsi Maluku sebesar 448 ribu jiwa dan Provinsi Maluku Utara sebesar 346 ribu jiwa. Dilihat dari tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pemuda yang tidak mempunyai ijazah. Adapun tingkat pengangguran terbuka pemuda di Kepulauan Maluku juga masih tinggi. Berdasarkan data Sakernas tahun 2006, tingkat pengangguran terbuka pemuda di Provinsi Maluku sebesar 23,42 persen, dan di Provinsi Maluku Utara sebesar 11,47 persen.

Di bidang olahraga, prestasi olahraga di Kepulauan Maluku masih rendah yang tercermin dari capaian pada PON ke XVII tahun 2008. Rendahnya prestasi olahraga di Kepulauan Maluku disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, atlet yang berkualitas, pelatih dan wasit yang profesional. Dilain pihak, kepulauan Maluku memiliki cabang olahraga unggulan daerah. Provinsi Maluku memiliki 8 cabang olahraga unggulan daerah, yaitu Atletik, Dayung, Panahan, Anggar, Layar, Ski Air, Taekwondo dan tinju. Sementara Provinsi Maluku Utara memiliki 3 cabang olahraga unggulan daerah yaitu Dayung, Renang dan Atletik.

(2) Potensi dan Isu Strategis Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, hingga tahun 2008, ketergantungan Kepulauan Maluku terhadap pusat yaitu sebesar 77 persen. Indeks kinerja PAD pemerintah daerah di Kepulauan Maluku dalam periode 2004-2006 menunjukkan peningkatan, dengan indeks kinerja PAD Maluku selalu lebih tinggi dari pada indeks kinerja PAD Maluku Utara. Namun demikian kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah di Kepulauan Maluku hingga tahun 2006, baru mencapai 10 persen. Dalam perkembangannya, kontribusi tertinggi terhadap pembentukan nilai PDRB adalah sektor pertanian (>30 persen), yaitu berasal dari perkebunan khususnya cengkeh, lada, pala, minyak kayu putih, dan kopra; serta sektor perikanan-kelautan. Sedangkan sektor basis di Kepulauan Maluku ialah industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu, bangunan, dan pengangkutan.

Khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan, hingga tahun 2006, Kepulauan Maluku memproduksi padi sawah sebesar 98.981 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 3,8 ton per hektar. Namun demikian, jumlah produksi yang besar tersebut, belum dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kepulauan maluku, sehingga harus dipenuhi oleh pasokan dari luar daerah. Selain itu, dalam sektor perkebunan, Kepulauan Maluku merupakan penghasil komoditi perkebunan besar maupun perkebunan rakyat, dengan komoditi utama terdiri atas: kakao, kopi, cengkeh, pala, kelapa, dan lainnya. Selain itu sektor pertanian dan perkebunan, sektor peternakan juga memegang peranannya di dalam perekonomian Kepulauan Maluku. Usaha peternakan didominasi oleh peternakan rakyat, dengan jenis ternak sapi dan ternak kambing, dan telah menjadi komoditi ekspor keluar daerah seperti Papua dan Pulau Jawa. Selain itu Wilayah Maluku yang merupakan kepulauan juga memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, dengan produksi hasil tangkapan ikan laut sebanyak 504.699 ton pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 555.848 ton pada tahun 2005 dengan peningkatan sebesar 10,13 persen.

Perkembangan realisasi investasi PMDN di Kepulauan Maluku, hingga tahun 2007, telah mencapai Rp 3.378,63 miliar, di Provinsi Maluku sebesar Rp 3.376,02 miliar dan Maluku Utara 2,618 miliar. Sedangkan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Maluku tahun 2006 mencapai US$ 328,47 juta, yakni di Provinsi Maluku sebesar US$ 328,07 juta dan US$ 0,408 juta untuk Maluku Utara. Pertumbuhan ekspor di Wilayah Maluku rata-rata sebesar 58 persen per tahun, dan pertumbuhan impor rata-rata 41 persen per tahun pada periode 2003-2007. Jika dilihat dari segi intensitas perdagangan, berdasarkan hasil analisa paling dominan, Kepulauan Maluku dengan Wilayah Jawa-Bali dengan nilai IIT sebesar 1,88 dan dengan Wilayah Sulawesi sebesar 1,78 (Analisa IRIO 2005)

Terlepas dari beberapa perkembangan dalam bidang ekonomi di Kepulauan Maluku tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diatasi, yaitu: (1) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional; (2) Belum berkembangnya industri pengolahan komoditi unggulan perikanan & hasil perkebunan; (3) Rendahnya tingkat investasi karena hambatan belum konsusifnya iklim usaha (stabilitas keamanan), kurangnya promosi, serta terbatasnya infrastruktur pendukung; (4) Belum terwujudnya stabilitas ketahanan pangan; (5) Terbatasnya upaya pengembangan komuditas unggulan berbasis ekspor; (6) Terbatasnya sarana pendukung perdagangan lintas pulau; (7) Masih tingginya ketergantungan terhadap sumber dana perimbangan.

(3) Potensi dan Isu Strategis Bidang Prasarana

Dalam bidang sarana dan prasarana, secara garis besar permasalahan yang terjadi di Kepulauan Maluku ialah terkait dengan rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. Selain itu kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Minimnya infrastruktur yang dibangun juga mengakibatkan keterisolasian wilayah antar pulau dan dalam pulau. Di Kepulauan Maluku, jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah serta mengurangi kemiskinan. Adapun jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun baik di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara masih belum memadai, yaitu masih sekitar 50 persen. Selain itu, armada angkutan jalan raya di Provinsi Maluku masih sangat terbatas, karena armada yang tersedia tidak sebanding dengan luas daratan pada setiap kabupaten. Jangkauan kapal PELNI, Kapal Ferry, Perintis dan Kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) masih sangat terbatas dan belum memadai untuk kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sedang dan besar.

Selain itu, infrastruktur penyediaan air bersih di Kepulauan Maluku masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, adapun persentase masyarakat yang menggunakan air bersih masih berada di bawah 50 persen, baik di provinsi Maluku maupun di Provinsi Maluku Utara. Terkait dengan sarana listrik, Wilayah Maluku terdiri atas beberapa sistem kelistrikan yang terisolasi. memiliki beban puncak mencapai 38,80 MW di Provinsi Maluku dan mencapai 13,56 MW di Maluku Utara. (tahun 2007), Rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk Provinsi Maluku 55,36 persen dan Provinsi Maluku Utara adalah 47,81. Sebahagian besar energi listrik masih menggunakan PLTD dengan menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakarnya. Sementara itu, proporsi desa yang memiliki sarana pos dan telekomunikasi masih terbatas, yaitu kurang dari 30 persen, dan Wilpos 11 (Maluku dan Papua) merupakan daerah dengan infrastruktur pos yang paling terbatas.

Isu Strategis bidang Infrastruktur di Wilayah Maluku yaitu (1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dalam pulau dan antar pulau, terumata di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, dan terluar; (2) Belum memadainya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi udara; (3) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik bagi masyarakat , terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, terisolir, dan daerah yang berkebutuhan khusus; (4) Masih minimnya infrastruktur irigasi dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan wilayah; (5) Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi; (6) Belum berjalannya pemanfaatan potensi energi yang dimiliki wilayah Maluku dalam penyediaan energi listrik; serta (7) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dalam mendukung kebutuhan energi listrik bagi rumah tangga.

(4) Potensi dan Isu Strategis Bidang SDA dan LH

Isu dan permasalahan yang paling penting dan perlu untuk segera ditangani di berbagai daerah adalah masalah kehutanan, baik itu menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, maupun kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti kegiatan penambangan, eksploitasi sumberdaya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai juga menyebabkan masalah.

Tingginya konversi lahan sawah juga berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi dari nilai kualitasnya, yaitu lahan sawah dengan kesuburan tinggi, di daerah yang dekat dengan konsentrasi penduduk akan kalah bersaing dengan keuntungan lokasinya. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah. Penggunaaan/peruntukan tanah di wilayah Maluku masih didominasi oleh kawasan hutan sebanyak 60,7 persen, baik di Provinsi Maluku maupun di Provinsi Maluku Utara yang masing-masing 73,3 persen luas lahan Provinsi Maluku Utara dan 53,3 persen dari total luas Provinsi Maluku.Sedangkan kawasan lindung di Provinsi Maluku Utara seluas 784.881,32 ha dan 93 persen diantaranya merupakan kawasan hutan, dan kawasan budidaya di Maluku Utara seluas 2.365.163,81 ha, sekitar 67 persen diantaranya merupakan kawasan hutan. Sementara kawasan hutan pada kawasan lindung di Provinsi Maluku sebesar 74,3 persen dan di kawasan budidaya sebesar 58,55 persen.

Secara umum penggunaan lahan di Kepulauan Maluku masih belum termanfaatkan secara intensif dan masih sangat potensial untuk meningkatkan peruntukan/pemanfaatan lahan untuk lahan perkebunan, pertanian lahan kering, lahan persawahan dan lahan perkebunan Sebahagian besar lahan kawasan lindung masih belum memiliki peraturan pemerintah dan masih tersedia untuk penggunaannya sesuai dengan kesesuaiannnya, yang mana luas wilayah Provinsi Maluku masih sangat besar dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara.

Isu Strategis Bidang Penataan Ruang di Wilayah Maluku antara lain adalah (1) Sering terjadi konflik pemanfaatan hutan (terutama konversi hutan lindung menjadi hutan budidaya) dan illegal logging serta konflik antara sektor pertambangan dan kehutanan; (2) perlunya pemanfaatan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan; (3) Rendahnya pemanfaatan potensi perikanan; (4) Tingginya potensi gempa di wilayah Maluku Maluku terletak pada pertemuan 3 lempeng; (5) Konflik pemanfaatan hutan (terutama konversi hutan lindung menjadi hutan budidaya) dan illegal logging serta konflik antara sektor pertambangan dan kehutanan; (6) Rendahnya akses masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup; (7) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah dalam mengendalikan illegal logging; (8) Adanya ancaman kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan yang tidak berawasan lingkungan; (9) Kerusakan lingkungan eks penambangan nikel di Pulau Gebe dan Maluku Utara; serta (10) Tingginya potensi gempa di wilayah Maluku yang terletak pada pertemuan 3 lempeng.

(5) Potensi dan Isu Strategis Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Isu dan permasalahan yang timbul dalam bidang politik dan hankam yang menonjol di setiap daerah menyangkut pelaksanaan otonomi daerah seperti inkonsistensi produk peraturan daerah, pemekaran wilayah administrasi, dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Isu pemekaran wilayah dan pilkadal tersebut memiliki dampak yang cukup panjang karena dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keamanan, termasuk diantaranya konflik batas antar wilayah administrasi.

Pada tahun 2010, wilayah Maluku akan menghadapi pilkada provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Agar dapat melaksanakan pilkada yang bebas dan adil, peningkatan kapasitas lembaga KPU provinsi/kabupaten/kota dan pendidikan pemilih menjadi

keniscayaan untuk menghasilkan kualitas elit politik yang diharapkan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila eksekutif yang akan dipilih melalui pilkada mendatang dan legislatif hasil pemilu 2009 dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal dan bekerja sama tanpa mengorbankan mekanisme *checks and balances*.

Masyarakat di Wilayah Maluku perlu dibangkitkan kebanggaan politik mereka sebagai daerah yang dulu pernah menjadi contoh kehidupan bersama yang ideal di masa sebelum reformasi. Di masa demokrasi, Maluku harus mampu kembali menjadi tempat persemaian nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial.di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Bahkan harus melebihi masa-masa sebelumnya.

Permasalahan di bidang pertahanan dan kemananan, antara lain yang menyangkut daerah perbatasan dengan negara lain dan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya. Reformasi birokrasi juga masih utama di beberapa provinsi, termasuk penegakkan hukum di bebagai tindak kejahatan.

Provinsi Maluku mengalami permasalahan keamanan lebih serius daripada Provinsi Maluku Utara, yaitu dengan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Maluku adalah pencurian, diikuti dengan kejahatan jenis lainnya, penganiayaan, pembakaran, pembunuhan, perkosaan, narkoba dan terakhir adalah penjarahan.

Isu strategis lainnya adalah koordinasi, penegakkan hukum, dan konflik tata ruang, yaitu konflik mengenai lahan dan daerah-daerah konservasi yang antara lain yaitu (1) Berlangsungnya konflik politik elit yang melibatkan masyarakat serta meningkatnya konflik warga dan warga dengan TNI/Polri dengan berbagai latar belakang; (2) Masih munculnya gejolak separatisme di Maluku; (3) Masih minimnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Saumlaki, Dobo (Provinsi Maluku), Pulau Morotae (Maluku Utara) yang berbatasan dengan Palau dan Filipina; (4) Sering terjadinya ilegal fishing pada wilayah perairan perbatasan; (5) Relatif tingginya jumlah desa yang mengalami perkelahian antarwarga dan antarwarga dengan aparat keamanan di Maluku Utara (dibandingkan dengan rata-rata nasional); (6) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berkisar antara 4.02 hingga 5.28 (IPK nasional 4.57). Nilai IPK tertinggi di Kep. Maluku tercatat di Ambon dan terrendah di Tual; (7) Rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam belum tentu memiliki PAD yang tinggi, akibatnya kapasitas fiskal provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan potensi sumber daya.

7.2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

Tujuan pengembangan wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara dalam kurun waktu 2010 antara lain adalah:

(1) Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara
(2) Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumberdaya laut dan perkebunan di wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara
(3) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut dan udara.
(4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian utara dan bagian selatan, wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
(5) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran

(6) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
(7) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga

Sasaran pengembangan wilayah Kepulauan Maluku dalam kurun waktu 2010 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya standar hidup masyarakat Kepulauan Maluku
   a. Meningkatnya pendapatan per kapita di Provinsi Maluku sekitar Rp.3,240.87 ribu dan Provinsi Maluku Utara sekitar Rp.2,998.35 ribu.
   b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sebesar 5,17 persen dan Provinsi Maluku Utara sebesar 5,13 persen.
   c. Penurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sebesar 30,52 persen dan Provinsi Maluku Utara sebesar 12,24 persen.
   d. Menurunnya angka pengangguran Provinsi Maluku sebesar 8,11 persen dan Provinsi Maluku Utara sebesar 4,90 persen.
   e. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Maluku sebesar 9,00 tahun dan Provinsi Maluku Utara sebesar 9,00 tahun
   f. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Maluku sebesar 32,29 per 1000 kelahiran hidup dan Provinsi Maluku Utara sebesar 37,12 per 1000 kelahiran hidup.

   (1) Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara.
   (2) Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi.
   (3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian utara dan bagian selatan.
   (4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
   (5) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.
   (6) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
   (7) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional

7.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku, pengembangaan wilayah Kepulauan Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya tansportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan sumber daya

alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian; (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha. (7) Meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (8) Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (9) Memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (10) Meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (11) Meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (12) Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Kepulauan Maluku ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di kawasan perbatasan negara.

Pengembangan PKN di Kepulauan Maluku diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pengembangan PKW di Kepulauan Maluku diarahkan untuk: (1) mengembangkan pusat indutri pengolahan hasil kelautan dan perikanan melalui pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan permukiman; (2) mengendalikan perkembangan kota Masohi, Namlea, dan Tual sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; (3) mendorong pengembangan kota Tidore, Tobelo, Labuha, Sanana, Werinama, dan Kairatu sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKL di Kepulauan Maluku diarahkan untuk: (1) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kota yang mendukung fungsi kota sebagai pusat pelayanan kawasan perdesaan di sekitarnya; (2) mendorong terciptanya keterkaitan sosial ekonomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang saling menguntungkan; (3) prioritas penanganan kota-kota PKL ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pusat permukiman PKN dan PKW di Kepulauan Maluku.

Pengembangan PKSN di Kepulauan Maluku diarahkan untuk mendorong perkembangan kota Ilwaki, Saumlaki, Daruba, dan Dobo sebagai pusat pelayanan sekunder.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

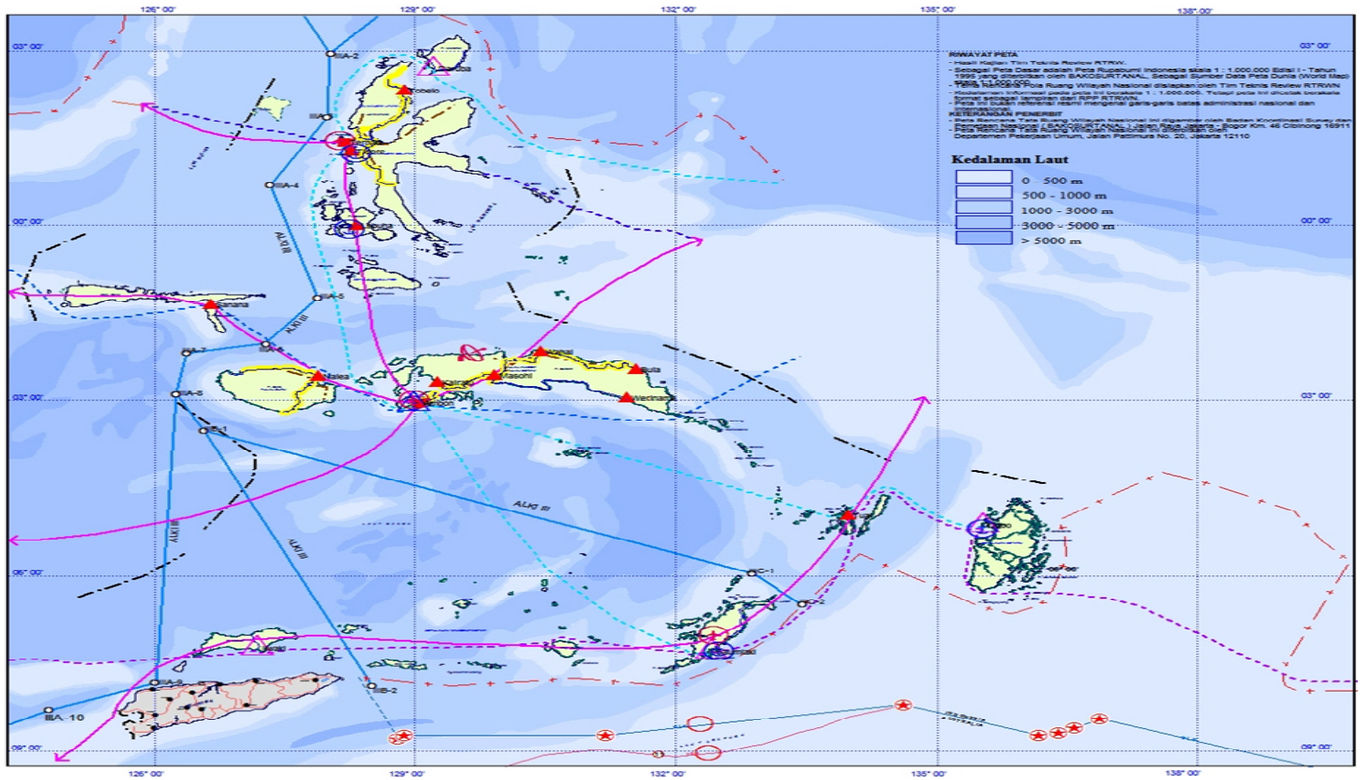

GAMBAR 7.1
PETA RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU

Rencana Tata Ruang Pulau:

- Mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air;
- Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
- Mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah;
- Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- Memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian;
- Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

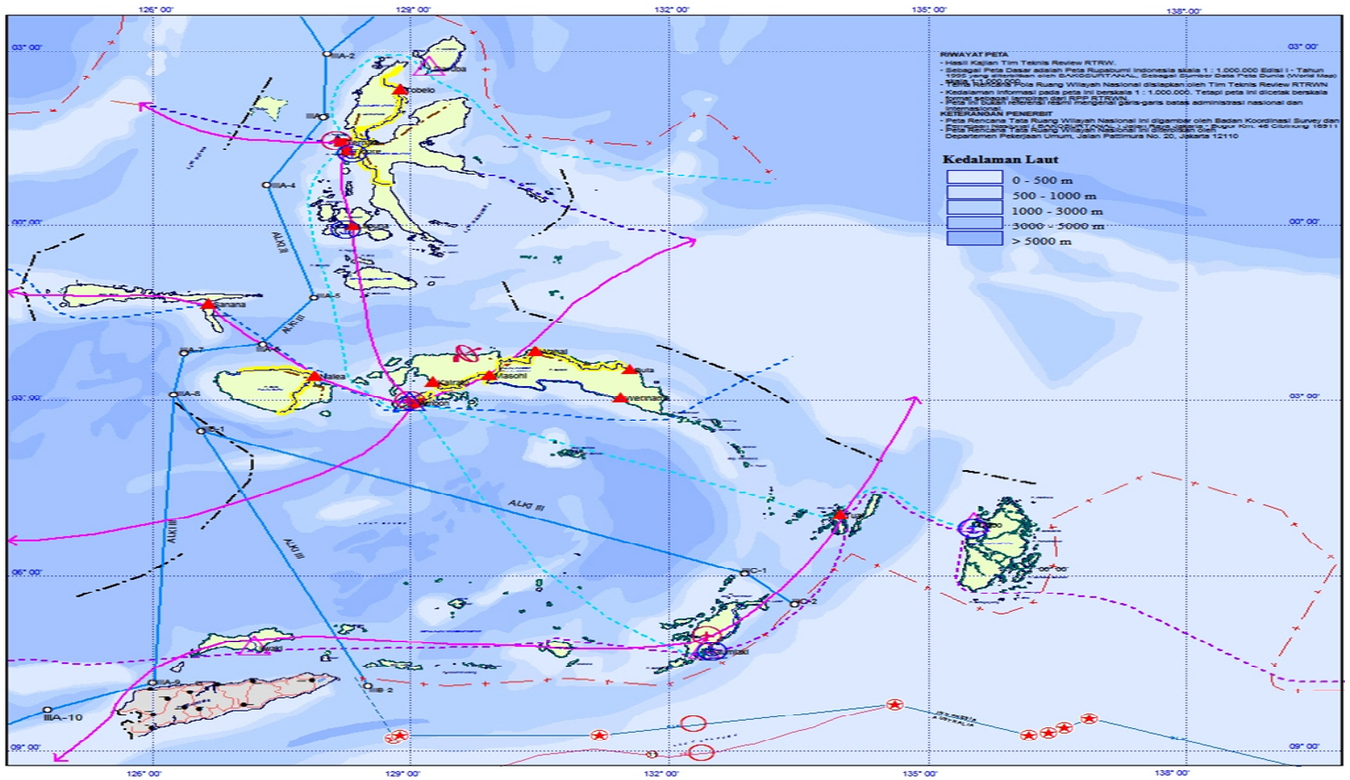

GAMBAR 7.2

ISU STRATEGIS KEPULAUAN MALUKU

Isu Strategis Bidang Ekonomi:
- Belum berkembangnya industri pengolahan komoditi unggulan perikanan & hasil perkebunan
- Rendahnya investasi terutama di Maluku Utara

Isu Strategis Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan:
- Persebaran penduduk yang tidak merata
- Rendahnya akses layanan Kesehatan bagi: Kaya-miskin, Desa-kota, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, Terisolir, Berkebutuhan khusus

Isu Strategis Bidang Polhukhankam:
- Berlangsungnya konflik politik elit yang melibatkan masyarakat serta meningkatnya konflik warga dan warga dengan TNI/ Polri dengan berbagai latar belakang
- Masih munculnya gejolak separatisme di Maluku

Isu Strategis Bidang Infrastruktur:
- Keterisolasian wilayah antar pulau dan dalam pulau akibat minimnya infrastruktur
- Rendahnya sarana dan prasarana pendukung di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, dan terluar.
- Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur listrik dan telekomunikasi

Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
- Konflik pemanfaatan hutan (terutama konversi hutan lindung menjadi hutan budidaya) dan illegal logging serta konflik antara sektor pertambangan dan kehutanan

Isu Strategi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
- Rendahnya pemanfaatan potensi perikanan
- Tingginya potensi gempa di wilayah Maluku Maluku terletak pada pertemuan 3 lempengan.

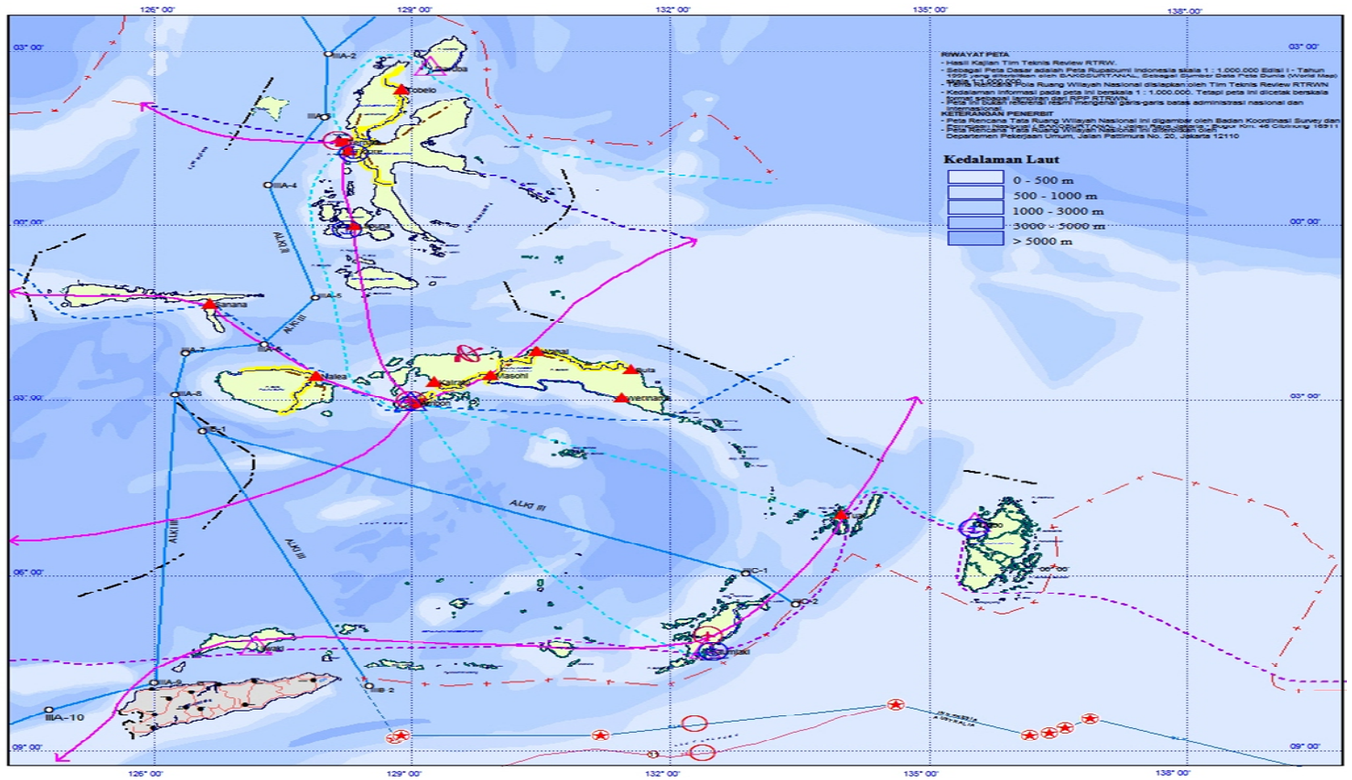

GAMBAR 7.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEPULAUAN MALUKU

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Ekonomi:

- Pengembangan komoditi unggulan: Perikanan utk pulau-pulau kecil, Pertanian dan perkebunan utk pulau Seram, Pulau Buru & Pulau Halmahera.
- Pengembangan kerjasama intra wilayah, kerjasama ekonomi KTI & kerjasama dengan pasar hasil produksi seperti Sulsel, Sulut & Jatim.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Kependudukan, Sosial dan Budaya:

- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan sampai ke pulau-pulau terpencil.
- Peningkatan kesempatan kerja di daerah-daerah tertinggal melalui peningkatan aktivitas ekonomi.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang PolHukHanKam:

- Akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan untuk meredam separatisme.
- Peningkatan personil TNI dan pendidikan komponen nir militer untuk pengamanan wilayah rawan separatisme.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur:

- Peningkatan kualitas jalan trans Seram yg menghubungkan antar daerah dlm pulau tertentu
- Pembangunan sarana & prasarana perhubungan laut & udara utk menghubungkan dgn daerah lain di luar Maluku.
- Pembangunan jalan & pelabuhan pd sentra-sentra produksi sektor pertanian, sektor perikanan, kehutanan & pertambangan.
- Pengembangan jalan trans Maluku yg menghubungkan pulau-pulau besar & pulau kecil.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:

- Pengendalian pemanfaatan pola kawasan budidaya ekonomi yang terkait pertambangan dan kehutanan shg target mempertahankan kawasan lindung sebesar minimal 40% dari luas seluruh wilayah Maluku dapat tercapai.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang SDA dan LH:

- Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan (TPI), armada tangkap, alat tangkap)
- Peningkatan penanganan gempa.
- Peningkatan sistem peringatan dini gempa untuk meningkatkan kewaspadaan gempa.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 8
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA TAHUN 2010

BAB 8
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA TAHUN 2010

8.1 Kondisi Saat Ini

Wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumberdaya alam sangat besar di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah. Wilayah Pulau Papua terletak di posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Dengan posisi tersebut, pengembangan wilayah Pulau Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat dari ketertinggalan dan keterisolasian. Permasalahan tersebut antara lain: (1) tingginya angka kemiskinan, (2) rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan, (3) tingginya angka pengangguran, dan (4) terjadinya gangggguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial. Selain itu, wilayah Papua juga menghadapi berbagai permasalahan gangguan ketertiban dan keamanan, serta konflik sosial.

Berbagai permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) rendahnya akses terhadap layanan jasa pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, (2) terbatasnya kegiatan ekonomi produktif yang menyerap angkatan kerja, (3) rendahnya investasi, (4) terbatasnya prasarana dasar seperti air minum dan sanitasi, jalan, pelabuhan, dan listrik, dan (5) terbatasnya akses terhadap layanan transportasi yang menghubungkan antarwilayah.

Pengembangan wilayah Pulau Papua memiliki tantangan yang lebih sulit dibanding wilayah lainnya. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah. Program pembangunan harus dirancang secara khusus sesuai dengan kondisi geografis dan karateristik masyarakat Papua yang terbagi dalam berbagai suku. Kondisi geografis juga menghambat mobilitas sumberdaya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian ketertiban dan keamanan wilayah, serta munculnya potensi konflik dan politik-keamanan (separatisme). Dengan kondisi wilayah yang berbeda dan berbagai hambatan yang ada, perencanaan pembangunan perlu memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik wilayah Pulau Papua sebagai suatu satu kesatuan wilayah yang saling berhubungan termasuk optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan sektoral.

Sebagai satu kesatuan wilayah, Pulau Papua sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar yang berbasis sumberdaya alam terutama pertambangan, hutan, perikanan, perkebunan dan wisata bahari. Saat ini pengelolaan sumberdaya alam (tambang dan hutan) belum memberikan dampak yang signifikan baik bagi kemajuan daerah maupun tingkat kesejahteraan penduduk. Potensi sumberdaya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Potensi sumberdaya hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya tetap harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah ekploitasi yang berlebihan, dan mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah. Selain itu, pengembangan wilayah Pulau Papua harus

memberikan porsi yang seimbang antara upaya memelihara kestabilan politik dan keamanan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mempercepat kemajuan wilayah Papua.

(1) Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk di Pulau Papua sekitar 2,8 juta jiwa atau 1,2 persen dari total penduduk nasional. Pulau Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah, hanya sebesar 7 jiwa per Km2. Konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan dan pedalaman namun proporsi penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pergeseran kepadatan penduduk dari desa ke kota tersebut mengindikasikan tingginya tingkat urbanisasi di Pulau Papua. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk lokal di Pulau Papua relatif besar, akan tetapi proporsi penduduk pendatang terus meningkat. Tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, selain tingkat kematian dan migrasi. Jika dilihat TFR per provinsi di Pulau Papua, Provinsi Papua Barat mempunyai TFR 3,4 dan Provinsi Papua sebesar 2,8 (SDKI 2007). Dalam bidang sosial dan budaya, tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang secara garis besar terjadi di Wilayah Papua. Pada tahun 2008, Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat adalah 35,12 persen dan Provinsi Papua 37,08 persen. Dari segi pertumbuhan jumlah penduduk miskin, Provinsi Papua mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin paling tinggi.

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan berbagai ***isu strategis yang perlu diatasi antara lain***: ketersediaan dan ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan; tingginya harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu; tingginya biaya transportasi sebagai akibat terbatasnya infrastruktur transportasi; dan rendahnya produktivitas usaha.

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendidikan menyangkut mahalnya biaya pendidikan, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan rendahnya mutu pendidik. Selain itu, secara garis besar ***isu strategis dalam pelayanan pendidikan*** antara lain adalah (1) optimalisasi mekanisme pembiayaan yang ada dengan mengutamakan perhatian terhadap anak murid sekolah dari keluarga miskin, (2) pengelolaan dana otonomi khusus bagi perbaikan layanan pendidikan, (3) manajemen sekolah berbasis asrama (*boarding school*), (4) koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam pelayanan kesehatan, permasalahan utama yaitu menyangkut terbatasnya akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah pedalaman dan pegunungan yang memiliki karakteristik geografis yang sulit; adanya berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Lebih jauh lagi masyarakat di Pulau Papua mengalami kesulitan untuk menjangkau air bersih yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Oleh karena itu sangat diharapkan peningkatan ketersediaan dan akses terhadap air bersih khususnya melalui pembangunan sarana dan prasarana skala kabupaten/kota untuk air bersih. Selain itu, permasalahan kesehatan lainnya berkaitan dengan rendahnya pemenuhan gizi terutama ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini dikarenakan sebagian besar desa/kelurahan di Pulau Papua mengalami kesulitan dalam

menjangkau prasarana kesehatan. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat ini ditandai oleh rendahnya tingkat harapan hidup, tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu.

Persentase penduduk miskin di Propinsi Papua menurun dari sebesar 46.4 persen pada tahun 2000 menjadi sebesar 37.1 persen pada tahun 2008. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat cenderung meningkat, yaitu dari sebesar 33.01 persen pada tahun 2006, kemudian melonjak menjadi sebesar 39.1 persen pada tahun 2008, lalu menurun kembali menjadi sebesar 35.12 persen pada tahun 2008. Secara umum, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua relatif lebih tinggi daripada di Provinsi Papua Barat.

Dilihat dari struktur kepadatan penduduk di Pulau Papua, secara garis besar Pulau papua memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Meskipun konsentrasi penduduk masih relatif tersebar di pedesaan dan pedalaman, namun proporsi penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan pergeseran struktur kepadatan penduduk dari desa ke kota tersebut, hal ini mengindikasikan tingginya tingkat urbanisasi di Pulau Papua. Tingginya tingkat urbanisasi tersebut bersamaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk lokal di Pulau Papua relatif besar, akan tetapi proporsi penduduk pendatang terus meningkat. Dengan tingginya tingkat urbanisasi di kedua provinsi, hal ini berimplikasi pada semakin melebarnya kesenjangan. Peningkatan kesenjangan tersebut terutama dilatarbelakangi oleh perbedaan tingkat pendapatan, serta lokasi dan asal (asli-pendatang). Dikaitkan dengan ***struktur ketenaga kerjaan dan tingkat pengangguran*** di Pulau Papua, dapat dilihat beberapa ***permasalahan diantaranya***: (1) Meningkatnya persentase pengangguran di Pulau Papua. Apabila dilihat perbandingan pengangguran terbuka di Pulau Papua, bahwa jumlah dan presentase pengangguran terbuka di Provinsi Papua barat lebih tinggi di Provinsi Papua. (2) Menurunnya jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja secara signifikan. (3) Masih terdapat banyak pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah SLTP sebagai akibat dari rendahnya jangkauan pelayanan pendidikan di Pulau Papua. (4) Rendahnya keterampilan masyarakat di Pulau Papua sehingga tidak banyak terserap di lapangan kerja.

Di bidang kebudayaan, Pulau Papua memiliki akar budaya yang sangat kuat dengan berbagai seni tradisional yang relatif masih terpelihara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hal ini juga didukung dengan kondisi keindahan alam dan demografis yang kaya dengan berbagai suku (etnis). Dilihat dari kekayaan seni budaya, Pulau Papua memiliki 46 Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs terbesar di berbagai daerah, Taman Nasional Lorents yang menjadi salah satu warisan dunia, serta berbagai kekayaan dan keragaman seni budaya tradisional lainnya. Namun kondisi geografis yang sulit dengan masih rendahnya akses transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya menjadi kendala dalam mengoptimalkan kualitas pengelolaan seni dan budaya . Selain itu, rendahnya kapasitas fiskal, kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akibat keterbatasan informasi juga menjadi faktor kendala pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya. Dilain pihak, semakin maraknya kasus pencurian berbagai benda sejarah (purbakala) untuk berbagai kepentingan harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh stakeholders terkait.

Terkait dengan pemuda, jumlah pemuda di Pulau Papua sebesar 1,03 juta jiwa atau sekitar 1,2 persen. Provinsi Irian Jaya Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemuda

paling sedikit di Indonesia, yaitu 254.939 jiwa. Sementara jumlah pemuda di Provinsi Papua sebesar 779.640 jiwa. Provinsi Pupua yang luasnya hampir 20 persen dari total luas Indonesia hanya memiliki kepadatan pemuda sebesar 2 pemuda per kilometer persegi. Sementara tingkat partisipasi pendidikan pemuda di Pulau Papua masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya pemuda yang tidak mempunyai ijazah. Adapun tingkat pengangguran terbuka pemuda di Provinsi Papua tergolong rendah, yaitu 8,61 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Irian Jaya Barat sebesar 14,61 persen.

Di bidang olahraga, prestasi olahraga di Pulau Papua perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari hasil PON ke XVII tahun 2008 yang masih belum terlalu menggembirakan. Sementara itu dilain pihak, pulau Papua memiliki beberapa cabang olahraga unggulan daerah. Provinsi Papua memiliki 9 cabang olahraga unggulan daerah, yaitu Tinju, Atletik, Pencak Silat, Karate, Judo, Gulat, Angkat Besi, Sepak Bola dan Hockey. Sedangkan Provinsi Irian Jaya Barat memiliki 9 cabang olahraga unggulan daerah yaitu Atletik, Sepak Bola, Tinju, Karate, Softball, Kempo, Dayung, Selam dan Pencak Silat.

(2) Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi papua cenderung relatif terhadap rata-rata nasional. Tipologi wilayah di Pulau Papua, menunjukkan bahwa Provinsi Papua termasuk tipologi Daerah Maju dan Cepat Tumbuh, sedangkan Provinsi Papua Barat termasuk tipologi Daerah Berkembang Cepat. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi Pulau Papua masih bertumpu pada kekayaan Sumber Daya Alam terutama sektor pertambangan dan penggalian. Dengan bertumpunya perekonomian Pulau Papua pada sektor pertambangan dan penggalian menyebabkan fluktuasi pada sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun demikian kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan, sedangkan sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor pertanian belum dikembangkan secara optimal untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Pulau Papua.

Hasil perhitungan tingkat kemandirian (derajat desentralisasi) berdasarkan kontribusi PAD di Wilayah Papua (Kabupaten/Kota dan Provinsi) cenderung menurun dari 5,4 persen pada tahun 2004 menjadi 2,3 persen di tahun 2006, Hasil perhitungan tingkat kemandirian (derajat desentralisasi) berdasarkan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, provinsi Papua Barat menunjukkan angka lebih tinggi dari provinsi Papua. Berdasarkan analisis Inter-regional Input-Output, Pulau Papua memiliki 4 sektor kunci yaitu sektor peternakan dan pengilangan minyak bumi sebagai kontributor terbesar dalam PDRB provinsi Papua, dan 2 sektor lainnya yaitu industri makanan dan minuman, dan industri barang kayu, rotan dan bambu, namun secara garis besar, struktur perekonomian Pulau Papua masih didominasi oleh aktivitas sektor informal/subsisten. Beberapa potensi lainnya adalah komoditas unggulan kakao, dan kelapa sawit, namun masih terbatas pada rendahn ya tingkat teknologi pengolahan dan tingkat produksi.

Tingginya ketimpangan ekonomi antara Provinsi Papua dan Papua Barat, serta relatif tingginya ketimpangan antara wilayah pesisir dan pedalaman masih merupakan permasalahan utama di Pulau Papua. Hal ini ditunjukkan oleh masih besarnya ketimpangan pendapatan perkapita antara penduduk di wilayah pesisir dan wilayah pedalaman, yang selain dikarenakan kendala geografis, juga daya dukung kelengkapan dasar sarana dan prasarana dasar penunjang perekonomian yang kurang memadai.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Papua, terdapat berbagai isu yang harus diselesaikan dari setiap sektor pendukunganya. Terkait dengan investasi di Pulau Papua terdapat beberapa isu strategis yang berkembang, diantaranya: (1) Terhambatnya investasi sebagai akibat ketidapastian dalam memperoleh ijin usaha, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja (2) Pertumbuhan investasi asing di wilayah Pulau Papua mengalami fluktuasi yang menunjukkan tidak stabilnya minat investor untuk menanam modal di Pulau Papua (3) Prasarana yang terbatas menyebabkan diperlukannya modal besar untuk melakukan investasi di Pulau Papua (4) Tingginya biaya transportasi dan tingginya konflik menjadi penyebab rendahnya kepercayaan investor untuk berinvetasi di wilayah Papua. Terkait dengan sektor pertanian di Pulau Papua, terdapat beberapa isu strategis yaitu: (1) Rendahnya produktivitas pertanian, (2) Rusaknya infrastruktur pendukung, (3) Produksi tanaman pangan masih sangat bergantung pada luas lahan, dan belum bertumpu pada peningkatan produktivitas, (4) Komoditas unggulan perkebunan masih didominasi kakao dan kelapa sawit. Dalam hal ini, peningkatan produksi kelapa sawit terutama dipicu dari banyaknya konversi lahan pada perkebunan sawit. Selain itu, terkait dengan sektor peternakan, terdapat beberapa isu strategis yang berkembang diantaranya: (1) Sektor peternakan masih didominasi oleh sapi potong dan kambing. (2) Rendahnya tingkat teknologi dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan peternak. Sedangkan dalam sektor perikanan, isu yang berkembang ialah: masih rendahnya produksi budidaya ikan darat yang menunjukkan belum berkembangnya industri perikanan. Berdasarkan berbagai isu strategis dari setiap sektor pendukung tersebut, maka (1) diperlukan suatu upaya peningkatan produksi pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta diversifikasinya yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi, (2) Revitalisasi pertanian secara terpadu, sistematik, dan konsisten; (2) Pengembangan sektor dan komoditas keunggulan; (3) Optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM. Keberadaan UKM perlu didukung oleh dengan fasilitasi dari pemerintah melalui pengembangan sistem pendukung usaha (akses terhadap sumberdaya, layanan lembaga pembiayaan), pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM (fasilitas teknologi, pemasaran terhadap potensi ekspor), dan pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha, kapasitas usaha, dan memperluas jangkauan pasar UKM di Papua.

Selain menyangkut permasalahan sektoral dalam bidang ekonomi tersebut diatas, terdapat beberapa isu dan permasalahan terutama terkait dengan keuangan daerah, yaitu: rendahnya kapasitas fiskal khususnya di provinsi Papua Barat dan rendahnya optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus yang seharusnya digunakan untuk peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat.

(3) Bidang Prasarana

Dalam bidang sarana dan prasarana, garis besar permasalahan utama terutama menyangkut rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. Kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Beberapa isu strategis yang berkembang dalam bidang infrastruktur khususnya terkait dengan sistem transportasi ialah (1) Kecenderungan memburuknya kondisi infrastruktur jalan darat terutama untuk wilayah terisolir dan perbatasan. (2) Belum berkembangnya sistem transportasi (darat, laut, ASDP dan Udara) dalam mendukung pembangunan di wilayah Papua. Oleh karena itu, diperlukan percepatan

pembangunan prasarana transportasi jalan, laut, ASDP, dan udara sebagai penghubung antar wilayah maju dan tertinggal di wilayah Papua. (3) Belum terjalinnya perhubungan laut antara kawasan dengan pulau-pulau disekitarnya dan daerah perbatasan dalam kawasan papua. Terkait dengan jaringan listrik dan telekomunikasi, beberapa isu strategis yang berkembang diantaranya: (1) Rendahnya rasio elektrifikasi untuk wilayah Papua sebesar 32,05 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 30,2 persen (2) Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana telekomunikasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Terkait dengan prasarana pengairan dan jaringan irigasi, permasalahan yang berkembang ialah rendahnya ketersediaan jaringan irigasi, terutama untuk mendukung ketahanan pangan regional di Pulau Papua.

(4) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam bidang SDA dan LH, garis besar isu dan permasalahan yang paling penting dan perlu untuk segera ditangani adalah terkait dengan masalah kehutanan, baik itu menyangkut perusakan hutan, pembalakan hutan, maupun kebakaran hutan. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga terjadinya perubahan iklim global. Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti kegiatan penambangan, eksploitasi sumberdaya laut dan pantai, serta buruknya manajemen daerah aliran sungai juga menyebabkan terjadinya permasalahan.

Tingginya konversi lahan sawah juga berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi dari nilai kualitasnya, yaitu lahan sawah dengan kesuburan tinggi, di daerah yang dekat dengan konsentrasi penduduk akan kalah bersaing dengan keuntungan lokasinya. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah.

Permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian ialah terkait dengan kerusakan lingkungan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali sehingga luas lahan kritis semakin bertambah. Laju kerusakan semakin parah dan tidak terkendali pada era otonomi daerah terutama disebabkan oleh aktivitas penebangan liar, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan. Kondisi ini merupakan isu strategis bidang penataan ruang, dan perlu penanganan serius secara berkelanjutan. Beberapa isu strategis lainnya yang juga perlu mendapat perhatian khusunya di Pulau Papua ialah: (1) Rendahnya pemanfaatan dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya air bagi irigasi dan domestik. (2) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pengembangan sektor unggulan. (3) Belum optimalnya upaya penurunan tingkat pencemaran dan upaya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis (4) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan serta belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup (5) Rendahnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air (6) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan (7) Tingginya eksploitasi sumberdaya tambang (Papua-Mimika) sebagai sumber utama pendapatan daerah (8) Tingginya tingkat abrasi pantai dan kasus illegal fishing (9) Tingginya kasus konflik pertanahan yang menyangkut hak ulayat dan peraturan adat (10) Belum terakomodasinya perbedaan kondisi wilayah pesisir dan pegunungan didalam arah pemanfaatan struktur ruang Pulau Papua (11) Terjadiunya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi tambang dan migas.

(5). Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Dalam bidang Politik, Hukum, dan Keamanan garis besar isu dan permasalahan yang timbul dan menonjol ialah menyangkut pelaksanaan otonomi daerah seperti inkonsistensi produk peraturan daerah, pemekaran wilayah administrasi, dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Isu pemekaran wilayah dan pilkada tersebut memiliki dampak yang cukup panjang karena dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keamanan, termasuk diantaranya konflik batas antar wilayah administrasi. Wilayah Papua masih mengalami permasalahan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Permasalahan di bidang pertahanan dan kemananan, antara lain yang menyangkut daerah perbatasan dengan negara lain dan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya. Reformasi birokrasi juga masih menjadi permasalahan utama termasuk penegakkan hukum di bebagai tindak kejahatan. Isu strategis lainnya yang perlu diatasi adalah (1) Koordinasi, penegakkan hukum, dan konflik tata ruang, yaitu konflik mengenai lahan dan daerah-daerah konservasi. (2) Tingginya potensi gangguan keamanan dan stabilitas politik yang dapat menghalangi pelaksanaan pembangunan (3) Terdapatnya potensi terhambatnya program eksekutif akibat hambatan dari partai dominan di legislatif. (4) Terbatasnya kemampuan personel, prasarana dan alustista dalam menjaga wilayah yang luas dan geografis sulit. (5) Masih tingginya konflik sosial di Papua memerlukan pengembangan early warning system untuk pencegahan konflik. (6) Masih adanya kontradiksi antara hukum adat dengan hukum positif dalam penyelesaian konflik dan kriminalitas ditingkat lokal. (7) Rendahnya kesadaran dan pemahaman politik di masyarakat (8) Masih terdapatnya aksi separatisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, dan (9) Sulitnya memisahkan antara konflik separatisme dengan isu etnis dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penciptaan stabilitas politik dan keamanan lokal untuk mendukung percepatan pembangunan, serta diperlukan peningkatan dinamika politik lokal yang kondusif sebagai pondasi percepatan pembangunan.

Isu bidang politik lain yang muncul di wilayah Papua adalah kinerja lembaga demokrasi yang masih rendah. Hal lain adalah di wilayah Papua, pada tahun 2010, akan melaksanakan pilkada di beberapa kabupaten/kota. Dalam merespon hal tersebut, kiranya pertama kinerja lembaga KPU kabupaten/kota perlu untuk lebih ditingkatkan agar dapat menghasilkan pelaksanaan pilkada yang berkualitas. Pendidikan politik penting pula bagi para eskekutif dan anggota legislative yang terpilih pada pemilu 2009 agar lembaga-lembaga tersebut dapat melaksanakan peran sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bidang politik.

Masyarakat sipil Papua perlu dibangkitkan melalui upaya-upaya sistematis pendidikan politik untuk meningkatkan rasa memiliki bangsa melalui pemasyarakatan nilai-nilai mulia demokrasi tentang persamaan di depan hukum dan persamaan hak. Masyarakat perlu diajak untuk lebih berpartisipasi di dalam proses perumusan kebijakan di dalam lembaga-lembaga pemerintahan daerah.

8.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Papua Tahun 2010 antara lain adalah:

(1) Meningkatkan standar hidup masyarakat Pulau Papua.
(2) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Pulau Papua terhadap pelayanan publik dasar.
(3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.
(4) Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

(5) Melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah.
(6) Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha.
(7) Meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon) yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Pulau Papua.
(8) Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Pulau Papua.
(9) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran
(10) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
(11) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga

Sasaran pengembangan wilayah Pulau Papua Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya standar hidup masyarakat Pulau Papua.
   a. Meningkatnya pendapatan per kapita Provinsi Papua menjadi sekitar Rp 23.712.800 dan Provinsi Papua Barat menjadi sekitar Rp 9.924.793.
   b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 2,32 persen dan Provinsi Papua Barat sebesar 6,52 persen.
   c. Menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua menjadi sekitar 35,21 persen dan Provinsi Papua Barat menjadi sekitar 36,92 persen.
   d. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Papua menjadi sekitar 3,89 persen dan di Provinsi Papua Barat menjadi sekitar 7,57 persen.
   e. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua menjadi sekitar 6,58 tahun dan di Provinsi Papua Barat menjadi sekitar 7,48 tahun.
   f. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Papua menjadi sekitar 29,87 per 1000 kelahiran hidup dan di Provinsi Papua Barat menjadi sekitar 24,21 per 1000 kelahiran hidup.
(2) Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di Pulau Papua.
(3) Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di Pulau Papua.
(4) Tercapainya tingkat produksi pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan di Pulau Papua.
(5) Meningkatnya peran sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dalam perekonomian wilayah Pulau Papua.
(6) Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tambang dan hutan.
(7) Berkembangan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Pulau Papua.
(8) Meningkatnya mutu pengelolaan otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Pulau Papua.
(9) Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif; serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.
(10) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
(11) Meningkatkan budaya serta prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional

8.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Papua

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Papua, pengembangaan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta mempekuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan; (6) menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah. (10) Meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian; (11) Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (12) Memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (13) Meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (14) Meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (15) Meningkatkan kerjasama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pengembangan PKN di Pulau Papua diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) mendorong pengembangan kota, dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan kota-kota Tanah Merah, Merauke dan Jayapura.

Pengembangan PKW di Pulau Papua diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Fak Fak, Manokwari, Nabire, Biak, Merauke dan Wamena sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (2) mengendalikan pengembangan kota Bade, Muting, Arso, Ayamaru, Teminabuan, dan Sarmi sebagai pusat pelayanan tersier yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan PKL di Pulau Papua ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Wilayah Papua.

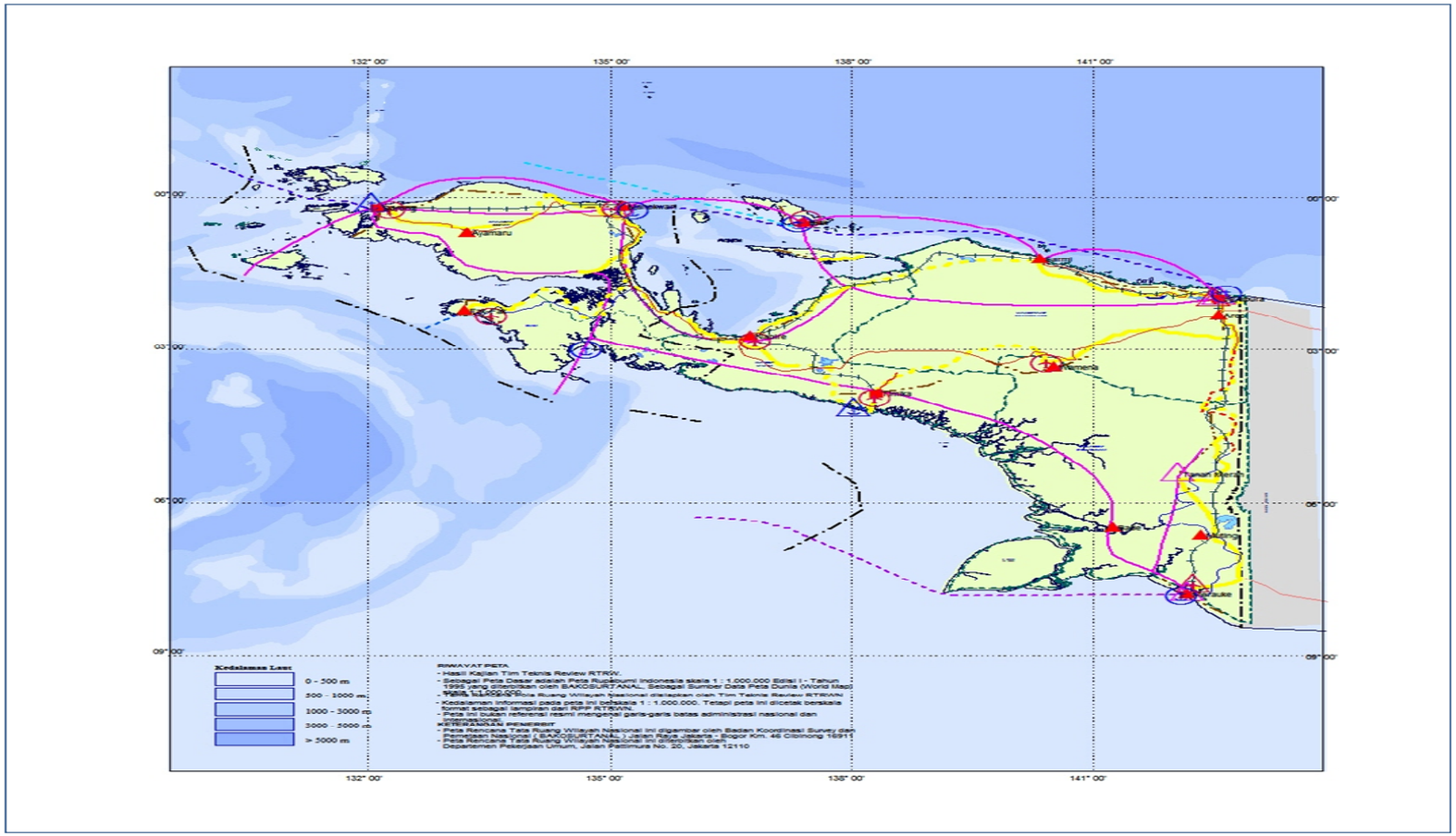

GAMBAR 8.1

PETA RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA

Rencana Tata Ruang Pulau:

- Mendukung peningkatan serta mempekuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara
- Menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat
- Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua
- Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan
- Menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan
- Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha
- Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan kelestarian dan berkelanjutan
- Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah

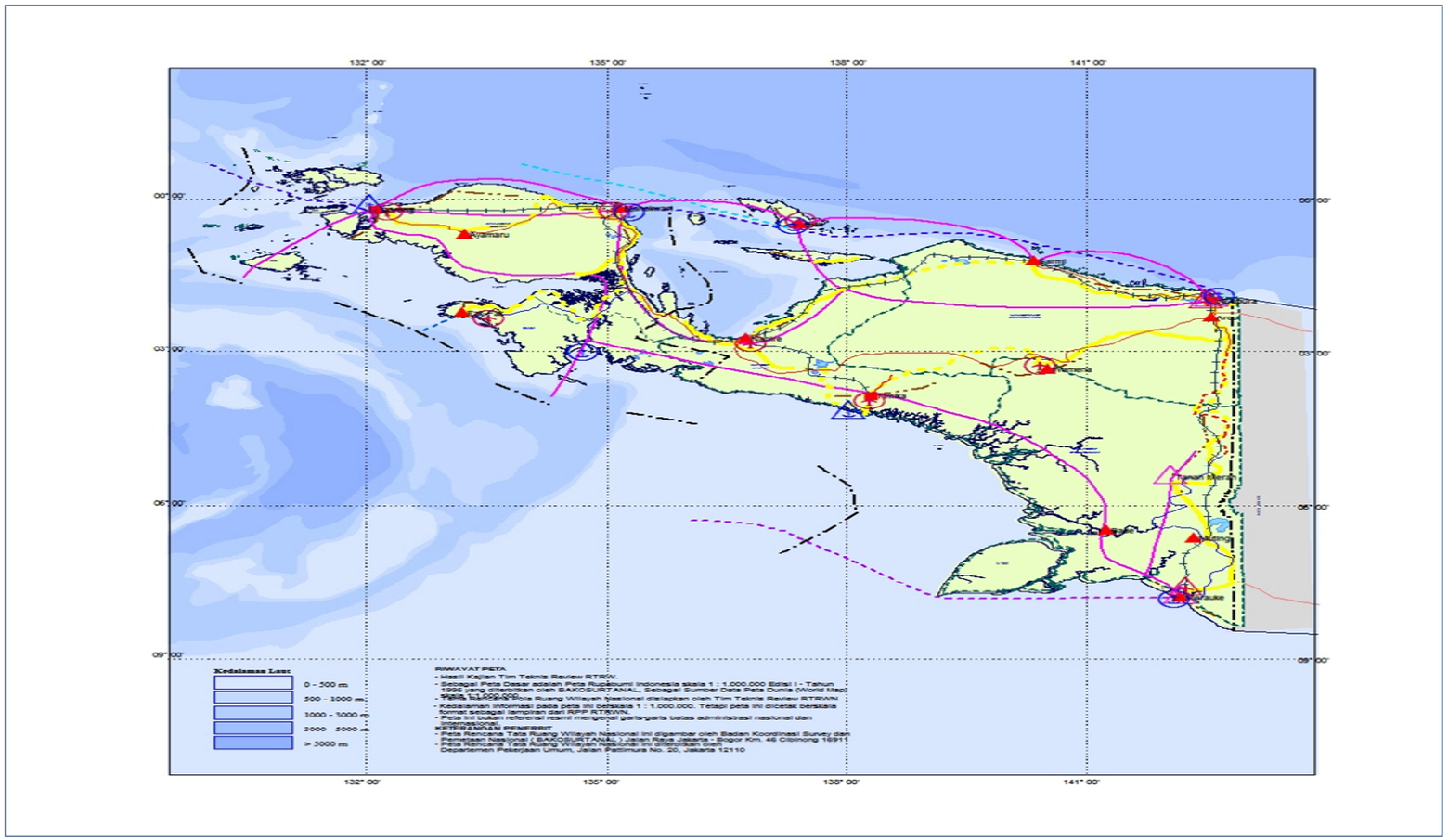

GAMBAR 8.2

ISU STRATEGIS PULAU PAPUA

Isu Strategis Bidang Ekonomi :

- Rendahnya optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Ketimpangan ekonomi antara kedua provinsi dan antara wilayah pesisir dan pedalaman.

Isu Strategis Sosial Budaya dan Kependudukan:

- Masih rendahnya kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pendidik, dan terbatasnya fasilitas pendidikan.
- Rendahnya derajat kesehatan masyaraat yang ditandai oleh rendahnya tingkat harapan hidup, tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu.
- Rentannya masyarakat akan penyakit menular terutama yang berhubungan dengan sanitasi dan penyakit menular.

Isu Strategis Bidang PolhukHanKam:

- Tingginya potensi gangguan keamanan dan stabilitas politik yang dapat menghalangi pelaksanaan pembangunan.
- Kemampuan personel, prasarana dan alustista dalam menjaga wilayah yang luas dan geografis sulit masih sangat terbatas.

Isu Strategis Bidang Infrastruktur:

- Perlunya percepatan pembangunan prasarana jalan sebagai penghubung antar wilayah maju dan tertinggal dan daerah perbatasan.

Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:

- Masih tingginya kasus konflik pertanahan yang menyangkut hak ulayat dan peraturan adat.
- Arah pemanfaatan struktur ruang Pulau Papua belum mengakomodir perbedaan kondisi wilayah pesisir dan pegunungan.

Isu Strategi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

- Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan.
- Tingginya eksploitasi sumberdaya tambang (Papua-Mimika) sebagai sumber utama pendapatan daerah.
- Tingginya tingkat abrasi pantai dan kasus ille gal fishing.

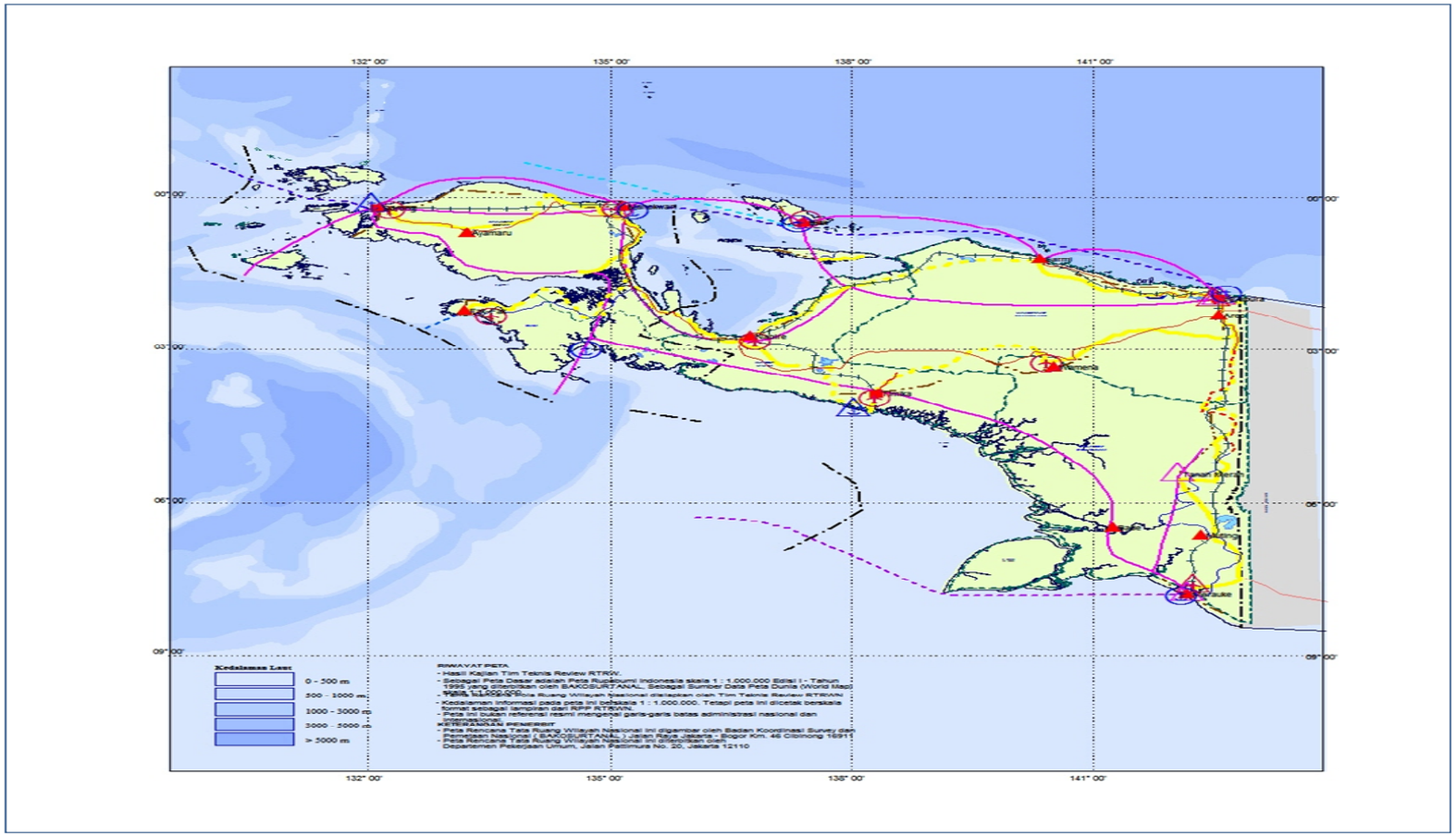

GAMBAR 8.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PULAU PAPUA

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi:

- Implementasi kebijakan dana otsus yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan infrastuktur dan mengurangi ketimpangan wilayah pedalaman dan pesisir

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang KepSosBud:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan formal dan non-formal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang PolhukHanKam:

- Peningkatan prasarana dan personel (kemampuan dan jumlah) dalam pengamanan wilayah rawan separatisme dan perbatasan
- Peningkatan kemampuan alustista dan transportasi pendukung pengamanan wilayah

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur:

- Percepatan pembangunan jalur jalan lintas provinsi (utara-tengah dan selatan)

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:

- Akomodasi nilai-nilai adat dalam pertanahan
- Perumusan peraturan khusus yang menjadi payung hukum atas kontradiksi kepemilikan tanah antara hukum adat dan hukum formal/positif

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

- Peningkatan sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukum
- Harmonisasi peraturan yang tidak kondusif terhadap percepatan investasi non-migas (Kehutanan-konteks Pusat & Daerah)
- Pengembangan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir.